

Bridging Inclusivity with Collaboration and Simplicity

Menjembatani Inklusivitas dengan
Kolaborasi dan Kemudahan



Metode Penyusunan dan Tentang Laporan Tahunan 2023

Preparation Method For The 2023 Annual Report

PT Bank Aladin Syariah Tbk telah menyusun Laporan Tahunan tahun buku 2023 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan tahunan ini juga disusun berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Laporan Tahunan ini terdiri dari beberapa bab, meliputi bab Performa yang mencakup Ikhtisar Data Keuangan Penting dan Informasi Saham; Laporan Manajemen yang mencakup Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi; Profil Perusahaan; Analisis dan Pembahasan Manajemen yang mencakup pembahasan Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko; Tata Kelola Perusahaan; serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Penyebutan satuan mata uang “Rupiah”, “Rp” atau “IDR” merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan “Dollar AS” atau “USD” merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Penyebutan kata “Bank Aladin Syariah” dan “Bank” didefinisikan sebagai PT Bank Aladin Syariah Tbk yang menjalankan bisnis utamanya di bidang perbankan syariah.

Laporan Tahunan ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di portal resmi PT Bank Aladin Syariah Tbk dengan alamat, <https://aladinbank.id/laporan-tahunan/>.

PT Bank Aladin Syariah Tbk Annual Report for the 2023 fiscal year has been prepared based on Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies, and Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies. This annual report is also prepared based on Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Reports of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

This Annual Report consists of several chapters, including the Performance chapter that includes a Summary of Important Financial Data and Stock Information; Management Reports that includes the Board of Commissioners and Board of Directors Reports; Company profile; Management Analysis and Discussion that includes discussions of the Capital Structure and Risk Management Practices; Corporate governance; and Social and Environmental Responsibility.

Any reference to the currency unit “Rupiah”, “Rp” or “IDR” refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while “US Dollar” or “USD” refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Any reference to “Bank Aladin Syariah” and “Bank” refers to PT Bank Aladin Syariah Tbk that carries out its main business in the field of sharia banking.

This Annual Report is presented in two languages, Indonesian and English, using an easy to read font and size, and good quality printing. This Annual Report can be viewed and downloaded on the official portal of PT Bank Aladin Syariah Tbk at the address, <https://aladinbank.id/laporan-tahunan/>.



Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer And Limitation Of Liability

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan PT Bank Aladin Syariah Tbk, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Adapun pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang PT Bank Aladin Syariah Tbk serta lingkungan bisnis di mana PT Bank Aladin Syariah Tbk menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, karena hasil sebenarnya di masa depan dapat berbeda karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali PT Bank Aladin Syariah Tbk.

This annual report contains statements of financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies and objectives of PT Bank Aladin Syariah Tbk, which are classified as forward-looking statements in compliance of applicable laws and regulations, except for historical matters. These statements have prospective risks, uncertainties, and may cause actual developments to be materially different from those reported.

The prospective statements in this Annual Report are made based on assumptions based on the current and future conditions of PT Bank Aladin Syariah Tbk, as well as the business environment in which PT Bank Aladin Syariah Tbk carries out its business activities. The statements contained in this Annual Report are not a guarantee of future performance, as actual results in the future may differ as they can be influenced by several factors outside the control of PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Penjelasan Tema

Theme Explanation



Bridging Inclusivity with Collaboration and Simplicity

Menjembatani Inklusivitas dengan
Kolaborasi dan Kemudahan



Bridging Inclusivity with Collaboration and Simplicity

Menjembatani Inklusivitas dengan Kolaborasi dan Kemudahan

Sebagai bank syariah digital terdepan di Indonesia, Bank Aladin Syariah senantiasa membangun pondasi yang kuat dan berkelanjutan, dengan memperkuat ekosistem keuangan syariah yang bermanfaat untuk seluruh lapisan Masyarakat. Bank Aladin Syariah juga terus memperluas kolaborasi melalui kerjasama dengan berbagai mitra, dalam rangka memperluas layanan perbankan. Hal tersebut juga dibarengi dengan pengembangan fitur produk agar lebih mudah dimanfaatkan untuk masyarakat.

Upaya yang dilakukan Bank Aladin Syariah tersebut, tercatat membuahkan hasil yang maksimal, di mana persebaran nasabah Bank Aladin Syariah baik dari sisi korporasi maupun nasabah ritel, semakin luas dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Di mana sejak aplikasi digital Bank Aladin Syariah diluncurkan pada awal tahun 2022, Bank Aladin Syariah tercatat telah berhasil mengakuisisi lebih dari tiga juta nasabah sampai dengan akhir tahun 2023.

As the leading digital sharia bank in Indonesia, Bank Aladin Syariah continues to build a strong and sustainable foundation, by strengthening a sharia financial ecosystem that is beneficial at all levels of society. Bank Aladin Syariah also continues to expand collaboration through cooperation with a number of partners, to expand its banking services. This goes hand-in-hand with the development of product features to make them easier for the public to use.

Bank Aladin Syariah's efforts has produced maximum results, where the distribution of Bank Aladin Syariah customers, both corporate and retail customers, has become wider and is spread across all provinces in Indonesia. Since the Bank Aladin Syariah digital application was launched in early 2022, Bank Aladin Syariah succeeded in acquiring more than three million customers by the end of 2023.

Kesinambungan Tema

Theme Continuity

2022



Bertumbuh Dalam Kebaikan: Masa Depan Berkelanjutan Untuk Semua

Growing With Kindness: A Sustainable Future For All

2022 menjadi tahun yang penuh optimisme bagi Bank Aladin Syariah untuk tumbuh berkelanjutan dalam kebaikan. Di mana pada awal tahun 2022, Bank Aladin Syariah resmi meluncurkan aplikasi digital dan berhasil mengakuisisi lebih dari satu koma tujuh juta Nasabah sampai dengan akhir tahun 2022. Hasil tersebut memperkuat optimisme Bank Aladin Syariah untuk “Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan” sebagaimana visi Bank. Aplikasi digital yang diluncurkan Bank Aladin Syariah terdiri dari produk-produk digital bank dengan fitur-fitur yang senantiasa memberikan kemudahan bagi nasabah. Produk-produk tersebut adalah tabungan transaksional Ala Dompot dan tabungan rencana Ala Impian serta fitur bill payment, Ala Berbagi dan tarik setor tunai melalui gerai Alfamart.

Bank Aladin Syariah juga berbagi kebaikan guna mewujudkan masa depan berkelanjutan untuk semua, melalui kegiatan pembiayaan yang sudah mulai terealisasi di tahun 2022. Di mana Bank memulai penyaluran dana melalui produk invoice financing, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ritel konsumtif. Sementara itu, dalam rangka mendukung pengembangan bisnis ke depan, Bank Aladin Syariah juga memperluas kolaborasi dengan mitra-mitra strategis. Bank Aladin Syariah berharap, pertumbuhan yang berhasil dibukukan Bank di tahun 2022, dapat memberikan kebaikan yang berkelanjutan untuk semua.

2022 will be a full of optimism year for Bank Aladin Syariah to grow sustainably in kindness. Where in early 2022, Bank Aladin Syariah officially launched a digital application and succeeded in acquiring more than one point seven million customers by the end of 2022. These results strengthen the optimism of Bank Aladin Syariah to “Become the Leading Digital Sharia Bank” as the Bank’s vision. The digital application launched by Bank Aladin Syariah consists of bank digital products with features that always provide convenience for customers. These products are Ala Dompot transactional savings and Ala Impian savings plans as well as bill payment features, Ala Berbagi and cash withdrawals through Alfamart outlets.

Bank Aladin Syariah also shares kindness in order to create a sustainable future for all, through financing activities that have begun to be disbursed in 2022. The Bank started disbursing funds through invoice financing products, working capital financing and consumer retail financing. Meanwhile, in order to support future business development, Bank Aladin Syariah is also expanding collaboration with strategic partners. Bank Aladin Syariah hopes that the growth that the Bank has successfully recorded in 2022 can provide sustainable good for all.

2021



Siap Berbagi Kebaikan untuk Masa Depan

Ready to Share Kindness for the Future

Di tengah tahun yang penuh dengan tantangan, Aladin Bank melakukan langkah besar di tahun 2021 yang menjadi babak baru bagi perkembangan bisnis Bank ke depan. Setelah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) pada 1 Februari 2021, dengan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia, Bank melakukan perubahan nama dari PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk, dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 3 Juni 2021. Pergantian nama yang dilakukan Bank, bukan sekadar proses merubah nama, melainkan juga sebuah transformasi diri menjadi bank yang dapat melayani kebutuhan seluruh lapisan masyarakat akan produk-produk perbankan, khususnya perbankan syariah, melalui pendekatan digitalisasi. Dimana Bank melakukan perubahan core business dari yang sebelumnya berfokus pada segmen corporate banking menjadi bank yang mengedepankan layanan digital dan berfokus pada segmen ritel. Melalui transformasi bisnis ini, Aladin Bank berupaya untuk menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan siap berbagi kebaikan untuk masa depan bersama.

In the midst of a full of challenges year, Bank Aladin Syariah took big steps in 2021 which will become a new chapter for the Bank’s business development going forward. After conducting an Initial Public Offering (IPO) on February 1, 2021, by listing shares on the Indonesia Stock Exchange, the Bank changed its name from PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk to PT Bank Aladin Syariah Tbk, and has obtained approval from the Authority Financial Services (OJK) on June 3, 2021. The name change carried out by the Bank was not just a name change process, but also a self-transformation into a bank that can serve the needs of all levels of society for banking products, especially sharia banking, through a digitalization approach. Where the Bank made changes to its core business from previously focusing on the corporate banking segment to becoming a bank that prioritizes digital services and focuses on the retail segment. Through this business transformation, Bank Aladin Syariah seeks to become closer to the community and is ready to share goodness for a common future.

Inovasi Digital dan Transformasi untuk Menjadi Lebih Tangguh Digital Innovation and Transformation to be Stronger

Bagi PT Bank Net Indonesia Syariah selanjutnya disebut “Bank Net Syariah” atau “BNS” dalam laporan ini, tahun 2020 merupakan tahun penuh harapan dan menantang. Hal itu ditandai dengan peralihan pemegang saham, upaya rebranding dan penguatan internal perusahaan serta upaya meningkatkan kapasitas usaha melalui aksi korporasi Go Public (IPO) di tahun 2021.

Perseroan memanfaatkan momentum tersebut dengan melakukan berbagai upaya transformasi, inovasi digital demi kemudahan layanan konsumen sekaligus mempertajam kapabilitas internal. Perseroan juga turut berkontribusi dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia yang kian tahun semakin menjanjikan. Sepanjang tahun 2020, kinerja perbankan syariah nasional justru lebih baik dibandingkan industri perbankan nasional.

For PT Bank Net Indonesia Syariah, hereinafter referred to as “Bank Net Syariah” or “BNS” in this report, 2020 was a full of hopes and challenges year. This was marked by the shift of shareholders, rebranding and strengthening efforts internal company as well as efforts to increase business capacity through Go Public (IPO) Corporate Action in 2021.

The Company takes advantage of this momentum by carrying out various transformation efforts, digital innovations for the convenience of customer service as well as sharpening internal capabilities. The Company also contributes to the development of the sharia banking industry in Indonesia, which is increasingly promising. Throughout 2020, the performance of the national sharia banking was actually better than the national banking industry.

Transformation Toward Digital Banking Digital Toward Transformation Banking

Berkat budaya pengelolaan risiko yang efektif yang terus dipertahankan secara konsisten sejak 2018, di tahun 2019 Bank Net Syariah telah membangun pondasi yang kokoh. Konsolidasi merupakan kata kunci Bank Net Syariah dalam menghadapi tantangan baru yang lebih besar di industri perbankan syariah, di mana Bank Net Syariah berkesempatan meraih peluang menjadi salah satu bank syariah nasional terdepan.

Thanks to an effective risk management culture that has been consistently maintained since 2018, in 2019 Bank Net Syariah has built a solid foundation. Consolidation is Bank Net Syariah's key word in facing new, bigger challenges in the sharia banking industry, where Bank Net Syariah has the opportunity to seize the opportunity to become one of the leading national sharia banks.

EMBRACING THE FUTURE

Di tahun 2018 Maybank Syariah telah melewati fase peralihan menuju sebuah perubahan besar, dengan tetap mempertahankan budaya pengelolaan risiko yang efektif secara signifikan sehingga kualitas aset dapat terus diperkuat dengan tercapainya NPF di angka nol. Kini Maybank Syariah siap menuntaskan rencana konsolidasi bisnis guna menghadapi tantangan baru yang lebih besar di industri perbankan syariah, menyongsong masa depan.

In 2018 Maybank Syariah has gone through a transitional phase towards a major change, while maintaining a significantly effective risk management culture so that asset quality can continue to be strengthened by achieving an NPF of zero. Now Maybank Syariah is ready to complete its business consolidation plan to face new bigger challenges in the sharia banking industry, facing the future.

2020



2019







2018



Sekilas Tentang Bank Aladin Syariah

Bank Aladin Syariah at A Glance

Aladin

	<h3>Pemegang Saham</h3>	<h3>Shareholders</h3>
	<p>PT Aladin Global Ventures (52,32%) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) (47,68%)</p>	<p>PT Aladin Global Ventures (52,32%) Public (each under 5%) (47,68%)</p>
	<h3>Bidang Usaha Line of Business</h3>	<h3>Fokus Bisnis: Business Focus</h3>
	<p>Bank Umum Syariah Sharia Banking</p>	<p>Layanan Perbankan Digital Digital Banking Services</p>
	<h3>Segmen Usaha</h3>	<h3>Business Segment</h3>
	<p>Segmen Ritel Segmen yang dirancang untuk melakukan akuisisi nasabah secara digital melalui aplikasi Bank.</p> <p>Segmen Non-Ritel (Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM & Korporasi) Segmen yang dirancang untuk membangun portofolio pendanaan dan juga pembiayaan Bank.</p>	<p>Retail Segment The segment designed for acquiring customers digitally through the bank's application.</p> <p>Non-Retail Segment (Small Medium Enterprise/SME & Corporation) The segment designed to build the bank's funding and financing portfolio.</p>
	<h3>Total Aset Total Assets</h3>	<h3>Jaringan Usaha Business Network</h3>
	<p>Rp 7,1 triliun per 31 Desember 2023</p> <p>IDR 7,1 trillion as of December 31, 2023</p>	<p>Seluruh Indonesia Throughout Indonesia</p>



Daftar Isi

List Of Contents

2	Metode Penyusunan dan Tentang Laporan Tahunan 2023 Preparation Method For The 2023 Annual Report	88	Visi, Misi dan Tata Nilai Bank Vision, Mission and Bank Values
3	Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer And Limitation Of Liability	90	Makna Logo Bank Bank Logo Meaning
4	Penjelasan Tema Theme Explanation	91	Kegiatan Usaha Serta Produk dan/atau Jasa Bank Business Activities and Bank Products and/or Services
6	Kesinambungan Tema Theme Continuity	96	Wilayah Operasional Bank Bank Operational Area
8	Sekilas Tentang Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah at A Glance	98	Struktur Organisasi Bank Bank Organizational Structure
10	Daftar Isi List of Contents	100	Keanggotaan Bank dalam Asosiasi atau Organisasi Bank Membership in Associations or Organizations
12	Pencapaian Terbaik Bank Aladin Syariah Best Achievement of Bank Aladin Syariah	101	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile
14	Milestone Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah Milestones	104	Profil Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board's Profiles
01	Ikhtisar Highlights	106	Profil Direksi Board of Directors Profile
18	Ikhtisar Data Keuangan Penting Financial Highlights	110	Profil <i>Chief Officer</i> Chief Officers' Profiles
22	Ikhtisar Saham Shares Highlights	114	Demografi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai Employee Demographics and Competence Development
25	Informasi Tentang Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi, serta Pendanaan Lainnya Information About Bonds, Sukuk, or Conversion Bonds, as Well as Other Funding	134	Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition
26	Peristiwa Penting Events Highlights	137	Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali Bank Aladin Syariah Information On Majority And Controlling Shareholders Of Bank Aladin Syariah Until The Final Individual Owner
02	Laporan Manajemen Management Report	138	Informasi Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Information on List of Subsidiaries and Associates and Joint Ventures
34	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	138	Nama Alamat Entitas Anak dan/atau Kantor Cabang Atau Kantor Perwakilan Name Address of Subsidiaries and/or Branch Office or Representative Office
50	Laporan Direksi Board of Directors' Report	139	Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham Chronology of Share Issuance and/or Listing
72	Laporan Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Report	141	Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Issuance and Other Securities Listing
78	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT Bank Aladin Syariah Tbk Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Annual Report 2022 of PT Bank Aladin Syariah Tbk	141	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Supporting Institutions and/or Professionals
03	Profil Perusahaan Company Profile	142	Informasi Pada Situs Web Bank Aladin Syariah Information On The Website Of Bank Aladin Syariah
82	Informasi Umum dan Identitas Bank General Information and Bank Identity	144	Penghargaan Yang Diterima Bank Dan Sertifikasi Yang Dimiliki Awards Received By The Bank And Certifications Held
84	Riwayat Singkat Bank Brief History of Bank		



**04 Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis**

148	Tinjauan Umum General Overview
151	Kebijakan Strategis Bisnis Bank dan Aspek Pemasaran Bank Business Strategic Policies and Marketing Aspects
153	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Bank Overview of Operational Per Bank Business Segment
156	Tinjauan Keuangan Financial Overview
185	Tinjauan Keuangan Lainnya Other Financial Overviews

**05 Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Functions**

200	Tata Kelola Sumber Daya Insani Human Capital Governance
219	Teknologi Informasi Information Technology

**06 Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance**

226	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Implementation of Good Corporate Governance
230	Governance Framework
236	Penerapan <i>Corporate Governance</i> Secara Berkelanjutan Sustainable Implementation of Corporate Governance
240	Struktur dan Organ Tata Kelola Bank Bank Good Governance Structure and Organs
251	Dewan Komisaris Board of Commissioners
260	Komisaris Independen Independent Commissioner
262	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board
267	Direksi Board Of Directors
279	Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi Transparency of Information Related to The Board of Commissioners and Board of Directors

296	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs for The Board of Commissioners
317	Komite-Komite di Bawah Direksi Committees Under the Board of Directors
340	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
344	Satuan Kerja Audit Internal Internal Audit Work Unit
352	Akuntan Publik Public Accountant
354	Manajemen Risiko Risk Management
362	Perkara Hukum Legal Cases
364	<i>Buy Back Saham</i> dan/atau <i>Buy Back Obligasi</i> Bank Buy Back Shares and/or Buy Back Bank Bond
364	Program Kepemilikan Saham Karyawan dan/atau Manajemen Employee and/or Management Share Ownership Program
365	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data
366	Kode Etik Bank Bank Code of Ethics
368	Penanganan Benturan Kepentingan Handling of Conflict of Interest
368	Penerapan Fungsi Kepatuhan Implementation of the Compliance Functions
372	Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Apu Dan Ppt) Anti Money Laundering And Terrorism Financing Prevention Program (Apu And Ppt)
374	Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy
375	Pendapatan Non Halal Non Halal Income
376	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
378	Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles In Accordance With Financial Services Authority Provisions

**07 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility**

384	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility
-----	---

**08 Laporan Keuangan
Financial Statements**

Pencapaian Terbaik Bank Aladin Syariah

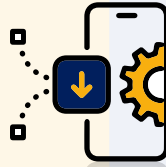
Best Achievements of Bank Aladin Syariah

Instalasi Aplikasi

Application Installations

Total Instalasi Aplikasi Bank Aladin Syariah di tahun 2023

> **5,2** Juta



Registered User yang telah menyelesaikan KYC

> **5,2** million

Registered User

Registered User

Registered User yang telah menyelesaikan KYC mencapai

> **3,1** Juta



Registered Users completed the KYC reached

> **3,1** million

Pembiayaan

Financing

Total Pembiayaan Bank di tahun 2023

> **3,1** triliun

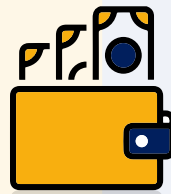


Total Bank Financing in 2023

> **3,1** trillion

Total pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib - Total income from fund managed by Bank as mudharib

Total Pendapatan Bank sebagai Mudharib meningkat **309,2%** dari **Rp81,7 miliar** di tahun 2022 menjadi **Rp334,5 miliar** di tahun 2023.



Total Income From Fund Managed By Bank As Mudharib

Total Bank Mudharib Income increased **309,2%** from **Rp81,7 billion** in 2022 to **Rp334,5 miliar** in 2023.

Total Aset

Total Aset meningkat **49,8%** dari **Rp4,7 triliun** di tahun 2022 menjadi **Rp7,1 triliun** di tahun 2023.

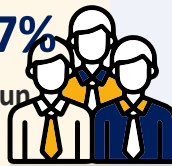


Total Assets

Total Assets increased **49,8%** from **Rp4,7 trillion** in 2022 to **Rp7,1 trillion** in 2023.

Jumlah Karyawan

Jumlah Karyawan meningkat **13,7%** dari **256 orang** karyawan di tahun 2022 menjadi **291** di tahun 2023.



Number of employees

The number of employees increased by **13,7%** from **256 employees** in 2022 to **291** in 2023.

Milestone Bank Aladin Syariah

Bank Aladin Syariah Milestones



1994

Pertama kali berdiri dengan nama PT Bank Maybank Nusa International pada tanggal 16 September 1994.

It was first established under the name PT Bank Maybank Nusa International on September 16, 1994.

2000

Pada tanggal 11 September 2000, PT Maybank Nusa International berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp.

On September 11, 2000, PT Maybank Nusa International changed its name to PT Bank Maybank Indocorp.

2021

Pada tanggal 1 Februari 2021, saham BNS telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "BANK", setelah sebelumnya memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan suratnya No. S-8/D.04/2021 tanggal 22 Januari 2021.

On February 1, 2021, BNS shares were listed on the Indonesia Stock Exchange with the stock code "BANK", having previously obtained an effective statement from OJK with its letter No. S-8/D.04/2021 dated January 22, 2021.

PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk berganti nama menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk, dan telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan penggunaan izin atas nama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Aladin Syariah Tbk.

PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk changed its name to PT Bank Aladin Syariah Tbk, and has received approval from OJK through letter No. KEP-42/PB.1/2021 dated June 3, 2021 concerning the determination of the use of a license on behalf of PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk to become a business license on behalf of PT Bank Aladin Syariah Tbk.

2020

Perubahan status PT Bank Net Indonesia Syariah dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0074002.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 3 November

Change of status of PT Bank Net Indonesia Syariah from a private company to a public company and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0074002. AH.01.02.Tahun 2020 November 3, 2020.

Pada Januari 2022, Bank telah berhasil meluncurkan aplikasi mobile banking untuk nasabah atau masyarakat. Selain itu, Bank juga sudah mulai menyalurkan financing di kuartal II tahun 2022 dengan total outstanding pembiayaan mencapai Rp1,3 triliun per 31 Desember 2022. Bank juga telah berhasil melakukan pemenuhan Modal Inti Bank sesuai dengan Peraturan OJK No.12/POJK. 03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

In January 2022, the Bank has successfully launched a mobile banking application for customers or the public. In addition, the Bank has also started disbursing financing in the second quarter of 2022 with a total outstanding financing of IDR1.3 trillion as of December 31, 2022. The Bank has also succeeded in fulfilling the Bank's Core Capital in accordance with OJK Regulation No.12/POJK. 03/2020 on Commercial. Bank Consolidation.

2022

2010

PT Bank Maybank Indocorp berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010, seiring dengan pergantian bidang usaha dari bank umum konvensional menjadi bank.

PT Bank Maybank Indocorp changed its name to PT Bank Maybank Syariah Indonesia based on the Decree of the Governor of the Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 dated September 23, 2010, in line with the change in business sector from conventional commercial banks to banks.

2019

Pada tanggal 20 Desember 2019, kembali terjadi perubahan nama dari PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah, sekaligus merubah fokus bisnis, dari segmen korporasi menjadi ritel.

On December 20, 2019, there was another name change from PT Bank Maybank Syariah Indonesia to PT Bank Net Indonesia Syariah, as well as changing the focus of the business, from the corporate segment to retail.

2023

Di tahun 2023, Bank Aladin Syariah meluncurkan QRIS dan Corporate Internet Banking (CIB) yang membuat layanan perbankan menjadi lebih luas kepada pengguna Korporat & Ritel. Di tahun ini juga, Bank meluncurkan fitur Setor & Tarik Tunai (Taretun) bersama Alfamidi. Bank juga sukses meluncurkan Banking as a Service (BaaS) yang telah go live dengan Alfagift. Dari sisi penyaluran pembiayaan, Bank telah melakukan penyaluran pembiayaan dengan total outstanding lebih dari Rp8,6 triliun hingga 31 Desember 2023.

In 2023, Bank Aladin Syariah launched QRIS and Corporate Internet Banking (CIB) making banking services wider for Corporate & Retail users. Also this year, the Bank launched the Cash Deposit & Withdrawal (Taretun) feature with Alfamidi.

The Bank also successfully launched Banking as a Service (BaaS) that went live with Alfagift. For financing distribution, the Bank distributed financing with a total outstanding of more than Rp8.6 trillion as at December 31, 2023.

Aladin



MUDAH

**DIMANA SAJA
KAPAN SAJA**





Ikhtisar

Highlights

Bank Aladin Syariah membukukan total pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib sebesar Rp334.502 juta, mengalami peningkatan 309% atau Rp252.747 juta. Hal ini dampak dari peningkatan pembiayaan yang signifikan pada tahun 2023.

Bank Aladin Syariah's total income from funds managed by the Bank as mudharib reached Rp334,502 million, an increase of 309% or Rp252,747 million. This was the impact of a significant increase in financing in 2023.

01

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlights

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Profit (Loss) and Other Comprehensive Income Statement

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib Fund Management Revenue by Banks as Mudharib						
Pendapatan dari Piutang Revenue from Receivables	201.056	16.101	3	86	3.958	1.149%
Pendapatan Usaha Utama Lainnya Other Main Operating Revenue	133.446	65.654	36.108	31.191	47.513	103%
Total Pendapatan Bank sebagai Mudharib Total Bank Revenue as Mudharib	334.502	81.755	36.111	31.277	51.471	309%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer Third Party Rights on Profit Sharing of Temporary Syirkah Funds	(121.047)	(23.982)	(403)	(158)	-	404%
Hak Bagi Hasil Milik Bank Profit Sharing Rights Owned by the Bank	213.455	57.773	35.708	31.119	51.471	269%
Pendapatan Operasional Lainnya Other Operating Revenue	36.794	19.788	785	476	1.712	85%
Pembalikan (Pembentukan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Reversal (Provision) of Allowance for Impairment Losses	(15.724)	(36.777)	(3.069)	65.250	3.187	-57%
Beban Operasional Operating Expenses	(477.666)	(305.143)	(156.319)	(54.374)	(47.814)	56%
Laba (Rugi) Operasional Operating Profit (Loss)	(243.141)	(264.359)	(122.895)	42.471	8.556	-8%
Pendapatan (Beban) Non-Operasional - Neto Non-Operating Revenue (Expense) – Net	16.403	(554)	1.620	2.397	68.418	-3.060%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	(226.738)	(264.913)	(121.275)	44.868	76.974	-14%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	(226.738)	(264.913)	(121.275)	44.868	77.304	-14%
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Revenue (Loss)	3.798	(5.552)	7.946	(2.217)	(11.850)	-168%
Total Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit (Loss) for the Year	(222.940)	(270.465)	(113.329)	42.651	65.454	-18%
Laba (Rugi) per Saham Dasar (Rupiah Penuh) Basic Profit (Loss) per Share (Full Rupiah)	(16)	(20)	(9)	5	69.259	-175%

Ket: Sampai dengan akhir tahun 2023, PT Bank Aladin Syariah Tbk tidak memiliki entitas anak dan entitas asosiasi, dengan demikian Laporan Keuangan Bank tidak menyajikan Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan serta Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang diatribusikan baik kepada pemilik entitas induk maupun kepentingan non-pengendali.

Note: Until the end of 2023, PT Bank Aladin Syariah Tbk does not have a subsidiary, thus the Bank's Financial Statements do not present Net Profit (Loss) for the Year and Total Comprehensive Profit (Loss) for the Year attributable to both owners of the parent entity and non-controlling interest.



Laporan Posisi Keuangan

Financial position statement

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)
ASET ASSETS						
Kas Cash	1.013	651	224	182	162	55%
Giro pada Bank Indonesia Current Account with Bank Indonesia	423.910	83.353	16.354	4.163	9.437	408%
Giro pada Bank Lain - Neto Current Accounts with Other Banks – Net	13.353	1.851	2.421	2.018	7.671	621%
Penempatan pada Bank Indonesia Placements with Bank Indonesia	1.752.700	1.734.100	1.139.500	49.100	104.200	1%
Investasi pada Surat Berharga - Neto Investment in Securities – Net	1.403.362	1.217.062	898.024	608.728	547.398	15%
Piutang <i>Murabahah</i> - Neto Murabaha Receivables – Net	790.645	796.716	-	52	4.802	-1%
Pinjaman <i>Qardh</i> - Neto Qardh Financing - Net	815.623	544.800	-	-	-	49%
Pinjaman Musyarakah – Neto Musyarakah Loans - Net	1.449.932	-	-	-	-	100%
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto Fixed Assets and Right of Use Assets – Net	47.367	45.177	51.114	12.630	-	4%
Aset tak Berwujud - Neto Intangible Assets – Net	77.339	51.538	5.603	85	-	50%
Aset Lain-lain Other Assets	316.876	258.153	59.922	44.439	41.953	22%
Total Aset Total Assets	7.092.120	4.733.401	2.173.162	721.397	715.623	49%
LIABILITAS LIABILITY						
Liabilitas Segera Immediate Liability	69.839	16.392	1.003	2	2	326%
Simpanan Wadiah Wadiah Deposits	1	1	-	5	1	0%
Simpanan dari Bank Lain Deposits from Other Banks	-	-	-	4	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan Securities Issued	-	684.000	-	-	-	-100%
Liabilitas kepada bank Indonesia Liabilities to Bank Indonesia	584.248	-	-	-	-	100%
Utang Pajak Tax Debt	6.973	6.066	3.042	640	400	15%
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi Estimated Loss of Commitments and Contingencies	2.822	1.752	-	-	60.470	61%
Liabilitas Lain-Lain Other Liabilities	87.997	87.265	84.606	39.310	59.033	1%
Total Liabilitas Total Liabilities	751.880	795.476	88.651	39.961	119.906	-5%
DANA SYIRKAH TEMPORER TEMPORARY SYIRKAH FUND						
Tabungan Mudharabah Mudharabah Savings	510.651	116.306	38.184	-	-	339%
Giro Mudharabah Mudharabah Current Account	-	-	-	40.062	-	-

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)
Deposito Mudharabah Mudharabah Deposit	2.744.348	678.343	1.000.000	100	-	304%
Total Dana Syirkah Temporer Total Temporary Syirkah Funds	3.254.999	794.649	1.038.184	40.162	-	309%
EKUITAS EQUITY						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and fully paid up capital	1.391.838	1.377.051	1.324.135	819.307	819.307	1%
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	965.669	964.190	10.870	-	-	0%
Dana Setoran Modal Capital Deposit Fund	1.512.501	1.363.862	2.684	-	-	10%
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of Defined Benefit Programs	4.761	2.720	1.808	689	2.906	75%
Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat Berharga dalam Kelompok: Unrealized Profit on Securities in Class:						
Tersedia untuk Dijual Available-for-Sale	2.120	363	6.827	-	-	484%
Saldo Laba Retained Earning						
Saldo Laba dari Kegiatan Konvensional Profit Balance from Conventional Activities	29.541	29.541	29.541	29.541	29.541	0%
Saldo Rugi dari Kegiatan Syariah Balance Loss from Sharia Activities	(821.189)	(594.451)	(329.538)	(208.263)	(256.037)	38%
Total Ekuitas Total Equity	3.085.241	3.143.276	641.274	595.717	530.263	-1%

Laporan Arus Kas

Cash Flow Statement

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	442.616	(1.334.535)	898.170	7.769	114.037	133%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities	(223.992)	(359.215)	(304.857)	(74.047)	(374.690)	-38%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Funding Activities	152.529	2.355.076	509.689	-	-	-94%
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) Net Cash and Cash Equivalents	371.153	661.326	1.103.002	(66.064)	(260.328)	-44%
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at The Beginning of The Year	1.819.974	1.158.523	55.483	121.547	381.875	57%
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang pada Kas dan Setara Kas Effect of Changes in Currency Rates on Cash and Cash Equivalents	(16)	125	38	214	325	-113%
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at The End of The Year	2.191.111	1.819.974	1.158.523	55.483	121.547	20%



Rasio-Rasio Keuangan Penting

Important Financial Ratios

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022- 2023 (%)
Rasio Kinerja Performance Ratio						
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM)	96,17	189,28	390,50	329,09	241,84	-51,53
Aset Produktif dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif Earning Assets and Non-Earning Non-Performing Assets to Total Assets	-	-	-	-	-	-
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif Non-performing Earning Assets to Total Earning Assets	-	-	-	-	-	-
CKPN Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif CKPN Financial Assets to Earning Assets	0,84	0,88	-	0,01	0,15	100,00
NPF Gross	-	-	-	-	-	-
NPF Net	-	-	-	-	-	-
Return on Assets (ROA)	(4,22)	(10,85)	(8,81)	6,19	11,15	23,11
Return on Equity (ROE)	(7,55)	(8,50)	(10,10)	7,07	13,78	-15,87
Net Imbalan (NI)	4,56	3,36	2,96	4,69	9,94	13,58
Net Operating Margin (NOM)	(4,77)	(12,24)	(9,93)	6,30	0,80	23,27
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Cost to Revenue (BOPO)	128,65	354,75	428,4	56,16	84,70	-17,19
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan Profit Sharing Financing to Total Financing	47,20	-	-	-	-	-
Financing to Deposit Ratio (FDR)	95,31	173,27	0,00	0,13	506,00	100,00
Cost to Revenue Ratio (CIR)	186,04	385,11	411,22	51,64	89,19	-6,35
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liability to Equity Ratio	129,87	50,59	107,69	6,23	20,13	-53,02
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset Ratio of Liabilities to Total Assets	56,50	33,59	51,85	5,54	16,76	-35,21
Rasio Kepatuhan Compliance Ratio						
Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) Percentage of Violations of the Maximum Funding Limit (BMPD)						
Pihak Terkait Related Parties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pihak Tidak Terkait Unrelated Parties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase Pelampauan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) Percentage of Exceeding the Maximum Funding Limit (BMPD)						
Pihak Terkait Related Parties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pihak Tidak Terkait Unrelated Parties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Giro Wajib Minimum Statutory Reserve Requirement						
GWM Rupiah Rupiah Statutory Reserve	13,46	10,39	17,17	4,38	14,68	-39,49
GWM Valuta Asing Foreign Exchange Statutory Reserve	157,73	157,73	157,73	157,98	1,14	-
Posisi Devisa Neto Secara Keseluruhan Overall Net Open Position	0,03	0,03	0,21	0,75	8,51	-85,12

Ikhtisar Saham

Shares Highlights

Informasi Kinerja Saham

Share Performance Information

Kode Saham: BANK
 Bursa Perdagangan Saham: Bursa Efek Indonesia
 Stock Code: BANK
 Stock Trading Exchange: Indonesia Stock Exchange

No	Bulan Month	Kurs (Rg) Exchange Rate			Peredaran Saham Di Pasar Reguler Share Circulation In The Regular Market			Jumlah Saham Tercatat Total Listed Share	Kapitalisasi Pasar Capitalization Market
		TTG	TRD	Akhir End	Volume	Nilai Value	Frek.		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Unit)	(Rp)	(X)		
2022									
1	Januari January	2.570	2.030	2.210	506.749.900	1.153.905.058.000	64.513	13.134.008.598	29.026.159
2	Februari February	2.430	2.040	2.250	401.115.000	917.177.072.000	50.017	13.134.307.498	29.552.191.870.500
3	Maret March	2.500	2.020	2.170	564.668.300	1.246.000.737.000	69.949	13.134.309.398	28.501.451.393.660
4	April April	2.600	1.990	2.020	476.168.500	1.053.259.841.000	71.534	13.134.312.198	26.531.310.639.960
5	Mei May	2.200	1.610	1.955	430.937.900	814.247.061.000	40.357	13.317.062.637	25.749.427.455.335
6	Juni June	2.190	1.845	1.915	473.384.300	938.378.010.000	46.063	13.632.806.289	26.106.824.043.435
7	Juli July	2.040	1.800	1.960	425.049.400	815.574.929.000	37.923	13.632.812.401	26.702.312.305.960
8	Agustus August	2.060	1.685	1.685	436.052.900	797.899.638.000	43.796	13.638.813.301	22.981.400.412.185
9	September September	1.835	1.505	1.705	615.100.000	1.024.171.062.000	52.765	13.667.813.301	23.303.621.678.205
10	Oktober October	1.770	1.180	1.320	626.475.200	902.191.456.000	51.534	13.667.791.701	18.041.643.445.320
11	November November	1.660	1.175	1.425	860.830.400	1.244.800.246.500	72.956	13.667.911.701	19.476.774.173.925
12	Desember December	1.635	1.290	1.415	916.555.900	1.301.443.923.500	62.459	14.517.912.501	20.542.846.188.915
Jumlah Total					6.733.087.700	12.209.049.034.000	663.866		
2023									
1	Januari January	1.545	1.280	1.325	695.954.000	978.404.601.000	41.536	14.509.061.592	19.224.506.609.400
2	Februari February	1.415	1.275	1.300	394.401.400	523.051.534.500	34,784	14.509.064.592	18.861.783.969.600
3	Maret March	1.325	1.110	1.200	419.380.300	519.582.222.500	25,134	14.509.071.740	17.410.886.088.000
4	April April	1.495	1.195	1.400	317.347.200	426.410.182.000	24,845	14.509.071.740	20.312.700.436.000
5	Mei May	1.460	1.230	1.285	356.607.600	477.917.512.000	29,276	14.509.072.140	18.644.157.699.900



Kode Saham: BANK
Bursa Perdagangan Saham: Bursa Efek Indonesia
Stock Code: BANK
Stock Trading Exchange: Indonesia Stock Exchange

No	Bulan Month	Kurs (Rg) Exchange Rate			Peredaran Saham Di Pasar Reguler Share Circulation In The Regular Market			Jumlah Saham Tercatat Total Listed Share	Kapitalisasi Pasar Capitalization Market
		TTG	TRD	Akhir End	Volume	Nilai Value	Frek.		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Unit)	(Rp)	(X)		
6	Juni June	1.480	1.135	1.225	235.063.000	301.359.215.500	24,515	14.509.072.140	17.773.613.371.500
7	Juli July	1.380	1.205	1.270	246.799.500	318.238.478.000	23,086	14.509.072.640	18.426.522.252.800
8	Agustus August	1.300	1.185	1.195	274.917.600	338.229.561.500	15,828	14.509.072.940	17.338.342.163.300
9	September September	1.205	1.035	1.075	289.689.300	322.563.541.000	15,409	14.509.073.440	15.597.253.948.000
10	Oktober October	1.090	930	1.040	298.744.300	308.942.583.000	16,717	14.509.075.140	15.089.438.145.600
11	November November	1.130	975	1.080	328.053.900	347.131.506.000	18,808	14.509.075.940	15.669.802.015.200
12	Desember December	1.250	1.050	1.240	290.803.000	328.740.321.500	19,843	14.621.833.840	18.131.073.961.600
Jumlah Total					4.147.761.100	5.190.571.258.500	289.781		

Aksi Korporasi yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan pada Saham

Informasi Pemegang Saham Pengendali Bank

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat aksi korporasi yang menyebabkan perubahan pada saham PT Aladin Global Venture selaku pemegang saham pengendali Bank.

Deviden Saham

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Bank tidak melakukan pembagian dividen saham untuk kinerja tahun buku 2019, 2020, 2021, 2022 sehingga menjadikan seluruh porsi laba bersih menjadi laba ditahan yang digunakan untuk modal kerja.

Konversi Waran menjadi Saham

Sepanjang tahun 2023 (1 Januari - 31 Desember 2023) terdapat 112.772.416 lembar Waran Seri 1 Bank Aladin Syariah yang dikonversi menjadi saham. Akibat konversi waran menjadi saham tersebut, saham Perseroan bertambah dari sebelumnya sejumlah 14,655,617,601 lembar menjadi 14,768,390,017.

Corporate Actions that Resulted in Changes in Shares

Information on the Bank's Controlling Shareholder

During 2023, there were no corporate actions that resulted in changes to the shares of PT Aladin Global Venture as the controlling shareholder of the Bank.

Share Dividends

Based on a General Meeting of Shareholders (GMS) resolution, the Bank did not distribute share dividends for the performance of the 2019, 2020, 2021, 2022 fiscal years, and the net profit was retained and used for working capital.

Conversion of Warrants into Shares

In 2023 (January 1 - December 31, 2023) 112,772,416 Bank Aladin Syariah Series 1 Warrants were converted into shares. As a result of the conversion of warrants into shares, the Company's total shares increased from the previous 14,655,617,601 shares to 14,768,390,017.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Pembatalan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Hingga 31 Desember 2023, Bank Aladin Syariah tidak pernah dikenakan sanksi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek tempat Bank mencatatkan saham dan memperdagangkan saham, baik penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait dampak dari penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting), yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Temporary Suspension of Share Trading and/or Delisting of Share Listing

Until December 31 2023, Bank Aladin Syariah has never been subject to sanctions that could affect its share trading activities on the Stock Exchange where the Bank lists shares and trades shares, whether temporary suspension of share trading and/or cancellation delisting of share listing. Therefore, there is no information to report on the impact of a temporary suspension of share trading and/or a delisting of share listing in this Annual Report.



Informasi Tentang Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi, Serta Pendanaan Lainnya

Information About Bonds, Sukuk, or Conversion Bonds, as Well as Other Funding

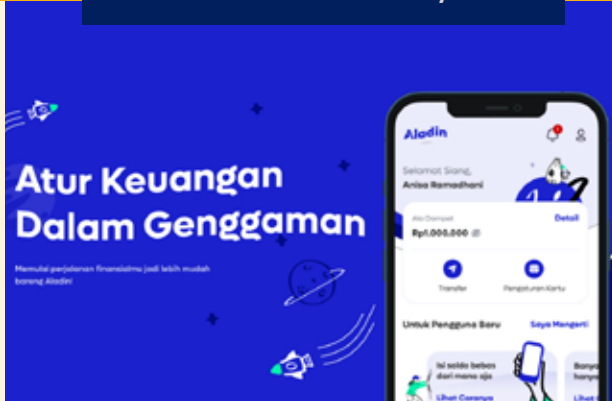
Hingga 31 Desember 2023, Bank Aladin Syariah tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya serta bentuk pendanaan lainnya seperti Medium Term Notes (MTN). Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk serta pendanaan lainnya.

Until December 31 2023, Bank Aladin Syariah has not issue bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities and other forms of funding such as Medium Term Notes (MTN). Thus, there is no information to report on outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/yield rates, maturity dates, and ratings of bonds/sukuk and other funding.

Peristiwa Penting

Events Highlights

19 Januari 2023 January 19



One year Aladin Apps Launching Anniversary

Sudah satu tahun sejak aplikasi Aladin diluncurkan ke publik pada tahun 2022. Ini menjadi momen bersejarah bagi Bank Aladin Syariah melihat perjuangan seluruh karyawan Aladin untuk proses launching aplikasi. Selama setahun Aplikasi Aladin telah menjadi salah satu solusi keuangan yang memberikan kemudahan untuk masyarakat di Indonesia.

It has been one year since the Aladin application was launched to the public in 2022. This was a historic moment for Bank Aladin Syariah as all Aladin employees had worked very hard to launch the application. After a year the Aladin application has become the financial solution that provides convenience for people in Indonesia.

3 Februari 2023 February 3



Tembus Pembiayaan lebih dari Rp1,3 Triliun, Bank Aladin Syariah siap berikan banyak terobosan di tahun ini!

After reaching more than Rp1.3 trillion in financing, Bank Aladin Syariah is ready to provide many breakthroughs this year!

PT Bank Aladin Syariah Tbk ("BANK") berhasil berlari kencang membukukan pembiayaan outstanding lebih dari Rp1,3 Triliun pada posisi akhir tahun 2022. Pembiayaan ini naik lebih dari 6 (enam) kali lipat dibandingkan dengan posisi pembiayaan di akhir kuartal II tahun 2022 sebesar Rp199 Miliar. Secara total disbursement, Bank telah menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp3,5 Triliun dalam kurun waktu kurang dari setahun beroperasi.

PT Bank Aladin Syariah Tbk ("BANK") recorded outstanding financing of more than Rp1.3 trillion at the end of 2022. This financing was more than 6 (six) times more when compared to the Rp199 billion financing position at the end of the QII 2022. For total disbursements, the Bank has distributed financing of more than Rp3.5 trillion in less than a year of operations.

17 Februari 2023 Februari 17



"Most Popular Leader in Sharia Financial Industry" The Iconomics

"Most Popular Leader in Sharia Financial Industry" The Iconomics

Suatu kebanggaan bagi Bank Aladin Syariah dan Bpk. Dyota Marsudi selaku Presiden Direktur Bank Aladin Syariah mendapatkan penghargaan dari The Iconomics sebagai Most Popular Leader dan ini menjadi semangat untuk para karyawan.

"Most Popular Leader in Sharia Financial Industry" The Iconomics
It was a moment of pride for Bank Aladin Syariah when Dyota Marsudi as President Director of Bank Aladin Syariah received an award from The Iconomics as Most Popular Leader, and this brought great encouragement to the employees.



12 April 2023 April 12



Bank Aladin Syariah meraih Penghargaan Infobank Digital Award 2023
Bank Aladin Syariah Raih Sertifikasi ISO 27001

Bank Aladin Syariah tahun ini mendapatkan penghargaan dari Indobank Digital Award 2023 dengan kategori The Best Sharia Bank (KBMI) 1 Asset class < 10 T dan The 2nd Best Digital Bank (KBMI) 1 Asset class < 10 T. Ajang ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12 April 2023. Pada kesempatan ini pula Ibu Firdila Sari selaku Direktur menerima langsung award tersebut.

This year, Bank Aladin Syariah received awards from the Indobank Digital Award 2023 in The Best Sharia Bank (KBMI) 1 Asset class < 10 Trillion, and The 2nd Best Digital Bank (KBMI) 1 Asset class < 10 Trillion categories. This event was held in Jakarta on April 12, 2023. On the same time, Firdila Sari as Director also received an award.

13 April 2023 April 13



Bank Aladin Syariah Raih Sertifikasi ISO 27001
Bank Aladin Syariah Achieves ISO 27001 Certification

PT Bank Aladin Syariah Tbk. (“Bank Aladin Syariah”) atau (“Bank”) berhasil meraih sertifikasi ISO 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi (ISMS) yang dikeluarkan oleh CBQA Global selaku badan sertifikasi. ISMS merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dengan organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi dan untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaan (availability) informasi.

PT Bank Aladin Syariah Tbk. (“Bank Aladin Syariah”) or (“Bank”) achieved ISO 27001 certification for the information security management systems (ISMS) from CBQA Global as the certification body. ISMS is a set of interrelated elements within an organization or company used to manage and control information security risks and to protect and maintain the confidentiality, integrity and availability of information.

17 April 2023 April 17



Mengedepankan Keselamatan dan Pelayanan kepada para Pemudik, Bank Aladin Syariah bersama Baznas dirikan Pos Siaga Mudik di Sejumlah Titik Jalur Mudik

Prioritizing Safety and Service for Mudik Travelers, Bank Aladin Syariah Together with Baznas Established Mudik Alert Posts at a Number of Points on the Mudik Route

Pada hari Senin 17 April 2023, Bank Aladin Syariah mendukung program Baznas untuk memberikan pelayanan kepada para pemudik yang sedang melakukan perjalanan ke kampung halaman dengan mendirikan sejumlah Pos Siaga Mudik yang tersebar di 20 titik lokasi. Program ini menyemarakkan bulan Ramadhan sebagai bulan kebangkitan dan keberkahan serta menghidupkan sifat kedermawanan sebagai salah satu sunnah Rasulullah di bulan suci ini.

On Monday April 17, 2023, Bank Aladin Syariah supported the Baznas program to provide services to mudik travelers who were traveling to their hometowns by establishing a number of Mudik Alert Posts in 20 locations. This program celebrated the month of Ramadan as a month of awakening and blessings and brought to life the nature of generosity as one of the sunnahs of the Prophet during this holy month.

18 April 2023 April 18



Bank Aladin Syariah Lepas Mudik Asyik 2023 bareng Alfamart
Bank Aladin Syariah Mudik 2023 with Alfamart

Selasa, 18 April 2023 menjadi momen paling indah bagi para pemudik yang mengikuti program Mudik Asyik 2023 yang diselenggarakan oleh Alfamart bersama Bank Aladin Syariah. Program ini memberikan tiket mudik gratis bagi para konsumen Alfamart dan Alfagift. Pelepasan mudik ini dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah – Jakarta.

Tuesday, April 18, 2023 was a beautiful moment for Mudik travelers who took part in the 2023 Mudik program organized by Alfamart together with Bank Aladin Syariah. This program provided free Mudik tickets for Alfamart and Alfagift consumers. The Mudik celebration was held at Taman Mini Indonesia Indah – Jakarta.

21 Juni 2023 June 21



Terus Kuatkan Perbankan Digital Syariah, Bank Aladin Syariah Tumbuh Semakin Solid By Continuous Strengthening of Sharia Digital Banking, Bank Aladin Syariah Grows Increasingly Solid

PT Bank Aladin Syariah Tbk (“Bank Aladin Syariah”) atau (“BANK”), melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada hari ini di Jakarta. Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh optimisme bagi Bank Aladin Syariah untuk terus bertumbuh dengan kinerja yang solid.

Dalam RUPST yang diselenggarakan, Bank Aladin Syariah telah mengambil sejumlah keputusan diantaranya adalah persetujuan Laporan Tahunan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan, serta Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

PT. Bank Aladin Syariah Tbk. (“Bank Aladin Syariah”) or (“BANK”), held its Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) today in Jakarta. 2022 was a year full of optimism for Bank Aladin Syariah to continue to grow following a solid performance.

At the AGMS, Bank Aladin Syariah’s resolutions included approval of the Annual Report, and the Company’s Activity Report, Financial Report and Sustainability Report for the fiscal year ending December 31, 2022.

25 Juli 2023 July 25



Penghargaan Sebagai Islamic Banking Initiative of The Year dari ABF Award 2023 Award as Islamic Banking Initiative of the Year from ABF Award 2023

PT. Bank Aladin Syariah Tbk (Bank Aladin Syariah) berhasil meraih penghargaan sebagai Islamic Banking Initiative of the year dari ABF Retail Banking Awards 2023 yang di gelar di Singapura pada tanggal 25 Juli 2023 dan diterima serta dihadiri langsung oleh Bapak Dyota Marsudi selaku Presiden Direktur Bank Aladin Syariah.

Penghargaan ini sebagai wujud komitmen Bank Aladin Syariah dalam melakukan inovasi dan optimalisasi layanan kepada masyarakat.

PT. Bank Aladin Syariah Tbk (Bank Aladin Syariah) received an award for Islamic Banking Initiative of the year from the ABF Retail Banking Awards 2023, in Singapore on July 25 2023, which and was received by Dyota Marsudi as President Director of Bank Aladin Syariah.

This award was in recognition of Bank Aladin Syariah’s commitment to innovating and optimizing services in the communities.

2 Agustus 2023 August 2



Tutup 2Q23, Bank Aladin Lanjutkan Pertumbuhan Kinerja yang semakin Solid At the Close of 2Q23, Bank Aladin continued its Increasingly Solid Performance Growth

PT Bank Aladin Syariah Tbk. (“Bank Aladin Syariah”) atau (“Bank”) menutup kuartal II tahun 2023 dengan kelanjutan pertumbuhan kinerja yang semakin solid. Bank Aladin Syariah terus melanjutkan tahapan pertumbuhan bisnis yang kuat dengan meningkatkan aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga (“DPK”) dan penyaluran pembiayaan.

“Bank Aladin Syariah ingin tumbuh dengan sustainable, sehingga optimalisasi digital harus berkontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan dan dalam membangun kolaborasi yang efektif dengan mitra-mitra strategis kami”

PT Bank Aladin Syariah Tbk. (“Bank Aladin Syariah”) or (“Bank”) closed QII 2023 with an increasingly solid performance growth. Bank Aladin Syariah continued its strong business growth stage by increasing third party fund (“TPF”) collections and financing distribution.

“Bank Aladin Syariah wants to grow sustainably, so digital optimization must contribute significantly to financial performance and in building effective collaboration with our strategic partners”.



11 Agustus 2023 August 11



Seperjuangan Bank Aladin Syariah Meriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 78
Bank Aladin Syariah Celebrates Indonesia's 78th Independence Day

Dalam rangkaian memperingati HUT RI ke 78, Bank Aladin Syariah mengadakan serangkaian kegiatan dari Olahraga hingga games tradisional yang dimeriahkan oleh para karyawan Bank Aladin Syariah. Kegiatan ini sebagai bentuk kemeriahan dalam menyambut HUT RI dan juga menciptakan kebersamaan antar karyawan Bank Aladin Syariah.

In commemoration of the Republic of Indonesia 78th Independence Day Anniversary, Bank Aladin Syariah held a series of sports to traditional games events for Bank Aladin Syariah employees. This activity was in celebration of the Republic of Indonesia's Independence Day and created togetherness among Bank Aladin Syariah employees.

31 Oktober 2023 October 31



Neraca Tumbuh Positif, Kinerja Bank Aladin Syariah Semakin Solid di Kuartal III 2023
Balance Sheet Grows Positively, Bank Aladin Syariah's Performance Becomes Increasingly Solid in QIII 2023

PT Bank Aladin Syariah Tbk (Bank Aladin Syariah) menutup kuartal III tahun 2023 dengan mencatatkan kelanjutan pertumbuhan kinerja yang positif. Pertumbuhan ini terlihat dari meningkatnya aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran pembiayaan.

Sampai dengan bulan September 2023, aplikasi Bank Aladin Syariah tercatat telah diunduh sebanyak lebih dari 5 Juta nasabah. Sedangkan pengguna yang teregistrasi secara aktif mencapai lebih dari 3 juta nasabah di seluruh Indonesia.

PT Bank Aladin Syariah Tbk (Bank Aladin Syariah) closed the QIII 2023 by recording a continuing positive performance growth. This growth can be seen in the increasing collection of third party funds (TPF) and financing distribution. As of September 2023, Bank Aladin Syariah's application has been downloaded by more than 5 million customers, while active registered users reach more than 3 million customers throughout Indonesia.

6 November 2023 November 6



Dorong Inklusi Keuangan, Bank Aladin Syariah terus dukung majukan UMKM dan Small Medium Business
To Encourage Financial Inclusion, Bank Aladin Syariah Continues to Support the Advancement of MSMEs and Small Medium Businesses

Selaras dengan program pemerintah dalam mendorong program pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, Bank Aladin Syariah berkomitmen membantu dan mendukung pertumbuhan UMKM dan SMB untuk mendapatkan dukungan finansial dan akses ke layanan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Aladin Syariah aktif dalam berbagai kegiatan dan program yang bertujuan untuk mendukung perkembangan UMKM syariah dan SMB. Dalam dukungannya tersebut, Bank Aladin Syariah telah bekerjasama dengan Meta sebagai penyedia periklanan. Bank Aladin Syariah percaya bahwa kerjasama dengan Meta memungkinkan para UMKM dan SMB dapat mengelola kampanye iklan dan memonitor kinerjanya. Selain itu Bank Aladin Syariah juga bekerjasama dengan Aspire yang memiliki platform iklan serta OrderOnline e-commerce yang memiliki jaringan yang luas untuk ribuan pedagang.

In line with the Government's program to encourage sharia economic growth programs in Indonesia, Bank Aladin Syariah is committed to helping and supporting the growth of MSMEs and SMBs to obtain financial support and access to financial services that comply with sharia principles.

Bank Aladin Syariah is active in a number of activities and programs aimed at supporting the development of sharia MSMEs and SMBs. For this support, Bank Aladin Syariah collaborates with Meta as an advertising provider, as Bank Aladin Syariah believes the collaboration with Meta will allow MSMEs and SMBs to manage their advertising campaigns and monitor their performance. Also, Bank Aladin Syariah collaborates with Aspire, an advertising and OrderOnline e-commerce platform with an extensive network of thousands of merchants.

30 November 2023 November 30



Saham Bank Aladin Syariah Naik Kelas Bank Aladin Syariah Shares Upgrade

Efektif per 30 November 2023 pencatatan saham PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK.JK) “naik kelas” dari Papan Pengembangan ke Papan Utama.

Effective November 30, 2023, the listing of PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK.JK) shares were “upgraded” from the Development Board to the Main Board.

13 Desember 2023 December 13



Bank Aladin Syariah Bersama Meta dan Aspire Beri Keleluasaan UMKM untuk Bertumbuh Bank Aladin Syariah Together with Meta and Aspire Give MSMEs Freedom to Grow

Aspire, Meta, dan Bank Aladin Syariah bekerjasama untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kerjasama ini memungkinkan UMKM untuk mendapatkan kredit pinjaman produktif, yang dapat langsung mereka gunakan melalui kartu korporat Aspire. Hal ini memudahkan UMKM untuk memaksimalkan potensi dan eksistensi online mereka melalui iklan digital di platform seperti Facebook atau Instagram dengan mudah dan efisien.

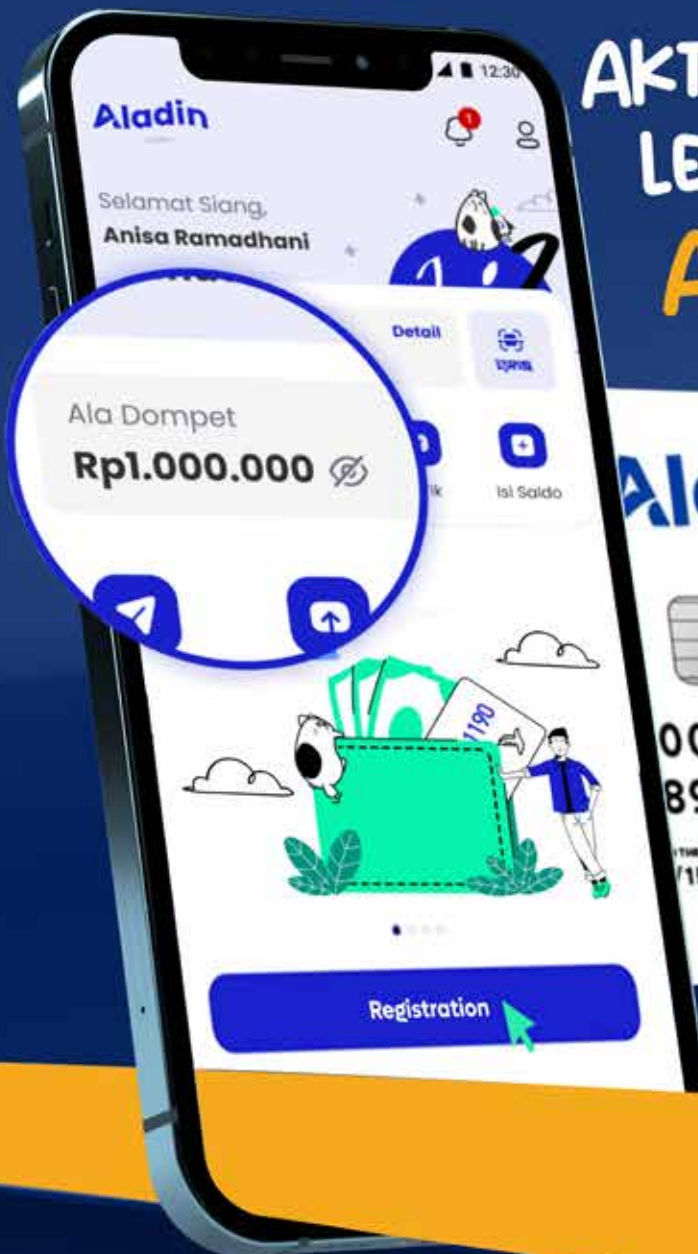
Aspire, Meta, and Bank Aladin Syariah collaborate to empower Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. This collaboration allows MSMEs to receive productive loan facilities, which they can immediately use via the Aspire corporate card. This enables MSMEs to easily and efficiently maximize their potential and online existence through digital advertising on platforms such as Facebook or Instagram.

halaman ini sengaja dikosongkan

Aladin



JALANI
AKTIVITAS KEUANGAN
LEBIH MUDAH PAKAI
ALA DOMPET!



Aladin



Laporan Manajemen

Management Report

Dewan Komisaris dan Direksi Serta Dewan Pengawas Syariah berhasil menjalin komunikasi dengan baik dan intens untuk tetap konsisten mengembangkan bisnis Bank secara positif dan berkelanjutan. Komunikasi yang dijalin juga mencakup aspek prinsip-prinsip syariah pada strategi dan kebijakan strategis bank.

The Board of Commissioners and Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board established good and intense communication to remain consistent in developing the Bank's business in a positive and sustainable manner. The communication also covered aspects of sharia principles in the Bank's strategy and strategic policies.

02

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Report



Pertama-tama, perkenankanlah saya atas nama Dewan Komisaris memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Bank Aladin Syariah dapat melalui tahun 2023 dengan pencapaian kinerja yang cukup baik. Hal tersebut seiring dengan peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat serta arahan kepada Direksi, yang senantiasa dilaksanakan dengan itikad baik, bertanggung jawab, dan penuh kehati-hatian, demi kepentingan Bank, sebagaimana arahan Pemegang Saham.

First and foremost, allow me to express gratitude and praise on behalf of the Board of Commissioners to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has bestowed His blessings and grace upon Bank Aladin Syariah, enabling it to navigate through the year 2023 with commendable performance. This achievement is in line with the role of the Board of Commissioners in overseeing and providing advice and guidance to the Board of Directors, always carried out with good intentions, responsibility, and utmost caution, all for the benefit of the Bank, as directed by the Shareholders.

Rudy Hamdani

Presiden Komisaris (Independen)
President Commissioner (Independent)



**Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,
Dear Respected Shareholders and Stakeholders,**

Laporan Dewan Komisaris meliputi penilaian kami atas kinerja Direksi dalam pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; pengawasan dalam perumusan dan implementasi strategi oleh Direksi; pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi dan dasar pertimbangannya; serta pengawasan dalam penerapan tata kelola perusahaan dan kinerja dari struktur Organ Tata Kelola.

Tinjauan Perekonomian Nasional dan Global

Di penghujung tahun 2023 ini, perekonomian dunia masih dihadapkan pada beragam tantangan. Pengetatan kebijakan moneter global masih terus berlanjut atau yang biasa disebut dengan istilah *higher for longer*. Kondisi tersebut dipicu perkembangan inflasi di negara-negara ekonomi utama yang masih di atas target. Inflasi yang terjadi disebabkan oleh fragmentasi politik yang berkepanjangan di Eropa ditambah konflik Israel-Hamas yang meletus sejak awal kuartal ke IV 2023, mendorong berlanjutnya krisis pangan dan membuat inflasi global bertahan tinggi sekalipun telah menurun, menjadi 6,8% pada 2023 dari 8,7% pada 2022.

Guna meredam tingkat inflasi yang masih berada di atas target jangka menengah panjang selama 2023, negara-negara maju meresponsnya dengan mempertahankan penerapan kebijakan suku bunga tinggi dengan jangka waktu yang lebih lama, termasuk Federal Funds Rate (FFR). The Fed menaikkan FFR secara bertahap hingga bps, dari 0,25% Januari 2022 menjadi di kisaran 5,25-5,50% di akhir Desember 2023.

Kenaikan FRR tersebut diikuti oleh naiknya yield obligasi jangka panjang Pemerintah negara maju, khususnya AS (US Treasury). Kondisi tersebut tentunya memicu aliran keluar modal asing dari Emerging Markets ke negara maju dan mendorong penguatan signifikan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia. Untuk meredamnya, negara-negara Emerging Market, menaikkan suku bunga rujukan di negara masing-masing, membuat agregat permintaan menurun, yang akhirnya membuat pertumbuhan perekonomian terhambat. Volume perdagangan dunia pun akhirnya terpengaruh, dan menurun.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan volume perdagangan barang dunia pada 2023 hanya tumbuh sebesar 0,4%, jauh menurun dari 5,2% pada tahun 2022. IMF juga merilis prediksi bahwa ekonomi dunia di tahun 2023 akan tumbuh sebesar 3,1%, menurun dari 3,5% di tahun 2022. Angka prakiraan pertumbuhan tersebut meningkat dari prakiraan IMF di Oktober 2023 yang sebesar 3,0%.

Sementara itu, suku bunga di negara berkembang seperti Meksiko di 11,25%, India di 6,50% dan Indonesia berada di tingkat 6,00%. Seperti halnya di negara maju, bank sentral di negara berkembang juga masih terus memantau kondisi inflasi secara berkelanjutan sehingga memerlukan waktu untuk memangkas suku bunga lebih lanjut. Oleh sebab itu, meskipun inflasi tengah melandai, suku bunga global diperkirakan masih akan berada di level yang tinggi beberapa waktu ke depan.

The Board of Commissioners' report covers our assessment of the Board of Directors' performance in managing the company and its evaluation criteria; supervision in formulating and implementing strategies by the Board of Directors; views on the company's business prospects prepared by the directors and their underlying considerations; and supervision in the implementation of corporate governance and the performance of the Organizational Governance structure.

National and Global Economic Review

Towards the end of 2023, the global economy still faces various challenges. The tightening of global monetary policies continues, commonly referred to as *"higher for longer."* This situation is triggered by inflation developments in major economies that remain above target. The inflation is caused by prolonged political fragmentation in Europe, coupled with the Israel-Hamas conflict that erupted in early Q4 2023. These factors have led to an ongoing food crisis and have kept global inflation high, even though it has decreased to 6.8% in 2023 from 8.7% in 2022.

In order to curb the inflation rate which is still above the medium to long-term target throughout 2023, developed countries have responded by maintaining the implementation of high-interest rate policies for a longer duration, including the Federal Funds Rate (FFR). The Fed gradually increased the FFR up to bps, from 0.25% in January 2022 to a range of 5.25-5.50% at the end of December 2023.

The increase in the Federal Funds Rate (FRR) was followed by a rise in the yield of long-term government bonds in developed countries, particularly in the United States (US Treasury). This condition naturally triggered an outflow of foreign capital from Emerging Markets to developed countries and significantly strengthened the US dollar against various world currencies. To mitigate this, Emerging Market countries raised their benchmark interest rates individually, leading to a decrease in aggregate demand, ultimately hindering economic growth. As a result, global trade volume was also affected and declined.

The World Trade Organization (WTO) estimates that the world trade volume of goods will only grow by 0.4% in 2023, a significant decline from the 5.2% growth observed in 2022. Additionally, the International Monetary Fund (IMF) predicts that the global economy in 2023 will experience growth of 3.1%, down from 3.5% in 2022. Notably, this growth projection represents an increase from the IMF's earlier prediction in October 2023, which was 3.0%.

Meanwhile, regarding interest rates in developing countries such as Mexico, the interest rate stands at 11.25%, India, the interest rate is 6.50%, while In Indonesia, the interest rate is at 6.00%. Similar to developed countries, central banks in developing nations continue to closely monitor inflation conditions, which influence their decisions on interest rates. Despite the downward trend in inflation, global interest rates are expected to remain at elevated levels for some time. The United States economy realized a growth of 2.5% year-on-year (yoy) in 2023, which is higher than the 1.9% (yoy) growth in 2022.

Realisasi perekonomian Amerika Serikat (AS) tumbuh 2,5% (yoy) pada 2023, atau lebih tinggi dari realisasi tahun 2022 sebesar 1,9% (yoy). Pertumbuhan ekonomi AS yang lebih cepat dari prakiraan tersebut terutama dikonstruksikan oleh naiknya belanja pemerintah dan swasta bersamaan dengan diperlonggarnya berbagai kebijakan restrictive pasca pandemi lebih cepat dari berbagai negara maju lainnya. Sementara perekonomian negara-negara Euro, masih tetap melemah akibat berlanjutnya disrupsi pasokan energi akibat konflik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan, yang membuat inflasi tetap tinggi dan memaksa European Central Bank (ECB) mempertahankan suku bunga tinggi. Akibatnya perekonomian negara-negara maju kawasan Euro diproyeksikan hanya tumbuh 0,5% dari 3,4% di tahun sebelumnya. Masalah inflasi ini akibat tingginya energi juga dialami Inggris, yang membuat ekonominya juga diprediksi hanya tumbuh 0,5% dari 4,3% di 2022.

Di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian dan tingginya suku bunga, namun diwarnai dengan menguatnya ekonomi kawasan, perekonomian nasional tetap menunjukkan ketahanan berkat penerapan kebijakan fiskal, makro-prudential dan kebijakan moneter antisipatif yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Berlanjutnya program-program bantuan sosial, bersamaan dengan berlanjutnya proyek-proyek infrastruktur konektivitas dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) membuat permintaan domestik serta daya beli masyarakat tetap terjaga, dengan inflasi yang tetap terkendali.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan momentum pemulihan ekonomi di 2023, BI hanya dua kali menaikkan suku bunga acuan BI Rate menjadi 6,00% per Desember 2023 atau hanya bertambah 50 bp dari posisi 2022 yang sebesar 5,50%. Keputusan BI tersebut didukung oleh tetap kuatnya neraca perdagangan Indonesia, yang tetap mencatatkan surplus hingga sebesar US\$36,9 miliar di tengah tren penurunan harga-harga komoditas primer, seperti batu bara, timah dan Crude Palm Oil (CPO) dalam setahun terakhir.

Surplus perdagangan beberapa tahun terakhir sejak masa pandemi tersebut membuat cadangan devisa Indonesia kembali meningkat, mencapai US\$146,38 miliar, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Kuatnya pondasi perekonomian nasional membuat nilai tukar rupiah terapresiasi 1,10% menjadi sebesar Rp15.397/USD, dari Rp15.568/USD di akhir 2022.

Perkembangan ekonomi nasional dan global, perubahan kebijakan oleh regulator, serta semakin tingginya persaingan di industri perbankan merupakan faktor eksternal penting dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), yang juga dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan atas adaptasi masyarakat ke teknologi dan digital, serta perkembangan literasi keuangan di Indonesia.

This faster-than-expected economic growth in the US was primarily contributed by an increase in government and private spending, along with a quicker relaxation of various restrictive policies post-pandemic compared to other advanced countries. Meanwhile, the economies of Eurozone countries continued to weaken due to ongoing energy supply disruptions caused by the prolonged conflict between Russia and Ukraine, leading to persistently high inflation and forcing the European Central Bank (ECB) to maintain high-interest rates. As a result, the projected growth for the advanced economies of the Eurozone is only 0.5%, down from 3.4% in the previous year. The core inflation issue due to high energy costs was also experienced by the UK, which is predicted to see its economy grow by only 0.5%, down from 4.3% in 2022.

Amidst a global economic environment still shrouded in uncertainty and high-interest rates, but marked by a strengthening regional economy, the national economy continued to show resilience thanks to the implementation of fiscal, macro-prudential, and anticipatory monetary policies by the Ministry of Finance and Bank Indonesia. The continuation of social assistance programs, along with ongoing connectivity infrastructure projects within the National Strategic Projects (PSN), maintained domestic demand and the purchasing power of the public, with inflation remaining under control.

To maintain exchange rate stability and the momentum of economic recovery in 2023, Bank Indonesia (BI) raised the benchmark BI Rate to 6.00% in December 2023, an increase of only 50 basis points from the 2022 rate of 5.50%. This decision by BI was supported by the continued strength of Indonesia's trade balance, which still recorded a surplus of US\$36.9 billion amidst a downward trend in the prices of primary commodities such as coal, tin, and Crude Palm Oil (CPO) over the last year.

The trade surplus over the past few years since the pandemic has led to an increase in Indonesia's foreign exchange reserves, reaching US\$146.38 billion, equivalent to financing 6.7 months of imports or 6.5 months of imports and government foreign debt payments. The strong foundation of the national economy resulted in the appreciation of the rupiah by 1.10%, to Rp15,397/USD, from Rp15,568/USD at the end of 2022.

The national and global economic development, policy changes by regulators, and the increasing competition in the banking industry are important external factors in the preparation of the Bank's Business Plan (RBB) and the Sustainable Finance Action Plan (RAKB). These plans also consider opportunities and challenges related to society's adaptation to technology and digital advancements, as well as the development of financial literacy in Indonesia.



Setelah memasuki tahapan pertumbuhan yang dimulai dengan diluncurkannya aplikasi digital Bank di tahun 2022, Bank Aladin Syariah terus mengembangkan produk-produknya sebagai bank digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi tersebut, Bank telah berhasil mengakuisisi lebih dari 3,1 juta nasabah sampai dengan akhir tahun 2023. Selain produk-produk yang telah diluncurkan sebelumnya seperti tabungan transaksional “Ala Dompot”, tabungan rencana “Ala Impian”, fitur-fitur baru seperti bill payment, Ala Berbagi, dan tarik setor tunai melalui gerai Alfamart, di tahun 2023 ini Bank kembali meluncurkan inovasi produk-produk perbankan seperti fitur QRIS sebagai metode pembayaran melalui aplikasi mobile banking dan platform Corporate Internet Banking untuk mempermudah transaksi bagi nasabah korporasi. Layanan tarik setor tunai Bank pun terus diperluas dan telah tersedia di lebih dari 20.000 gerai Alfamart dan Alfamidi di seluruh Indonesia. Pada Triwulan IV 2023, Bank juga telah menghadirkan terobosan baru meluncurkan layanan Banking as a Service (BaaS), sebuah layanan dari bank digital dengan pihak ketiga untuk terhubung dengan sistem perbankan secara langsung melalui Application Programming Interface (API).

Dari sisi pembiayaan, Bank juga terus mendorong penyaluran dana melalui produk invoice financing, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ritel konsumtif. Di tahun 2023, Bank juga telah menyalurkan pembiayaan produktif berbasis bagi hasil untuk nasabah UMKM dan Korporasi dan pembiayaan kendaraan bermotor untuk nasabah ritel. Guna mendukung pengembangan bisnis Bank, kemitraan yang dimiliki Bank juga akan terus diperluas dan Bank akan terus berupaya menggali potensi pengembangan bisnis melalui ekosistem mitra strategis Bank.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Dewan Komisaris melihat bahwa kebijakan strategis Bank di tahun 2023 dengan memperkuat fokus sebagai entitas digital banking pada segmen ritel serta terus berkolaborasi dengan mitra-mitra sudah sangat tepat. Dewan Komisaris juga mengapresiasi langkah Bank untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia serta memperkuat fungsi intermediari melalui pertumbuhan bisnis bersama mitra-mitra yang akrab dengan keseharian nasabah.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Direksi mengenai Pengelolaan Bank

Di sepanjang tahun 2023, Direksi Bank Aladin Syariah telah melakukan beberapa langkah yang besar untuk masa depan Bank, atas persetujuan Dewan Komisaris dan sesuai dengan arahan Pemegang Saham. Dewan Komisaris menilai bahwa langkah tersebut sudah cukup tepat dan telah terimplementasi dengan baik, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik selama 2023, tercermin antara lain dari capaian kinerja Bank yang secara keseluruhan telah melebihi target yang ditetapkan khususnya dari sisi penghimpunan dana dan pembiayaan.

After entering a growth phase that began with the launch of the Bank’s digital application in 2022, Bank Aladin Syariah has continued to develop its products as a digital bank to meet the needs of the community. Through this application, the Bank has successfully acquired more than 3.1 million customers by the end of 2023. In addition to previously launched products such as the transactional savings “Ala Dompot” and the planned savings “Ala Impian”, new features like bill payment, Ala Berbagi, and cash withdrawal and deposit through Alfamart stores were introduced. In 2023, the Bank launched banking product innovations such as the QRIS feature as a payment method through the mobile banking application and the Corporate Internet Banking platform to facilitate transactions for corporate customers. The Bank’s cash withdrawal and deposit services have been expanded and are now available in more than 20,000 Alfamart and Alfamidi stores across Indonesia. In the fourth quarter of 2023, the Bank also introduced a new breakthrough by launching Banking as a Service (BaaS), a service from the digital bank with third parties to connect directly with the banking system through an Application Programming Interface (API).

Furthermore, Bank continues to encourage the financing disbursement through invoice financing products, working capital financing, and consumer retail financing. In 2023, the Bank also disbursed productive financing based on profit-sharing for SME and Corporate customers, as well as vehicle financing for retail customers. To support the Bank’s business development, the partnerships will continue to be expanded, and the Bank will continue to explore potential business development through the Bank’s strategic partner ecosystem.

Based on these developments, the Board of Commissioners sees that the Bank’s strategic policy in 2023, which strengthens its focus as a digital banking entity in the retail segment and continues to collaborate with partners, is very appropriate. The Board of Commissioners also appreciates the Bank’s steps to strengthen the Islamic financial ecosystem, which is beneficial for all layers of society in Indonesia, and to strengthen the intermediary function through business growth with partners familiar with the daily lives of customers.

The Board of Commissioners’ Assessment of the Board of Directors’ Performance on Bank Management

Throughout 2023, the Board of Directors of Bank Aladin Syariah has taken several significant steps for the future of the Bank, with the approval of the Board of Commissioners and in accordance with the direction of the Shareholders. The Board of Commissioners assesses that these steps are quite appropriate and have been well implemented, in line with what was planned. The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities very well during 2023, reflected among other things from the Bank’s overall performance achievements that have exceeded the targets set, especially in terms of funding and financing.

Kami melihat Bank Aladin Syariah melalui tahun 2023 yang berkembang menjadi penuh tantangan dan ketidakpastian dengan tetap mencatatkan kinerja yang baik. Di tahun 2023, Bank Aladin Syariah berhasil membukukan pembiayaan lebih dari Rp3,1 triliun. Pembiayaan ini naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan posisi pembiayaan di akhir tahun 2022 sebesar Rp1,4 triliun. Secara total *disbursement*, Bank telah menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp8,6 triliun selama tahun 2023. Sedangkan dari sisi penghimpunan dana, Bank berhasil memperoleh lebih dari Rp3,3 triliun per akhir Desember 2023.

Sementara itu dalam rangka mendukung kegiatan bisnis bank, Bank terus memperluas jaringan kerjasama mitra dan terus mengoptimalkan fungsi intermedierinya dengan meningkatkan aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan. Untuk mendorong penghimpunan dana, Bank meluncurkan produk Deposito untuk nasabah ritel segmen menengah atas dan produk tabungan remaja, serta fitur tabungan rencana Ala Impian dengan membuat tema tabungan baru Ala Impian Qurban.

Pada sisi pembiayaan, Bank telah menyalurkan pembiayaan produktif berbasis bagi hasil untuk nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Korporasi dan pembiayaan kendaraan bermotor untuk nasabah ritel. Layanan Bank pun terus dilengkapi melalui peluncuran fitur QRIS sebagai metode pembayaran melalui aplikasi *mobile banking* dan *platform Corporate Internet Banking* untuk mempermudah transaksi bagi nasabah korporasi. Layanan tarik setor tunai Bank pun terus diperluas dan telah tersedia di lebih dari 20.000 gerai Alfamart dan Alfamidi di seluruh Indonesia. Pada Triwulan IV 2023, Bank juga telah meluncurkan layanan *Banking as a Service*. Dewan Komisaris juga mengapresiasi atas langkah-langkah yang dilakukan Bank Aladin Syariah yang dapat menjaga serta memitigasi dengan baik *Non-Performing Financing* (NPF) atau kualitas pembiayaan bermasalah yang nihil atau 0,00%.

Berdasarkan kebijakan strategis yang diimplementasikan oleh Direksi, Bank berhasil memperoleh lebih dari 3,1 juta pengguna per 31 Desember 2023. Hal ini menjadi pencapaian yang cukup membanggakan, terlebih Bank Aladin Syariah terbilang cukup baru dalam fokus ke bisnis digital banking syariah ini yang dimulai sejak tahun 2022.

Dewan Komisaris berharap, pencapaian yang telah dibukukan di sepanjang tahun 2023 akan memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan bisnis Bank di masa mendatang. Dewan Komisaris memberikan apresiasi terhadap kinerja, komitmen, dan dedikasi Direksi dan seluruh jajarannya dalam mengantisipasi tantangan dan perkembangan bisnis ke depan.

We observe that Bank Aladin Syariah faced a challenging and uncertain year in 2023, yet managed to maintain strong performance. During that year, Bank Aladin Syariah achieved financing of more than Rp3.1 trillion, which is more than twice the amount compared to the year-end position in 2022, which was Rp1.4 trillion. In terms of total disbursement, the Bank disbursed more than Rp8.6 trillion throughout 2023. On the funding side, Bank Aladin Syariah successfully obtained more than Rp3.3 trillion by the end of December 2023.

To support its business activities, the Bank continued to expand its network of partner collaborations and optimized its intermediary function by increasing third-party fund collection activities and financing disbursements. To boost collected funds, the Bank introduced deposit products for upper-middle retail segment customers and youth savings accounts. Additionally, it launched the "Ala Impian" savings plan feature with a new theme called "Ala Impian Qurban."

In financing, Bank Aladin Syariah provided productive financing based on profit-sharing for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) and Corporate customers. The Bank also extended its services by introducing the QRIS feature as a payment method through the mobile banking application and the Corporate Internet Banking platform, making transactions easier for corporate clients. Cash withdrawal and deposit services were expanded and made available at over 20,000 Alfamart and Alfamidi stores across Indonesia. In the fourth quarter of 2023, the Bank also launched the "Banking as a Service" (BaaS) offering. The Board of Commissioners commends Bank Aladin Syariah for effectively managing and mitigating Non-Performing Financing (NPF), maintaining a 0.00% Non-Performing financing quality.

Based on the strategic policies implemented by the Board of Directors, the Bank successfully acquired more than 3.1 million users by December 31, 2023. This achievement is particularly remarkable considering that Bank Aladin Syariah is relatively new to the focus on digital Islamic banking, having started in 2022.

The Board of Commissioners hopes that the accomplishments throughout 2023 will provide a strong foundation for the Bank's future business growth. They appreciate the performance, commitment, and dedication of the Board of Directors and all staff members in anticipating business challenges and developments in the future.



Pengawasan Dewan Komisaris dalam Perumusan dan Implementasi Strategi Bank

Salah satu fungsi Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi serta kebijakan yang dijalankan oleh Direksi. Dalam merumuskan target kinerja di awal tahun, Dewan Komisaris berperan memberikan arahan dan masukan sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya, termasuk arahan dan masukan untuk rencana kerja strategis yang dirumuskan Direksi. Untuk itu, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab agar implementasi rencana strategis tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Meski demikian, terdapat batasan dari tanggung jawab dan peran yang dijalankan baik oleh Dewan Komisaris maupun Direksi. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Bank oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Bank Aladin Syariah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG).

Pengawasan Dewan Komisaris difokuskan terhadap rencana pengembangan bisnis Bank dalam rangka menjadikan Bank Aladin Syariah sebagai Bank berbasis digital yang dapat menjadi solusi bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan layanan perbankan yang efektif dan efisien. Dalam merealisasikan rencana tersebut, Dewan Komisaris selalu menekankan kepada Direksi untuk senantiasa mengedepankan aspek kepatuhan dan prinsip-prinsip GCG.

Dewan Komisaris selalu berupaya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan arahan, saran dan rekomendasi yang konstruktif dan solutif kepada Direksi. Di tengah segala keterbatasan, Dewan Komisaris berhasil melakukan komunikasi secara baik dan intens dengan Direksi, khususnya terkait dengan pemenuhan aspek *governance* dalam rangka memperkuat fondasi bisnis Bank yang tengah dibangun Direksi di sepanjang tahun 2023.

Mengacu pada Peraturan OJK No.5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Bank Aladin Syariah menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan RBB tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tiap semester.

Frekuensi dan Mekanisme Pemberian Nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas penerapan strategi dan kebijakan yang dijalankan Direksi, yang salah satunya adalah melalui mekanisme rapat-rapat yang diselenggarakan. Dewan Komisaris secara rutin mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan Bank yang dijalankan oleh Direksi dalam forum rapat gabungan. Dalam forum tersebut Dewan Komisaris senantiasa meminta penjelasan dari Direksi mengenai strategi dan kebijakan yang dijalankan serta pencapaian atas implementasi strategi yang telah diterapkan Direksi berikut dengan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat berupa arahan atau rekomendasi kepada Direksi mengenai hal tersebut.

The Board of Commissioners' Oversight in the Formulation and Implementation of Bank Strategy

One of the functions of the Board of Commissioners is to supervise the implementation of strategies and policies carried out by the Board of Directors. In formulating performance targets at the beginning of the year, the Board of Commissioners plays a role in providing guidance and input according to its capacity and capabilities, including directions and inputs for the strategic work plan formulated by the Board of Directors. Therefore, the Board of Commissioners has a responsibility to ensure that the implementation of the strategic plan is well executed.

However, there are limitations to the responsibilities and roles carried out by both the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners is tasked with supervising the management of the Bank by the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, and ensuring that Bank Aladin Syariah implements Good Corporate Governance (GCG).

The Board of Commissioners' supervision is focused on the Bank's business development plan to make Bank Aladin Syariah a digital-based bank that can be a solution for all layers of society in obtaining effective and efficient banking services. In realizing this plan, the Board of Commissioners always emphasizes to the Board of Directors to always prioritize compliance aspects and GCG principles.

The Board of Commissioners always strives to carry out its function in providing constructive and solutive guidance, advice, and recommendations to the Board of Directors. Despite all limitations, the Board of Commissioners has successfully communicated well and intensively with the Board of Directors, especially regarding the fulfillment of governance aspects to strengthen the business foundation that the Board of Directors is building throughout 2023.

Referring to OJK Regulation No.5/POJK.03/2016 on Bank Business Plans, the Board of Commissioners carries out supervision over the implementation of the Bank Business Plan (RBB), which includes, among other things, management policies and strategies. Bank Aladin Syariah submits the Supervisory Report on the Implementation of the RBB to the Financial Services Authority (OJK) every semester.

Frequency and Mechanism of Providing Advice by the Board of Commissioners to the Board of Directors

The Board of Commissioners has supervised the implementation of strategies and policies carried out by the Board of Directors, one of which is through the mechanism of meetings held. The Board of Commissioners regularly holds meetings with the Board of Directors to discuss various matters related to the management of the Bank carried out by the Board of Directors in a joint meeting forum. In this forum, the Board of Commissioners always asks for explanations from the Board of Directors regarding the strategies and policies implemented and the achievements of the implementation of the strategies that the Board of Directors has applied, along with the various obstacles faced. The Board of Commissioners always conveys views and provides advice in the form of directions or recommendations to the Board of Directors regarding these matters.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat gabungan dengan mengundang Direksi. Selain forum rapat gabungan dengan Direksi, Dewan Komisaris juga senantiasa melakukan pertemuan berupa rapat dengan organ pendukung Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko, untuk membahas hasil pengawasan yang dilakukan komite sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing Komite.

Secara umum, sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Bank dan mengevaluasi kinerja Bank. Selama 2023 Dewan Komisaris telah melakukan 11 (sebelas) kali rapat, yang terdiri dari 7 (tujuh) kali Rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) kali Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris. Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga telah berupaya melakukan tindakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Bank serta memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi guna memastikan bahwa bisnis dan usaha Bank telah berjalan dengan baik.

Pandangan atau Tanggapan Dewan Komisaris atas Prospek Usaha dan Tantangan ke Depan

Perekonomian global ditahun 2024 masih akan diwarnai dengan ketidakpastian akibat konflik geopolitik yang berkepanjangan dan relatif tingginya suku bunga untuk mengatasi inflasi. Namun demikian, seiring dengan menurunnya harga energi akibat pengetatan moneter di tahun 2023, inflasi diperkirakan semakin menurun, diiringi dengan menurunnya suku bunga. Perkembangan tersebut membuat pertumbuhan berbagai kawasan bervariasi.

IMF dalam Laporan World Economic Outlook Januari 2024 memprakirakan pertumbuhan perekonomian AS di tahun 2024 akan melambat menjadi 2,1% dari 2,5% akibat pemberlakuan kebijakan moneter ketat sejak tahun 2022, pengetatan fiskal dan menurunnya pasar tenaga kerja seiring dengan turunnya agregat permintaan. Namun penurunan ini dikompensasikan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa, berkat adanya subsidi energi, turunnya inflasi yang diikuti oleh turunnya suku bunga rujukan.

Pertumbuhan negara-negara berkembang di Asia akan terpengaruh oleh pelemahan pertumbuhan Tiongkok, namun terkompensasi tetap kuatnya perekonomian India dan negara-negara berkembang di kawasan lainnya, sehingga tetap tumbuh 4,1% pada 2023. Secara keseluruhan pertumbuhan perekonomian global diproyeksikan tetap di angka 3,1%, namun inflasi global diproyeksikan menurun dari 6,8% menjadi 5,8% di tahun 2024, terutama dikompensasikan oleh menurunnya harga energi dan pangan.

Di tengah dinamika dan ketidakpastian perekonomian global tersebut, perekonomian Indonesia diperkirakan terus tumbuh dengan baik. Konsistensi penerapan kebijakan makro-prudential yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Kebijakan Moneter akomodatif, responsif yang diterapkan oleh Bank Indonesia menjadi salah satu pendukung

Throughout 2023, the Board of Commissioners conducted joint meetings by inviting the Board of Directors. In addition to the joint meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners consistently held meetings with supporting bodies, namely the Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, and Risk Monitoring Committee, to discuss the results of the committee's supervision in accordance with their respective functions and responsibilities.

In general, throughout 2023, the Board of Commissioners carried out its duties, including organizing meetings related to discussions on management issues and evaluating the Bank's performance. During 2023, the Board of Commissioners held 11 (eleven) meetings, consisting of 7 (seven) Board of Commissioners meetings and 4 (four) joint meetings with the Board of Directors. In addition to recommending the effective implementation of Good Corporate Governance principles, the Board of Commissioners also made efforts to supervise the Bank's management policies and provided advice and recommendations to the Board of Directors to ensure that the Bank's business and operations were running smoothly.

The Board of Commissioners' View or Response on Business Prospects and Future Challenges

The global economy in 2024 will still be marked by uncertainty due to prolonged geopolitical conflicts and relatively high interest rates to combat inflation. However, as energy prices decrease due to monetary tightening in 2023, inflation is expected to decline further, accompanied by lower interest rates. These developments lead to varying growth rates across different regions.

According to the IMF's World Economic Outlook report in January 2024, the US economic growth in 2024 is projected to slow to 2.1% from 2.5% due to tight monetary policies since 2022, fiscal tightening, and a decrease in the labor market along with aggregate demand. However, this decline is compensated by increased economic growth in Europe, thanks to energy subsidies, decreased inflation followed by lower benchmark interest rates.

The growth of developing countries in Asia will be affected by China's weakened growth, but it will be offset by the strong economies of India and other developing countries in the region, resulting in a growth rate of 4.1% in 2023. Overall, global economic growth is projected to remain at 3.1%, while global inflation is expected to decrease from 6.8% to 5.8% in 2024, primarily due to lower energy and food prices.

Amidst the dynamics and uncertainties of the global economy, Indonesia's economy is expected to continue growing well. The consistent implementation of macro-prudential policies by the Ministry of Finance and accommodative, responsive monetary policies by Bank Indonesia remain key factors supporting Indonesia's strong economy.



tetap kuatnya ekonomi Indonesia. Beberapa faktor yang akan memberi efek positif pada perekonomian Indonesia di tahun 2024, maupun beberapa tahun kemudian di antaranya adalah membaiknya konsumsi domestik, realisasi investasi swasta maupun Pemerintah, berlanjutnya PSN konektivitas maupun telekomunikasi, serta penyelenggaraan Pemilu yang damai.

Di tahun 2024 Bank akan terus melanjutkan pengembangan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan Nasabah. Diantaranya, Bank berencana melakukan penambahan produk Deposito pada aplikasi Bank yang ditujukan untuk nasabah ritel dan melakukan pengembangan fitur pada produk pendanaan eksisting, serta produk-produk pembiayaan berbasis syariah. Layanan Bank juga akan ditambahkan untuk terus meningkatkan aktivitas transaksi Nasabah.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis ini, infrastruktur teknologi pendukung akan terus dikembangkan secara berkelanjutan, begitu pula penyempurnaan organisasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai model bisnis. Bank juga menjajaki potensi kerja sama dengan mitra bisnis lainnya sebagai upaya pengembangan ekosistem bisnis Bank.

Dalam melaksanakan bisnisnya, Bank akan selalu mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk diantaranya menjaga modal inti minimum sesuai dengan ketentuan. Dari sisi manajemen risiko, Bank berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan risiko secara konsisten dan terpadu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Secara berkesinambungan, Bank akan mengevaluasi penerapan manajemen risiko agar dapat secara efektif mengelola risiko sesuai dengan aktivitas bisnis Bank.

Selanjutnya, di tahun 2024 Bank juga akan melanjutkan ekspansi bisnis dengan terus melengkapi produk dan layanan Perbankan Syariah yang ditawarkan kepada nasabahnya, baik melalui aplikasi digital Bank atau melalui ekosistem yang dimiliki oleh mitra strategis Bank. Ke depannya, kemitraan yang dimiliki Bank juga akan terus diperluas dan Bank akan terus berupaya menggali potensi pengembangan bisnis melalui ekosistem mitra strategis Bank.

Pandangan Dewan Komisaris atas Penerapan Tata Kelola Bank

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris menilai Direksi memiliki komitmen optimal dalam memenuhi tujuan dan penerapan GCG sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan-peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris menilai bahwa Bank Aladin Syariah senantiasa fokus pada penerapan praktik tata kelola perusahaan sesuai rencana yang telah disusun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan regulator yang berkepentingan pada pasar modal serta perkembangan dunia usaha Indonesia, telah berkomitmen untuk mendorong penerapan prinsip dan praktik GCG sebagai sebuah nilai yang wajib diemban oleh setiap entitas usaha yang berusaha di Indonesia. Bank Aladin Syariah menyambut dengan baik hal tersebut, terutama karena penerapan GCG melalui 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, terbukti memberikan hasil positif bagi keberlanjutan dunia usaha dan iklim investasi.

Several factors that will positively impact Indonesia's economy in 2024 and beyond include improved domestic consumption, realization of private and government investments, continued connectivity and telecommunications projects, and peaceful elections.

In 2024, the Bank will continue to develop products and services to meet customer needs. Plans include adding deposit products for retail customers through the Bank's application and enhancing features in existing funding products, as well as introducing Sharia-based financing products. The Bank's services will also be expanded to further enhance customer transaction activities.

In order to support business growth, the supporting technological infrastructure will continue to be developed sustainably, as well as organizational improvements and human resource development in line with the business model. The Bank also explores potential collaborations with other business partners as part of its business ecosystem development.

In conducting its business, the Bank will always comply with applicable regulations, including maintaining the minimum core capital as required. From a risk management perspective, the Bank is committed to consistently and comprehensively implementing risk management by prioritizing prudential principles. Continuously, the Bank will evaluate risk management implementation to effectively manage risks according to the Bank's business activities.

Furthermore, in 2024, the Bank will continue its business expansion by enhancing the products and services offered to its customers through digital banking applications or ecosystems owned by strategic partners. Going forward, the Bank's partnerships will also be expanded, and efforts will be made to explore business development potential through the Bank's strategic partner ecosystem.

The Board of Commissioners' View on Bank Governance Implementation

In 2023, the Board of Commissioners assessed that the Board of Directors demonstrated optimal commitment in achieving the objectives and implementing Good Corporate Governance (GCG) as mandated in the Company's Articles of Association and applicable regulations. The Board of Commissioners recognized that Bank Aladin Syariah consistently focused on implementing corporate governance practices according to the established plan. Regulatory authorities such as the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (BEI), and other relevant regulators have committed to promoting the adoption of GCG principles and practices as a mandatory value for every business entity operating in Indonesia. Bank Aladin Syariah welcomed this commitment, especially because the implementation of GCG through the five fundamental principles—transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness—has proven to yield positive results for business sustainability and the investment climate.

Dilihat dari *governance structure*, terdapat kemajuan penerapan GCG Bank Aladin Syariah sepanjang tahun 2023, yaitu secara umum struktur organisasi Bank Aladin Syariah telah diselaraskan dengan fokus bisnis Bank Aladin Syariah dan secara reguler telah direviu dan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan Bank Aladin Syariah. Selain itu, dilihat dari *governance process*, Bank Aladin Syariah selalu berupaya agar dalam melakukan kegiatan usaha dan proses operasional Bank Aladin Syariah sesuai dengan *Good Corporate Governance* dan prinsip kehati-hatian. Dengan struktur dan proses yang telah dilakukan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan serta disempurnakan, diharapkan *outcome* yang dicapai oleh Bank Aladin Syariah dapat membantu Bank Aladin Syariah untuk terus berkembang.

Secara khusus, perkembangan/kemajuan yang dilaksanakan Bank Aladin Syariah sepanjang tahun 2023 dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bank telah meluncurkan layanan *Banking as a Service* (BaaS) sebagai terobosan baru guna mendukung layanan perbankan bersama mitra salah satunya Alfamart melalui aplikasi Alfagift serta *Marketplace* produk halal pertama di Indonesia yaitu Evermos;
- Bank telah berhasil meluncurkan QRIS dan CIB, memungkinkan layanan perbankan yang lebih luas kepada pengguna Korporat & Ritel;
- Bank Aladin Syariah telah memenuhi target penyaluran pembiayaan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp3,1 triliun;
- Bank Aladin Syariah telah memenuhi modal inti minimum sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris memandang, bahwa seluruh perangkat GCG Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penilaian pada *governance structure*, *process*, dan *outcome* dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris selalu ter-update dengan baik mengenai kondisi Bank Aladin Syariah sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsi pengawasan yang efektif.

Tahun 2023 adalah tahun yang penting bagi Bank Aladin Syariah mengingat di tahun ini Bank berhasil melanjutkan optimalisasi fungsi intermediari dengan terus mendorong pertumbuhan penghimpunan dan penyaluran dana dan berkolaborasi dengan mitra-mitranya. Tanpa pelaksanaan *Good Corporate Governance*, pencapaian tersebut tidak akan mungkin tercapai. Oleh karenanya, ke depannya *Good Corporate Governance* perlu semakin memadai agar sesuai dengan misi Bank Aladin Syariah untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap

Regarding governance structure, there has been progress in the implementation of GCG at Bank Aladin Syariah throughout 2023. The Bank's organizational structure has generally been aligned with the focus of Bank Aladin Syariah's business, and regular reviews and evaluations have been conducted as needed. Additionally, in terms of governance process, Bank Aladin Syariah consistently strives to ensure that its business activities and operational processes adhere to Good Corporate Governance principles and prudential principles. With the structures and processes in place, continuously improved and refined, it is expected that the outcomes achieved by Bank Aladin Syariah will contribute to its ongoing development.

Specifically, the developments and progress implemented by Bank Aladin Syariah throughout 2023 can be seen in the following aspects:

- The Bank launched the Banking as a Service (BaaS) as a new breakthrough to support banking services in collaboration with partners, including Alfamart through the Alfagift application and the first halal product marketplace in Indonesia, Evermos;
- Bank Aladin Syariah successfully launched QRIS and CIB, enabling broader banking services for Corporate and Retail users;
- The Bank has achieved its financing disbursement target in 2023, amounting to Rp3.1 trillion;
- Bank Aladin Syariah fulfilled the minimum core capital requirement as stipulated by applicable regulations.

The Board of Commissioners believes that the entire GCG apparatus of the Bank has generally implemented Good Corporate Governance well. This is reflected in the assessment of the governance structure, process, and outcome, considering the principles of Good Corporate Governance. Throughout 2023, the Board of Commissioners has been well-updated on the condition of Bank Aladin Syariah, enabling it to perform effective supervisory functions.

The year 2023 was significant for Bank Aladin Syariah as it continued to optimize its intermediary function by promoting the growth of funding and disbursement and collaborating with its partners. Without the implementation of Good Corporate Governance, these achievements would not have been possible. Therefore, going forward, Good Corporate Governance needs to be further adequate to align with Bank Aladin Syariah's mission to strengthen the Islamic financial ecosystem beneficial for all layers of society.



Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan peran dan tanggung jawab dari semua lini yang dimiliki, termasuk didalamnya peran Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris menempatkan sistem pengendalian internal sebagai komponen pengawasan yang utama dalam pengelolaan Bank dan menjadi acuan kegiatan operasional Bank yang sehat dan terkendali sehingga dapat mencapai visi dan misi Bank serta dapat meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang efektif, Bank telah memiliki Kerangka kerja sistem pengendalian internal Bank mengacu kepada 5 (lima) komponen dasar pelaksanaan yang sejalan dengan Pedoman Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017. Selain itu, sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Bank telah mencakup kepada kecukupan pengendalian keuangan dan operasional, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta penerapan sistem/aplikasi. Pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank pada tahun 2023 telah lebih baik, hal ini tercermin dari kecukupan kerangka kerja sistem pengendalian internal untuk mendukung aktivitas Bank dalam bentuk ketentuan internal dan adanya penguatan fungsi pada lini pertahanan yaitu fungsi lini kedua pada Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan lini ketiga pada Internal audit serta penerapan sistem/aplikasi.

Pandangan Dewan Komisaris atas penerapan Manajemen Risiko

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ekonomi, pandemi COVID-19, serta peningkatan eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank Aladin Syariah, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan risiko dan permodalan yang efektif dan terintegrasi, yang mampu mendukung pencapaian dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing Bank. Dewan Komisaris memandang bahwa pengelolaan manajemen risiko di Bank Aladin Syariah telah dilakukan secara terintegrasi dengan strategi bisnis Bank. Penerapan manajemen risiko bersifat proaktif dan *forward looking* dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi Pemegang Saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Kemudian, keselarasan antara strategi dan tujuan bisnis dengan strategi risiko dan *risk appetite* juga dibutuhkan serta menjadi elemen penting dalam penerapan manajemen risiko. Strategi pengelolaan risiko dan *risk appetite* tersebut diterjemahkan ke dalam tata kelola, proses, kebijakan serta perangkat dan metodologi yang didukung oleh teknologi informasi, sumber daya manusia dan budaya risiko yang kuat. Dewan Komisaris memandang bahwa Bank Aladin Syariah telah mengimplementasikan kebijakan umum manajemen risiko sebagai kebijakan yang menjadi acuan dasar yang bersifat strategis dan komprehensif dalam penerapan Manajemen Risiko Bank.

Di mana sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko,

The Board of Commissioners' View on the Effectiveness of the Internal Control System

The implementation of the internal control system is the role and responsibility of all lines, including the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners places the internal control system as a primary oversight component in managing the Bank and as a reference for healthy and controlled operational activities of the Bank, thus achieving the Bank's vision and mission and increasing value for stakeholders, minimizing the risk of loss, and ensuring compliance with applicable laws and regulations.

To ensure the effective implementation of the internal control system, the Bank has an internal control system framework that refers to five basic components of implementation, in line with the Guidelines for the Internal Control System for Commercial Banks as established by the Financial Services Authority (OJK) through OJK Circular Letter No.35/SEOJK.03/2017 dated July 7, 2017. Additionally, the Bank's internal control system covers the adequacy of financial and operational controls, financial reporting, operational effectiveness and efficiency, compliance with applicable laws and regulations, and the implementation of systems/applications. The implementation of the Bank's internal control system in 2023 has improved, as reflected in the adequacy of the internal control system framework to support the Bank's activities in the form of internal provisions and there is strengthening of functions in the defense line, namely the second line function in the Risk Management Unit, the Compliance Unit, and the third line in Internal Audit, as well as the implementation of systems/applications.

The Board of Commissioners' View on the Implementation of Risk Management

In anticipation of economic challenges, the COVID-19 pandemic, and increased risk exposure faced by Bank Aladin Syariah, an effective and integrated risk and capital management system is needed, capable of supporting sustainable performance achievement and growth while enhancing the Bank's competitiveness. The Board of Commissioners views that risk management at Bank Aladin Syariah has been integrated with the Bank's business strategy. The implementation of risk management is proactive and forward-looking, aiming to maximize added value for Shareholders, manage capital comprehensively, and ensure profitability and sustainable business growth.

The alignment between business strategy and objectives with risk strategy and risk appetite is essential and a critical element in risk management implementation. The risk management strategy and risk appetite are translated into governance, processes, policies, as well as tools and methodologies supported by information technology, human resources, and a strong risk culture. The Board of Commissioners views that Bank Aladin Syariah has implemented a general risk management policy as a strategic and comprehensive reference for risk management at the Bank.

Bank Aladin Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan terhadap masing-masing profil risiko. Dewan Komisaris senantiasa mendorong agar implementasi manajemen risiko dapat berjalan secara efektif, dengan didasarkan pada tata kelola risiko yang telah ditetapkan. Di mana dalam menerapkan sistem manajemen risiko secara efektif, Bank Aladin Syariah telah menyesuaikan sistem manajemen risiko dengan POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No. 08/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dewan Komisaris juga senantiasa mengedepankan upaya untuk memitigasi risiko melalui pengawasan aktif terhadap pelaksanaan manajemen risiko. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris (Radirkom), maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko, maupun Komite Audit. Dengan dukungan dari Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris terus melakukan pemantauan atas pelaksanaan inisiatif manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi dalam upayanya memitigasi faktor risiko utama Bank dan mencegah terjadinya risiko serta memastikan keberlangsungan bisnis Bank dalam jangka panjang.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa pelaksanaan manajemen risiko Bank di tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Dalam pandangan Dewan Komisaris, Bank Aladin Syariah telah memiliki kecukupan kebijakan, toleransi risiko dan limit risiko yang secara berkala dikaji dengan mendapat persetujuan Direksi. Bank Aladin Syariah juga telah memiliki kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko.

Pandangan Dewan Komisaris atas penerapan *Whistleblowing System* (WBS) dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut

Keberadaan *Whistleblowing System* (WBS) merupakan bagian dari komitmen Bank Aladin Syariah untuk menjadikan prinsip GCG sebagai landasan dari setiap aspek operasi dan bisnis Bank sehari-hari. WBS memungkinkan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan pelapor. Penerapan WBS bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran dalam setiap aspek kegiatan bisnis Bank. Dalam pandangan Dewan Komisaris, WBS dapat menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di lingkungan Bank. Dewan Komisaris memandang bahwa Bank Aladin Syariah senantiasa mendorong partisipasi aktif seluruh Insan Bank untuk melaporkan setiap pelanggaran atau indikasi *fraud* di lingkungan Bank Aladin Syariah. Dengan demikian, tujuan WBS untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas menjadi lebih efektif dan independen.

Peran Dewan Komisaris dalam pengelolaan WBS Bank Aladin Syariah antara lain untuk melakukan pengawasan guna memastikan terselenggaranya WBS dengan dibantu oleh Komite Audit. Dewan Komisaris bersama dengan Komite Audit dan unit-unit lainnya senantiasa melakukan evaluasi dan melakukan tindak lanjut atas laporan yang diterima.

Berdasarkan laporan yang diterima Dewan Komisaris, di sepanjang

As a guideline for risk management implementation, Bank Aladin Syariah has established policies and procedures as the basis for managing each risk profile. The Board of Commissioners consistently encourages effective risk management implementation based on the established risk governance. In effectively implementing the risk management system, Bank Aladin Syariah has aligned its risk management system with OJK Regulation No. 65/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and OJK Regulation No. 08/POJK.03/2014 regarding the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

The Board of Commissioners also emphasizes efforts to mitigate risks through active supervision of risk management implementation. The Board of Commissioners' supervisory function is carried out through the Board of Directors and Commissioner Meeting (Radirkom) forum, as well as in the Risk Monitoring Committee and the Audit Committee meetings. With the support of the Risk Monitoring Committee, the Board of Commissioners continuously monitors the implementation of risk management initiatives by the Board of Directors to mitigate key risk factors for the Bank and ensure long-term business continuity.

The Board of Commissioners believes that the implementation of risk management at the Bank in 2023 has been successful. In their view, Bank Aladin Syariah has adequate risk policies, risk tolerance, and risk limits that are periodically reviewed and approved by the Board of Directors. The Bank has also established processes for identifying, measuring, monitoring, and controlling risks continuously across all material risk factors, supported by risk management information systems.

The Board of Commissioners' View on the implementation of the *Whistleblowing System* (WBS) and the role of the Board of Commissioners in the WBS:

The existence of the *Whistleblowing System* (WBS) is part of Bank Aladin Syariah's commitment to making GCG principles the foundation of every aspect of daily Bank operations and business. The WBS provides a confidential reporting mechanism. Its implementation aims to detect and prevent deviations or violations in all aspects of Bank business. In the Board of Commissioners' view, the WBS can create an open, sincere, honest, and accountable work environment within the Bank. The Board of Commissioners encourages active participation from all Bank personnel to report any violations or indications of fraud within the Bank. Thus, the WBS aims to create a clean and integrity-driven work environment more effectively and independently.

The role of the Board of Commissioners in managing Bank Aladin Syariah's WBS includes overseeing the system's implementation, assisted by the Audit Committee. The Board of Commissioners, along with the Audit Committee and other units, consistently evaluates and follows up on received reports.



tahun 2023, tidak terdapat karyawan atau Manajemen Bank yang dilaporkan melalui *Whistleblowing System*. Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan WBS di lingkup Bank Aladin Syariah telah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi agar sosialisasi penerapan WBS terus menerus dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian segenap Insan Bank dalam melaporkan tindak pelanggaran, sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

Capaian kinerja Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan pada penerapan Tata Kelola Bank di lingkup Bank Aladin Syariah

Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan regulator yang berkepentingan pada bidang perbankan, pasar modal serta perkembangan dunia usaha Indonesia, telah berkomitmen untuk mendorong penerapan prinsip dan praktik GCG sebagai sebuah nilai yang wajib diemban oleh setiap entitas usaha yang berusaha di Indonesia. Bank Aladin Syariah menyambut dengan baik hal tersebut, terutama karena penerapan GCG melalui 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, terbukti memberikan hasil positif bagi keberlanjutan dunia usaha dan iklim investasi.

Sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan GCG oleh Direksi, Dewan Komisaris memandang implementasi GCG di lingkup Bank terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini juga seiring dengan transformasi bisnis yang dilakukan Bank di tahun 2023. Pengembangan perangkat kebijakan yang terus diperbaharui, hingga evaluasi dan pemantauan GCG, menjadi cerminan komitmen Direksi untuk dapat menerapkan prinsip dan praktik GCG di seluruh elemen operasi dan bisnis Bank.

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan penerapan prinsip GCG adalah sinergi dan kolaborasi yang baik antara organ pendukung Dewan Komisaris dan organ pendukung Direksi. Melalui keberadaan organ-organ pendukung tersebut, setiap aspek dalam penerapan prinsip GCG dapat terlaksana dan terpantau, baik itu kepatuhan, manajemen risiko, audit, hingga perkembangan SDM dan Teknologi Informasi sebagai salah satu fondasi mewujudkan akuntabilitas Bank.

Selain itu, Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan GCG di lingkup Bank telah berjalan dengan baik. Untuk melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan GCG, Bank Aladin Syariah secara berkala melaksanakan self assessment atas praktik GCG, yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan hasil self assessment GCG Bank yang dilaksanakan pada tahun 2023 secara semesteran, *self assessment* implementasi GCG Bank semester I dan semester II di tahun 2023 telah dijalankan secara komprehensif dengan hasil peringkat secara Individual adalah 2 (dua) dengan definisi peringkat yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan

Based on the reports received by the Board of Commissioners, throughout 2023, there were no employees or Management of the Bank reported through the Whistleblowing System. The Board of Commissioners believes that the implementation of the WBS within the scope of Bank Aladin Syariah has been successful. The Board of Commissioners has instructed the Board of Directors to continuously conduct awareness campaigns regarding the WBS to enhance the understanding and vigilance of all Bank personnel in reporting violations, thereby creating a clean and integrity-driven work environment.

The performance achievement of the Board of Commissioners in the oversight function regarding the implementation of Bank Governance at Bank Aladin Syariah

Bank Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (BEI), and regulators concerned with banking, capital markets, and Indonesia's business development have committed to promoting the adoption of GCG principles and practices as a mandatory value for every business entity operating in Indonesia. Bank Aladin Syariah welcomes this commitment, especially because the implementation of GCG through the five fundamental principles—transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness—has proven to yield positive results for business sustainability and the investment climate.

As the organ responsible for overseeing the implementation of GCG by the Board of Directors, the Board of Commissioners views that the implementation of GCG within the Bank has continuously improved over time. This progress is also in line with the Bank's business transformation in 2023. The continuous development of updated policy instruments, evaluations, and monitoring of GCG reflects the Board of Directors' commitment to implementing GCG principles and practices across all operational and business elements of the Bank.

One crucial aspect of successful GCG implementation is the synergy and collaboration between the supporting bodies of the Board of Commissioners and the supporting bodies of the Board of Directors. Through the existence of these supporting bodies, every aspect of GCG implementation can be executed and monitored, including compliance, risk management, auditing, and the development of human resources and information technology as foundations for achieving Bank accountability.

Additionally, the Board of Commissioners believes that the implementation of GCG within the Bank has been successful. To evaluate the effectiveness of GCG implementation, Bank Aladin Syariah periodically conducts self-assessments of GCG practices, referring to Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009, regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, as well as the Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 regarding the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. Based on the self-assessment results conducted semi-annually in 2023, the GCG self-assessment for both the first and second semesters achieved a comprehensive Individual rating of 2 (two), reflecting that the Bank's Management has implemented

penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh jajarannya yang telah bekerja secara optimal dalam menerapkan GCG dalam melakukan pengelolaan Bank selama tahun 2023. Dewan Komisaris menilai, perangkat GCG yang dimiliki Bank Aladin Syariah saat ini telah sesuai dengan proses bisnis Bank. Dewan Komisaris juga senantiasa terlibat dalam berbagai implementasi GCG, dengan melakukan pengawasan baik secara langsung maupun melalui pengawasan yang dilakukan oleh organ Komite Dewan Komisaris. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris bersama Komite, Dewan Komisaris sangat mengapresiasi atas upaya Bank Aladin Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG secara optimal. Hal tersebut sebagaimana komitmen yang ditunjukkan oleh Bank Aladin Syariah untuk terus berupaya menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional pada seluruh aktivitas kegiatan usaha Bank.

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya pengurusan Bank didukung oleh Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. Pelaksanaan tugas Komite-komite di bawah Dewan Komisaris berpedoman pada Piagam Komite masing-masing Komite yang telah disusun. Di setiap awal tahun, komite-komite di bawah Dewan Komisaris menyusun program rencana kerja masing-masing yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, melalui pemantauan, penelaahan/review serta pemberian saran atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang terkait dengan fungsi dan tugas komite-komite yang bersangkutan. Penilaian kinerja terhadap Komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah dilakukan sebagai berikut:

- **Komite Audit**
Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan/atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris baik pada area Laporan Keuangan, Pengendalian Intern, maupun Kepatuhan. Komite Audit telah melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya di antaranya melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/ atau pihak Otoritas. Komite Audit juga melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit/jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP), termasuk menelaah independensi dan objektivitas KAP. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat Komite Audit, termasuk menyusun risalah rapat.
- **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Good Corporate Governance principles effectively and generally well. This is evident from the application of Good Corporate Governance principles.

The Board of Commissioners highly appreciates the efforts of the Board of Directors and all its members for optimally implementing Good Corporate Governance (GCG) in managing the Bank throughout 2023. The Board of Commissioners assesses that the GCG instruments currently held by Bank Aladin Syariah are in line with the Bank's business processes. The Board of Commissioners is also consistently involved in various GCG implementations, supervising both directly and through the oversight conducted by the Board of Commissioners' Committee organs. Based on the supervision conducted by the Board of Commissioners along with the Committees, the Board of Commissioners greatly appreciates Bank Aladin Syariah's efforts in optimally implementing GCG principles. This is in line with Bank Aladin Syariah's commitment to continuously strive to make GCG principles the operational foundation for all the Bank's business activities.

Assessment of the Board of Commissioners on the Performance of Committees under the Board of Commissioners

The execution of duties and functions by the Board of Commissioners in supervising the management of the Bank is supported by the Audit Committee, the Nomination & Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee. The tasks of the Committees under the Board of Commissioners are guided by each Committee's Charter. At the beginning of each year, the Committees under the Board of Commissioners prepare their respective work plan programs, which serve as a reference in carrying out their duties to assist the Board of Commissioners through monitoring, reviewing, and providing advice or recommendations to the Board of Commissioners on matters related to the functions and duties of the respective Committees. The performance assessment of the Committees under the Board of Commissioners has been conducted as follows:

- **Audit Committee**
The Audit Committee is responsible for providing opinions to the Board of Commissioners regarding reports and/or other matters submitted by the Board of Directors and identifying issues that require the attention of the Board of Commissioners in areas such as Financial Reporting, Internal Control, and Compliance. The Audit Committee has carried out its functions, duties, and responsibilities, including reviewing financial information to be released by the Bank to the public and/or authorities. The Audit Committee also reviews compliance with legislation related to the Bank's activities and evaluates the effectiveness of audits/services provided by the Public Accountant Office (KAP), including assessing the independence and objectivity of the KAP. Throughout 2023, the Audit Committee held 5 (five) Audit Committee meetings, including the preparation of meeting minutes.



Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan memastikan pelaksanaan proses pencalonan posisi strategis dalam manajemen dan proses penetapan besaran remunerasi berjalan secara objektif, efektif dan efisien, sesuai ketentuan Peraturan OJK. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab pengawasannya terhadap pelaksanaan kebijakan nominasi dan remunerasi pada setiap tingkatan organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan 5 (Lima) kali rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, termasuk menyusun risalah rapat.

- **Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko dibentuk guna membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan. Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat Komite Pemantau Risiko, termasuk menyusun risalah rapat.

Di tahun 2023, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dengan baik. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya atas kinerja dan pelaksanaan tugas yang telah ditunjukkan oleh seluruh komite. Dukungan dari komite menjadi dasar bagi Dewan Komisaris untuk dapat memberikan masukan secara formal kepada Direksi untuk terus meningkatkan pengelolaan dan Tata Kelola yang Baik bagi Bank.

Penjelasan Dewan Komisaris terkait

- **Nomination and Remuneration Committee**

The Nomination and Remuneration Committee was established to assist the Board of Commissioners in performing supervisory functions and ensuring that the nomination process for strategic positions in management and the determination of remuneration amounts are conducted objectively, effectively, and efficiently, in accordance with OJK regulations. The Nomination and Remuneration Committee has carried out its supervisory functions, duties, and responsibilities over the implementation of nomination and remuneration policies at every organizational level, from the Board of Commissioners, the Board of Directors, to employees, in accordance with applicable regulations. Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee held 5 (five) Nomination and Remuneration Committee meetings, including the preparation of meeting minutes.

- **Risk Monitoring Committee**

The Risk Monitoring Committee was established to assist the Board of Commissioners in their supervisory duties and in providing advice to the Board of Directors to ensure that the Bank's risk management practices continue to meet the elements of adequacy in risk management procedures and methodologies. This ensures that the Bank's business activities remain within acceptable and profitable limits. Throughout 2023, the Risk Monitoring Committee held 5 (five) meetings, including the preparation of meeting minutes.

In 2023, the Board of Commissioners assessed that the committees had performed their functions, duties, and responsibilities well. The Board of Commissioners expressed its appreciation for the performance and execution of duties demonstrated by all the committees. The support from the committees forms the basis for the Board of Commissioners to provide formal input to the Board of Directors to continue improving management and Good Governance for the Bank.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Anggota Dewan Komisaris di Bank Aladin Syariah. Susunan Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis For Appointment
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris (Independen) President Commissioner (Independent)	RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2021 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 54 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H Notaris, di Jakarta Annual GMS on July 29, 2021 as stated in the Deed of Meeting Minutes Number 54 dated July 29, 2021 made before Notary Yulia, S.H, Notary Jakarta
Ationo Teguh Basuki	Komisaris Commissioner	RUPS Tahunan 21 Juni 2023 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12, tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H Notaris, di Jakarta Annual GMS on June 21, 2023 as stated in the Deed of Meeting Decision Statement No. 12, dated July 6, 2023 made before Notary Yulia, S.H, Notaris in Jakarta
Fransisca Ekawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	RUPS Tahunan 21 Juni 2023 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12, tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H Notaris, di Jakarta Annual GMS on June 21, 2023 as stated in the Deed of Meeting Decision Statement No. 12, dated July 6, 2023 made before Notary Yulia, S.H, Notary in Jakarta

Explanation of Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2023, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners at Bank Aladin Syariah. The composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2023, is as follows:

Apresiasi dan Penutup

Dewan Komisaris yakin bahwa Bank Aladin Syariah akan terus meningkatkan standar kinerjanya dengan terus melakukan inovasi dan meningkatkan kolaborasi, serta secara konsisten menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Pencapaian pada tahun 2023 telah memperkuat bisnis Bank untuk menjadi lebih berfokus peningkatan layanan yang berkelanjutan bagi nasabah kami yang berharga. Atas nama Dewan Komisaris, Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Direksi dan seluruh karyawan atas kerja keras dan dedikasinya dalam memajukan Bank Aladin Syariah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada nasabah setia dan mitra Bank atas kepercayaan dan dukungannya. Dewan Komisaris juga mengucapkan selamat kepada Direksi atas pencapaian kinerja Bank yang baik.

Appreciation and Closing

The Board of Commissioners is confident that Bank Aladin Syariah will continue to enhance its performance standards by constantly innovating and increasing collaboration, as well as consistently applying good corporate governance. The achievements in 2023 have strengthened the Bank's business to become more focused on improving sustainable services for our valued customers. On behalf of the Board of Commissioners, we express our utmost appreciation to the Board of Directors and all employees for their hard work and dedication in advancing Bank Aladin Syariah. We also thank our loyal customers and Bank partners for their trust and support. The Board of Commissioners also congratulates the Board of Directors on the Bank's performance achievements.

Jakarta, 29 April, 2024

Jakarta, April 29, 2024

Bank Aladin Syariah Tbk



Rudy Hamdani

Presiden Komisaris (Independen)

President Commissioner (Independent)



Laporan Direksi

Board of Directors' Report



Pertama-tama, perkenankan kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga PT Bank Aladin Syariah Tbk. ("Bank Aladin Syariah") berhasil melalui tahun 2023 yang berkembang dinamis dengan pertumbuhan dan kinerja yang cemerlang. Pencapaian kinerja tersebut telah sejalan dengan visi Bank Aladin Syariah untuk Menjadi Bank Syariah Digital terdepan.

First and foremost, allow us to express our praise and gratitude to Allah SWT for abundant blessing enabling PT Bank Aladin Syariah Tbk. ("Bank Aladin Syariah") to navigate through the dynamically evolving year of 2023 with remarkable growth and performance. These achievements align with Bank Aladin Syariah's vision to become a leading Digital Sharia Bank.

Dyota Mahottama Marsudi

Presiden Direktur
President Director



**Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,
Dear Respected Shareholders and Stakeholders,**

Dengan berakhirnya status pandemi di tahun 2023, tidak langsung menghadirkan kondisi yang kondusif khususnya untuk industri perbankan di Indonesia. Pelaku usaha dan pemerintah di berbagai negara tetap bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai krisis yang diakibatkan oleh pandemi yang melanda sejak akhir tahun 2020. Di saat yang bersamaan, dunia justru dihadapkan pada tantangan baru yang lebih kompleks akibat beberapa faktor, diantaranya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berkepanjangan, inflasi tinggi akibat krisis pangan dan energi, dan kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan berbagai negara. Hal ini membuat pertumbuhan perekonomian global melambat dan pada akhirnya berdampak pada berkurangnya permintaan barang dan jasa.

Namun demikian, Bank Aladin Syariah tetap berhasil melalui kondisi tersebut dengan mencatatkan kinerja yang baik dan memantapkan posisi Bank Aladin Syariah sebagai Bank Syariah Digital terdepan di Indonesia. Izinkan kami menyampaikan laporan pengelolaan Bank Aladin Syariah untuk tahun buku 2023.

Tinjauan Kondisi Perekonomian Nasional dan Global

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank Aladin Syariah") tahun buku 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan Laporan Tahunan ini, Bank Aladin Syariah mempertimbangkan berbagai aspek eksternal seperti perkembangan ekonomi dan industri perbankan nasional, serta kondisi internal Bank.

Perang yang berlarut-larut antara Rusia dan Ukraina serta konflik antara Israel dan Hamas sejak paruh kedua tahun 2023 telah menghambat ruang bagi pertumbuhan ekonomi global karena tingginya inflasi yang terus-menerus membatasi bank sentral di banyak negara besar, termasuk The Fed AS, untuk menerapkan kebijakan yang lebih baik. Suku bunga dalam jangka waktu yang lebih lama (lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama).

Suku bunga FFR pada bulan Desember 2023 berkisar antara 5,25% hingga 5,50%, meningkat sebesar 525 basis poin (bps) dibandingkan 0,25% pada bulan Januari 2022. Kenaikan suku bunga akan memberikan tenor yang lebih panjang dengan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah di negara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat (US Treasury). Situasi ini mau tidak mau menyebabkan gelombang aliran modal asing mengalir dari negara-negara *emerging market* ke negara-negara maju dan mengakibatkan apresiasi dolar AS yang signifikan terhadap berbagai mata uang global.

Dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi Januari 2024, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun ini bisa mencapai 3,1%. Angka tersebut merupakan hasil revisi yang lebih optimistis dibanding proyeksi sebelumnya. Dalam WEO edisi Oktober 2023, IMF memperkirakan ekonomi global 2024 hanya bisa tumbuh 2,9%. Kebijakan suku bunga tinggi membuat

With the end of the pandemic in 2023, a conducive environment was not immediately present, especially for the banking industry in Indonesia. Businesses and governments in various countries continued to work diligently to resolve various crises stemming from the pandemic that began at the end of 2020. At the same time, the world was confronted with new and more complex challenges due to several factors, including prolonged geopolitical tensions in the Middle East, high inflation resulting from food and energy crises, and the high interest rate policies implemented by various countries. This resulted in a slowdown in global economic growth and ultimately led to a reduction in the demand for goods and services.

Nevertheless, Bank Aladin Syariah managed to navigate through these conditions successfully by achieving solid performance and solidifying its position as the leading Digital Sharia Bank in Indonesia. Allow us to present the management report of Bank Aladin Syariah for the fiscal year 2023.

Review of National and Global Economic Conditions

Praise and gratitude to Allah SWT, for all His mercy and grace. The Annual Report of PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank Aladin Syariah") for the 2023 fiscal year has been completed. In the preparation of this Annual Report, Bank Aladin Syariah has taken into account various external aspects such as economic developments and the national banking industry, as well as internal conditions within the Bank.

The prolonged conflict between Russia and Ukraine, as well as the conflict between Israel and Hamas since the second half of 2023, has hindered the space for global economic growth due to high inflation, which has continuously constrained central banks in many major countries, including the US Federal Reserve, from implementing more accommodative policies. Interest rates are expected to remain higher for a longer period.

The Federal Funds Rate (FFR) in December 2023 ranged between 5.25% to 5.50%, marking an increase of 525 basis points (bps) compared to 0.25% in January 2022. The rise in interest rates will lead to longer tenors with increasing yields on government bonds in developed countries, particularly in the United States (US Treasury). This situation unavoidably triggers a wave of foreign capital inflows from emerging markets to developed countries, resulting in significant appreciation of the US dollar against various global currencies.

In the January 2024 edition of the World Economic Outlook (WEO), the International Monetary Fund (IMF) projected that global economic growth this year could reach 3.1%. This figure is the revision that is more optimistic compared to previous projections. In the October 2023 edition of WEO, the IMF predicted that the global economy in 2024 would only grow by 2.9%. The high interest rate policies caused the

pertumbuhan ekonomi negara maju menurun menjadi 1,6% (yoy) namun perekonomian negara berkembang bertahan di level 4,1% (yoy) pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Volume perdagangan dunia juga diperkirakan turut melemah, dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 0,4% jauh menurun dari capaian sebesar 5,2% di 2022.

Dalam situasi ekonomi global yang melambat dan penuh ketidakpastian, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dan stabil. Meskipun berangkat dari basis yang tinggi (*high base*) pada 2022, perekonomian Indonesia tetap berhasil mencatatkan pertumbuhan yang kuat sebesar 5,04% (yoy) pada triwulan IV-2023 dan 5,05% untuk keseluruhan tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2023 mencapai 5,04% (yoy), sedikit melebihi proyeksi pemerintah sebesar 5%. Penyumbang utama pertumbuhan ini adalah peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen terbesar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, tumbuh 4,82 persen di 2023. Kenaikan upah minimum dan bantuan sosial pemerintah menjadi faktor pendorong utama peningkatan konsumsi rumah tangga. Di tengah tantangan ekonomi global dan inflasi yang tinggi, peningkatan konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih terjaga.

Mengacu pada kebijakan The Fed menaikkan suku bunga acuan, Bank Indonesia (BI) juga telah menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 6,00% suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Terhitung per 21 Desember 2023, keputusan Bank Indonesia dalam mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah *pre-emptive* dan *forward looking*.

Keputusan Bank Indonesia tersebut dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan perekonomian nasional. Bauran penerapan kebijakan makroprudensial dari Kementerian Keuangan dan fleksibilitas moneter dari Bank Indonesia membuat neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus sebesar US\$36,9 miliar, membuat cadangan devisa di akhir tahun 2023 mencapai US\$146,38, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kuatnya pondasi perekonomian tersebut membuat nilai tukar rupiah per akhir Desember 2023 tercatat sebesar Rp15.399/USD atau terapresiasi 1,10% dari Rp15.568/USD di akhir 2022.

Kondisi Perbankan Nasional dan Pasar Modal Indonesia

Sepanjang tahun 2023, stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga. Hal ini tercermin dari kinerja perbankan nasional yang menunjukkan perkembangan positif terutama dalam menopang perekonomian nasional, baik itu dari sisi pembiayaan (perkreditan), penghimpunan dana, maupun perolehan laba. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan kredit perbankan tumbuh 10,4% secara year on year (yoy) per Desember 2023. Pertumbuhan ini didorong pertumbuhan kredit modal kerja yang naik 10,14% (yoy) November, kredit investasi

economic growth of developed countries to decline to 1.6% (yoy), but the economy of developing countries remained at 4.1% (yoy) in 2023 compared to the previous year. World trade volume is also expected to weaken, with projected growth of 0.4%, a big decrease from the achievement of 5.2% in 2022.

In a global economic situation that is slowing down and full of uncertainty, the Indonesian economy continued to grow strongly and stable. Despite starting from a high base in 2022, the Indonesian economy still managed to record strong growth of 5.04% (yoy) in QIV 2023, and 5.05% for the whole of 2023.

Indonesia's economic growth in fourth quarter 2023 reached 5.04% (yoy), slightly exceeding the government's projection of 5%. The main contributor to this growth was increased household consumption and investment. Household consumption, which is the largest component of Indonesia's gross domestic product (GDP), grew by 4.82% in 2023. The increases in the minimum wages and Government social assistance were the main drivers for the increased household consumption. Despite the global economic challenges and high inflation, the increase in household consumption shows that the purchasing power of Indonesian people was maintained.

Referring to the Fed's policy for increasing their benchmark interest rate, Bank Indonesia (BI) also increased the BI 7-Day Reverse Repo Rate to 6.00%, Deposit Facility interest rate to 5.25% and Lending Facility interest rate to 6.75%. On December 21, 2023, Bank Indonesia's decision to maintain the BI-Rate at 6.00% remained consistent with the focus of its pro-stability monetary policy to strengthen the stabilization of the Rupiah exchange rate, as well as its pre-emptive and forward-looking steps.

The decision by Bank Indonesia was made to maintain exchange rate stability while also preserving the momentum of national economic growth. The macroprudential policy from the Ministry of Finance, and the monetary flexibility from Bank Indonesia meant that Indonesia's trade balance again recorded a surplus of US\$36.9 billion, with foreign exchange reserves at the end of 2023 reaching US\$146.38, equivalent to financing 6.7 months of imports, or 6.5 months of imports, and payments of Government foreign debt, which was above the international adequacy standard of around 3 months of imports. The strong economic foundation meant that the rupiah exchange rate as of the end of December 2023 was Rp15,399/USD, an increase of 1.10% from IDR15,568/USD at the end of 2022.

Conditions in the National Banking and Indonesian Capital Markets

During 2023, the national financial services sector stability was maintained. This was reflected in the performance of national banking that showed positive developments, especially for supporting the national economy, both in terms of lending, raising funds and generating profits. Data from the Financial Services Authority (OJK) shows that bank lending grew 10.4% year on year (yoy) as of December 2023. This growth was driven by growth in working capital loans that grew 10.14% (yoy) in November, investment loans that grew 9.25%



bertumbuh 9,25% (yoy), dan kredit konsumsi meningkat 9,40% (yoy). Berdasarkan kelompok usaha penggunaannya, kredit kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh sebesar 8,46% (yoy) sementara kredit korporasi meningkat sebesar 9,99% (yoy).

Sementara itu, dari sisi kredit restrukturisasi terus mengalami tren penurunan sesuai dengan target yang dicanangkan Pemerintah. Di akhir tahun 2022, posisi kredit restrukturisasi tinggal sebesar Rp265,8 triliun dari Rp469 triliun. Trend ini memungkinkan untuk masa restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 bisa berakhir di tahun 2024.

Peningkatan kredit di 2023 dapat diimbangi dengan membaiknya kualitas kredit. Hal ini tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) gross yang dapat ditekan menjadi 2,38% di 2023, atau turun dibandingkan 2,44% di 2022. Sementara pada sisi permodalan, rasio *Capital to Adequacy Ratio* (CAR) menguat dari sebelumnya 25,68% di 2022 naik menjadi 27,97% di 2023.

Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan mengalami tren lesu sepanjang 2023. Per akhir 2023 atau Desember 2023 total DPK nasabah mencapai Rp8.234,2 triliun. Nilai DPK itu tumbuh hanya 3,8% secara tahunan (year on year/yoy). Pada bulan sebelumnya atau November 2023, pertumbuhan DPK juga berada di level 3,8% yang didorong oleh kenaikan giro, tabungan dan deposito yang masing-masing per November tumbuh 2,96% (yoy), 2,57% dan 3,50% (yoy). Sedangkan likuiditas industri perbankan dapat dijaga dengan baik dengan tingkat level yang memadai. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/ NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) tercatat sebesar 127,07% dan 28,73% pada 2023, atau jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Pasar modal Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang sehat, meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan yang berasal dari kondisi perekonomian global. Hal ini tercermin dari kinerja indeks harga saham Gabungan (IHSG) yang terus meningkat mencapai level 7.272,8 pada 29 Desember 2023, atau meningkat 6,16% dari posisi 30 Desember 2022. Sementara itu, kapitalisasi pasar mencapai Rp11.708,0 triliun di 2023 atau naik 22,86% dibandingkan posisi akhir 2022 yakni Rp9.529,86 triliun, dan juga sempat menembus rekor baru sebesar Rp11.792,0 triliun pada 28 Desember 2023.

Penjelasan Direksi terkait Perkembangan Bank Aladin Syariah Tahun 2023

Bank Aladin Syariah berhasil membukukan kinerja yang baik di sepanjang tahun 2023. Bank Aladin Syariah berhasil meningkatkan total aset sebesar 50,6% dari Rp4,73 triliun di tahun 2022 menjadi Rp7,13 triliun di tahun 2023. Pertumbuhan aset ini didukung oleh peningkatan volume pembiayaan, tentunya dengan kualitas aset yang terus membaik. Tercatat, penyaluran pembiayaan Bank Aladin Syariah mencapai Rp3,1 triliun, tumbuh 125,3% yoy.

Kinerja ekspansi pembiayaan tersebut diimbangi oleh kemampuan Bank Aladin Syariah dalam menjaga kualitas aset melalui pendekatan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dengan disiplin. Hingga akhir tahun 2023, Bank berhasil mempertahankan rasio NPF di level 0%.

(yoy), and consumer loans increased 9.40% (yoy). Based on growing user business, loans to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) grew by 8.46% (yoy) while corporate loans grew by 9.99% (yoy).

At the same time, loan restructuring continued to experience a downward trend in line with the targets set by the Government. At the end of 2022, the loan restructuring position fell to IDR265.8 trillion from IDR469 trillion. This trend was due to the loan restructuring during the period affected by COVID-19 to end in 2024.

The increase in loans in 2023 was balanced by an improvement in credit quality. This is reflected in the gross Non-Performing Loan (NPL) ratio, which was reduced to 2.38% in 2023, down from 2.44% in 2022. Meanwhile, on the capital side, the Capital Adequacy Ratio (CAR) strengthened from 25.68% in 2022 to 27.97% in 2023.

Additionally, Third Party Funds (TPF) in the banking sector experienced a declining trend throughout 2023. Up until the end of 2023, total customer TPF reached IDR8,234.2 trillion, an annual growth of 3.8% (year on year/yoy). In November 2023, TPF was also at the same level of 3.8%, driven by an increase in current accounts, savings and deposits, which in November respectively grew by 2.96% (yoy), 2.57% and 3.50% (yoy). While, banking industry liquidity was maintained at an adequate level, with the Liquid Assets/Non-Core Deposits (AL/NCD) and Liquid Assets/DPK (AL/DPK) ratios reaching 127.07% and 28.73% in 2023, or well above the respective regulatory thresholds of 50% and 10%.

The Indonesian capital market also demonstrated healthy growth, despite facing various challenges stemming from the global economic conditions. This is evidenced by the performance of the Composite Stock Price Index (IHSG), which continued to increase, reaching a level of 7,272.8 on December 29, 2023, representing a 6.16% increase from the position on December 30, 2022. Meanwhile, market capitalization reached IDR11,708.0 trillion in 2023, a 22.86% increase compared to the year-end 2022 position of IDR9,529.86 trillion, and also briefly reached a new record of IDR11,792.0 trillion on December 28, 2023.

Explanation from the Board of Directors on the Development of Bank Aladin Syariah in 2023

Bank Aladin Syariah has achieved a commendable performance throughout the year 2023. Bank Aladin Syariah successfully increased its total assets by 50.6% from IDR4.73 trillion in 2022 to IDR7.13 trillion in 2023. This asset growth was supported by an increase in financing volume, accompanied by continuously improving asset quality. It is noteworthy that Bank Aladin Syariah disbursed financing amounting to IDR3.1 trillion, representing a year-on-year growth of 125.3%.

This financing expansion performance was balanced by Bank Aladin Syariah's ability to maintain asset quality through a disciplined prudent approach. By the end of 2023, the Bank successfully maintained the Non-Performing Financing (NPF) ratio at 0%.

Selain itu, di tengah kondisi likuiditas yang semakin ketat dan perlambatan pertumbuhan DPK di industri, Bank Aladin Syariah berhasil menghimpun DPK sebesar Rp3,2 triliun atau tumbuh 309,6% yoy. Di tahun 2023, Bank juga berhasil meraih *registered user* yang telah menyelesaikan *Know Your Customer* (KYC) mencapai lebih dari 3,1 pengguna atau naik 85% dari 1,7 pengguna di tahun 2022.

Perkembangan ekonomi nasional dan global, perubahan kebijakan oleh regulator, serta semakin tingginya persaingan di industri perbankan merupakan faktor eksternal penting dalam perkembangan bisnis Bank Aladin Syariah. Pencapaian dan perkembangan bisnis Bank juga mempertimbangkan peluang dan tantangan yang hadir dari adaptasi masyarakat ke teknologi dan digital, serta perkembangan literasi keuangan di Indonesia.

Di tahun 2023, Bank terus memperluas jaringan kerjasama mitra dan terus mengoptimalkan fungsi intermediasinya dengan meningkatkan aktivitas penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan penyaluran pembiayaan. Untuk mendorong penghimpunan dana, Bank meluncurkan produk Deposito untuk nasabah ritel segmen menengah atas dan produk tabungan remaja, serta fitur tabungan rencana Ala Impian dengan membuat tema tabungan baru Ala Impian Qurban. Pada sisi pembiayaan, Bank telah menyalurkan pembiayaan produktif berbasis bagi hasil untuk nasabah UMKM dan Korporasi dan pembiayaan kendaraan bermotor untuk nasabah ritel.

Layanan Bank pun terus dilengkapi melalui peluncuran fitur QRIS sebagai metode pembayaran melalui aplikasi *mobile banking* dan *platform Corporate Internet Banking* untuk mempermudah transaksi bagi nasabah korporasi. Layanan tarik setor tunai Bank pun terus diperluas dan telah tersedia di lebih dari 20.000 gerai Alfamart dan Alfamidi di seluruh Indonesia. Pada Triwulan IV 2023, Bank juga telah menghadirkan terobosan baru meluncurkan layanan *Banking as a Service* (BaaS), sebuah layanan dari bank digital dengan pihak ketiga untuk terhubung dengan sistem perbankan secara langsung melalui *Application Programming Interface* (API).

Selanjutnya, di tahun 2024 Bank akan melanjutkan ekspansi bisnis dengan terus melengkapi produk dan layanan Perbankan Syariah yang ditawarkan kepada nasabahnya, baik melalui aplikasi digital Bank atau melalui ekosistem yang dimiliki oleh mitra strategis Bank. Ke depannya, kemitraan yang dimiliki Bank juga akan terus diperluas dan Bank akan terus berupaya menggali potensi pengembangan bisnis melalui ekosistem mitra strategis Bank.

Penjelasan Direksi terkait Strategi dan Kebijakan Strategis Tahun 2023

Penetapan strategi Bank Aladin Syariah mengacu pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah dengan tujuan mendorong pertumbuhan nasional dan meningkatkan kemakmuran negeri. Bank Aladin Syariah kemudian menetapkan Visi, yakni "Menjadi Bank Syariah Terdepan". Bank Aladin Syariah melengkapi visi tersebut dengan menetapkan Misi "Bersama, memperkuat ekosistem keuangan syariah yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat".

Furthermore, amidst tightening liquidity conditions and a slowdown in Third Party Funds growth in the industry, Bank Aladin Syariah successfully gathered TPF amounting to IDR3.2 trillion, marking a growth of 309.6% year-on-year. In 2023, the Bank also achieved a registered user base that had completed Know Your Customer (KYC) processes, reaching over 3.1 million users, an increase of 85% from 1.7 million users in 2022.

The national and global economic developments, regulatory policy changes, and increasing competition in the banking industry are important external factors in Bank Aladin Syariah's business development. The achievements and business developments of the Bank also take into account the opportunities and challenges arising from the adaptation of society to technology and digitalization, as well as the development of financial literacy in Indonesia.

In 2023, the Bank continued to expand its partnership collaboration network, and continued to optimize its intermediary function by increasing activities for Third Party Funding and financing disbursement. To increase Third Party Funding, the Bank launched time deposit for upper middle segment retail customers, and a youth savings product, as well as the Ala Impian savings plan feature by creating a new savings theme Ala Impian Qurban. On the financing side, the Bank has disbursed revenue sharing based productive financing for MSMEs and Corporates, as well as vehicle financing for retail customers.

The Bank's services were complemented with the launch of the QRIS feature as a payment method via the mobile banking application and Corporate Internet Banking platform to make transactions easier for corporate customers. The Bank's cash deposit withdrawal service continues to be expanded and is now available in more than 20,000 Alfamart and Alfamidi outlets throughout Indonesia. In the fourth quarter of 2023, the Bank also introduced a new breakthrough by launching the Banking as a Service (BaaS) service, a digital banking service in collaboration with third parties to directly connect to the banking system through Application Programming Interface (API).

Furthermore, in 2024 the Bank continued its business expansion by further enhancing the Sharia Banking products and services offered to its customers, either through the Bank's digital applications or through the ecosystems owned by the Bank's strategic partners. Moving forward, the Bank's partnerships will also continue to expand, and efforts will be ongoing to explore the potential for business development through the ecosystem of strategic partners of the Bank.

Explanation of the Board of Directors on the Strategy and Strategic Policies for 2023

The strategic direction of Bank Aladin Syariah is aligned with the achievement of the Government's Medium-Term Development Plan, aimed at fostering national growth and enhancing the prosperity of the nation. Bank Aladin Syariah has consequently established its Vision, which is to "Become the Leading Sharia Bank." In complement to this vision, Bank Aladin Syariah has formulated its Mission as "Together, strengthening the Sharia financial ecosystem for the benefit of all segments of society."



Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut Bank Aladin Syariah kemudian menetapkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh, yakni:

- Membangun sinergi melalui kemitraan strategis dengan mitra yang memiliki reputasi baik, jaringan luas, serta basis Nasabah yang kuat guna mendorong aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana;
- Membangun strategi akuisisi pendanaan secara organik maupun melalui ekosistem mitra strategis dan mendorong pertumbuhan CASA;
- Menjalinkan hubungan dengan Nasabah korporasi sebagai salah satu sumber DPK dan sumber akuisisi Nasabah;
- Mendorong pertumbuhan pembiayaan melalui produk eksisting dan produk pembiayaan baru dengan pricing yang tepat dan kompetitif, dengan terus menjaga tingkat pembiayaan bermasalah sesuai target;
- Menjaga kecukupan modal untuk mendukung pertumbuhan Bank dan memenuhi regulasi.

Guna berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan, Bank terus membangun sinergi melalui kemitraan strategis dengan mitra yang memiliki reputasi baik, jaringan luas, serta basis Nasabah yang kuat guna mendorong aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Bank membangun sinergi melalui kemitraan strategis dengan mitra yang memiliki reputasi baik, jaringan luas, serta basis Nasabah yang kuat melalui *payroll* yaitu dengan Alfamart. Tidak hanya itu, Bank juga memperluas layanan Tarik Setor Tunai (“Tarsetun”) ke ekosistem Alfamart termasuk Alfamidi di tahun 2023. Bank juga terus melakukan penyaluran pembiayaan ke ekosistem mitra Alfamart.

Bank juga terus berkolaborasi dengan mitra lainnya yaitu Evermos. Evermos adalah sebuah *e-commerce* yang bertujuan untuk memberikan fasilitas yang membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bersaing dengan bisnis besar. Kemitraan dengan Evermos dilakukan untuk mendorong akuisisi Nasabah Bank Aladin Syariah melalui ekosistem aplikasi Evermos. Selanjutnya Bank akan terus menggali potensi kolaborasi termasuk pembiayaan ke mitra UMKM dan Ultra Mikro untuk mitra pedagang di Evermos. Bank juga telah menjalin kerja sama penyediaan layanan *Banking as a Service* yang diharapkan dapat mendorong penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan, serta pendapatan *fee-based income* dari transaksi yang dilakukan Nasabah.

Bank juga terus berfokus untuk menjaga manajemen likuiditas secara optimal diantaranya dengan mendorong dana murah agar rasio CASA tetap kuat melalui optimalisasi transaksi dan inovasi digital. Dalam mendorong pertumbuhan CASA, Bank menawarkan program-program promosi menarik melalui produk Ala Dompot dan Ala Impian sehingga bank berhasil melakukan strategi akuisisi pendanaan secara organik maupun melalui ekosistem mitra strategis, khususnya menyediakan *payroll* karyawan untuk mitra guna menetapkan langkah strategis ini.

Bank juga terus mendorong pertumbuhan pembiayaan melalui produk eksisting dan produk pembiayaan baru dengan *pricing* yang tepat dan kompetitif, dengan terus menjaga tingkat pembiayaan bermasalah sesuai target. Bank Aladin Syariah melakukan penyaluran pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan pembiayaan *invoice financing* dan *working*

To realize this vision and mission, Bank Aladin Syariah determined the strategic steps to be taken, including:

- Building synergies through strategic partnerships with reputable partners who have good, extensive networks and a strong customer base to encourage Third Party Funding and financing disbursement;
- Developing a strategy for funding acquisition both organically and through strategic partner ecosystems, while driving the growth of Current Account and Savings Account (CASA).
- Establishing relationships with corporate clients as one of the source for deposits and customer acquisition;
- Driving financing growth through existing products and new financing products with appropriate and competitive pricing, while consistently maintaining the target level of non-performing financing.;
- Maintaining capital adequacy to support the bank’s growth and comply with regulations.

With a focus on sustainable growth, the Bank continues to cultivate synergies through strategic partnerships with reputable allies boasting extensive networks and robust customer bases to drive fund and disbursement activities. The Bank fosters synergies through strategic partnerships with allies possessing commendable reputations, expansive networks, and strong customer bases via payroll, notably with Alfamart. Moreover, the Bank has expanded its Cash Deposit and Withdrawal (“Tarsetun”) services to the Alfamart ecosystem, including Alfamidi, in 2023. Furthermore, the Bank consistently disburses financing to the Alfamart partner ecosystem.

The Bank also continues to collaborate with another partner, namely Evermos. Evermos is an *e-commerce* platform aimed at providing facilities to support Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to compete with larger businesses. The partnership with Evermos is established to facilitate the acquisition of customers for Bank Aladin Syariah through the Evermos application ecosystem. Furthermore, the Bank will continue to explore collaboration potential, including financing opportunities for MSME and Ultra Micro partners within the Evermos merchant network. Additionally, the Bank has initiated a partnership for the provision of *Banking as a Service*, aimed at boosting funding and financing disbursement, as well as generating *fee-based income* from customer transactions.

The Bank also remains steadfast in optimizing liquidity management, including the encouragement of low-cost funds to maintain a robust CASA ratio through transaction optimization and digital innovations. To drive CASA growth, the Bank offers attractive promotional programs through Ala Dompot and Ala Impian products, thereby successfully executing organic funding acquisition strategies as well as through strategic partner ecosystems, particularly by providing employee payroll services for partners to solidify this strategic approach.

The Bank also continued to encourage financing growth through existing products and new financing products by using appropriate and competitive pricing, while continuing to maintain the target for non-performing loans. Bank Aladin Syariah distributes financing to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) using *invoice financing* and *working capital*. MSME financing disbursement will be developed

capital. Penyaluran pembiayaan UMKM akan dikembangkan terutama pada ekosistem mitra bisnis Bank. Komposisi dari pendanaan dan pembiayaan Bank akan dijaga di titik optimum agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal untuk Bank secara keseluruhan.

Pasca penawaran umum perdana (IPO) di tahun 2021, Bank telah melakukan Penambahan Modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) yang dilakukan di tahun 2022 sehingga Bank Aladin Syariah memiliki permodalan yang cukup kuat. Bank akan terus berkomitmen untuk menjaga kecukupan modal untuk mendukung pertumbuhan Bank dan memenuhi regulasi.

Penjelasan Terkait Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Bank Aladin Syariah menjunjung tinggi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menyusun dan menerapkan strategi guna memastikan optimalnya hasil berkat keselarasannya dengan kebutuhan dan perkembangan industri serta selaras dengan kompetensi dan potensi pengembangan usaha yang ditetapkan. Perumusan strategi dan kebijakan strategis yang disusun Bank Aladin Syariah senantiasa diselaraskan dengan Visi, Misi dan rencana strategis bank. Direksi secara aktif telah mengkomunikasikan rencana kerja kepada Pemegang saham dan seluruh jajaran bank.

Penyusunan strategi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilannya mengacu pada daya saing bank, dilengkapi tahapan pelaksanaannya. Dalam menyusun target Bank dilakukan secara *bottom up*. Dimana setiap direktorat yang dimiliki Bank Aladin Syariah ditugaskan untuk menyusun target dan strategi pencapaian target baik untuk satu tahun ke depan maupun untuk jangka panjang. Rencana target dan strategi pencapaian target tersebut kemudian dilaporkan kepada Direksi untuk bersama-sama dilakukan *reviu*.

Setelah itu diadakan pertemuan, yang bertujuan untuk memetakan tantangan dan peluang yang ada, kemudian mencanangkan target dan arah strategi ke depan, kemudian diselaraskan dengan target dan strategi yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank Aladin Syariah. Setelah target tersusun, Direksi menentukan visi-misi ke depan yang relevan dengan target, strategi, dan perkembangan bisnis Bank.

Direksi bersama Dewan Komisaris juga mempertimbangkan kondisi eksternal yang harus diatasi, sehingga strategi tetap dapat dijalankan dengan hasil optimal, dan menuangkannya dalam Rencana Bisnis Bank maupun secara spesifik dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Direksi telah menyusun RBB dan RAKB secara realistis, komprehensif, dan terukur untuk dilaksanakan dan dievaluasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan. Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan asumsi eksternal dan internal serta kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Bank yang berkelanjutan.

primarily within the Bank's business partnership ecosystem. The Bank's funding and financing composition will be maintained at an optimum point in order to produce maximum performance for the Bank as a whole.

Following the Initial Public Offering (IPO) in 2021, the Bank has undertaken Additional Capital increases through Rights Issues (PMHMETD) and Additional Capital increases without Preemptive Rights (PMTHMETD) conducted in 2022, thereby ensuring that Bank Aladin Syariah possesses a sufficiently robust capital base. The Bank remains committed to maintaining adequate capital to support its growth and comply with regulatory requirements.

Explanation on the Role of the Board of Directors in Formulating Strategy and Strategic Policy

Bank Aladin Syariah upholds the application of Good Corporate Governance (GCG) principles when formulating and instigating strategies to ensure optimal results thanks to its alignment with industry needs and developments, and in line with established competencies and potential business development. The strategies and strategic policies prepared by Bank Aladin Syariah are always aligned with the Bank's Vision, Mission and strategic plans. The Board of Directors actively communicates the work plans to shareholders and all levels of the Bank.

The formulation of these strategies is conducted by considering both the driving factors and the obstacles to success, with reference to the bank's competitiveness, and complemented by the stages of its execution. In setting the bank's targets, a bottom-up approach is employed. Each directorate within Bank Aladin Syariah is tasked with setting targets and strategies for achieving these targets, both for the upcoming year and for the long term. The plans for targets and strategies to achieve them are then reported to the Board of Directors for a collaborative review process.

Following this, a meeting is held with the aim of mapping out the challenges and opportunities, then setting targets and future strategic directions. These are then aligned with the targets and strategies outlined in the Business Plan of Bank Aladin Syariah. Once the targets are established, the Board of Directors determines future visions and missions relevant to the targets, strategies, and business developments of the bank.

The Board of Directors together with the Board of Commissioners also considers external conditions that must be addressed, so that the strategies can still be implemented with optimal results, and this is included in the Bank's Business Plan, and specifically in the Sustainable Financial Action Plan (SFAP). The Board of Directors has prepared the RBB and SFAP in a realistic, comprehensive and measurable manner to be implemented and evaluated by taking into account the prudential principle, and the responsiveness to change. This is done while considering both external and internal assumptions and the interests of shareholders and other stakeholders, aiming to maintain and enhance sustainable Bank performance.



Direksi juga telah mengkomunikasikan RBB dan RAKB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank melalui forum dan rapat-rapat yang diadakan secara reguler. Dalam melakukan perumusan strategi dan kebijakan strategi bank, diawasi oleh Dewan Komisaris dan tetap mematuhi prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Dengan arahan Dewan Komisaris serta memperhatikan prinsip-prinsip syariah dari Dewan Pengawas Syariah, Direksi memastikan implementasi strategi Bank yang telah ditetapkan di RBB dan RAKB berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan melalui forum-forum koordinasi seperti rapat rutin dan rapat komite dibawah Direksi. Direksi kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh program dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam RBB maupun RAKB bersama-sama seluruh jajaran dibawahnya dan mendelegasikan kewenangan untuk mengeksekusi tiap program sesuai tugas dan wewenang yang digariskan.

Direksi memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan strategi dilaksanakan sesuai rencana. Direksi melakukan pemantauan terhadap kinerja serta pelaksanaan rencana bisnis dengan proses evaluasi, dan jika diperlukan dilakukan penyesuaian terhadap strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk beradaptasi selaras dengan dinamika pasar dan industri.

Sementara, untuk memastikan implementasi dari kebijakan strategis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris tersebut, telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka target-target yang diberikan kepada Manajemen maupun setiap direktorat dituangkan ke dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Manajemen maupun masing-masing Direktorat. Direksi memiliki peran yang sangat strategik dalam memastikan kebijakan strategi Bank yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan sesuai rencana. Salah satunya adalah melalui rapat koordinasi dan evaluasi yang dilakukan secara berkala bersama dengan tiap direktorat untuk memastikan bahwa implementasi strategi yang telah dilakukan, sesuai dengan arah kebijakan Bank dan tercapainya berbagai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penjelasan Direksi terkait Kinerja Bank Aladin Syariah Tahun 2023

Kinerja Keuangan

Berdasarkan seluruh strategi dan kebijakan yang telah ditempuh di sepanjang tahun 2023, Bank Aladin Syariah menunjukkan kinerja yang dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan berkelanjutan. Dimana Bank Aladin Syariah berhasil membukukan pembiayaan lebih dari Rp3,1 triliun pada posisi akhir tahun 2023. Pembiayaan ini naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan posisi pembiayaan di akhir tahun 2022 sebesar Rp1,4 triliun. Secara total *disbursement*, Bank telah menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp8,6 triliun selama tahun 2023. Sedangkan dari sisi penghimpunan dana, Bank berhasil memperoleh

The Board of Directors has also communicated the Bank's Business Plan and SFAP to the shareholders of the Bank and all levels of the organization through forums and regular meetings. In formulating the bank's strategies and strategic policies, oversight is provided by the Board of Commissioners, while adherence to Sharia principles is ensured by the Sharia Supervisory Board.

The Process Undertaken by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation

Under the guidance of the Board of Commissioners and in consideration of the Sharia principles outlined by the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors ensures the implementation of the Bank's strategies as set forth in the Bank Business Plan (RBB) and the Sustainable Financial Action Plan (SFAP). This is achieved through coordination forums such as regular meetings and committee meetings under the purview of the Board of Directors. The Board of Directors then coordinates the implementation of all programs and work plans outlined in the RBB and SFAP with all levels of the organization, delegating authority to execute each program according to the designated tasks and authorities delineated.

The Board of Directors plays a highly strategic role in ensuring the strategy is implemented according to plan. The Board of Directors monitors the performance and implementation of the business plans through an evaluation process, and if necessary, adjustments are made to the strategies and policies to adapt in line with market and industry dynamics.

Meanwhile, to ensure that the implementation of the strategic policies approved by the Board of Commissioners aligns with what has been established, targets assigned to management and each directorate are translated into Key Performance Indicators (KPIs) for both management and each directorate. The Board of Directors plays a highly strategic role in ensuring that the strategic policies of the Bank that have been established are executed according to plan. One of the ways this is achieved is through regular coordination and evaluation meetings held with each directorate to ensure that the implementation of strategies aligns with the Bank's policy direction and the achievement of various pre-established targets.

Explanation from the Board of Directors regarding the Performance of Bank Aladin Syariah in 2023

Financial Performance

Based on all the strategies and policies pursued throughout the year 2023, Bank Aladin Syariah has demonstrated performance that can serve as a foundation for sustainable growth. Bank Aladin Syariah successfully recorded financing disbursement of more than IDR3.1 trillion at the end of 2023. This financing disbursement represents an increase of more than double compared to the financing disbursement position at the end of 2022, which stood at IDR1.4 trillion. In terms of total disbursements, the Bank has disbursed financing of more than IDR8.6 trillion during 2023. As for Third Party Funding, the Bank

lebih dari Rp3,3 triliun per akhir Desember 2023. Dengan pencapaian penyaluran dan penghimpunan dana, Bank dapat menjaga rasio FDR di level 95,31%.

Sejalan dengan perkembangan bisnis Bank di tahun 2023, pendapatan dari penyaluran dana ke pembiayaan dan surat berharga menunjukkan pertumbuhan yang baik mencapai lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Dari sisi rentabilitas, meskipun masih membukukan kerugian di tahun 2023, namun hal ini masih sesuai dengan proyeksi di dalam Rencana Bisnis Bank mengingat Bank masih dalam tahap awal pertumbuhan bisnisnya. Hal ini didukung pula oleh pengendalian biaya yang efisien.

Secara umum, realisasi tahun 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya lebih baik dikarenakan fungsi intermediasi bank sudah berjalan dimana penghimpunan DPK dari nasabah ritel, UMKM, dan korporasi sudah dimulai dan penyaluran pembiayaan sudah berjalan.

Kinerja Non Keuangan Operasional

Pencapaian kinerja finansial Bank Aladin Syariah di sepanjang tahun 2023, tentunya juga didukung oleh transformasi pada aspek-aspek *human capital*, inovasi produk, dan pengembangan teknologi informasi. Sementara dari sisi operasional, Bank mencatatkan pencapaian yang cukup membanggakan dan bisa menjadi fondasi pertumbuhan kinerja ke depan. Di mana pada tahun 2023 Bank telah meluncurkan produk Deposito untuk nasabah ritel segmen menengah atas dan produk tabungan remaja, serta fitur tabungan rencana Ala Impian dengan membuat tema tabungan baru Ala Impian Qurban. Pada sisi pembiayaan, Bank telah menyalurkan pembiayaan produktif berbasis bagi hasil untuk nasabah UMKM dan Korporasi dan pembiayaan kendaraan bermotor untuk nasabah ritel. Layanan Bank pun terus dilengkapi melalui peluncuran fitur QRIS sebagai metode pembayaran melalui aplikasi *mobile banking* dan *platform Corporate Internet Banking* untuk mempermudah transaksi bagi nasabah korporasi. Layanan tarik setor tunai Bank pun terus diperluas dan telah tersedia di lebih dari 20.000 gerai Alfamart dan Alfamidi di seluruh Indonesia. Pada Triwulan IV 2023, Bank juga telah meluncurkan layanan *Banking as a Service* (BaaS) sebagai terobosan baru guna mendukung layanan perbankan bersama mitra.

Sementara itu, guna meningkatkan kualitas layanan serta mendukung kegiatan bisnis, secara berkelanjutan Bank terus melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Bank juga melanjutkan pengembangan terhadap produk dan fitur aplikasi, seperti akun transaksional (Ala Dompot), *goal savings account* (Ala Impian), Ziswaf (Ala Berbagi), dan *bill payment*. Dari sisi kerja sama kemitraan, Bank pun terus memperdalam kolaborasi bersama Alfamart dan ekosistemnya. Diantaranya dengan telah diluncurkannya layanan Taretun di seluruh gerai Alfamidi di bulan April 2023 sehingga saat ini layanan Taretun Bank telah tersedia di seluruh gerai Alfamart dan Alfamidi di Indonesia.

Selain itu, di tahun 2023 Bank juga telah memulai kerja sama rekening *payroll* karyawan Alfamart dan ekosistemnya. Kerja sama Bank dengan ekosistem Alfamart juga meliputi penyediaan layanan BaaS pada aplikasi Alfagift yang mulai tersedia di bulan November 2023. Kerja

successfully obtained more than IDR3.3 trillion by the end of December 2023. With these achievements in financing disbursement and Third Party Funding, the Bank has maintained its Financing to Deposit Ratio (FDR) at the level of 95.31%.

In line with the Bank's business development in 2023, income from disbursement to financing and securities showed significant growth, reaching more than three times that of the previous year. In terms of profitability, although the Bank still recorded losses in 2023, this is in line with projections outlined in the Bank's Business Plan, considering the Bank's early stage of business growth. This is further supported by efficient cost control measures.

Overall, the performance in 2023 compared to the previous year is better due to the functioning of the bank's intermediary role, where funding from retail customers, MSMEs, and corporations has commenced, and financing disbursement is underway.

Non-Financial Performance Operational

The financial performance achievements of Bank Aladin Syariah throughout 2023 are certainly supported by transformations in human capital aspects, product innovation, and information technology development. From an operational perspective, the Bank has recorded quite commendable achievements, laying a foundation for future performance growth. In 2023, the Bank launched deposit products for retail customers in the upper-middle segment and youth savings products, as well as the Ala Impian savings plan feature with the introduction of a new Ala Impian Qurban savings theme. On the financing side, the Bank has disbursed productive revenue-sharing-based financing for MSME and Corporate customers, as well as vehicle financing for retail customers. Banking services have also been enhanced through the launch of QRIS features as a payment method via mobile banking applications and the Corporate Internet Banking platform to facilitate transactions for corporate customers. Cash withdrawal and deposit services have also been expanded and are now available at more than 20,000 Alfamart and Alfamidi outlets across Indonesia. In the fourth quarter of 2023, the Bank also launched Banking as a Service (BaaS) as a new breakthrough to support banking services with partners.

While to improve service quality and support business activities, the Bank continued to develop its information technology infrastructure on an ongoing basis. The Bank also continued to develop products and application features, such as transactional accounts (Ala Dompot), goal savings accounts (Ala Impian), Ziswaf (Ala Berbagi), and bill payments. In terms of partnership cooperation, the Bank continued to deepen its collaboration with Alfamart and its ecosystem. Among these achievements is the launch of the Taretun service in all Alfamidi outlets in April 2023, thus making the Bank's Taretun service available in all Alfamart and Alfamidi outlets across Indonesia.

In 2023 the Bank also started collaborating on Alfamart employee payroll accounts and its ecosystem. The Bank's collaboration with the Alfamart ecosystem also included providing BaaS services in the Alfagift application, which became available in November 2023. Collaboration

sama dengan mitra lain seperti Evermos, PERSIB, Persis Solo dan lainnya pun juga terus diperdalam guna memastikan layanan Bank Aladin Syariah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pencapaian Produk

Di tahun 2023, Bank telah berhasil meraih lebih dari 3,1 juta pengguna. Nasabah bank berasal dari seluruh provinsi di Indonesia dengan konsentrasi pengguna di daerah dengan populasi Muslim tertinggi di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Banten.

Sementara itu, fokus bank dalam membangun produk perbankan digital syariah dengan berbasis pada kebutuhan dan kepuasan konsumen. Bank Aladin Syariah membangun produk yang lebih unggul dari standar industri baik dari segi perbankan maupun sisi teknologi, terutama dari segi *customer satisfaction*. Prinsip Bank Aladin Syariah dalam mengembangkan produk adalah untuk memberikan dampak kepada segmen *underbanked* dan *unbanked* nasabah melalui produk yang memberikan kemudahan dalam registrasi. Di mana registrasi dapat berjalan di ponsel yang memiliki spesifikasi memori dan kualitas internet yang rendah. Inilah salah satu bentuk komitmen Bank Aladin Syariah yang senantiasa ingin memberikan kemudahan bagi para nasabah.

Adapun sampai dengan akhir tahun 2023, aplikasi Bank Aladin Syariah telah diunduh sebanyak lebih dari 5,2 juta kali. Jumlah instalasi aplikasi ini terus meningkat dari waktu ke waktu sepanjang tahun 2023. Sementara jumlah pengguna yang teregistrasi sampai dengan akhir Desember 2022 mencapai 3,1 Juta orang.

Selain itu, Bank Aladin Syariah telah meluncurkan fitur QRIS untuk memudahkan proses transaksi dengan QR *code* agar lebih cepat dan terjaga keamanannya. Diharapkan fitur QRIS ini dapat mempermudah transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai serta transaksi yang aman. Bank juga telah meluncurkan layanan *Banking as a Service* (BaaS) yang merupakan sarana Bank untuk dapat meningkatkan fungsi intermedierinya.

Human Capital

Untuk meningkatkan produktivitas pekerja, Bank senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi. Bank Aladin Syariah menyadari bahwa keberlanjutan usaha Bank, sangat ditentukan dengan pengelolaan dan pengembangan *Human Capital* (HC) yang unggul dan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan lingkungan bisnis. Terlebih di era digitalisasi seperti sekarang ini, Bank membutuhkan sumber daya manusia yang andal dan berkompeten di bidangnya untuk menunjang perkembangan dan keberlanjutan usaha. Pengelolaan dan pengembangan HC yang tepat dan berkesinambungan, terus dilakukan Bank Aladin Syariah dalam mengembangkan talenta yang berkualitas dan berkompeten agar tetap adaptif terhadap setiap perubahan lingkungan bisnis.

Untuk itu, Bank Aladin Syariah melalui *Human Capital* telah menetapkan program strategis pengelolaan dan pengembangan SDI di tahun 2023, di antaranya adalah:

with other partners such as Evermos, PERSIB, Persis Solo and others also continued to be deepened to ensure that Bank Aladin Syariah's services could reach all levels of society.

Product Achievement

In 2023, the Bank reached more than 3.1 million users from all provinces in Indonesia with a concentration of users in areas with the highest Muslim populations in Indonesia, namely West Java, East Java, Central Java, DKI Jakarta and Banten.

Meanwhile, the bank's focus on building Shariah digital banking products is based on consumer needs and satisfaction. Bank Aladin Syariah is developing products that exceed industry standards both in banking and technology, particularly in terms of customer satisfaction. The principle of Bank Aladin Syariah in developing products is to have an impact on the underbanked and unbanked segments of customers through products that make registration easy. Registration can take place on mobile phones with low memory and internet quality specifications. This is one of Bank Aladin Syariah's commitments to always provide convenience for customers.

As for the end of 2023, the Bank Aladin Syariah application had been downloaded more than 5.2 million times. The number of installations of this application continued to increase over time throughout 2023. This compares to the number of registered users as of the end of December 2022 of 3.1 million people.

Bank Aladin Syariah has also launched a QRIS feature to facilitate the transaction process using QR codes to make it faster and more secure. It is hoped that this QRIS feature will make payment transactions easier without the need to carry cash and ensures safer transactions. The Bank has also launched Banking as a Service (BaaS) for the Bank to enhance its intermediary function.

Human Capital

To increase employee productivity, the Bank is committed to increasing competencies through competency development programs. Bank Aladin Syariah understands that the sustainability of the Bank's business is largely determined by the management and development of superior and quality Human Capital (HC), in line with the needs and development of the business environment. Especially in the current digitalization era, the Bank needs HC who are reliable and competent in their fields to support business development and sustainability. Bank Aladin Syariah continues to pursue proper and sustainable management and development of Human Capital (HC) to cultivate high-quality and competent talents, ensuring adaptability to any changes in the business environment.

For this reason, Bank Aladin Syariah through Human Capital established a strategic program for managing and developing HC in 2023, including:

- **Mandatory Training:** Seluruh *training* atau program pelatihan yang bersifat wajib, termasuk program sertifikasi yang dibutuhkan oleh karyawan dalam pengembangan kompetensinya.
- **Nonmandatory Training:** Seluruh *training* atau program pelatihan yang bersifat tidak wajib, yang terbagi menjadi dua tipe, yaitu *related to job* maupun *non related to job*. Kedua tipe ini diinisiasi oleh karyawan. Hal ini mencakup tapi tidak terbatas pada *Technical Training* yang bersifat *non mandatory*, *Soft Skill Training* yang bersifat *non mandatory*, Pelatihan External, dan *Personal Development*.

Penjelasan Direksi terkait Kendala yang Dihadapi di Tahun 2023

Tantangan terbesar bagi Bank khususnya dan perbankan nasional pada umumnya muncul dari faktor eksternal, khususnya perekonomian global yang berimbas pada kondisi perekonomian nasional. Tingkat persaingan di industri digital cukup tinggi karena semakin banyak bank berinvestasi pada pengembangan teknologi digital. Pesatnya perkembangan teknologi memang telah mengubah perilaku dan pola transaksi nasabah menjadi serba digital. Geliat transformasi digital salah satunya dipicu oleh pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) yang melanda Tanah Air pada awal 2020 lalu.

Ketika pembatasan sosial berskala besar dilakukan, seluruh kegiatan perbankan nasabah dipaksa beralih ke kanal digital. Kebiasaan ini pun terus berlanjut, bahkan makin menguat. Alhasil, nasabah makin memiliki preferensi untuk tidak datang langsung ke kantor cabang perbankan. Hal ini menyebabkan bergesernya fokus bank mengikuti kebiasaan baru nasabah. *Timing go-to-market* dan eksekusi merupakan kunci sukses utama dalam meraih pangsa pasar.

Likuiditas yang ketat menyebabkan tingkat persaingan di industri perbankan cukup tinggi terutama dalam penawaran imbal hasil kepada nasabah. Atas hal tersebut, Bank juga memberikan bagi hasil yang kompetitif melalui produk-produk Ala Impian dan Ala Deposito kepada nasabahnya.

Maraknya perusahaan rintisan dan Fintech yang model bisnisnya menyerupai bank menambah sengit iklim persaingan. Sederhananya, fintech adalah sebuah layanan yang bergerak di bidang jasa keuangan berbasis teknologi di mana setiap tahunnya ada saja lembaga pembiayaan baru yang bermunculan guna membantu memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat yang membuat persaingan semakin kompetitif.

Sementara itu, bank menghadapi tantangan dalam sisi pengembangan produk, dimana pangsa pasar bank yang kebanyakan segmen *underbanked* dan *unbanked* yang wawasan penggunaan gawai masih minim sehingga bank harus berusaha menghasilkan fitur yang sederhana namun tetap dengan fungsi yang maksimal. Bank juga harus tetap menghasilkan fitur yang mendukung nasabah ritel, termasuk pengembangan produk pembiayaan yang lebih beragam baik untuk para nasabah.

Direksi meyakini, seluruh strategi dan inovasi yang terus dilakukan dapat menjawab tantangan dan mewujudkan visi Bank "Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan", dengan menerapkan solusi yang tepat. Di mana sebagai Bank Digital Syariah pertama di Indonesia, Bank

- **Mandatory Training:** All mandatory training or training programs, including certification programs required by employees to develop their competencies.
- **Nonmandatory Training:** All training or training programs that are not mandatory, divided into two types, related to job and non-related to job. Both types can be initiated by employees. This includes but is not limited to non-mandatory Technical Training, non-mandatory Soft Skill Training, External Training, and Personal Development.

Explanation of the Board of Directors regarding the Obstacles Faced in 2023

The biggest challenges for banks, and in particular and national banking, arise from external factors, especially the global economy that can impact the national economic conditions. The level of competition in the digital industry is quite high as more and more banks are investing in developing digital technology. The rapid development of technology has changed customer behavior and transaction patterns to become completely digital. One of the reasons for digital transformation was the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic that hit the country in early 2020.

When large-scale social restrictions were implemented, all banking customers were forced to switch to digital channels. This habit now continues, and is even getting stronger. As a result, customers increasingly have a preference not to come directly to bank branches. This has caused the Bank to shift its focus to follow new customer habits. *Go-to-market timing* and *execution* are the keys to success in gaining market share.

Tight liquidity resulted in high levels of competition in the banking industry, especially in offering competitive returns to customers. Consequently, the Bank also provided competitive profit-sharing through its Ala Impian and Ala Deposito products to its customers.

The rise of startups and Fintech companies whose business models resemble banks adds to the fierce competitive climate. Simply put, fintech is a service that operates in the field of technology-based financial services where every year new financing institutions emerge to help meet the funding needs of the community which makes competition even more competitive.

Banks face challenges in terms of product development, where banks' market share is mostly in the underbanked and unbanked segments where insight into the use of devices is still minimal, so banks must try to produce features that are simple but still have maximum functionality. Banks must also continue to produce features that support retail customers, including developing more diverse financing products for customers.

The Board of Directors firmly believes that all the strategies and innovations being pursued can address challenges and realize the Bank's vision of "Becoming the Leading Digital Sharia Bank," by implementing appropriate solutions. As the first Digital Sharia Bank in Indonesia, Bank Aladin Syariah continually strives to provide banking products with



Aladin Syariah senantiasa berusaha untuk menyediakan produk-produk perbankan dengan fitur syariah yang sesuai dengan kebutuhan nasabah atau masyarakat. Di samping itu, selain memperkuat kerjasama dengan Alfamart dan Alfamidi yang memiliki lebih dari 20.000 gerai di seluruh Indonesia, Bank juga telah menjalin kemitraan strategis melalui layanan *Banking as a Service* dengan Alfagift dan Evermos untuk terus bersaing di pasar perbankan Indonesia. Bank juga terus bekerjasama dengan Persib dan Persis Solo, untuk mendorong akuisisi nasabah. Kebijakan-kebijakan tersebut, menjadi salah satu langkah strategis Bank yang dapat menjawab tantangan di tahun 2023.

Gambaran Direksi tentang Prospek Usaha Bank Aladin Syariah

Perekonomian global pada tahun 2024 masih akan dibayangi dengan berbagai tantangan dan ketidakpastian. IMF memperkirakan ekonomi global akan melemah di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Menurut IMF, perekonomian global di 2024 akan tumbuh sebesar 2,9% dengan proyeksi pertumbuhan di 2023 yang sebesar 3,0%.

Pertumbuhan ekonomi global ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya laju ekonomi Tiongkok yang cenderung melambat karena dipengaruhi pelemahan dari konsumsi dan mengalami krisis pada sektor propertinya. Kondisi ini dapat berdampak pada perlambatan kinerja ekspor Indonesia, mengingat Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Selain itu, konflik Israel dan Hamas pada semester kedua 2023, maupun perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan meningkatkan tekanan terhadap perekonomian global. Risiko geopolitik tersebut berpotensi mengganggu laju perekonomian dunia apabila berlangsung terus menerus, serta rentan memicu kenaikan harga-harga energi dan pangan dunia yang memicu peningkatan inflasi.

Di sisi lain, suku bunga acuan global yang mengalami peningkatan di sepanjang 2023 diprediksi akan mulai mengalami penurunan pada tahun 2024, yang diharapkan juga diikuti dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap Perekonomian Indonesia, terutama pada peningkatan permintaan atas kredit perbankan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi, perekonomian Indonesia tetap menjadi salah satu yang *resilient*. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 berada di kisaran 4,7%-5,5% yang didukung oleh kebijakan moneter yang akomodatif terhadap stabilitas dan pertumbuhan. Pada 2024, kinerja konsumsi, baik swasta maupun Pemerintah, dan investasi diperkirakan terus meningkat sejalan dengan pola konsumsi masyarakat yang tetap kuat, dampak positif pelaksanaan Pemilu, serta keberlanjutan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dengan masih terjaganya stabilitas perekonomian domestik, peningkatan peran intermediasi perbankan juga diperkirakan akan terus berlanjut. Penyaluran kredit masih akan melanjutkan tren positif pada sektor yang *resilient*. DPK industri perbankan juga diperkirakan masih dapat tumbuh sehat sehingga likuiditas perbankan dapat terjaga di rasio yang memadai.

Sharia features that meet the needs of customers or the community. Additionally, besides strengthening cooperation with Alfamart and Alfamidi, which have over 20,000 outlets across Indonesia, the Bank has also forged strategic partnerships through Banking as a Service with Alfagift and Evermos to remain competitive in the Indonesian banking market. The Bank also continues to collaborate with Persib and Persis Solo to drive customer acquisition. These policies represent one of the Bank's strategic steps in addressing challenges in 2023.

Board of Directors' overview of Bank Aladin Syariah's Business Prospects

The global economy in 2024 will still be shadowed by many challenges and uncertainties. The IMF estimates that the global economy will weaken in 2024 compared to 2023. According to the IMF, the global economy in 2024 will grow by 2.9% following projected growth in 2023 of 3.0%.

This global economic growth is influenced by several matters, including the pace of the Chinese economy that has slowed down due to it is weakening consumption, and it is experiencing a crisis in its property sector. This condition could have an impact on slowing Indonesia's export performance, considering that China is one of Indonesia's main trading partners. In addition, the conflict between Israel and Hamas that started in the second half of 2023, and the prolonged Russia-Ukraine war are putting increasing pressure on the global economy. These geopolitical risks have the potential to disrupt the pace of the world economy if they continue, and could trigger increases in world energy and food prices, which will increase inflation.

On the other side, the global benchmark interest rate, which increased throughout 2023, is predicted to start decreasing in 2024, which is also expected to be followed by a reduction in Bank Indonesia's benchmark interest rate. This will certainly have a positive impact on the Indonesian economy, especially in increasing demand for bank loans.

Despite the global economic uncertainty, the Indonesian economy remains resilient. Bank Indonesia estimates that Indonesia's economic growth in 2024 will be in the range of 4.7%-5.5%, supported by monetary policies that are focused towards stability and growth. For 2024, consumption performance, both private and Government, and investments are expected to continue to increase in line with people's strong consumption patterns, a positive impact of the election, and the sustainability of the National Strategic Project (PSN) development.

With maintained domestic economic stability, the increasing role of banking intermediation is also expected to continue. Loan disbursement will continue its positive trend in resilient sectors. It is also estimated that the banking industry's TPF will continue to grow healthily so that banking liquidity can be maintained at an adequate ratio.

Melihat hal tersebut Bank Aladin Syariah optimis kinerja di 2024 akan terus tumbuh secara berkelanjutan. Kebijakan Bank Aladin Syariah mengarah pada layanan perbankan *omnichannel* yang mengedepankan inovasi teknologi perbankan syariah melalui *digital banking* serta berkomitmen untuk menciptakan layanan perbankan syariah yang terpercaya dan inklusif melalui kemitraan. Pengembangan bisnis Bank ke depannya akan menasar segmen ritel, UMKM dan Korporasi.

Melalui aplikasi perbankan berbasis digital, Bank Aladin Syariah telah menawarkan produk penghimpunan dana dan layanan untuk Nasabah dari segmen ritel. Di tahun 2024, Bank rencananya akan terus mengembangkan produk dan layanan yang ditawarkan sebagai solusi keuangan untuk Nasabah, baik melalui kanal digital yang dimiliki oleh Bank maupun secara langsung (*offline*). Komposisi dari pendanaan dan pembiayaan Bank akan dijaga di titik optimum agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal untuk Bank secara keseluruhan. Untuk mendukung hal tersebut, di tahun 2024 Bank akan berfokus pada penghimpunan dana Nasabah ritel, UMKM dan korporasi dengan menitikberatkan akuisisi dan peningkatan kualitas rekening untuk produk CASA terutama di segmen ritel.

Selain itu, Bank akan meningkatkan kualitas Nasabah pendanaan guna mendorong peningkatan saldo di rekening Nasabah melalui program-program yang berfokus pada retensi nasabah, serta melengkapi jenis layanan pada aplikasi mobile banking Bank untuk membuat Nasabah lebih aktif bertransaksi. Bank juga akan terus mengoptimalkan pendapatan dari pembiayaan dengan mendorong pertumbuhan pembiayaan dari produk eksisting dan produk baru dengan berfokus pada penyaluran berbasis kerja sama dengan mitra dan ke dalam ekosistem mitra Bank.

Tidak hanya itu, Bank Aladin Syariah juga akan terus melakukan pengembangan akses layanan perbankan berbasis teknologi baik melalui kemitraan maupun secara langsung kepada Nasabah sehingga dapat memberikan proses transaksi yang aman, efektif dan efisien. Dengan meningkatkan konektivitas mitra and perluasan fitur-fitur aplikasinya, termasuk melengkapi jenis produk dan fitur yang ditawarkan melalui aplikasi mobile banking Bank terutama untuk nasabah ritel. Bank Aladin Syariah siap menjadi bank yang dekat dengan keseharian masyarakat.

Penjelasan Direksi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI)

Pengelolaan Pengembangan Teknologi Informasi

Direksi menyadari bahwa penerapan teknologi informasi (TI) yang optimal dapat membuat Bank menjadi lebih produktif, kompetitif, dan beradaptasi dengan perubahan serta tantangan dari perkembangan bisnis, sehingga membawa Bank dalam mencapai percepatan pertumbuhan bisnis. Pengembangan Teknologi Informasi (TI) dilakukan sebagai langkah berkelanjutan dari pengembangan infrastruktur dasar yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Tema pengembangan TI akan mencakup aspek yang lebih luas dari sebelumnya yang ditujukan agar teknologi bisa mendukung pertumbuhan secara komprehensif dari berbagai unit di dalam Perseroan baik untuk kebutuhan pengembangan bisnis maupun kegiatan operasional.

Considering these factors, Bank Aladin Syariah is optimistic that its performance will continue to grow sustainably in 2024. The bank's policies are directed towards omnichannel banking services that prioritize innovative Sharia banking technology through digital banking. Additionally, it is committed to creating trustworthy and inclusive Sharia banking services through partnerships. The future business development of the bank will target retail, MSME, and corporate segments.

Through its digital-based banking applications, Bank Aladin Syariah will offer funding products and services for customers in the retail segment. In 2024, the Bank plans to continue developing products and services as financial solutions for customers, through digital channels owned by the Bank and directly (*offline*). The Bank's funding and financing composition will be maintained at an optimum point in order to deliver a maximum performance for the Bank. To support this, in 2024 the Bank will focus on collecting funds from retail, MSME and corporate customers by emphasizing acquisition and improving account quality for CASA products, especially in the retail segment.

Also, the Bank will improve the quality of its customer funding to encourage an increase in balances in customer accounts through programs that focus on customer retention, as well as by complementing the types of services on the Bank's mobile banking application to make customers more active in performing transactions. The Bank will also continue to optimize revenue from financing by encouraging a growth in financing from existing and new products by focusing on disbursement based on collaboration with partners and the Bank's partner ecosystem.

Bank Aladin Syariah will also continue to develop access to technology-based banking services through partnerships and directly to customers so that it can provide a safe, effective and efficient transaction process. By increasing partner connectivity and expanding application features, including completing the types of products and features offered through the Bank's mobile banking application, especially for retail customers. Bank Aladin Syariah is ready to become a bank that is closely integrated with the daily lives of the community.

Board of Directors' explanation on Human Capital (HC) and Information Technology (IT)

Management of Information Technology Development

The Board of Directors understands that optimal application of information technology (IT) can make the Bank more productive, competitive and adaptive to changes and challenges in business development, thus helping the Bank achieve accelerated business growth. Information Technology (IT) development is carried out as a continuous step from the development of basic infrastructure carried out in the previous period. The IT development theme will cover broader aspects than before, aimed at ensuring that technology can comprehensively support the growth of various units within the Company, both for business development needs and operational activities.



Antara lain hal ini akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pengembangan aplikasi mobile banking dengan penambahan berbagai fitur seperti pembukaan produk tabungan dan deposito yang lebih beragam, transfer dana melalui BI-Fast, pembayaran tagihan dan pembelian, penjadwalan transaksi, tarik-setor tunai, donasi, zakat, dan berbagai layanan Nasabah lainnya
2. Melanjutkan pengembangan Open API dan pengembangan aspek teknis lainnya untuk kemudahan interkoneksi dengan berbagai mitra sehingga layanan bisa digunakan oleh ekosistem yang lebih luas (BaaS - *Banking as a Service*)
3. Melanjutkan pengembangan *Corporate Internet Banking* untuk melayani Nasabah korporasi dalam kegiatan transaksi dasar penggajian dan pembayaran, sekaligus menjadikan kanal untuk pengelolaan ekosistem dengan mitra
4. Melanjutkan pengembangan aplikasi untuk mendukung aktivitas pembiayaan dengan berbagai akad yang lebih bervariasi serta integrasinya dengan berbagai *channel* yang digunakan oleh Nasabah
5. Melanjutkan program yang mampu meningkatkan keterlibatan Nasabah sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih personal dan menyeluruh
6. Melanjutkan pengembangan sistem loyalty sehingga bisa meningkatkan konversi dan retensi Nasabah serta kemampuan *up-selling* dan *cross-selling*
7. Melanjutkan pengembangan terkait pengamanan informasi serta ketahanan *cyber* dalam bentuk pengamanan akses terhadap data dan aplikasi melalui jaringan internal maupun eksternal
8. Melanjutkan penguatan infrastruktur Devops untuk mendukung kegiatan pengembangan dan operasional melalui pemindahan Data Center/Disaster Recovery Center serta aksesibilitasnya
9. Melanjutkan pengembangan kemampuan untuk penanganan anti-money laundering dan anti-fraud untuk mengantisipasi ekspansi channel, Nasabah dan produk yang terus berkembang
10. Melanjutkan pengembangan sistem aplikasi lainnya untuk mendukung kegiatan operasional dan management internal terkait layanan *call center* dan *back-office*, kepegawaian, pembelanjaan, rekon, pelaporan dan lain sebagainya.

Melalui pengembangan teknologi informasi yang dilakukan Bank, Direksi berharap terwujudnya pertumbuhan usaha yang lebih baik dan berkesinambungan, sehingga Bank lebih mudah dalam melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja. Adanya TI meningkatkan kualitas SDI karena unit sistem kerja terkoordinasi dengan sistematis, selanjutnya juga meningkatkan produktivitas dan mendukung layanan operasional. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi di Bank Aladin Syariah juga telah diselaraskan dengan Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Penjelasan Direksi terkait Perkembangan Penerapan Tata Kelola Bank

Bank Aladin Syariah terus menunjukkan konsistensinya dalam mewujudkan komitmen menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) sebagai landasan dan fondasi dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karenanya, dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta memastikan

This will be achieved with the following steps:

1. Continuing the development of the mobile banking application by adding features such as opening a wider variety of savings and deposit products, transferring funds via BI-Fast, paying bills and purchases, scheduling transactions, cash deposit and withdrawal, donations, zakat, and other customer services
2. Continuing the development of Open APIs and developing other technical aspects for easy interconnection with partners so that services can be used by a wider ecosystem (BaaS - *Banking as a Service*)
3. Continuing the development of *Corporate Internet Banking* to serve corporate customers in basic payroll and payment transaction activities, as well as creating a channel for ecosystem management with partners
4. Continuing the development of applications to support financing activities with more varied contracts and integration with other channels used by customers
5. Continuing programs that can increase customer involvement so they can provide a more personal and comprehensive experience
6. Continuing the development of a loyalty system to increase customer conversion and retention as well as up-selling and cross-selling capabilities
7. Continuing the development of information security and cyber resilience by securing access to data and applications via internal and external networks
8. Continuing to strengthen the Develop infrastructure to support development and operational activities through the relocation of the Data Center/Disaster Recovery Center and its accessibility
9. Continuing developing capabilities for handling anti-money laundering and anti-fraud to anticipate channel expansion, customers and products that continue to develop
10. Continuing developing other application systems to support operational and internal management activities related to call center and back-office services, staffing, spending, recon, reporting and others.

Through the development of information technology undertaken by the Bank, the Board of Directors anticipates achieving better and sustainable business growth, thus enabling the Bank to facilitate easier planning, supervision, direction, and delegation of tasks. The existence of IT improves the quality of HC as the work system units are systematically coordinated, which in turn also increases productivity and supports operational services. The development and use of IT at Bank Aladin Syariah has also been aligned with OJK Circular Letter (SEOJK) No. 21/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.

Explanation from the Board of Directors on the Development of Bank Governance Implementation

Bank Aladin Syariah continues to demonstrate its consistency in realizing its commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG) as the basis and foundation for conducting its business activities. Therefore, to carry out its duties and responsibilities and ensure that all best management practice principles are fulfilled in light of the business

dipenuhinya seluruh kaidah praktik pengelolaan terbaik guna mengatasi kondisi usaha yang berkembang dinamis serta penuh tantangan. Selama 2023 Direksi telah melakukan 16 (enam belas) kali rapat, yang terdiri dari 12 (dua belas) kali Rapat Direksi dan 4 (empat) kali Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.

Bank Aladin Syariah telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Aladin Syariah antara lain:

1. Governance Structure

Struktur organisasi Bank Aladin Syariah telah diselaraskan dengan fokus bisnis Bank Aladin Syariah dan secara reguler telah direviu dan dievaluasi menyesuaikan kebutuhan Bank Aladin Syariah. Bank Aladin Syariah juga telah melengkapi struktur Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah ("DPS"), Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI"), Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR"), dan Satuan Kerja Kepatuhan secara memadai sehingga masing-masing fungsi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Demikian juga, komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS juga telah sesuai dengan regulasi dan skala bisnis serta kebutuhan Bank. Terkait persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atau Bank Indonesia, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/PKK (fit and proper) dan seluruh anggota DPS juga telah mendapatkan persetujuan dari OJK atau Bank Indonesia.

Dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS, telah memperhatikan faktor integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sehingga anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan melengkapi keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Direksi juga telah membentuk 5 (lima) komite yaitu Komite Pengarah Teknologi Informasi/*Information Technology Steering Committee* (ITSC); Komite Aset dan Liabilitas/*Assets & Liabilities Committee* (ALCO); Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee* (RMC); Komite Pembiayaan/*Credit Committee* (CC); dan Komite Eksekutif Keberlanjutan/*Sustainability Executive Committee* (SEC), guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta diharapkan dapat melakukan pengambilan keputusan secara efektif dan tepat dalam menghadapi kondisi terkini Bank dan tantangan bisnis ke depan.

Selain kelima Komite tersebut, Direksi juga telah melengkapi organisasi dengan SKAI, SKMR, dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dari satuan kerja operasional. Satuan kerja yang merupakan *second & third line of defense* tersebut diharapkan mampu mendukung kegiatan operasional Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*. Infrastruktur tata kelola Bank berupa

conditions that are developing dynamically and full of challenges. During 2023, the Board of Directors held 16 (sixteen) meetings, consisting of 12 (twelve) Internal Board of Directors meetings and 4 (four) Joint meetings with the Board of Directors.

Bank Aladin Syariah has implemented Good Corporate Governance that is generally good, as reflected in the adequate application of Good Corporate Governance principles. The strengths of Bank Aladin Syariah Good Corporate Governance implementation include:

1. Governance Structure

The organizational structure of Bank Aladin Syariah has been aligned with the business focus of Bank Aladin Syariah and regularly reviewed and evaluated to meet the needs of Bank Aladin Syariah. Bank Aladin Syariah has also adequately completed the structure of the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board ("DPS"), Internal Audit Unit ("SKAI"), Risk Management Unit ("SKMR"), and Compliance Unit so that each function can perform its duties and responsibilities effectively.

Similarly, the composition of members in the Board of Commissioners, Board of Directors, and DPS has been in accordance with regulations, the scale of business, and the needs of the Bank. Regarding approval from the Financial Services Authority ("OJK") or Bank Indonesia, all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners have passed the Fit and Proper Test (PKK), and all members of the DPS have also received approval from OJK or Bank Indonesia.

In appointing members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and DPS, attention has been paid to factors such as integrity, competence, and financial reputation. This ensures that members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and DPS possess adequate and relevant competencies for their positions to fulfill their duties and responsibilities. Additionally, they are capable of implementing their competencies in carrying out their duties and responsibilities effectively.

To assist in its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has established the membership of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee, in accordance with regulations and in accordance with the Bank's needs. The Board of Directors has also established 5 (five) committees, namely the Information Technology Steering Committee (ITSC); Assets and Liabilities Committee (ALCO); Risk Management Committee (RMC); Financing Committee/Credit Committee (CC); and the Sustainability Executive Committee (SEC), to support the effective implementation of its duties and responsibilities, and to take effective and appropriate decisions when facing the Bank's current conditions and future business challenges.

As well as these five Committees, the Board of Directors has established SKAI, SKMR, and a Compliance Work Unit in the organization that is independent from operational work units. The work units that are the second & third line of defense are expected to support the Bank's operational activities by paying attention to the prudential principle and Good Corporate Governance. The Bank's governance

kebijakan dan prosedur Bank, tugas pokok, dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah memadai dan mendukung kegiatan usaha Bank.

2. Governance Process

Bank Aladin Syariah selalu berupaya agar dalam melakukan kegiatan usaha dan proses operasional Bank Aladin Syariah sesuai dengan *Good Corporate Governance* dan prinsip kehati-hatian. Proses pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan penilaian terhadap faktor integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Semua organ Bank Aladin Syariah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi masing-masing secara proper. Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi telah melakukan rapat koordinasi untuk saling memberikan informasi, berdiskusi, dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjaga bisnis Bank Aladin Syariah berjalan dengan baik.

Pada level Dewan Komisaris, untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris telah menyetujui RBB dan RAKB yang telah disusun dengan memperhatikan kondisi faktor eksternal dan internal Bank Aladin Syariah. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan terhadap realisasi dari RBB dan RAKB yang telah ditetapkan. Sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris membentuk komite yang dapat membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan. Komite-Komite yang dibentuk telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait proses perbaikan yang perlu dilakukan oleh Bank Aladin Syariah.

DPS secara rutin telah menyelenggarakan rapat bulanan guna memastikan antara lain usulan produk, jasa, dan program sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dibantu oleh 1 (satu) orang *Liaison Officer* yang berada di bawah supervisi Satuan Kerja Kepatuhan. Hasil pengawasan dari DPS telah dilaporkan secara semesteran ke OJK, DSN, dan Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tanpa intervensi dari pemegang saham, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, *Good Corporate Governance*, dan prinsip syariah. RBB yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, menjadi panduan dan fokus bagi Direksi untuk dapat direalisasikan dengan baik.

Karyawan juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelatihan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan Bank dan karyawan. Secara reguler juga dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan sehingga mendukung karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Saat ini, Bank juga telah melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap ketentuan internal dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian ketentuan internal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah.

infrastructure including Bank policies and procedures, key tasks and functions in the organizational structure is adequate and supports the Bank's business activities.

2. Governance Process

Bank Aladin Syariah consistently strives to ensure that its business activities and operational processes adhere to Good Corporate Governance principles and prudence. The appointment and/or replacement process for members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and DPS has been conducted in accordance with applicable regulations and considering recommendations from the Nomination and Remuneration Committee. This process considers assessments of integrity, competence, and financial reputation as key factors. All organs of Bank Aladin Syariah fulfill their duties and responsibilities according to their respective functions properly. The Board of Commissioners, DPS, and Board of Directors have conducted coordination meetings to exchange information, engage in discussions, and make necessary decisions to ensure the smooth operation of Bank Aladin Syariah's business

At the Board of Commissioners level, to support its supervisory and advisory duties and responsibilities of the Board of Directors, the Board of Commissioners has approved the RBB and SFAP that were prepared taking into account the condition of Bank Aladin Syariah's external and internal factors. The Board of Commissioners also supervised the realization of the RBB and SFAP. In an effort to improve its supervisory function, the Board of Commissioners has established committees to assist it in carrying out its supervisory duties. These committees submit recommendations to the Board of Commissioners regarding the improvement process that needs to be carried out by Bank Aladin Syariah.

DPS holds monthly meetings to ensure that proposed products, services and programs comply with sharia principles regulated in the DSN-MUI Fatwa. To carry out their duties and responsibilities, they are assisted by 1 (one) Liaison Officer who is under the supervision of the Compliance Work Unit. The DPS supervision results are reported semi-annually to OJK, DSN and the Board of Directors.

When carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors, without intervention from shareholders, is fully responsible for the Bank management based on the prudential principle, Good Corporate Governance and sharia principles. The RBB, as approval by the Board of Commissioners, becomes a guide and focus for the Board of Directors so that it can be realized well.

Employees also have an opportunity to receive training based on the needs of the Bank and the employees. Regular training is also carried out to improve employee skills and knowledge to support them in fulfilling their duties and responsibilities well.

Currently, the Bank has also evaluated and updated internal regulations to maintain their effectiveness, adequacy and conformity of internal regulations with applicable laws and regulations and sharia principles.

3. Governance Outcome

Dengan struktur dan proses yang telah dilakukan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan serta disempurnakan, diharapkan *outcome* yang dicapai oleh Bank Aladin Syariah dapat membantu Bank Aladin Syariah untuk terus berkembang. Bank juga terus melakukan pengkinian untuk Ketentuan internal Bank Aladin Syariah dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Untuk memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam lingkungan usaha Bank berjalan secara efektif melalui adanya proses audit internal yang meliputi seluruh aspek keuangan dan operasional serta penerapan teknologi informasi. Proses audit internal tersebut dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Selain itu SKAI Bank dibentuk untuk memeriksa efektivitas sistem pengendalian Intern yang berfokus pada risiko bisnis yang signifikan dan rekomendasi dari regulator, Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit dengan mengidentifikasi potensi risiko internal yang dapat mempengaruhi kinerja Bank, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kecukupan proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Bank, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan unit kerja terkait serta tidak ada temuan yang berulang.

Bank Aladin Syariah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dan signifikan diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank Aladin Syariah dan masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada Rencana Audit Internal yang telah disusun oleh SKAI secara tahunan yang disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan pertimbangan dari Komite Audit.

Penerapan Manajemen Risiko Bank

Bank Aladin Syariah menyusun sistem manajemen risiko sesuai dengan POJK No. 65/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No. 08/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank menerapkan Manajemen Risiko dengan melakukan pengimplementasian manajemen risiko di segala aktivitas fungsional operasional Bank.

Bank memiliki struktur organisasi dan kebijakan serta prosedur yang mendukung pelaksanaan manajemen risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja lini 2 (dua) yang independen. Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Manajemen Risiko. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko Perseroan akan diselenggarakan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan Bank dengan ruang lingkup risiko yang mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi

Bank Aladin Syariah telah melakukan penyaluran pembiayaan yang fokus di ekosistem mitra strategis sejak pertengahan tahun 2022. Pembiayaan tersebut dapat dimitigasi dengan baik sehingga di tahun 2023, *Non Performing Financing* (NPF) atau kualitas pembiayaan bermasalah Bank nihil atau 0%.

3. Governance Outcome

With the implemented structures and processes that continue to be improved and perfected, it is hoped that the outcome achieved by Bank Aladin Syariah will help Bank Aladin Syariah continue to develop. The Bank also continues to update the internal provisions of Bank Aladin Syariah and adapts them to applicable regulations.

Implementation of an Internal Control System

To ensure that the implementation of the internal control system in the Bank's business runs effectively, it follows an internal audit process that covers all financial and operational aspects as well as the application of information technology. The Internal Audit Work Unit (SKAI) carries out the internal audit process. In addition, the Bank's SKAI also examines the effectiveness of the Internal control system with a focus on significant business risks, and recommendations from the regulators, Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee by identifying potential internal risks that could affect the Bank's performance, including compliance with applicable laws and regulations, the adequacy of the Bank's governance processes, risk management and the internal control system, and provides recommendations for improvements. The SKAI audit findings are followed up by the Board of Directors and related work units so there are no repeat findings.

Bank Aladin Syariah has implemented the internal audit function effectively in all aspects and elements of activities that are expected to directly and significantly influence the interests of Bank Aladin Syariah and the community, as can be seen in the Internal Audit Plan prepared by SKAI on an annual basis, and approved by the President Director and the Board Commissioner with consideration from the Audit Committee.

Implementation of the Bank's Risk Management

Bank Aladin Syariah has developed a risk management system in accordance with POJK No. 65/ POJK.03/2016 concerning Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, and POJK No. 08/POJK.03/2014 concerning Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The Bank applies Risk Management by applying risk management in all operational functional activities of the Bank.

The Bank has the organizational structure and policies and procedures to support the implementation of risk management. The Risk Management Work Unit is an independent 2 (two) line work unit, with the Head of the Risk Management Work Unit being responsible to the Director of Risk Management. The Company's risk management is aligned with the Bank's objectives, business policies, size, business complexity and capabilities with a risk scope that includes Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Yield Risk, and Investment Risk

Bank Aladin Syariah has been disbursed financing that focused on the strategic partner ecosystem since mid-2022. This financing has been mitigated properly so that in 2023, *Non-Performing Financing* (NPF), or the quality of the Bank's financing problems was 0%.



Tahun 2023, penyusunan, penetapan dan pengkinian prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko telah dilaksanakan dengan memadai. Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

Penerapan *Whistleblowing System*/ Sistem Penanganan Pengaduan

Bank Aladin Syariah mempersiapkan WBS sebagai sarana bagi pelapor untuk menyampaikan pengaduan perilaku pelanggaran seperti perbuatan *Fraud*, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau Peraturan Perusahaan, serta perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian baik bersifat materiil maupun immateriil yang diduga dilakukan oleh Karyawan yang terjadi di lingkungan Bank dengan proses penanganan yang cepat, tepat dan efektif. Sistem ini disediakan dengan maksud untuk menindaklanjuti dengan serius hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian, baik dari segi keuangan maupun reputasi Bank tetapi tidak terbatas pada:

1. Penipuan/*Fraud*, Ketidakjujuran atau Korupsi.
2. Penggunaan tidak sah atau klaim palsu atas dana bank.
3. Penyalahgunaan posisi untuk keuntungan pribadi.
4. Aktivitas tidak sah dan/atau perdagangan ilegal dan/atau kelakuan buruk.
5. Pelanggaran hukum, aturan, peraturan dan pedoman seperti UU Perbankan.
6. Kegagalan untuk memenuhi standar profesional.
7. Tindakan ilegal atau kriminal (seperti perusakan fisik properti, pembakaran, pencurian, bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menipu bank).
8. Pemalsuan, perubahan/penggantian catatan bank.
9. Pelanggaran serius Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
10. Pelecehan Seksual (baik secara fisik maupun verbal), intimidasi/pengancaman, pemerasan.
11. Penyalahgunaan Informasi yang bersifat rahasia.
12. Menyetujui, mengarahkan atau berpartisipasi dalam salah satu kegiatan di atas.

Di sepanjang tahun 2023, tidak terdapat karyawan atau Manajemen Bank yang dilaporkan melalui *Whistleblowing System*. Direksi berpendapat bahwa penerapan WBS di lingkup Bank Aladin Syariah telah berjalan dengan baik. Sosialisasi penerapan WBS terus menerus dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian segenap Insan Bank dalam melaporkan tindak pelanggaran, sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

Tingkat Kesehatan Bank

Bank Aladin Syariah melakukan *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) terhadap risiko dan kinerja Bank dengan mengacu pada Peraturan OJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, serta berdasarkan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*). Hasil akhir tercermin pada Peringkat Komposit (PK) yang mencakup penilaian terhadap faktor-faktor profil risiko (*risk profile*), GCG, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*).

Hasil *self-assessment* TKB Bank Aladin Syariah secara individu per 31 Desember 2023 berada pada Peringkat Komposit 2 (Dua). Hal ini mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga

In 2023, the preparation, determination and updating of procedures and tools to identify, measure, monitor and control risks was implemented adequately. The Board of Directors and Board of Commissioners carried out active supervision of the risk management strategies and policies through the Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee.

Implementation of the *Whistleblowing System*/Complaint Handling System

Bank Aladin Syariah has prepared the WBS as a means for whistleblowers to submit complaints about violation behavior such as fraud, unethical/inappropriate actions, violations of company policies and/or regulations, as well as actions or behavior that can cause material or immaterial losses that are allegedly committed by employees that occur within the Bank through a fast, precise and effective handling process. This system is provided with the intention of following up seriously any matters that could cause losses, both in terms of finances and the Bank's reputation but is not limited to:

1. Fraud, Dishonesty or Corruption.
2. Unauthorized use or false claims of Bank funds.
3. Misuse of position for personal gain.
4. Unauthorized activities and/or illegal trading and/or misconduct.
5. Violation of laws, rules, regulations and guidelines such as the Banking Law.
6. Failure to meet professional standards.
7. Illegal or criminal acts (such as physical damage to property, arson, theft, collaborating with third parties to defraud the bank).
8. Forgery, alteration/manipulation of Bank records.
9. Serious violation of the Code of Ethics and Code of Conduct.
10. Sexual harassment (both physical and verbal), intimidation/threats, blackmail.
11. Misuse of confidential information.
12. Approving, directing or participating in any of the above activities.

During 2023, no employees or Bank Management was reported through the *Whistleblowing System*. The Board of Directors believes that Bank Aladin Syariah's WBS has functioned properly. Continuous socialization of the WBS is carried out to increase the understanding and awareness of all Bank Personnel in reporting violations, so as to create a clean working environment with integrity.

Bank Soundness Level

Bank Aladin Syariah carries out a self-assessment of the Bank's Soundness Level (BHL) on the Bank's risks and performance by referring to OJK Regulation No.4/POJK.03/2016 concerning the Assessment of the Soundness Level of Commercial Banks, and is based on a Risk-Based Bank Rating. The final results are reflected in the Composite Rating (PK) that includes an assessment of risk profile factors, GCG, earnings and capital.

The individual Bank Aladin Syariah's Soundness Level self-assessment results as of December 31, 2023 were at the Composite Rank 2 (Two). This reflects the condition of a Bank that is generally quite healthy, and

dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, aspek rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Jika ditemukan kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

Penjelasan Direksi terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Bagi Bank Aladin Syariah, penerapan Program TJSL merupakan bagian dari komitmen Bank terhadap aspek keberlanjutan. Pelaksanaan Program TJSL dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari sisi internal maupun eksternal, guna mewujudkan kesejahteraan bersama (*shared prosperity*) baik bagi penerima bantuan program TJSL, mitra pelaksana, maupun untuk Bank. Oleh karena itu, pelaksanaan program TJSL ditujukan untuk menciptakan nilai secara bersama (*shared value*) yang akan mendukung kepentingan Bank dan para pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

Perencanaan dan penerapan Program TJSL Bank Aladin Syariah dilakukan secara strategis agar selaras dengan kepentingan bisnis Bank dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Terkait dengan hal ini, Bank telah menetapkan nilai-nilai sebagai berikut yang menjadi landasan dalam penerapan Program TJSL.

1. Memungkinkan (*enable*): Penerapan Program TJSL diharapkan dapat menyiapkan para pelaku usaha dan masyarakat untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Selain itu, penerapan Program ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada karyawan Bank untuk turut berpartisipasi dalam membantu mengatasi isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan.
2. Mendukung (*support*): Penerapan Program TJSL diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup maupun menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.
3. Melestarikan (*preserve*): Penerapan Program TJSL dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Sepanjang tahun 2023, program-program TJSL secara khusus ditujukan guna memenuhi pencapaian SDG 1 (*No Poverty*), SDG 2 (*Zero Hunger*); SDG 3 (*Good Health and Well Being*); SDG 4 (*Quality Education*); SDG 5 (*Gender Equality*), SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), SDG 10 (*Reduced Inequalities*), SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*); SDG 13 (*Climate Action*); dan SDG 17 (*Partnerships for the Goals*).

Program-program TJSL unggulan yang dilaksanakan oleh Bank pada tahun 2023 antara lain terdiri dari:

1. Pelatihan edukasi keuangan secara *online* untuk 150 UMKM bekerja sama dengan Group Alfamart.
2. Penyempurnaan modul edukasi keuangan untuk pelaku UMKM agar selaras dengan POJK Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, bekerja sama dengan Yayasan Benih Baik.
3. Kerjasama dengan Alfamart dan Heinz ABC dalam Program Warteg Gratis, dimana dalam program ini Bank berpartisipasi dalam menyediakan paket makanan bagi kaum dhuafa yang

is considered capable of facing significant negative influences from changes in business conditions and other external factors, as reflected in the ranking of assessment factors, including risk profiles, Governance implementation, profitability aspects, and adequate capital, which are quite good. If weaknesses are found, then these weaknesses can be resolved during normal business activities.

Board of Directors' explanation on the Social and Environmental Responsibility Program

For Bank Aladin Syariah, the SER Program is part of the Bank's commitment to sustainability aspects. The SER Program is executed by involving various stakeholders, both internally and externally, to achieve shared prosperity for the recipients of the SER program, implementing partners, and the bank itself. Therefore, the implementation of the SER program is aimed at creating shared value that will support the long-term interests of the bank and its stakeholders.

Bank Aladin Syariah plans and implements the SER Program strategically to align with the bank's business interests and the Sustainable Development Goals (SDGs). In this regard, the bank has established the following values as the foundation for implementing the SER Program.

1. Enable: The SER Program is expected to prepare businesses and communities adapt to changes. In addition, this program is also expected to provide opportunities for Bank employees to participate in overcoming social, economic and environmental issues faced by stakeholders.
2. Support: The SER Program is expected to improve the standard of living and maintain the sustainability of people's lives.
3. Preserve: The SER Program is carried out to preserve nature and the environment.

In 2023, the SER programs were specifically aimed at meeting the following: SDG 1 (No Poverty), SDG 2 (Zero Hunger); SDG 3 (Good Health and Well Being); SDG 4 (Quality Education); SDG 5 (Gender Equality), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 12 (Responsible Consumption and Production); SDG 13 (Climate Action); and SDG 17 (Partnerships for the Goals).

The leading SER programs implemented by the Bank in 2023 included:

1. Online financial education training for 150 MSMEs in collaboration with the Alfamart Group.
2. Completion of the financial education module for MSMEs to be in line with POJK No. 3 of 2023 concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Community, in collaboration with Yayasan Benih Baik.
3. Collaboration with Alfamart and Heinz ABC in the Free Warteg Program, where in this program the Bank participated by providing food packages for the poor that were distributed through 33 food



disalurkan melalui 33 warung makan di Indonesia selama bulan suci Ramadhan.

4. Program kurban sapi yang disalurkan melalui Islamic Dakwah Fund - Majelis Ulama Indonesia (IDF - MUI) dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444H.
5. Penggalangan donor darah dengan melibatkan seluruh karyawan Bank yang disalurkan melalui Palang Merah Indonesia.
6. Penyelenggaraan Program Beasiswa Bagi Karyawan untuk menunjang pendidikan karyawan yang sedang menempuh pendidikan tinggi.
7. Penyelenggaraan Program Donasi untuk Pencegahan Stunting bekerja sama dengan Yayasan Benih Baik Indonesia.

Selain program-program TJSI di atas, Bank Aladin Syariah juga melanjutkan beberapa program TJSI unggulan dengan mitra-mitra eksisting, dengan fokus pada pengukuran dampak sosial dan/atau lingkungan dari program-program tersebut. Program-program ini meliputi:

1. Program pemeliharaan rumpun bambu di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah bekerjasama dengan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP), Yayasan Kehati dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
2. Program kerjasama dengan Plastic Bank Indonesia untuk mengumpulkan dan mencegah 20 ribu kg sampah plastik agar tidak mencemari perairan Indonesia.

Penilaian Direksi atas Kinerja Komite di bawah Direksi

Hingga akhir 2023, Direksi telah menilai bahwa Komite di bawah Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik dan memberikan dukungan yang positif dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pengurusan oleh Direksi. Hal ini didasari oleh realisasi pemenuhan tugas masing-masing Komite yang telah dilakukan di sepanjang tahun 2023:

- **Komite Pengarah Teknologi Informasi atau Information Technology Steering Committee (ITSC)**
ITSC dibentuk oleh Direksi untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis Bank serta meningkatkan kemampuan daya saing Bank Aladin Syariah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.
- **Komite Aset dan Liabilitas atau Assets & Liabilities Committee (ALCO)**
ALCO dibentuk oleh Direksi dalam memelihara struktur neraca yang kuat, yang meliputi analisis dan perumusan kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan, pengawasan dalam pengelolaan risiko likuiditas, risiko pasar dan permodalan sejalan dengan peraturan BI atau OJK maupun strategi bisnis.
- **Komite Manajemen Risiko atau Risk Management Committee (RMC)**
RMC dibentuk oleh Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan manajemen risiko secara efektif di Bank Aladin Syariah.
- **Komite Pembiayaan atau Credit Committee (CC)**
CC dibentuk Direksi dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait pembiayaan.

stalls in Indonesia during the holy month of Ramadan.

4. Cattle sacrifice program distributed through the Islamic Dakwah Fund - Majelis Ulama Indonesia (IDF - MUI) to welcome Eid al-Adha 1444H.
5. Blood donations program involving all Bank employees, through the Indonesian Red Cross.
6. Organizing a Scholarship Program for Employees to support the education of employees who are currently pursuing higher education.
7. Organizing a Donation Program for Stunting Prevention in collaboration with Yayasan Benih Baik Indonesia.

In addition to the above SER programs, Bank Aladin Syariah is also continuing several Leading SER programs with existing partners, with a focus on measuring the social and/or environmental impact of these programs. These programs include:

1. Bamboo grove maintenance program in Magelang Regency, Central Java in collaboration with the Communication Forum Compliance Director (FKDKP), Yayasan Kehati and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).
2. Collaboration program with Plastic Bank Indonesia to collect and prevent 20 thousand kg of plastic waste from polluting Indonesian waters.

Board of Directors' performance assessment of the committees under the Board of Directors

During 2023, the Board of Directors assessed that the Committees under the Board of Directors had carried out their respective duties and responsibilities properly, and provided positive support for carrying out the Board of Directors' management and management functions. This is based on the realization of the fulfillment of each Committee's duties in 2023:

- **Information Technology Steering Committee (ITSC)**

ITSC was formed by the Board of Directors to ensure the information technology (IT) systems are in line with the Bank's strategic plans and to increase the competitiveness of Bank Aladin Syariah through the appropriate use of information technology.

- **Assets and Liabilities Committee (ALCO)**

ALCO was formed by the Board of Directors to maintain a strong balance sheet structure, which includes analysis and formulation of policies and strategies, decision making, supervision in managing liquidity risk, market risk and capital in line with BI or OJK regulations, and the business strategy.

- **Risk Management Committee (RMC)**

RMC is formed by the Board of Directors to assist in the implementation of tasks and authorities related to effective risk management at Bank Aladin Syariah.

- **Financing Committee or Credit Committee (CC)**

CC is formed by the Board of Directors with the aim of assisting the Board of Directors in the oversight function related to financing.

- **Komite Eksekutif Keberlanjutan atau Sustainability Executive Committee (SEC)**

SEC dibentuk untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan pada seluruh aspek operasional Bank sejalan dengan strategi dan rencana kerja keberlanjutan guna mencapai target-target keberlanjutan yang telah ditetapkan.

- **Sustainability Executive Committee (SEC)**

SEC was formed to ensure the sustainability principles in all aspects of the Bank's operations are in line with the sustainability strategy and work plan to achieve the established sustainability targets.

Penjelasan Direksi Terkait Perubahan Komposisi Direksi

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi di Bank Aladin Syariah. Susunan Direksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Board of Directors' Explanation on Changes in the Board of Directors Composition

During 2023, there were no changes to the Bank Aladin Syariah Board of Directors composition. The Board of Directors composition as of December 31, 2023 remained as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis For Appointment
Dyota Marsudi	Presiden Direktur President Director	RUPS Luar Biasa tanggal 7 April 2021 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 11 tanggal 7 April 2021 Extraordinary GMS dated April 7, 2021 as stated in the Deed of Extraordinary GMS Decision Statement No. 11 dated April 7, 2021
Firdila Sari	Direktur Director	RUPS Luar Biasa tanggal 7 April 2021 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 11 tanggal 7 April 2021 Extraordinary GMS dated April 7, 2021 as stated in the Deed of Extraordinary GMS Decision Statement No. 11 dated April 7, 2021
Mayang Ekaputri	Direktur Director	RUPS Luar Biasa tanggal 10 Februari 2022 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa melalui Akta No. 56 tanggal 21 Februari 2022 Extraordinary GMS dated February 10, 2022 as stated in the Deed of Statement of Extraordinary GMS Decisions through Deed No. 56 dated February 21, 2022
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	menjawab komen bu ME : RUPS Tahunan 21 Juni 2023 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12, tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H Notaris, di Jakarta Annual GMS on 21 June 2023 as stated in the Deed of Meeting Decision Statement No. 12, dated 6 July 2023 made before Notary Yulia, S.H, Notary in Jakarta

Apresiasi dan Penutup

Pencapaian kinerja tahun 2023, tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama banyak pihak, khususnya para pemegang saham, yang tiada henti dan secara terus menerus mendukung terwujudnya visi dan misi Bank Aladin Syariah. Sebagai penutup dari laporan tahun 2023, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada seluruh Insan Bank Aladin Syariah atas dedikasi, loyalitas serta kerja kerasnya dalam mendukung target dan realisasi bisnis Bank hingga tumbuh dengan baik seperti sekarang ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua Pemangku Kepentingan, Mitra Bisnis, nasabah serta Dewan Komisaris atas dukungan dan kerjasamanya selama ini sehingga Bank dapat mengoptimalkan perannya sebagai Bank Digital Syariah yang senantiasa memberikan solusi pembiayaan dan layanan perbankan syariah inovatif.

Appreciation and Closing

The performance achievements in 2023 could not have been possible without the continuous support and cooperation of many parties, especially the shareholders, who tirelessly and continuously support the realization of Bank Aladin Syariah's vision and mission. As a conclusion to the 2023 report, we would like to express our utmost gratitude and deepest appreciation to all members of Bank Aladin Syariah for their dedication, loyalty, and hard work in supporting the bank's targets and business realization, leading to its current successful growth. We also extend our gratitude to all stakeholders, business partners, customers, and the Board of Commissioners for their support and cooperation, allowing the bank to optimize its role as a Shariah Digital Bank that consistently provides innovative Shariah financing solutions and banking services.

Jakarta, 29 April, 2024
Jakarta, April 29, 2024
PT Bank Aladin Syariah Tbk.



Dyota Marsudi
Presiden Direktur
President Director



Laporan Dewan Pengawas Syariah

Laporan Dewan Pengawas Syariah



Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga PT Bank Aladin Syariah Tbk dapat merasakan segala nikmat dan mewujudkan kinerja yang baik di sepanjang tahun 2023. Pada kesempatan ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aladin Syariah merasa bangga untuk menyampaikan peran serta pencapaian Bank. Dimana ditengah perkembangan perekonomian di tahun 2023 ini yang penuh dengan dinamika, PT Bank Aladin Syariah Tbk dapat meraih pencapaian yang baik.

PROF. DR. H. M. ASRORUN NI'AM

SHOLEH, M.A.

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board



DRS. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB,
S.AG, M.SI.

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

All praise to Allah SWT for the mercy and grace, enabling PT Bank Aladin Syariah Tbk to experience all blessings and achieve great performance throughout the year 2023. On this occasion, the Sharia Supervisory Board (DPS) of Bank Aladin Syariah is proud to convey the role and achievements of the Bank. Amid the economic developments in 2023 filled with dynamics, PT Bank Aladin Syariah Tbk managed to achieve great outcomes.

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillah rabbil 'alamin, wa bihi nastai'in, wa 'ala 'umuriddunya waddin, washshalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya iwal mursalin, nabiyyina muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, amma ba'du

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillah rabbil 'alamin, wa bihi nastai'in, wa 'ala 'umuriddunya waddin, washshalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya iwal mursalin, nabiyyina muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, amma ba'du

Untuk itu, Dewan Pengawas Syariah memberikan apresiasi atas konsistensi seluruh komponen Bank Aladin Syariah atas penerapan model bisnis yang fokus dan berkelanjutan. Dewan Pengawas Syariah pun turut merasa bangga dan bersyukur atas komitmen yang tetap konsisten terjaga dalam mengembangkan bisnis Bank yang berkelanjutan. Hal tersebut terutama dari Layanan perbankan yang terus dilengkapi melalui peluncuran fitur QRIS dan *platform Corporate Internet Banking*, Layanan tarik setor tunai Bank pun terus diperluas dan telah tersedia di lebih dari 20.000 gerai Alfamart dan Alfamidi di seluruh Indonesia, serta menghadirkan terobosan baru yaitu layanan Banking as a Service (BaaS).

Pada tahun 2023, Bank Aladin Syariah juga berhasil meraih penghargaan sebagai *Islamic Banking Initiative of the year* dari ABF Retail Banking Awards 2023 yang di gelar di Singapura. Penghargaan ini sebagai wujud komitmen Bank Aladin Syariah dalam melakukan inovasi dan optimalisasi layanan kepada masyarakat. Inovasi dan layanan yang dihadirkan tentunya sudah memenuhi prinsip syariah, untuk memastikan kesesuaian Syariah, maka DPS melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta memberikan pengarah dan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah. Seluruh proses pengembangan produk baru yang dilakukan Bank senantiasa memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah memperoleh pendapat syariah dari DPS.

Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Sebagai emiten perbankan dengan prinsip syariah, Bank Aladin Syariah menegaskan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ utama dalam struktur tata kelola perusahaan. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dijalankan melalui penyelenggaraan rapat bulanan dengan tujuan untuk memastikan antara lain usulan produk, jasa, dan program sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh 1 (satu) orang *Liaison Officer* yang berada di bawah supervisi Satuan Kerja Kepatuhan. Hasil pengawasan dari DPS telah dilaporkan secara semesteran kepada OJK, DSN-MUI dan Direksi.

Dalam menjalankan tugasnya, DPS diwajibkan melakukan rapat setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Adapun setiap hasil rapat akan dituangkan dalam Risalah Rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam Risalah Rapat DPS merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS. Per 31 Desember tahun 2023, DPS telah melakukan rapat 12 (dua belas) kali untuk periode tahun 2023.

For this result, the Sharia Supervisory Board appreciates the consistency of all components of Bank Aladin Syariah in implementing a focused and sustainable business model. The Sharia Supervisory Board also feels proud and grateful for its consistent commitment to developing the Bank's business in a sustainable manner. This is especially evident in the continued enhancement of banking services through the launch of QRIS features and the Corporate Internet Banking platform. Cash withdrawal and deposit services of the Bank are also continuously expanded and are now available at more than 20,000 Alfamart and Alfamidi outlets across Indonesia, as well as introducing a new breakthrough Banking as a Service (BaaS).

In 2023, Bank Aladin Syariah received an award for Islamic Banking Initiative of the year from the ABF Retail Banking Awards 2023 event that was held in Singapore. This award reflects Bank Aladin Syariah's commitment to innovating and optimizing services for the communities. The innovations and services presented certainly comply with sharia principles. To ensure Sharia compliance, DPS carries out supervision, both actively and passively, especially in implementing the National Sharia Council (DSN) fatwa, and provides direction and/or supervision over products or services and business activities to ensure they comply with Sharia principles. The entire process of developing new products conducted by the Bank consistently takes into consideration the fatwas issued by the National Sharia Supervisory Board and has obtained Sharia opinions from the Sharia Supervisory Board (DPS).

Implementation of the Sharia Supervisory Board Duties

As a Sharia-compliant banking issuer, Bank Aladin Syariah asserts the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) as the primary organ within the corporate governance structure. The function of the Sharia Supervisory Board (DPS) is executed through the conduct of monthly meetings aimed at ensuring, among other things, that proposed products, services, and programs align with the principles set forth in the Fatwa issued by DSN-MUI. In fulfilling its duties, the Sharia Supervisory Board is assisted by 1 (one) Liaison Officer who operates under the supervision of the Compliance Unit. The oversight outcomes from the Sharia Supervisory Board are reported semi-annually to the Financial Services Authority (OJK), DSN-MUI, and the Board of Directors.

In carrying out its duties, the DPS is required to hold meetings at least once a month. The outcomes of each meeting will be recorded in the DPS Meeting Minutes and documented thoroughly. All decisions made by the DPS and documented in the DPS Meeting Minutes constitute collective decisions of all DPS members. As of December 31, 2023, the DPS has held 12 (twelve) meetings for the year 2023.



Pada tahun 2023, agenda yang diaktualisasikan Dewan Pengawas Syariah Bank Aladin Syariah adalah terkait dengan pemenuhan *sharia compliance* dan pengembangan Karyawan yang berkelanjutan. Selain itu, DPS juga memastikan pemenuhan prinsip-prinsip syariah pada strategi dan kebijakan strategis bank. Untuk itu, DPS mengapresiasi Direksi dalam melakukan perumusan strategi dan kebijakan strategi bank senantiasa memperhatikan prinsip syariah yang berlaku.

Pada tahun 2023, DPS tidak melihat implementasi dari kebijakan strategis Bank yang melanggar prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank Aladin Syariah telah berupaya untuk menjalankan roda usaha sesuai dengan regulasi dan terus menanamkan nilai-nilai budaya kerja dan nilai-nilai keislaman yang telah menjadi kesepakatan bersama guna mengarahkan seluruh karyawan agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Bank Aladin Syariah.

Penerapan GCG Aspek Dewan Pengawas Syariah

Bagi Bank Aladin Syariah, pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan 5 (lima) *prinsip Good Corporate Governance* (GCG), Transparans, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Profesional dan Kewajaran tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu organ Bank Aladin Syariah menjadi unsur penting dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Maka dari pada itu, dalam melakukan *self-assessment* GCG, aspek Dewan Pengawas Syariah menjadi salah satu dalam penilaian tersebut. Aspek Dewan Pengawas Syariah dinilai berdasarkan faktor Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah. Dimana pada tahun 2023, DPS mendapat peringkat 1 (satu).

Komposisi dan Susunan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Aladin Syariah berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang ketua dan anggota. Sepanjang tahun 2023 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan jumlah, susunan dan komposisi Dewan Pengawas Syariah, namun terdapat pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah yang telah habis masa jabatannya, sebagaimana tertuang dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023.

In 2023, the agenda actualized by the Bank Aladin Syariah Sharia Supervisory Board was related to fulfilling *sharia compliance* and sustainable development of Human Capital (HC). The DPS also ensures the fulfillment of *sharia* principles in the bank's strategy and strategic policies, and The Sharia Supervisory Board (DPS) appreciates the Board of Directors for consistently incorporating the principles of *Sharia* into the formulation of the bank's strategic strategies and policies.

In 2023, the Sharia Supervisory Board (DPS) did not observe any of the Bank's strategic policies that contravened the principles of Islamic *Sharia*. Bank Aladin Syariah conducts its operations in accordance with regulations and consistently promotes an Islamic work culture and values. By mutual agreement, all Human Capital (HC) are directed to adhere to the values of Bank Aladin Syariah.

Implementation of GCG Aspects by the Sharia Supervisory Board

For Bank Aladin Syariah, the implementation of *Good Corporate Governance* in *sharia* banking is not only intended to develop bank management that applies the 5 (five) principles of *Good Corporate Governance* (GCG), Transparency, Accountability, Responsibility, Professionalism and Fairness, but also must act in accordance with *sharia* principles. This is aimed at broader interests, including protecting the interests of *stakeholders* and increasing compliance with applicable laws and regulations, as well as ethical values that generally apply to the *sharia* banking industry.

The Sharia Supervisory Board, as one of the organs of Bank Aladin Syariah, plays a crucial role in implementing the principles of *Good Corporate Governance*. Therefore, in conducting the *self-assessment* of GCG, the aspect of the Sharia Supervisory Board is one of the factors considered in the evaluation. The Sharia Supervisory Board aspects are assessed based on factors in the Implementation of the Sharia Supervisory Board Duties and Responsibilities. In the year 2023, the Sharia Supervisory Board received a rating 1 (one).

Sharia Supervisory Board Composition and Structure

The Sharia Supervisory Board of Bank Aladin Syariah consists of 2 (two) individuals, comprising a chairman and a member. Throughout the year 2023 until the signing of this Annual Report, there have been no changes in the number, composition, and structure of the Sharia Supervisory Board. However, there was a reappointment of the Sharia Supervisory Board member whose term had expired, as stipulated in the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) for the Fiscal Year 2022 held on June 21, 2023.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis For Appointment
Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA	Ketua Chair	RUPS Tahunan 21 Juni 2023 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12, tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H Notaris, di Jakarta Annual GMS on 21 June 2023 as stated in the Deed of Meeting Decision Statement No. 12, dated 6 July 2023 made before Notary Yulia, S.H, Notary in Jakarta
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si	Anggota Member	RUPS Tahunan 21 Juni 2023 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12, tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H Notaris, di Jakarta Annual GMS on 21 June 2023 as stated in the Deed of Meeting Decision Statement No. 12, dated 6 July 2023 made before Notary Yulia, S.H, Notary in Jakarta

Apresiasi dan Penutup

Pada kesempatan ini Dewan Pengawas Syariah juga senantiasa mengingatkan manajemen Bank Aladin Syariah agar tetap berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karyawan Bank Aladin Syariah pun diharapkan untuk terus bertumbuh yang berdedikasi tinggi, amanah dan profesional sehingga Bank Aladin Syariah mampu menjadi emiten perbankan syariah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat diseluruh Indonesia.

Appreciation and Closing

On this occasion, the Sharia Supervisory Board also consistently reminds the management of Bank Aladin Syariah management to remain committed to maintaining compliance with sharia principles and compliance with applicable laws and regulations. Employees of Bank Aladin Syariah are also expected to continue growing, demonstrating high dedication, trustworthiness, and professionalism. This will enable Bank Aladin Syariah to become a Sharia-compliant banking issuer that can provide benefits to the community throughout Indonesia.

Jakarta, 29 April, 2024

Jakarta, April 29, 2024

Atas nama Dewan Pengawas Syariah PT Bank Aladin Syariah Tbk
On behalf of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Aladin Syariah Tbk



Prof. Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board



Sholahudin Al Aiyub, S.Ag., M.Si.
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of the Sharia Supervisory Board

halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Aladin Syariah Tbk. tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 April, 2024
Jakarta, April 29, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Rudy Hamdani



Presiden Komisaris (Independen)
President Commissioner
(Independent)

Ationo Teguh Basuki



Komisaris
Commissioner

Fransisca Ekawati



Komisaris Independen
Independent Commissioner



STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS FOR THE ANNUAL REPORT 2023 OF PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report 2023 of PT Bank Aladin Syariah Tbk has been fully disclosed and we are solely responsible for the accuracy of all contents of the Annual Report.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 29 April, 2024
Jakarta, April 29, 2024

Direksi
Directors

Dyota Mahottama Marsudi

Presiden Direktur
President Director

Firdila Sari

Direktur
Director

Baiq Nadea Dzurriatin

Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Mayang Ekaputri

Direktur
Director

Aladin



KEUNTUNGAN
WUJUDKAN MIMPI
Di **ALA IMPIAN**





Profil Perusahaan

Company Profile

Bank Aladin Syariah terus merambah syariah ekosistem dan memperluas pangsa pasar melalui strategi *Offline-to-Online (O2O)*. Bank Aladin Syariah terus mengoptimalkan fungsi intermediasinya dengan meningkatkan aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan.

Bank Aladin Syariah continues to penetrate the sharia ecosystem, and expands its market share by following an *Offline-to-Online (O2O)* strategy.

Bank Aladin Syariah continues to optimize its intermediary function by increasing its activities in collecting third party fund collections and financing distribution.

03

Informasi Umum dan Identitas Bank

Bank's General Information and Identity

Nama Name	PT Bank Aladin Syariah Tbk	
Nama Inisial Initial	Bank Aladin Syariah	
Informasi Perubahan Nama dan Status Bank Information on Change of Bank Name and Status	<ul style="list-style-type: none"> 16 September 1994 - PT Bank Maybank Nusa International 11 September 2000 - PT Bank Maybank Indocorp 23 September 2010 - PT Bank Maybank Syariah Indonesia 20 Desember 2019 - PT Bank Net Indonesia Syariah 3 November 2020 - PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk 3 Juni 2021 - PT Bank Aladin Syariah Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> September 16, 1994 - PT Bank Maybank Nusa International September 11, 2000 - PT Bank Maybank Indocorp September 23, 2010 - PT Bank Maybank Syariah Indonesia December 20, 2019 - PT Bank Net Indonesia Syariah November 3, 2020 - PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk June 3, 2021 - PT Bank Aladin Syariah Tbk
	Adapun terkait kronologis perubahan nama dan status Bank Aladin Syariah berikut alasannya, terlampir pada pembahasan Riwayat Singkat Bank.	The chronology of changes in the name and status of Bank Aladin Syariah, along with the reasons, are included in the Brief History of the Bank.
Tanggal Pendirian Date of Establishment	16 September 1994	September 16, 1994
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta No. 58 tanggal 16 September 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Abid, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) No. C2-15.525.HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10872 Tahun 1994.	Deed No. 58 dated September 16, 1994 which was made before Notary Achmad Abid, S.H., and has been approved by the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia (now Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia) No. C2-15.525.HT.01.01.Th.94 dated October 17, 1994 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 103 dated December 27, 1994, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 10872 Year 1994.
Bidang Usaha Line of Business	Bank Umum Syariah	
Kepemilikan Saham Share Ownership	Kepemilikan Saham Perusahaan per 31 Desember 2023: <ul style="list-style-type: none"> PT Aladin Global Ventures (52,32%) Masyarakat (Kepemilikan di bawah 5%) (47,68%) 	Company Share Ownership as of December 31, 2023: <ul style="list-style-type: none"> PT Aladin Global Ventures (52.32%) Public (Ownership under 5%) (47.68%)
Modal Dasar Authorized Capital	Rp 5.000.000.000.000	IDR 5,000,000,000,000



<p>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-up Capital</p>	<p>: Rp 1.476.839.001.700 (Periode 31 Desember 2023)</p>	<p>IDR 1,476,839,001,700 (As of December 31, 2023)</p>
---	---	---



<p>Informasi Pencatatan Saham Share Listing Information</p>	<p>: Saham Bank telah dicatitkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 1 Februari 2021. Mulai efektif per 30 November 2023, pencatatan saham Bank Aladin Syariah berpindah dari Papan Pengembangan ke Papan Utama.</p>	<p>Bank Aladin Syariah shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) on February 1, 2021. Effective November 30, 2023, the listing of Bank Aladin Syariah shares moved from the Development Board to the Main Board.</p>
---	--	--

<p>Kode Saham Share Code</p>	<p>: BANK</p>
----------------------------------	----------------------

<p>Jumlah Karyawan Total Employees</p>	<p>: 291 orang (2023)</p>	<p>291 employees (2023)</p>
--	----------------------------------	------------------------------------



<p>Alamat Address</p>	<p>: Kantor Pusat Gedung Millenium Centennial Center, Lt 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25. Jakarta Selatan, Indonesia. 12920</p>
---------------------------	--

<p>Telepon Telephone</p>	<p>: +62 21 85500947</p>
------------------------------	---------------------------------

<p>Faksimili Faximile</p>	<p>+62 21 39708007</p>
-------------------------------	-------------------------------

<p>Surel Email</p>	<p>: corsec@aladinbank.id</p>
------------------------	---

<p>Website Perusahaan Company Website</p>	<p>www.aladinbank.id</p>
---	---

<p>Media Sosial Social media</p>	<p>: Instagram : @aladinbank.id Tiktok : aladinbank Linkedin : PT Bank Aladin Syariah Tbk</p>
--------------------------------------	--

<p>Jaringan Usaha Business Network</p>	<p>: Seluruh Indonesia Throughout Indonesia</p>
--	---

Riwayat Singkat Bank

Brief History of Bank



Sekilas tentang Bank Aladin Syariah dan Perkembangannya

PT Bank Aladin Syariah Tbk (Bank), yang selanjutnya disebut "Bank Aladin Syariah", awalnya didirikan sebagai bank umum konvensional dengan nama PT Bank Maybank Nusa International (BMNI), berdasarkan Akta Pendirian No. 58 pada tanggal 16 September 1994. Pendirian ini sebagai bagian dari program kerja sama dalam perjanjian bisnis (Joint Venture) antara dua bank umum, yaitu PT Bank Nusa Nasional (BNN) dan Malayan Banking (Maybank) Berhad yang berasal dari Malaysia.

Lalu, seiring dengan beralihnya kepemilikan saham BMNI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selanjutnya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA, pada tanggal 11 September 2000, BMNI berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp (BMI). Kemudian pada tahun 2010, BMI berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (BMSI) seiring dengan pergantian bidang usaha Bank, dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010.

Bank Aladin Syariah at a Glance and its Development

PT Bank Aladin Syariah Tbk (Bank), hereinafter referred to as "Bank Aladin Syariah", was initially established as a conventional commercial bank under the name PT Bank Maybank Nusa International (BMNI), based on Deed of Establishment No. 58 dated September 16, 1994. This establishment was part of a cooperation program in a business agreement (Joint Venture) between two commercial banks, PT Bank Nusa Nasional (BNN) and Malayan Banking (Maybank) Berhad originating from Malaysia.

Then, with the transfer of BMNI share ownership to the National Bank Restructuring Agency (BPPN), subsequently by the Republic of Indonesia Minister of Finance PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) or PPA, on September 11, 2000, BMNI changed its name to PT Bank Maybank Indocorp (BMI). Then in 2010, BMI changed its name to PT Bank Maybank Syariah Indonesia (BMSI) in line with the change in the Bank's business field, from a conventional commercial bank to a sharia commercial bank based on the Governor of Bank Indonesia Decree No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 dated September 23, 2010.



Kemudian pada tahun 2011, terdapat perubahan pemegang saham, dimana 30.000 lembar saham Bank yang dimiliki oleh PPA dijual kepada Malayan Banking (Maybank) Berhad dan Maybank telah melakukan penjualan 9.451 saham Bank kepada PT Prosperindo. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Aliya S. Azhar S.H., M.H., M.Kn., No. 27 tanggal 19 Desember 2011.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Mei 2019, Malayan Banking Berhad (Maybank) dan PT Prosperindo yang merupakan pemegang saham Bank, menandatangani Perjanjian Pembelian Saham (Agreement for the Sale and Purchase of Shares) dengan PT NTI Global Indonesia (NTI) dan PT Berkah Anugerah Abadi (BAA). Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menjual dan mentransfer seluruh kepemilikan saham Bank oleh Malayan Banking Berhad (Maybank) dan PT Prosperindo kepada NTI dan BAA. Pada tanggal 31 Januari 2020, akuisisi Bank telah berlaku efektif dan disahkan oleh Notaris Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., berdasarkan Akta No. 20 tanggal 31 Januari 2020 mengenai akuisisi Bank. Seiring perubahan pemegang saham, Bank kembali berganti nama menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah (BNIS).

Pada tahun 2020, yakni berdasarkan Akta No. 26 tanggal 6 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham Bank kepada masyarakat dan mencatatkannya pada Bursa Efek Indonesia (BEI), serta mengubah status Bank dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka. Sementara, berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Bank, yang telah diaktakan dalam akta No. 63 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 17 Desember 2020, para Pemegang Saham memberikan persetujuan kepada BAA untuk menjual seluruh sahamnya dalam Bank, yakni sebanyak 2.457.924.400 saham, kepada dan menunjuk sebagai pembelinya, yakni PT Alphaplus Adhigana Asia, sebanyak 204.826.814 saham dan PT NTI Global Indonesia sebanyak 2.253.097.586 saham.

Adapun pada tanggal 22 Januari 2021, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No. S-8/D.04/2021 untuk melakukan penawaran umum perdana 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- (nilai penuh) per saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp103,- (nilai penuh) per saham.

Selanjutnya, seiring dengan perubahan pemegang saham dan berubahnya fokus bisnis, pada tanggal 7 April 2021, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diwakili dalam Akta No. 11 oleh Notaris Yulia S.H., di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan nama dari PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk. Perubahan ini mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021937.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 dan telah disetujui oleh OJK melalui surat No. KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Then in 2011, there was a change in shareholders, where 30,000 Bank shares owned by PPA were sold to Malayan Banking (Maybank) Berhad, and Maybank sold 9,451 Bank shares to PT Prosperindo. This was stated in the Notary Deed No. 27 dated December 19, 2011, made before Aliya S. Azhar S.H., M.H., M.Kn.

Then, on May 15, 2019, Malayan Banking Berhad (Maybank) and PT Prosperindo, as shareholders of the Bank, signed an Agreement for the Sale and Purchase of Shares with PT NTI Global Indonesia (NTI) and PT Berkah Anugerah Abadi (BAA). The purpose of this agreement was to sell and transfer all Bank share ownership by Malayan Banking Berhad (Maybank) and PT Prosperindo to NTI and BAA. On January 31, 2020, the acquisition of the Bank was effective and legalized by Notary Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., based on Deed No. 20 dated January 31, 2020 concerning the acquisition of the Bank. Together with the changes in shareholders, the Bank changed its name again to PT Bank Net Indonesia Syariah (BNIS).

In 2020, namely based on Deed No. 26 dated July 6, 2020, made before Notary Yulia, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the Bank's plan to conduct an Initial Public Offering of Bank shares to the public and listed them on the Indonesia Stock Exchange (BEI), as well as changed the Bank's status from a Limited Company to a Public Company. Then, based on the Bank Shareholder Decision Statement that notarized in deed No. 63 dated 17 December 2020, made before Yulia, S.H., Notary in Jakarta, the Shareholders gave their approval to BAA to sell all their shares in the Bank, namely 2,457,924,400 shares, to the appointed buyer, PT Alphaplus Adhigana Asia, for 204,826,814 shares and PT NTI Global Indonesia for 2,253,097,586 shares.

Then, on January 22, 2021, the Bank received an effective statement from the Financial Services Authority (OJK) in letter No. S-8/D.04/2021 to conduct an initial public offering of 5,000,000,000 shares with a nominal value of Rp100 (full value) per share to the public at an offering price of Rp103 (full value) per share.

Then, in line with changes in shareholders and changes in business focus, on April 7, 2021, at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) in Deed No. 11 by Notary Yulia S.H., in Jakarta, the shareholders approved the change of name from PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk to PT Bank Aladin Syariah Tbk. This change received approval from the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights based on Decree No. AHU-0021937.AH.01.02 of 2021 dated April 12, 2021 and was approved by OJK through letter No. KEP-42/PB.1/2021 dated June 3, 2021 concerning the determination of the use of a business license in the name of PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk to become a business license in the name of PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Sementara itu, pada tanggal 24 September 2021, Bank menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik terkait perubahan nama Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank yang semula bernama PT NTI Global Indonesia menjadi PT Aladin Global Ventures.

Sepanjang tahun 2022, Bank melaksanakan aksi korporasi berupa penambahan modal Bank melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) serta Penambahan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Kedua aksi korporasi tersebut dilakukan Bank dalam rangka memenuhi ketentuan OJK yang disampaikan melalui Peraturan OJK No. 12 Tahun 2022 tentang Konsolidasi Bank Umum, dimana bank umum diwajibkan memiliki modal inti Rp3 triliun per akhir tahun 2022.

Adapun melalui PMTHMETD tanggal 29 Desember 2022, Bank menerbitkan saham baru sejumlah 850.000.000 saham dengan harga pelaksanaan Rp1.400,- (nilai penuh) atau senilai dengan Rp1.190.000.000.000,-. PT BNC Technologies Ventures menyerap seluruhnya saham yang ditawarkan dalam PMTHMETD tersebut dan membuatnya menjadi pemegang saham baru Bank dengan kepemilikan sebesar 5,80%. Sehingga, kepemilikan saham Bank Ladin Syariah per 31 Desember 2022 adalah PT Aladin Global Ventures sebesar 53,67%, PT BNC Technologies Ventures sebesar 5,80%, dan Masyarakat sebesar 40,53%.

Dengan telah dilaksanakannya dua aksi korporasi di tahun 2022, menambah optimisme Bank untuk melakukan pengembangan usaha dengan tetap fokus untuk mendukung perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Indonesia, selaku basis utama nasabah Bank Aladin Syariah. Di tahun 2023, Bank Aladin Syariah terus meningkatkan kualitas layanan yang dapat memudahkan nasabah dalam melakukan perencanaan keuangan dan bertransaksi sehari-hari seperti pembayaran atau pembelian, juga produk pembiayaan yang lebih beragam baik untuk nasabah ritel maupun korporasi.

Di tahun 2023, Bank berupaya memperluas jaringan kerja sama mitra dan terus mengoptimalkan fungsi intermediasinya dengan meningkatkan aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan. Selain itu, guna mendorong penghimpunan dana, Bank meluncurkan produk Deposito untuk nasabah ritel segmen menengah atas dan produk tabungan remaja, serta fitur tabungan rencana Ala Impian dengan membuat tema tabungan baru Ala Impian Qurban. Pada sisi pembiayaan, Bank telah mulai menyalurkan pembiayaan produktif berbasis bagi hasil untuk nasabah UMKM dan Korporasi, serta pembiayaan kendaraan bermotor untuk nasabah ritel. Layanan Bank pun terus dilengkapi melalui peluncuran fitur QRIS sebagai metode pembayaran melalui aplikasi mobile banking dan platform Corporate Internet Banking untuk mempermudah transaksi bagi nasabah korporasi. Layanan tarik setor tunai Bank terus diperluas dan telah tersedia di seluruh gerai Alfamart dan Alfamidi di seluruh Indonesia. Pada triwulan akhir di tahun 2023, Bank juga telah meluncurkan layanan Banking as a Service.

Then, on September 24 2021, the Bank submitted information disclosure to the public on the change in the name of the Bank's Controlling Shareholder (PSP), from originally PT NTI Global Indonesia to PT Aladin Global Ventures.

Throughout 2022, the Bank conducted corporate actions in the form of increasing the Bank's capital through the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD) and Capital Increases without Pre-emptive Rights (PMTHMETD). These two corporate actions were carried out by the Bank to comply with OJK regulations as stated in OJK Regulation No. 12 of 2022 concerning Commercial Bank Consolidation, where commercial banks are required to have a core capital of Rp3 trillion by the end of 2022.

Through, through PMTHMETD on December 29, 2022, the Bank issued new shares totaling 850,000,000 shares with an exercise price of Rp1,400 (full value), or Rp1,190,000,000,000. Whereby PT BNC Technologies Ventures absorbed all the shares offered in the PMTHMETD making it the new shareholder of the Bank with ownership of 5.80%. Thus, the share ownership of Bank Ladin Syariah as of December 31, 2022 was PT Aladin Global Ventures with 53.67%, PT BNC Technologies Ventures with 5.80%, and the Public with 40.53%.

The implementation of these two corporate actions in 2022, added to the Bank's optimism to carry out business development while remaining focused on supporting the development of Indonesian MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), as the main base of Bank Aladin Syariah customers. In 2023, Bank Aladin Syariah continued to improve the quality of its services to make it easier for customers to carry out financial planning and daily transactions such as payments or purchases, as well as introduced a wider variety of financing products for both retail and corporate customers.

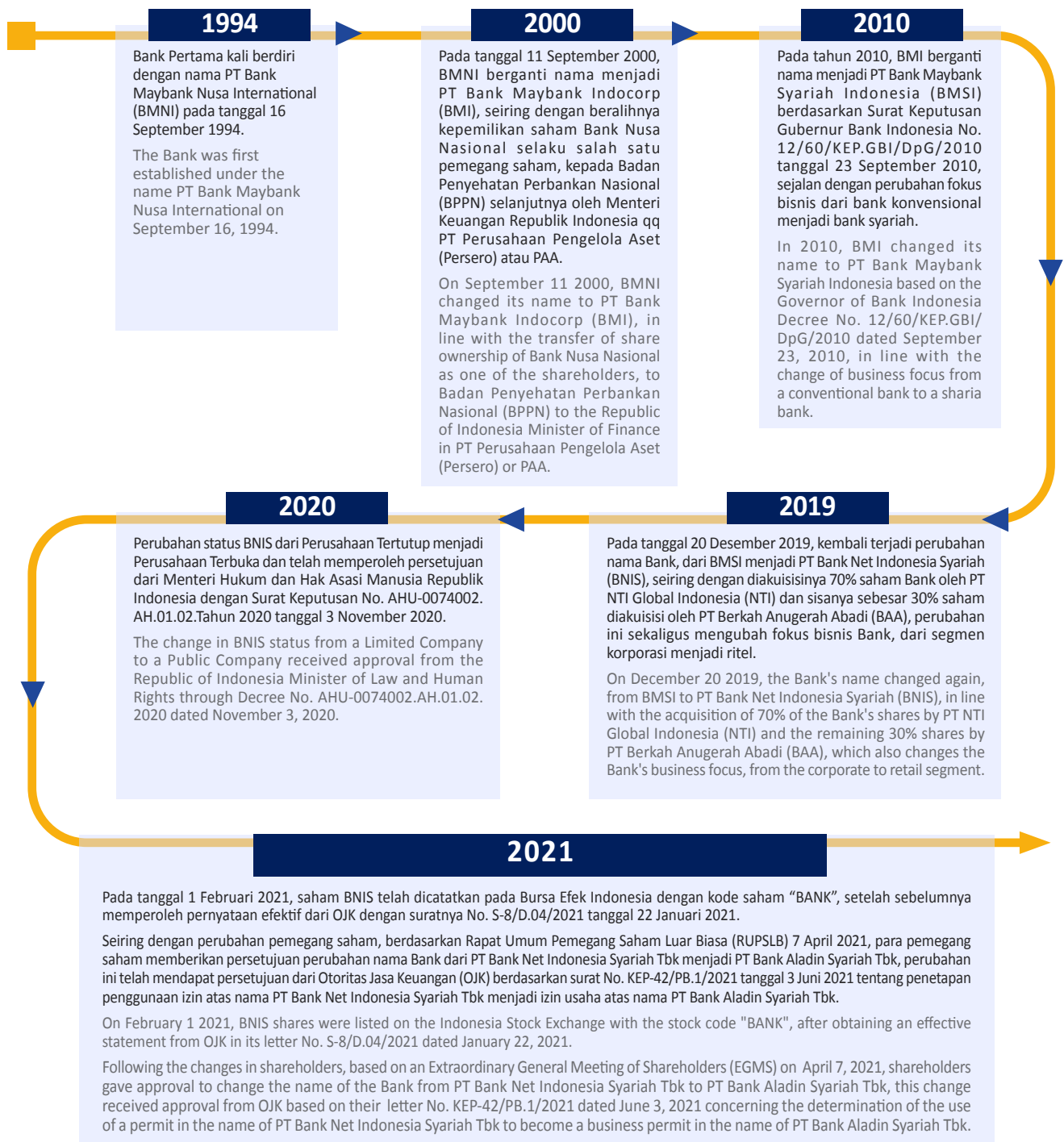
In 2023, the Bank looked to expand its partnership collaboration network and continued to optimize its intermediary function by increasing third party fund collection and financing distribution activities. To encourage fund accumulation, the Bank also launched a deposit product for upper middle segment retail customers and a youth savings product, as well as the Ala Impian savings plan feature by creating a new savings theme Ala Impian Qurban. On the financing side, the Bank has started to distribute productive financing based on profit sharing for MSME and Corporate customers, as well as motor vehicle financing for retail customers. The Bank's services continued to be complemented with the launch of the QRIS feature as a payment method via a mobile banking application and Corporate Internet Banking platform to make transactions easier for corporate customers. The Bank's cash deposit withdrawal service continues to be expanded and is available at all Alfamart and Alfamidi outlets throughout Indonesia. In QIV 2023, the Bank also launched Banking as a Service.

Informasi Perubahan Nama dan Status Bank serta Alasannya

Dalam perkembangannya, Bank telah mengalami sejumlah perubahan nama dan status, sebelum menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk. Berikut kronologis perubahan nama dan status Bank sejak pertamakali didirikan sampai menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk, sebagaimana terlampir di bawah ini.

Information on Changes in Bank Name and Status and Reasons

During its development, the Bank has undergone a number of name and status changes, before becoming PT Bank Aladin Syariah Tbk. The following lists the chronology of name and status changes of the Bank from when it was first established until it became PT Bank Aladin Syariah Tbk.



Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Utama Bank

Vision, Mission, and Key Values of The Bank

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Utama Bank Aladin Syariah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dari Dewan Komisaris dan Direksi, senantiasa dievaluasi dengan menggunakan mekanisme penyusunan Rencana Kerja Bank. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa Visi, Misi, dan Nilai-nilai Utama Bank Aladin Syariah cukup relevan dengan kondisi perkembangan lingkungan bisnis tahun 2023, serta arah dan tujuan bisnis Bank Aladin Syariah.

The Vision, Mission and Key Values of Bank Aladin Syariah, which received joint approval from the Board of Commissioners and Board of Directors, are always evaluated using the mechanism for preparing the Bank's Work Plan. The Board of Commissioners and Board of Directors has assessed that the Vision, Mission and Key Values of Bank Aladin Syariah are still relevant to the development conditions in the business environment in 2023, as well as the business direction and objectives of Bank Aladin Syariah

Visi *Vision*

Menjadi **Bank Syariah Digital Terdepan**

Becoming the Leading Digital Sharia Bank

Misi *Mission*

Bersama, memperkuat ekosistem keuangan syariah yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat.

Together, strengthen and create a beneficial sharia financial ecosystem for the society.



Nilai-Nilai Utama Bank Aladin Syariah

Bank Aladin Syariah Core Values

Bantu | Help

Tulus membantu baik untuk sesama Aladiner maupun kepada masyarakat
Providing sincere support for one another and to society at large

Bangun | Build

Setiap proses dan produk oleh Bank Aladin Syariah
dibangun dengan baik dan berkelanjutan
Assuring that products and processes are built well and sustainable

Tumbuh | Grow

Bank Aladin Syariah menjadi tempat belajar dan berkembang bersama
Aladin Sharia Bank is a place to learn and grow together

Makna Logo Bank

Bank Logo Meaning

Desain logo yang secara keseluruhan bergelombang menunjukkan karakter brand Bank Aladin Syariah yang dinamis. Desain yang nampak bergelombang ini juga sebuah epitomi dari karpet terbang Aladin, yang akan membawa nasabah Bank Aladin Syariah masuk ke dunia baru yang penuh dengan banyak kesempatan.



The overall wavy logo design shows the dynamic character of the Aladin brand. This wavy design is also the epitome of a flying carpet, which will bring Bank Aladin Syariah customers into a new world full of opportunities.



Kegiatan Usaha Serta Produk dan/atau Jasa Bank

Business Activities and Bank Products and/or Services

Kegiatan Usaha Bank Aladin Syariah

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank yang terakhir diubah dan disahkan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 8 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan, maksud dan tujuan Bank Aladin Syariah berdasarkan anggaran dasar adalah menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah Devisa. Namun, Bank Aladin Syariah sampai saat ini hanya menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Bank Aladin Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana berikut:

I. Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan usaha dengan melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian pembiayaan. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia (BI) untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri;
- b. Melaksanakan kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing yang meliputi:
 - Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dengan cakupan yang lebih luas;
 - Kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance);
 - Kegiatan treasury secara terbatas;
 - Jasa lainnya;
 - Kegiatan dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan kerjasama; dan
 - Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan yang lebih luas;
- c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

Bank Aladin Syariah Business Activities

Business Activities Based on the Articles of Association

on the Bank's Articles of Association which were last amended and ratified through the Deed of Meeting Resolution No. 41 dated July 8, 2022, made before Notary Yulia SH, Notary in South Jakarta, the aims and objectives of Bank Aladin Syariah based on the articles of association are to carry out business activities as a Sharia Foreign Exchange Commercial Bank. However, Bank Aladin Syariah currently only carries out business activities as a Sharia Commercial Bank.

To achieve the aims and objectives mentioned above, Bank Aladin Syariah carries out the following business activities:

I. Main Business Activities:

- a. Carrying out business by through banking activities that follow sharia principles, the main activity is collecting public funds in the form of savings and syirkah whose rules follow Islamic law and redistributing the funds in the form of providing financing. Sharia commercial banks are sharia banks that in their activities provide services for payment traffic and have obtained a letter of appointment from Bank Indonesia (BI) to carry out banking business activities in foreign currency and/or carry out banking transactions with foreign parties;
- b. Carrying out business activities in Rupiah and foreign currency includes:
 - Fund raising activities as basic products or activities;
 - Fund distribution activities as basic products or activities with a wider scope;
 - Trade finance activities ;
 - Limited treasury activities;
 - Other services;
 - Activities with a wider scope for agency and collaboration; and
 - Payment system and electronic banking activities with a wider scope;
- c. Carrying out other activities commonly carried out by a Bank as long as they do not conflict with sharia principles and statutory regulations;
- d. Collecting funds in the form of savings in the form of current accounts, savings, or other similar forms based on wadi'ah contracts or other contracts that do not conflict with sharia principles;

- e. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- g. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad istishna atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- i. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/ atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- j. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- k. Melakukan usaha kartu debit dan /atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- l. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan antara lain:
- wakalah;
 - hawalah;
 - kafalah;
 - rahn.
- m. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah;
- n. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia (BI);
- o. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- p. memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- q. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- r. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- s. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
- t. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- u. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- v. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;
- w. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bank Indonesia (BI) dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
- e. Collecting investment funds in the form of deposits, savings, or other similar forms based on mudharabah contracts or other contracts that do not conflict with sharia principles;
- f. Distributing profit sharing financing based on mudharabah contracts, musyarakah contracts, or other contracts that do not conflict with sharia principles;
- g. Distributing financing based on mudharabah contracts, salam contracts, istishna contracts or other contracts that do not conflict with sharia principles;
- h. Channeling financing based on qardh contracts or other contracts that do not conflict with sharia principles;
- i. Channeling financing for the rental of movable or immovable goods to customers based on ijarah contracts and/or hire purchase contracts in the form of ijarah muntahiyah bittamlik or other contracts that do not conflict with sharia principles;
- j. Carrying out debt acquisition based on hawalah contracts or other contracts that do not conflict with sharia principles;
- k. Carrying out debit card and/or financing card business based on sharia principles;
- l. Providing banking services based on:
- wakalah;
 - hawalah;
 - kafalah;
 - rahn.
- m. Buying, selling and/or guaranteeing at your own risk third party securities issued on the basis of actual transactions (underlying transactions) and based on sharia principles;
- n. Purchasing securities based on sharia principles issued by the Government and/or Bank Indonesia (BI);
- o. Receiving payments from claims on securities and carrying out calculations with third parties or between third parties based on sharia principles;
- p. transferring money for own and/or customer interests based on sharia principles;
- q. Placing funds with, borrowing funds from, or lending funds to other banks, whether using letters, telecommunication facilities or by bearer money orders, checks or other means;
- r. Providing a place to store goods and securities based on the principles of wadi'ah yad amanah or other principles based on sharia principles;
- s. Carrying out custodial activities including administration for the benefit of another party based on a contract based on sharia principles;
- t. Providing letter of credit (L/C) facilities based on sharia principles;
- u. Providing bank guarantee facilities based on sharia principles;
- v. Carrying out trustee activities based on the wakalah agreement;
- w. Carrying out other activities commonly carried out by banks as long as they are approved by the Financial Services Authority (OJK) and/or Bank Indonesia (BI) and obtain a fatwa from the National Sharia Council (DSN).



II. Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- h. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui pasar modal;
- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan pada Tahun Buku

Kegiatan usaha yang dijalankan Bank Aladin Syariah di tahun buku, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, dimana ruang lingkup kegiatan Bank adalah melakukan usaha di bidang Bank Umum Syariah Devisa dengan kegiatan usaha utama melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah.

Produk dan/atau Jasa Bank Aladin Syariah

Jenis Produk

Bank Aladin Syariah memiliki dua jenis produk yang dijalankan saat ini, yakni produk simpanan dan produk pembiayaan, dengan penjelasan sebagaimana berikut.

I. Produk Simpanan

Saat ini, Bank Aladin Syariah tidak hanya fokus pada nasabah dari segmen ritel, namun juga berperan sebagai lembaga intermediasi untuk melayani segmen non-ritel (SME & Korporasi). Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah di kedua segmen tersebut, Bank Aladin Syariah menyajikan produk simpanan berbasis prinsip syariah, antara lain:

1. Giro iB (akan segera diluncurkan)
Produk Giro iB ditujukan untuk memenuhi kebutuhan transaksional nasabah dari segmen ritel dan non-ritel. Produk ini didasarkan pada akad wadi'ah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah dapat melakukan penarikan dana kapan saja dengan berbagai media transaksi seperti cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

II. Business Support Activities:

- a. Carrying out foreign exchange activities based on sharia principles;
- b. Carrying out capital investment activities in sharia financial institutions in Indonesia;
- c. Carrying out temporary capital investment activities to overcome the consequences of financing failure based on sharia principles with the condition that the participation must be withdrawn;
- d. Acting as founder and administrator of pension funds based on sharia principles;
- e. Carrying out activities in the capital market as long as they do not conflict with sharia principles and statutory provisions in the capital market sector;
- f. Carrying out banking activities or products based on sharia principles using electronic means;
- g. Issuing, offering and trading short-term securities based on sharia principles, either directly or indirectly, through the money market;
- h. Issuing, offering and trading long-term securities based on sharia principles, either directly or indirectly through the capital market;
- i. Providing products or carrying out other sharia commercial banking business activities based on sharia principles.

Business Activities Carried Out in the Fiscal Year

The business activities carried out by Aladin Syariah Bank in the fiscal year are as stated in Article 3 of the Bank's Articles of Association, where the scope of the Bank's activities is carrying out business in the Sharia Foreign Exchange Commercial Bank sector with the main business activity of carrying out banking business activities with sharia principles.

Aladin Syariah Bank Products and/or Services

Types of Products

Bank Aladin Syariah currently has two types of products, savings products and financing products, with an explanation as follows.

I. Savings Products

Currently, Bank Aladin Syariah not only focuses on customers from the retail segment, but also acts as an intermediation institution to serve the non-retail segment (SME & Corporate). To meet customer needs in these two segments, Bank Aladin Syariah provides savings products based on sharia principles, including:

1. iB Giro (to be launched soon)
iB Giro products are aimed at meeting the transactional needs of customers from the retail and non-retail segments. This product is based on a wadi'ah contract or other contracts that are in accordance with sharia principles. Customers can withdraw funds at any time using transaction media such as checks, giro bills, other payment order facilities, or by transfer orders.

2. Tabungan iB

Tabungan iB adalah produk yang dirancang khusus untuk nasabah segmen ritel dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan transaksional dan perencanaan keuangan. Produk ini didasarkan pada akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Penarikan dana dari Tabungan iB hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik melalui cek, bilyet giro, atau alat pembayaran serupa.

Bank saat ini telah menyediakan produk seperti Tabungan Ala Dompot dan Tabungan Ala Impian untuk nasabah segmen ritel, serta Tabungan Ala Bisnis untuk nasabah segmen non-ritel. Produk untuk nasabah segmen ritel dapat diakses melalui aplikasi Aladin, sementara nasabah non-ritel dapat mengaksesnya melalui internet banking atau cabang Bank Aladin Syariah.

3. Deposito iB

Deposito iB dapat digunakan oleh nasabah dari segmen ritel dan non-ritel. Deposito iB adalah produk berbasis investasi yang didasarkan pada akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Penarikan dana dari deposito iB hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad yang disepakati antara nasabah penyimpanan dan Bank.

II. Produk Pembiayaan

Bank Aladin Syariah, memiliki komitmen untuk memberikan pembiayaan kepada debitur yang terlibat dalam beragam sektor usaha, termasuk perdagangan besar, menengah, dan kecil. Bank akan menyediakan pembiayaan kepada para pelaku UMKM yang tergabung dalam jaringan mitra bisnis mereka.

Bank telah memiliki produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, yakni Invoice Financing iB, dimana produk ini merupakan produk pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja jangka pendek. Produk pembiayaan ini diselenggarakan sesuai dengan prinsip syariah dan berkaitan dengan transaksi perdagangan. Hal itu dapat diberikan baik kepada pembeli (buyer) maupun penjual (seller/supplier) yang terlibat dalam perdagangan. Tujuannya adalah untuk membantu perputaran kas nasabah yang mengajukan invoice sebagai dasar utama untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Segmentasi Produk

Adapun dari sisi segmentasi, produk yang ditawarkan Bank Aladin Syariah saat ini adalah sebagaimana terlampir berikut ini:

I. Segmen Retail

1. Ala Dompot

Produk Ala Dompot adalah bentuk tabungan yang didasarkan pada prinsip Akad Mudharabah. Produk ini dirancang untuk memenuhi keperluan transaksi perbankan sehari-hari dan dapat dihubungkan dengan Kartu Debit yang diterbitkan oleh Bank.

2. iB Savings

iB Savings is a product specifically designed for retail segment customers with the aim of supporting transactional and financial planning needs. This product is based on a wadi'ah contract or investment of funds based on a mudharabah contract or other contracts that comply with sharia principles. Withdrawing funds from iB Savings can only be made in accordance with certain agreed terms and conditions, but cannot be withdrawn via check, giro or similar payment instruments.

Currently the Bank provides products such as Ala Dompot Savings and Ala Impian Savings for retail segment customers, as well as Ala Bisnis Savings for non-retail segment customers. Products for retail segment customers can be accessed via the Aladin application, while non-retail customers can access them via internet banking or Bank Aladin Syariah branches.

3. iB Deposits

iB deposits can be used by customers in the retail and non-retail segments. iB Deposits are investment-based products based on mudharabah contracts or other contracts that comply with sharia principles. Withdrawals from iB deposits can only be made at certain times based on an agreement between the deposit customer and the Bank.

II. Financing Products

Bank Aladin Syariah is committed to providing financing to debtors involved in business sectors, including large, medium and small trade. The Bank will provide financing to MSME businesses who are members of a business partner network.

The Bank has financing products to meet customer needs, including iB Invoice Financing, a financing product used for short-term working capital. This financing product is carried out in accordance with sharia principles and is related to trade transactions. This can be given to both buyers and sellers/suppliers involved in trade. The aim is to help cash circulation for customers who submit invoices as the main basis for obtaining financing facilities.

Product Segmentation

For segmentation, the products currently offered by Bank Aladin Syariah are described below:

I. Retail Segment

1. Ala Dompot

Ala Dompot products are a form of savings based on the principles of a Mudharabah Agreement. This product is designed to meet daily banking transaction needs and can be linked to a Debit Card issued by the Bank.



2. **Ala Impian**
Ala Impian merupakan produk tabungan berdasarkan Akad Mudharabah yang bertujuan untuk membantu nasabah merencanakan keuangan mereka. Nasabah dapat menetapkan target waktu atau jumlah tabungan sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. **Ala Berbagi**
Ala Berbagi adalah layanan yang tersedia melalui aplikasi mobile Aladin. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk berdonasi melalui Lembaga Amil Zakat yang telah menjalin kemitraan dengan Bank dan dikenal sebagai lembaga yang terpercaya.
4. **Layanan Bill Payment**
Layanan *Bill payment* yang disediakan dalam aplikasi mobile Aladin membantu nasabah untuk membayar berbagai tagihan utilitas bulanan, membeli token listrik, pulsa, maupun paket data.
5. **Tarik dan Setor Tunai**
Layanan Tarik dan Setor Tunai membantu nasabah untuk menarik dan menyetor uang tunai tanpa perlu menggunakan kartu debit. Layanan ini dapat diakses melalui seluruh outlet Alfamart di seluruh Indonesia.

II. Segmen Bisnis

1. **Tabungan Ala Bisnis**
Tabungan Ala Bisnis adalah produk tabungan yang menggunakan prinsip Akad Mudharabah yang disediakan oleh Aladin untuk mempermudah transaksi yang berkaitan dengan tujuan keuangan khusus perusahaan. Produk ini ditawarkan dengan nisbah yang kompetitif.
2. **Deposito Ala Bisnis**
Deposito Ala Bisnis adalah produk deposito yang menggunakan prinsip Akad Mudharabah yang disediakan oleh Aladin untuk mempermudah transaksi yang berkaitan dengan tujuan keuangan khusus perusahaan. Produk ini ditawarkan dengan nisbah yang kompetitif.
3. **Invoice Financing**
Invoice Financing atau yang dikenal sebagai anjak piutang, adalah layanan pembiayaan yang berfokus pada pengelolaan penagihan piutang. Layanan ini didasarkan pada bukti tagihan (invoice) dan dapat mencakup tindakan penagihan dengan atau tanpa talangan (qardh). Layanan ini diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor).
4. **Pembiayaan Modal Kerja**
Pembiayaan Modal Kerja adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung modal kerja perusahaan dengan jangka waktu tertentu dengan periode waktu yang pendek. Layanan ini ditujukan bagi pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip syariah.

2. **Ala Impian**
Ala Impian is a savings product based on a Mudharabah Agreement which aims to help customers plan their finances. Customers can set a time target or savings amount according to their needs.
3. **Ala Berbagi**
Ala Berbagi is a service available through the Aladin mobile application. This service allows customers to donate through the Amil Zakat Institution that has established a partnership with the Bank and is known as a trusted institution.
4. **Bill Payment Service**
Bill Payment Service provided in the Aladin mobile application helps customers pay monthly utility bills, buy electricity tokens, credit and data packages.
5. **Cash Withdraw and Deposit**
The Cash Withdrawal and Deposit service helps customers withdraw and deposit cash without needing to use a debit card. This service can be accessed through all Alfamart outlets throughout Indonesia.

II. Business Segment

1. **Ala Bisnis Savings**
Ala Bisnis is a savings product that uses the principles of the Mudharabah Agreement provided by Aladin to facilitate transactions related to the company's specific financial goals. This product is offered with competitive ratios.
2. **Ala Bisnis Deposits**
Ala Bisnis Deposits are deposit products that use the principles of the Mudharabah Agreement provided by Aladin to facilitate transactions related to the company's specific financial goals. This product is offered with competitive ratios.
3. **Invoice Financing**
Invoice Financing also known as factoring, is a financing service that focuses on managing receivables collection. This service is based on proof of billing (invoice) and can include collection actions with or without bailout (qardh). This service is provided to business actors who have bills from third parties (payors).
4. **Working Capital Financing**
Working Capital Financing is a form of financing that aims to support a company's working capital for a certain period of time over a short period of time. This service is aimed at businesses that needs additional working capital in accordance with sharia principles.

Wilayah Operasional Bank

Bank Operational Area





Sebagai bank digital terdepan di Indonesia, Bank Aladin Syariah terus merambah syariah ekosistem dan memperluas pangsa pasar melalui strategi Offline-to-Online (O2O) yang bekerjasama dengan salah satu minimarket terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan demikian, wilayah operasional Bank Aladin Syariah adalah mencakup seluruh provinsi di Indonesia.

As the leading digital bank in Indonesia, Bank Aladin Syariah continues to penetrate the sharia ecosystem and expands its market share through an Offline-to-Online (O2O) strategy in collaboration with one of the largest minimarkets in Indonesia that has a network in all provinces in Indonesia. Thus, Bank Aladin Syariah's operational area covers all provinces in Indonesia.



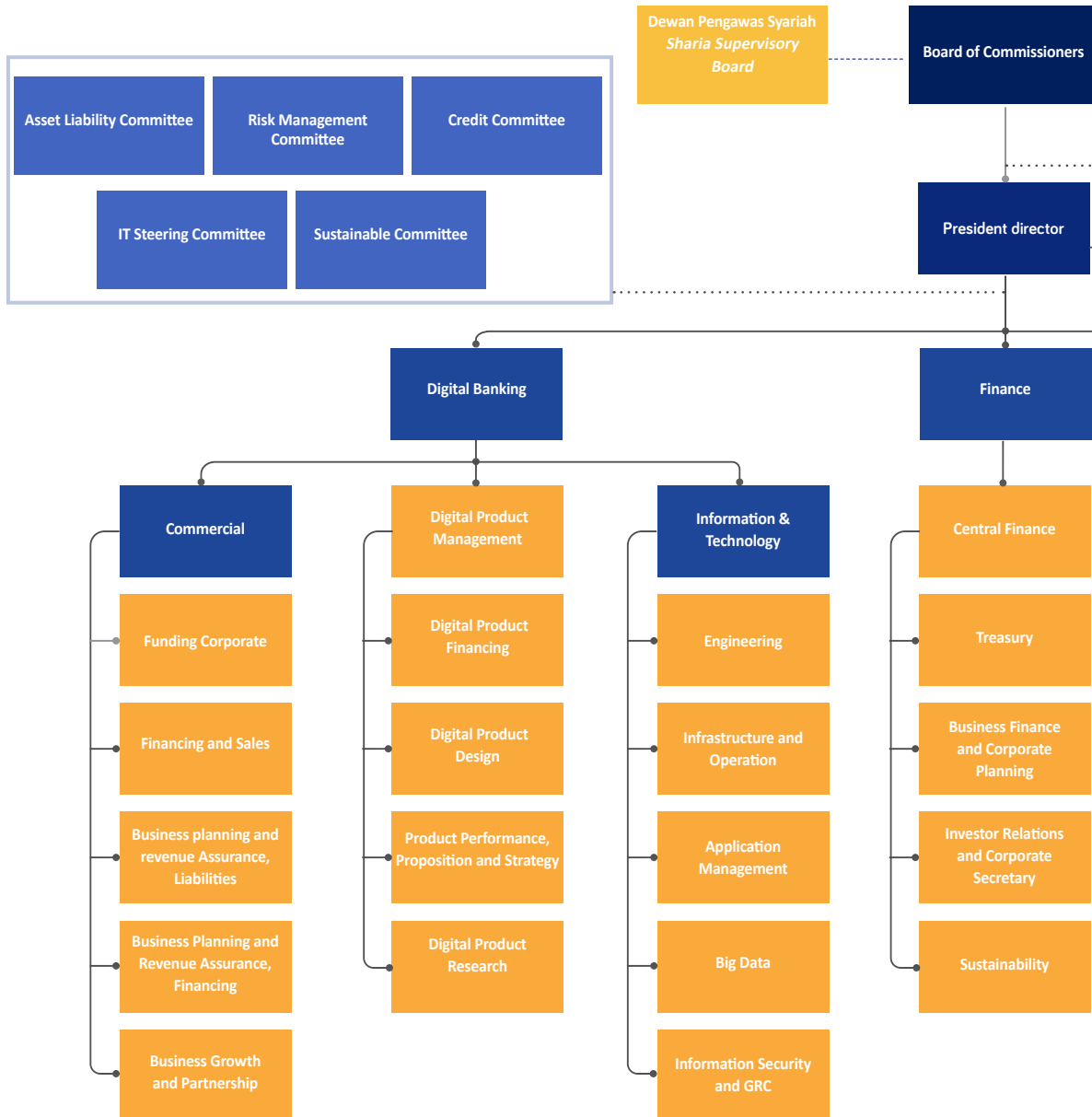
Struktur Organisasi Bank

Bank Organizational Structure

Sejalan dengan dinamika bisnis yang terus berkembang dan berubah, Bank terus melakukan penguatan struktur organisasi demi mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi Aladin Bank telah disahkan melalui Surat Keputusan No. 307 tanggal 31 Desember 2023 tentang Struktur Organisasi PT Bank Aladin Syariah Tbk. Berikut struktur organisasi Aladin Bank per 31 Desember 2023, sebagaimana terlampir di bawah ini.

In line with the business dynamics that continue to develop and change, the Bank continues to strengthen its organizational structure to achieve its common goals. Bank Aladin's organizational structure was approved through Decree No. 307 dated December 31, 2023 concerning the Organizational Structure of PT Bank Aladin Syariah Tbk. The following shows the Bank Aladin organizational structure as of December 31, 2023.

Struktur Organisasi Bank Aladin Syariah per 31 Desember 2023
Bank Aladin Syariah Organizational Structure as of December 31, 2023

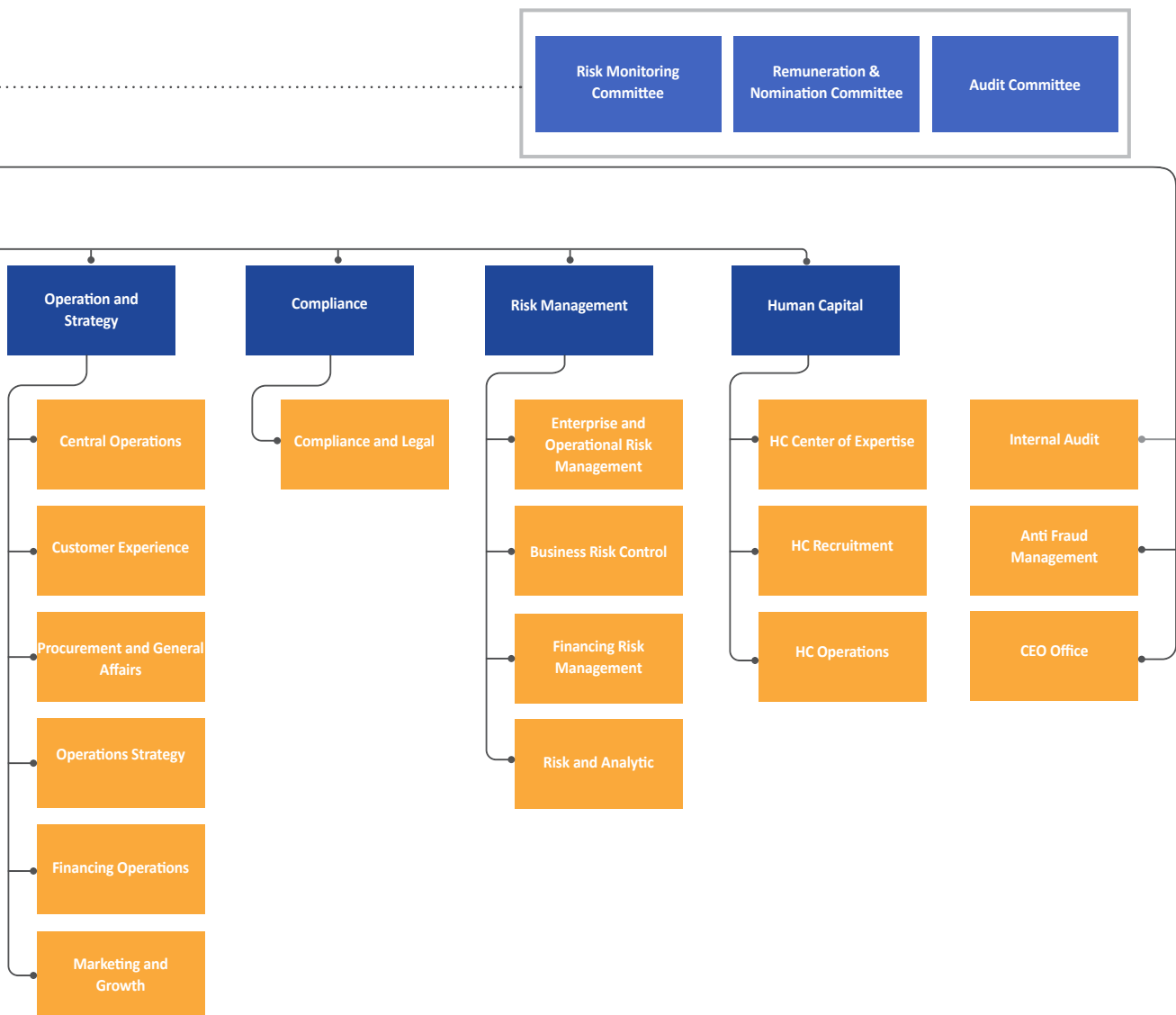


Sebagaimana terlampir pada bagan struktur organisasi di atas, Direksi Bank Aladin Syariah dibantu oleh 5 (lima) Komite Eksekutif yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Bank. Sementara itu, untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) Komite di bawah Dewan Komisaris sebagaimana terlampir pada struktur organisasi di atas.

Adapun informasi terkait struktur organisasi Komite Eksekutif telah diuraikan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada laporan tahunan ini, begitupun dengan struktur organ Komite di bawah Dewan Komisaris berikut nama dan jabatannya.

As shown in the organizational structure chart above, Bank Aladin Syariah's Board of Directors is assisted by 5 (five) Executive Committees that were established to assist in the duties and responsibilities of managing the Bank. Meanwhile, to assist the Board of Commissioners in carrying out supervision, the Board of Commissioners established 3 (three) Committees under the Board of Commissioners as shown in the organizational structure above.

Information on the Executive Committee organizational structure is described in the Corporate Governance Chapter of this annual report, as well as the organ structure of the Committees under the Board of Commissioners together with their names and positions.



Keanggotaan Bank Dalam Asosiasi atau Organisasi

Bank Membership In Associations or Organizations

Sampai akhir tahun 2023, Bank Aladin Syariah telah menjadi anggota dari beberapa asosiasi atau organisasi, baik dalam skala nasional maupun internasional, yaitu:

- Nasional
 1. Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)
 2. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)
 3. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)
 4. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI)
 5. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- Internasional
 1. UN Global Compact Network Indonesia (UNGC)
 2. UN Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI) – Principles for Responsible Banking

Until the end of 2023, Bank Aladin Syariah has become a member of several associations or organizations, both on a national and international scale, including:

- National
 1. Association of Indonesian Banks (ASBISINDO)
 2. Indonesian Payment System Association (ASPI)
 3. Indonesian Fintech Association (AFTECH)
 4. Indonesian Sharia Fintech Association (AFSI)
 5. Membership of the MUI National Sharia Council (DSN)
- International
 1. UN Global Compact Network Indonesia (UNGC)
 2. UN Environment Program Finance Initiative (UNEP FI) - Principles for Responsible Banking

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Profile

Sepanjang tahun 2023 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris, namun terdapat pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya, sebagaimana tertuang dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 21 Juni 2023.

In 2023 until this Annual Report was signed, there were no changes to the structure and membership composition of the Board of Commissioners, however there were re-appointments of Board of Commissioners members whose term of office had expired, as stated in the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on June 21, 2023.



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Profile

Rudy Hamdani
Presiden Komisaris (Independen)
President Commissioner (Independent)

Masa Jabatan: 29 Juli 2021 – Penutupan RUPS tahun ketiga
Term of Office: July 29, 2021 – Closing of the third year GMS

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 61 tahun per 31 Desember 2023

Domisili

Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 29 Juli 2021 yang telah diaktakan melalui Akta No. 54 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia, S.H Notaris, di Jakarta. Kemudian diangkat sebagai Presiden Komisaris berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Februari 2022 yang telah diaktakan melalui Akta No. 38 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia, S.H Notaris di Jakarta.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-24/D.03/2022 tanggal 18 Februari 2022

Riwayat Pendidikan

Sarjana Sains, Economics and Business Administration, St. Mary College of California (1987).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris (Independen) PT Bank Aladin Syariah Tbk pada Februari 2022 beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Danakita Investama sejak Desember 2013 hingga Juli 2021. Beliau sempat menjabat sebagai Vice President Director PT Sequis Life Insurance Indonesia (Agustus 2017 - Juli 2018). Beliau memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan sejak tahun 1989, yakni di PT Bank Internasional Indonesia (BII) bermula menjabat sebagai Account Officer sampai menjabat sebagai Direktur Perbankan Konsumer (Maret 2000 - April 2007). Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur Perbankan Konsumer PT Bank OCBC NISP Tbk (Mei 2007 - April 2013).

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain. Di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau juga merangkap sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, serta sebagai Anggota Komite Audit, dan Anggota Komite Pemantau Risiko.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham BANK

Beliau tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah.

Personal Data

Indonesian citizens
Age 61 years old as of December 31, 2023

Domicile

Indonesia

Appointment History

Appointed for the first time as Independent Commissioner based on the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on July 29, 2021, which was notarized through Deed No. 54 dated July 29, 2021, made before Notary Yulia, S.H Notary, in Jakarta. Then was appointed as President Commissioner based on the Extraordinary GMS on February 10, 2022, which was notarized through Deed No. 38 dated February 10, 2022, made before Notary Yulia, S.H., Notary in Jakarta.

Fit and Proper Test

Passed the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK) as stated in OJK Board of Commissioners Decree No. KEP- 24/D.03/2022 dated February 18, 2022.

Educational Background

Bachelor of Science, Economics and Business Administration, St. Mary College of California (1987).

Employment History

Prior to serving as President Commissioner (Independent) of PT Bank Aladin Syariah Tbk in February 2022, served as President Commissioner of PT Danakita Investama from December 2013 to July 2021. Also served as Vice President Director of PT Sequis Life Insurance Indonesia (August 2017 - July 2018). Has a long experience in the Banking world since 1989, namely at PT Bank Internasional Indonesia (BII) starting as an Account Officer until serving as Director of Consumer Banking (March 2000 - April 2007). Then served as Consumer Banking Director of PT Bank OCBC NISP Tbk (May 2007 - April 2013).

Information on Concurrent Positions

Has no concurrent positions in other companies or institutions, but concurrently serves as Chair of the Remuneration and Nomination Committee, as well as a Member of the Audit Committee, and as a Member of the Risk Monitoring Committee.

Affiliated Relationship

Has no affiliated relationship with members of Board of Directors, Sharia Supervisory Board and other members of Board of Commissioners, or with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

BANK Shares Ownership

Does not have share ownership in Bank Aladin Syariah.

Ationo Teguh Basuki

Komisaris
Commissioner



Masa Jabatan: 21 Juni 2023 – Penutupan RUPS tahun ketiga

Term of Office: June 21, 2023 – Closing of the third year GMS

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 63 tahun per 31 Desember 2023

Domisili

Indonesia

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Bank pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler Tahun 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020, dibuat oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., di Jakarta. Kemudian beliau diangkat kembali sebagai Komisaris berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. SR-30/PB.101/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) Calon Presiden Komisaris PT Bank Net Indonesia Syariah.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik jurusan Teknik Elektro dari Insititut Teknologi Bandung, Jawa Barat (1985).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum bergabung dengan Bank Aladin Syariah, beliau memiliki pengalaman panjang di industri perbankan. Di antaranya menjabat Direktur Kepatuhan Bank Index (2018-2019), Direktur IT & E-Channel Bank Index (2015-2018), Direktur Pengembangan Bisnis Bank Index (2011-2015), Direktur Bisnis Support Bank Index (2008-2011). Pengalaman lain beliau adalah menduduki posisi Advisor untuk Direksi di Bidang Operasional Bank Index (2008-2008), Kepala Bidang Operasi di Panin Bank (2004-2007), Kepala Bagian Pelayanan Jasa KCU di Panin Bank (1997-2003), Kepala Bagian Administrasi Operasi KCU Senayan di Panin Bank (1996-1997), Pemimpin KCP Tanah Abang di Panin Bank (1994-1995) dan Koordinator Marketing KCU Senayan di Panin Bank (1993-1994).

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau juga merangkap sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham BANK

Beliau tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah.

Personal Data

Indonesian citizens
Age 63 years old as of December 31, 2023

Domicile

Indonesia

Appointment History

Appointed as Bank Commissioner for the first time based on the decision of the 2020 Circular GMS with minutes in Notarial Deed No. 149 dated May 28, 2020, made by Notary Eliwaty Tjitra, S.H., in Jakarta. Then he was reappointed as Commissioner based on the decision of the Annual GMS dated June 21, 2023 which was notarized through the Deed of Meeting Decision Statement No. 12 dated July 6, 2023 made before Notary Yulia S.H., Notary in South Jakarta.

Fit and Proper Test

Passed the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK) as stated in OJK Board of Commissioners Decree No. SR-30/PB.101/2020 dated October 15, 2020 concerning Decision on the results of the fit and proper test for the Candidate for President Commissioner of PT Bank Net Indonesia Syariah.

Educational Background

Bachelor of Engineering degree majoring in Electrical Engineering from Insititut Teknologi Bandung, Jawa Barat (1985).

Employment History

Prior to joining Bank Aladin Syariah, had a long experience in Banking industry including serving as Director of Compliance at Bank Index (2018-2019), Director of IT & E-Channel Bank Index (2015-2018), Director of Business Development for Bank Index (2011-2015), Director of Support Business for Bank Index (2008-2011). Other experiences include holding the position of Advisor to Board of Directors in the Field of Operations at Bank Index (2008-2008), Head of Operations at Panin Bank (2004-2007), Head of KCU Services at Panin Bank (1997-2003), Head of Operations Administration Section KCU Senayan at Panin Bank (1996-1997), Head of KCP Tanah Abang at Panin Bank (1994-1995) and KCU Senayan Marketing Coordinator at Panin Bank (1993-1994).

Information on Concurrent Positions

Does not have concurrent positions in other companies or institutions, while Bank Aladin Syariah, is concurrently serves as a Member of the Risk Monitoring Committee.

Affiliated Relationship

Has no affiliation with members of Board of Directors, Sharia Supervisory Board and other members of Board of Commissioners, as well as with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

BANK Shares Ownership

Does not have share ownership in Bank Aladin Syariah.

Fransisca Ekawati

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Masa Jabatan: 21 Juni 2023 – Penutupan RUPS tahun ketiga

Term of Office: June 21, 2023 – Closing of the third year GMS

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 58 tahun per 31 Desember 2023

Domisili

Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia 14/1/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012. Kemudian beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Bank Indonesia (BI) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/1/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta (1988).

Riwayat Pekerjaan

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Aladin Syariah Tbk. Sebelum Bank diakuisisi dan mengalami perubahan nama, beliau tercatat menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Maybank Syariah Indonesia sejak 15 Maret 2012. Beliau memiliki pengalaman panjang di berbagai korporasi, di antaranya mendapat penugasan dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagai Direktur PT SIPPA Kemasan Internasional (April 2020 - September 2021), General Manager Treasury PPA (Juni 2019 - April 2020), General Manager Business Advisory & Asset Management PPA (Juli 2014-Juni 2019), General Manager Monitoring and Administration of Equity Management (Mei 2004 - Juni 2014), kemudian menjabat posisi Group Head Analisa dan Pengkajian Pengelola Bank Unit Restrukturisasi Bank pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (Desember 1999 - April 2004), serta berkarier di PT Bank Pesona Kriyadana sejak tahun 1989 dengan posisi terakhir sebagai Kepala Sub Divisi Pengembangan Cabang.

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit, serta sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Pernyataan Independensi

Beliau telah menyampaikan pernyataan independensi kepada RUPS dan telah membuat surat pernyataan independensi yang ditandatangani pada tanggal 2 April 2007.

Kepemilikan Saham BANK

Beliau tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah.

Personal Data

Indonesian citizens
Age 58 years old as of December 31, 2023

Domicile

Indonesia

Appointment History

Appointed for the first time as Independent Commissioner based on Governor of Bank Indonesia Decree No. 14/1/GBI/DPbS dated March 15, 2012. Then was reappointed as Independent Commissioner based on the decision of the Annual GMS dated June 21, 2023, which was notarized through the Deed of Meeting Decision Statement No. 12 dated July 6, 2023, made before Notary Yulia SH, Notary in South Jakarta.

Fit and Proper Test

Passed the fit and proper test by Bank Indonesia (BI) as stated in the Governor of Bank Indonesia Decree No. 14/1/GBI/DPbS dated March 15, 2012.

Educational Background

Bachelor of Economics degree, Majoring in Management, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta (1988).

Employment History

Currently serves as Independent Commissioner of PT Bank Aladin Syariah Tbk. Before the Bank was acquired and underwent a name change, was an Independent Commissioner of PT Bank Maybank Syariah Indonesia since March 15, 2012. Has a long experience in various corporations, including being assigned by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) as Director of PT SIPPA Kemasan Internasional (April 2020-September 2021), General Manager Treasury at PPA (June 2019 - April 2020), General Manager Business Advisory & Asset Management at PPA (July 2014-June 2019), General Manager Monitoring and Administration of Equity Management (May 2004- June 2014), then held the position of Group Head of Analysis and Assessment of Bank Management at Bank Restructuring Unit at the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (December 1999-April 2004), and had a career at PT Bank Pesona Kriyadana since 1989 with the last position as Head of Branch Development Sub Division.

Information on Concurrent Positions

Does not have concurrent positions in other companies or institutions, while in Bank Aladin Syariah, serves as Chair of the Audit Committee, as well as Chair of the Risk Monitoring Committee.

Affiliated Relationship

Has no affiliation with members of Board of Directors, Sharia Supervisory Board and other members of Board of Commissioners, as well as with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

Independence Statement

Has submitted a statement of independence to the GMS and has made a statement of independence which was signed on April 2, 2007.

BANK Shares Ownership

Does not have share ownership in Bank Aladin Syariah.

Profil Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board's Profiles

Sepanjang tahun 2023 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Pengawas Syariah, namun terdapat pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah yang telah habis masa jabatannya, sebagaimana tertuang dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 21 Juni 2023.

Throughout 2023 until this Annual Report was signed, there were no changes in the structure and membership composition of the Sharia Supervisory Board. The profiles of the Sharia Supervisor Board members who served as of December 31, 2023 until this Annual Report was signed, are as follows.

Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chair of Sharia Supervisory Board



Masa Jabatan: 21 Juni 2023 – Penutupan RUPS tahun ketiga

Term of Office: June 11, 2023 – Closing of the third year GMS

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 47 tahun per 31 Desember 2023

Domisili

Indonesia

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler Tahun 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020, dibuat oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., di Jakarta. Kemudian beliau diangkat kembali sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan.

Riwayat Pendidikan

S3 - Doktor Konsentrasi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2008).

Riwayat Pekerjaan

Selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Deputy 2 Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua DPS Maybank Syariah (2010 - Januari 2020). Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT BESS Finance, Jakarta (2008-sekarang). Dosen di UIN Jakarta (2004-sekarang). Pengasuh Ponpes Al-Nahdlah, Depok, Jawa Barat (2006-sekarang).

Informasi Rangkap Jabatan

Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. memiliki rangkap jabatan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Deputy 2 Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, Ketua DPS di PT FWD Asuransi. Anggota DPS PT Pegadaian (Persero), Dosen di UIN Jakarta (2004-sekarang), dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Nahdlah, Depok, Jawa Barat (2006-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham BANK

Beliau tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah.

Personal Data

Indonesian citizens
Age 47 years old as of December 31, 2023

Domicile

Indonesia

Appointment History

Appointed as Chairman of Sharia Supervisory Board based on the decision of the 2020 Circular GMS with the minutes of the Notary Deed No. 149 dated May 28, 2020, made before Notary Eliwaty Tjitra, S.H., in Jakarta. Then was reappointed as Chair of the Sharia Supervisory Board based on the decision of the Annual GMS dated June 21, 2023, which was notarized through the Deed of Meeting Decision Statement No. 12 dated July 6, 2023, made before Notary Yulia SH, Notary in South Jakarta.

Educational Background

Doctor of Sharia Law Concentration, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2008).

Employment History

Apart from serving as Chair of the Company's Sharia Supervisory Board, currently also serves as Chair of the Indonesian Ulema Council (MUI) for Fatwa, Deputy 2 for Youth Development at the Ministry of Youth and Sports. Also currently serves as Chair of DPS Maybank Syariah (2010 - January 2020). Chair of the Sharia Supervisory Board (DPS) at PT BESS Finance, Jakarta (2008-present). Lecturer at UIN Jakarta (2004-present). Caretaker of Al-Nahdlah Islamic Boarding School, Depok, West Java (2006-present).

Information on Concurrent Positions

Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. has concurrent positions as Chair of the Indonesian Ulema Council (MUI) for Fatwa, Deputy 2 for Youth Development at the Ministry of Youth and Sports, Chair of DPS PT FWD Asuransi. Member of PT Pegadaian (Persero) DPS, Lecturer at UIN Jakarta (2004-present), and Caretaker of Al-Nahdlah Islamic Boarding School, Depok, West Java (2006-present).

Affiliated Relationship

Has no affiliation with members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, other members of the Sharia Supervisory Board, or with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

BANK Shares Ownership

Does not have share ownership in Bank Aladin Syariah.



Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

Masa Jabatan: 21 Juni 2023 – Penutupan RUPS tahun ketiga

Term of Office: June 21, 2023 – Closing of the third year GMS

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 49 tahun per 31 Desember 2023

Domisili

Indonesia

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler Tahun 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020, dibuat oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., di Jakarta. Kemudian beliau diangkat kembali sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Riwayat Pendidikan

- S2 – Sarjana Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Indonesia (2007).
- S1 – Sarjana Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Aqidah (IAIA) (2003).

Riwayat Pekerjaan

Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota DPS Bank Muamalat Indonesia, Anggota DPS Reindo Syariah, Anggota DPS Indomobil Finance Syariah. Sebelum bergabung dengan PT Bank Aladin Syariah Tbk, beliau berkiprah sebagai Anggota DPS Maybank Syariah. Sekretaris Pribadi di Sekretariat Wakil Presiden (2019-sekarang). Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat Indonesia (2017-sekarang). Dewan Pengawas Syariah di Reindo Syariah (2016-sekarang). Wakil Sekjen MUI (2015-sekarang). Wakil Sekretaris BPH di DSN-MUI (2015-sekarang). Katib Syariah di PBNU (2015-sekarang). Dewan Pengawas Syariah di Indomobil Finance Syariah (2013-sekarang).

Informasi Rangkap Jabatan

Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si memiliki rangkap jabatan sebagai Anggota DPS Bank Muamalat Indonesia (2017-sekarang), Anggota DPS Reindo Syariah (2016-sekarang), Anggota DPS Indomobil Finance Syariah (2013-sekarang), Wakil Sekjen MUI (2015-sekarang), Wakil Sekretaris BPH di DSN-MUI (2015-sekarang), dan Katib Syariah di PBNU (2015-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham BANK

Beliau tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah.

Personal Data

Indonesian citizens
Age 49 years old as of December 31, 2023

Domicile

Indonesia

Appointment History

Appointed as a Member of Sharia Supervisory Board based on the decision of the 2020 Circular GMS with the minutes of the Notary Deed No. 149 dated May 28, 2020, drawn up by Notary Eliwaty Tjitra, S.H., in Jakarta. Then was reappointed as Member of the Sharia Supervisory Board based on the decision of the Annual GMS dated June 21, 2023, which was notarized through the Deed of Meeting Decision Statement No. 12 dated July 6, 2023, made before Notary Yulia S.H., Notary in South Jakarta.

Educational Background

- Master's degree – Bachelor of Sharia Economics and Finance, Universitas Indonesia (2007).
- Bachelor of Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Aqidah (IAIA) (2003).

Employment History

Apart from serving as a Member of the Company's Sharia Supervisory Board, currently also serves as a Member of Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat Indonesia, Member of Sharia Supervisory Board of Reindo Syariah, Member of the Sharia Sharia Supervisory Board of Indomobil Finance. Prior to joining PT Bank Aladin Syariah Tbk, served as a Member of Maybank Syariah Sharia Supervisory Board. Private Secretary at the Secretariat of the Vice President (2019-present). Sharia Supervisory Board at Bank Muamalat Indonesia (2017-present). Sharia Supervisory Board at Reindo Syariah (2016-present). Deputy Secretary General of MUI (2015-present). Deputy Secretary of BPH at DSN-MUI (2015-present). Head of Syariah at PBNU (2015-present). Sharia Supervisory Board at Indomobil Finance Syariah (2013-present).

Information on Concurrent Positions

Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si has concurrent positions as Member of SSB Bank Muamalat Indonesia (2017-present), Member of SSB Reindo Syariah (2016-present), Member of SSB Indomobil Finance Syariah (2013-present), Deputy Secretary General of MUI (2015-present), Deputy Secretary of BPH at DSN-MUI (2015-present), and Katib Syariah at PBNU (2015-present).

Affiliated Relationship

Has no affiliation with members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, other members of the Sharia Supervisory Board, or with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

BANK Shares Ownership

Does not have share ownership in Bank Aladin Syariah.

Profil Direksi

Board of Directors' Profiles

Sepanjang tahun 2023 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi, namun terdapat pengangkatan kembali Direksi yang telah habis masa jabatannya, sebagaimana tertuang dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 21 Juni 2023.

Throughout 2023 until this Annual Report was signed, there were no changes to the Board of Directors' structure and composition, however there were re-appointments of Directors whose term of office had expired, as stated in the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on June 21, 2023.

Dyota Mahottama Marsudi
 Presiden Direktur
 President Director



Masa Jabatan: 7 April 2021 – Penutupan RUPS tahun ketiga
 Term of Office: April 7, 2021 – Closing of the third year GMS

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
 Usia 34 tahun per 31 Desember 2023

Domisili

Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Presiden Direktur berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 7 April 2021 yang telah diaktakan melalui Akta No. 11 tanggal 7 April 2021 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris, di Jakarta.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-166/D.03/2021 tanggal 11 November 2021.

Riwayat Pendidikan

- Master in Business Administration dari INSEAD, Perancis (2016).
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (2010).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum bergabung dengan Bank Aladin Syariah, beliau berkarir sebagai Senior Executive Director of Investments di Vertex Ventures, Singapura (2018-2021), Member of National Digital Transformation Committee di PPN/BAPPENAS (2019), Co-Founder & COO di Happy5.co (2016-2018), dan Consultant di Boston Consulting Group (2011-2017).

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain, adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau juga merangkap sebagai ketua komite di bawah Direksi sebagai berikut: Komite Pengarah Teknologi Informasi; Komite Aset dan Liabilitas atau Assets & Liabilities Committee (ALCO); Komite Manajemen Risiko atau Risk Management Committee (RMC); Komite Pembiayaan.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham BANK

Beliau tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah.

Personal Data

Indonesian citizens
 Age 34 years old as of December 31, 2023

Domicile

Indonesia

Appointment History

Appointed as President Director based on the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) on April, 2021, which was notarized through Deed No. 11 April 7, 2021, made before Yulia, S.H., Notary, in Jakarta

Fit and Proper Test

Passed the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK) as stated in OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-166/D.03/2021 dated November 11, 2021.

Educational Background

- Master in Business Administration degree from INSEAD, France (2016).
- Bachelor of Economics degree from Universitas Indonesia (2010).

Employment History

Prior to joining Bank Aladin Syariah, had a career as Senior Executive Director of Investments at Vertex Ventures, Singapore (2018-2021), Member of National Digital Transformation Committee at PPN/ BAPPENAS (2019), Co-Founder & COO at Happy5.co (2016-2018), and Consultant at the Boston Consulting Group (2011-2017).

Information on Concurrent Positions

Does not have concurrent positions in other companies or institutions, while within Bank Aladin Syariah, also serves as chair of committees under Board of Directors as follows: Information Technology Steering Committee; Assets and Liabilities Committee (ALCO); Risk Management Committee (RMC); Financing Committee.

Affiliated Relationship

Has no affiliation with either the Supervisory Sharia Board or members of Board of Commissioners, other members of Board of Directors, or with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

BANK Shares Ownership

Does not have share ownership in Bank Aladin Syariah.



Firdila Sari

Direktur
Director

Masa Jabatan: 7 April 2021 – Penutupan RUPS tahun ketiga

Term of Office: April 7, 2021 – Closing of the third year GMS

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 38 tahun per 31 Desember 2023

Domisili

Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 7 April 2021 yang telah diaktakan melalui Akta No. 11 tanggal 7 April 2021 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris, di Jakarta.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-167/D.03/2021 tanggal 11 November 2021.

Riwayat Pendidikan

S1 - Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, (2007).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum bergabung dengan Bank Aladin Syariah, beliau berkarier sebagai Manager, Product Management- Global Payments & Cash Management (PCM) di PT Bank HSBC Indonesia (2008-2012), Senior Manager, Office of CEO di PT Digital Media Asia (VivaPlus) (2012-2013), Senior Manager, Business Development, Product, & Content Management di PT Digital Vision Nusantara (K-Vision) (2013-2015), Head of Product di PT Visionet Internasional (OVO) (2015-2017), Vice President, Head of Mobile Products di PT Bank Commonwealth (2017-2018), Vice President, Head of Product di PT Visionet Internasional (OVO) (2018-2020) dan Digital Banking Group Head di PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (2020-2021).

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain, adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau juga merangkap sebagai anggota komite di bawah Direksi sebagai berikut: Komite Pengarah Teknologi Informasi; Komite Aset dan Liabilitas atau Assets & Liabilities Committee (ALCO); Komite Manajemen Risiko atau Risk Management Committee (RMC).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham BANK

Beliau tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah.

Personal Data

Indonesian citizens
Age 38 years old as of December 31, 2023

Domicile

Indonesia

Appointment History

Appointed as Director based on the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) on April 7, 2021, which was notarized through Deed No. 11 dated April 7, 2021, made before Yulia, S.H., Notary, in Jakarta.

Fit and Proper Test

Passed the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK) as stated in OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-167/D.03/2021 dated November 11, 2021.

Educational Background

Bachelor of Economics, Universitas Indonesia, (2007).

Employment History

Prior to joining Bank Aladin Syariah, had a career as Manager, Product Management- Global Payments & Cash Management (PCM) at PT Bank HSBC Indonesia (2008-2012), Senior Manager, Office of CEO at PT Digital Media Asia (VivaPlus) (2012 -2013), Senior Manager, Business Development, Product & Content Management at PT Digital Vision Nusantara (K-Vision) (2013-2015), Head of Product at PT Visionet Internasional (OVO) (2015-2017), Vice President, Head of Mobile Products at PT Bank Commonwealth (2017-2018), Vice President, Head of Product at PT Visionet Internasional (OVO) (2018-2020) and Digital Banking Group Head at PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (2020-2021).

Information on Concurrent Positions

Does not have concurrent positions in other companies or institutions, while within Bank Aladin Syariah, serves as a member of the committees under the Board of Directors as follows: Information Technology Steering Committee; Assets and Liabilities Committee (ALCO); Risk Management Committee (RMC).

Affiliated Relationship

Has no affiliation with either the Supervisory Sharia Board or members of Board of Commissioners, other members of Board of Directors, or with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

BANK Shares Ownership

Does not have share ownership in Bank Aladin Syariah.

Baiq Nadea Dzurriatin

Direktur Kepatuhan
Compliance Director



Masa Jabatan: 21 Juni 2023 – Penutupan RUPS tahun ketiga

Term of Office: June 21, 2023 – Closing of the third year GMS

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 53 tahun per 31 Desember 2023

Domisili

Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler tanggal 31 Januari 2020 yang telah diaktakan melalui Akta No. 19 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Aliya S, Ashar S.H., M.H., M.KN, Notaris, di Jakarta. Kemudian beliau diangkat kembali sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan.

Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Bank Indonesia (BI) sebagaimana tertuang dalam Surat Bank Indonesia No. 12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010.

Riwayat Pendidikan

- S2 – Master Bidang Hukum (LLM) Jurusan International Comparative Law dari Southern Methodist University School of Law, Dallas, Texas, Amerika Serikat (1999).
- S1 – Sarjana Hukum, Universitas Airlangga, (1993).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum bergabung dengan Bank Aladin Syariah, beliau menjabat Direktur Kepatuhan di PT Maybank Syariah Indonesia (Oktober 2010 - Januari 2020). Karier awal beliau adalah Pegawai Muda (PCPM) Angkatan 17-2, Direktorat Hukum di Bank Indonesia (Juni 1995 - Juni 2001). Kemudian menjabat Head of Compliance Department di The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Jakarta (Sep 2001 - Juli 2005), Direktur Kepatuhan di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Jakarta (Juli 2005 - Nov 2008), Direktur Kepatuhan di PT Bank Maybank Indocorp (Feb 2009 - Okt 2010).

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain, adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau juga merangkap sebagai anggota komite di bawah direksi sebagai berikut: Komite Aset dan Liabilitas atau Assets & Liabilities Committee (ALCO); Komite Manajemen Risiko atau Risk Management Committee (RMC).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham BANK

Beliau tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah.

Personal Data

Indonesian citizens
Age 53 years old as of December 31, 2023

Domicile

Indonesia

Appointment History

Appointed as Director of Compliance based on the decision of the Circular General Meeting of Shareholders (GMS) dated January 31, 2020, which was notarized through Deed No. 19 dated January 31, 2020, made before Aliya S, Ashar S.H., M.H., M.KN, Notary, in Jakarta. Then was reappointed as Compliance Director based on the decision of the Annual GMS dated June 21, 2023, which was notarized through the Deed of Meeting Decision Statement No. 12 dated July 6, 2023, made before Notary Yulia SH, Notary in South Jakarta.

Fit and Proper Test

Passed the fit and proper test by Bank Indonesia (BI) as stated in Bank Indonesia Letter No. 12/5/DpG/DPbS dated September 23, 2010.

Educational Background

- Master of Law degree (LLM) Majoring in International Comparative Law from Southern Methodist University School of Law, Dallas, Texas, USA (1999)
- Bachelor of Law degree, Universitas Airlangga, (1993)

Employment History

Prior to joining Bank Aladin Syariah, served as Compliance Director at PT Maybank Syariah Indonesia (October 2010 - January 2020). Had a career as a Junior Officer (PCPM) Batch 17-2, Legal Directorate at Bank Indonesia (June 1995-June 2001). Then served as Head of Compliance Department at Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Jakarta (Sep 2001-July 2005), Compliance Director at Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Jakarta (July 2005-Nov 2008), Compliance Director at PT Bank Maybank Indocorp (Feb 2009-Oct 2010).

Information on Concurrent Positions

Does not have concurrent positions in other companies or institutions, while within Bank Aladin Syariah, concurrently serves as a member of committees under the Board of Directors as follows: Assets & Liabilities Committee (ALCO); Risk Management Committee (RMC).

Affiliated Relationship

Has no affiliation with either the Supervisory Sharia Board or members of Board of Commissioners, other members of Board of Directors, or with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

BANK Shares Ownership

Does not have share ownership in Bank Aladin Syariah.



Mayang Ekaputri

Direktur
Director



Masa Jabatan: 10 Februari 2022 – Penutupan RUPS tahun ketiga

Term of Office: February 10, 2022 – Closing of the third year GMS

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 41 tahun per 31 Desember 2023

Domisili

Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 10 Februari 2022 yang telah diaktakan melalui Akta No. 56 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Yulia S.H., Notaris, di Jakarta.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-83/D.03/2022 tanggal 10 Juni 2022.

Riwayat Pendidikan

- S2 - University of Chicago Booth School of Business – Master Degree in Business Administration (2018).
- S1 - National University of Singapore - Bachelor Degree in Electrical Engineering (2002).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum bergabung dengan Bank Aladin Syariah, beliau pernah menduduki berbagai posisi senior di Indonesia dan International Bank. Mayang menjabat sebagai Group Head Finance & Strategy dan Pjs. Corporate Secretary di Bank Aladin Syariah tahun 2021. Sebelum bergabung dengan Bank Aladin Syariah, Mayang menjabat sebagai Senior Vice President Treasury Finance di HSBC Indonesia (2011-2021) dan Assistant Vice President Product Control di Credit Suisse Singapore (2006-2010).

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain, adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau juga merangkap sebagai anggota komite di bawah Direksi sebagai berikut: Komite Pengarah Teknologi Informasi; Komite Aset dan Liabilitas atau Assets & Liabilities Committee (ALCO); Komite Manajemen Risiko atau Risk Management Committee (RMC).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham BANK

Beliau tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah.

Personal Data

Indonesian citizens
Age 41 years old as of December 31, 2023

Domicile

Indonesia

Appointment History

Appointed as Director based on the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated February 10, 2022, which was notarized through Deed No. 56 dated February 21, 2022, made before Yulia S.H., Notary, in Jakarta.

Fit and Proper Test

Passed the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK) as stated in OJK Board of Commissioners Decree No. Kep- 83/D.03/2022 dated June 10, 2022.

Educational Background

- University of Chicago Booth School of Business – Master's Degree in Business Administration (2018).
- National University of Singapore – Bachelor's Degree in Electrical Engineering (2002).

Employment History

Prior to joining Bank Aladin Syariah, held various senior positions in Indonesia and International Banks. Served as Group Head Finance & Strategy and Acting. Corporate Secretary at Bank Aladin Syariah in 2021. Prior to joining Aladin, Mayang served as Senior Vice President Treasury Finance at HSBC Indonesia (2011-2021) and Assistant Vice President Product Control at Credit Suisse Singapore (2006-2010).

Information on Concurrent Positions

Does not have concurrent positions in other companies or institutions, while within Bank Aladin Syariah, serves as a member of committees under the Directors as follows: Information Technology Steering Committee; Assets and Liabilities Committee (ALCO); Risk Management Committee (RMC).

Affiliated Relationship

Has no affiliation with either the Supervisory Sharia Board or members of Board of Commissioners, other members of Board of Directors, or with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

BANK Shares Ownership

Does not have share ownership in Bank Aladin Syariah.

Profil Chief Officer

Chief Officers' Profiles



Willy Hambali

Chief Operating Officer
Chief Operating Officer

Menjabat Sejak: 10 Februari 2022
Served Since: February 10, 2022

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 42 tahun per 31 Desember 2023

Domisili

Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Chief Operating Officer berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SRT.013.HCD/02.2022 tanggal 10 Februari 2022.

Riwayat Pendidikan

- Master in Business Administration dari Johnson Graduate School of Management, Cornell University (2011).
- S1 - Sarjana Teknik Mesin, National University of Singapore (2006).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum bergabung dengan Bank Aladin Syariah, beliau berkarier sebagai Demand Analyst di Singapore Airlines (2006-2007), Fixed income and equity derivatives di Royal Bank of Scotland (2007-2009), sebagai Associate di A.T. Kearney (2011-2013), sebagai Direktur Pengembangan Bisnis di Purwana Group (2013-2015), Senior Managing Consultant di MasterCard Advisors (2015-2016), Project Director, Chief Product Officer di PT Visionet Internasional (OVO) (2016-2019), Director of Portfolio Operations di PT Multipolar Tbk (2019), Gojek & Head of Liquidity Gopay (2019-2020).

Kepemilikan Saham BANK

Beliau tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah.

Personal Data

Indonesian citizens
Age 42 years old as of December 31, 2023

Domicile

Indonesia

Appointment History

Appointed as Chief Operating Officer based on Board of Directors Decree No. Srt.013. HCD/02.2022 dated February 10, 2022.

Educational Background

- Master in Business Administration from Johnson Graduate School of Management, Cornell University (2011).
- Bachelor of Mechanical Engineering, National University of Singapore (2006).

Employment History

Prior to joining Bank Aladin Syariah, had a career as a Demand Analyst at Singapore Airlines (2006-2007), Fixed income and equity derivatives at Royal Bank of Scotland (2007-2009), as an Associate at A.T. Kearney (2011-2013), as Director of Business Development at Purwana Group (2013-2015), Senior Managing Consultant at MasterCard Advisors (2015-2016), Project Director, Chief Product Officer at PT Visionet Internasional (OVO) (2016-2019), Director of Portfolio Operations at PT Multipolar Tbk (2019), Gojek & Head of Liquidity Gopay (2019-2020).

BANK Shares Ownership

Does not have share ownership in Bank Aladin Syariah.



Budi Santoso Kusmiantoro

Chief Technology Officer
Chief Technology Officer

Menjabat Sejak: 2 Agustus 2021
Served Since: August 2, 2021

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 47 tahun per 31 Desember 2023

Domisili

Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Chief Technology Officer berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SRT.011.HCD/08.2021 tanggal 2 Agustus 2021.

Riwayat Pendidikan

- Master of Science, San Jose State University, Amerika Serikat (2001).
- S1 - Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanegara (1998).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum bergabung dengan Bank Aladin Syariah, beliau berkarier sebagai Software Engineer di Novell, Inc (2000-2001), Software Engineer III di Symbol Technologies (2001-2004), Team Architect di PayPal (2004-2006), Senior Engineering Manager di Google (2006-2016), Vice President Engineering di Traveloka (2016-2018), Chief Technology Officer di PT Visionet Internasional (OVO) (2018-2019) dan Chief Technology Officer Transport di Traveloka (2019-Januari 2021).

Kepemilikan Saham BANK

Beliau tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah.

Personal Data

Indonesian citizens
Age 47 years old as of December 31, 2023

Domicile

Indonesia

Appointment History

Appointed as Chief Technology Officer based on Board of Directors Decree No. SRT.011.HCD/08.2021 dated August 2, 2021.

Educational Background

- Master of Science, San Jose State University, USA (2001).
- S1 – Bachelor's degree in Civil Engineering, Universitas Tarumanegara (1998).

Employment History

Prior to joining Bank Aladin Syariah, had a career as Software Engineer at Novell, Inc (2000-2001), Software Engineer III at Symbol Technologies (2001-2004), Team Architect at PayPal (2004-2006), Senior Engineering Manager at Google (2006-2016), Vice President Engineering at Traveloka (2016-2018), Chief Technology Officer at PT Visionet Internasional (OVO) (2018-2019) and Chief Technology Officer Transport at Traveloka (2019-January 2021).

BANK Shares Ownership

Does not have share ownership in Bank Aladin Syariah.

Profil Chief Officer
Chief Officers' Profiles



Linda Setiawan

Chief People, Diversity and Culture Officer
Chief People, Diversity and Culture Officer

Menjabat Sejak: 1 Juli 2022
Served Since: July 1, 2022

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 36 tahun per 31 Desember 2023

Domisili

Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Chief People, Diversity and Culture Officer berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001.BOD/06.2022 tanggal 30 Juni 2022.

Riwayat Pendidikan

- Master of Science dari Technische Universität Hamburg-Hamburg (2005).
- Sarjana Teknik Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung (2001).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum bergabung dengan Bank Aladin Syariah, beliau menjabat sebagai Head of People & Culture untuk General & Administration Functions, PT HM Sampoerna, Tbk. (2020-Mei 2021), Director People & Culture, Philip Morris Taiwan, S.A. (2017-2020), Head of Compensation & Benefits, PT HM Sampoerna, Tbk. (2013-2017), Regional Manager Compensation & Benefits Asia, Philip Morris Asia Limited, Hong Kong (2011-2013), dan berbagai posisi di divisi Organization Design dan Compensation & Benefits di PT HM Sampoerna, Tbk. (2005-2011).

Kepemilikan Saham BANK

Beliau tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah.

Personal Data

Indonesian citizens
Age 46 years old as of December 31, 2023

Domicile

Indonesia

Appointment History

Appointed as Chief People, Diversity and Culture Officer based on Board of Directors Decree No. SK.001.BOD/06.2022 dated June 30, 2022..

Educational Background

- Master of Science degree from the Technische Universität Hamburg-Hamburg (2005).
- Bachelor of Environmental Engineering degree from Institut Teknologi Bandung (2001).

Employment History

Prior to joining Bank Aladin Syariah, served as Head of People & Culture for General & Administration Functions, PT HM Sampoerna, Tbk. (2020-May 2021), Director People & Culture, Philip Morris Taiwan, S.A. (2017-2020), Head of Compensation & Benefits, PT HM Sampoerna, Tbk. (2013-2017), Regional Manager Compensation & Benefits Asia, Philip Morris Asia Limited, Hong Kong (2011-2013), and various positions in the Organization Design and Compensation & Benefits division at PT HM Sampoerna, Tbk. (2005-2011).

BANK Shares Ownership

Does not have share ownership in Bank Aladin Syariah.



Stefen Loekito

Chief Commercial Officer
Chief Commercial Officer

Menjabat Sejak: 1 Desember 2022
Served Since: December 1, 2022

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 44 tahun per 31 Desember 2023

Domisili

Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Chief Commercial Officer berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SRT.016.HCD/11.2022 tanggal 18 November 2022.

Riwayat Pendidikan

- MBA konsentrasi Marketing & Internal Audit di Louisiana State University (LSU) USA (2003).
- Sarjana Information Systems and Decision Sciences Louisiana State University (LSU) USA (2001).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum bergabung dengan Bank Aladin Syariah, beliau menjabat sebagai Chief Operating Officer di PT. Capital Net Indonesia – VIRGO (2020-2022), EVP – Enterprise Payment & Business Owner – Analytics & Strategy di PT. Visionet International – OVO (2018-2020), VP – Decision Management Head Consumer Banking di PT. CIMB Niaga Tbk (2016-2018), Business Leader/Director – Country Finance and Senior Business Analyst di PT. Visa Worldwide Indonesia (2013-2016), AVP – Branch Network Planning & Optimization Head – Sales and Distribution Consumer Banking di PT. CIMB Niaga Tbk (2011-2013), AVP – Business Intelligence Unit Head – Consumer Banking di PT. Bank Permata Tbk (2008-2009), AVP – Strategic Portfolio Management and Planning Division Head – Consumer Banking di PT Lippobank Tbk. (2006-2008), MGR – Sales & Distribution MIS and Performance Manager – Consumer Banking di Citibank (2003-2006).

Kepemilikan Saham BANK

Beliau tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah.

Personal Data

Indonesian citizens
Age 44 years old as of December 31, 2023

Domicile

Indonesia

Appointment History

Appointed as Chief Commercial Officer based on Board of Directors Decree No. Srt.016.HCD/11.2022 dated November 18, 2022.

Educational Background

- MBA Marketing & Internal Audit concentration from Louisiana State University (LSU) USA (2003).
- Bachelor of Information Systems and Decision Sciences from Louisiana State University (LSU) USA (2001).

Employment History

Prior to joining Bank Aladin Syariah, served as Chief Operating Officer at PT. Capital Net Indonesia – VIRGO (2020-2022), EVP – Enterprise Payment & Business Owner – Analytics & Strategy at PT. Visionet International – OVO (2018-2020), VP – Decision Management Head Consumer Banking at PT. CIMB Niaga Tbk (2016-2018), Business Leader/ Director – Country Finance and Senior Business Analyst at PT. Visa Worldwide Indonesia (2013-2016), AVP – Branch Network Planning & Optimization Head – Consumer Banking Sales and Distribution at PT. CIMB Niaga Tbk (2011-2013), AVP – Business Intelligence Unit Head – Consumer Banking at PT. Bank Permata Tbk (2008-2009), AVP – Strategic Portfolio Management and Planning Division Head – Consumer Banking at PT Lippobank Tbk. (2006-2008), MGR – Sales & Distribution MIS and Performance Manager – Consumer Banking at Citibank (2003-2006).

BANK Shares Ownership

Does not have share ownership in Bank Aladin Syariah.

Demografi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Employee Demographics and Competence Development

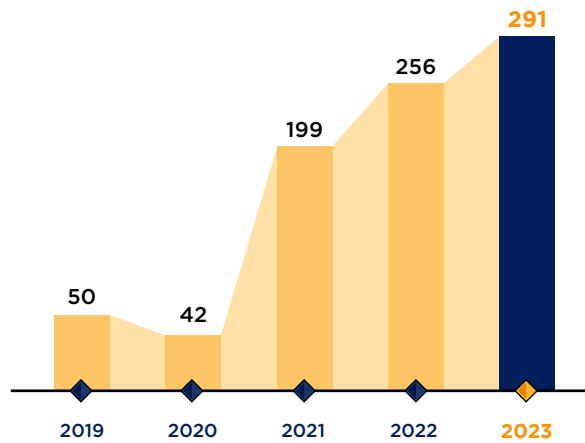
Demografi Pegawai Bank

Pegawai Bank Aladin Syariah per 31 Desember 2023, adalah sebanyak 291 pegawai, mengalami peningkatan sebesar 13,7% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 256 orang. Perubahan ini terjadi karena pertumbuhan bisnis dan layanan Bank.

Bank Employee Demographics

Bank Aladin Syariah employees as of December 31 2023, reached 291 employees, an increase of 13.7% compared to 256 people the previous year. This change was due to the growth of the Bank's business and services.

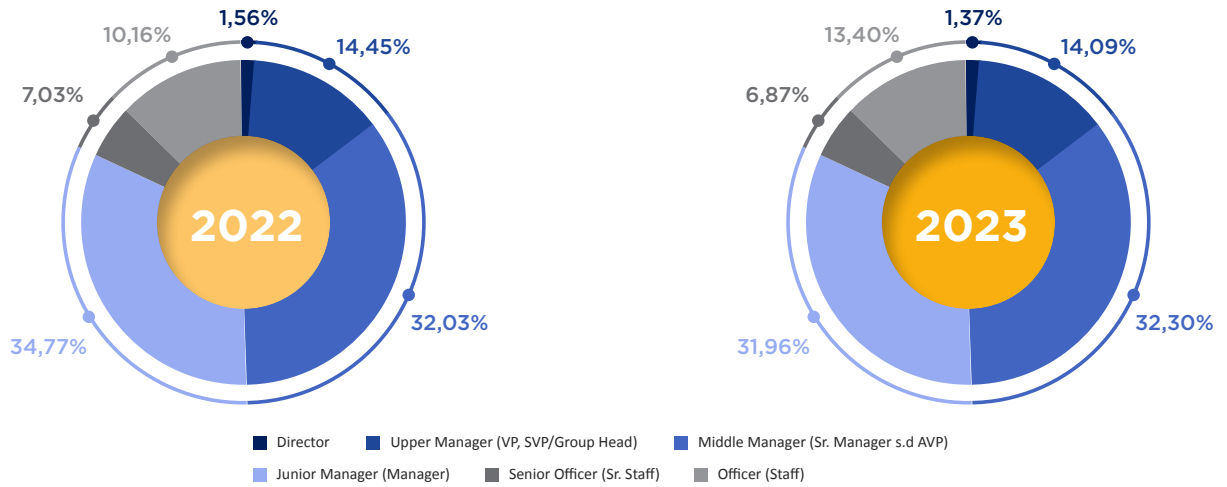
Pergerakan Jumlah Pegawai 2019-2023 (orang)
Total Employee Turnover 2019-2023 (person)



Demografi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi (orang)
Employee Demographics by Organizational Level (person)

Level Organisasi Organizational Level	2023				2022				
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	
Director	1	3	4	1,37%	1	3	4	1,56%	=
Upper Manager (VP, SVP/Group Head)	26	15	41	14,09%	25	12	37	14,45%	↑
Middle Manager (Sr. Manager s.d AVP)	68	26	94	32,30%	62	20	82	32,03%	↑
Junior Manager (Manager)	67	26	93	31,96%	59	30	89	34,77%	↑
Senior Officer (Sr. Staff)	7	13	20	6,87%	6	12	18	7,03%	↑
Officer (Staff)	17	22	39	13,40%	12	14	26	10,16%	↑
Jumlah Total	186	105	291	100,00%	165	91	256	100,00%	↑

Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi (%)
Employee Composition by Organizational Level (%)

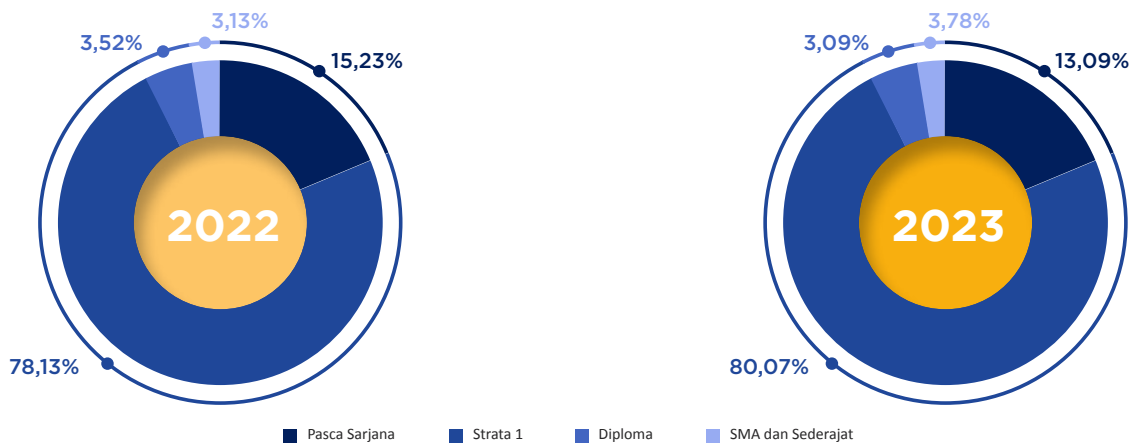


Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
Employee Demographics by Education Level (person)

Tingkat Pendidikan Education Level	2023				2022			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)
Pasca Sarjana Postgraduate	26	12	38	13,06%	24	15	39	15,23% ↓
Strata 1 Bachelor Degree	146	87	233	80,07%	127	73	200	78,13% ↑
Diploma Diploma	7	2	9	3,09%	7	2	9	3,52% =
SMA dan Sederajat High School and Equivalent	7	4	11	3,78%	7	1	8	3,13% ↑
Jumlah Total	186	105	291	100,00%	165	91	256	100,00% ↑

L = Laki-laki | M = Male P = Perempuan | F = Female

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (%)
Employee Composition by Education Level (%)

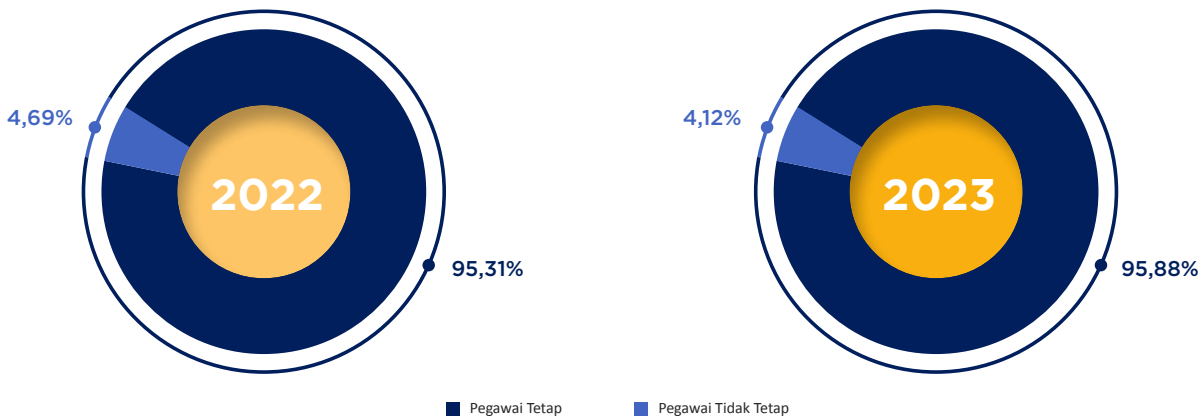


Demografi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian (orang) Employee Demographics by Employment Status (person)

Status Kepegawaian Employment Status	2023				2022			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)
Pegawai Tetap Permanent Employee	181	98	279	95,88%	158	86	244	95,31% ↑
Pegawai Tidak Tetap Contract Employee	5	7	12	4,12%	7	5	12	4,69% =
Jumlah Total	186	105	291	100,00%	165	91	256	100,00% ↑

L = Laki-laki | M = Male P = Perempuan | F = Female

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian (%) Employee Composition by Employment Status (%)

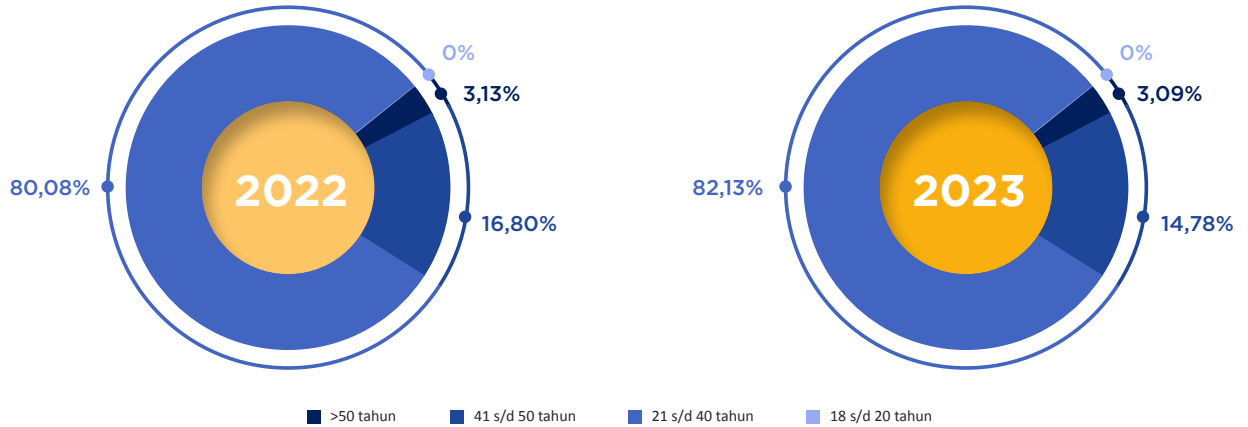


Demografi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia (orang) Employee Demographics by Age Range (person)

Rentang Usia Age Range	2023				2022			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)
>50 tahun >50 years	3	6	9	3,09%	4	4	8	3,13% ↑
41 s/d 50 tahun 41 - 50 years	28	15	43	14,78%	30	13	43	16,80% =
21 s/d 40 tahun 21 - 40 years	155	84	239	82,13%	131	74	205	80,08% ↑
18 s/d 20 tahun 18 - 20 years	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00% =
Jumlah Total	186	105	291	100,00%	165	91	256	100,00% ↑

L = Laki-laki | M = Male P = Perempuan | F = Female

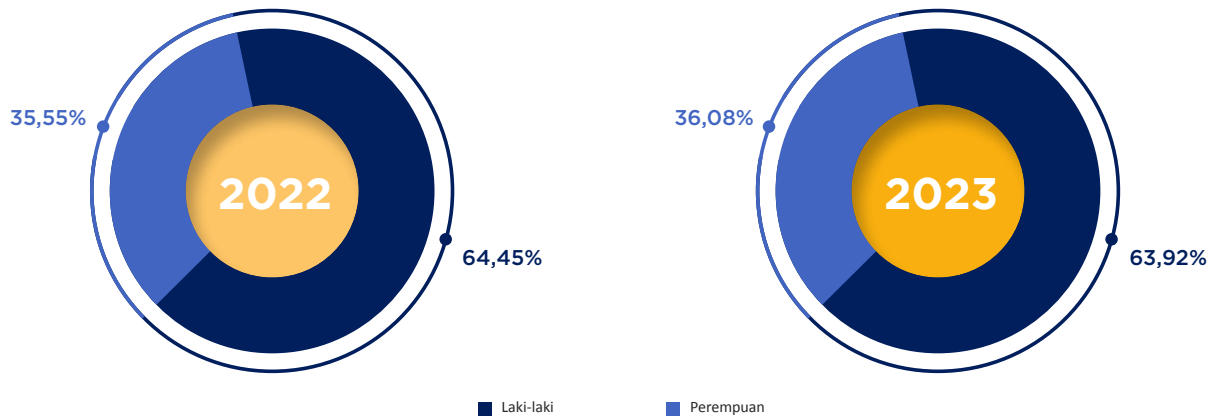
Komposisi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia (%)
Employee Composition by Age Range (%)



Demografi Pegawai Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)
Employee Demographics by Gender (person)

Gender/Jenis Kelamin Gender	2023		2022	
	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)
Laki-laki Male	186	63,92%	165	64,45% ↑
Perempuan Female	105	36,08%	91	35,55% ↑
Jumlah Total	291	100,00%	256	100,00% ↑

Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (%)
Employee Composition by Gender (%)



Pengembangan Kompetensi Pegawai

Sebagai langkah konkret untuk membangun tim yang berkualitas dan profesional dalam menghadapi perubahan yang terus berlangsung dalam dunia bisnis yang dinamis, Bank Aladin Syariah secara konsisten melaksanakan program pendidikan dan pengembangan pegawai. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi perkembangan industri serta untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja Bank.

Bank Aladin Syariah memahami bahwa Sumber Daya Insani (SDI) yang kompeten adalah elemen utama dalam mewujudkan visi dan misi Bank. Salah satu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pegawai adalah dengan memberikan akses pelatihan dan pendidikan yang berkualitas. Setiap pegawai diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan kebutuhan. Bank Aladin Syariah secara berkesinambungan mendorong semua Insan Bank di seluruh unit kerja untuk mengikuti program pengembangan kompetensi agar selalu siap menghadapi tantangan yang akan datang dan mendukung pertumbuhan Bank di masa depan.

Employee Competency Development

As a concrete step to building a quality and professional team to face the ongoing changes in the dynamic business world, Bank Aladin Syariah consistently organizes employee education and development programs. This is aimed at increasing competitiveness in the face of industry developments and to increase the Bank's work efficiency and productivity.

Bank Aladin Syariah understands that competent Human Capital (HC) is a key element in realizing the Bank's vision and mission. One way to improve and develop employee competency is to provide access to quality training and education. All employees are given the same opportunity to develop abilities according to their needs. Bank Aladin Syariah continuously encourages all Bank Personnel in all work units to take part in competency development programs so that they are always ready to face future challenges and support the Bank's growth in the future.

Demografi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia (orang)
Employee Demographics by Age Range (person)

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Purposes	Jumlah Peserta Number of Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organization Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan (%) Based on Type of Training (%)
Director	External	Advanced Sharia Banking	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Know and understand the philosophy of transactions at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	4	100%	50%
		Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 Maintaining Banking Risk Management Certification Level 4	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security	4	100%	67%



Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Purposes	Jumlah Peserta Number of Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organization Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan (%) Based on Type of Training (%)
Director	External	Corporate Action	Menambah pengetahuan mengenai penerbitan saham dan memperkuat struktur modal perseroan Increase knowledge regarding share issuance and strengthen the company's capital structure	3	75%	14%
		Excellent Public Speaking Skills	Meningkatkan kemampuan dalam memberikan public statement Improve the ability to give public statements	4	100%	11%
		Team Building Management	Meningkatkan kolaborasi di internal perusahaan Increase collaboration within the company	4	100%	50%
		Webinar Batch 2/2023 FKDKP "Implementation Of Personal Data Protection Laws and Challenges To Their Implementation"	Mengetahui informasi dan tantangan implementasi dari UU No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi Know the information and challenges of implementing Law no. 27 of 2022 concerning personal data protection	1	25%	100%
		Webinar Batch 4/2023 FKDKP "Peluang, Harapan Dan Tantangan Perekonomian Nasional"	Mengetahui tantangan perekonomian indonesia	1	25%	100%
		FKDKP Batch 4/2023 Webinar "Opportunities, Hopes and Challenges for the National Economy"	Understand the challenges of the Indonesian economy			
Upper Management	External	Competency Based Interview	Mengetahui teknik-teknik interview dan melakukan assessment yang lebih tepat sasaran kepada calon karyawan Know interview techniques and carry out more targeted assessments of prospective employees	25	61%	38%
		Executive Development Program	Mengetahui update tools mengenai Talent and Culture Assessment Find out about updated tools regarding Talent and Culture Assessment	1	2%	100%

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Purposes	Jumlah Peserta Number of Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organization Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan (%) Based on Type of Training (%)
Upper Management	External	Leaders Activation Program 2023	Meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang kolaboratif dan mandiri bagi para line manager melalui peningkatan kemampuan komunikasi, mendengar dan mempersuasi Improve collaborative and independent leadership abilities for line managers through improving communication, listening and persuasion skills	7	17%	17%
		Advanced Sharia Banking	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Know and understand the philosophy of transactions at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	4	10%	50%
		Intermediate Sharia Banking	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Know and understand the philosophy of transactions at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	8	20%	21%
		Basic Sharia Banking	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Know and understand the philosophy of transactions at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	8	20%	11%



Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Purposes	Jumlah Peserta Number of Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organization Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan (%) Based on Type of Training (%)
Upper Management	External	SPPUR J6 Pengelolaan Transfer Dana	Memastikan kompetensi pengelolaan transfer dana sesuai dengan regulasi dan standar yang ditetapkan regulator	1	2%	100%
		SPPUR J6 Fund Transfer Management	Ensure competence in managing fund transfers in accordance with regulations and standards set by the regulator			
		Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis	2	5%	33%
		Maintenance of Level 4 Banking Risk Management Certification	Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security			
		Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 3	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis	10	24%	71%
		Maintenance of Level 3 Banking Risk Management Certification	Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security			
		Refreshment Treasuri Level Advance, Rapat Pleno dan Gathering 2023	Mengetahui update mengenai kebijakan treasuri	1	2%	100%
		Advance Level Treasury Refreshment, Plenary Meeting and Gathering 2023	Know updates regarding treasury policies			
Serial Pendidikan PROPAMI Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE)	Memahami prosedur perdagangan efek	1	2%	50%		
PROPAMI Education Series for Securities Trading Broker Representatives (WPPE)	Understand securities trading procedures					

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Purposes	Jumlah Peserta Number of Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organization Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan (%) Based on Type of Training (%)
Upper Management	External	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 3	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis	1	2%	100%
		Provision and Examination for Level 3 Banking Risk Management Certification	Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security			
		Microsoft Excel 2019 Costumized dan Google Sheets Costumized	Memahami teknik dalam menggunakan Ms. Excel 2019 dan Google Sheet	5	12%	13%
		Microsoft Excel 2019 Customized and Google Sheets Customized	Understand the techniques in using Ms. Excel 2019 and Google Sheets			
		National Conference IAIB 2023	Mengetahui update mengenai kondisi dan issue Internal Audit di Indonesia	1	2%	100%
		Corporate Action	Find out updates regarding Internal Audit conditions and issues in Indonesia			
		Corporate Action	Menambah pengetahuan mengenai penerbitan saham dan memperkuat struktur modal perseroan	6	15%	27%
		Corporate Action	Increase knowledge regarding share issuance and strengthen the company's capital structure			
		Excellent Public Speaking Skills	Meningkatkan kemampuan dalam memberikan public statement	29	71%	83%
Excellent Public Speaking Skills	Improve ability in giving public statements					
Fraud & Code of Ethics Investigation	Memahami teknik-teknik pencegahan dan investigasi korupsi serta pelanggaran etika	1	2%	10%		
Fraud & Code of Ethics Investigation	Understand techniques for preventing and investigating corruption and ethical violations					
Retail Financing	Memahami kaidah hukum syariah dalam pembuatan produk	6	15%	40%		
Retail Financing	Understand sharia law rules in product manufacturing					



Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Purposes	Jumlah Peserta Number of Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organization Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan (%) Based on Type of Training (%)
Upper Management	External	Sales Training Delivery	Melakukan standarisasi kemampuan menjual produk perbankan Standardize the ability to sell banking products	1	2%	10%
		Stress Testing on Banking Exposure	Memahami teknik-teknik dalam melakukan stress testing Understand the techniques for conducting stress testing	2	5%	100%
		Team Building Management	Meningkatkan kolaborasi di internal perusahaan Increase collaboration within the company	4	10%	50%
		Workshop dan Sertifikasi Office Channeling	Mengetahui sistem dan prosedur dana pensiun	3	7%	23%
		Workshop and Office Channeling Certification	Know the pension fund systems and procedures	3	7%	23%
Middle Management	External	Competency Based Interview	Mengetahui teknik-teknik interview dan melakukan assessment yang lebih tepat sasaran kepada calon karyawan Know interview techniques and carry out more targeted assessments of prospective employees	35	37%	53%
		ISTQB	Memastikan kompetensi software testing sesuai dengan standar Ensure software testing competency is in accordance with standards	1	1%	50%
		Leaders Activation Program 2023	Meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang kolaboratif dan mandiri bagi para line manager melalui peningkatan kemampuan komunikasi, mendengar dan mempersuasi Improve collaborative and independent leadership abilities for line managers through improving communication, listening and persuasion skills	31	33%	76%

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Purposes	Jumlah Peserta Number of Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organization Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan (%) Based on Type of Training (%)
Middle Management	External	Basic Sharia Banking	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Know and understand the philosophy of transactions at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	21	22%	29%
		Intermediate Sharia Banking	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Know and understand the philosophy of transactions at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	12	13%	31%
		Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Provision and Examination for Level 1 Banking Risk Management Certification	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security	6	6%	0.5%
		Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Provision and Examination for Level 2 Banking Risk Management Certification	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security	2	2%	67%
		Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Maintenance of Level 1 Banking Risk Management Certification	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security	4	4%	80%



Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Purposes	Jumlah Peserta Number of Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organization Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan (%) Based on Type of Training (%)
Middle Management	External	Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 2	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis	5	5%	45%
		Maintenance of Level 2 Banking Risk Management Certification	Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security			
		Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 3	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis	4	4%	29%
		Maintenance of Level 3 Banking Risk Management Certification	Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security			
		Microsoft Excel 2019 Customized dan Google Sheets Customized	Memahami teknik dalam menggunakan Ms. Excel 2019 dan Google Sheet	10	11%	25%
		Microsoft Excel 2019 Customized and Google Sheets Customized	Understand the techniques in using Ms. Excel 2019 and Google Sheets			
		Corporate Action	Menambah pengetahuan mengenai penerbitan saham dan memperkuat struktur modal perseroan	8	9%	36%
			Increase knowledge regarding share issuance and strengthen the company's capital structure			
		Excellent Public Speaking Skills	Meningkatkan kemampuan dalam memberikan public statement	2	2%	6%
			Improve the ability to give public statements			
Fraud & Code of Ethics Investigation	Memahami teknik-teknik pencegahan dan investigasi korupsi serta pelanggaran etika	5	5%	50%		
	Understand techniques for preventing and investigating corruption and ethical violations					

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Purposes	Jumlah Peserta Number of Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organization Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan (%) Based on Type of Training (%)
Middle Management	External	Membedah IRA dan Risk Enterprise Terkait Program APU-PPT & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan	Memahami teknik-teknik dalam melakukan risk assessment dan identifikasi terhadap transaksi mencurigakan	1	1%	100%
		Dissecting IRA and Enterprise Risk Related to APU-PPT & PPPSPM Programs in the Financial Services Sector	Understand techniques for conducting risk assessments and identifying suspicious transactions			
		Presentation Skills	Meningkatkan kemampuan mengolah data dan membuat presentasi Improve the ability to process data and make presentations	7	7%	58%
		Retail Financing	Memahami kaidah hukum syariah dalam pembuatan produk Understand sharia law rules in product manufacturing	6	6%	40%
		Sales Training Delivery	Melakukan standarisasi kemampuan menjual produk perbankan Standardize the ability to sell banking products	5	5%	50%
		Sustainable Finance	Memahami update dan issue terkini mengenai praktik keuangan berkelanjutan Understand the latest updates and issues regarding sustainable financial practices	3	3%	20%
		Workshop dan Sertifikasi Office Channeling	Mengetahui sistem dan prosedur dana pensiun	5	5%	38%
		Office Channeling Workshop and Certification	Know the pension fund systems and procedures			
		SPPUR J5 Pengelolaan Transfer Dana	Memastikan kompetensi pengelolaan transfer dana sesuai dengan regulasi dan standar yang ditetapkan regulator	1	1%	100%
		SPPUR J5 Fund Transfer Management	Ensure competence in managing fund transfers in accordance with regulations and standards set by the regulator			



Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Purposes	Jumlah Peserta Number of Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organization Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan (%) Based on Type of Training (%)
Middle Management	External	Serial Pendidikan PROPAMI Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE)	Memahami prosedur perdagangan efek	1	1%	50%
		PROPAMI Education Series for Securities Trading Broker Representatives (WPPE)	Understand securities trading procedures			
Junior Management	External	Competency Based Interview	Mengetahui teknik-teknik interview dan melakukan assessment yang lebih tepat sasaran kepada calon karyawan Know interview techniques and carry out more targeted assessments of prospective employees	5	5%	8%
		Continuous Audit & Data Analytics	Memahami teknik-teknik audit dan analisa data Understand audit techniques and data analysis	1	1%	100%
	Fundamental of Cybersecurity Auditing	Memahami teknik audit dalam cybersecurity Understand audit techniques in cybersecurity	1	1%	100%	
	Fundamental of IT Auditing	Memahami teknik audit dalam IT Understand audit techniques in IT	1	1%	100%	
	Fundamental Risk Based Auditing	Memahami teknik dasar audit Understand basic audit techniques	1	1%	100%	
	ISTQB	Memastikan kompetensi software testing sesuai dengan standar Ensure software testing competency is in accordance with standards	1	1%	50%	
	Leaders Activation Program 2023	Meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang kolaboratif dan mandiri bagi para line manager melalui peningkatan kemampuan komunikasi, mendengar dan mempersuasi Improve collaborative and independent leadership abilities for line managers through improving communication, listening and persuasion skills	3	3%	7%	

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Purposes	Jumlah Peserta Number of Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organization Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan (%) Based on Type of Training (%)
Junior Management	External	Basic Sharia Banking	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Know and understand the philosophy of transactions at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	23	25%	32%
		Intermediate Sharia Banking	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Know and understand the philosophy of transactions at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	16	17%	41%
		Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Provision and Examination for Level 1 Banking Risk Management Certification	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security	5	5%	42%
		Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Provision and Examination for Level 2 Banking Risk Management Certification	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security	1	1%	33%
		Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Maintenance of Level 1 Banking Risk Management Certification	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security	1	1%	20%

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Purposes	Jumlah Peserta Number of Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organization Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan (%) Based on Type of Training (%)
Junior Management	External	Retail Financing	Memahami kaidah hukum syariah dalam pembuatan produk Understand sharia law rules in product manufacturing	3	3%	20%
		Sales Training Delivery	Melakukan standarisasi kemampuan menjual produk perbankan Standardize the ability to sell banking products	3	3%	30%
		Sustainable Finance	Memahami update dan issue terkini mengenai praktik keuangan berkelanjutan Understand the latest updates and issues regarding sustainable financial practices	7	8%	47%
		Workshop dan Sertifikasi Office Channeling	Mengetahui sistem dan prosedur dana pensiun	4	4%	31%
		Office Channeling Workshop and Certification	Know the pension fund systems and procedures	4	4%	31%
		Training Financial Statement	Memahami cara membaca laporan keuangan Understand how to read financial reports	1	1%	33%
Staff	External	Competency Based Interview	Mengetahui teknik-teknik interview dan melakukan assessment yang lebih tepat sasaran kepada calon karyawan Know interview techniques and carry out more targeted assessments of prospective employees	1	2%	2%
		Basic Sharia Banking	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Know and understand the philosophy of transactions at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	21	36%	29%



Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Purposes	Jumlah Peserta Number of Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organization Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan (%) Based on Type of Training (%)
Staff	External	Intermediate Sharia Banking	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Know and understand the philosophy of transactions at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	3	5%	8%
		Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Provision and Examination for Level 1 Banking Risk Management Certification	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security	1	2%	8%
		Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Maintenance of Level 2 Banking Risk Management Certification	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security	1	2%	9%
		SPPUR J4 Pengelolaan Uang Tunai SPPUR J4 Fund Transfer Management	Memastikan kompetensi pengelolaan uang tunai sesuai dengan regulasi dan standar yang ditetapkan regulator Ensure cash management competency in accordance with regulations and standards set by the regulator	1	2%	100%
		Microsoft Excel 2019 Costumized dan Google Sheets Costumized Microsoft Excel 2019 Customized and Google Sheets Customized	Memahami teknik dalam menggunakan Ms. Excel 2019 dan Google Sheet Understand the techniques in using Ms. Excel 2019 and Google Sheets	16	27%	40%
		Brevet AB	Memahami standar perpajakan indonesia Understand Indonesian tax standards	1	2%	100%

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Purposes	Jumlah Peserta Number of Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organization Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan (%) Based on Type of Training (%)
Staff	External	Corporate Action	Menambah pengetahuan mengenai penerbitan saham dan memperkuat struktur modal perseroan Increase knowledge regarding share issuance and strengthen the company's capital structure	2	3%	9%
		Program Motion Graphic Level 1	Memahami teknik dasar dalam pembuatan motion graphic Understand basic techniques in creating motion graphics	1	2%	100%
		Program Motion Graphic Level 2	Memahami teknik menengah dalam pembuatan motion graphic Understand intermediate techniques in creating motion graphics	2	3%	100%
		Sales Training Delivery	Melakukan standarisasi kemampuan menjual produk perbankan Standardize the ability to sell banking products	1	2%	10%
		Sustainable Finance	Memahami update dan issue terkini mengenai praktik keuangan berkelanjutan Understand the latest updates and issues regarding sustainable financial practices	5	8%	33%
		Workshop dan Sertifikasi Office Channeling	Mengetahui sistem dan prosedur dana pensiun Know the pension fund systems and procedures	1	2%	8%
		Pelatihan dan Sertifikasi BNSP Certified Human Capital Supervisor (CHCS)	Memastikan kompetensi sesuai dengan standar regulator Ensure competency in accordance with regulatory standards	1	2%	100%
		Training and Certification BNSP Certified Human Capital Supervisor (CHCS)	Memahami cara membaca laporan keuangan Understand how to read financial reports	2	3%	67%



Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai

Bank Aladin Syariah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas SDI yang dimilikinya. Salah satu upaya konkret dalam mewujudkan komitmen ini adalah melalui pengalokasian anggaran investasi untuk program pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan. Pada tahun 2023, realisasi biaya yang dialokasikan untuk pengembangan kompetensi pegawai mencapai Rp5.754.302.862,- mengalami peningkatan 131% atau setara dengan Rp3.272.791.195,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencapai Rp2.481.511.667,-.

Rincian total biaya pengembangan kompetensi karyawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Employee Competency Development Costs

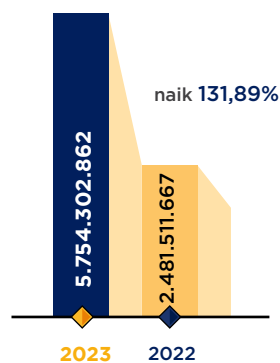
Bank Aladin Syariah emphasized its commitment to increase the capacity and quality of its HC. One concrete effort to realize this commitment is by allocating an investment budget for sustainable employee competency development programs. In 2023, the costs allocated for employee competency development reached Rp5,754,302,862, an increase of 131%, or Rp3,272,791,195 compared to Rp2,481,511,667 the previous year.

Details of the total costs for employee competency development can be seen in the following table:

Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai
Employee Competency Development Costs

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Perbandingan Realisasi 2022 - 2023 Realization Comparison 2022 - 2023	
			Selisih (Rp) Difference (Rp)	Persentase (%) Percentage (%)
Pengembangan Kompetensi Competency Development	5.754.302.862	2.481.511.667	3.272.791.195	131,89%

Perbandingan Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai 2022-2023 (Rp)
Comparison of Employee Competency Development Costs 2022-2023 (Rp)



Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

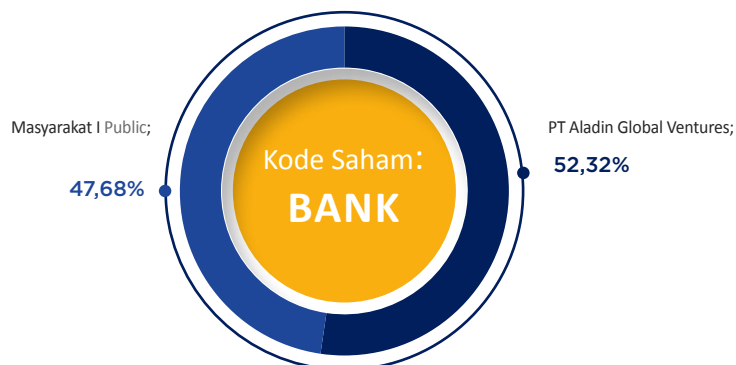
Komposisi Kepemilikan Saham Bank

Composition of Bank Share Ownership

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Paid-up Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
NILAI NOMINAL SAHAM = RP100/LEMBAR SAHAM Nominal Value of Shares = Rp100/share			
1 JANUARI 2023 January 1, 2023			
PT Aladin Global Ventures	7.865.630.746	786.563.074.600	53,67%
PT BNC Technologies Ventures	850.000.000	85.000.000.000	5,80%
Masyarakat Public	5.939.986.855	593.998.685.500	40,53%
Jumlah Total	14.655.617.601	1.465.561.760.100	100,00%
31 DESEMBER 2023 December 31, 2023			
PT Aladin Global Ventures	7.726.530.746	772.653.074.600	52,32%
Masyarakat Public	7.041.859.271	704.185.927.100	47,68%
Jumlah Total	14.768.390.017	1.476.839.001.700	100,00%

Komposisi Pemegang Saham Bank Aladin Syariah per 31 Desember 2023

Composition of Bank Aladin Syariah Shareholders December 31, 2023





Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Shareholder Composition of 5% or More

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih per 31 Desember 2023

Shareholder Composition of 5% or More
December 31, 2023

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (share)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
PT Aladin Global Ventures	7.726.530.746	52,32%

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat yang Masing-Masing Memiliki Kurang dari 5% Saham Bank

Community Shareholder Groups Who Each Own Less Than 5% of Bank Shares

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% per 31 Desember 2023

Community Shareholder Group Less than 5%
as at December 31, 2023

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
PEMODAL NASIONAL NATIONAL INVESTORS			
Perorangan Indonesia Indonesian individuals	11.194	394.589.863	2,67%
Perseroan Terbatas Limited Liability Companies	108	12.144.437.120	82,24%
Asuransi Insurance	22	1.122.701.500	7,60%
Dana Pensiun Pension Funds	4	6.236.600	0,04%
Jumlah Total	11.328	13.667.965.083	92,55%
Pemodal Asing Foreign Investors			
Perorangan Asing Foreign individuals	8	63.900	0,00%
Badan Usaha Asing Foreign Business Entities	66	1.100.361.034	7,45%
Jumlah Total	74	1.100.424.934	7,45%
Jumlah Keseluruhan Overall Total	11.402	14.768.390.017	100,00%

Komposisi Pemegang Saham Bank Aladin Syariah Berdasarkan Status

Composition of Shareholders of Bank Aladin Syariah Based on Status

Rincian Komposisi Pemegang Saham Bank Aladin Syariah Berdasarkan Status per 31 Desember 2023 Details of Bank Aladin Syariah Shareholder Composition Based on Status as at December 31, 2023

Status Pemegang Saham Shareholder Status	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
LOKAL Local			
Perorangan Individuals	11.194	394.589.863	2,67%
Institusi Institutions	134	13.273.375.220	89,88%
Jumlah Total	11.328	13.667.965.083	92,55%
ASING Foreign			
Perorangan Individuals	8	63.900	0,00%
Institusi Institutions	66	1.100.361.034	7,45%
Jumlah Total	74	1.100.424.934	7,45%
Jumlah Keseluruhan Jumlah Keseluruhan	11.402	14.768.390.017	100,00%

Komposisi Kepemilikan Waran Seri I

Bersamaan dengan penawaran umum perdana saham, yakni pada tanggal 22 Januari 2021, Bank Aladin Syariah menerbitkan sebanyak 2.800.000.000 Waran Seri I yang melekat pada saham yang dikeluarkan dan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham dengan harga pelaksanaan waran Rp110,- yang mulai berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 30 Januari 2026.

Informasi Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Hingga 31 Desember 2023, Bank Aladin Syariah belum melaksanakan program kepemilikan saham bagi pegawai (Employee Stock Option Program/ESOP) atau manajemen (Management Stock Option Program/MSOP). Oleh karena itu, tidak ada pegawai atau anggota manajemen, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah. Selain itu, baik Dewan Komisaris maupun Direksi tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Bank Aladin Syariah. Dengan demikian, tidak ada informasi tentang persentase kepemilikan tidak langsung saham Bank Aladin Syariah oleh Dewan Komisaris atau Direksi pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk tujuan kepemilikan tidak langsung oleh anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Series I Warrant Ownership Composition

Simultaneously with the initial public offering of shares, on January 22, 2021, Bank Aladin Syariah issued a total of 2,800,000,000 Series I Warrants attached to the shares issued and given free of charge as an incentive for shareholders with a warrant exercise price of Rp110 which will take effect from August 2, 2021 to January 30, 2026..

Information on Bank Aladin Syariah Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

As of December 31 2023, Bank Aladin Syariah has not yet implemented a share ownership program for employees (Employee Stock Option Program/ESOP) or management (Management Stock Option Program/MSOP). Therefore, no employees or members of management, including the Commissioners and Directors, own shares in Bank Aladin Syariah. In addition, neither the Commissioners nor the Directors have indirect ownership of Bank Aladin Syariah shares. Therefore there is no information to report on the percentage of indirect ownership of Bank Aladin Syariah shares by the Board of Commissioners or Board of Directors at the beginning and end of the fiscal year, nor information on shareholders registered in the list of shareholders for the purpose of indirect ownership by members of the Board of Commissioners or Board of Directors.



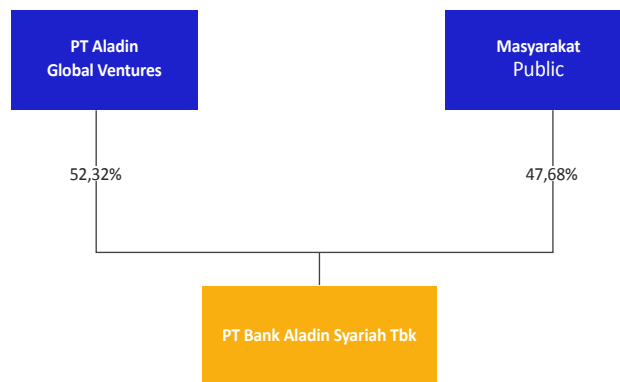
Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali Bank Aladin Syariah

Information On Majority And Controlling Shareholders Of Bank Aladin Syariah Until The Final Individual Owner

Pemegang saham utama dan pengendali Bank adalah PT Aladin Global Ventures dengan Pemegang saham akhir adalah John Dharma J. Kusuma. PT Aladin Global Ventures memiliki 52,32% saham Bank Aladin Syariah dan sisanya dimiliki oleh masyarakat dengan kepemilikan saham kurang dari 5%, mencapai 47,68%.

The majority and controlling shareholder of the Bank is PT Aladin Global Ventures with the final shareholder being John Dharma J. Kusuma. PT Aladin Global Ventures owns 52.32% of Bank Aladin Syariah shares and the remainder is owned by the public with share ownership of less than 5%, with 47.68%.

Struktur Grup Bank Aladin Syariah per 31 Desember 2023
Bank Aladin Syariah Group Structure
as of December 31, 2022



Informasi Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Dan Ventura Bersama

Information On List Of Subsidiaries and Associates And Joint Ventures

Per 31 Desember 2023, Bank Aladin Syariah tidak memiliki entitas anak dan entitas asosiasi, maupun ventura bersama. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nama, persentase kepemilikan, bidang usaha, total aset, dan status operasi terkait entitas anak dan entitas asosiasi, maupun ventura bersama.

As of December 31, 2023, Bank Aladin Syariah did not have subsidiaries and associated entities, or joint ventures. Therefore there is no information to report on the names, percentage of ownership, business field, total assets, and operational status of subsidiaries and associated entities, or joint ventures.

Nama Alamat Entitas Anak dan/atau Kantor Cabang Atau Kantor Perwakilan

Name Address Of Subsidiaries and/or Branch Office Or Representative Office

Per 31 Desember 2023, Bank Aladin Syariah tidak memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi, serta Kantor Cabang ataupun Kantor Perwakilan.

As of December 31, 2023, Bank Aladin Syariah did not have any subsidiaries or associated entities, as well as branch offices or representative offices.



Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

Chronology Of Share Issuance and/or Listing

Pada tahun 2021, Bank Aladin Syariah melakukan Aksi Korporasi dalam bentuk Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) kepada masyarakat. Sebelum melaksanakan IPO, saham Bank dimiliki oleh PT Aladin Global Ventures (sebelumnya dikenal sebagai PT NTI Global Indonesia) sebanyak 7.988.245.746 saham atau setara dengan 97,50% dan PT Alphaplus Adhigana Asia sebanyak 204.826.814 saham atau 2,50%. Pada tanggal 22 Januari 2021, Bank menerima persetujuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat nomor S-8/D.04/2021 untuk melakukan penawaran umum perdana 5.000.000.000 saham Bank dengan nilai nominal Rp100 per saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp103 per saham. Pada tanggal 1 Februari 2021, saham tersebut resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "BANK". Dari hasil penawaran umum saham perdana, Bank berhasil mengumpulkan tambahan modal disetor sebesar Rp500.000.000.000 serta tambahan modal disetor berupa agio sebesar Rp15.000.000.000 setelah dikurangi biaya emisi penerbitan saham sebesar Rp4.612.334.741. Hasil penerimaan bersih dari penawaran umum saham perdana ini adalah sebesar Rp510.387.665.259.

Pada tanggal 22 Januari 2021, yang bersamaan dengan penawaran umum perdana saham, Bank menerbitkan 2.800.000.000 Waran Seri I yang melekat pada saham yang dikeluarkan dan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham dengan harga pelaksanaan waran sebesar Rp110 yang mulai berlaku tanggal 2 Agustus 2021 hingga 30 Januari 2026. Jumlah dana yang mungkin diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika seluruh waran yang diterbitkan dieksekusi, adalah sebanyak Rp308.000.000.000.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2021, para Pemegang Saham menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I atau *rights issue*. Bank menawarkan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham, setara dengan 13,12% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan setelah HMETD I.

Bank berhasil menjalankan Aksi Korporasi penambahan modal sepanjang tahun 2022 melalui Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) serta Penambahan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) untuk memenuhi ketentuan OJK yang diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12 Tahun 2022 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang mengharuskan bank umum memiliki modal inti sebesar Rp3 triliun pada akhir 2022.

In 2021, Bank carried out a Corporate Action in the form of an Initial Public Offering (IPO) to the public. Prior to carrying out the IPO action, Bank's shares were owned by PT Aladin Global Ventures (formerly PT NTI Global Indonesia) with a total of 7,988,245,746 shares or 97.50% and PT Alphaplus Adhigana Asia with 204,826,814 shares with 2.50%. Then on January 22, 2021, the Bank obtained an effective statement from the Financial Services Authority (OJK) through its letter No. S-8/D.04/2021 to conduct an initial public offering of 5,000,000,000 Bank shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share to the public at an offering price of Rp103 (full amount) per share. On February 1, 2021, these shares were listed on the Indonesia Stock Exchange with the ticker code BANK. From the results of the initial public offering, Bank recorded additional paid-in capital of Rp500,000,000,000 and additional paid-in capital in the form of premiums of Rp15,000,000,000 before deducting the issuance costs of shares of Rp4,612,334,741. The proceeds from the net proceeds from this initial public offering amounted to Rp510,387,665,259.

On January 22, 2021, which coincided with the initial public offering of shares, Bank issued 2,800,000,000 Series I Warrants attached to the issued shares and provided free of charge as an incentive for shareholders with a warrant exercise price of Rp110 with an effective date between August 2, 2021 to January 30, 2026. So the total funds obtained from the results of the exercise of the Series I Warrants if all of the warrants are exercised will be of Rp308,000,000,000.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on May 28, 2021, the Shareholders approved the Bank's plan to increase Capital through a Rights Issue. The Bank offered a maximum of 2,000,000,000 new shares with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share or 13.12% of the issued and fully paid-up capital of Bank after Right Issue I.

The Bank successfully carried out Corporate Actions to increase capital throughout 2022 through additional Rights Issue and Private Placements. The two Corporate Action were in compliance with OJK regulations as conveyed through Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 12 of 2022 concerning Commercial Bank Consolidation, in which commercial banks are required to have a core capital of Rp3 trillion by the end of 2022.

Bank melaksanakan HMETD mulai 23 Mei hingga 7 Juni 2022 dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.999.933.723 saham, setara dengan 11,12% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga pelaksanaan HMETD adalah Rp2.000 per saham. Dari pelaksanaan HMETD tersebut, Bank berhasil menjual sejumlah 504.264.065 saham, senilai dengan Rp1.008.528.130.000. Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruh dana yang dihasilkan dari *rights issue* akan digunakan untuk mendukung penyaluran pembiayaan dan menguatkan kinerja Perusahaan.

Pada akhir tahun 2022, melalui PMTHMETD yang berlangsung pada 29 Desember 2022, Bank mengeluarkan saham baru sebesar 850.000.000 dengan harga pelaksanaan Rp1.400, senilai dengan Rp1.190.000.000.000. Keseluruhan saham yang ditawarkan dalam PMTHMETD tersebut diambil alih oleh PT BNC Technologies Ventures, sehingga perusahaan tersebut menjadi pemegang saham baru Bank dengan kepemilikan sebanyak 5,80%. Dana yang diperoleh dari PMTHMETD akan digunakan untuk memperkuat struktur modal perusahaan guna mendukung perkembangan usaha Bank.

Berikut disampaikan kronologis penerbitan dan pencatatan saham Bank.

Bank carried out Rights Issues on May 23 - June 7, 2022 by offering a maximum of 1,999,933,723 equivalent to 11.12% of the issued and fully paid capital. The exercise price for the Rights Issue was Rp2,000 per share. Through the Rights Issue, 504,264,065 shares were successfully executed for a value of Rp1,008,528,130,000. After deducting issuance costs, all proceeds from the rights issue were used for financing distribution to support the Company's performance.

Then at the end of 2022 through a Private Placement on December 29, 2022 the Bank issued 850,000,000 new shares with an exercise price of Rp1,400 or a value of Rp1,190,000,000,000. PT BNC Technologies Ventures absorbed all of the shares offered in the Private Placement thereby making it a new shareholder of Bank with ownership of 5.80%. All funds from the Private Placement were used to strengthen the capital structure in order to develop the Company's business.

The following shows the chronology of the issuance and listing of the Bank's shares.

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham Chronology of Issuance and Listing of Shares

Periode Period	Keterangan Information	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (IDR)	Harga Penawaran (Rp) Bid Price (IDR)	Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Paid-up Capital			
				Jumlah Saham yang Diterbitkan Number of Issued Shares	Jumlah Saham Number of Shares	Total Nilai (Rp) Total Value (IDR)	Total Harga Penawaran (Rp) Total Offering Price (IDR)
Sebelum - IPO Before - IPO					8.193.072.560	819.307.256.000	
2021	Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering	100	103	5.000.000.000	13.193.072.560	1.319.307.256.000	515.000.000.000
2022	HMETD Rights Issue	100	2.000	504.264.065	13.266.245.924	1.326.624.592.400	1.008.528.130.000
2022	PMTHMETD Private Placement	100	1.400	850.000.000	14.655.617.601	1.465.561.760.100	1.190.000.000.000
2021-2026	Waran Seri I Series I Warrant	100	110	2.800.000.000	15.993.072.560*	1.599.307.256.000	308.000.000.000

Catatan: *) Apabila seluruh waran yang diterbitkan tereksekusi seluruhnya
Note: *) If all issued warrants are fully executed



Kronologis Penerbitan Dan Pencatatan Efek Lainnya

Chronology Of Issuance And Other Securities Listing

Hingga akhir tahun 2023 dan sampai informasi ini diberikan, Bank tidak menerbitkan efek dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, tidak ada data terkait dengan nama efek, tahun penerbitan, tingkat bunga/ imbalan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, nama bursa efek lainnya, atau peringkat efek yang dapat disediakan.

Until the end of 2023 and until the date this information was submitted, the Bank has not issued securities in any form. Therefore, there is no data to report on the name of the security, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value, name of other stock exchanges, or security ratings.

Lembaga Dan/Atau Profesi Penunjang

Supporting Institutions And/Or Professionals

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Public Accountant and Public Accounting Firm

Nama Lembaga/Profesi Name of Institution/Profession	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
Nama Akuntan Publik	Yasir
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia Stock Exchange Building, Tower II Floor 7 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
Jasa yang Diberikan Services Rendered	Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia Auditing Standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Acc
Periode Penugasan Assignment Period	Tahun Buku 2023 Fiscal Year 2023

Securities administration Bureau

Biro Administrasi Efek

Nama Lembaga/Profesi Name of Institution/Profession	PT Sharestar Indonesia
Alamat Address	Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt 18 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan
Jasa yang Diberikan Services Rendered	Membantu Penjamin Pelaksana Assisting the Implementing Guarantor
Periode Penugasan Assignment Period	Tahun Buku 2023 Fiscal Year 2023

Notary

Notaris

Nama Lembaga/Profesi Name of Institution/Profession	Yulia, S.H.
Alamat Address	Multivision Tower, Lantai 3, Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Indonesia
Jasa yang Diberikan Services Rendered	Perubahan Anggaran Dasar dan Pembuatan Akta Changes to the Articles of Association and Making of Deeds
Periode Penugasan Assignment Period	Tahun Buku 2023 Fiscal Year 2023

Informasi Pada Situs

Web Bank Aladin Syariah

Information On The Website Of Bank Aladin Syariah

PT Bank Aladin Syariah Tbk menyediakan situs web resmi sebagai salah satu sarana untuk menjaga transparansi dan keterbukaan kepada publik dengan menyajikan informasi yang *up to date*. Situs web ini dapat diakses dengan mudah dan sederhana melalui alamat aladinbank.id. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi yang komprehensif, akurat, dan terkini tentang Perusahaan kepada masyarakat umum. Situs web resmi Bank telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 yang berkaitan dengan situs web perusahaan publik.

Peraturan ini mengharuskan perusahaan untuk menyajikan berbagai informasi, antara lain:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi Bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan;
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

PT Bank Aladin Syariah Tbk provides an official website as a means of maintaining transparency and openness to the public by presenting up to date information. This website can be accessed easily and simply via the aladinbank.id address. The main objective is to provide comprehensive, accurate and up-to-date information about the Company to the general public. The Bank's official website was created in accordance with the provisions of Article 6 in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.4/2015 relating to public company websites.

This regulation requires companies to present information, including:

1. General Information on Issuers or Public Companies;
2. Information for Investors;
3. Corporate Governance Information;
4. Corporate Social Responsibility Information.





Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Information
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; Shareholder information up to the individual final owner	√	Memuat informasi kepemilikan Saham dari Para pemegang Saham Bank yang dapat diakses di situs web Bank pada "Hubungan Investor → Struktur Pemegang Saham" https://aladinbank.id/struktur-pemegang-saham/ Contains information on share ownership of Bank's Shareholders that can be accessed on the Bank's website at "Investor Relations Shareholder Structure" https://aladinbank.id/struktur-pemegang-saham/
Isi Kode Etik Code of Ethics Content	√	Memuat informasi mengenai Kode Etik Bank yang dapat diakses di situs web Bank pada "Tentang Kami → Tata Kelola" https://aladinbank.id/id/tata-kelola Contains information on the Bank's Code of Ethics that can be accessed on Bank's website at "About Us Governance" https://aladinbank.id/id/tata-kelola
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) including agenda items discussed at the GMS, summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, namely the date of the announcement of the GMS, the date of the summons for the GMS, the date of the GMS, the date the summary of the minutes of the GMS was announced	√	Memuat informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank yang dapat diakses di situs web Bank pada "Hubungan Investor → Rapat Umum Pemegang Saham" https://aladinbank.id/id/rapat-umum-pemegang-saham Contains information on the Bank's General Meeting of Shareholders (GMS) that can be accessed on Bank's website at "Investor Relations General Meeting of Shareholders" https://aladinbank.id/id/rapat-umum-pemegang-saham
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir) Annual financial report (last 5 years)	√	Memuat Informasi terkait Laporan Keuangan Bank yang dapat diakses di situs web Bank pada "Hubungan Investor → Laporan Triwulanan" https://aladinbank.id/id/laporan-tahunan Contains information on the Bank's Financial Statements that can be accessed on Bank's website at "Investor Relations Quarterly Reports" https://aladinbank.id/id/laporan-tahunan
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profiles of Board of Commissioners and Board of Directors	√	Memuat informasi terkait Profil Dewan Komisaris dan Direksi yang dapat diakses di situs web Bank pada "Tentang Kami → Manajemen Bank Aladin Syariah" https://aladinbank.id/id/manajemen Contains information on the Profiles of Commissioners and Directors that can be accessed on the Company's website at "About Us Bank Aladin Syariah Management"
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Unit Audit Internal Charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and Internal Audit Unit	√	Memuat Informasi terkait Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Unit Audit Internal Bank yang dapat diakses di situs web Bank pada "Tentang Kami → Tata Kelola" https://aladinbank.id/id/tata-kelola Contains information on the Charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and the Company's Internal Audit Unit that can be accessed on the Company's website at "About Us Governance"

√ = tersedia pada situs web Perusahaan
 x = belum tersedia pada situs web Perusahaan
 v = available on the Company's website
 x = not yet available on the Company's website

Penghargaan Yang Diterima Bank Dan Sertifikasi Yang Dimiliki

Awards Received By The Bank And Certifications Held

Penghargaan yang Diperoleh di Tahun 2023 Awards Received in 2023

Tanggal Diperolehnya Penghargaan Date the Award was Given	Nama Penghargaan Name of the Award	Badan atau Lembaga yang Memberikan Providing Body or Institution
12 April 2023 April 12, 2023	Infobank: The Best Sharia Bank (KBM) 1 Asset class < 10 T The 2nd Best Digital Bank (KBM) 1 Asset class < 10 T	Infobank
25 Juli 2023 July 25, 2023	Asian Banking Finance Award: Islamic Banking Initiative of The Year	Asian Banking Finance
30 Agustus 2023 August 30, 2023	Sharia Bank Category for Action	TrenAsia ESG Award
14 September 2023 September 14, 2023	Best New Islamic Digital Bank Indonesia	World Economic Magazine
27 November 2023 November 27, 2023	Best Financial Award 2023 the Sharia Digital Bank Category "Best Brand Popularity"	The Economics
14 Desember 2023 December 14, 2023	Digital Banking Award 2023 Kategori Dimensi Kolaborasi Bank Digital Murni Digital Banking Award 2023 Kategori Dimensi Kolaborasi Bank Digital Murni	InvestorTrust
19 Desember 2023 December 19, 2023	Digital Financial Excellence Award 2023 Kategori Bank Syariah Digital Financial Excellence Award 2023 Sharia Bank Category	Media Asuransi

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2023 Certification Still Valid in 2023

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Certification Issue Date	Jenis Sertifikat Type of Certification	Badan atau Lembaga yang Memberikan Body or Institution Issuing the Certification
12 April 2023 April 12, 2023	Sertifikasi ISO 27001	CBQA Global

halaman ini sengaja dikosongkan

Aladin



KEMUDAHAN PAKAI QRIS Di **ALADIN**





Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Ditengah lanskap bisnis yang semakin dinamis, Bank Aladin Syariah berhasil menkonversi strategi menjadi kinerja yang positif. Selain fokus dalam menyediakan produk dan layanan unggul, Bank Aladin Syariah juga memperluas cakupan pasar hingga ke seluruh wilayah di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi dan aplikasi Aladin.

Despite an increasingly dynamic business landscape, Bank Aladin Syariah converted its strategies into a positive performance. Other than focusing on providing superior products and services, Bank Aladin Syariah also expanded its market coverage to all regions in Indonesia through the use of Aladin technology and applications.

Tinjauan Umum

General Overview



Tinjauan Perekonomian

Kondisi perekonomian global di tahun 2023, masih diselimuti oleh ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang belum juga mereda, dan ditambah lagi dengan memuncaknya ketegangan di wilayah Palestina. Sebelumnya, hampir semua negara-negara di dunia optimis akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2023, terutama pasca dicabutnya status darurat Covid-19 secara resmi oleh *World Health Organization* (WHO) pada awal Mei 2023. Dicabutnya status darurat Covid-19 oleh WHO tersebut, telah mendorong perbaikan rantai pasok global dengan biaya dan waktu pengiriman yang telah kembali ke level sebelum pandemi.

Pertumbuhan ekonomi global melambat dengan ketidakpastian yang meningkat tinggi, disertai divergensi pertumbuhan antar negara yang semakin melebar. *International Monetary Fund* (IMF) memprakirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 mencapai 3,0% dan melambat menjadi 2,9% pada 2024. Tekanan inflasi diprakirakan masih tinggi dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik dan fragmentasi ekonomi.

Walaupun prospek pertumbuhan ekonomi global masih terbatas, perlambatan pertumbuhan global pada tahun 2023 masih bisa diantisipasi, terutama karena peningkatan pengeluaran rumah tangga di Amerika Serikat dan Uni Eropa serta pemulihan ekonomi di Tiongkok. Pendorong utama pertumbuhan ekonomi global yaitu kinerja sektor-sektor jasa yang didukung oleh kuatnya permintaan, disertai oleh penciptaan lapangan kerja dan optimisme bisnis yang membaik.

GENERAL OVERVIEW

Global economic conditions in 2023 were still shrouded in uncertainty due to geopolitical tensions between Russia and Ukraine that had still not subsided, and this was compounded by mounting tensions in the Palestinian region. Previously, almost all countries in the world were optimistic they would record positive economic growth in 2023, especially after the official lifting of the Covid-19 emergency status by the World Health Organization (WHO) in early May 2023. The lifting of the Covid-19 emergency status by WHO had driven improvements in global supply chains with costs and delivery times returning to pre-pandemic levels.

Global economic growth is slowing with increasing uncertainty, accompanied by increasingly widening growth divergences between countries. The International Monetary Fund (IMF) predicted global economic growth in 2023 to reach 3.0% and slow to 2.9% in 2024. Inflation pressure was predicted to remain high, triggered by rising energy and food prices due to escalation of geopolitical conflicts and economic fragmentation.

Although the outlook for global economic growth remained limited, a slowdown in global growth in 2023 was still anticipated, especially due to increased household spending in the United States and the European Union, as well as the economic recovery in China. The main driver for global economic growth is the performance of the service sectors that are supported by strong demand, together with job creation and improving business optimism.



Lebih lanjut, Bank Indonesia (BI) mencatat, bahwa dalam rangka mengendalikan laju inflasi, The Fed menerapkan kebijakan moneter ketat dan secara bertahap menaikkan suku bunga acuan dengan total kenaikan sepanjang 2023 sebesar 25 *basis point* (bps). Hal tersebut diikuti oleh kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral dari berbagai negara dan berakibat pada likuiditas global. Dengan banyak tekanan sehingga The Fed masih terus memberikan perhatian khusus untuk inflasi.

Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan. Konsumsi swasta diperkirakan masih tumbuh kuat sejalan dengan keyakinan konsumen yang masih tinggi, terkendalinya inflasi, dan aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu. Percepatan belanja negara terkait penyelenggaraan Pemilu serta penguatan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai *shock absorber*, diharapkan dapat mendorong konsumsi Pemerintah serta menjaga daya beli masyarakat. Sementara investasi bangunan dan non-bangunan memasuki tren peningkatan seiring dengan progres penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun 2023.

Pada sisi lain, sebagaimana dialami oleh banyak negara, aktivitas ekspor mengalami penurunan sejalan dengan pelemahan ekonomi global. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan masih tetap kuat. BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2023 tetap pada kisaran 4,5%-5,3%. Upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi dari dampak rambatan tingginya ketidakpastian global diperkuat dengan koordinasi kebijakan BI dan kebijakan fiskal Pemerintah yang terus ditingkatkan.

Adapun di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh kuat sebesar 5,05% *year on year* (yoy). Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ini di dorong oleh meningkatnya perekonomian Indonesia pada kuartal IV 2023 didukung oleh hampir seluruh komponen Produk Domestik Bruto (PDB). Di mana konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,47% (yoy) seiring dengan kenaikan mobilitas terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang meningkat. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh tinggi sebesar 18,11% (yoy) didorong peningkatan aktivitas persiapan pemilu. Konsumsi Pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 2,81% (yoy) didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Investasi tumbuh sebesar 5,02% (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aktivitas penanaman modal.

Tinjauan Industri Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis perkembangan industri perbankan nasional tetap dengan intermediasi yang terjaga serta ditopang permodalan yang memadai. Di mana sektor perbankan mampu menunjukkan resiliensi dengan permodalan yang tinggi dan kinerja intermediasi yang tetap positif. Permodalan perbankan tetap

Bank Indonesia (BI) noted that to control their rate of inflation, the Fed implemented a tight monetary policy and gradually raised the benchmark interest rate with a total increase throughout 2023 of 25 basis points (bps). This was followed by an increase in interest rates by Central Banks in other countries that resulted in global liquidity. With so much pressure the Fed continued to pay special attention to inflation.

The Indonesian economy was predicted to continue to grow well and be resilient. Private consumption was predicted to continue to grow strongly in line with high consumer confidence, controlled inflation, and the activities related to holding general elections. It was hoped that the acceleration of state spending related to the elections, and the strengthening of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) as a shock absorber would encourage Government consumption, and maintain people's purchasing power. Whilst building and non-building investments were entering an increasing trend in line with the progress of completing the National Strategic Project s(PSN) in 2023.

On the other side, as experienced by many countries, export activity had decreased in line with the weakening global economy. Despite this, national economic growth was predicted to remain strong. BI estimated that economic growth in 2023 would remain in the range of 4.5%-5.3%. Efforts to maintain macroeconomic stability and economic growth from the spillover impact of the high global uncertainty were strengthened by continuously improving BI policy coordination and the Government's fiscal policy.

In 2023, Indonesia's economic growth remained strong despite the global economic slowdown. The Central Statistics Agency (BPS) noted that the Indonesian economy as a whole in 2023 recorded strong growth of 5.05% year on year (yoy). This overall economic growth was driven by an increase in the Indonesian economy in QIV 2023, supported by almost all components of Gross Domestic Product (GDP). Where household consumption grew by 4.47% (yoy) in line with increased mobility, especially during the National Religious Holidays (HBKN), Christmas and New Year, stable public purchasing power, and increasing consumer confidence. Consumption of Non-Profit Institutions Serving Households (LNPR) grew by 18.11% (yoy) driven by increased election preparation activities. Government consumption increased by 2.81% (yoy) driven by goods and personnel spending. Investments grew by 5.02% (yoy) mainly supported by building investments as infrastructure development continued and investment activity increased.

Islamic Banking Industry Overview

The Financial Services Authority (OJK) announced that the development of the national banking industry will continue with maintained intermediation, and supported by adequate capital. Whilst the banking sector showed resilience with high capital and positive intermediation performance. Banking capital remained solid in terms of the banking

solid ditinjau dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) industri perbankan yang tinggi sebesar 27,75%. Fungsi intermediasi perbankan berjalan dengan baik dalam menopang perekonomian, baik dari sisi pembiayaan (perkreditan) maupun dalam penghimpunan dana.

Pada Desember 2023, OJK mencatat, pertumbuhan kredit sebesar 10,61% (yoy) menjadi Rp7.186,94 triliun, dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi sebesar 12,26% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Desember 2023 meningkat sebesar 3,73% (yoy) atau menjadi sebesar Rp8.457,93 triliun, dengan kontribusi terbesar dari Giro yang tumbuh sebesar 4,57% (yoy). Likuiditas industri perbankan pada Desember 2023 dalam level yang memadai dengan risiko kredit yang terjaga dengan rasio Alat Likuid/DPK (AL/DPK) berada pada 28,73%. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non Performing Loan (NPL) net perbankan sebesar 0,75% dan NPL gross sebesar 2,19%.

Adapun industri perbankan syariah beserta unit usaha syariah berhasil membukukan total aset sebesar Rp1.236,1 triliun per Desember 2023, dengan total pembiayaan sebesar Rp570,3 triliun atau tumbuh 15,63% (yoy). Pertumbuhan aset perbankan syariah tersebut ditopang oleh pertumbuhan DPK perbankan syariah yang mencapai Rp669,3 triliun atau tumbuh 10,43% (yoy).

Sementara itu, Bank Aladin Syariah menutup tahun 2023 dengan mencatatkan kelanjutan pertumbuhan kinerja yang positif. Di mana aplikasi Bank Aladin Syariah tercatat telah diunduh sebanyak lebih dari 5,2 juta nasabah per 31 Desember 2023. Sedangkan pengguna yang teregistrasi secara aktif mencapai lebih dari 3,1 juta nasabah di seluruh Indonesia, atau meningkat sekitar 75% dibanding tahun sebelumnya. Di samping itu, DPK Bank Aladin Syariah pun mengalami pertumbuhan signifikan dan naik hingga lebih dari 300% dibandingkan dengan posisi Desember 2022. Pertumbuhan DPK ini didorong oleh pertumbuhan dana yang dihimpun baik dari nasabah ritel maupun non ritel.

industry's *Capital Adequacy Ratio* (CAR) that rose to a high of 27.75%. The banking intermediation function was running well and was supporting the economy, both in terms of financing (loans) and in raising funds.

In December 2023, OJK recorded loan growth of 10.61% (yoy) to reach Rp7,186.94 trillion, with the highest growth in investment loans at 12.26% (yoy). On the other side, the growth of Third Party Funds (TPF) by December 2023 increased by 3.73% (yoy), to reach Rp8,457.93 trillion, with the largest contribution coming from Current Accounts that grew by 4.57% (yoy). Banking industry liquidity in December 2023 stood at an adequate level with loan risk maintained with the Liquid Assets/DPK (AL/DPK) ratio at 28.73%. Meanwhile, loan quality was maintained with a net banking Non-Performing Loan (NPL) ratio of 0.75% and gross NPL of 2.19%.

The sharia banking industry and sharia business units total assets stood at Rp1,236.1 trillion as of December 2023, with total financing of Rp570.3 trillion, or growth of 15.63% (yoy). The growth in sharia banking assets was due to the growth of sharia banking deposits that reached Rp669.3 trillion, an increase of 10.43% (yoy).

While Bank Aladin Syariah closed 2023 by recording a positive performance growth. The Bank Aladin Syariah application was downloaded by more than 5.2 million customers as of December 31, 2023. Active registered users reached more than 3.1 million customers throughout Indonesia, an increase of 75% compared to the previous year. In addition, Bank Aladin Syariah's TPF also grew significantly, increasing by more than 300% compared to December 2022. This growth in TPF was due to the growth in funds collected from both retail and non-retail customers.



Kebijakan Strategis Bisnis Bank dan Aspek Pemasaran

Bank Business Strategic Policies and Marketing Aspects

Strategi Bisnis Bank Aladin Syariah Tahun 2023

Di tahun 2023, Bank Aladin Syariah terus melakukan *improvement* produk dan pelayanan, untuk melanjutkan tren pertumbuhan positif. Sebagai bank syariah *digital* terdepan di Indonesia, Bank Aladin Syariah terus meningkatkan fokus pada strategi ekspansi bisnis dengan melakukan inovasi produk yang berkesinambungan melalui pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka memberikan kemudahan layanan perbankan untuk masyarakat luas. Disamping itu, Bank Aladin Syariah juga terus memperkuat dan meningkatkan kerja sama dengan mitra bisnis potensial dalam rangka membangun ekosistem *digital* berbasis syariah, serta terus melanjutkan pengembangan TI, dan meningkatkan akuisisi nasabah baik dari sisi korporasi maupun nasabah ritel. Kemudian sejalan dengan perkembangan bisnis Bank, Bank Aladin Syariah juga terus meningkatkan pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) untuk menunjang tercapainya target pertumbuhan di 2023.

Pada Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023, Bank Aladin Syariah telah menyusun serangkaian kebijakan strategis untuk mencapai target pertumbuhan, sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Bank (RJPB) Bank Aladin Syariah. Adapun inisiatif strategis yang telah ditetapkan Bank Aladin Syariah di tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Membangun strategi akuisisi nasabah pendanaan ritel dan non ritel.
2. Pemenuhan permodalan Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mengoptimalkan pendapatan Bank dari penyaluran pembiayaan.
4. Pengelolaan tingkat kesehatan Bank, menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik dan profil risiko pada tingkat yang terukur.
5. Pengembangan akses layanan perbankan berbasis teknologi baik melalui kemitraan maupun secara langsung kepada Nasabah sehingga dapat memberikan proses transaksi yang aman, efektif dan efisien.
6. Pengembangan bisnis yang berkesinambungan melalui inovasi produk dan layanan yang berkelanjutan.
7. Keseimbangan antara penghimpunan dan penyaluran dana

Strategi Pemasaran dan Pangsa Pasar Bank

Menjadi bank syariah *digital* terdepan di tahun 2023 Bank Aladin Syariah terus meningkatkan semangat untuk terus tumbuh, diperkuat dengan telah didapatkannya izin dari regulator terkait, perihal produk-produk Bank Aladin Syariah yang berhasil dikembangkan dan didaftarkan, di tahun sebelumnya. Bank Aladin Syariah menyadari, ditengah perubahan perilaku dan persaingan yang cukup ketat, dibutuhkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien, yang tentunya

Bank Aladin Syariah Business Strategy for 2023

In 2023, Bank Aladin Syariah continued to improve its products and services, and continued its positive growth trend. As the leading digital sharia bank in Indonesia, Bank Aladin Syariah continued to increase its focus on business expansion strategies by carrying out product innovations through the use of developments in Information Technology (IT) to provide easy banking services for the wider community. In addition, Bank Aladin Syariah also continued to strengthen and increase its cooperation with potential business partners to build a sharia-based digital ecosystem, as well as continued its IT development, and increased customer acquisition from both corporate and retail customers. Then, in line with the Bank's business development, Bank Aladin Syariah also continued to increase the development of Human Capital (HC) to support the growth target in 2023.

In the Bank Business Plan (RBB) for 2023, Bank Aladin Syariah had prepared a series of strategic policies to achieve its growth targets, in accordance with the Bank Aladin Syariah Long Term Plan (RJPB). The strategic initiatives established by Bank Aladin Syariah in 2023 included the following:

1. Develop a retail and non-retail funding customer acquisition strategy.
2. Fulfill Bank capital in accordance with applicable regulations.
3. Optimize the Bank's revenue from financing disbursements.
4. Manage the Bank's health level, implement good corporate governance and risk profiles at a measurable level.
5. Develop access to technology-based banking services through partnerships, and directly to customers to provide safe, effective and efficient transaction processes.
6. Develop sustainable business through continuous product and service innovation.
7. Balance collecting and distributing funds.

Marketing Strategy and Bank Market Share

To become the leading digital sharia bank in 2023, Bank Aladin Syariah continued to increase its enthusiasm to grow, strengthened by obtaining permission from the relevant regulator on its products that had been developed and registered in the previous year. Bank Aladin Syariah understands that amidst the changing behavior and tight competition, a more effective and efficient marketing strategy was needed, which of course must be carried out intensively. To achieve

harus dilakukan secara intensif. Dimana dalam rangka mencapai pertumbuhan, Bank Aladin Syariah harus berfokus pada peningkatan akuisisi nasabah. Pada prinsipnya, Indonesia yang merupakan penduduk dengan populasi muslim terbesar di dunia, merupakan potensi besar bagi Bank Aladin Syariah untuk meningkatkan kinerja dan mencapai pertumbuhan. Terlebih, Bank Aladin Syariah yang merupakan bank syariah *digital*, diuntungkan dengan semakin masifnya penggunaan ponsel di hampir seluruh kalangan masyarakat, yang didukung oleh infrastruktur jaringan yang memadai.

Untuk mendukung target pencapaian pertumbuhan di tahun 2023, Bank Aladin Syariah telah menyusun dan menetapkan strategi pemasaran, sebagaimana berikut ini:

1. Terus meningkatkan *Brand Awareness Bank* dengan menjalankan kampanye *branding* melalui media digital maupun konvensional, termasuk kampanye *branding* didalam jaringan Alfamart di seluruh Indonesia.
2. Peningkatan Fokus pada pemasaran dan kampanye Produk DPK Ritel, sejalan dengan perkembangan produk dan bisnis bank demi meningkatkan pertumbuhan nilai DPK segmen ritel Bank.
3. Peluncuran kolaborasi pemasaran dengan mitra strategis Bank seperti Alfamart dan Evermos pasca integrasi *Banking-as-a-Service* dengan Aplikasi Alfagift dan Evermos demi meningkatkan retensi, kualitas nasabah dan nilai transaksi pada platform yang telah terintegrasi dengan Aladin tersebut.

Dengan strategi pemasaran yang efektif, Bank Aladin Syariah percaya tingkat penetrasi produk dan layanan yang ditawarkan Bank kepada masyarakat akan terus meningkat. Dengan begitu, harapannya terjadi peningkatan pangsa pasar Bank Aladin Syariah, yang berfokus pada akuisisi dan peningkatan kualitas nasabah dari segmen Ritel, serta segmen *Small Medium Enterprise (SME) & Korporasi*.

growth, Bank Aladin Syariah had to focus on increasing customer acquisition. In principle, Indonesia, with the largest Muslim population in the world, has great potential for Bank Aladin Syariah to improve its performance and achieve growth. Moreover, Bank Aladin Syariah, which is a digital sharia bank, has benefited from the increasingly massive use of mobile phones among almost all levels of society, which is supported by adequate network infrastructure.

To support the growth target for 2023, Bank Aladin Syariah prepared and determined the following marketing strategies:

1. Continue to increase the Bank's Brand Awareness by running branding campaigns through digital and conventional media, including branding campaigns within the Alfamart network throughout Indonesia.
2. Increase focus on marketing and campaigns for Retail TPF Products, in line with the development of the Bank's products and business to increase the growth of the TPF in the Bank's retail segment.
3. Launch marketing collaborations with strategic Bank partners such as Alfamart and Evermos after the integration of Banking-as-a-Service with the Alfagift and Evermos Applications to increase retention, customer quality and transaction value on the platforms vthat has been integrated with Aladin.

With effective marketing strategies, Bank Aladin Syariah believes that the level of penetration of products and services offered by the Bank to the public will continue to increase. In this way, it is hoped that Bank Aladin Syariah will increase its market share, which is focuses on acquiring and improving the quality of customers from the Retail segment, as well as the Small Medium Enterprise (SME) & Corporate segments.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Bank

Overview of Operations per Bank Business Segment

Bank Aladin Syariah Syariah perusahaan bergerak di bidang syariah berbasis digital terus berupaya untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah dengan menyediakan berbagai produk-produk perbankan syariah terbaik. Selain fokus dalam menyediakan produk dan layanan unggul, Bank Aladin Syariah juga memperluas cakupan pasar hingga ke seluruh wilayah di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi dan aplikasi Aladin. Di samping itu, untuk memberikan layanan yang optimal kepada nasabah, Bank Aladin Syariah juga terus memperluas kerja sama kemitraan. Diantaranya adalah kemitraan dengan Alfamart yang menghadirkan layanan tarik setor tunai Bank pada seluruh gerai Alfamart dan Alfamidi yang ada di Indonesia. Selain itu, Bank Aladin Syariah juga telah menghadirkan layanan Banking as a Service pada platform Alfagift.

Transformasi bisnis yang dilakukan oleh Bank Aladin Syariah dengan tetap menjalankan fungsi intermediasi, baik untuk penghimpunan dana maupun penyaluran dana dengan prinsip syariah. Segmen usaha Bank Aladin Syariah terdiri dari atas segmen Ritel, serta segmen *Small Medium Enterprise* (SME) & Korporasi. Berikut pembahasan dan penjelasan mengenai segmen Ritel, serta segmen *Small Medium Enterprise* (SME) & Korporasi dari Bank Aladin Syariah.

Segmen Ritel

Penjelasan dan Perkembangan Segmen

Segmen Ritel dirancang untuk menjadi pilar utama dalam melakukan akuisisi nasabah secara digital melalui aplikasi Bank Aladin Syariah. Pada segmen ritel, Bank Aladin Syariah menasar nasabah individu termasuk di dalamnya kepada segmen *underbanked* dan *unbanked* dengan menawarkan produk penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito berjangka, serta layanan perbankan seperti menu pembayaran, pembelian, donasi hingga transaksi tarik dan setor tunai di gerai Alfamart yang merupakan mitra strategis Bank Aladin Syariah.

Berikut adalah produk-produk penghimpunan dana dari segmen ritel Bank.

1. Ala Dompêt
Produk Ala Dompêt adalah bentuk tabungan yang didasarkan pada prinsip Akad *Mudharabah*. Produk ini dirancang untuk memenuhi keperluan transaksi perbankan sehari-hari dan dapat dihubungkan dengan Kartu Debit yang diterbitkan oleh Bank.
2. Ala Impian
Ala Impian merupakan produk tabungan berdasarkan Akad *Mudharabah* yang bertujuan untuk membantu nasabah merencanakan keuangan mereka. Nasabah dapat menetapkan target waktu atau jumlah tabungan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Bank Aladin Syariah is a company operating in the digital-based sharia sector, and continues to strive to meet all customer needs by providing the best sharia banking products. As well as providing superior products and services, Bank Aladin Syariah has expanded its market coverage to all regions in Indonesia through the use of Aladin technology and applications. Also, to provide optimal service to customers, Bank Aladin Syariah is continuing to expand its partnership cooperations. These include a partnership with Alfamart that provides Bank cash deposit withdrawal services at all Alfamart and Alfamidi outlets in Indonesia. In addition, Bank Aladin Syariah also provides Banking as a Service services on the Alfagift platform.

The business transformation carried out by Bank Aladin Syariah continues with an intermediation function, for collecting funds and distributing funds according to sharia principles. Bank Aladin Syariah's business segments consist of the Retail segment, as well as the Small Medium Enterprise (SME) & Corporate segments. The following is a discussion and explanation of the Retail segment, as well as the Small Medium Enterprise (SME) & Corporate segments of Bank Aladin Syariah.

Retail Segment

Segment Explanation and Development

The Retail segment is designed to be the main pillar for digitally acquiring customers through the Bank Aladin Syariah application. In the retail segment, Bank Aladin Syariah targets individual customers including the underbanked and unbanked segments by offering fund collection products such as savings and time deposits, as well as banking services such as menu payments, purchases, donations and cash withdrawals and deposit transactions at Alfamart outlets who is strategic partner of Bank Aladin Syariah.

The Bank's retail segment includes the following fund collection products.

1. Ala Dompêt
Ala Dompêt product is a form of savings based on the principles of a Mudharabah Agreement. This product is designed to meet daily banking transaction needs and can be linked to a Debit Card issued by the Bank.
2. Ala Impian
Ala Impian is a savings product based on a Mudharabah Agreement that aims to help customers plan their finances. Customers can set a time target or savings amount according to their needs.

3. Ala Berbagi

Ala Berbagi adalah layanan yang tersedia melalui aplikasi mobile Aladin. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk berdonasi melalui Lembaga Amil Zakat yang telah menjalin kemitraan dengan Bank dan dikenal sebagai lembaga yang terpercaya.

4. Bayar dan Beli

Layanan Bayar dan Beli yang disediakan dalam aplikasi *mobile* Aladin membantu nasabah untuk membayar berbagai tagihan utilitas bulanan, membeli token listrik, pulsa, maupun paket data.

5. Tarik dan Setor Tunai

Layanan Tarik dan Setor Tunai membantu nasabah untuk menarik dan menyetor uang tunai tanpa perlu menggunakan kartu debit. Layanan ini dapat diakses melalui seluruh *outlet* Alfamart di seluruh Indonesia.

Tantangan dan Strategi Tahun 2023

Upaya melakukan pengembangan, Bank Aladin Syariah pada segmen Ritel dalam rangka meningkatkan kinerja, meski terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Adapun tantangan yang dihadapi Bank Aladin Syariah terkait segmen Ritel di tahun 2023, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Persaingan di industri Perbankan dalam memberikan imbal hasil di tengah tren kenaikan suku bunga di pasar.
2. Semakin banyaknya Bank berinvestasi pada pengembangan teknologi digital yang menghadirkan berbagai pilihan produk dan layanan digital sehingga nasabah ritel dapat merubah preferensi Bank dengan cepat.

Di tengah tantangan tersebut, Bank Aladin Syariah telah menetapkan berbagai kebijakan strategis terkait segmen Ritel, yakni sebagai berikut:

1. Memperluas kerja sama berbasis kemitraan guna menjaring nasabah segmen ritel.
2. Melakukan pengembangan dan inovasi berkelanjutan atas produk dan layanan perbankan ritel yang ditawarkan oleh Bank, baik melalui aplikasi digital Bank maupun pelayanan kepada nasabah secara langsung oleh *Relationship Manager*.

Segmen UMKM & Korporasi

Penjelasan dan Perkembangan Segmen

Segmen UMKM dan Korporasi merupakan pilar utama dalam membangun portofolio pendanaan dan juga pembiayaan Aladin Bank. Pada segmen ini, Bank Aladin Syariah menysasar nasabah pengusaha atau badan usaha baik yang berasal dari segmen mikro, kecil, menengah maupun korporasi besar dengan menawarkan produk penghimpun dana seperti tabungan dan deposito berjangka, serta layanan rekening *payroll* karyawan. Di samping produk pendanaan, Bank juga menawarkan produk pembiayaan syariah yang bertujuan mendukung pertumbuhan usaha nasabah.

3. Ala Berbagi

Ala Berbagi is a service available through the Aladin mobile application. This service allows customers to donate through the Amil Zakat Institution that has established a partnership with the Bank and is known as a trusted institution.

4. Pay and Buy

The Pay and Buy service provided in the Aladin mobile application helps customers pay monthly utility bills, buy electricity tokens, HP Topups and data packages.

5. Cash Withdrawal and Deposit

The Cash Withdrawal and Deposit service helps customers withdraw and deposit cash without needing to use a debit card. This service can be accessed through all Alfamart outlets throughout Indonesia.

Challenges and Strategies for 2023

Efforts were made to develop Bank Aladin Syariah's Retail segment to improve its performance, although there were several challenges to face. The challenges faced by Bank Aladin Syariah in the Retail segment in 2023 included the following:

1. Competition in the banking industry in providing returns during the trend to increase interest rates in the market.
2. More and more banks are investing in the development of digital technology that provides a wide choice of digital products and services so that retail customers can change their bank preferences quickly.

Despite these challenges, Bank Aladin Syariah instigated a number of strategic policies related to the Retail segment including the following:

1. Expand partnership-based cooperation to attract retail segment customers.
2. Carry out continuous development and innovation of retail banking products and services offered by the Bank, both through the Bank's digital application and the direct service to customers by the Relationship Managers.

MSME & Corporate segment

Segment Explanation and Development

The MSME & Corporate segment is the main pillar for building Aladin Bank's funding and financing portfolio. In this segment, Bank Aladin Syariah targets business customers or business entities from the micro, small, medium and large corporate segments by offering fund-raising products such as savings and time deposits, and payroll account services. In addition to funding products, the Bank also offers sharia financing products aimed at supporting customer business growth.



Tantangan dan Strategi Tahun 2023

Di tahun 2023, Bank Aladin Syariah terus melakukan ekspansi kemitraan untuk menciptakan *awareness* pada target segmen, dan diharapkan akan memudahkan proses akuisisi atas nasabah UMKM & Korporasi. Adapun kemitraan strategis yang dilakukan oleh Bank Aladin Syariah juga menasar ke seluruh ekosistem yang terkait, mulai dari karyawan, jaringan *supplier*, dan ekosistem lainnya untuk dapat menikmati produk dan layanan perbankan syariah Bank Aladin Syariah. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Aladin Bank terkait segmen UMKM & Korporasi di tahun 2023, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Persaingan di industri perbankan baik dari sisi penghimpunan dana maupun pembiayaan di tengah tren kenaikan suku bunga dan likuiditas tinggi di pasar
2. Gap atas kapasitas segmen UMKM terhadap pemenuhan persyaratan standar produk dan layanan keuangan perbankan
3. Kebutuhan sektor korporasi yang komprehensif akan solusi keuangan menyeluruh bagi perusahaan

Adapun strategi yang dilakukan Bank Aladin Syariah dalam rangka mengembangkan segmen UMKM & Korporasi, yakni sebagai berikut:

1. Memberikan informasi produk dan layanan Bank Aladin Syariah yang lebih efektif bagi segmen UKM dan Korporasi melalui Sosialisasi Produk dan Layanan Bank Aladin Syariah terutama kepada calon nasabah dari ekosistem mitra
2. Menambah ragam produk dan akad pembiayaan yang ditawarkan Bank, diantaranya dengan peluncuran produk pembiayaan dengan akad *Musyarakah*
3. Melengkapi produk pendanaan dan layanan perbankan yang ditawarkan Bank, diantaranya melalui layanan Corporate Internet Banking dan penyediaan rekening *payroll* Karyawan bagi nasabah.

Challenges and Strategies for 2023

In 2023, Bank Aladin Syariah continued to expand its partnerships to create awareness in target segments, and to help the acquisition process for MSME & Corporate customers. Bank Aladin Syariah's strategic partnerships targeted all related ecosystems, starting with employees, supplier networks, and other ecosystems, so they could enjoy Bank Aladin Syariah's sharia banking products and services. However, there were several challenges faced by Aladin Bank in the MSME & Corporate segment in 2023, including the following:

1. Competition in the banking industry in terms of raising funds and financing during the trend to increase interest rates, and the high liquidity in the market
2. Gaps in the MSME segment capacity to fulfill standard requirements for banking financial products and services
3. The corporate sector's need for comprehensive financial solutions for companies

The strategies instigated by Bank Aladin Syariah to develop the MSME & Corporate segment were as follows:

1. Provide more effective information on Bank Aladin Syariah products and services for the SME and Corporate segments by Socializing Bank Aladin Syariah Products and Services, especially to potential customers from the partner ecosystem
2. Increase the variety of financing products and contracts offered by the Bank, including launching financing products with *Musyarakah* contracts
3. Complement the funding products and banking services offered by the Bank, including Corporate Internet Banking services and providing employee payroll accounts for customers.

Tinjauan Keuangan

Financial Overview

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan dalam Laporan Tahunan ini telah mengacu kepada Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Bank Aladin Syariah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, serta peraturan-peraturan yang berlaku.

The analysis and discussion of financial performance in this Annual Report refers to the Financial Report audited by the Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro & Surja with an opinion of unqualified in all material respects for the years ending December 31, 2023 and 2022.

Presentation and disclosure of Bank Aladin Syariah's Financial Reports are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, including Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), Indonesian Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI), and Bapepam-LK Regulation No. VIII.G.7 Attachment to the Chairman of Bapepam and LK Decision No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 concerning Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Reports of Issuers or Public Companies, as well as applicable regulations.

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

Tabel Posisi Keuangan Tahun 2022-2023
Statement of Financial Position 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Aset Assets	7.092.120	4.733.401	2.358.719	50%	▲
Liabilitas Liabilities	751.880	795.476	(43.596)	-6%	▼
Dana Syirkah Temporer Temporary Syirkah Fund	3.254.999	794.649	2.460.350	310%	▲
Ekuitas Equity	3.085.241	3.143.276	(58.035)	-2%	▼
Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas Total Liabilities, Temporary Syirkah Funds and Equity	7.092.120	4.733.401	2.358.719	50%	▲

Berdasarkan tabel di atas, jumlah aset Bank di tahun 2023, tercatat meningkat 50% dibanding tahun sebelumnya, sementara jumlah liabilitas mengalami penurunan 6%. Adapun jumlah dana syirkah temporer di tahun 2023, tercatat meningkat 310% dibanding tahun sebelumnya, dan jumlah ekuitas mengalami penurunan 2%.

Based on the above table, the Bank's total assets in 2023 increased by 50% compared to the previous year, while total liabilities decreased by 6%. Total temporary syirkah funds in 2023 increased by 310% compared to the previous year, and total equity decreased by 2%.

Aset

Assets

Tabel Aset Tahun 2022-2023
Assets 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Kas Cash	1.013	651	362	56%	▲
Giro pada Bank Indonesia Current accounts with Bank Indonesia	423.910	83.353	340.557	409%	▲
Giro pada Bank Lain - Neto Current accounts with other Banks	13.353	1.851	11.502	621%	▲
Penempatan pada Bank Indonesia Placements with Bank Indonesia	1.752.700	1.734.100	18.600	1%	▲
Investasi pada Surat Berharga - Neto Investment in marketable securities - Net	1.403.362	1.217.062	186.300	15%	▲
Piutang Murabahah - Neto Murabahah receivables - Net	790.645	796.716	(6.071)	-1%	▼
Pinjaman Qardh - Neto Qardh Funds – Net	815.623	544.800	270.823	50%	▲
Pembiayaan Musyarakah - Neto Musyarakah Financing - Net	1.449.932	-	1.449.932	100%	▲
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto Fixed assets and right of use assets - net	47.367	45.177	2.190	5%	▲
Aset tak Berwujud - Neto Intangible assets - net	77.339	51.538	25.801	50%	▲
Aset Lain-Lain Other assets	316.876	258.153	58.723	23%	▲
Total Aset Total Assets	7.092.120	4.733.401	2.358.719	50%	▲

Per 31 Desember 2023, jumlah aset Bank tercatat sebesar Rp7.092.120 juta, mengalami peningkatan 50% atau Rp2.358.719 juta dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp4.733.401 juta. Adapun peningkatan ini disebabkan oleh adanya kenaikan dana syirkah temporer yang kemudian disalurkan untuk pembiayaan Musyarakah, pinjaman Qardh maupun investasi pada surat berharga.

As of December 31, 2023, the Bank's total assets stood at Rp7,092,120 million, an increase of 50%, or Rp2,358,719 million compared to the previous year's Rp4,733,401 million. This increase was due to an increase in temporary syirkah funds that were then channeled for Musyarakah financing, Qardh loans and investments in securities.

Kas

Jumlah kas di tahun 2023, tercatat sebesar Rp1.013 juta, mengalami peningkatan 56% atau Rp362 juta dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp651 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya aktivitas operasional Bank.

Cash

Total cash in 2023 reached Rp1,013 million, an increase of 56%, or Rp362 million compared to Rp651 million in 2022. This increase was due to the Bank's operational activities.

Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp423.910 juta, mengalami peningkatan 409% atau Rp 340.557 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp83.353 juta. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya rata-rata DPK dan liabilitas lainnya sehingga adanya kewajiban pemenuhan GWM/RIM yang lebih besar.

Current accounts with Bank Indonesia

Current accounts with Bank Indonesia, as of December 31, 2023, reached Rp423,910 million, an increase of 409%, or Rp340,557 million compared to the previous year's Rp83,353 million. This was due to the increase in the average TPF and other liabilities so that there was a greater obligation to fulfill the GWM/RIM.

Giro pada Bank Lain - Neto

Giro pada Bank lain - neto, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp13.353 juta, mengalami peningkatan 621% atau Rp11.502 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp1.851 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penempatan nostro pada bank lain.

Penempatan pada Bank Indonesia

Per 31 Desember 2023, penempatan pada Bank Indonesia tercatat sebesar Rp1.752.700 juta, mengalami peningkatan 1% atau Rp18.600 juta dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp1.734.100 juta. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan penempatan pada instrumen FASBIS.

Investasi pada Surat Berharga - Neto

Investasi pada surat berharga – neto, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp1.403.362 juta, meningkat 15% atau Rp186.300 juta dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.217.062 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya komersial surplus Bank yang kemudian ditempatkan pada instrumen Surat Berharga.

Piutang Murabahah - Neto

Piutang *murabahah* – neto, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp790.645 juta. Penurunan 1% atau Rp6.071 juta dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp796.716 juta, yang dikarenakan adanya pelunasan pembiayaan.

Pinjaman Qardh – Neto

Pinjaman *qardh* – neto, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp815.623 juta, mengalami peningkatan 50% atau Rp270.823 juta dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp544.800 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya nasabah pembiayaan yang menyebabkan peningkatan atas pinjaman *qardh* di tahun 2023.

Pembiayaan Musyarakah – Neto

Pembiayaan *musyarakah* – neto, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp1.449.932 juta. Sementara di tahun 2022, tidak mencatatkan pembiayaan *musyarakah* - neto, dikarenakan pada tahun sebelumnya belum terdapat pembiayaan *musyarakah*.

Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto

Aset tetap dan aset hak guna – neto, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp47.367 juta, mengalami peningkatan 5% atau Rp2.190 juta dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp45.177 juta. Peningkatan ini dikarenakan oleh bertambahnya perolehan aset tetap komputer dan aset hak guna, offset dengan aset yang telah terdepresiasi.

Aset tak Berwujud - Neto

Aset tak berwujud – neto, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp77.339 juta, meningkat 50% atau Rp25.801 juta dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp51.538 juta. Hal ini dikarenakan adanya penambahan berupa piranti lunak dan aset tak berwujud dalam penyelesaian.

Current Accounts with Other Banks - Net

Current accounts with other banks - net, as of December 31, 2023, reached Rp13,353 million, an increase of 621%, or Rp11,502 million compared to the previous year's Rp1,851 million. This was due to the increase in nostro placements with other banks.

Placements with Bank Indonesia

As of December 31, 2023, placements with Bank Indonesia reached Rp1,752,700 million, an increase of 1%, or Rp18,600 million compared to Rp1,734,100 million in 2022. This was due to an increase in placements in the FASBIS instruments.

Investment in Marketable Securities - Net

Investment in Marketable securities – net, as of December 31, 2023 reached Rp1,403,362 million, an increase of 15%, or Rp186,300 million compared to Rp1,217,062 million the previous year. This increase was due to an increase in the Bank's commercial surplus that was then placed in Securities.

Murabahah Receivables - Net

Murabahah receivables – net, as of December 31, 2023, reached Rp790,645 million., a decrease of 1%, or Rp6,071 million compared to Rp796,716 million in 2022. This was due to financing repayments.

Qardh Funds – Net

Qardh funds – net, as of December 31, 2023, reached Rp815,623 million, an increase of 50%, or Rp270,823 million compared to Rp544,800 million in 2022. This increase was due to an increase in customer financing that resulted in an increase in qardh loans in 2023.

Musyarakah Financing - Net

Musyarakah Financing – net, as of December 31, 2023, reached Rp1,449,932 million, compared to zero in 2022 when there was no musyarakah financing.

Fixed Assets and Right of Use Assets - Net

Fixed assets and right-of-use assets – net, as of December 31, 2023, reached Rp47,367 million, an increase of 5%, or Rp2,190 million compared to Rp45,177 million the previous year. This increase was due to an increase in the acquisition of computer fixed assets and right-of-use assets, offset by asset depreciation.

Intangible Assets - Net

Intangible assets – net, as of December 31, 2023, reached Rp77,339 million, an increase of 50%, or Rp25,801 million compared to Rp51,538 million the previous year. This was due to the addition of software and intangible assets in progress.

Aset Lain-Lain

Per 31 Desember 2023, aset lain-lain tercatat sebesar Rp316.876 juta, meningkat 23% atau Rp58.723 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp258.153 juta. Peningkatan ini dikarenakan oleh adanya kenaikan biaya dibayar dimuka dan pendapatan yang masih akan diterima.

Other Assets

As of December 31, 2023, other assets reached Rp316,876 million, an increase of 23%, or Rp58,723 million compared to Rp258,153 million the previous year. This increase was due to an increase in prepaid costs and accrued income.

Liabilitas

Liabilities

Tabel Liabilitas Tahun 2022-2023
Liabilities 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Liabilitas Segera Liabilities due immediately	69.839	16.392	53.447	326%	▲
Simpanan dari Wadiah Wadiah deposits	1	1	0	0%	▲
Surat Berharga yang Diterbitkan Securities issued	-	648.000	(684.000)	-100%	▼
Liabilitas pada Bank Indonesia Liabilities to Bank Indonesia	584.248		584.248	100%	▲
Utang Pajak Taxes payable	6.973	6.066	907	15%	▲
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi Estimated Losses on Commitments and Contingencies	2.822	1.752	1.070	61%	▲
Liabilitas Lain-Lain Other liabilities	87.997	87.265	732	1%	▲
Total Liabilitas Total Liabilities	751.880	795.476	(43.596)	-6%	▼

Per 31 Desember 2023, jumlah liabilitas tercatat sebesar Rp751.880 juta, mengalami penurunan 6% atau Rp43.596 juta dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp795.476 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan transaksi pada surat berharga yang diterbitkan antar bank (SIMA dan SIPA), serta adanya peningkatan transaksi pada Bank Indonesia (PASBI).

As of December 31, 2023, total liabilities reached Rp751,880 million, a decrease of 6%, or Rp43,596 million compared to Rp795,476 million in 2022. This decrease was due to a decrease in transactions for securities issued between banks (SIMA and SIPA), as well as an increase in transactions with Bank Indonesia (PASBI).

Liabilitas Segera

Liabilitas segera, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp69.839 juta, meningkat 326% atau Rp53.447 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp16.392 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan transaksi kewajiban ATM.

Liabilities due immediately

Liabilities due immediately, as of December 31, 2023, reached Rp69,839 million, an increase of 326%, or Rp53,447 million compared to the previous year's Rp16,392 million. This was due to an increase in ATM liabilities transactions.

Simpanan dari Wadiah

Per 31 Desember 2023, simpanan dari nasabah berupa giro wadiah tercatat sebesar Rp1 Juta, tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya.

Wadiah deposits

As of December 31, 2023, Wadiah deposits from customers reached Rp1 million, no change from the previous year.

Surat Berharga Yang Diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar nihil, mengalami penurunan 100% atau Rp684.000 juta dibanding tahun 2022 sebesar Rp684.000 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran kembali/pelunasan atas transaksi surat berharga yang diterbitkan antar bank (SIMA dan SIPA).

Securities Issued

Securities issued, as of December 31, 2023, reached zero, a decrease of 100%, or Rp684,000 million compared to Rp684,000 million in 2022. This decrease was due repayments of securities transactions issued between banks (SIMA and SIPA).

Liabilitas pada Bank Indonesia

Liabilitas pada Bank Indonesia, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp584.248 juta. Sementara di tahun sebelumnya, tidak terdapat transaksi pada Bank Indonesia (PASBI).

Utang Pajak

Per 31 Desember 2023, utang pajak tercatat sebesar Rp6.973 juta, mengalami peningkatan 15% atau Rp907 juta dibanding tahun 2022 sebesar Rp6.066 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pada PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 4 ayat 2.

Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp2.822 juta. mengalami peningkatan 61% atau Rp1.070 juta dibanding tahun 2022 sebesar Rp1.752 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan fasilitas pembiayaan murabahah yang belum ditarik (*committed*).

Liabilitas Lain-lain

Per 31 Desember 2023, liabilitas lainnya tercatat sebesar Rp87.997 juta, meningkat 1% atau Rp732 juta dibanding tahun 2022 yang mencapai Rp87.265 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya kenaikan biaya yang masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja karyawan dan bagi hasil yang belum dibagikan.

Dana Syirkah Temporer

Bank Indonesia Liabilities

Bank Indonesia Liabilities, as of December 31, 2023, reached Rp84,248 million. While, in the previous year, there were no transactions at Bank Indonesia (PASBI).

Taxes Payable

As of December 31, 2023, taxes payable reached Rp6,973 million, an increase of 15%, or Rp907 million compared to Rp6,066 million in 2022. This increase was due to an increase in PPH Article 21 and PPH Article 4 paragraph 2.

Estimated Losses on Commitments and Contingencies

Estimated Losses on Commitments and Contingencies, as of December 31 2023, reached Rp2,822 million, an increase of 61%, or Rp1,070 million compared to Rp1,752 million in 2022. This increase was due to an increase in murabahah financing facilities that had not been withdrawn (*committed*).

Other Liabilities

As of December 31, 2023, other liabilities reached Rp87,997 million, an increase of 1%, or Rp732 million compared to Rp87,265 million in 2022. This increase was due to an increase in accrued expenses, employee benefit obligations and undistributed profit sharing.

Temporary Syirkah Fund

Tabel Dana Syirkah Temporer Tahun 2022-2023
Temporary Syirkah Funds 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Tabungan <i>Mudharabah</i> <i>Mudharabah demand savings</i>	510.651	116.306	394.345	339%	▲
Deposito <i>Mudharabah</i> <i>Mudharabah time deposits</i>	2.744.348	678.343	2.066.005	304%	▲
Total Dana Syirkah Temporer Total Temporary Syirkah Funds	3.254.999	794.649	2.460.350	309%	▲

Jumlah dana *syirkah* temporer, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp3.254.999 juta, mengalami peningkatan 309% atau Rp2.460.350 juta dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp794.649 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.

Tabungan Mudharabah

Per 31 Desember 2023, tabungan *mudharabah* tercatat sebesar Rp510.651 juta, mengalami peningkatan 339% atau Rp394.345 juta dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp116.306 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penempatan dana nasabah, bertambahnya jumlah nasabah serta peningkatan akuisisi *payroll* dan peningkatan *use case* dari fitur *bill payment*, donasi, serta tarik setor tunai di *outlet-outlet* Alfamart.

Total temporary *syirkah* funds, as of December 31, 2023, reached Rp3,254,999 million, an increase of 309%, or Rp2,460,350 million compared to Rp794,649 million in 2022. This increase was due to an increase in *mudharabah* time deposits and *mudharabah* demand savings.

Mudharabah Demand Savings

As of December 31, 2023, *mudharabah* demand savings reached Rp510,651 million, an increase of 339%, or Rp394,345 million compared to Rp116,306 million in 2022. This increase was due to customer fund placements, an increase in the number of customers as well as an increase in *payroll* acquisitions, and an increase in use cases for bill payments, donations and cash deposit withdrawal features at Alfamart outlets.

Deposito Mudharabah

Per 31 Desember 2023, deposito *mudharabah* tercatat sebesar Rp2.744.348 juta, mengalami peningkatan 304% atau Rp2.066.005 juta dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp678.343 juta. Pertumbuhan tersebut berasal dari penempatan dana nasabah ritel dan korporasi.

Mudharabah Time Deposits

As of December 31, 2023, *mudharabah* time deposits reached Rp2,744,348 million, an increase of 304%, or Rp2,066,005 million compared to Rp678,343 million in 2022. This growth came from the placement of funds from retail and corporate customers.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas Tahun 2022-2023
Equity 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and fully paid-in capital	1.391.838	1.377.051	14.787	1%	▲
Tambahan Modal Disetor Additional paid-in capital	965.669	964.190	1.479	0%	▲
Dana Setoran Modal Capital deposit funds	1.512.501	1.363.862	148.639	11%	▲
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of defined benefit plan	4.761	2.720	2.041	75%	▲
KEUNTUNGAN YANG BELUM DIREALISASIKAN SURAT BERHARGA DALAM KELOMPOK TERSEDIA UNTUK DIJUAL: Unrealized Gain on available-for-sale marketable securities					
Tersedia untuk Dijual Tersedia untuk Dijual	2.120	363	1.757	484%	▲
Saldo Laba Retained earnings					
Saldo Laba dari Kegiatan Konvensional Retained earnings from conventional activities	29.541	29.541	-	0%	▲
Saldo Rugi dan Kegiatan Syariah Deficit from sharia activities	(821.189)	(594.451)	(226.738)	38%	▲
Total Ekuitas Total Equity	3.085.241	3.143.276	(58.035)	-2%	▼

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Modal ditempatkan dan disetor penuh, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp1.391.838 juta, meningkat 1% atau Rp14.787 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp1.377.051 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pelaksanaan waran.

Issued and Fully Paid-in Capital

Issued and fully paid-in capital, as of December 31, 2023, stood at Rp1,391,838 million, an increase of 1%, or Rp14,787 million compared to Rp1,377,051 the previous year. This increase was due to the execution of warrants.

Tambahan Modal Disetor

Per 31 Desember 2023, tambahan modal disetor tercatat sebesar Rp965.669 juta, meningkat Rp1.479 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp964.190 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pelaksanaan waran.

Additional Paid-in Capital

As of December 31, 2023, additional paid-in capital stood at Rp965,669 million, an increase of Rp1,479 compared to the previous year's Rp964,190 million, due to the execution of warrants.

Dana Setoran Modal

Dana setoran modal, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp1.512.501 juta, meningkat 11% atau Rp 148.639 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp1.363.862 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penambahan dana setoran modal dari pemegang saham pengendali dan pelaksanaan waran.

Capital Deposit Funds

Capital deposit funds, as of December 31, 2023, stood at Rp1,512,501 million, an increase of 11%, or Rp148,639 million compared to the previous year's Rp1,363,862 million. This increase was due to additional capital contributions from controlling shareholders and the execution of warrants.

Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti

Hingga 31 Desember 2023, pengukuran kembali atas program imbalan pasti tercatat sebesar Rp4.761 juta, meningkat 75% atau Rp2.041 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp2.720 juta. Hal ini disebabkan oleh pengukuran kembali atas (liabilitas) aset imbalan neto berjalan yang dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen sesuai dengan PSAK 24.

Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat Berharga dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual

Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp2.120 juta, meningkat 484% atau Rp 1.757 juta dibanding tahun 2022 sebesar Rp363 juta. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan Investasi pada surat berharga dalam unit reksadana syariah serta pergerakan nilai aktiva bersih (NAV).

Saldo Laba

Saldo laba merupakan akumulasi atas saldo laba dari kegiatan konvensional serta saldo rugi dari kegiatan syariah, per 31 Desember 2023 tercatat sebesar minus Rp821.189 juta, mengalami peningkatan 38% atau Rp226.738 juta dibanding tahun 2022 sebesar minus Rp594.451 juta. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan beban operasional.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Remeasurement of Defined Benefit Plan

As of December 31, 2023, the remeasurement of the defined benefit plan stood at Rp4,761 million, an increase of 75%, or Rp2,041 million compared to the previous year's Rp2,720 million. This was due to the remeasurement of current net benefit assets (liabilities), which is calculated annually by an independent actuary in accordance with PSAK 24.

Unrealized Gains on Available-for-Sale Marketable Securities

Unrealized gains on available-for-sale marketable securities, as of December 31, 2023, stood at Rp2,120 million, an increase of 484%, or Rp1,757 million compared to Rp363 million in 2022. This increase was due to an increase in investment in securities in sharia mutual fund units as well as movements in net asset value (NAV).

Retained Earnings

Retained earnings are the accumulation of Retained earnings from conventional activities and deficits from sharia activities, and as of December 31 2023, stood at minus Rp821,189 million, an increase of 38%, or Rp226,738 million compared to minus Rp594,451 million in 2022. This was due to an increase in operational expenses.

Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain 2022-2023
Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB Income from Funds Managed By Bank As Mudharib					
Pendapatan dari Piutang Income from receivables	201.056	16.101	184.955	1149%	▲
Pendapatan Usaha Utama Lainnya Other main operating income	133.446	65.564	67.792	103%	▲
Total Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib Total income from fund managed by Bank as mudharib	334.502	81.755	252.747	309%	▲
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer Third Parties' Rights on Return of Temporary Syirkah Funds	(121.047)	(23.982)	(97.065)	405%	▲
Hak Bagi Hasil Milik Bank Bank's Share in Profit Sharing	213.455	57.773	155.682	270%	▲
PENDAPATAN USAHA LAINNYA Other Operating Income					
Laba Selisih Kurs - Neto Gain on foreign exchange - net	(11)	150	(161)	-107%	▼
Lain-Lain Others	36.804	19.638	17.167	87%	▲



Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain 2022-2023
Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Total Pendapatan Usaha Lainnya Total Other Operating Income	36.794	19.788	17.006	86%	▲
(Pembentukan) Pembalikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif (Establishment) Reversal of allowance for impairment losses on earning assets	(15.724)	(36.777)	21.053	-57%	▼
(Pembentukan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (Establishment) of Estimated Losses on Commitments and Contingencies		-			
BEBAN OPERASIONAL Operating Expenses					
Umum dan Administrasi General and administrative	(137.667)	(86.734)	(50.933)	59%	▲
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Salaries and employees' benefits	(194.251)	(161.867)	(32.384)	20%	▲
Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and amortization	(24.070)	(18.703)	(5.367)	29%	▲
Promosi Promotion	(105.799)	(22.037)	(83.762)	380%	▲
Iuran Otoritas Jasa Keuangan Financial Service Authority contributions	(3.282)	(1.631)	(1.651)	101%	▲
Rugi Selisih Kurs - Neto Loss on Exchange Differences - Net	-	-	-	-	
Lain-Lain Others	(12.597)	(14.171)	1.574	-11%	▼
Total Beban Operasional Total Operating Expenses	(477.666)	(305.143)	(172.523)	57%	▲
Laba (Rugi) Operasional Profit (loss) from Operations	(243.141)	(264.359)	21.218	-8%	▼
Pendapatan Non Operasional - Neto Non-Operating Income - Net	16.403	(554)	16.957	3.061%	▲
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Profit (loss) Before Tax Expense	(226.738)	(264.913)	38.175	-14%	▼
Beban Pajak - Neto Tax expenses - net	-	-	-	-	
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan Profit (loss) – Net for the Current Year	(226.738)	(264.913)	38.175	-14%	▼
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Other Comprehensive Income					
Pos-Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Item that will not be reclassified to profit or loss:					
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of defined benefit plan	2.041	912	1.129	124%	▲
Pajak Penghasilan Terkait Related income tax	-	-	-	-	
Pos-Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Item that will be reclassified to profit or loss:					
Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat Berharga dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual Unrealized gain on available-for-sale marketable securities	1.757	(6.464)	8.221	127%	▲

Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain 2022-2023
Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Pajak Penghasilan Terkait Related income tax	-	-	-	-	
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income (Loss) for the Year	3.798	(5.552)	9.350	168%	▲
Total Laba(Rugi) Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for the Current Year	(222.940)	(270.465)	47.525	-18%	▼
Lab a (Rugi) per Saham Dasar (Rupiah Penuh) Basic Profit (Loss) per Share (Full Rupiah)	(16)	(20)	4	-20%	▼

Total Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Di Tahun 2023, Bank membukukan total pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* sebesar Rp334.502 juta, mengalami peningkatan 309% atau Rp252.747 juta dibanding tahun 2022 sebesar Rp81.755 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan Pembiayaan yang signifikan meliputi pembiayaan multiguna dan kendaraan bermotor untuk nasabah ritel, pembiayaan modal kerja dan investasi untuk nasabah UMKM & korporasi serta *invoice financing*.

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Per 31 Desember 2023, Bank mencatatkan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, sebesar Rp121.047 juta, meningkat 405% atau Rp97.065 juta dibanding tahun 2022 sebesar Rp23.982 juta. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan dana syirkah temporer yang signifikan meliputi tabungan maupun deposito retail dan korporasi.

Hak Bagi Hasil Milik Bank

Hak bagi hasil milik Bank, adalah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* dikurangi hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, dimana per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp213.455 juta, meningkat 270% atau Rp155.682 juta dibanding tahun 2022 sebesar Rp57.773 juta. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib yang di *offset* dengan Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer.

Total Pendapatan Usaha Lainnya

Di tahun 2023, total pendapatan usaha lainnya tercatat sebesar Rp36.794 juta, mengalami peningkatan 86% atau Rp17.006 juta dibanding tahun 2022 sebesar Rp19.788 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan provisi dan komisi lainnya.

(Pembentukan) Pembalikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif

Per 31 Desember 2023, Bank mencatatkan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif, sebesar Rp15.724 juta. Sementara di tahun 2022, Bank mencatatkan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif, sebesar Rp36.777 juta.

Total Income from Funds Managed by the Bank as Mudharib

In 2023, the Bank's total income from funds managed by the Bank as *mudharib* reached Rp334,502 million, an increase of 309%, or Rp252,747 million compared to Rp81,755 million in 2022. This increase due to a significant increase in financing, including multipurpose and motor vehicle financing for retail customers, working capital and investment financing for MSME & corporate customers as well as *invoice financing*.

Third Party Rights on Return of Temporary Syirkah Funds

As of December 31, 2023, the Bank's Third Party Rights on Return of Temporary Syirkah Funds reached Rp121,047 million, an increase of 405%, or Rp97,065 million compared to Rp23,982 million in 2022. This is due to a significant increase in temporary syirkah funds including retail and corporate savings and deposits.

Bank's Share in Profit Sharing

The Bank's Share in Profit Sharing from managing funds by the Bank as *mudharib* minus third party rights to profit sharing from temporary syirkah funds, as of December 31, 2023, reached Rp213,455 million, an increase of 270%, or Rp155,682 million compared to Rp57,773 million in 2022. This was due to an increase Managing Funds by the Bank as Mudharib, offset by Third Party Rights to Profit Sharing from Temporary Syirkah Funds.

Total Other Operating Income

In 2023, total other operating income reached Rp36,794 million, an increase of 86%, or Rp17,006 million compared to Rp19,788 million in 2022. This increase was due to an increase in other fees and commission income.

(Establishment) Reversal of Allowance for Impairment Losses on Earning Assets

As of December 31, 2023, the Bank's (Establishment) Reversal of Allowance for Impairment Losses on Earning Assets, reached Rp15,724 million, compared to Rp36,777 million in 2022.



Total Beban Operasional

Per 31 Desember 2023, total beban operasional tercatat mencapai Rp477.666 juta, meningkat 57% atau Rp172.523 juta dibanding tahun 2022 sebesar Rp305.143 juta. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada beban promosi, beban umum dan administrasi, dan beban gaji dan kesejahteraan karyawan.

Laba (Rugi) Operasional

Di tahun 2023, Bank membukukan rugi operasional sebesar Rp243.141 juta, turun 8% atau Rp21.218 juta dibanding tahun 2022 dengan rugi operasional yang tercatat sebesar Rp264.359 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan beban operasional

Pendapatan Non Operasional - Neto

Per 31 Desember 2023, Bank mencatatkan pendapatan non-operasional - neto, sebesar Rp16.403 juta, meningkat 3061% atau Rp16.957 juta dibanding tahun 2022 dengan total pendapatan non-operasional - neto yang tercatat sebesar Rp554 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh reversal pencadangan tagihan pajak.

Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak

Di tahun 2023, Bank membukukan rugi sebelum pajak sebesar Rp226.738 juta, mengalami penurunan 14% atau Rp38.175 juta dibanding rugi sebelum pajak yang dibukukan di tahun 2022 yakni sebesar Rp264.913 juta. Rugi tersebut masih sejalan dengan strategi dan rencana bisnis Bank di mana Bank sedang fokus dalam proses transformasi dan pengembangan bisnis bank digital. Proses tersebut berdampak pada peningkatan beban operasional Bank.

Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan

Di tahun 2023, Bank membukukan rugi bersih periode berjalan sebesar Rp226.738 juta, mengalami penurunan 14% atau Rp38.175 juta dibanding rugi bersih periode berjalan tahun 2022 yakni sebesar Rp264.913 juta. Rugi tersebut masih sejalan dengan strategi dan rencana bisnis Bank di mana Bank sedang fokus dalam proses transformasi dan pengembangan bisnis bank digital. Proses tersebut berdampak pada peningkatan beban operasional Bank.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Periode Berjalan

Per 31 Desember 2023, Bank mencatatkan penghasilan komprehensif lain periode berjalan sebesar Rp3.798 juta, mengalami peningkatan 168% atau Rp9.350 juta dibanding rugi komprehensif lain periode berjalan yang tercatat sebesar Rp5.552 juta di tahun 2022. Hal ini dikarenakan kenaikan pada keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar dan pengukuran kembali program imbalan pasti setelah pajak tangguhan.

Total Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Total laba (rugi) penghasilan komprehensif periode berjalan merupakan akumulasi dari laba (rugi) neto periode berjalan, dan penghasilan (rugi) komprehensif lain periode berjalan. Dimana per 31 Desember 2023, Bank membukukan total laba/rugi penghasilan komprehensif periode berjalan sebesar Rp222.940 juta, mengalami penurunan 18%

Total Operating Expenses

As of December 31, 2023, total operating expenses reached Rp477,666 million, an increase of 57%, or Rp172,523 million compared to Rp305,143 million in 2022. This was due to an increase in promotional expenses, general and administrative expenses, and employee salaries and welfare expenses.

Profit (loss) from Operations

In 2023, the Bank's profit from operations was Rp243,141 million, a decrease of 8%, or Rp21,218 million compared to the loss of Rp264,359 million in 2022. This was due to the increase in operational expenses

Non-Operating Income - Net

As of December 31, 2023, the Bank's non-operating income – net was Rp16,403 million, an increase of 3,061%, or Rp16,957 million compared to Rp554 million in 2022. This increase was due to a reversal in tax bill reserves.

Profit (Loss) Before Tax Expense

In 2023, the Bank's Loss before tax expense was Rp226,738 million, a decrease of 14%, or Rp38,175 million compared to the loss before tax of Rp264,913 million in 2022. This loss was still in line with the Bank's strategy and business plan where the Bank is focusing on the transformation and development process of the digital bank business. This process will have an impact on increasing the Bank's operational expenses.

Net Profit (Loss) for the Current Period

In 2023, the Bank's net loss for the current period was Rp226,738 million, a decrease of 14%, or Rp38,175 million compared to the net loss for the current year in 2022 of Rp264,913 million. This loss was still in line with the Bank's strategy and business plan where the Bank is focusing on the transformation and development process of the digital bank business. This process will have an impact on increasing the Bank's operational expenses.

Other Comprehensive Income (Loss) for the Current Period

As of December 31, 2023, the Bank's other comprehensive income for the current year was Rp3,798 million, a decrease of 168%, or Rp9,350 million compared to Rp5,552 million in 2022. This was due to the increase in unrealized gains on securities in the group measured at fair value, and the remeasurement of defined benefit plans after deferred tax.

Total Comprehensive Income (Loss) for the Current Period

Total comprehensive profit (loss) for the current year is the accumulation of net profit (loss) for the current period, and other comprehensive income (loss) for the current period. Where as of December 31, 2023, the Bank posted a total comprehensive income profit/loss for the current year of Rp222,940 million, a decrease of

atau Rp47.575 juta dibanding total rugi penghasilan komprehensif periode berjalan di tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp270.465 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan bank yang di *offset* dengan peningkatan beban operasional.

Laba (Rugi) per Saham Dasar

Per 31 Desember 2023, Bank mencatatkan rugi per saham dasar sebesar Rp16,- mengalami penurunan 20% atau Rp4,- dibanding rugi per saham dasar yang tercatat sebesar Rp20,- di tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan bank yang di *offset* dengan peningkatan beban operasional.

18%, or Rp47,575 million compared to the loss of Rp270,465 million in 2022. This decrease was due to an increase in Bank income, offset by an increase in operational expenses.

Basic Profit (Loss) per Share

As of December 31, 2023, the Bank's basic loss per share was Rp16, a decrease of 20%, or Rp4 compared to the basic loss per share of Rp20 in 2022. This decrease was due to an increase in Bank income, offset by an increase in operational expenses.

Laporan Arus Kas

Statement of Cash Flows

Tabel Arus Kas 2022-2023
Statement of Cash Flows 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES					
Penerimaan Piutang, Bagi Hasil dan Usaha Utama Lainnya Proceeds of Receivables, Profit Sharing and Other Main Operating Businesses	336.092	73.671	262.421	356%	▲
Pembayaran Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer Payment of profit sharing for temporary <i>syirkah</i> funds	(115.011)	(23.342)	(91.669)	393%	▲
Penerimaan Pendapatan Operasional Lainnya Receipt of other operating income	36.805	446	36.359	8152%	▲
Penerimaan Non Operasional - Neto Proceeds of Non Operating - Net	(487)	(623)	136	-22%	▼
Pembayaran Beban Operasional Payment of operating expense	(345.060)	(283.699)	(61.361)	22%	▲
Laba (Rugi) Sebelum Perubahan dalam Aset dan Liabilitas Operasi Profit (Loss) before changes in operating assets and liabilities	(87.661)	(233.547)	145.886	-62%	▼
Kenaikan (Penurunan) Aset Operasi Increase (Decrease) in operating assets:	(1.891.557)	(1.567.011)	(324.546)	21%	▲
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi Increase (Decrease) in operating liabilities:	2.421.834	466.023	1.955.811	420%	▲
Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net cash (used in) provided by operating activities	442.616	1.334.535	1.777.151	133%	▲
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES					
Perolehan Investasi dalam Surat Berharga dalam Kelompok Biaya Perolehan dan Tersedia untuk Dijual Acquisition of investment in marketable securities classified at cost and available-for-sale	(842.993)	(18.315.437)	17.472.444	-95%	▼
Perolehan Aset Tetap, Aset Hak Guna dan Piranti Lunak Acquisitions of fixed assets, right to use asset and software	(35.673)	(53.219)	17.546	-33%	▼
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Proceed from sale of marketable securities	326.000	1.422.971	(1.096.971)	-77%	▼
Penerimaan dari Investasi dalam Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo Proceed from investment in matured marketable securities	328.674	16.586.470	(16.586.370)	-98%	▼
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net cash used in investing activities	(223.992)	(359.215)	135.223	-38%	▼

Tabel Arus Kas 2022-2023
Statement of Cash Flows 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES					
Penerimaan Modal dari HMETD Proceeds capital of PMHMETD I	-	1.008.529	(1.008.529)	-100%	▼
Pembayaran Biaya Emisi Saham Payment of PMHMETD I	-	(5.031)	(5.031)	-100%	▼
Penerimaan Modal dari PMTHMETD Proceeds capital of private placement	-	1.190.000	(1.190.000)	-100%	▼
Penerimaan Modal dari Pemegang Saham Pengendali Proceeds capital of ultimate shareholder	152.500	170.000	(17.500)	-10%	▼
Pelaksanaan Waran Exercise of warrants	12.405	3.916	8.489	217%	▲
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of lease liabilities	(12.376)	(12.338)	(38)	0,3%	▲
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Net cash provided by financing activities	152.529	2.355.076	(2.202.547)	-94%	▼
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	371.153	661.326	(290.173)	-44%	▼
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR	1.819.974	1.158.523	661.351	57%	▲
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang pada Kas dan Setara Kas Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(16)	125	(141)	-113%	▼
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR	2.191.111	1.819.974	371.137	20%	▲

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Di tahun 2023, Bank mencatatkan kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi sebesar Rp442.616 juta, mengalami peningkatan 133% atau Rp1.777.151 juta dibandingkan tahun 2022, dimana Bank mencatatkan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi sebesar minus Rp1.334.535 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pada liabilitas operasi yaitu dana syirkah temporer dan liabilitas kepada bank indonesia.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2023, Bank mencatatkan kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi, sebesar Rp223.992 juta, mengalami penurunan 38% atau Rp135.223 juta dibanding kas neto digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2022, yang tercatat sebesar Rp359.215 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan perolehan investasi dalam surat berharga dalam kelompok biaya perolehan dan tersedia dijual net off dengan penurunan penerimaan dari investasi dalam surat berharga yang telah jatuh tempo dan penjualan dari surat berharga

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Di tahun 2023, Bank mencatatkan kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan sebesar Rp152.529 juta, mengalami penurunan 94% atau Rp2.202.547 juta dibandingkan tahun 2022, dimana Bank mencatatkan kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2.355.076 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya penerimaan modal dari HMETD dan PMTHMETD.

Cash Flow from Operating Activities

In 2023, the Bank recorded net cash from (used for) operating activities of Rp442,616 million, an increase of 133%, or Rp1,777,151 million compared to Rp1,334,535 million net cash from operating activities in 2022. This was due to an increase in operating liabilities, namely temporary syirkah funds and liabilities to Bank Indonesia.

Cash Flows from Investing Activities

As of December 31, 2023, the Bank recorded net cash from (used for) investment activities of Rp223,992 million, a decrease of 38%, or Rp135,223 million compared to Rp359,215 million net cash used for investment activities in 2022. This was due to an increase in the Acquisition of investment in marketable securities classified at cost and available-for-sale, net off a decrease in proceeds from investment in matured marketable securities and sales of securities

Cash Flow from Financing Activities

In 2023, the Bank recorded net cash from (used for) funding activities of Rp152,529 million, a decrease of 94%, or Rp2,202,547 million compared to Rp2,355,076 million net cash from financing activities in 2022. This was due to the receipt of capital from HMETD and PMTHMETD.

Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas

Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas merupakan akumulasi atas arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan, yang per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp371.153 juta, mengalami penurunan 44% atau Rp290.173 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp661.326 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan atas aktivitas dari pendanaan dan aktivitas investasi *net off* dengan kenaikan aktivitas operasi.

Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun

Kas dan setara kas pada awal tahun 2023, tercatat sebesar Rp 1.819.874 juta, mengalami peningkatan 57% atau Rp661.351 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp1.158.523 juta. Peningkatan cukup signifikan ini disebabkan oleh peningkatan penempatan pada dana syirkah temporer di tahun sebelumnya.

Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang pada Kas dan Setara Kas

Per 31 Desember 2023, pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas, tercatat sebesar Rp16 juta, turun 113% atau Rp141 juta dibanding tahun 2022, yang tercatat sebesar Rp125 juta. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan kurs mata uang USD.

Kas dan Setara Kas Pada akhir Tahun

Kas dan setara kas pada akhir tahun 2023, tercatat sebesar Rp2.191.111 juta, mengalami peningkatan 20% atau Rp371.137 juta dibandingkan akhir tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp1.819.974 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan penempatan pada Bank Indonesia (FASBIS) serta pemenuhan GWM/RIM yang lebih besar.

Adapun rincian kas dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, adalah sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini.

Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents

The net increase (decrease) in cash and cash equivalents reflects the accumulation of cash flows from operating activities, cash flows from investing activities, and cash flows from financing activities, which as of December 31, 2023 amounted to Rp371,153 million, a decrease of 44%, or Rp290,173 million compared to Rp661,326 million in 2022. This was due to a decrease in funding activities and net off the investment activities increase from operating activities.

Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year

Cash and cash equivalents at the beginning of 2023 was Rp1,819,874 million, an increase of 57%, or Rp661,351 million compared to Rp1,158,523 million in 2022. This significant increase was due to an increase in placements in temporary syirkah funds in the previous year.

Effects of Currency Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents

As of December 31, 2023, the effects of currency exchange rate changes on cash and cash equivalents was Rp16 million, a decrease of 113%, or Rp141 million compared to Rp125 million in 2022. This was due to changes in the USD currency exchange rate.

Cash and Cash Equivalents at end of the year

Cash and cash equivalents at the end of 2023 was Rp2,191,111 million, an increase of 20%, or Rp371,137 million compared to Rp1,819,974 million at the end of 2022. This increase was due to an increase in placements with Bank Indonesia (FASBIS) as well as greater GWM/RIM fulfillment.

The details of cash and cash equivalents as of December 31, 2023 and December 31, 2022 are as shown in the table below.

Tabel Rincian Kas dan Setara Kas 2022-2023
Details of Cash and Cash Equivalents 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		▲
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Kas Cash	1.013	651	362	56%	▲
Giro pada Bank Indonesia Current accounts with Bank Indonesia	423.910	83.353	340.557	409%	▲
Giro pada Bank Lain Current accounts with other Banks	13.488	1.870	11.618	621%	▲
Penempatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi Placements with Bank Indonesia maturing within 3 (three) months from the date of acquisition	1.752.700	1.734.100	18.600	1%	▲
Total Kas dan Setara Kas Total cash and cash equivalents	2.191.111	1.819.974	371.137	20%	▲

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Statement of Reconciliation of Income and Revenue Sharing

Tabel Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil 2022-2023
Reconciliation of Income and Revenue Sharing 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan Usaha Operating Income	334.502	81.755	252.746	309%	▲
Total Pengurang Total deduction	8.815	(10.405)	(1.590)	-15%	▼
Total Penambah Total addition	10.406	2.322	8.084	348%	▲
Pendapatan Usaha yang Tersedia untuk Bagi Hasil Available operating income for profit sharing	336.093	73.672	262.421	356%	▲
Bagi Hasil yang Menjadi Hak Bank Profit sharing attributable to Bank	215.049	49.690	165.359	333%	▲
Bagi Hasil yang Menjadi Hak Pemilik Dana: Profit sharing attributable to depositors					
Hak Pemilik Dana atas Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer yang Sudah Didistribusikan Distributed return of temporary <i>syirkah</i> funds attributable to depositors	121.047	23.982	97.065	405%	▲

Pendapatan Usaha yang Tersedia untuk Bagi Hasil

Per 31 Desember 2023, pendapatan usaha yang tersedia untuk bagi hasil tercatat sebesar Rp336.093 juta, mengalami peningkatan 356% atau Rp262.421 juta dibanding tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp73.672 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan surat berharga, piutang murabahah, pinjaman qardh dan pembiayaan musyarakah.

Operating Income Available for Profit Sharing

As of December 31, 2023, operating income available for profit sharing was Rp336,093 million, an increase of 356%, or Rp262,421 million compared to Rp73,672 million in 2022. This increase was caused by an increase in securities income, murabahah receivables, funds qardh, and musyarakah financing.

Bagi Hasil yang Menjadi Hak Bank

Di tahun 2023, bagi hasil yang menjadi hak Bank tercatat sebesar Rp215.049 juta, mengalami peningkatan 333% atau Rp165.359 juta dibanding tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp49.690 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha bank.

Profit Sharing Attributable to the Bank

In 2023, profit sharing attributable to the Bank was Rp215,049 million, an increase of 333%, or Rp165,359 million compared to Rp49,690 million in 2022. This increase was due to an increase in bank operating income.

Bagi Hasil yang Menjadi Hak Pemilik Dana

Per 31 Desember 2023, bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana yang merupakan hak pemilik dana atas hasil dana *syirkah* temporer yang sudah didistribusikan tercatat sebesar Rp121.047 juta, mengalami peningkatan 405% atau Rp97.065 juta dibanding tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp23.982 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan bagi hasil deposito untuk pihak ketiga.

Profit Sharing Attributable to Depositors

As of December 31, 2023, profit sharing attributable to depositors, who have rights to the proceeds of temporary *syirkah* funds distributed was Rp121,047 million, an increase of 405%, or Rp97,065 million compared to Rp23,982 million in 2022. This increase was due to an increase in profit sharing from deposits for third parties.

Laporan Sumber dan Peyaluran Dana Zakat

Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds

Tabel Sumber dan Peyaluran Dana Zakat 2022-2023
Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Saldo Awal Dana Zakat Opening Balance of Zakat Funds	-	-	-	-	-
Sumber Dana Zakat Sources of Zakat funds	-	-	-	-	-
Zakat dari Bank Zakat from banks	-	-	-	-	-
Zakat dari Pihak Luar Bank Zakat from non-bank parties	357	105	252	240%	▲
Penyaluran Dana Zakat Distribution of Zakat funds	(357)	(105)	(252)	240%	▲
Kenaikan Dana Zakat Increase in Zakat funds	-	-	-	-	-
Saldo Akhir Dana Zakat Ending balance of Zakat funds	-	-	-	-	-

Saldo Awal Dana Zakat

Per 31 Desember 2023 dan 2022, bank tidak mencatatkan saldo awal dana zakat, disebabkan karena zakat yang diterima langsung disalurkan oleh bank kepada lembaga amil zakat.

Opening Balance of Zakat Funds

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank did not record an initial balance of zakat funds, as zakat received is directly distributed by the Bank to the zakat amil institution.

Sumber Dana Zakat

Sumber dana zakat Bank, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp357 juta, yang terdiri atas zakat dari Bank sebesar nihil, dan zakat dari pihak luar Bank sebesar Rp357 juta.

Sources of Zakat Funds

The sources of the Bank's zakat funds, as of December 31, 2023, was Rp357 million, which consisted of zakat from the Bank of nil, and zakat from non-bank parties of Rp357 million.

Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp357 juta, yang telah disalurkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompot Dhuafa.

Distribution of Zakat Funds

As of December 31, 2023, the distribution of zakat funds was Rp357 million, compared to 2022 when there was no distribution of zakat funds by the Bank.

Kenaikan Dana Zakat

Per 31 Desember 2023 dan 2022, Bank tidak terdapat kenaikan dana zakat, yang lebih disebabkan oleh seluruh dana zakat telah disalurkan pada periode yang sama.

Increase in Zakat Funds

As of December 31 2023 and 2022, there was no increase in Bank's zakat funds, as all zakat funds are channeled in the same period.

Saldo Akhir Dana Zakat

Per 31 Desember 2023 dan 2022, Bank tidak mencatatkan saldo akhir dana zakat, yang lebih disebabkan oleh seluruh dana zakat telah disalurkan pada periode yang sama.

Ending Balance of Zakat Funds

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank did not record a final balance of zakat funds, as all zakat funds are channeled in the same period.



Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Statement of Sources and Uses of Qadrul Hasan Funds

Tabel Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 2022-2023
Statement of Sources and Uses of Qadrul Hasan Funds 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Sumber Dana Kebajikan Sources of qardhul hasan funds					
Denda Penalties	2	1	1	100%	▲
Lainnya Lainnya	5	-	5	100%	▲
Penggunaan Dana Kebajikan Uses of qardhul hasan funds	416	10	406	4060%	▲
Penurunan Dana Kebajikan Decrease in qardhul hasan funds	(409)	(9)	(400)	4444%	▲
Saldo Awal Dana Kebajikan Beginning balance of qardhul hasan funds	993	1.002	9	-1%	▼
Saldo Akhir Dana Kebajikan Ending balance of qardhul hasan funds	584	993	(409)	-41%	▲

Sumber Dana Kebajikan

Sumber dana kebajikan merupakan penerimaan pendapatan denda dari nasabah dan pendapatan dari transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7 juta dan Rp1 juta.

Sources of qardhul hasan Funds

The source of qardhul hasan funds is the receipt of fined from customers and income from sharia transactions that do not fulfill the provisions and limitations (rukun and/or conditions). For the years ending December 31, 2023 and 2022, it reached Rp7 million and Rp1 million, respectively.

Penggunaan Dana Kebajikan

Penggunaan dana kebajikan, per 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp416 juta, yang telah disalurkan kepada Baznas - Tematik Ramadhan (April 2023), Staf MUI & PP Al Nahdiah (April 2023) dan IDF MUI (September 2023). Sementara di tahun 2022 tercatat sebesar Rp10 juta.

Use of qardhul hasan Funds

The use of qardhul hasan funds, as of December 31 2023, was Rp416 million, which has been distributed to Baznas - Thematic Ramadhan (April 2023), MUI & PP Al Nahdiah Staff (April 2023) and IDF MUI (September 2023). Whereas in 2022 it was Rp10 million.

Penurunan Dana Kebajikan

Per 31 Desember 2023, Bank mencatatkan penurunan dana kebajikan sebesar Rp409 juta, sementara di tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp9 juta.

Decrease in qardhul hasan Funds

As of December 31, 2023, the Bank's decrease in qardhul hasan funds was Rp409 million, compared to Rp9 million in 2022.

Saldo Awal Dana Kebajikan

Saldo awal dana kebajikan, per 31 Desember tercatat sebesar sebesar Rp993 juta, mengalami penurunan 1% atau Rp9 juta dibanding tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp1.002 juta.

Beginning Balance of qardhul hasan funds

The beginning balance of qardhul hasan funds, as of December 31, 2023 was Rp993 million, a decrease of 1%, or Rp9 million compared to Rp1,002 million in 2022.

Saldo Akhir Dana Kebajikan

Saldo akhir dana kebajikan, per 31 Desember tercatat sebesar sebesar Rp584 juta, mengalami penurunan 41% atau Rp409 juta dibanding tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp993 juta.

Ending Balance of qardhul hasan funds

The ending balance of qardhul hasan funds, as of December 31, 2023 was Rp584 million, a decrease of 41%, or Rp409 million compared to Rp993 million in 2022.

Analisis Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan

Analysis of Earning Asset Quality and Financial Ratios

Tabel Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan 2022-2023
Earning Asset Quality and Financial Ratios 2022-2023

Uraian Description	2023 (%)	2022 (%)	Perubahan (%) Change (%)	
Rasio Kinerja Performance Ratio				
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM)	96,17	189,28	-49	▼
Aset Produktif dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Earning Assets and Non-Performing Non-Earning Assets to Total Assets	0,00	-	0,00	-
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif Non-Performing Earning Assets to Total Earning Assets	0,00	-	0,00	-
CKPN Aset Keuangan terhadap Aset Produktif Allowance for Financial Assets to Earning Assets	0,84	0,88	-5	▼
NPF Gross	0,00	0,00	0,00	-
NPF Net	0,00	0,00	0,00	
Return on Assets (ROA)	(4,22)	(10,85)	61	▲
Return on Equity (ROE)	(7,55)	(8,50)	11	▲
Net Imbalan (NI) Net Rewards (NI)	4,56	3,36	36	▲
Net Operating Margin (NOM)	(4,77)	(12,24)	61	▲
Biaya Operasional terhadap Pendapatan (BOPO) Operating Cost to Operating Income (BOPO)	128,65	354,75	-64	▼
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan Profit Sharing Financing to Total Financing	47,20	-	100	▲
Financing to Deposit Ratio (FDR)	95,31	173,27	-45	▼
Cost to Income Ratio (CIR)	186,04	385,11	-52	▼
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liabilities to Equity Ratio	129,87	50,59	157	▲
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset Liabilities to Total Assets Ratio	56,50	33,59	68	▲
Rasio Kepatuhan Compliance Ratio				
Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana (BPMD) Percentage of Violations of the Maximum Funding Limit (BPMD)				
Pihak Terkait Related parties	0,00	-	0,00	-
Pihak Tidak Terkait Unrelated Parties	0,00	-	0,00	-
Persentase Pelampauan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BPMD) Percentage of Exceeding the Maximum Funding Limit (BPMD)				
Pihak Terkait Related parties	0,00	-	0,00	-
Pihak Tidak Terkait Unrelated Parties	0,00	-	0,00	-
Giro Wajib Minimum Statutory Reserve Requirement				
GWM Rupiah	13	10	30	▲
GWM Valuta Asing GWM Foreign Currency	158	158	0,00	-
Posisi Devisa Neto Secara Keseluruhan Overall Net Open Position	0,03	0,03	0,00	-

Bank senantiasa menjaga kualitas aset produktif, di mana berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa tidak terdapat aset produktif bermasalah pada tahun 2023. Bank juga telah membentuk pencadangan sesuai dengan ketentuan regulasi atas aset produktif yang dimiliki oleh Bank. Sementara rasio keuangan Bank yang meliputi rasio kinerja dan rasio kepatuhan, secara umum mencatatkan kinerja yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat terlihat dari kenaikan rasio Net Imbalan (NI), penurunan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), penurunan Cost to Income Ratio (CIR) serta dari segi kepatuhan, Bank tidak melanggar atau melampaui Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

Komitmen dan Kontinjensi

Pada tahun 2023, Bank membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi") atas fasilitas pembiayaan yang tidak ditarik sebesar Rp2.822 juta. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontinjensi atas fasilitas yang tidak ditarik adalah sebagai berikut:

Tabel Kerugian Komitmen dan Kontinjensi 2022-2023
Estimated Losses on Commitments and Contingencies 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta)	2022 (Rp-juta)
Estimasi Penyisihan untuk Komitmen dan Kontinjensi Estimated Allowance for Commitments and Contingencies		
Kerugian khusus lainnya Other special disadvantage	-	-
Perubahan Estimasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi Changes in Estimated Allowance for Impairment Losses on Commitments and Contingencies		
Saldo Awal Tahun Beginning of the Year Balance	1.752	-
Pembentukan pada Periode/Tahun Berjalan Provision in Current Period/Year	1.070	1.752
Selisih Difference	-	-
Saldo Akhir Ending balance	2.822	1.752

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan Bank Aladin Syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya tercermin dari likuiditas dan solvabilitas Bank. Kemampuan membayar utang juga tercermin dari telah ikutnya Bank Aladin Syariah sebagai peserta program penjaminan pada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

The Bank maintains the quality of its productive assets, where based on the table above, it can be seen that there were no problematic productive assets in 2023. The Bank has also established reserves in accordance with regulatory provisions for productive assets owned by the Bank. While, the Bank's financial ratios that includes performance ratios and compliance ratios recorded a better performance compared to the previous year. This can be seen from the increase in the Net Rewards ratio (NI), the decrease in the ratio of Operational Expenses to Operational Income (BOPO), the decrease in the Cost to Income Ratio (CIR), and in terms of compliance, the Bank did not violate or exceed the Maximum Fund Distribution Limit (BMPD).

Commitments and Contingencies

In 2023, the Bank established reserves (presented in the "Estimated Loss on Commitments and Contingencies") for undrawn financing facilities amounting to Rp2,822 million. Changes in the allowance for impairment losses on estimated commitments and contingencies for undrawn facilities are as follows:

Ability to Pay Debts and Collectibility of Receivables

Ability to Pay Debt

Bank Aladin Syariah's ability to fulfill its short-term and long-term obligations is reflected in the Bank's liquidity and solvency. The ability to pay debts is also reflected in Bank Aladin Syariah's participation as a guarantee program participant at the Deposit Insurance Corporation (LPS).

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo, Bank menggunakan rasio likuiditas, berupa rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) yang merupakan rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain), serta surat berharga korporasi yang dimiliki Bank terhadap DPK (tidak termasuk dana antarbank), surat berharga yang diterbitkan Bank, dan pinjaman yang diterima Bank.

Adapun rasio likuiditas Bank di tahun 2023 dibanding tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Ability to Pay Short Term Debt (Bank Liquidity)

To fulfill short-term obligations that are due, the Bank uses liquidity ratios, in the form of financing to third party funds ratios or Financing to Deposit Ratio (FDR) and macroprudential intermediation ratios (RIM), which are ratios resulting from comparisons between financing to third parties (excluding financing to other banks), as well as corporate securities owned by the Bank against DPK (excluding interbank funds), securities issued by the Bank, and loans received by the Bank.

The Bank's liquidity ratio in 2023 compared to 2022 is as follows.

Tabel Rasio Likuiditas 2022-2023
Liquidity Ratios 2022-2023

Uraian Description	2023 (%)	2022 (%)	Perubahan (%) Change (%)	
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Macroprudential Intermediation Ratio (RIM)	95	173	-45	▼

Di tahun 2023, likuiditas Bank berdasarkan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tercatat sebesar 95,31%, mengalami penurunan 45% dari tahun 2022 yang tercatat 173%. Penurunan tersebut mencerminkan adanya percepatan peningkatan pada dana pihak ketiga yang berasal dari deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penempatan dana nasabah, bertambahnya jumlah nasabah serta peningkatan akuisisi payroll dan peningkatan use case dari fitur bill payment, donasi, serta tarik setor tunai di outlet-outlet Alfamart.

In 2023, the Bank's liquidity based on the ratio of financing to third party funds or Financing to Deposit Ratio (FDR) was 95.31%, a decrease of 45% compared to 173% in 2022. This decrease was due to an accelerated increase in third party funds originating from mudharabah time deposits and mudharabah savings. This was due to an increase in the placement of funds by customers, an increase in the number of customers, as well as an increase in payroll acquisitions, and an increase in use cases for bill payments, donations and cash deposit withdrawal features at Alfamart outlets.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Dalam mengukur kemampuan Bank dalam membayar utang jangka panjang, Bank Aladin Syariah menggunakan rasio solvabilitas dengan memastikan kecukupan modal dalam memenuhi risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Hal tersebut dapat terlihat dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Adapun rasio solvabilitas Bank di tahun 2023 dibanding tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Ability to Pay Long Term Debt (Bank Solvency)

In measuring the Bank's ability to pay long-term debt, Bank Aladin Syariah uses solvency ratios to ensure capital adequacy to meet financing risks, market risks and operational risks. This can be seen from the minimum capital requirement ratio or Capital Adequacy Ratio (CAR).

The Bank's solvency ratio in 2023 compared to 2022 was as follows.

Tabel Rasio Solvabilitas 2022-2023

Uraian Description	2023 (%)	2022 (%)	Perubahan (%) Change (%)	
Capital Adequacy Ratio (CAR)	96	189	49	▼

Di tahun 2023, rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank tercatat sebesar 96% atau mengalami penurunan 49% dibanding tahun 2022 yang mencapai 189%. Penurunan tersebut dikarenakan oleh adanya peningkatan penyaluran pembiayaan yang cukup signifikan, namun rasio tersebut menunjukkan bahwa kondisi permodalan Bank dalam keadaan yang baik.

In 2023, the Bank's minimum capital adequacy ratio (CAR) was 96%, a decrease of 49% compared to 189% in 2022. This decrease was due to a significant increase in financing disbursements, but this ratio shows that the Bank's capital condition is in a good condition.



Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, rasio kecukupan modal minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank yang ditetapkan OJK adalah sebesar 9,99%. Dengan rasio kecukupan Bank Aladin Syariah yang berada pada tingkat 9617% di tahun 2023, struktur permodalan Bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum OJK. Adapun struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan OJK. Hal ini berarti bahwa Bank Aladin Syariah telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

Kolektibilitas Piutang

Kolektibilitas piutang mencerminkan kemampuan Bank dalam meminimalisir terjadinya piutang macet. Bank Aladin Syariah mengukur kelancaran pembiayaan bank melalui total pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF).

Adapun tingkat kolektibilitas Perusahaan di tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kolektibilitas Piutang 2022-2023
Receivables Collectibility 2022-2023

Uraian Description	2023 (%)	2022 (%)	Perubahan (%) Change (%)	
<i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Gross	-	-	-	-
<i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Net	-	-	-	-

Sepanjang tahun 2023, *Non-Performing Financing* (NPF) Gross dan *Non-Performing Financing* (NPF) Net Bank masing-masing adalah sebesar 0,00%. Hal tersebut menunjukkan prinsip kehati-hatian Bank dalam menyalurkan pembiayaan sehingga dapat meminimalisasi pembiayaan bermasalah.

Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko

Struktur Permodalan

Kebijakan Struktur Modal

Bank Aladin Syariah menyusun rencana permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan kondisi ekonomi terkini. Secara rutin, Bank Aladin Syariah telah melakukan evaluasi dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan Bank memiliki modal kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha Bank saat ini dan mempertahankan kelangsungan usaha Bank pada masa yang akan datang, serta untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagaian dalam Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana permodalan Bank disusun berdasarkan penilaian atas kecukupan kebutuhan permodalan yang dipersyaratkan, rencana pengembangan usaha dan kebutuhan likuiditas Bank.

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.03/2014 concerning Minimum Capital Requirements for Sharia Commercial Banks, the minimum capital adequacy ratio associated with the Bank's risk profile determined by OJK is 9.99%. With Bank Aladin Syariah's adequacy ratio being at the level of 9617% In 2023, the Bank's capital structure has the capability to offset financing risks, market risks and operational risks where the ratio is higher than OJK's minimum adequacy ratio. The Bank's capital structure has complied with OJK Regulations. This means that Bank Aladin Syariah has managed the Bank's capital well and has sufficient capital to protect against solvency risks.

Receivables Collectibility

Collectibility of receivables reflects the Bank's ability to minimize the occurrence of bad debts. Bank Aladin Syariah measures the smoothness of bank financing through total non-performing financing (NPF).

The Company's collectibility level in 2023 was as follows.

During 2023, Bank's *Non-Performing Financing* (NPF) Gross and *Non-Performing Financing* (NPF) Net both amounted to 0%. This reflects the Bank's prudential principle being used in channeling financing to minimize problematic financing.

Capital Structure and Risk Management Practices

Capital Structure

Capital Structure Policy

Bank Aladin Syariah prepares a capital plan based on an assessment and review of the required capital requirements and combines them with the latest economic conditions. Routinely, Bank Aladin Syariah has evaluated and managed the capital structure to ensure the Bank has strong capital to support the Bank's current business development strategy, and to maintain the Bank's business continuity in the future, as well as to meet the capital adequacy set by the regulator.

Capital is structured by the Board of Directors as part of the Bank's Business Plan and approved by the Board of Commissioners. The Bank's capital plan is prepared based on an assessment of the adequacy of the capital requirements, business development plans and the Bank's liquidity needs.

Dasar Pemilihan Struktur Modal

Struktur modal yang diterapkan Bank bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha agar tetap memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham, bermanfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, serta mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal. Selain itu, Bank Aladin Syariah juga melakukan perencanaan kebutuhan permodalan dengan mendiskusikan secara rutin dan didukung dengan data analisis.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan perubahan POJK No.34/OJK.03/2016 tanggal 22 September 2016, serta POJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, dimana bank wajib membentuk tambahan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) yaitu *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systematically Important Banks*.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan secara internal (*self assessment*), profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, adalah peringkat 2 (dua). Atas dasar ini, KPMM minimum ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Rincian Struktur Modal

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Struktur permodalan Bank Aladin Syariah terdiri dari Modal Inti (*Tier 1*) dan Modal Pelengkap (*Tier 2*). Struktur permodalan Bank dan rasio kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhatikan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar, per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut.

Basis for Selection of Capital Structure

The Bank's capital structure is aimed at maintaining business continuity so that it can provide returns for Shareholders, benefits for other stakeholders, and maintains an optimal capital structure to reduce capital costs. Bank Aladin Syariah also plans capital needs by discussing it regularly and supporting it with analytical data.

The Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) on December 31, 2022 and December 31, 2021 was calculated based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 11/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 and amendments to POJK No.34/OJK.03/2016 dated September 22, 2016, and POJK No. 21/POJK.03/2014 dated November 19, 2014 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Sharia Commercial Banks, where banks are required to form additional minimum capital according to the risk profile that functions as a buffer, namely Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer and Capital Surcharge for Domestic Systematically Important Banks.

Based on a self-assessment, the Bank's risk profile as of December 31, 2022 and December 31, 2021, was ranked 2 (two). On this basis, the minimum KPMM is set at 9% to less than 10%.

Capital Structure Details

Based on Financial Services Authority (OJK) regulations, Bank Aladin Syariah's capital structure consists of Core Capital (*Tier 1*) and Supplementary Capital (*Tier 2*). The Bank's capital structure and the Bank's capital adequacy ratio takes into account credit risk, operational risk and market risk, and as of December 31, 2023 and December 31, 2022, was as follows.

Struktur Permodalan Bank 2022-2023 Bank Capital Structure 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
MODAL INTI (TIER 1) Core Capital (Tier 1)					
Modal Inti Utama (CET 1) Main Core Capital (CET 1)	3.003.141	3.117.691	(114.550)	-4	▼
Modal Inti Tambahan (AT-1) Additional Core Capital (AT-1)	-	-	-	-	-
Total Modal Inti Total Core Capital	3.003.141	3.117.691	(114.550)	-4	▼
Modal Pelengkap (Tier 2) Supplementary Capital (Tier 2)	36.997	16.108	20.889	130	▲
Total Modal Total Capital	3.040.138	3.133.799	(93.661)	-3	▼
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) Risk Weighted Assets (RWA)					
ATMR untuk Risiko Kredit RWA for Credit Risk	3.048.909	1.582.477	1.466.432	93	▲

Struktur Permodalan Bank 2022-2023 Bank Capital Structure 2022-2023

Uraian Description	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	2022 (Rp-juta) 2022 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
ATMR untuk Risiko Pasar RWA for Market Risk	969	980	(11)	-1	▼
ATMR untuk Risiko Operasional RWA for Operational Risk	111.447	72.174	39.237	54	▲
Total ATMR Total RWA	3.161.325	1.655.601	1.505.724	100	▲

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Bank 2022-2023 Bank Capital Adequacy Ratio 2022-2023

Uraian Description	2023	2022
Rasio CAR CAR ratio		
Rasio CET 1 CET ratio 1	95%	188%
Rasio Tier 1 Tier 1 ratio	95%	188%
Rasio Tier 2 Tier 2 Ratio	1%	100%
Rasio Total Total Ratio	96%	189%
Rasio Minimum Tier 1 Tier 1 Minimum Ratio	6%	6%
Rasio Minimum CET 1 CET 1 Minimum Ratio	5%	5%
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko Minimum CAR Based on Risk Profile	9,00%-10,00%	9,00-10,00%

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk rasio kecukupan modal. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, tidak terdapat pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) oleh Bank.

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the Bank has complied with the ratios required by Bank Indonesia (BI) for capital adequacy ratio. In addition, on December 31, 2023 and December 31, 2022, there was no exceedance of the Maximum Fund Distribution Limit (BMPD) by the Bank.

Adapun rincian struktur modal Bank untuk tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut.

Details of the Bank's capital structure for December 31, 2023 and December 31, 2022 are as follows.

Struktur Modal Bank 2022-2023 Bank Capital Structure 2022-2023

Uraian	2023 (Rp-juta)	Komposisi (%)	2022 (Rp-juta)	Komposisi (%)	Kenaikan (Penurunan)		
					Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	
Liabilitas	751.880	11%	795.476	16,81%	(43.596)	-5%	▼
Dana Syirkah Temporer	3.254.999	46%	794.649	16,79%	2.460.350	310%	▲
Ekuitas	3.085.241	44%	3.143.276	66,41%	(58.035)	-2%	▼
Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas	7.092.120	100%	4.733.401	100,00%	2.358.719	50%	▲

Praktik Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko

Merujuk pada ketentuan Bank Indonesia (BI) serta *best practices*, Bank Aladin Syariah menerapkan manajemen risiko secara independen dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Misi Bank dalam manajemen risiko adalah mempersiapkan kerangka dan metodologi yang sesuai untuk pengelolaan risiko secara efektif. Tujuan pengelolaan risiko mencakup pengembangan pendekatan dan metodologi baku dalam mengelola risiko Bank, mempertegas struktur fungsional termasuk tujuan, peran dan tanggung jawab, serta menumbuhkan budaya sadar akan risiko di Bank secara keseluruhan.

Penerapan manajemen risiko mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan risiko, Bank telah membentuk Unit Manajemen Risiko untuk memonitor risiko di Bank secara keseluruhan, terpisah dari Risk Taking Unit dan Audit Internal.

Dalam melakukan kegiatan usaha, Bank melakukan pengelolaan risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi yang telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Pengungkapan Exposure Risiko

Risiko Kredit

Risiko kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban membayar pembiayaan, Risiko Konsentrasi Kredit, *Counterparty Credit Risk* dan *Settlement Risk*. Bank melakukan berbagai langkah mitigasi risiko kredit atau pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti penerapan agunan dan penjaminan atau asuransi pembiayaan untuk mengurangi dampak risiko.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini adalah:

1. Bank telah menetapkan dan menerapkan tata kelola, kerangka, proses dan pengendalian manajemen risiko kredit;
2. Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan dan Prosedur Kredit, *Risk Appetite Statement*, *Risk Acceptance Criteria*, dan Komite Kredit secara konsisten;
3. Memiliki standar prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan infrastruktur terkait dengan proses pembiayaan, yaitu antara lain prosedur pembiayaan yang memadai, Tim *Collection* dengan sistem yang mendukung, serta pembukuan pencadangan kerugian atas kemungkinan pembiayaan bermasalah berupa PPAP dan/atau CKPN sesuai dengan jenis akad pembiayaan yang dilakukan.

Risk Management Practices

Implementation of Risk Management

Referring to Bank Indonesia (BI) regulations and best practices, Bank Aladin Syariah independently implements risk management based on sharia principles. The Bank's mission in risk management is to prepare an appropriate framework and methodology for effective risk management. Risk management objectives include developing a standard approach and methodology for managing the Bank's risks, strengthening the functional structure including objectives, roles and responsibilities, and fostering a culture of risk awareness in the Bank as a whole.

Implementation of risk management includes active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors. To carry out the risk management function, the Bank has established a Risk Management Unit to monitor risks in the Bank as a whole, separate from the Risk Taking Unit and Internal Audit.

In carrying out business activities, the Bank carries out risk management for 10 (ten) types of risk in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 65/POJK.03/2016 dated December 23, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, and include credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategy risk, compliance risk, yield risk returns, and investment risks that have been outlined in the General Risk Management Policy (KUMR).

Risk Exposure Disclosure

Credit Risk

Risk of failure of customers and/or other parties in fulfilling obligations to the Bank in accordance with agreed agreements, including credit risk due to debtor failure, Credit Concentration Risk, Counterparty Credit Risk and Settlement Risk. The Bank takes credit or financing risk mitigation steps by using a number of techniques such as applying collateral and guarantees or financing insurance to reduce the impact of risk.

Some of the steps taken to manage and mitigate this risk include:

1. The Bank has established and implemented credit risk management governance, framework, processes and controls;
2. The Bank has consistently implemented Credit Policies and Procedures, Risk Appetite Statements, Risk Acceptance Criteria, and established a Credit Committee;
3. Has well-documented standard procedures and infrastructure related to the financing process, including adequate financing procedures, a Collection Team with a supporting system, and recording provisions for losses for possible problematic financing in the form of PPAP and/or CKPN according to the type of financing contract.



4. Bank menetapkan batas kredit, termasuk BMPD, financing line, wewenang pemutus pembiayaan dan portofolio berdasarkan sektor ekonomi guna mengelola risiko kredit.

Risiko Pasar

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Risiko pasar meliputi antara lain risiko *benchmark* suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko *benchmark* suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*.

Langkah mitigasi yang dijalankan meliputi:

1. Strategi pengelolaan aset dan liabilitas bank melalui mekanisme ALCO antara lain yaitu *asset & liabilities management*;
2. Monitoring dan pengukuran secara berkala terhadap kecenderungan perubahan harga pasar, kemungkinan terjadinya tekanan pasar serta limitasi risiko pasar;
3. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan tingkat margin di pasar dan menganalisa pengaruhnya terhadap kinerja Bank;
4. Bank telah memiliki dan menerapkan Prosedur Risiko Pasar dan *Risk Appetite Statement*.
5. Melakukan perhitungan *stress testing* risiko pasar secara berkala.

Risiko Likuiditas

Risiko ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas timbul akibat adanya ketidaksesuaian jatuh tempo antara liabilitas dan tagihan/pembiayaan yang dimiliki Bank. Hal ini dikarenakan pada umumnya Bank memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko likuiditas di antaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran profil risiko likuiditas yang menggambarkan posisi dan kecenderungan risiko likuiditas Bank secara berkesinambungan, sehingga menjadi indikator peringatan dini, jika Bank mulai mengalami permasalahan likuiditas;
2. Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas;
3. Mengatur dan menjaga likuiditas Bank secara keseluruhan dan sesuai ketentuan Regulator dalam hal pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM);
4. Memelihara akses Bank ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank;
5. Bank telah memiliki dan menerapkan *Risk Appetite Statement*, Prosedur Risiko Likuiditas dan *Contingency Funding Plan*.

4. The Bank determines credit limits, including BMPD, financing line, financing decision authority and portfolio based on the economic sector to manage credit risk.

Market Risk

Is the Risk in the balance sheet and administrative account positions due to changes in market prices, including risks in the form of changes in the value of assets that can be traded or leased.

Market risk consists of interest rate benchmark risk, exchange rate risk, equity risk and commodity risk. Benchmark interest rate risk, exchange rate risk and commodity risk can originate from trading book positions and banking book positions, while equity risk originates from trading book positions.

Mitigation steps implemented include:

1. Strategy for managing bank assets and liabilities through the ALCO mechanism, including asset & liabilities management;
2. Regular monitoring and measuring trends in market price changes, the possibility of market pressure and market risk limitations;
3. Supervising developments in margin levels in the market and analyze their impact on the Bank's performance;
4. The Bank has implemented Market Risk Procedures and a Risk Appetite Statement.
5. Carrying out regular market risk stress testing calculations.

Liquidity Risk

The risk from the Bank's inability to fulfill maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets that can be pledged as collateral, without disrupting the Bank's activities and financial condition. Liquidity risk arises due to a mismatch in maturity between liabilities and claims/financing owned by the Bank. This is because banks generally have short-term funding and channel it into longer-term financing.

Actions taken by the Bank to minimize liquidity risk include the following:

1. Measuring the liquidity risk profile that describes the Bank's liquidity risk position and trends on an ongoing basis, so that it becomes an early warning indicator, if the Bank begins to experience liquidity problems;
2. Reviewing policies and standard operating procedures related to liquidity risk management;
3. Regulating and maintaining the Bank's overall liquidity and in accordance with Regulator provisions in terms of fulfilling the Minimum Statutory Reserve (GWM), RIM (Macroprudential Intermediation Ratio) and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM);
4. Maintaining the Bank's access to the money market through interbank placements and loans;
5. The Bank has implemented a Risk Appetite Statement, Liquidity Risk Procedures and Contingency Funding Plan.

Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko operasional adalah peningkatan kontrol diseluruh unit kerja melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control* dalam pelaksanaan fungsi transaksi, deviasi/otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan, termasuk pemenuhan kecukupan sumber daya manusia (SDM), dan pelaksanaan audit internal.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Bank Aladin Syariah untuk mengelola risiko ini adalah:

1. Melakukan analisa risiko operasional untuk produk baru yang diusulkan dan atau kegiatan yang akan diluncurkan oleh Bank;
2. Mengembangkan kebijakan manajemen risiko termasuk prosedur untuk teknologi informasi termasuk jaringan komunikasi data dan standarisasi perangkat lunak, manajemen sistem akses, pengembangan layanan perbankan elektronik dalam hal keamanan aksesibilitas dan *Disaster Recovery Plan*;
3. Melakukan *review* terhadap ketentuan baik itu kebijakan maupun prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan risiko operasional;
4. Bank telah memiliki dan menerapkan pedoman internal diantaranya *Risk Appetite Statement*, *Prosedur Anti Fraud*, *Prosedur Risiko Operasional*, dan *Business Continuity Plan*.

Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh kelemahan dalam perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi atau penyelesaian sengketa baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Mitigasi yang dijalankan untuk mengelola risiko ini adalah:

1. Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan Hukum dan *Risk Appetite Statement* untuk risiko hukum;
2. Memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Bank dengan pihak ketiga dan melakukan pemeriksaan berkala atas perjanjian yang telah dibuat;
3. Menerapkan standarisasi akad dan perjanjian kerja sama untuk program pembiayaan tertentu;
4. Melakukan analisa hukum atas produk dan/atau aktivitas baru, serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan/atau aktivitas tersebut;
5. Memberikan opini hukum atas permintaan unit kerja lain guna memitigasi adanya potensi hukum bagi Bank.

Risiko Reputasi

Risiko menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

Operational Risk

The risk of losses resulting from inadequate internal processes, internal process failures, human errors, system failures and/or external events that affect the Bank's operations.

One of the efforts made to manage operational risk is increasing control in all work units through separation of duties and responsibilities, dual control mechanisms in the transaction functions, deviation/authorization, limiting access system authority, increasing employee competency, including fulfilling human capital adequacy (HC), and internal audits.

The mitigation steps taken by Bank Aladin Syariah to manage this risk are:

1. Conducting operational risk analysis for proposed new products and/or activities to be launched by the Bank;
2. Developing risk management policies including procedures for information technology including data communication networks and software standardization, access system management, development of electronic banking services in terms of accessibility security and *Disaster Recovery Plan*;
3. Reviewing the provisions, both policies and procedures related to operational risk management;
4. The Bank has implemented internal guidelines including a *Risk Appetite Statement*, *Anti-Fraud Procedures*, *Operational Risk Procedures*, and *Business Continuity Plan*.

Legal Risk

The risk of lawsuits and/or weaknesses in juridical aspects. Legal risk can originate from weaknesses in the juridical aspects caused by weaknesses in the engagements carried out by the Bank, the absence or changes in statutory provisions that may cause a transaction carried out by the Bank to be inconsistent with the provisions of statutory regulations, and the litigation process or resolving disputes arising from third party lawsuits against the Bank or the Bank against third parties.

The mitigations implemented to manage this risk are:

1. The Bank has instigated a *Legal Policy* and *Risk Appetite Statement* for legal risks;
2. Examining all agreements to be made between the Bank and third parties and carrying out periodic checks on the agreements that have been made;
3. Standardizing contracts and cooperation agreements for certain financing programs;
4. Carrying out legal analysis of new products and/or activities, as well as creating standard legal documents related to these products and/or activities;
5. Providing legal opinions at the request of other work units to mitigate legal potential for the Bank.

Reputational Risk

The risk of decreasing levels of stakeholder trust stemming from negative perceptions of the Bank. This risk arises, due to negative media reports and/or rumors about the Bank as well as ineffective bank communication strategies.



Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan Bank Aladin Syariah, mencakup:

1. Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media;
2. Membuat klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah terbaik yang ditempuh Bank apabila terdapat pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media;
3. Melakukan analisis risiko reputasi yang mungkin timbul, serta strategi untuk mengantisipasi risiko saat meluncurkan produk/ layanan/program baru Bank.

Risiko Strategik

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif dan/ atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik antar level strategik.

Selain itu, timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi dipasar dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Adapun mitigasi atau pengelolaan risiko strategik yang dijalankan oleh Bank Aladin Syariah, mencakup:

1. Melakukan identifikasi dan kuantifikasi risiko strategis sejak awal penyusunan rencana bisnis bank dengan berpedoman pada visi, misi, strategi serta kemampuan Bank;
2. Mengelola risiko strategik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan Komite Manajemen Risiko, untuk selanjutnya disampaikan ke Direksi;
3. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap strategi dan rencana bisnis bank untuk memastikan apakah masih relevan dengan situasi dan kondisi terkini serta melakukan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pencapaian rencana bisnis bank.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, ketentuan internal bank, dan penerapan Prinsip Syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional. Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Bank.

Risk mitigation and management carried out by Bank Aladin Syariah includes:

1. Supervising media reports to monitor negative publications or customer complaints that appear in the media;
2. Clarifying and responding in accordance with the best steps taken by the Bank if there are negative news and customer complaints appearing in the media;
3. Analyzing reputational risks that may arise, as well as strategies to anticipate risks when launching new Bank products/services/ programs.

Strategic Risk

The risk resulting from inaccuracies in making and/or implementing strategic decisions as well as failure to anticipate changes in the business environment. This risk arises due to the Bank adopting a strategy that is not in line with the Bank's vision and mission, conducts an analysis of the strategic environment that is not comprehensive and/ or there is a mismatch between strategic plans and strategic levels.

In addition, this risk arises from a failure to anticipate changes in the business environment, including failure to anticipate technological changes, changes in macroeconomic conditions, dynamics of market competition and changes in relevant authority policies.

The strategic risk mitigation or management carried out by Bank Aladin Syariah includes:

1. Identifying and quantifying strategic risks from the start of preparing the Bank's business plan, guided by the Bank's vision, mission, strategy and capabilities;
2. Managing strategic risks through a collective and comprehensive consideration and decision-making process within the Risk Management Committee, to be submitted to the Board of Directors;
3. Conducting regular reviews of the Bank's business strategy and plan to ensure whether they are still relevant to the current situation and conditions, and assessing the level of success in achieving the Bank's business plan.

Compliance Risk

This is a risk resulting from the Bank not complying with and/or not implementing statutory regulations, other applicable provisions, internal bank regulations, and the application of Sharia Principles. When carrying out business activities in the banking industry, Banks are required to always comply with banking regulations issued by the Government, Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the National Sharia Council. The Bank's inability to follow and comply with all laws and regulations related to its banking business activities can have an impact on the Bank's business continuity.

Untuk memitigasi risiko ini, Bank Aladin Syariah menjalankan beberapa inisiatif, yakni:

1. Melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan masukan/*review* kepada unit bisnis serta unit operasional dalam hal pengembangan produk dan/atau aktivitas baru;
2. Melakukan *review* terhadap kebijakan pedoman dan prosedur internal yang dimiliki dalam rangka memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah disediakan akomodasi sedemikian rupa dan dipatuhi dalam pelaksanaannya;
3. Melakukan sosialisasi terkait peraturan yang berlaku kepada unit kerja terkait sehingga setiap unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan berlaku;
4. Menjadi *Liaison* Dewan Pengawas Syariah guna memastikan kepatuhan operasi Bank dengan prinsip syariah.
5. Melaksanakan program-program kepatuhan, antara lain pelatihan secara berkala untuk memastikan seluruh karyawan senantiasa melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan bisnis dan operasional.

Risiko Imbal Hasil

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga.

Mitigasi dan pengelolaan risiko Imbal Hasil yang dilakukan Bank Aladin Syariah, mencakup:

1. *Monitoring* dan pengukuran melalui rapat ALCO terhadap kebijakan *pricing* secara berkala atau sesuai kebutuhan apabila terjadi tekanan pasar yang dapat meningkatkan risiko bank;
2. Kecukupan penetapan limit dan proses kaji ulang yang memadai terhadap portofolio DPK dan pembiayaan dengan akad berbasis bagi hasil serta sensitivitas terhadap perubahan *pricing* di pasar;
3. Estimasi secara berkala terhadap potensi kerugian ekonomis Bank pada kondisi pasar yang tidak normal guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan suku bunga *benchmark* dan nisbah di pasar;
4. Bank telah memiliki dan menerapkan standar prosedur risiko imbal hasil.

Risiko Investasi

Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usahanasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Beberapa langkah mitigasi dan pengelolaan yang dilakukan, mencakup:

1. Identifikasi atas risiko aktivitas investasi dengan akad berbasis bagi hasil terhadap portofolio yang sudah ada atau potensi risiko yang mungkin timbul, guna memudahkan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang jelas dan hati-hati, sehingga risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif;
2. Mengimplementasikan proses persetujuan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang efektif antara lain dengan menetapkan batas kewenangan (*limit*) dan mekanisme pengambilan keputusan investasi dengan akad berbasis bagi hasil;

The risk mitigation or management carried out by Bank Aladin Syariah includes:

1. Identifying and managing compliance risks from the start by providing input/*reviews* to business units and operational units regarding the development of new products and/or activities;
2. Reviewing the internal policy guidelines and procedures to ensure all external regulations are have been accommodated and are complied with in their implementation;
3. Conducting socialization on applicable regulations to related work units so that each work unit can carry out duties and responsibilities in accordance with applicable regulations;
4. Acting as a *Liaison* with the Sharia Supervisory Board to ensure compliance of the Bank's operations with sharia principles.
5. Implementing compliance programs, including regular training to ensure that all employees implement the precautionary principle when carrying out business and operational activities.

Yield Risk

This risk arises due to changes in the rate of return paid by the Bank to customers, due to changes in the rate of return received by the Bank from channeling funds, which can affect the behavior of third party fund customers.

Yield risk mitigation and management carried out by Bank Aladin Syariah includes:

1. Monitoring and measuring through ALCO meetings the pricing policy regularly or as needed if market pressure occurs that can increase Bank risk;
2. Setting adequate limits and an adequate review process for the TPF portfolio and financing with profit sharing based contracts as well as sensitivity to changes in pricing in the market;
3. Estimating the Bank's potential economic losses regularly during abnormal market conditions to see the sensitivity of the Bank's performance to changes in benchmark interest rates and market ratios;
4. The Bank has implemented standard return risk procedures.

Investment Risk

This risk results from the Bank sharing part of the losses of customers' businesses financed through profit sharing based financing, using the net revenue sharing method or using the profit and loss sharing method.

Some of the mitigation and management steps taken include:

1. Identifying the risks of investment activities with profit sharing based contracts on existing portfolios or potential risks that may arise, to facilitate the preparation and implementation of investment policies with clear and careful profit sharing based contracts, so that these risks can be managed and controlled effectively;
2. Implementing an investment approval process with effective profit sharing-based contracts, including establishing limits of authority and investment decision-making mechanisms for profit-sharing-based contracts;



3. *Monitoring* terhadap konsentrasi penyaluran dana dengan akad berbasis bagi hasil sehingga sesuai dengan *risk appetite* Bank.
4. Secara efektif mengatasi dan mengendalikan tipe, karakteristik, dan kualitas dari investasi dengan akad berbasis bagi hasil serta melakukan pencadangan kerugian atas kemungkinan pembiayaan bermasalah untuk memitigasi risiko investasi.

3. Monitoring the concentration of channeling funds using profit sharing based contracts so that it is in line with the Bank's risk appetite.
4. Effectively monitoring and controlling the type, characteristics and quality of investments with profit sharing based contracts and reserve losses for possible problematic financing to mitigate investment risks.

Deklarasi Transaksi Material

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

Per 31 Desember 2023, Bank Aladin Syariah tidak terdapat ikatan material untuk investasi barang modal sehingga Bank Aladin Syariah tidak menyajikan informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan ikatan, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan Bank untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing.

Informasi atau Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik

Berikut disampaikan informasi dan fakta material yang terjadi antara akhir periode pelaporan 31 Desember 2023 hingga laporan audit diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2024, yakni antara lain:

1. Permodalan
 - a. Sejak awal diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2021 hingga tanggal 31 Desember 2023, jumlah waran yang telah di eksekusi adalah sejumlah 221.053.392 lembar waran atau sebesar Rp24.315.873.120 (nilai penuh) dimana 221.042.892 lembar waran atau sebesar Rp24.314.718.120 (nilai penuh) telah dicatat sebagai modal ditempatkan dan disetor dan untuk sisa waran yang telah dieksekusi namun belum diaktakan sejumlah 10.500 lembar waran, masih dicatat sebagai dana setoran modal. Sisa waran yang belum di eksekusi sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan adalah sejumlah 2.578.946.608 lembar waran.
 - b. Untuk menambah permodalan Bank, pada tanggal 28 Maret 2024, Bank telah menerima dana setoran modal dari pemegang saham pengendali sebesar Rp45.000.000.000 (nilai penuh).
2. Perpajakan

Pada tanggal 28 Februari 2024, Pengadilan Pajak telah menerbitkan keputusan Pengadilan Pajak tentang Keberatan Bank atas SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 yang dalam keputusan tersebut, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh keberatan banding yang diajukan oleh Bank.

Material Transaction Declaration

Based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, Article 3 paragraph (1) states that a transaction is categorized as a material transaction if the transaction value is equal to 20% or more of a Public companies equity.

As of December 31, 2023, Bank Aladin Syariah had no material commitments for capital goods investments therefore Bank Aladin Syariah has no information to report on the names of parties making the bond, the purpose of the bond, the source of funds expected to fulfill the bond, the currency in which the bond is denominated and the steps taken by the Bank to hedge the risk of foreign currency positions.

Material Information or Facts that Occurred After the Date of the Public Accountant's Report

The following is related to material information and facts that occurred from the end of the reporting period December 31, 2023 until the accountant's report was published on March 28, 2024, and includes:

1. Capital
 - a. Since their initial issuance between August 2, 2021 to December 31 2023, the total number of warrants executed amounted to 221,053,392 warrants or Rp24,315,873,120 (full value) of which 221,042,892 or Rp24,314,718.120 (full value) have been recorded as issued and paid-up capital, and for the remaining warrants that have been executed but not yet notarized was 10,500 warrants, and are still recorded as paid-up capital. The remaining warrants that have not been executed up to the date the financial report was published amounted to 2,578,946,608 warrants.
 - b. To increase the Bank's capital, on March 28, 2024, the Bank received capital deposits from controlling shareholders amounting to Rp45,000,000,000 (full amount).
2. Taxation

On February 28, 2024, the Tax Court issued a decision regarding the Bank's objection to the 2017 Income Tax SKPKB. In its decision, the Tax Court granted all objections to the appeal submitted by the Bank.

Perbandingan antara Target dan Realisasi serta Proyeksi untuk 1 (Satu) Tahun ke Depan

Perbandingan antara Target dan Realisasi

Bank Aladin Syariah telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan industri. Adapun perbandingan pencapaian beberapa target yang ditetapkan berdasarkan RBB Tahun 2023 dengan realisasi tahun buku 2023, adalah sebagai berikut.

Tabel Perbandingan antara Rencana Bisnis Bank dan Realisasi Tahun 2023
Comparison between Bank Business Plans and 2023 Realization

Uraian Description	Realisasi 2023 (Rp-juta) Realization 2023 (Rp-million)	Target 2023 (Rp-juta) Target 2023 (Rp-million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2023 (%) Realization Achievement against 2023 Target (%)	
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib Fund Management Income by Bank as Mudharib	334.502	365.361	-8%	▼
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan Net Profit (Loss) for the Period	(226.738)	(247.447)	8%	▼
Aset Assets	7.092.120	6.554.747	8%	▲
Dana Pihak Ketiga Third-party funds	3.254.999	2.374.797	37%	▲
Pembiayaan Financing	3.102.310	3.004.384	3%	▲

Di tahun 2023, Bank Aladin Syariah mencatatkan pencapaian melampaui target keuangan yang dicanangkan pada RBB. Bank Aladin Syariah membukukan rugi sebesar Rp226,7 miliar, lebih baik dari yang diproyeksikan sebelumnya. Pencapaian ini sejalan dengan beban operasional yang dapat dijaga di bawah target sampai dengan akhir tahun 2023. Dari sisi penyaluran pembiayaan, di tahun 2023 Bank berhasil mencatatkan pencapaian yang melebihi target dengan total pembiayaan sebesar Rp3,10 triliun atau 3% dari target. Sementara itu dari sisi penghimpunan, Bank berhasil menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp3,2 triliun per akhir tahun yang terdiri dari dana dari nasabah ritel dan non-ritel.

Proyeksi untuk 1 (Satu) Tahun ke Depan

Untuk 1 (tahun) ke depan, Bank Aladin Syariah telah menetapkan sejumlah proyeksi yang tertuang dalam RBB Tahun 2024 yang juga telah disesuaikan dengan kondisi industri dan ekonomi. Di tahun 2024, Bank akan melanjutkan pengembangan bisnis yang telah berlangsung di tahun sebelumnya serta terus melengkapi produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah, baik produk pendanaan maupun pembiayaan. Produk dan layanan yang dikembangkan ditujukan untuk menggarap potensi yang ada pada segmen ritel, UMKM dan Korporasi. Pengembangan bisnis Bank utamanya akan melalui ekosistem mitra, baik mitra eksisting maupun mitra baru. Melalui kerja sama kemitraan, Bank memproyeksikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tahun 2024.

Comparison between Targets and Realization and Projections for the Next 1 (One) Year

Comparison between Targets and Realization

Bank Aladin Syariah set a number of targets to be achieved in the 2023 Bank Business Plan (RBB), which had been adjusted to economic and industrial conditions. The comparison of the targets set based on the 2023 RBB with the realization in the 2023 fiscal year was as follows.

In 2023, Bank Aladin Syariah's achievements exceeding the financial targets set out in the RBB. Bank Aladin Syariah posted a loss of Rp226.7 billion, better than previously projected. This achievement was due to operational expenses being maintained below the target until the end of 2023. In terms of financing disbursements, in 2023 the Bank's achievements exceeded the 3% target with total financing of Rp3.10 trillion. While for collections, the Bank collected third party funds of Rp3.2 trillion by the end of the year, consisting of funds from retail and non-retail customers.

Projections for the Next 1 (One) Year

For the next year, Bank Aladin Syariah has set a number of projections in the 2024 RBB, which have also been adjusted to industry and economic conditions. In 2024, the Bank will continue the business development that took place in the previous year and continue to complement the products and services offered to customers, both for funding and financing products. The products and services developed will be aimed at exploiting the potential that exists in the retail, MSME and corporate segments. The Bank's business development will primarily be through partner ecosystems with existing partners and new partners. Through partnership cooperation, the Bank projects sustainable business growth in 2024.



Tinjauan Keuangan Lainnya

Other Financial Overviews

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Kebijakan Dividen

Pembagian dividen dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal tersebut diperbolehkan dalam Anggaran Dasar, tidak menyebabkan aset bersih Bank menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh serta cadangan wajib Bank. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Bank. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim, Bank mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Bank. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh Pemegang Saham.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Manajemen Bank dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas. Pemegang Saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh Pemegang Saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Informasi Pembagian Dividen dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir

Bank Aladin Syariah belum melakukan pembagian dividen selama 2 (dua) tahun terakhir disebabkan saat ini Bank masih dalam tahap pengembangan bisnis seiring dengan transformasi bisnis Bank Aladin Syariah. Berdasarkan keputusan RUPS yang dilaksanakan di tahun 2022 untuk kinerja Tahun Buku 2021 dan RUPS di tahun 2023 untuk kinerja Tahun Buku 2022, Bank Aladin Syariah memutuskan tidak melakukan pembayaran dividen.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP)

Program kepemilikan saham bagi karyawan (*Employee Stock Option Program/ESOP*), maupun bagi manajemen (*Management Stock Option Program/MSOP*) adalah program yang memberikan hak kepada karyawan atau manajemen atas kepemilikan saham sebuah perusahaan. Hingga 31 Desember 2023, Bank Aladin Syariah belum memiliki program ESOP,

Dividend Policy and Distribution

Dividend Policy

Dividend distribution is carried out based on the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions, as regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Before the end of the financial year, interim dividends can be distributed as long as this is permitted in the Articles of Association, and does not cause the Bank's net assets to become less than the issued and fully paid-up capital and the Bank's mandatory reserves. The distribution of interim dividends must not interfere with the Bank activities. The interim dividends distribution is determined by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners. If after the end of the financial year in which interim dividends are distributed, the Bank suffers a loss, then the interim dividends that have been distributed must be returned by the Shareholders to the Bank. The Board of Commissioners and Board of Directors will be jointly and severally responsible for the return if the interim dividend is not returned by the Shareholders.

Determining the amount and distribution of dividends for these shares will depend on recommendations from Bank Management after considering the following factors: retained earnings, financial condition, liquidity condition, future business prospects and cash requirements. Shareholders on the recording date will receive the right to dividends in the full amount and will be subject to income taxes applicable in Indonesian taxation provisions. Cash dividends received by Shareholders from outside Indonesia will be subject to income taxes in accordance with tax regulations in Indonesia.

Information on Dividend Distribution in the Last 2 (Two) Years

Bank Aladin Syariah has not distributed dividends for the last 2 (two) years because currently the Bank is still in the business development stage in line with Bank Aladin Syariah's business transformation. Based on the resolutions in the GMS held in 2022 for the performance of the 2021 Fiscal Year, and the GMS in 2023 for the performance of the 2022 Fiscal Year, Bank Aladin Syariah decided not to pay dividends.

Employee and Management Stock Ownership Programs (ESOP/MSOP)

Stock ownership programs for employees (*Employee Stock Option Program/ESOP*), and for management (*Management Stock Option Program/MSOP*) are programs that give employees or management the right to own shares in a company. As of December 31, 2023, Bank Aladin Syariah does not yet have an ESOP or MSOP program.

maupun MSOP. Sehingga tidak terdapat informasi terkait jumlah saham dan/atau opsi, jangka waktu pelaksanaan, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan harga pelaksanaan.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Pada tanggal 22 Januari 2021, Bank Aladin Syariah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat No. S-8/D.04/2021 untuk melakukan penawaran umum perdana 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp103 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 1 Februari 2021, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham BANK.

Dari hasil penawaran umum saham perdana, Bank berhasil mencatat penambahan modal disetor sebesar Rp500.000.000.000 dan tambahan modal disetor berupa agio sebesar Rp15.000.000.000,- sebelum dikurangi biaya emisi penerbitan saham sebesar Rp4.612.334.741,-. Hasil penerimaan bersih dari penawaran umum saham perdana ini adalah sebesar Rp510.387.665.259,-.

Penawaran umum perdana saham ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperkuat modal kerja Bank, dimana sebagian digunakan untuk modal kerja dan sebagian lagi digunakan untuk pembiayaan pemeliharaan IT & penunjangannya.

Berikut realisasi penggunaan dana dari hasil penawaran umum perdana saham, per 31 Desember 2022, yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S.023.BOD/01.2024 tanggal 15 Januari 2024.

So there is no information to report on the number of shares and/or options, exercise period, requirements for eligible employees and/or management, and exercise price.

Realization of Use of Public Offering Proceeds

On January 22 2021, Bank Aladin Syariah received an effective statement from the Financial Services Authority (OJK) through letter No. S-8/D.04/2021 to conduct an initial public offering of 5,000,000,000 shares with a nominal value of Rp100 (full value) per share at an offering price of Rp103 (full value) per share. On February 1, 2021, these shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) with the share code BANK.

From the results of the initial public offering, the Bank managed to record additional paid-in capital of Rp500,000,000,000 and additional paid-in capital in the form of premiums of Rp15,000,000,000 before deducting share issuance costs of Rp4,612,334,741. The net proceeds from this initial public offering amounted to Rp510,387,665,259.-.

This initial public offering of shares was carried out in order to improve performance and strengthen the Bank's working capital, where part of it was used for working capital and part was used to finance IT maintenance & support.

The following shows the realization of the use of funds from the initial public offering of shares, as of December 31, 2022, as reported to the Financial Services Authority (OJK) via letter No. S.023.BOD/01.2024 dated January 15, 2024.

halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember 2023

Realization of Use of Funds from Initial Public Offering of Shares as of December 31, 2023

Jenis Penawaran Umum Type of Public Offering	Tanggal Efektif Effective date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Realized Value of Public Offering Results		
		Jumlah Hasil Penawaran Umum (Rp) Total Public Offering Results (Rp)	Biaya Penawaran Umum (Rp) Public Offering Fee (Rp)	Hasil Bersih (Rp) Net Yield (Rp)
IPO Saham IPO Shares	1 Februari 2021 February 1, 2021	515.000.000.000	4.612.334.741	510.387.665.259

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

Bank Aladin Syariah senantiasa menggunakan jasa pihak ketiga untuk menilai kewajaran transaksi investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal, yang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

Adapun informasi material yang terdapat di sepanjang tahun 2023, adalah terkait dengan investasi, sebagaimana terlampir berikut ini.

Informasi Material Mengenai Investasi

Adapun Bank Aladin Syariah melakukan kegiatan investasi pada surat berharga yang per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp1.409.892 juta, mengalami peningkatan sebesar 15% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.219.816 juta.

Komitmen dan Kontinjensi

Pada tahun 2023, Bank membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi") atas fasilitas pembiayaan yang tidak ditarik Rp2.822 juta. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontinjensi atas fasilitas yang tidak ditarik adalah sebagai berikut:

Tabel Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi 2022-2023
Estimated Losses on Commitments and Contingencies 2022-2023

Uraian Description	2023	2022
Estimasi Penyisihan Untuk Komitmen Dan Kontinjensi Estimated Allowance for Commitments and Contingencies		
Kerugian khusus lainnya Another special disadvantage	-	-
Perubahan Estimasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi Changes in Estimated Allowance for Impairment Losses on Commitments and Contingencies		
Saldo Awal Tahun Beginning of the Year Balance	1.752	-
Pembentukan pada Periode/Tahun Berjalan Provision in Current Period/Year	1.070	1.752

Material Information Regarding Investments, Expansions, Divestments, Mergers/Consolidation, Acquisitions, and Debt/Capital Restructuring

Bank Aladin Syariah always uses third party services to assess the fairness of investment transactions, expansions, divestments, business mergers/consolidations, acquisitions, and debt/capital restructuring, which are carried out in accordance with applicable provisions in the capital market sector.

The material information for 2023 is related to investments, as attached below.

Material Information Regarding Investments

Bank Aladin Syariah carries out investment activities in securities, which as of December 31, 2023 had reached Rp1,409,892 million, an increase of 15% compared to the previous year's Rp1,219,816 million.

Commitments and Contingencies

In 2023, the Bank established reserves (as presented in the "Estimated Losses on Commitments and Contingencies" account) for undrawn financing facilities of Rp2,822 million. Changes in the estimated allowance for impairment losses on commitments and contingencies for undrawn facilities are as follows:



Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus Proposed Use of Funds According to the Prospectus		Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus Realization of Use of Funds According to the Prospectus		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum (Rp) Funds from the Public Offering (Rp)
Biaya Pemeliharaan IT & Penunjangnya (Rp) Cost of IT maintenance & Support (Rp)	Modal Kerja Lainnya (Rp) Other Working Capital (Rp)	Biaya Pemeliharaan IT & Penunjangnya (Rp) Cost of IT maintenance & Support (Rp)	Modal Kerja Lainnya (Rp) Other Working Capital (Rp)	
306.232.599.155	204.155.066.104	274.438.757.476	204.155.066.104.	31.793.841.679

Tabel Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi 2022-2023
Estimated Losses on Commitments and Contingencies 2022-2023

Uraian Description	2023	2022
Selisih Difference	-	-
Saldo Akhir Ending balance	2.822	1.752

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Kebijakan serta Mekanisme Review atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Bank Aladin Syariah memiliki kebijakan terkait transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi. Transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, yang dilakukan Bank Aladin Syariah, senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan telah memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, serta PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Mekanisme *review* atas transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, dilakukan melalui proses audit oleh Komite Audit yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2023, Bank Aladin Syariah tidak memiliki pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi.

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Policies and Review Mechanisms for Transactions and Compliance with Related Regulations and Provisions

Bank Aladin Syariah has a policy related to material transactions that could contain conflicts of interest and/or transactions with affiliated/related parties. Material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated/related parties, carried out by Bank Aladin Syariah always pay attention to the precautionary principle in accordance with generally accepted business practices and have complied with OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, as well as PSAK No. 7 concerning Disclosure of Related Parties.

The review mechanism for material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated/related parties is carried out through an audit process by the Audit Committee, the results of which are then reported to the Board of Commissioners.

During 2023, there were no violations of laws and regulations by Bank Aladin Syariah related to material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated/related parties.

Komitmen Bank atau Manajemen atas Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Dalam melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, Direksi memastikan bahwa seluruh kegiatan transaksi tersebut telah melalui prosedur yang memadai dan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*). Bank Aladin Syariah melalui Dewan Komisaris dan Komite Audit juga telah melakukan *review* untuk memastikan bahwa transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan telah memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*), dan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tentang Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Pada tahun 2023, Bank Aladin Syariah melakukan seluruh transaksi secara wajar (*arm's length*) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal, serta atas dasar alasan kebutuhan Bank dan bebas dari konflik kepentingan. Bank Aladin Syariah melakukan transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi seperti yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Bank or Management Commitment for Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/Related Parties

When carrying out material transactions that may contain conflicts of interest and/or transactions with affiliated/related parties, the Board of Directors ensures that all transaction activities have gone through adequate procedures and are in accordance with the arm's length principle. Bank Aladin Syariah, through the Board of Commissioners and the Audit Committee, also carries out reviews to ensure that material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated/related parties are carried out in accordance with generally accepted business practices and meet the principles of fair transactions (*arms-length principle*), and are in accordance with applicable regulations.

Policy on Affiliated Parties/Related Parties

In 2023, Bank Aladin Syariah carried out all transactions fairly (*arm's length*) and in accordance with normal commercial requirements, as well as based on the Bank's needs and free from conflicts of interest. Bank Aladin Syariah transactions with affiliated/related parties are regulated in PSAK No. 7 concerning Disclosures of Related Parties.

A party is considered a related party to the Bank if:

1. The person or immediate family member has a relationship with the reporting entity if the person:
 - a. Has control or joint control of the reporting entity;
 - b. Has significant influence over the reporting entity; or
 - c. Represents key management personnel of the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.
2. An entity is related to the reporting entity if it fulfills one of the following:
 - a. The entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning the parent entity, subsidiary entity and subsequent subsidiaries are related to another entity);
 - b. One entity is an associated entity or joint venture of another entity (or an associated entity or joint venture that is a member of a business group, in which the other entity is a member);
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate entity of a third entity;
 - e. The entity is a post-employment benefits program for employee benefits from one of the reporting entities or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organizes the program, then the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
 - f. Entities controlled or jointly controlled by the person identified in point (1);
 - g. The person identified in point (1) (a) has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or the parent entity of the entity).

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam laporan keuangan Bank.

Transactions with related parties are carried out with terms agreed by both parties, where these terms may not be the same as transactions with third parties. All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the relevant financial reports and the details are presented in the Bank's financial reports.

Nama dan Sifat Hubungan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi Berelasi

Berikut disampaikan nama-nama pihak berelasi, sifat hubungan dan sifat transaksi yang dilakukan Bank Aladin Syariah.

Names and Nature of Relationship of Affiliated Parties/Related Parties

The names of related parties, the nature of the relationship and the nature of the transactions carried out by Bank Aladin Syariah are shown below.

Tabel Pihak Berelasi
Related Parties

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Transaction Nature
John Dharma J. Kusuma	Pemilik Manfaat Terakhir Ultimate Beneficial Owner	Tabungan Mudharabah Mudharabah Demand Saving
PT Aladin Global Ventures	Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders	Tabungan Mudharabah Mudharabah Demand Saving
Direksi, Dewan Komisaris, dan Manajemen Kunci Lainnya Board of Directors, Board of Commissioners and Other Key Management	Manajemen Kunci Key Management	Tabungan dan Deposito Mudharabah Mudharabah demand saving and time deposits

Kewajaran Transaksi dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Perjalanan transaksi pada tahun 2023 dan 2022 dengan pihak berelasi merupakan transaksi yang wajar yang tercerminkan dari persentase terkait transaksi dengan pihak berelasi bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhannya tidak memberikan dampak yang signifikan. Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Seluruh transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan usaha Bank.

Fairness of Transactions and Reasons for Conducting Transactions

Transactions in 2023 and 2022 with related parties are normal transactions as reflected in the percentage of transactions with related parties compared to the total amount, and they do not have a significant impact. In normal business activities, the Bank carries out transactions with affiliated/related parties, due to ownership and/or management relationships. All transactions with affiliated/related parties have been carried out with mutually agreed policies and conditions. All transactions with affiliated/related parties are necessary to support the smooth running of the Bank's business activities.

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Realisasi saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi terhadap kinerja keuangan Bank dapat disampaikan sebagai berikut.

Realization of Related Party Transactions

The realization of balances and related party transactions in the Bank's financial performance can be seen as follows.

Tabel Transaksi dan Saldo dengan Pihak-pihak Berelasi 2022-2023
Transactions and Balances with Related Parties 2022-2023

Uraian Description	2023	2022
DANA SYIRKAH TEMPORER Temporary Syirkah Fund		
Tabungan Mudharabah Pemegang Saham Utama Mudharabah Savings Major Shareholders of the Company	Rp8.377 juta	Rp8.301 juta
Tabungan Mudharabah Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders' Mudharabah Savings	Rp65 juta	-
Tabungan Mudharabah Manajemen Kunci Key Management's Mudharabah Savings	Rp9.145 juta	1.936 juta
Deposito Mudharabah Manajemen Kunci Mudharabah Time Deposits Key Management	Rp9.230 juta	-
Persentase terhadap Dana Syirkah Temporer Percentage of Temporary Syirkah Funds	1%	1%
BEBAN Expenses		

Tabel Transaksi dan Saldo dengan Pihak-pihak Berelasi 2022-2023
Transactions and Balances with Related Parties 2022-2023

Uraian Description	2023	2022
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer Third Party Rights on Profit Sharing of Temporary <i>Syirkah</i> Funds	Rp312 juta	Rp166 juta
Persentase terhadap Total Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer Percentage of Total Rights of Third Parties on Profit Sharing of Temporary <i>Syirkah</i> Funds	1%	1%

Giro *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut berdasarkan *nisbah* yang disetujui sebelumnya. Adapun bagi hasil dana *syirkah* temporer adalah bagi hasil dana *syirkah* temporer yang berasal dari pihak-pihak berelasi dengan Bank.

Mudharabah demand deposits are deposits of funds from other parties who receive a profit sharing reward from the Bank's income for the use of these funds based on a previously agreed ratio. The profit sharing of temporary *syirkah* funds is the profit sharing of temporary *syirkah* funds originating from parties related to the Bank.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Bank

Di tahun 2023, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Bank. Adapun perubahan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Bank Aladin Syariah di tahun 2023, dan dampaknya terhadap Bank khususnya pada laporan keuangan, adalah sebagai berikut.

Changes in Legislation that Have a Significant Impact on the Bank

In 2023, there were changes to the laws and regulations that will have a significant impact on the Bank. The changes in laws and regulations that will have a significant impact on Bank Aladin Syariah in 2023, and their impact on the Bank, especially on financial reports, are as follows.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and regulations	Latar Belakang/Penjelasan Background/Explanation	Pengaruhnya terhadap Bank, dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Services Sector	Pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi, sistem keuangan yang makin maju, serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan New arrangements and adjustments to various regulations in the financial sector to support and realize efforts to develop and strengthen the financial sector in Indonesia in line with the development of an increasingly complex and diverse financial services industry, a fast-moving, competitive and integrated national and international economy, an increasingly advanced financial system, and to strengthen the regulatory framework and supervision of financial service institutions	Bank melakukan penyesuaian pedoman internal agar sejalan dengan UU ini. Namun, UU ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya The Bank has adjusted its internal guidelines to be in line with this Law. However, this Law does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year
POJK No.3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat. POJK No. 3 of 2023 concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Communities.	Perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan, perlu meningkatkan pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan memanfaatkan perkembangan inovasi dan teknologi serta sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan POJK The rapid and dynamic development of innovations and technology in the financial services sector requires increasing the financial literacy and inclusion activities by utilizing developments in innovation and technology as well as financial education learning management systems.	Bank wajib memiliki fungsi atau unit Literasi dan Inklusi Keuangan, melaksanakan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan paling sedikit satu kali dalam satu semester, serta menyusun dan menyampaikan laporan literasi keuangan dan inklusi keuangan kepada regulator. Namun, POJK ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The Bank is required to have a Financial Literacy and Inclusion function or unit to carry out Financial Literacy and Inclusion activities at least once a semester, and prepare and submit financial literacy and financial inclusion reports to regulators. However, this POJK does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.

<p>Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and regulations</p>	<p>Latar Belakang/Penjelasan Background/Explanation</p>	<p>Pengaruhnya terhadap Bank, dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements</p>
<p>POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. POJK No. 8 of 2023 concerning Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs in the Financial Services Sector.</p>	<p>Penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan inovasi teknologi dan informasi serta rekomendasi FATF yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini diterbitkan karena adanya perkembangan prinsip internasional sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi FATF, serta perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perkembangan inovasi dan teknologi. Adjustment to developments in Indonesian laws and regulations, and technological and information innovations as well as FATF recommendations that are directly or indirectly related to the Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs in the Financial Services Sector. This POJK was issued due to developments in international principles as intended in the FATF recommendations, as well as the development of laws and regulations in Indonesia and the development of innovations and technology.</p>	<p>Bank melakukan penyesuaian pedoman internal gar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada POJK ini. Namun, POJK ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The Bank has adjusted its internal guidelines to ensure they are in line with the provisions set out in this POJK. However, this POJK does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.</p>
<p>POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Kegiatan Jasa Keuangan. POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services (AP) and Public Accounting Firms (KAP) in Financial Services Activities.</p>	<p>Penyesuaian dengan perkembangan aktivitas Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) di industri jasa keuangan sehingga perlu penyempurnaan ketentuan untuk mengoptimalkan pengelolaan admintasi dan pengawasan OJK terhadap AP dan KAP. Adapting to developments in the activities of Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP) in the financial services industry, it is necessary to improve provisions to optimize OJK administration and supervision of AP and KAP.</p>	<p>Bank wajib menggunakan AP dan KAP yang terdaftar dan tercatat di OJK serta menyampaikan laporan berkala mengenai penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan. The Bank is required to use APs and KAPs that are registered and recorded with the OJK and submit periodic reports regarding the appointment of APs and KAPs for audits of annual historical financial information.</p>
<p>POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. POJK No. 17 of 2023 concerning Governance Implementation in Commercial Banks.</p>	<p>Penguatan penerapan Tata Kelola untuk (i) menjadi pedoman bagi setiap pihak pada Bank untuk peningkatan kualitas pengelolaan Bank yang sehat dan mendukung penegakan market discipline, penguatan, daya saing dan resiliensi Bank serta penegakan integritas sistem keuangan. Strengthening the implementation of Governance to (i) serve as a guideline for all parties in the Bank to improve the quality of healthy Bank management and support the enforcement of market discipline, strengthening, competitiveness and resilience of the Bank as well as to uphold the integrity of the financial system.</p>	<p>Bank menyesuaikan pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada POJK ini. Namun, POJK ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The Bank has adjusted its internal guidelines to be in line with the provisions regulated in this POJK. However, this POJK does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.</p>
<p>POJK No.21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum POJK No.21 of 2023 concerning Digital Services by Commercial Banks</p>	<p>Penguatan prinsip perlindungan konsumen dan prinsip perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan Layanan Digital Pemanfaatan Teknologi Informasi Mekanisme dan dokumen perizinan Layanan Digital serta Layanan Digital terkait Sistem Pembayaran Harmonisasi pengaturan mengenai identifikasi dan verifikasi dengan POJK Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Redefinisi Layanan Perbankan Digital dan Layanan Perbankan Elektronik menjadi Layanan Perbankan Digital Rekategorisasi Layanan Digital yaitu dibagi menjadi 2 antara lain Layanan Digital yang diselenggarakan oleh Bank dan Layanan Digital yang diselenggarakan oleh Bank dengan mitra Penyesuaian persyaratan penyelenggaraan Layanan Digital yang berfokus pada kesiapan TI Bank. Strengthening consumer protection principles and personal data protection principles when providing Digital Services Utilization of Information Technology Licensing mechanisms and documents for Digital Services and Digital Services related to Payment Systems Harmonization of regulations for identification and verification with POJK Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector Redefinition of Digital Banking Services and Electronic Banking Services into Digital Banking Services Recategorization of Digital Services, divided into 2, namely Digital Services organized by Banks and Digital Services organized by Banks with partners Adjustment to Digital Service requirements that focus on the Bank's IT readiness</p>	<p>Bank memastikan pedoman internal yang dimiliki sejalan dengan ketentuan yang diatur pada POJK ini. Namun, POJK ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The Bank ensures that its internal guidelines are in line with the provisions regulated in this POJK. However, this POJK does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.</p>

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and regulations	Latar Belakang/Penjelasan Background/Explanation	Pengaruhnya terhadap Bank, dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
<p>POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>POJK No. 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.</p>	<p>Penyesuaian pengaturan antara lain: (i) penambahan prinsip Pelindungan Konsumen dan Masyarakat yaitu penegakan kepatuhan dan persaingan yang sehat; (ii) penyesuaian cakupan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menjadi kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan; (iii) penambahan dan penegasan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan serta hak, kewajiban dan larangan bagi PUJK; (iv) penegasan pelindungan data Konsumen dan kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber; dan (v) tata cara peneraan dan batas pemenuhan sanksi.</p> <p>Regulatory adjustments include: (i) adding the principle of Consumer and Community Protection, namely enforcing compliance and fair competition; (ii) adjusting the scope of Financial Services Businesses (PUJK) under the authority of OJK in carrying out supervision; (iii) addition and confirmation of Consumer rights and obligations in the financial services sector as well as rights, obligations and prohibitions for PUJK; (iv) confirmation of consumer data protection and the obligation to ensure information system security and cyber resilience; and (v) procedures for imposing and limits on compliance with sanctions.</p>	<p>Bank menyesuaikan pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada POJK ini. Di samping itu, POJK ini akan berdampak pada laporan keuangan apabila dibutuhkan extra expenses untuk pemenuhan perlindungan konsumen.</p> <p>The Bank has adjusted its internal guidelines to be in line with the provisions regulated in this POJK. However, this POJK will have an impact on financial reports if extra expenses are needed to fulfill consumer protection.</p>
<p>SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan</p> <p>SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 concerning Procedures for Using the Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.</p>	<p>Ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan sehubungan dengan diterbitkannya POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Kegiatan Jasa Keuangan</p> <p>Implementation provisions regarding procedures for using the services of public accountants and public accounting firms in financial services activities in connection with the issuance of POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services (AP) and Public Accounting Firms (KAP) in Financial Services Activities.</p>	<p>Bank wajib menggunakan AP dan KAP yang terdaftar dan tercatat di OJK serta menyampaikan laporan berkala mengenai penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan</p> <p>The Bank is required to use APs and KAPs that are registered and recorded with OJK and submit periodic reports regarding the appointment of APs and KAPs for audits of annual historical financial information.</p>
<p>SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</p> <p>SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 concerning Application of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units</p>	<p>Ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diterbitkan dalam rangka mengelola dan memitigasi risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah dan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah.</p> <p>Implementation provisions of POJK No. 65/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units that was issued to manage and mitigate risks in Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units using identification, measurement, monitoring and control processes risks in accordance with sharia banking business activities and considering conformity with sharia principles.</p>	<p>Bank menyesuaikan pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada lampiran SEOJK ini. Namun, SEOJK ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.</p> <p>The Bank has adjusted its internal guidelines to be in line with the provisions set out in this SEOJK attachment. However, the SEOJK does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.</p>
<p>PBI No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia</p> <p>PBI No. 3 of 2023 concerning Consumer Protection</p>	<p>Penyesuaian dan penguatan pengaturan mengenai pelindungan konsumen Bank Indonesia sehubungan dengan perkembangan prinsip pelindungan konsumen sejalan dengan meningkatnya risiko bagi konsumen yang ditimbulkan dari inovasi dan digitalisasi produk dan/atau layanan di sektor keuangan.</p> <p>Adjusting and strengthening Bank Indonesia's consumer protection regulations in connection with developments in consumer protection principles in line with the increasing risks for consumers arising from innovations and digitalization of products and/or services in the financial sector.</p>	<p>Bank menyesuaikan pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada PBI ini. Selain itu, Bank juga wajib menyampaikan laporan terkait pelindungan konsumen sebagaimana diatur pada PBI ini.</p> <p>Di samping itu, PBI ini akan berdampak pada laporan keuangan apabila dibutuhkan extra expenses untuk pemenuhan perlindungan konsumen.</p> <p>The Bank has adjusted its internal guidelines to be in line with the provisions set out in this PBI. In addition, the Bank is also required to submit reports related to consumer protection as regulated in this PBI.</p> <p>In addition, this PBI will have an impact on financial reports if extra expenses are needed to fulfill consumer protection.</p>



<p>Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and regulations</p>	<p>Latar Belakang/Penjelasan Background/Explanation</p>	<p>Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements</p>
<p>PADG No. 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment (BIFAST) PADG No. 17 of 2023 concerning Implementation of Bank Indonesia-Fast Payment (BIFAST)</p>	<p>Pengaturan sehubungan dengan pengembangan Bank Indonesia-Fast Payment sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional diperlukan untuk mendorong perkembangan ekosistem keuangan digital dan inovasi yang dilakukan oleh industri sistem pembayaran di Indonesia Regulations related to the development of Bank Indonesia-Fast Payment as a national retail payment system infrastructure are needed to encourage the development of the digital financial ecosystem and innovations carried out by the payment system industry in Indonesia</p>	<p>Bank menyesuaikan penghitungan jasa,imbalan, atau kompensasi yang akan dibayarkan ke nasabah sesuai dengan formula baru yang ditetapkan dalam PADG ini. Namun,PADG ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The Bank has adjusted its calculation of services, rewards or compensation that will be paid to customers based on the new formula stipulated in this PADG. However, this PADG does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.</p>
<p>PADG No. 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia PADG No. 20 of 2023 concerning Procedures for Implementing Bank Indonesia Consumer Protection</p>	<p>Ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia untuk penyesuaian dan penguatan pengaturan mengenai pelindungan konsumen Bank Indonesia Implementation provisions of PBI No. 3 of 2023 concerning Bank Indonesia Consumer Protection to adjust and strengthen Bank Indonesia consumer protection regulations</p>	<p>Bank wajib menyesuaikan pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada SEBI ini. Selain itu, Bank juga wajib menyampaikan laporan terkait pelindungan konsumen sebagaimana diatur pada SEBI ini. Di samping itu, PBI ini akan berdampak pada laporan keuangan apabila dibutuhkan extra expenses untuk pemenuhan perlindungan konsumen. The Bank is required to adjust internal guidelines to be in line with the provisions regulated by this SEBI. In addition the Bank is also required to submit reports related to consumer protection as regulated in the SEBI. In addition, this PBI will have an impact on financial reports if extra expenses are needed to fulfill consumer protection.</p>

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Bank

Bank Aladin Syariah telah menyusun kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023.

Adapun perubahan-perubahan kebijakan akuntansi, penjelasan, serta dampaknya terhadap laporan keuangan Bank adalah sebagai berikut.

Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Bank

Bank Aladin Syariah has prepared accounting policies in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) published by the Financial Accounting Standards Board-Indonesian Accountants Association (DSAK-IAI), which are effective for the fiscal year starting January 1, 2023 to December 31, 2023.

Changes to accounting policies, explanations and their impact on the Bank's financial statements are as follows.Bank Health Level

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies	Penjelasan/Alasan Perubahan Explanation/Reason for Change	Dampak terhadap Laporan Keuangan Bank Impact on Bank Financial Reports
Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian laporan keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi" Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of financial reports regarding Accounting Policy Disclosures"	Amandemen PSAK 1 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan "informasi kebijakan akuntansi material" yang sebelumnya "Kebijakan akuntansi signifikan" dan mengklarifikasi bahwa tidak seluruh informasi kebijakan akuntansi terkait dengan transaksi, kejadian atau kondisi material lainnya adalah material terhadap laporan keuangan. Amendments to PSAK 1 require entities to disclose "material accounting policy information" previously "significant accounting policies" and clarify that not all accounting policy information related to transactions, events or other material conditions is material to the financial statements.	Penerapan Amandemen PSAK No. 1 tidak menimbulkan perubahan yang signifikan dan tidak berdampak material. Implementation of Amendment to PSAK No. 1 did not cause significant changes and had no material impact.
Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap— Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan" Amendment to PSAK No. 16, "Fixed Assets - Proceeds before Intended Use"	Amandemen ini menambahkan pengaturan atas: <ul style="list-style-type: none"> Pengakuan hasil penjualan dan biaya perolehan atas item yang dihasilkan saat membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diperlukan sesuai dengan intensi manajemen dalam Laba Rugi. Pengukuran biaya perolehan atas item tersebut dengan menerapkan persyaratan pengukuran dalam PSAK 14: Persediaan. This amendment adds provisions for: <ul style="list-style-type: none"> Recognition of sales proceeds and acquisition costs for items generated when bringing fixed assets to the required location and condition in accordance with management's intentions in Profit and Loss. Measurement of the cost of these items by applying the measurement requirements in PSAK 14: Inventory. 	Penerapan Amandemen PSAK No. 16 tidak menimbulkan perubahan yang signifikan dan tidak berdampak material. Implementation of Amendment to PSAK No. 16 did not cause significant changes and had no material impact.
Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi" Amendment to PSAK No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors Related to the Definition of Accounting Estimates"	Amandemen PSAK 25 ini memperkenalkan definisi estimasi Akuntansi dan mengklarifikasi: <ul style="list-style-type: none"> Teknik estimasi dan teknik penilaian merupakan contoh dari teknik pengukuran yang digunakan dalam mengembangkan estimasi akuntansi. Perubahan dalam estimasi akuntansi sebagai hasil informasi baru atau perkembangan baru yang bukan merupakan koreksi kesalahan. This amendment to PSAK 25 introduces the definition of Accounting estimate and clarifies: <ul style="list-style-type: none"> Estimation techniques and valuation techniques as examples of measurement techniques used in developing accounting estimates. Changes in accounting estimates as a result of new information or new developments that are not corrections of errors. 	Penerapan Amandemen PSAK No. 25 tidak menimbulkan perubahan yang signifikan dan tidak berdampak material. Implementation of Amendment to PSAK No. 25 did not cause significant changes and had no material impact.
Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan tentang Pajak Tanggahan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal" Amendment to PSAK No. 46, "Income Taxes regarding Deferred Tax Related to Assets and Liabilities Arising From Single Transactions"	Amandemen PSAK 46 ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tanggahan pada saat pengakuan awalnya misalnya dari transaksi sewa, untuk menghilangkan perbedaan praktik di lapangan atas transaksi tersebut dan transaksi serupa. This amendment to PSAK 46 proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from lease transactions, to eliminate differences in practices in the field for these transactions and similar transactions.	Penerapan Amandemen PSAK No. 46 tidak menimbulkan perubahan yang signifikan dan tidak berdampak material. Implementation of Amendment to PSAK No. 46 did not cause significant changes and had no material impact.

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja Bank atau disebut dengan *Risk based Bank Rating*. Pada tahun 2023, peringkat tingkat kesehatan Bank Aladin Syariah yang dinilai secara *self assessment*, mencapai Peringkat Komposit Sehat (PK-2). Hal tersebut mencerminkan kondisi Bank Aladin Syariah sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari kriteria faktor-faktor penilaian, antara lain *risk profile*, penerapan GCG, *earnings*, dan *capital* yang secara umum baik. Meskipun terdapat kelemahan, maka dapat dikatakan bahwa kelemahan tersebut tidak signifikan.

Prospek Usaha dan Strategi ke Depan

Pertumbuhan perekonomian sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya dan ekonomi Indonesia masih mengalami pertumbuhan 5,05% (yoy) di tahun 2023. Pertumbuhan terjadi di berbagai jenis

Bank Health Level

The Bank's Health Level is based on an assessment of the Bank's condition and is carried out based on risks including risks related to sharia principles and the Bank's performance, and is referred to as a Risk-based Bank Rating. In 2023, Bank Aladin Syariah's health level rating, assessed through self-assessment, reached a Composite Rating of Healthy (PK-2). This reflects the healthy condition of Bank Aladin Syariah, so that it is considered capable of facing significant negative influences from changes in business conditions and other external factors, as reflected in the assessment factor criteria, including risk profile, GCG implementation, earnings and capital which are generally good. Although there are weaknesses, it can be said that these weaknesses are not significant.

Business Prospects and Future Strategy

Economic growth slowed slightly compared to the previous year, and the Indonesian economy still experienced growth of 5.05% (yoy) in 2023. Growth occurred across many types of business fields, including



lapangan usaha, termasuk pada industri Perbankan. Peningkatan peran intermediasi perbankan terus berlanjut, di mana sampai dengan akhir Desember 2023. Pada Desember 2023, OJK mencatat pertumbuhan kredit mencapai sebesar 10,61% (yoy) dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi sebesar 12,26% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Desember 2023 meningkat sebesar 3,73% (yoy) dengan kontribusi terbesar dari Giro yang tumbuh sebesar 4,57% (yoy). Begitupun industri perbankan syariah beserta unit usaha syariah menunjukkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 15,63% (yoy) dan pertumbuhan DPK sebesar 10,43% (yoy). Likuiditas industri perbankan pada Desember 2023 dalam level yang memadai dengan risiko kredit serta kualitas kredit yang terjaga dengan rasio Alat Likuid/DPK (AL/DPK) berada pada 28,73%. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non Performing Loan (NPL) net perbankan sebesar 0,75% dan NPL gross sebesar 2,19%. Memasuki tahun 2024, perekonomian nasional diprediksikan akan terus tumbuh. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,75-5,50% (yoy). Hal ini didukung oleh kuatnya permintaan domestik serta membaiknya permintaan ekspor, serta bauran kebijakan yang akomodatif guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, peran intermediasi perbankan pun diprediksi akan terus menguat dengan pertumbuhan kredit diprakirakan di level 10,00-12,00% (yoy).

Adapun industri perbankan syariah beserta unit usaha syariah berhasil membukukan total aset sebesar Rp1.236,1 triliun per Desember 2023, dengan total pembiayaan sebesar Rp 570,3 triliun atau tumbuh 15,63% (yoy). Pertumbuhan aset perbankan syariah tersebut ditopang oleh pertumbuhan DPK perbankan syariah yang mencapai Rp669,3 triliun atau tumbuh 10,43% (yoy).

Setelah mencatat pertumbuhan bisnis yang baik di tahun 2023, Bank Aladin Syariah optimis bahwa di tahun 2024 perkembangan bisnis Bank akan terus berlanjut. Hal ini mempertimbangkan potensi pertumbuhan ekonomi serta perkembangan internal Bank yang meliputi kesiapan infrastruktur dan kelengkapan produk dan layanan yang dimiliki oleh Bank. Di tahun 2024 akan mengedepankan pertumbuhan berbasis kerja sama kemitraan, dengan memperdalam kerja sama dengan mitra yang telah ada dan memperluas kerja sama dengan mitra baru. Untuk mendukung terjalannya kerja sama ini, Bank akan terus menyempurnakan produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Penyempurnaan ini tentunya meliputi inovasi berkelanjutan pada aplikasi mobile banking Bank yang sampai dengan akhir Desember 2023 telah diunduh oleh lebih dari 5 juta nasabah dan digunakan oleh lebih dari 3 juta pengguna. Dalam melakukan pengembangan bisnis, tentunya Bank akan senantiasa memastikan penerapan manajemen risiko yang baik dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Menutup tahun 2023 dengan mencatatkan kelanjutan pertumbuhan kinerja yang positif. Di mana aplikasi Bank Aladin Syariah tercatat telah diunduh sebanyak lebih dari 5,2 juta nasabah per 31 Desember 2023. Sedangkan pengguna yang teregistrasi secara aktif mencapai lebih dari 3,1 juta nasabah di seluruh Indonesia, atau meningkat sekitar 75% dibanding tahun sebelumnya. Di samping itu, DPK Bank Aladin Syariah pun mengalami pertumbuhan signifikan dan naik hingga lebih dari 300% dibandingkan dengan posisi Desember 2022. Pertumbuhan DPK ini didorong oleh pertumbuhan dana yang dihimpun baik dari nasabah ritel maupun non ritel.

the banking industry. The banking intermediation role continued to increase until the end of December 2023. In December 2023, OJK recorded loan growth of 10.61% (yoy) with the highest growth in investment loans at 12.26% (yoy). On the other side, the growth in Third Party Funds (DPK) in December 2023 increased by 3.73% (yoy) with the largest contribution coming from Current Accounts that grew by 4.57% (yoy). Likewise, the sharia banking industry and sharia business units recorded financing growth of 15.63% (yoy), and deposit growth of 10.43% (yoy). The Banking industry's liquidity in December 2023 was at an adequate level with loan risk and loan quality maintained with the Liquid Assets/DPK (AL/DPK) ratio at 28.73%. While, loan quality was maintained with a net banking Non-Performing Loan (NPL) ratio of 0.75% and gross NPL of 2.19%. Entering 2024, the national economy is predicted to continue to grow with Bank Indonesia predicting economic growth in a range of 4.75-5.50% (yoy). This is supported by strong domestic demand and improving export demand, as well as an accommodative policy mix to maintain stability and encourage growth. In line with national economic growth, the banking intermediation role is predicted to continue to strengthen with loan growth predicted at a level of 10.00-12.00% (yoy).

The sharia banking industry and sharia business units realized total assets of Rp1,236.1 trillion as of December 2023, with total financing of Rp570.3 trillion, a growth of 15.63% (yoy). The growth in sharia banking assets was due to the growth of sharia banking deposits that reached Rp669.3 trillion, an increase of 10.43% (yoy).

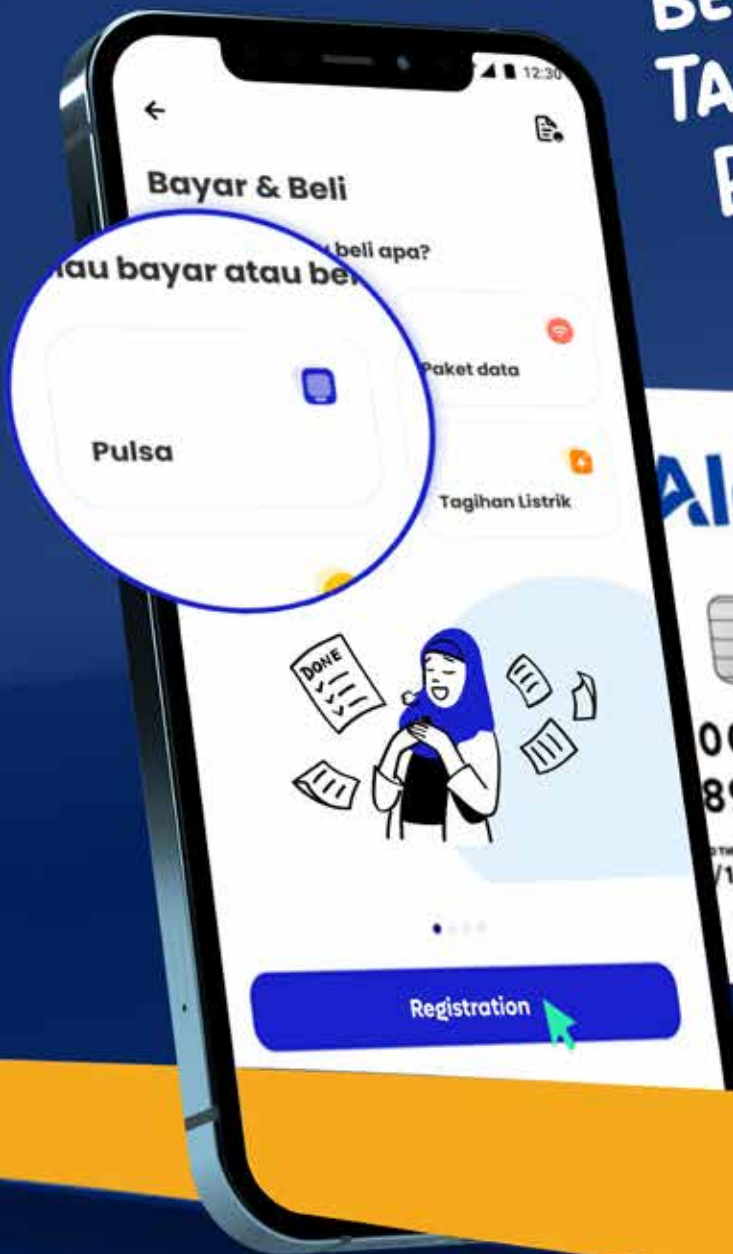
After recording good business growth in 2023, Bank Aladin Syariah is optimistic that in 2024 the Bank's business development will continue. This takes into account the potential for economic growth and internal development of the Bank, including the infrastructure readiness and completeness of the Bank's products and services. In 2024, we will prioritize growth based on partnership cooperations, by deepening cooperation with existing partners and expanding cooperation with new partners. To support these collaborations, the Bank will continue to improve the products and services it offers to customers. These improvements will include continuous innovations in the Bank's mobile banking application, which by the end of December 2023 had been downloaded by more than 5 million customers and used by more than 3 million users. When carrying out its business development, the Bank will always ensure the application of good risk management and prioritize the prudential principle

We closed 2023 by recording continued positive performance growth. Where the Bank Aladin Syariah application was downloaded by more than 5.2 million customers as of December 31, 2023. At the same time, actively registered users reached more than 3.1 million customers throughout Indonesia, an increase of around 75% compared to the previous year. Bank Aladin Syariah's TPF also experienced significant growth and increased by more than 300% compared to its position in December 2022. This growth in TPF was driven by a growth in funds collected from both retail and non-retail customers.

Aladin



BELI ATAU BAYAR
TAGIHAN APA AJA
BISA LANGSUNG
Di **ALADIN**





Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Functions

Sebagai bank syariah digital, keamanan informasi nasabah merupakan poin yang sangat penting bagi Bank Aladin Syariah. Sertifikasi ISO 27001 yang diterima oleh Bank Aladin Syariah merupakan komitmen Bank untuk terus meningkatkan keamanan informasi sesuai dengan standar yang ada.

As a digital sharia bank, customer information security is a very important for Bank Aladin Syariah. Bank Aladin Syariah receiving ISO 27001 certification demonstrates the Bank's commitment to continuing to improve information security in accordance with existing standards..

05

Tata Kelola Sumber Daya Insani

Human Capital Governance

Komitmen serta Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani

Ditengah tantangan yang semakin dinamis pada industri perbankan, khususnya bank digital syariah ditambah tuntutan akselerasi digital yang kian mengemuka didorong perubahan ekspektasi publik akan layanan keuangan yang cepat, efisien dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja menuntut Bank Aladin Syariah untuk senantiasa melakukan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) yang adaptif dan efektif yang berdampak tidak hanya pada produktifitas pekerja dan profitabilitas, namun juga sustainability Bank.

Bank Aladin Syariah tetap berkomitmen untuk memastikan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Insani yang kuat dan berkelanjutan serta mengembangkan talenta yang kompeten dan berkualitas tinggi yang mampu beradaptasi terhadap setiap perubahan lingkungan bisnis. Bank Aladin Syariah terus mengembangkan dan meningkatkan berbagai aspek dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Insani yang kompeten dan berkualitas seperti yang diharapkan. Hal ini selain untuk menjawab tantangan industri perbankan juga untuk mewujudkan visi Menjadi Bank Syariah Digital terdepan.

Pelaku industri perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki karakteristik khusus, yakni wajib menjaga kepercayaan nasabah yang mana tingkat kepercayaan dan reputasi Bank diukur dari kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini Bank Aladin Syariah menjadikan kepercayaan nasabah sebagai prinsip yang fundamental dan senantiasa mendorong seluruh SDI berkomitmen untuk menjaga sikap dan perilaku sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkup Bank Aladin Syariah, dengan tujuan menjaga kepercayaan nasabah terhadap Bank Aladin Syariah dalam hal pengelolaan keuangan dan layanan berdasarkan syariat Islam.

Ketersediaan talenta perbankan yang andal merupakan tantangan yang dihadapi industri perbankan di Tanah Air. Mengembangkan SDI dan mempertahankan talenta terbaik secara berkesinambungan merupakan keharusan dan telah menjadi salah satu agenda strategis Bank Aladin Syariah. Pada tahun 2023, Bank Aladin Syariah melanjutkan upaya pembentukan SDI yang kompeten, berintegritas tinggi, serta menjunjung sikap dan perilaku yang luhur melalui 2 (dua) pendekatan, yakni meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal; dan mengikutsertakan pegawai dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan. Hal ini selaras dengan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Human Capital Management and Development Commitment and Policy

The increasingly dynamic challenges in the banking industry, especially in sharia digital banks, together with the increasingly emerging demands for digital acceleration, driven by changes in public expectations for fast, efficient and safe financial services that can be carried out anywhere, requires that Bank Aladin Syariah carries out adaptive and effective management and development of its Human Capital (HC), which will impact its employee productivity and profitability, and also the Bank's sustainability.

Bank Aladin Syariah remains committed to strong and sustainable HC management and development, so as to develop competent and high-quality talent who can adapt to changes in the business. Bank Aladin Syariah continues to develop and improve various aspects and functions to meet the needs for competent and quality HC. This not only answers the challenges of the banking industry but also helps realize the vision of becoming a leading Digital Sharia Bank.

When carrying out its business activities the Banking industry is obliged to maintain customer trust, where the level of trust in the bank, and its reputation is measured by the quality of its HC. In this area, Bank Aladin Syariah places customer trust as a fundamental principle and encourages its HC to commit to maintaining attitudes and behavior in accordance with applicable principles and standards, both within and outside Bank Aladin Syariah, with the aim of maintaining customer trust in Bank Aladin Syariah related to its financial management and services based on Islamic law.

The banking industry in Indonesia faces a challenge due to the availability of reliable banking talent. Developing its own HC and retaining the best talent on an ongoing basis is a must and has become a strategic agenda in Bank Aladin Syariah. In 2023, Bank Aladin Syariah continued to develop competent HC who have high integrity, and uphold noble attitudes and behavior. Development was achieved by following 2 (two) approaches: increasing togetherness of all members in the organization with a team work ethic to achieve the business targets and maximize profits; and involving employees in seminars as well as education and training. This was in line with Law No. 13 of 2003 concerning Employment and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.



Pengelola SDI Bank Aladin Syariah

Struktur organisasi yang kuat dan solid perlu didukung oleh pengelolaan Human Capital yang baik serta diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Untuk mendukung hal tersebut, Bank Aladin Syariah telah memiliki organisasi pengelolaan Human Capital yang berada di bawah supervisi langsung dari Presiden Direktur. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkup Bank Aladin Syariah, dilaksanakan oleh Direktorat Human Capital sesuai Kebijakan Sumber Daya Manusia No. KB-O/010/2021/PRESDIR pada 25 November 2021 dimana Direktorat Human Capital memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait SDI.

Jumlah pegawai Direktorat Human Capital and General Affairs Division per 31 Desember 2023 berjumlah 11. Adapun tugas dan tanggung jawab Human Capital and General Affairs Division dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan SDI, adalah sebagai berikut:

1. Menyadari dan melakukan kebutuhan rekrutmen saat ini dan yang mendatang;
2. Memastikan kepatuhan terhadap hukum terkait ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Mendapatkan dan mempertahankan pegawai berpotensi;
4. Mengelola kompensasi dan benefit pegawai;
5. Memastikan efektivitas hubungan pegawai;
6. Mengelola onboarding, pelatihan, learning and development untuk memaksimalkan performa kerja;
7. Menerapkan tindakan yang mendukung kesehatan dan keselamatan;
8. Mengelola tugas administrasi seperti data pegawai, payroll, hingga perpajakan;
9. Menyelenggarakan evaluasi performa;
10. Memastikan data karyawan yang tersimpan di Bank Aladin Syariah, akurat dan paling update.

Program Strategis Tahun 2023

Sebagai aset penting, Bank Aladin Syariah mempunyai komitmen untuk mengembangkan SDI dalam upaya mendukung implementasi inisiatif strategis secara efektif, sekaligus untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh nasabah. Untuk itu, Bank Aladin Syariah telah menetapkan program strategis pengelolaan dan pengembangan SDI di tahun 2023. Program tersebut berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2023 diantaranya adalah:

Dalam RBB tahun 2023, Bank Aladin Syariah melalui Direktorat Human Capital telah menetapkan program strategis pengelolaan dan pengembangan SDI di tahun 2023, di antaranya adalah:

1. Pada tahun 2023, Bank telah menjalankan program pelatihan sebagai berikut:
 - a. Mandatory Training: Training yang diharuskan oleh regulator dan wajib diambil sesuai dengan job rolenya;
 - b. Non Mandatory Training : Training yang diajukan oleh karyawan dan masih berhubungan dengan pekerjaan agar karyawan dapat memperbaharui kemampuan mereka sesuai dengan trend saat ini;

Bank Aladin Syariah HC Manager

A strong and solid organizational structure has to be supported by good Human Capital management and staffed by people who are competent in their fields. To support this, Bank Aladin Syariah has a Human Capital management organization under the direct supervision of the President Director. Bank Aladin Syariah's HC management and development is carried out by the Human Capital Directorate in accordance with Human Resources Policy No. KB-O/010/2021/PRESDIR dated November 25, 2021 where the Human Capital Directorate has the authority to determine policies related to HC.

There were 11 employees in the Human Capital Directorate as of December 31, 2023. The Human Capital and General Affairs Division duties and responsibilities for managing and developing HC are to:

1. Recognize and address current and future recruitment needs;
2. Ensure compliance with applicable labor-related laws;
3. Obtain and retain potential employees;
4. Manage employee compensation and benefits;
5. Ensure the effectiveness of employee relations;
6. Manage onboarding, training, learning and development to maximize work performance;
7. Implement measures that support health and safety;
8. Manage administrative duties such as employee data, payroll, and taxation;
9. Organize performance evaluations;
10. Ensure that employee data held at Bank Aladin Syariah is accurate and up to date.

Strategic Program in 2023

As an important asset, Bank Aladin Syariah is committed to developing its HC in an effort to support the effective application of its strategic initiatives, as well as to provide the best service to all customers. Therefore, Bank Aladin Syariah instigated a strategic program for managing and developing HC in 2023. This program was based on the 2023 Bank Business Plan (RBB), and included:

In its 2023 RBB, Bank Aladin Syariah through the Human Capital Directorate established a strategic program for managing and developing HC in 2023, including:

1. In 2023, the Bank implemented the following training programs:
 - a. Mandatory Training: Training required by the regulator that must be taken according to the job role;
 - b. Non Mandatory Training: Training proposed by employees and still related to work so that employees can update their abilities in accordance with current trends;

- c. Personal Development Training : Training yang diberikan oleh Bank untuk pengembangan diri secara personal.
2. Pada tahun 2023, Bank telah menjalankan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan efektif mulai dari Januari 2023.
3. Selain itu Bank juga memiliki program Beasiswa kepada karyawan dan anak karyawan efektif mulai dari November 2023.
4. Bank juga terus melakukan proses rekrutmen untuk memenuhi karyawan di setiap level

Manajemen Sumber Daya Insani

Bank Aladin Syariah senantiasa berupaya untuk mengelola Sumber Daya Insani yang dimiliki secara terintegrasi dan berkelanjutan, dalam rangka mencapai tujuan dan arah bank yang telah ditetapkan Manajemen. Dalam pelaksanaannya, Bank Aladin Syariah menerapkan Program Pengelolaan dan Pengembangan SDI sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan Bank berdasarkan nasihat Direksi dan bertujuan untuk terus meningkatkan kinerja Bank.

Manpower Planning

Manpower Planning yang dilakukan Bank Aladin Syariah merupakan proses berkelanjutan terkait perencanaan sistematis untuk mengoptimalkan Sumber Daya Insani. Dalam perencanaan SDI, Bank Aladin Syariah tidak hanya untuk jangka pendek melainkan untuk jangka panjang dan berulang. Bank Aladin Syariah senantiasa melakukan monitoring untuk menjaga pemenuhan kebutuhan SDI tetap dalam koridor kebutuhan bisnis di lingkup Bank.

- c. Personal Development Training: Training provided by the Bank for personal development.
2. In 2023, the Bank implemented the Financial Institution Pension Fund program effective from January 2023.
3. The Bank also implemented a Scholarship program for employees and employees' children effective from November 2023.
4. The Bank also continued its recruitment process to meet employee requirements at all levels

Human Capital Management

Bank Aladin Syariah always endeavors to manage its Human Capital in an integrated and sustainable manner to achieve the Bank's goals and directives as determined by Management. To achieve this, and to improve the Bank's performance, Bank Aladin Syariah instigated the HC Management and Development Program in line with the Bank's developments and needs based on advice from the Board of Directors.

Manpower Planning

Bank Aladin Syariah's Manpower Planning is a continuous process related to systematic planning to optimize HC. Bank Aladin Syariah's HC planning is not only for the short term but also for the long term and is carried out repeatedly. Bank Aladin Syariah also carries out monitoring to maintain the fulfillment of its HC needs based on the Bank's business needs.

Manpower Planning Bank Aladin Syariah Tahun 2023
Bank Aladin Syariah Manpower Planning in 2023

Direktorat Directorate	Jumlah (orang) Total (people)
Commissioner	3
Director	4
Business Commercial	37
Compliance and Risk	27
Digital Bank	34
Finance & Corporate Strategy	20
Human Capital	12
Operations and Strategy	92
President Directorate	16
Information and Technology	102
TOTAL	347



Rekrutmen

Direktorat Human Capital and General Affairs Division secara konsisten melakukan proses rekrutmen dalam rangka pemenuhan SDI yang kompeten, berintegritas, profesional dan unggul, sesuai dengan kebutuhan dalam proses transformasi. Dalam memperoleh SDI yang sesuai kebutuhan, Direktorat Human Capital and General Affairs Division menjalankan program rekrutmen yang baik dan profesional. Bank Aladin Syariah memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh calon pegawai untuk mengikuti proses rekrutmen, selama memenuhi persyaratan administrasi, kompetensi dan posisi yang dibutuhkan guna mendukung keberlangsungan operasional Bank.

Pada tahun 2023, Bank Aladin Syariah telah melakukan perekrutan sebanyak 84 orang. Jumlah ini menurun dibanding tahun 2022 yang berjumlah 114 orang. Sementara itu, jumlah keseluruhan pegawai Bank Aladin Syariah per 31 Desember 2023, adalah mencapai 291 orang, mengalami peningkatan sebesar 13,67% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 256 orang.

Dalam proses rekrutmen, Bank Aladin Syariah selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Dimana, Bank tidak membedakan calon pegawai berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dan jenis kelamin. Bank Aladin Syariah mempertimbangkan calon pegawai berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.

Adapun pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan melalui sumber internal maupun eksternal yang dilakukan dengan jalur atau program, di antaranya:

1. Online recruitment platform;
2. Employee Referral Program;
3. Executive Search/HeadHunter;
4. Career Website di Bank Aladin Syariah website.

Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Sebagai upaya dalam mempersiapkan Insan SDI Bank Aladin Syariah yang berkualitas sekaligus demi meningkatkan produktifitas SDI, Bank Aladin Syariah senantiasa mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, baik internal maupun eksternal.

Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk memberikan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dalam hal peningkatan Skill Pekerja. Pengembangan kompetensi juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis Bank Aladin Syariah. Bank Aladin Syariah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai untuk dapat mengikuti program pengembangan kompetensi yang diadakan Bank tanpa memandang level jabatan maupun gender dari Pegawai.

Sepanjang tahun 2023, Bank Aladin Syariah telah mengeluarkan investasi anggaran sebesar untuk program pendidikan atau pelatihan sebesar Rp5.754.302.862,- dengan rincian sebagai berikut:

Recruitment

The Human Capital Directorate consistently carries out the recruitment process to recruit HC who are competent, have integrity, professionalism and excellence, in accordance with the needs in its transformation process. To recruit HC that matches its needs, the Human Capital Directorate runs a proper and professional recruitment program. Bank Aladin Syariah provides ample opportunities for all prospective employees to take part in the recruitment process, so long as they meet the administrative, competency and position requirements needed to support the continuity of the Bank's operations.

In 2023, Bank Aladin Syariah recruited 84 people, a decrease compared to 114 people in 2022. As of December 31, 2023, the total number of Bank Aladin Syariah employees was 291 people, an increase of 13.67% compared to the previous year's 256 people.

In its recruitment process, Bank Aladin Syariah always upholds human rights values, whereby, the Bank does not differentiate prospective employees based on ethnicity, religion, race and inter-group (SARA) and gender. Bank Aladin Syariah considers prospective employees based on their abilities and competencies.

Fulfilling employee requirements is carried out using internal and external sources through using the following channels or programs:

1. Online recruitment platform;
2. Employee Referral Program;
3. Executive Search/Head Hunter;
4. Career Website on Bank Aladin Syariah website.

Employee Competency Development and Policy Program

In an effort to prepare qualified Bank Aladin Syariah HC, as well as to increase HC productivity, Bank Aladin Syariah involves its employees in internal and external education and training.

Bank Aladin Syariah is committed to providing competency development to all employees in terms of improving employee skills. Competency development will also have a positive impact on Bank Aladin Syariah's business growth. Bank Aladin Syariah provides equal opportunities for all employees to take part in competency development programs held by the Bank regardless of the employee's position level or gender.

In 2023, Bank Aladin Syariah budget investment for the education or training programs was Rp5,754,302,862, with the following details:

No	Jenis Pendidikan/ Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
1	Mandatory Training - SPPUR J6 - Pengelolaan Transfer Dana (Uji Kompetensi)* Mandatory Training - SPPUR J6 - Fund Transfer Management (Competency Test)*	Staff	1	15-Dec-2022 December 15, 2022	LSP	6.000.000
2	Keanggotaan IIGMA 2022* IIGMA Membership 2022*	Staff	1	19-Dec-2022 December 19, 2022	IIGMA	1.000.000
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 - (Pembekalan)* Level 1 Risk Management Certification - (Debriefing)*	Komisaris Commissioners	1	29-Dec-2022 December 29, 2022	GPS Consulting	35.000.000
4	Executive Sharia Banking for Commissioner	Komisaris Commissioners	1	09 s.d 10 Jan 2023 January 9 – 10, 2023	Yayasan Muamalat Institute	15.000.000
5	Personal Development Training - LKP Arum Driving Course*	Staff	1	10 s.d 15 Dec 2022 December 10 - 15, 2022	LKP Arum	1.000.000
6	Basic Accounting Training - Program 12 - 13 Desember 2022* Basic Accounting Training - Program December 12 – 13, 2022*	PE dan Staff PE and Staff	22	12 - 13 Dec 2022 December 12 - 13, 2022	Yayasan Muamalat Institute	20.450.000
7	Sharia Accounting Training - Program 13 & 19 Desember 2022* Sharia Accounting Training - Program December 13 & 19, 2022*	Direktur, PE, dan Staff Directors, PE, and Staff	25	13 & 19 Dec 2022 December 13 - 19, 2022	Yayasan Muamalat Institute	24.250.000
8	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 - (Pembekalan dan Sertifikasi)* Level 1 Risk Management Certification - (Debriefing and Certification)*	Staff	2	16 - 17 Dec 2022 December 16 - 17, 2022	Yayasan Muamalat Institute	3.500.000
9	Mandatory Training - SPPUR J4 - Pengelolaan Uang Tunai* Mandatory Training - SPPUR J4 - Cash Management*	Staff	1	19 - 20 Dec 2022 December 19 - 20, 2022	IBI-BCC	1.100.000
10	Personal Development Training - Fitness	Staff	1	1-Jan-2023 January 1, 2023	Fitness First	700.000
11	Non-Mandatory Training - Training & Sertifikasi BNSP Certified Human Capital Supervisor (CHCS)	Staff	1	28-Jan-2023	PT Sahabat Karir Indonesia	3.900.000
	Non-Mandatory Training - Training & Certification BNSP Certified Human Capital Supervisor (CHCS)			January 28, 2023		
12	Personal Development Training - Music	Staff	1	28-Jan-2023 January 28, 2023	Yamaha Music School	1.000.000
13	Personal Development Training - Wakil Manajer Investasi	PE	1	31-Jan-2023	WMII (Wakil Manager Investasi Indonesia)	1.000.000
	Personal Development Training - Deputy Investment Manager			January 31, 2023		
14	Personal Development Training - Fitness	Staff	1	1-Feb-2023 February 1, 2023	PT Fit HUB Indonesia	1.000.000



No	Jenis Pendidikan/ Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
15	Workshop Bank Aladin Sesi 3 Bank Aladin Workshop Session 3	Direksi, PE dan Staff Directors, PE, and Staff	224	1-Feb-2023 February 1, 2023	PT Produta Promosindo	218.865.471
16	Executive Development Program For Management Team	PE	1	3-Feb-2023 February 3, 2023	Gallup	1.885.400
17	Personal Development Training - Forest camp Self Development mindfulness	Staff	1	3-Feb-2023 February 3, 2023	Forest Camp	1.000.000
18	Personal Development Training - Fitness	Staff	1	14-Feb-2023 February 14, 2023	Will Fitness	1.000.000
19	Dasar Perbankan Syariah Basics of Sharia Banking	Staff	12	30 s.d 31 Jan 2023 January 30 -31, 2023	Yayasan Muamalat Institute	10.400.000
20	SPPUR - J4 - Setelment Transaksi Treasuri – LPPI* SPPUR - J4 - Treasury Transaction Settlement – LPPI*	Staff	1	6 s.d 8 Dec 2022 December 6 - 8, 2022	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	3.600.000
21	SPPUR - J5 - Pengelolaan Transfer Dana – LPPI* SPPUR - J5 - Fund Transfer Management – LPPI*	Staff	1	8 s.d 9 Dec 2022 December 8 - 9, 2022	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	3.000.000
22	Mandatory Training - Ujian Sertifikasi Management Risiko - GPS BSMR Mandatory Training - Risk Management Certification Exam - GPS BSMR	BOC	1	27-Jan-2023 January 27, 2023	PT Gema Prima Solusi	500.000
23	Mandatory Training - Ujian Sertifikasi Management Risiko - GPS BSMR Mandatory Training - Risk Management Certification Exam - GPS BSMR	Staff	1	27-Jan-2023 January 27, 2023	GPS	750.000
24	Iuran Keanggotaan FKDKP periode 1 Januari s/d Desember 2023 FKDKP Membership Fees for the period 1 January to December 2023	BOD	1	15-Feb-2023 February 15, 2023	FKDKP	5.000.000
25	Workshop DPLK with Steven Mouritz	Staff dan PE Staff and PE	12	20-Feb-2023 February 20, 2023	Steven Mouritz	389.500
26	Personal Development - Duolingo Language Lessons Apps	Staff	1	23-Feb-2023 February 23, 2023	Apple	599.000
27	Personal Development Training - Learning Udemy - Rendy	Staff	1	24-Feb-2023 February 24, 2023	Udemy	1.000.000
28	Mandatory Training - Leaders Activation Program 2023	Staff	46	1-Mar-2023 March 1, 2023	PT Cahaya Santosa Lestari	447.844.000
29	Mandatory Training - Sustainable Finance (SF) Training Program 2022	BOD, BOC, PE, dan Staff BOD, BOC, PE, and Staff	35	1 - 2 Nov 2022* & 17 Feb 2023 November 1 -2, 2022* & February 17, 2023	Trisakti Sustainability Center	73.000.000

No	Jenis Pendidikan/ Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
30	Mandatory Training - Refreshment Treasuri Level Advance, Rapat Pleno dan Gathering 2023 Mandatory Training - Advance Level Treasury Refreshment, Plenary Meeting and Gathering 2023	PE	1	10-11 Mar 2023 March 10 - 11, 2023	IIGMA (Indonesia Islamic Global Market Association)	700.000
31	Mandatory Training - Training Financial Statement	Staff	3	13 - 14 Mar 2023 March 13 - 14, 2023	PT Ardana Cakyakirta Consultant	7.500.000
32	Mandatory Training - SPPUR J4 - Pengelolaan Uang Tunai Mandatory Training - SPPUR J4 - Cash Management	Staff	1	13-15 Feb 2023 February 13 - 15, 2023	IBI-BCC	1.100.000
33	Mandatory Training - Microsoft Excel 2019 Costumized dan Google Sheets Costumized - Executrain Mandatory Training - Microsoft Excel 2019 Customized and Google Sheets Customized - Executrain	Staff	60	2 - 3 Mar 2023 March 2 - 3, 2023	PT Executrain Nusantara Jaya	119.366.700
34	Mandatory Training - SPPUR - J5 - Settlement Transaksi Treasuri Mandatory Training - SPPUR - J5 - Treasury Transaction Settlement	Staff	1	21-22 Nov 2023 November 21 - 22, 2023	LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia)	3.250.000
35	Mandatory Training - Competency Based Interview - Batch 1&2	Staff	46	27 & 28 Feb 2023 February 27 - 28, 2023	PT Learning Resources	87.629.500
36	Mandatory Training - Advanced Sharia Banking Program for BOC & BOD	BOC	12	3 Feb & 1 Mar 2023 February 3 & March 1, 2023	Yayasan Muamalat Institute	25.000.000
37	Mandatory Training - Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 - Komisaris Mandatory Training - Level 2 Risk Management Certification Training - Commissioners	BOC	1	6 - 7 Feb 2023 February 6 - 7, 2023	PT Gema Prima Solusi	7.667.000
38	Mandatory Training - SPPUR J5 - Pengelolaan Uang Tunai Mandatory Training - SPPUR J5 - Cash Management	Staff	1	6-7 Feb 2023 February 6 - 7, 2023	IBI-BCC	1.300.000
39	Personal Development Training - Smile Music School	Staff	1	16-Jan-2023 January 16, 2023	Smile Music	690.000
40	Mandatory Training - Final Leaders Activation Program	Staff	46	1-Mar-2023 March 1, 2023	PT Cahaya Santosa Lestari	426.240.000
41	Mandatory Training - Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Mandatory Training - Risk Management Certification Refreshment	Staff dan PE Staff and PE	11	6-Mar-2023 March 6, 2023	PT Bintang Solusi Laras	31.500.000
42	Mandatory Training - Refreshment Sertifikasi Manajemen Resiko BOD & Chief Mandatory Training - BOD & Chief Risk Management Certification Refreshment	BOD dan BOC BOD and BOC	4	14-Mar-2023 March 14, 2023	PT GEMA PRIMA SOLUSI	16.000.000



No	Jenis Pendidikan/ Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
43	Mandatory Training - Competency Based Interview - Batch 3	Staff dan PE Staff and PE	28	15-Mar-2023 March 15, 2023	PT Learning Resources	56.610.000
44	Personal Development Training - Fitness	Staff	1	18-Mar-2023 March 18, 2023	Flex Camp	1.000.000
45	Subscribe Magazine Mar 2023-Jun 2023	Staff	1	25-Mar-2023 March 25, 2023	Techinasia	297.600
46	Mandatory Training - Perpanjangan Iuran Keanggotaan Baru an. Triana Yulianti Mandatory Training - Extension of New Membership Fees for Triana Yulianti	Staff	1	27-Mar-2023 March 27, 2023	Propami	350.000
47	Mandatory Training - Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko level 3 Mandatory Training - Level 3 Risk Management Certification Exam	PE	1	1-Apr-2023 April 1, 2023	Muamalat Institute	1.500.000
48	Mandatory Training - Refreshment Sertifikasi Manajemen Resiko BOD & Chief Mandatory Training - BOD & Chief Risk Management Certification Refreshment	BOD dan BOC BOD and BOC	4	6-Jun-2023 June 6, 2023	GPS	16.000.000
49	Mandatory Training - Serial Pendidikan PROPAMI Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE) Mandatory Training - PROPAMI Education Series for Securities Trading Broker Representatives (WPPE)	PE	1	10 - 13 Apr 2023 April 10 - 13, 2023	Propami	300.000
50	Mandatory Training - ISTQB Exam Guide	Staff	2	14,15,16,17,20,21 & 24 Mar 2023	Brainmatics	11.988.000
51	Mandatory Training - Intermediate Sharia Banking for Departement Head	Staff dan PE Staff and PE	39	16 - 17 Mar 2023 March 16 - 17, 2023	Yayasan Muamalat Institute	38.000.000
52	Mandatory Training - Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Mandatory Training - Level 2 Risk Management Provision and Certification	Staff	2	20-21 Jul 2023 July 20 - 21, 2023	Yayasan Muamalat Institute	4.000.000
53	Mandatory Training - Serial Pendidikan PROPAMI Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE) - Edi Rahardjo Mandatory Training - PROPAMI Education Series for Securities Trading Intermediary Representative (WPPE) - Edi Rahardjo	Staff	1	27-30 Mar 2023 March 27 - 30, 2023	Propami	650.000
54	Mandatory Training - Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Mandatory Training - Level 2 Risk Management Provision and Certification	Staff	1	3 - 4 Apr 2023 April 3 - 4, 2023	Muamalat Institute	2.000.000

No	Jenis Pendidikan/ Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
55	Alakadabra 2023	Komisaris, Direktur, PE, dan <i>Staff</i> Commissioners, Directors, PE, and <i>Staff</i>	263		Bank Aladin	244.943.389
56	Mandatory Training - Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Mandatory Training - Risk Management Certification Refreshment	<i>Staff</i>	9	18-Apr-2023 April 18, 2023	Yayasan Muamalat Institute	14.400.000
57	Personal Development Training - FTL Gym	<i>Staff</i>	1	10-May-2023 May 10, 2023	FTL Gym	1.000.000
58	Personal Development Training - FTL Gym	Karyawan Employees	1	9-Dec-2023 December 9, 2023	FTL Gym	1.000.000
59	Mandatory Training - Internal Anti Fraud	All	All	10 Mei - 7 Juni 2023 May 10 – June 7, 2023	Trivia Quiz	2.250.000
60	Mandatory Training - SPPUR J6 -Pengelolaan Transfer Dana Bagi Bank Mandatory Training - SPPUR J6 - Fund Transfer Management for Banks	PE	1	15-Mei-2023 May 15, 2023	PTUK	2.040.816
61	Mandatory Training - BREVET AB	<i>Staff</i>	1	22 Jul - 18 Nov 2023 July 22 – November 18, 2023	IAI	4.900.000
62	Mandatory Training - Corporate Action - Sahid	BOD <i>Staff</i> dan PE BOD <i>Staff</i> and PE	23	29-30 Mei 2023 May 29 - 30, 2023	Aditya Martowardoyo (CIMB Sekuritas) & Freddy Karyadi (ABNR)	27.000.000
63	Personal Development Training - House of Pilates	PE	1	16-Apr-2023 April 16, 2023	House of Pilates	1.000.000
64	Personal Development Training - Champion Fitness	<i>Staff</i>	1	10-Juni-2023 June 10, 2023	Champion Fitness	1.000.000
65	National Conference IAIB 2023	PE	1	12-13 Juli 2023 July 12 – 13, 2023	IAIB	4.050.000
66	Mandatory Training - Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Mandatory Training - Level 1 Risk Management Provision and Certification	<i>Staff</i>	3	17-18 Jun 2023 June 17 - 18, 2023	Yayasan Muamalat Institute	5.250.000
67	Mandatory Training - Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Mandatory Training - Level 1 Risk Management Provision and Certification	<i>Staff</i>	8	20-21 Jul 2023 July 20 – 21, 2023	Yayasan Muamalat Institute	14.000.000
68	Mandatory Training - Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Mandatory Training - Level 1 Risk Management Provision and Certification	<i>Staff</i>	1	20-21 Mei 2023 May 20 - 21, 2023	Yayasan Muamalat Institute	1.750.000
69	Personal Development Training - Anytime Fitness	<i>Staff</i>	1	27-Mei-2023 MAY 27, 2023	Anytime Fitness	1.000.000
70	Mandatory Training - Basic Sharia Banking Batch 10	<i>Staff</i>	18	3-4 April 2023 April 3 – 4, 2023	Muamalat Institute	12.600.000
71	Personal Development Training - Urban Gym	<i>Staff</i>	1	5-Juni-2023 June 5, 2023	Urban Gym	1.000.000



No	Jenis Pendidikan/ Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
72	Mandatory Training - Basic Sharia Banking Batch 11	Staff	13	7-8 Juni 2023 June 7 - 8, 2023	Yayasan Muamalat Institute	9.100.000
73	Mandatory Training - Pelatihan SPPUR J6 - Pengelolaan Transfer Dana Bagi Bank Mandatory Training - SPPUR J6 Training - Fund Transfer Management for Banks	PE	1	9 Mei 2023 May 9, 2023	Ikatan Bankir Indonesia	3.000.000
74	Personal Development Training - Strongbee	Staff	1	8-Jun-2023 June 8, 2023	Strongbee	1.000.000
75	Personal Development Training - Six Pack Gym	Staff	1	11-Jun-2023 June 11, 2023	Six Pack Gym	1.000.000
76	Personal Development Training - Fit Hub	Staff	1	15-Jun-2023 June 15, 2023	Fit Hub	1.000.000
77	Mandatory Training - SPPUR J5 - Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Tunai (Uji Kompetensi) Mandatory Training - SPPUR J5 - Payment and Cash Management System (Competency Test)	Staff	1	24-Jul-2023 July 24, 2023	IBI-PTUK	1.530.613
78	Personal Development Training - Fit Hub	Karyawan Employees	1	20-Sep-2023 September 20, 2023	FIT HUB Indonesia	1.000.000
79	Personal Development Training - Fit Hub	Karyawan Employees	1	4-Dec-2023 December 4, 2023	FIT HUB Indonesia	1.000.000
80	Membership YPO Concierge A/n Dyota Mahottama Marsudi	BOD	1	01 Juli 2023 July 1, 2023	YPO Concierge	62.690.819
81	Fundamental of IT Auditing	Staff	1	19-20 Juni 2023 June 19 - 20, 2023	IIA	3.500.000
82	Personal Development Training - PT Digital Edukasi Plus	Staff	1	19-Mei-2023 May 19, 2023	PT Digital Edukasi Plus	1.000.000
83	Personal Development Training - FIT HUB	Staff	1	24-Ags-2023 August 24, 2023	FIT HUB Indonesia	1.000.000
84	Personal Development Training - FIT HUB	Staff	1	25-Ags-2023 August 25, 2023	FIT HUB Indonesia	1.000.000
85	Personal Development Training - FIT HUB	Staff	1	25-Ags-2023 August 25, 2023	FIT HUB Indonesia	1.000.000
86	Personal Development Training - FIT HUB	Staff	1	25-Ags-2023 August 25, 2023	FIT HUB Indonesia	1.000.000
87	Perpanjangan Iuran Keanggotaan IAI an. Dwima Sulistyowati Extension of IAI Membership Fee for Dwima Sulistyowati	Staff	1	27-Juni-2023 June 27, 2023	Ikatan Akuntan Indonesia	600.000
88	Mandatory Training - Corporate Action - ABNR	BOD Staff dan PE BOD Staff and PE	23	29-30 Mei 2023 May 29 - 30, 2023	ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO (ABNR)	23.310.000
89	YPO Indonesia FY2023-2024 - Dyota Mahottama Marsudi	BOD	1	1-Jul 2023 July 1, 2023	YPO Concierge	30.000.000

No	Jenis Pendidikan/ Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
90	Webinar Batch 2/2023 dengan tema "Implementation Of Personal Data Protection Laws and Challenges To Their Implementation" Webinar Batch 2/2023 with the theme "Implementation Of Personal Data Protection Laws and Challenges To Their Implementation"	BOD	1	12-Jul-2023 July 12, 2023	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	510.204
91	Excellent Public Speaking Skills Offline Training Batch 2	BOD	8	8-Sep-2023 September 8, 2023	TALKINC	64.997.000
92	Personal Development Training - Fitness First	Staff	1	10-Ags-2023 August 10, 2023	Fitness First	1.000.000
93	Fundamental of Cybersecurity Auditing	Staff	1	17 & 20 Juli 2023 July 18 & 20, 2023	IIA	3.500.000
94	Personal Development Training - Fitness First	Staff	1	2-Ags-2023 August 2, 2023	Fitness First	700.000
95	Fundamental Risk Based Auditing	Staff	1	24-25 Juli 2023 July 24 - 25, 2023	IIA	3.500.000
96	Continuous Audit & Data Analytics	Staff	1	26-27 Juli 2023 July 26 - 27, 2023	IIA	3.500.000
97	SPPUR - Pengeloaan Transfer Dana - Jenjang Penyelia SPPUR - Fund Transfer Management - Supervisory Level	Staff	1	26,27 Juni & 1 Juli 2023 June 26 - 27 & July 1, 2023	IBI-BCC	1.800.000
98	Team Building Management	BOD	7	28-29 Ags 2023 August 28 - 29, 2023	PT. Idecemerlang Hasilgemilang	352.100.635
99	Excellent Public Speaking Skills Offline Training Batch 1	Staff	27	29-Ags-2023 August 29, 2023	TALKINC	73.650.000
100	Mandatory Training - Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 Mandatory Training - Level 3 Risk Management Certification Refreshment	Staff	6	4-Ags-2023 August 4, 2023	Bintang Solusi Laras	25.000.000
101	Personal Development Training - Nunchi	Staff	1	4-Ags-2023 August 4, 2023	Nunchi	599.000
102	Non Mandatory Training - Hybrid Program 6 Months	BOD dan PE BOD and PE	8	27-Okt-2023	PT. Idecemerlang Hasilgemilang	499.500.000
103	Non Mandatory Training - Outing Aladin ke Yogyakarta	Staff	3	6-Sept-2023 s/d 8-Sept-2023 September 6 - 8, 2023	Internal	7.291.167
104	Non Mandatory Training - Reimbursement Reforge Training	Staff	1	10-Ags-2023 August 10, 2023	Reforge	30.646.303
105	Non Mandatory Training - Workshop dan Sertifikasi Office Channeling Batch 62 Non Mandatory Training - Office Channeling Batch 62 Workshop and Certification	Staff	13	10-Ags-2023 s/d 12-Ags-2023 August 10 - 12, 2023	PT Taspen (Persero)	9.750.000
106	Personal Development Training - English Adventure	Staff	1	13-Sept-2023 September 13, 2023	English Adventure	1.000.000
107	Personal Development Training - Pilates Re Bar	BOD	1	19-Ags-2023 August 19, 2023	PT Semesta Anugerah Mutiara	1.000.000
108	Personal Development Training - Will Fitness	Karyawan Employees	1	6-Oct-2023 October 6, 2023	Will Fitness	1.000.000



No	Jenis Pendidikan/ Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
109	Personal Development Training - Will Fitness	Karyawan Employees	1	30-Oct-2023 October 30, 2023	Will Fitness	1.000.000
110	Personal Development Training - Doogether	Karyawan Employees	1	14-Dec-2023 December 14, 2023	Doogether	1.000.000
111	Personal Development Training - Will Fitness	Staff	1	07-Okt-2023 October 7, 2023	Will Fitness	1.000.000
112	Non Mandatory Training - Webinar Peluang, Harapan Dan Tantangan Perekonomian Nasional Non Mandatory Training - Webinar on Opportunities, Hopes and Challenges of the National Economy	BOD	1	10-Okt-2023 October 10, 2023	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	500.000
113	Non Mandatory Training - Association of Certified Fraud Examiners	Staff	10	11-Okt-2023 October 11, 2023	Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat	53.320.000
114	Personal Development Training - Buteyko Indonesia	Staff	1	13-Okt-2023 October 13, 2023	Buteyko Indonesia	1.000.000
115	Mandatory Training - Basic Sharia Banking Batch 12	Staff	19	13-Sept-2023 s/d 14-Sept-2023 September 13 – 14, 2023	Yayasan Muamalat Institute	13.300.000
116	Non Mandatory Training - Menulis Siaran Pers di Era Digital Non Mandatory Training - Writing Press Releases in the Digital Era	Staff	1	19-Sept-2023 September 19, 2023	PT Edutama Tempo Integra	1.062.500
117	Non Mandatory Training - Townhall Aladin	BOC, DPS, BOD, dan Karyawan BOC, DPS, BOD, and Employees	263	20-Okt-2023 October 20, 2023	Ayu Kartika Dewi	2.294.226.762
118	Personal Development Training - Doogether	Staff	1	27-Sept-2023 September 27, 2023	Doogether	267.650
119	Reklass Membership dan Alakadabra 2023 Reklass Membership and Alakadabra 2023	BOC, DPS, BOD, dan Karyawan BOC, DPS, BOD, and Employees	266	30-Okt-2023 October 30, 2023	Bank Aladin	251.243.389
120	Non Mandatory Training - Membedah IRA dan Risk Enterprise Terkait Program APU-PPT & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan Non Mandatory Training - Dissecting IRA and Enterprise Risk Related to APU-PPT & PPPSPM Programs in the Financial Services Sector	Staff	1	6-Okt-2023 s/d 7-Okt-2023 October 6 - 7, 2023	PT Genesis Inti Utama	6.500.000
121	Non Mandatory Training - Sales Training Delivery	PE dan Staff PE and Staff	11	6-Okt-2023 s/d 7-Okt-2023 October 6 - 7, 2023	PT Diva Sukses Mulia	110.850.000
122	Personal Development Training - English First	Karyawan Employees	1	13-Jul-2023 July 13, 2023	English First	1.000.000
123	Personal Development Training - Fit Hub Indonesia	Karyawan Employees	1	2-Nov-2023 November 2, 2023	Fit Hub Indonesia	1.000.000
124	Personal Development Training - Fit Hub Indonesia	Karyawan Employees	1	3-Nov-2023 November 3, 2023	Fit Hub Indonesia	1.000.000
125	Non Mandatory Training - Program Motion Graphic Level 2	Karyawan Employees	3	16-Nov-2023 November 16, 2023	PT Hellomotion Korpora Indonesia	14.250.000

No	Jenis Pendidikan/ Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
126	Refund Townhall Aladin	Komisaris, Direktur, PE, dan Staff Commissioners, Directors, PE, and Staff	263	29-Nov-2023 November 29, 2023	Bank Aladin	3.331.295
127	Non Mandatory Training - Membership Forum Human Capital Perbankan Indonesia (FHCPi) Tahun 2023 Non Mandatory Training - Membership of the Indonesian Banking Human Capital Forum (FHCPi) in 2023	Karyawan Employees	1	02-Des-2023 December 2, 2023	Forum HC Perbankan Indonesia	3.000.000
128	Non Mandatory Training - Stress Testing on Banking Exposure	Karyawan Employees	2	07-Nov-2023 s/d 8-Nov-2023 November 7 - 8, 2023	CV Diorama Success	15.000.000
129	Non Mandatory Training - Retail Financing	Karyawan Employees	15	30-Okt-2023 October 30, 2023	PT. Berinvest Digital Indonesia	32.004.231
130	Personal Development Training - Duo Shine Fitness	Karyawan Employees	1	30-Sept-2023 September 30, 2023	Duo Shine Fitness	1.000.000
131	Personal Development Training - Rhythm Star Music School	Karyawan Employees	1	10-Sep-2023 September 10, 2023	Rhythm Star Music School	1.000.000
132	Mandatory Training - Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Syariah Level 1-3 Mandatory Training - Maintaining Sharia Banking Risk Management Certification Level 1-3	Karyawan Employees	6	23-Nov-2023 November 23, 2023	Yayasan Muamalat Institute	10.500.000
133	Personal Development Training - CV Belajar Tenis Bersama	Karyawan Employees	1	1-Dec-2023 December 1, 2023	CV Belajar Tenis Bersama	950.000
134	Non Mandatory Training - Sustainable Finance	Karyawan Employees	15	7-Dec-2023 December 7, 2023	Trisakti Sustainability Center	48.500.000
135	Personal Development Training - Colortones	Karyawan Employees	1	7-Dec-2023 December 7, 2023	Colortones	1.000.000
136	Personal Development Training - Sepatu Roda Indonesia	Karyawan Employees	1	11-Dec-2023 December 11, 2023	Sepatu Roda Indonesia	1.000.000
137	Mandatory Training - Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Syariah bagi Direksi Mandatory Training - Maintaining Sharia Banking Risk Management Certification for Directors	Dewan Komisaris dan Direktur Board of Commissioners and Directors	2	13-Dec-2023 December 13, 2023	Yayasan Muamalat Institute	10.000.000
138	Non Mandatory Training - Program Motion Graphic Level 1 (Webinar)	Karyawan Employees	1	18-Dec-2023 December 18, 2023	PT Hellomotion Korpora Indonesia	3.000.000
139	Non Mandatory Training - Presentation Skill	Karyawan Employees	11	12-Des-2023 December 12, 2023	PT Latih Wacana Reformasi	59.714.286
140	Mandatory Training - Basic Sharia Banking Batch 13	Karyawan Employees	21	16-Nov-2023 s/d 17-Nov-2023 November 16 - 17, 2023	Yayasan Muamalat Institute	12.600.000

*) Dilaksanakan pada tahun 2022 dengan menggunakan anggaran tahun 2023

*) Implemented in 2022 using the 2023 budget

Sementara itu, dalam memperkuat dan meningkatkan pelayanan terhadap nasabah juga memberikan kontribusi terbaik bagi para pemangku kepentingan, Bank memiliki sejumlah SDI yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Berikut daftar SDI Bank Aladin Syariah yang Memiliki Keahlian Khusus atau Memiliki Sertifikasi dan Masih Berlaku sampai dengan akhir tahun 2023, yakni sebagaimana terlampir di bawah ini.

Meanwhile, to strengthen and improve services to customers as well as to provide the best contribution to stakeholders, the Bank employs HC who have special expertise in their fields. The following lists Bank Aladin Syariah HC that have special skills or certification and were still valid until the end of 2023.

No	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan/Pelatihan Type of Education/Training	Tahun Diperoleh Year Acquired	Masa Berlaku Sertifikasi Certification Validity Period	Penyelenggara Organizer
1	Mayang Ekaputri	Direktur Finance Finance Director	Sertifikasi Treasury Level Advance Advance Level Treasury Certification	2022	3 Tahun 3 years	IIGMA
2	Triana Yulianti	Treasury Head	Refreshment Sertifikasi Treasury Level Advance Advance Level Treasury Certification Refreshment	2022	3 Tahun 3 years	Muamalat Institute/ IIGMA
3	Edi Raharjo	Senior Dealer	Sertifikasi Treasury Level Intermediate Intermediate Level Treasury Certification	2022	3 Tahun 3 years	IIGMA
4	Dwima Sulistiyowati	Internal Audit Manager	Sertifikasi Banking Internal Auditor Level Supervisor Supervisor Level Banking Internal Auditor Certification	2022	4 Tahun tanggal berlaku 4 Years effective date	PT. Efektifpro Knowledge Source
5	Willy Hambali	Chief Operations & Strategy	Sertifikasi SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana SPPUR Certification - Fund Transfer Management	2023	3 Tahun 3 years	BNSP
6	Hery Suiwinata	Head of Central Operations	Sertifikasi SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana SPPUR Certification - Fund Transfer Management	2022	3 Tahun 3 years	BNSP

Penilaian Kinerja Pegawai

Penilaian Kinerja Pegawai merupakan evaluasi sistematis terhadap kemampuan dan kinerja pegawai secara berkala. Hasil penilaian kinerja nantinya akan digunakan oleh manajemen sebagai acuan dalam merencanakan pengembangan SDI di Bank Aladin Syariah. Bank Aladin Syariah melaksanakan program evaluasi pegawai berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) Objective & Key Results (OKR) dan kompetensi yang ditetapkan. Penyelenggaraan penilaian pegawai ini merupakan sarana pengembangan pribadi pegawai sekaligus berfungsi untuk menilai efektivitas sistem dan pedoman yang ada di bank. Review pegawai menghasilkan rekomendasi yang menjadi acuan bagi pegawai dan bank untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Dalam pengelolaan kinerja, bank menggunakan tujuan dan metode Key Performance Indikator Objective & Key Results (OKR). OKR KPI Bank Aladin Syariah diperoleh secara bertahap dari Direksi dan kemudian dikomunikasikan kepada individu terkait di bank. Sasaran kinerja dan OKR KPI memastikan pegawai dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya, membuat tindakan mereka lebih percaya diri, dan mencapai hasil akhir yang diharapkan.

Penilaian Kinerja Pegawai adalah upaya Bank Aladin Syariah untuk menilai prestasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas pegawai

Employee Performance Assessment

Employee Performance Assessments are used on a regular basis to systematically evaluate employee abilities and performance. The performance assessment results are later used by management as a reference for planning HC development at Bank Aladin Syariah. Bank Aladin Syariah's employee evaluation program is based on Objective & Key Results (OKR) and specified competencies. The employee assessments are used as a means of determining personal development for employees, and also serve to assess the effectiveness of existing systems and guidelines at the Bank. Employee reviews produce recommendations that become a reference for employees and the Bank to achieve better results.

For performance management, the Bank uses the Objective & Key Results (OKR) method. Bank Aladin Syariah OKR's are obtained in stages from the Board of Directors and then communicated to relevant individuals at the Bank. Performance OKRs and goals ensure employees can concentrate on their work, make their actions more confident, and achieve the desired end results.

Employee Performance Assessments reflects Bank Aladin Syariah's effort to assess achievements with the aim of increasing employee

maupun Bank. Penilaian kinerja dapat memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja melalui feedback yang diberikan oleh Bank

Selain memiliki tujuan, penilaian kinerja ini juga memiliki kegunaan yaitu sebagai media ukur yang digunakan Bank Aladin Syariah untuk menaikkan jabatan pegawai, menentukan gaji pegawai, memberikan prestasi kerja pegawai, dan mengembangkan karier pegawai. Bank melaksanakan remunerasi pegawai secara adil dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2023, Bank Aladin Syariah telah melaksanakan program penilaian kinerja terhadap 272 pegawai dengan hasil mayoritas karyawan (lebih dari 50% populasi) memenuhi target yang ditetapkan, sementara 24% dari karyawan melebihi dari target yang ditetapkan secara konsisten ataupun outstanding, dan 12% karyawan belum memenuhi target yang ditetapkan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Hasil penilaian kerja ini menjadi dasar untuk pengembangan pegawai di tahun selanjutnya, dan juga dasar untuk memberikan penghargaan kepada pegawai. Hal ini memperlihatkan bahwa Bank telah menerapkan pengelolaan kinerja sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Penilaian kinerja yang dilakukan bank telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dalam penilaian kinerja pegawai Bank Aladin Syariah menggunakan metode skala rating. Dimana skala penilaian tersebut kemudian akan diubah ke dalam bentuk angka seperti dalam tabel berikut ini

and Bank productivity. Performance appraisals will provide opportunities for employees to take corrective actions with the aim of improving their performance through feedback provided by the Bank.

These performance assessments are also used as a measuring medium by Bank Aladin Syariah to determine employee promotions, salaries, work performance, and career development. The Bank's employee remuneration is fair and transparent in accordance with applicable regulations.

In 2023, Bank Aladin Syariah conducted performance assessments for 272 employees that showed the majority of employees (more than 50%) met the set targets, while 24% of employees exceeded the set targets consistently or outstandingly, and 12% of employees did not meet the targets set, either partially or completely.

The work assessment results become the basis for employee development in the following year, and also the basis for giving awards to employees. This shows that the Bank's performance management is in accordance with what has been determined.

The performance assessments were carried out by the Bank in accordance with what has been determined. Bank Aladin Syariah uses a rating scale method when evaluating the employee performance. The rating scale is as follow.

Skala Rating yang Digunakan Rating Scale Used

Skala Rating Rating Scale	Keterangan Description
1	Secara konsisten menunjukkan kinerja luar biasa Consistently showing outstanding performance
2	Secara konsisten melebihi target Consistently exceeding targets
3	Memenuhi target Meeting targets
4	Memenuhi sebagian target Meeting some targets
5	Tidak memenuhi target Not meeting targets

Manajemen Karier

Program pengembangan karier yang dilakukan di tahun 2023 untuk seluruh pegawai Bank adalah on the job training, yaitu program pengembangan yang dilengkapi dengan pelatihan wajib sesuai level dan posisi masing-masing pegawai. On the job training dan program pengelolaan kinerja akan menjadi dasar pengembangan karier serta untuk mewujudkan visi juga misi Bank.

Career Management

The Bank employees career development program was carried out in 2023 and included job training, a development program that includes mandatory training based on the level and position of each employee. The job training and performance management programs form the basis for career development, and also to realize the Bank's vision and mission.



Program Pensiun

Bank Aladin Syariah telah menetapkan batas usia kerja maksimum yaitu 56 (lima puluh enam) tahun. Dengan begitu, pekerja yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun akan memasuki masa purna karya. Sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan loyalitas pegawai, Bank Aladin Syariah mempersiapkan berbagai program masa purna karya. Program ini diharapkan dapat membekali para pegawai yang menghadapi masa pensiun dengan persiapan mental dan emosional sekaligus memfasilitasi kesejahteraan pensiun pegawai. Per 31 Desember 2023, terdapat 0 pegawai yang memasuki masa pensiun.

Pension Program

Bank Aladin Syariah has set a maximum working age limit of 56 (fifty six) years, where employees who have reached the age of 56 (fifty six) years will enter retirement. As a form of appreciation for employee dedication and loyalty, Bank Aladin Syariah has developed retirement programs to equip employees facing retirement with mental and emotional preparation while facilitating employee retirement welfare. Up until December 31, 2023, no employees entered retirement.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Dalam proses rekrutmen, Bank Aladin Syariah memberikan hak yang sama kepada setiap calon pegawai yang memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Bank juga mengimplementasikan prinsip kesetaraan, yaitu dengan tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin pada program pendidikan atau pelatihan dan remunerasi serta program kesejahteraan pegawai. Selama calon pegawai memiliki kompetensi dan integritas untuk menempati posisi strategis tersebut, maka Bank akan memberikan hak kesempatan kerja yang sama.

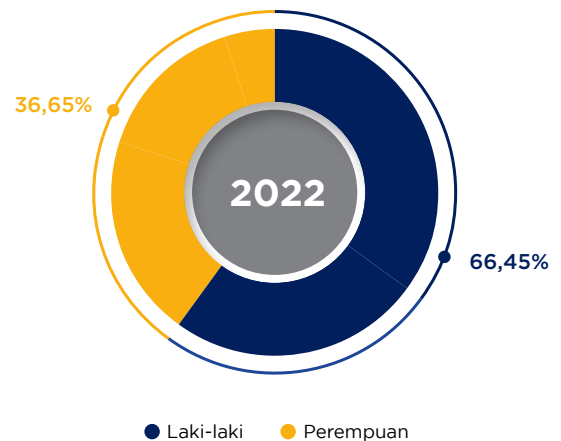
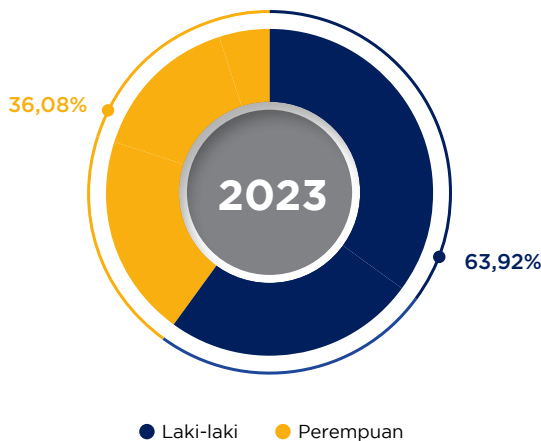
Gender Equality and Employment Opportunities

In its recruitment process, Bank Aladin Syariah provides the same rights to every prospective employee who meets the pre-determined administrative requirements. The Bank also applies the principle of equality, by not differentiating based on gender in its education or training and remuneration programs, and its employee welfare programs. So long as prospective employees have the competencies and integrity to occupy strategic positions, the Bank will provide equal employment opportunities.

Adapun komposisi pegawai Bank berdasarkan jenis kelamin untuk tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The Bank employees based on gender for 2022 and 2023 were as follows:

Komposisi Pegawai Bank Berdasarkan Gender 2022-2023
Composition of Bank Employees Based on Gender 2022-2023



Program Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) setiap SDI merupakan prioritas bagi Bank Aladin Syariah dalam melaksanakan kegiatan operasional. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya Bank dalam menyediakan beberapa fasilitas alat keselamatan kerja seperti APAR, yaitu alat untuk mengantisipasi kebakaran. Bank Aladin Syariah, terus menghimbau partisipasi semua pihak dalam mengoptimalkan pelaksanaan budaya K3 yang menjadi kunci terwujudnya lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan produktif.

Dari aspek kesehatan, Bank Aladin Syariah memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh pegawai. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut merupakan pemenuhan amanat undang-undang untuk menjamin keselamatan dan kesehatan bagi seluruh pegawai. Dalam hal ini, Bank telah mendaftarkan seluruh pegawai beserta keluarganya untuk mengikuti Program Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Bank melindungi pegawai dengan mengikutsertakan mereka pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Mengacu kepada peraturan undang-undang di bidang ketenagakerjaan, Bank Aladin Syariah telah mematuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh pegawai, pembayaran lembur diberikan kepada pegawai pada tingkat pelaksana, dan pemberian hak-hak cuti pegawai telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Program Kesejahteraan

Bank Aladin Syariah senantiasa memperhatikan dan mengedepankan kesejahteraan pegawai. Bank Aladin Syariah tidak hanya fokus pada tingkat remunerasi, Bank juga memberikan pegawai berbagai macam fasilitas dan program kesejahteraan. Kesejahteraan pegawai merupakan prioritas utama, selain demi mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif Bank menghubungkan dan mengorelasikannya dengan keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, juga strategi Bank. Adapun fasilitas dan program yang diberikan bank di antaranya:

Jenis Program Kesejahteraan Type of Welfare Program	Pegawai Tetap Permanent Employees	Pegawai Kontrak Permanent Employees
BPJS Ketenagakerjaan BPJS Employment	✓	✓
BPJS Kesehatan BPJS Health	✓	✓
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Financial Institution Pension Fund	✓	✓

✓ : Tersedia | Available ✗ : Tidak Tersedia | Not Available

Occupational Health, Safety, and Environment Program

Occupational Health and Safety (OHS) for HC is a priority for Bank Aladin Syariah when carrying out operational activities. This can be seen in the Bank's efforts to provide work safety equipment facilities such as APAR (portable fire extinguishers). Bank Aladin Syariah encourages all parties to adopt an OHS culture, which is the key to creating a safe, comfortable, healthy and productive working environment.

From the health aspect, Bank Aladin Syariah provides guaranteed health services to all employees. These health service facilities fulfill the statutory mandate to ensure safety and health for all employees. To do so, the Bank has registered all employees and their families in the Health Social Security Administering Agency (BPJS) Membership Program, and the Bank further protects employees by including them in the Employment Social Security Administering Agency (BPJS) Program.

For the statutory employment regulations, Bank Aladin Syariah has complied with the minimum wage requirements, on time payment of salaries and THR, the Jamsostek program for all employees, overtime payments for employees at the executive level, and employee leave rights, which have been laid down in the Company Regulations book.

Welfare Program

Bank Aladin Syariah always pays attention to and prioritizes employee welfare. Bank Aladin Syariah does not only focus on remuneration levels, the Bank also provides employees with other facilities and welfare programs. Employee welfare is a top priority, apart from creating a safe, comfortable and conducive work environment, the Bank connects and correlates it with success in achieving the Bank's vision, mission and strategy. The facilities and programs provided by the Bank include:



Pengupahan Bank Aladin Syariah disusun untuk mendorong Pegawai menyelaraskan diri dengan visi, misi, strategi, dan budaya Bank sehingga mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam pencapaian tujuan bisnis Bank Aladin Syariah. Dalam rangka memberikan daya tarik, motivasi dan mempertahankan pegawai terbaiknya, Bank menyusun pemberian gaji dan upah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan/fairness dan kompetitif/competitiveness yang telah disesuaikan dengan peraturan pengupahan pegawai, yang mengacu pada ketentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/K) wilayah masing-masing unit kerja Bank yang ditentukan oleh Pemerintah setempat.

Berikut jumlah remunerasi yang diberikan kepada pegawai untuk tahun 2022 dan tahun 2023.

Bank Aladin Syariah's remuneration is designed to encourage employees to align themselves with the Bank's vision, mission, strategy and culture so that they will provide their best contribution in achieving Bank Aladin Syariah's business goals. To attract, motivate and retain the best employees, the Bank prepares salaries and wages by considering the principles of fairness and competitiveness, and adjusting them to employee remuneration regulations, which refers to the Provincial/Regency/City Minimum Wage (UMP/K) provisions in the area of each Bank work unit, as determined by the local Government.

The following shows the remuneration given to employees in 2022 and 2023.

Jumlah Remunerasi yang diberikan kepada pegawai 2022-2023
Total Remuneration given to employees 2022-2023

Jumlah Remunerasi Pegawai Tahun 2023 Rp160.764.734.574	→	Diberikan untuk 291 pegawai
Jumlah Remunerasi Pegawai Tahun 2022 Rp140.698.211.064	→	Diberikan untuk 256 pegawai
Total Employee Remuneration in 2023 Rp160,764,734,574	→	Given to 291 employees
Total Employee Remuneration in 2022 Rp140,698,211,064	→	Given to 256 employees

Selain itu, sesuai Pasal 19 UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bank telah mendaftarkan semua pegawai dalam Program Jaminan Sosial. Berikut Jaminan Sosial yang diberikan kepada masing-masing pegawai:

1. Jaminan Hari Tua (JHT);
2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
3. Jaminan Kematian (JKM);
4. Jaminan Pensiun (JP); dan
5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Pengelolaan Hubungan Industrial

Selaras dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Bank Aladin Syariah senantiasa menjaga komitmen dalam membangun serta memelihara Hubungan Industrial yang harmonis, transparan, dan berkeadilan antara pegawai dan Bank. Hal tersebut dilakukan dalam menjaga keberlangsungan operasional Bank. Selama tahun 2023, Hubungan Industrial yang baik dinilai

Also, in accordance with Article 19 of Law 40 of 2004 concerning the National Social Security System, the Bank has registered all employees in the Social Security Program. The following shows the Social Security provided to each employee:

1. Old Age Security (JHT);
2. Work Accident Insurance (JKK);
3. Life Insurance (JKM);
4. Pension Insurance (JP); And
5. Health Care Insurance (JPK).

Industrial Relations Management

This is in line with Law No. 13 of 2003 and Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation as Laws concerning Employment. Bank Aladin Syariah maintains its commitment to building and maintaining harmonious, transparent and fair Industrial Relations between employees and the Bank, in order to maintain the continuity of the Bank's operations. During 2023, having the proper industrial relations helped produce a conducive working atmosphere.

telah menghasilkan suasana kerja yang kondusif.

Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM ke Depan

Bank Aladin Syariah menilai program kerja tahun 2023 yang meliputi Leadership Training, Mandatory Training, Non Mandatory Training, Personal Development Training telah berjalan dengan baik. Sementara itu, dalam upaya untuk menyusun rencana program kerja tahun 2024 yang lebih berkualitas Bank Aladin Syariah mempertimbangkan kondisi pertumbuhan bisnis yang akan semakin menantang yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi perkembangan global dan nasional.

Adapun pada tahun 2024, Bank berencana melakukan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Insani sebagai berikut:

1. 77 karyawan akan diikutkan dalam program SKKNI perbankan
2. 53 karyawan akan diikutkan dalam program SKKNI selain perbankan
3. 343 karyawan akan diikutkan dalam program pengembangan kompetensi
4. 70 karyawan akan diikutkan dalam program Leadership Training.

Future HC Management and Development Program

Bank Aladin Syariah's view is that the 2023 work program that includes Leadership Training, Mandatory Training, Non Mandatory Training, and Personal Development Training has run well. However, in an effort to prepare a better quality work program plan for 2024, Bank Aladin Syariah is also taking into consideration the increasingly challenging business growth conditions brought on by global and national development conditions.

For 2024, the Bank plans to manage and develop Human Capital as follows:

1. 77 employees will be included in the banking SKKNI program
2. 53 employees will be included in the SKKNI non-banking program
3. 343 employees will be included in the competency development program
4. 70 employees will be included in the Leadership Training program.



Teknologi Informasi Information Technology

Diperkuat dengan basis teknologi yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir, Bank memasuki fase penting untuk melanjutkan pengembangan teknologi, dimana unsur pemenuhan kebutuhan Bank Aladin Syariah dan nasabah semakin dominan. Modal yang sangat penting untuk mendukung rencana bisnis bank adalah ketersediaan infrastruktur hybrid dan core banking dengan fungsionalitas API First.

Pada tahun 2023, Bank Aladin Syariah berhasil meraih sertifikasi ISO 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi (ISMS) yang dikeluarkan oleh CBQA Global selaku badan sertifikasi. ISMS merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dengan organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi dan untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaan (availability) informasi.

Sertifikasi ISO 27001 yang diterima oleh Bank Aladin Syariah merupakan komitmen Bank untuk terus meningkatkan keamanan informasi sesuai dengan standar yang ada. Harapannya, capaian yang ada saat ini bisa ditingkatkan dengan lingkup yang lebih luas lagi. Terlebih lagi, Bank Aladin Syariah adalah bank yang berbasis digital maka keamanan informasi bagi nasabah merupakan poin yang sangat penting. Selain itu, perhatian utama Bank Aladin Syariah adalah nasabah dapat bertransaksi melalui aplikasi Bank secara aman dan nyaman.

Bank terus memperkuat tata kelola seraya melanjutkan penguatan terhadap sumber daya manusia dan struktur organisasi untuk mendukung visi dan misi TI Bank Aladin Syariah, untuk meningkatkan kinerja Bank.

Strengthened by the technological base built in recent years, the Bank is entering an important phase of continuing technological development, where the element of meeting the needs of Bank Aladin Syariah and customers is increasingly dominant. A very important asset to support the Bank's business plan is the availability of a hybrid and core banking infrastructure with API First functionality.

In 2023, Bank Aladin Syariah achieved ISO 27001 certification for its information security management systems (ISMS) from the CBQA Global certification body. ISMS is a set of interrelated elements within an organization or company that are used to manage and control information security risks, and to protect and maintain the confidentiality, integrity and availability of information.

The ISO 27001 certification received by Bank Aladin Syariah reflects the Bank's commitment to continue improving information security in line with existing standards. The hope is that the current achievements can be further improved to cover a wider scope. Moreover, Bank Aladin Syariah is a digital-based bank, so information security for customers is a very important factor. Also, Bank Aladin Syariah's main concern is that customers can make transactions via the Bank applications safely and comfortably.

The Bank continues to strengthen its governance while continuing to strengthen its HC and organizational structure to support Bank Aladin Syariah's IT vision and mission, and to improve the Bank's performance.

Visi dan Misi TI Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah IT Vision and Mission

VISI | VISION

Menjadi mitra bagi seluruh stakeholder dengan mengedepankan teknologi tepat guna dan layanan berkelas dunia
To become a partner for all stakeholders by prioritizing appropriate technology and world-class services

MISI | MISSION

1. Mendorong secara aktif budaya internal dalam inovasi teknologi
 2. Menjadi pendorong terdepan dalam meningkatkan daya saing produk dan daya saing Bank secara umum dengan penerapan teknologi tepat guna
 3. Partisipasi aktif dalam meningkatkan literasi perbankan serta adopsi teknologi digital dalam perbankan Syariah
1. Actively encourage an internal culture of technological innovation
 2. Be a leading driver in increasing product competitiveness and the Bank's overall competitiveness by implementing appropriate technology
 3. Active participation in increasing banking literacy and adopting digital technology in Sharia banking

Pengelola Sistem Teknologi Informasi

Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Bank Aladin Syariah dijalankan oleh Chief Technology Officer yang berada di bawah supervisi langsung dari Presiden Direktur, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SRT.011.HCD/08.2021 tanggal 2 Agustus 2021. Chief Technology Officer menyusun rencana strategis hingga tersedianya solusi TI yang selaras dengan kebutuhan di sisi bisnis. Tren teknologi dan prinsip GCG juga diperhatikan dalam membuat rencana solusi TI.

Adapun tugas dan tanggung jawab Chief Technology Officer dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan TI Bank, adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama;
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (project charter);
5. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank;
6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.

Sebagai Bank dengan layanan perbankan digital, teknologi informasi memainkan peranan yang sangat penting dalam seluruh aktivitas perusahaan. Menyadari akan hal ini, Bank berkomitmen untuk turut serta dalam perkembangan ini dengan terus menambah besaran belanja modal untuk pengembangan teknologi informasi dan memperkuat Departemen teknologi Informasi Sampai dengan 31 Desember 2022, Bank Aladin Syariah memiliki jumlah pegawai Departemen Teknologi Informasi sebanyak 86 pegawai.

Program Strategis Tahun 2023

Melanjutkan rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, program strategis tahun 2023 adalah sebagai:

1. Pengembangan Digital Banking
 - b. Pengembangan transaksi digital pada platform Mobile Banking dengan memperkenalkan fitur-fitur baru seperti pembayaran digital dan integrasi dengan sistem pembayaran pihak ketiga
 - c. Penyediaan layanan API Terbuka (Open Banking) untuk mitra eksternal, memungkinkan integrasi dengan aplikasi dan layanan pihak ketiga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan

Information Technology System Management

Bank Aladin Syariah's Information Technology System management is carried out by the Chief Technology Officer under the direct supervision of the President Director, in accordance with Directors' Decree No. SRT.011.HCD/08.2021 dated August 2, 2021. The Chief Technology Officer prepares strategic plans for IT solutions that are in line with business needs. Technology trends and GCG principles are also considered when preparing IT solution plans.

The Chief Technology Officer's duties and responsibilities for managing and developing the Bank's IT are as follows:

1. Preparing an Information Technology Strategic Plan in line with the Bank's strategic plan for business activities;
2. Formulating key Information Technology policies, standards and procedures;
3. Ensuring conformity between approved Information Technology projects and the Information Technology Strategic Plan;
4. Ensuring conformity between the implementation of Information Technology projects and the agreed project plan (project charter);
5. 5. Ensuring conformity between Information Technology and the needs of management information systems and the needs of the Bank's business activities;
6. Taking effective steps to minimize risks in Bank investments in the Information Technology sector so that they contribute to achieving the Bank's business objectives;
7. Monitoring Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance.

As a bank that uses digital banking services, information technology plays a very important role in all Company activities. To realize this, the Bank is committed to participating in its development by continuing to increase the amount of capital expenditure for information technology development, and for strengthening the Information Technology Department. As of December 31, 2022, Bank Aladin Syariah's Information Technology Department had a total of 86 employees.

Strategic Program for 2023

Continuing the strategic plan previously established, the 2023 strategic program includes the following:

1. Digital Banking Development
 - b. Developing digital transactions using the Mobile Banking platform by introducing new features such as digital payments and integration with third party payment systems
 - c. Providing Open Banking API services for external partners, enabling integration with third-party applications and services to increase added value for customers



- d. Penggunaan platform customer engagement untuk meningkatkan keterlibatan, retensi, dan konversi pelanggan, serta untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan menyeluruh kepada pelanggan
 2. Penguatan Keamanan Informasi
 - c. Penguatan Keamanan jaringan untuk meningkatkan perlindungan terhadap ancaman siber dengan mengimplementasikan firewall canggih, deteksi intrusi, dan sistem proteksi jaringan lainnya.
 - d. Peningkatan Keamanan Digital dengan penerapan metode otentikasi yang lebih kuat, deteksi kecurangan yang lebih canggih, dan perlindungan data yang lebih ketat untuk melindungi informasi sensitif pelanggan
 - e. Penyusunan Kebijakan Keamanan dengan merevisi dan memperkuat kebijakan keamanan informasi perusahaan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan yang berlaku.
 3. Penguatan Infrastruktur dan Arsitektur TI
 - d. Pemindahan pusat data dan pusat pemulihan bencana untuk meningkatkan skalabilitas, ketersediaan dan efisiensi
 - e. Peningkatan Kapasitas Jaringan dengan meningkatkan kapasitas dan kinerja jaringan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mengakomodasi permintaan data yang meningkat
 - f. Pengembangan Sistem Big Data dengan menerapkan infrastruktur dan teknologi big data untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara efisien guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik
- d. Using customer engagement platforms to increase customer engagement, retention and conversion, as well as to provide a more personalized and holistic experience for customers
 2. Strengthening Information Security
 - c. Strengthening network security to increase cyber threat protection by implementing advanced firewalls, intrusion detection, and other network protection systems.
 - d. Enhancing Digital Security by implementing stronger authentication methods, more advanced fraud detection, and stricter data protection to protect sensitive customer information
 - e. Preparing a Security Policy by revising and strengthening the Company's information security policies, to ensure compliance with applicable security regulations and standards.
 3. Strengthening IT Infrastructure and Architecture
 - d. Relocating data centers and disaster recovery centers to improve scalability, availability and efficiency
 - e. Increasing Network Capacity by increasing network capacity and performance to support business growth, and to accommodate increasing data demands
 - f. Developing Big Data Systems by applying big data infrastructure and technology to collect, store and analyze data efficiently to support better decision making

Strategi dan Kebijakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi

Sebagai bank yang menawarkan layanan perbankan digital, teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam segala aktivitas bisnis Bank Aladin Syariah. Mulai dari mendukung pengembangan produk bisnis digital, layanan kepuasan pelanggan, aktivitas operasional sehari-hari hingga aktivitas pendukung internal lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan nasabah. Selain itu, tren yang berkembang menuju perbankan digital dan teknologi keuangan lainnya telah menyebabkan banyak gangguan pada teknologi, proses, dan sumber daya manusia. Menyadari hal tersebut, Bank Aladin Syariah berupaya untuk berpartisipasi dalam perkembangan tersebut dengan terus meningkatkan tingkat investasi dalam pengembangan teknologi informasi melalui penyertaan teknologi dan metode baru yang dapat meningkatkan daya saing Bank secara keseluruhan.

Pada tahun 2023, selain melanjutkan transformasi teknologi dan infrastruktur dasar yang mampu menunjang percepatan pengembangan produk dan layanan digital, IT terus melakukan pengembangan berkelanjutan antara lain melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Information Technology Management and Development Strategy and Policy

As a bank that uses digital banking services, information technology plays a very important role in all Bank Aladin Syariah business activities, including supporting digital business product development, customer satisfaction services, daily operational activities to other internal support activities directly or indirectly related to customers. Additionally, the growing trend towards digital banking and other financial technologies has caused numerous disruptions to technology, processes and human capital. Realizing this, Bank Aladin Syariah participates in these developments by continuing to increase its level of investment in information technology development that includes new technology and methods that can increase the Bank's overall competitiveness.

In 2023, as well as continuing its technology and basic infrastructure transformation to support the accelerated development of digital products and services, IT will continue to carry out sustainable development through the following policies and strategies:

1. Kebijakan Teknologi Informasi
2. Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan
3. Standar Prosedur Pengembangan dan Pengadaan IT
4. Standar Prosedur Operasional Teknologi Informasi
5. Standar Prosedur IT Change Management
6. Standar Prosedur Penanganan Insiden Teknologi Informasi
7. Standar Prosedur Penanganan Insiden Siber
8. Standar Prosedur Backup dan Restore
9. Standar Prosedur Pengujian Keamanan Siber

Pada tahun 2023, Bank Aladin Syariah meraih Sertifikat ISO 27001. Sertifikasi ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Aladin Syariah untuk merealisasikan regulasi Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Bank Aladin Syariah memastikan setiap proses yang dilaksanakan dalam pengembangan dan implementasi ISO 27001 memberikan dampak signifikan terhadap bisnis bank, nasabah, dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, ISO 27001 ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis Bank Aladin Syariah untuk meningkatkan kepercayaan dan ekspansi bisnis berkaitan dengan produk layanan perbankan digital dengan prinsip syariah.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Bank Aladin Syariah melaksanakan manajemen risiko secara efektif dan bertahap sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggara Teknologi Informasi oleh Bank Umum, serta Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum, serta Standar ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System (Sistem Manajemen Keamanan Informasi). Bank senantiasa melakukan beberapa langkah dalam menerapkan manajemen risiko tersebut:

1. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi atas pengembangan TI;
2. Mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan, standar, dan prosedur TI;
3. Mengembangkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan TI;
4. Melakukan sistem pengendalian intern atas penggunaan TI;
5. Membangun dan mengembangkan perangkat pendukung manajemen risiko;
6. Melakukan evaluasi profil risiko teknologi informasi secara berkala; dan
7. Perancangan dan penerapan Program IT Risk and Security Awareness yang menjadi semakin penting sejalan dengan rencana bisnis.

Bank Aladin Syariah membentuk Departemen Infosec & GRC sebagai komitmennya dalam melaksanakan Tata Kelola TI dan sistem pengawasan lainnya. Bank menyadari pentingnya kerahasiaan dan pengamanan informasi, maka dari itu Bank Aladin Syariah menetapkan beberapa program strategis. Salah satunya adalah menentukan penguatan keamanan informasi yang dijalankan seiring dengan program-program strategis lainnya.

1. Information Technology Policy
2. Security Management System Policy
3. IT Development and Procurement Standard Procedures
4. Information Technology Operational Standard Procedures
5. IT Change Management Standard Procedures
6. Handling Information Technology Incidents Standard Procedures
7. Handling Cyber Incidents Standard Procedures
8. Backup and Restore Standard Procedures
9. Cyber Security Testing Standard Procedures

In 2023, Bank Aladin Syariah received the ISO 27001 Certificate. This certification is a concrete manifestation of Bank Aladin Syariah's commitment to realizing Bank Indonesia regulation No. 23/6/PBI/2021 concerning Payment Service Providers. Bank Aladin Syariah ensures that every process carried out in the development and implementation of ISO 27001 will have a significant impact on the Bank's business, customers and stakeholders. Thus, ISO 27001 is expected to be one of Bank Aladin Syariah's strategic steps to increase trust and business expansion related to digital banking service products with sharia principles.

Information Technology Governance

Bank Aladin Syariah's risk management is carried out effectively and in stages in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2022 concerning Information Technology Providers by Commercial Banks, and OJK Circular Letter (SEOJK) No. 21/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Risk Management when Using Information Technology by Commercial Banks, Financial Services Authority Circular Letter No. 29/SEOJK.03/2022 concerning Cyber Resilience and Security for Commercial Banks, as well as the ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System Standards. The Bank has instigated the following steps when implementing risk management:

1. Actively supervised IT development by the Board of Commissioners and Board of Directors;
2. Developed and improved IT policies, standards and procedures;
3. Developed processes for identifying, measuring, monitoring and controlling IT use risks;
4. Implemented an internal control system for IT use;
5. Built and developed risk management supporting tools;
6. Regularly evaluated information technology risk profiles; and
7. Designed and instigated the IT Risk and Security Awareness Program, which is becoming increasingly important in line with the business plan.

Bank Aladin Syariah established the Infosec & GRC Department as a commitment to IT Governance and other supervisory systems implementation. The Bank is aware of the importance of confidentiality and security of information, therefore it has established several strategic programs. One of which is strengthening of information security to be carried out in line with other strategic programs.



Dalam meyakinkan pengembangan TI berjalan sesuai dengan rencana strategis, kebijakan, standar, dan prosedur yang telah ditentukan, Bank menyelenggarakan pertemuan IT Steering Committee (ITSC) sebagai bagian dari Komite Eksekutif secara rutin.

To ensure that IT development runs in accordance with pre-determined strategic plans, policies, standards and procedures, the Bank regularly holds IT Steering Committee (ITSC) meetings as part of the Executive Committee.

Investasi Teknologi Informasi

Setiap tahunnya Bank Aladin Syariah senantiasa melakukan investasi di bidang TI dalam rangka peningkatan dan pengembangan sistem teknologi informasi. Bank Aladin Syariah menyadari bahwa pengoptimalan penggunaan TI dapat mengakselerasi percepatan dan pertumbuhan kinerja Bank. Maka dari itu, Bank menyediakan anggaran khusus yang diperuntukkan bagi pengelolaan dan pengembangan TI. Pada tahun 2023, Bank Aladin Syariah telah mengalokasikan dana sebesar Rp99.5 Miliar untuk investasi dan biaya di bidang TI.

Information Technology Investment

Each year Bank Aladin Syariah invests in the IT sector to improve and develop the information technology systems. Bank Aladin Syariah understands that optimizing the use of IT can accelerate and increase the Bank's performance. Therefore, the Bank provides a special budget for IT management and development. In 2023, Bank Aladin Syariah budgeted Rp99.5 billion for investments and costs in the IT sector.

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi ke Depan

Sejalan dengan meningkatnya peranan teknologi informasi bagi Bank Aladin Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, hal ini membuat Teknologi Informasi tidak hanya berperan sebagai alat pendukung melainkan dapat menjadi elemen utama atau pendorong bagi Bank untuk mencapai tujuan bisnis. Untuk itu, Bank Aladin Syariah telah menyusun rencana pengembangan Teknologi Informasi untuk tahun 2024.

Future Information Technology Development Plans

In line with the increasing role of information technology in Bank Aladin Syariah's operational activities, Information Technology now not only act as a supporting tool but also as the main element or driving force for the Bank to achieve its business goals. Therefore, Bank Aladin Syariah has prepared an Information Technology development plan for 2024.

Rencana pengembangan Teknologi Informasi menyelaraskan dengan rencana bisnis bank dengan mengedepankan inovasi dan digitalisasi. adalah sebagai berikut:

1. Inovasi dalam pembayaran digital dengan berbagai platform pembayaran digital baru maupun integrasi dengan pihak ketiga lainnya.
2. Pengembangan ekosistem fintech dengan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan fintech untuk menyediakan layanan tambahan seperti pinjaman online atau manajemen keuangan pribadi yang lebih komprehensif.
3. Peningkatan analisis data untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku dan preferensi pelanggan, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih disesuaikan dan memuaskan.
4. Melanjutkan penguatan infrastruktur TI dengan mengedepankan prinsip high availability, scalability dan resiliency.
5. Melanjutkan penguatan pengamanan informasi serta resilience terhadap potensi cyber-attack.

The Information Technology development plan will align with the Bank's business plan by prioritizing the following innovation and digitalization:

1. Innovating digital payments with new digital payment platforms and integrating with other third parties.
2. Developing a fintech ecosystem by collaborating with fintech companies to provide additional services such as online loans or more comprehensive personal financial management.
3. Improving data analysis to gain deeper insight into customer behavior and preferences, so as to provide more customized and satisfying services.
4. Continuing to strengthen IT infrastructure by prioritizing the principles of high availability, scalability and resiliency.
5. Continuing to strengthen information security and resilience against potential cyber-attacks.

Aladin



TOP UP E-WALLET
LEBIH MUDAH
PAKAI **ALADIN**





Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Bank Aladin Syariah terus menunjukkan konsistensinya dalam mewujudkan komitmen menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik di lingkup Bank menjadi landasan dan kebutuhan Bank Aladin Syariah dalam rangka menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Bank Aladin Syariah continued to demonstrate its consistent commitment to implementing Good Governance. Good Governance Corporate Implementation in the Bank is the foundation and necessity of Bank Aladin Syariah to create sustainable added value.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementation of Good Corporate Governance



Keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan dan peningkatan laba saja. Dalam hal ini, implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan. GCG merupakan prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, GCG juga menjadi indikator penting bagi para investor untuk menilai sebuah entitas di masa depan. Selain itu, penerapan GCG dalam industri perbankan menjadi landasan dan kebutuhan perusahaan dalam rangka menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, mendukung perusahaan untuk menghadapi dinamika industri perbankan, dan membentuk pondasi iklim investasi serta bisnis ekonomi syariah yang sehat pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Sejalan dengan hal tersebut, Bank Aladin Syariah senantiasa memperkuat dan meningkatkan penerapan GCG di seluruh aspek kegiatan usahanya.

Business sustainability is not only determined by financial performance and increasing profits. In this case, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is an important factor for the company. GCG is the principle that underlies company management processes and mechanisms by referring to statutory regulations. In this regard, GCG is also an important indicator for investors to assess an entity in the future. Apart from that, the implementation of GCG in Banking industry is the foundation and need for companies in order to create sustainable added value, support companies to face the dynamics of Banking industry, and form the foundation of a healthy investment climate and sharia economic business based on the concept of sustainable development. In line with this, Bank Aladin Syariah continues to strengthen and improve the implementation of GCG in all aspects of its business activities.



Landasan Dasar Penerapan Good Corporate Governance di Lingkup Bank Aladin Syariah

Landasan hukum penerapan GCG di Bank Aladin Syariah mengacu pada aturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
7. Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Sistem Pembayaran;
8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

Basic Foundations for Implementing Corporate Governance in Bank Aladin Syariah

The Legal Basis for implementing GCG at Bank Aladin Syariah refers to the following laws and regulations:

1. Law of the Republic of Indonesia no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector;
2. Law of the Republic of Indonesia no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering;
3. Law of the Republic of Indonesia no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation as stipulated into law based on Law no. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming Law;
4. Law of the Republic of Indonesia no. 24 of 2004 as amended by Law no. 7 of 2009 concerning Deposit Insurance Corporation;
5. Law of the Republic of Indonesia no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection;
6. Bank Indonesia Regulation no. 23/6/PBI/2021 dated July 1, 2021 concerning Payment Service Providers;
7. Bank Indonesia Regulation no. 22/23/PBI/2020 dated December 29, 2020 concerning Payment Systems;
8. Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
9. Financial Services Authority Regulation no. 22 of 2023 dated 22 December 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector;
10. Financial Services Authority Regulation no. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks;
11. Financial Services Authority Regulation no. 16/POJK.03/2022 dated 30 August 2022 concerning Sharia Commercial Banks;
12. Financial Services Authority Regulation no. 11/POJK.03/2022 dated 6 July 2022 concerning the Implementation of Information Technology by Commercial Banks;
13. Financial Services Authority Regulation no. 26/POJK.03/2021 dated 17 December 2021 concerning Maximum Limits for Fund Distribution and Large Fund Distribution for Sharia Commercial Banks;
14. Financial Services Authority Regulation no. 3/POJK.04/2021 dated 22 February 2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector;
15. Financial Services Authority Regulation no. 17/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities;
16. Financial Services Authority Regulation no. 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies;
17. Financial Services Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies;

18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik;
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2023 tanggal 1 Januari 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
18. Financial Services Authority Regulation no. 37/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports;
19. Financial Services Authority Regulation no. 1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks;
20. Financial Services Authority Regulation no. 34/POJK.03/2018 dated 27 December 2018 as amended by Financial Services Authority Regulation no. 14/POJK.03/2021 dated 30 July 2021 concerning Reassessment for Main Parties of Financial Services Institutions;
21. Financial Services Authority Regulation no. 59/POJK.03/2017 dated 18 December 2017 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
22. Financial Services Authority Regulation no. 51/POJK.03/2017 dated 18 July 2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies;
23. Financial Services Authority Regulation no. 46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 concerning Implementation of Commercial Bank Compliance Functions;
24. Financial Services Authority Regulation no. 65/POJK.03/2016 dated 23 December 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
25. Financial Services Authority Regulation no. 29/POJK.04/2016 dated 29 July 2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies;
26. Financial Services Authority Regulation no. 27/POJK.03/2016 dated 22 July 2016 concerning Capability and Conformity Assessment for Main Parties of Financial Services Institutions;
27. Financial Services Authority Regulation no. 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies;
28. Financial Services Authority Regulation no. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines;
29. Financial Services Authority Regulation no. 8/POJK.04/2015 dated 25 June 2015 concerning Issuer or Public Company Websites;
30. Financial Services Authority Regulation no. 8/POJK.03/2014 dated 11 June 2014 concerning Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
31. Financial Services Authority Circular No. 25/SEOJK.03/2023 dated 1 January 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
32. Financial Services Authority Circular No. 16/SEOJK.04/2021 dated 29 June 2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies;
33. Financial Services Authority Circular No. 10/SEOJK.03/2020 dated July 1, 2020 concerning Transparency and Publication of Reports of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
34. Financial Services Authority Circular No. 21/SEOJK.03/2017 dated 6 June 2017 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks;



35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
38. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
39. Anggaran Dasar PT Bank Aladin Syariah Tbk berikut perubahannya;
40. Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah – Komite Nasional Kebijakan Governance;
41. Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan – Komite Nasional Kebijakan Governance;
42. Kebijakan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan *Code of Ethics and Conduct* yang berlaku di PT Bank Aladin Syariah Tbk.
35. Financial Services Authority Circular No. 39/SEOJK.03/2016 dated 13 September 2016 concerning Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of the Board of Directors, and Prospective Members of the Board of Commissioners of Banks;
36. Financial Services Authority Circular No. 32/ SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 concerning Public Company Governance Guidelines;
37. Financial Services Authority Circular No. 10/SEOJK.03/2014 dated 11 June 2014 concerning Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
38. Fatwa of the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council;
39. Articles of Association of PT Bank Aladin Syariah Tbk including amendments;
40. General Guidelines for Sharia Business Good Governance – National Committee for Governance Policy;
41. Guidelines for Good Corporate Governance in Banking – National Committee for Governance Policy;
42. Good Corporate Governance Policy and Code of Ethics and Conduct that apply at PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* Bank Aladin Syariah

Implementasi prinsip-prinsip GCG diterapkan Bank Aladin Syariah secara konsisten dan berkelanjutan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Bank (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan agar Bank dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.
3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
4. Mengelola risiko secara lebih baik.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank.
7. Memperbaiki budaya kerja Bank.
8. Meningkatkan citra atau *image* Bank menjadi semakin baik.

Objectives of Implementing Corporate Governance at Bank Aladin Syariah

Bank Aladin Syariah implements GCG principles consistently and sustainably with the following objectives:

1. Control and direct relationships between Bank Organs (Shareholders, Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board), employees, customers, work partners, as well as the community and environment so that Bank is run well in accordance with GCG principles.
2. Encourage and support the development of Bank.
3. Manage resources more reliably.
4. Manage risks better.
5. Increase accountability to stakeholders.
6. Prevent irregularities in Bank management.
7. Improving Bank's work culture.
8. Improve the image of Bank for the better.

Governance Framework

Sebagai bentuk komitmen Bank dalam menerapkan prinsip GCG, Bank Aladin Syariah telah menetapkan kerangka kerja tata kelola (*governance framework*) yang terdiri dari 4 pilar, yaitu:

1. *Governance Commitment* yakni wujud komitmen dari seluruh elemen Bank untuk menerapkan dan menegakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank Aladin Syariah Syariah secara konsisten dan berkelanjutan.
2. *Governance Structure* yakni organ internal dan pihak regulator Bank Aladin Syariah yang berwenang menjalankan mandat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Bank, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
3. *Governance Process* yakni serangkaian *soft structure* yang digunakan untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank Aladin Syariah, telah diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.
4. *Governance Outcome* yakni manifestasi dari penerapan dan penegakan GCG Bank Aladin Syariah yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai (*Value Creation*) dan keberlangsungan bisnis (*Sustainability*). Dalam penerapan GCG di lingkungan Bank, Bank Aladin Syariah berpedoman pada *soft structure*, yaitu struktur manajemen dan dokumen-dokumen yang mengatur hal yang bersifat strategis, teknis, dan terperinci berupa kebijakan serta prosedur.

Sementara itu, Bank Aladin Syariah juga telah menyusun *Governance Mechanism* yang merupakan mekanisme implementasi GCG yang dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis dengan diperkuat oleh *Governance Soft-Structure*, sebagai bentuk komitmen Bank Aladin Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Governance Commitment

Sebagai upaya mewujudkan keberhasilan usaha secara etis, legal, berkelanjutan, dan memberikan keuntungan optimal bagi pemangku kepentingan, Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip GCG secara konsisten. Adapun upaya yang dilakukan Bank untuk mempertahankan dan meningkatkan penerapan GCG secara berkelanjutan adalah dengan membentuk komite, sistem, dan unit kerja.

Penerapan GCG di lingkup Bank Aladin Syariah berlandaskan pada lima prinsip, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Profesional, dan Kesetaraan/Kewajaran. Dalam hal ini, Bank Aladin Syariah mengawasi penerapan prinsip tersebut dengan proses internalisasi di lingkungan Bank. Proses tersebut bertujuan untuk menanamkan kesepahaman terkait penerapan GCG di setiap unit organisasi. Dengan demikian, penerapan prinsip GCG diharapkan dapat berjalan di setiap aspek secara konsisten.

As a form of Bank's commitment to implementing GCG principles, Bank Aladin Syariah has established a governance framework consisting of 4 pillars, namely:

1. Governance Commitment is a form of commitment from all elements of Bank to implement and uphold Good Corporate Governance at Bank Aladin Syariah consistently and sustainably.
2. Governance Structure, namely the internal organs and regulators of Bank Aladin Syariah which have the authority to carry out the mandate of carrying out their duties and supervisory functions over Bank, namely the GMS, Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board.
3. Governance Process, namely a series of soft structures used to ensure the implementation and enforcement of Good Corporate Governance at Bank Aladin Syariah, has been implemented consistently and sustainably.
4. Governance Outcome, namely the manifestation of the implementation and enforcement of Bank Aladin Syariah's GCG which has a positive impact on value creation (Value Creation) and business continuity (Sustainability). In implementing GCG within Bank, Bank Aladin Syariah is guided by soft structure, namely the management structure and documents that regulate strategic, technical and detailed matters in the form of policies and procedures.

Meanwhile, Bank Aladin Syariah has also developed a Governance Mechanism which is a mechanism for implementing GCG which is carried out in a structured and systematic manner and is strengthened by Governance Soft-Structure, as a form of Bank Aladin Syariah's commitment to implementing GCG principles in accordance with applicable rules.

Governance Commitment

In an effort to realize business success ethically, legally, sustainably, and provide optimal benefits for stakeholders, Bank Aladin Syariah is committed to implementing GCG principles consistently. The efforts made by Bank to maintain and improve the implementation of GCG in a sustainable manner are by establishing committees, systems and work units.

The implementation of GCG within Bank Aladin Syariah is based on five principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Professionalism, and Equality/Fairness. In this case, Bank Aladin Syariah began implementing these principles with an internalization process within Bank. This process aims to instill an understanding regarding the implementation of GCG in each organizational unit. Thus, it is hoped that the application of GCG principles can run consistently in every aspect.



Governance Structure

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas), organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Akan tetapi, sebagai perusahaan yang berprinsip syariah, Bank Aladin Syariah menegaskan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ utama dalam struktur tata kelola perusahaan.

Secara rinci, Bank Aladin Syariah didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan. Adapun jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS Bank telah memadai dan sesuai dengan ketentuan. Kemudian dalam hal pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, proses tersebut telah melalui tahapan *assessment* oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mengedepankan faktor integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Dengan demikian, Bank ditunjang dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kompetensi memadai dan sesuai dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, seluruh anggota Direksi dan Komisaris Independen juga telah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh Bank Indonesia dan/OJK.

Selanjutnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan melengkapi keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di mana hal tersebut sehingga sesuai dengan regulasi dan kebutuhan Bank Aladin Syariah. Sementara itu, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi juga telah membentuk 5 (lima) komite yaitu Komite Aset dan Liabilitas, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Pembiayaan dan Komite Keberlanjutan. Kelima Komite tersebut diharapkan dapat mengambil keputusan secara efektif dan tepat dalam menghadapi dinamika dan tantangan bisnis Bank Aladin Syariah.

Direksi juga telah melengkapi organisasi dengan Satuan Kerja Audit, Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang independen dari satuan kerja operasional. Satuan kerja yang merupakan *2nd & 3rd line of defense* ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional Bank Aladin Syariah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan GCG. Infrastruktur tata kelola Bank Aladin Syariah, yang mencakup Kebijakan dan Prosedur Bank, Tugas Pokok dan Fungsi didefinisikan dengan baik untuk setiap struktur organisasi, telah diperkuat untuk memastikan dukungan yang memadai terhadap kegiatan bisnis Bank.

Governance Process

Bank Aladin Syariah secara konsisten melaksanakan prosedur dan mekanisme yang terstruktur serta sistematis. Di mana hal tersebut sejalan dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan prinsip kehati-hatian. Proses penunjukan dan/atau pergantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan

Governance Structure

In accordance with the Law of the Republic of Indonesia no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Limited Company Law), company organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Directors. However, as a company that adheres to sharia principles, Bank Aladin Syariah emphasizes the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) as the main organ in the corporate governance structure.

In detail, Bank Aladin Syariah is supported by an organizational structure consisting of a Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board (DPS), Internal Audit Work Unit, Risk Management Work Unit, and Compliance Work Unit. The number and composition of members of Bank's Board of Commissioners, Directors and DPS are adequate and in accordance with regulations. Then, in terms of appointing members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board, the process has gone through an assessment stage by the Nomination and Remuneration Committee by prioritizing the factors of integrity, competence and financial reputation. Thus, Bank is supported by members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board who have adequate competence and are in accordance with their positions to carry out their duties and responsibilities. Apart from that, all members of the Board of Directors and Independent Commissioners have also been declared to have passed the Capability and Proper Test (PKK) by Bank Indonesia and/OJK.

Furthermore, the Board of Commissioners has formed and completed the membership of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee to carry out their duties and responsibilities. Where this is in accordance with the regulations and needs of Bank Aladin Syariah. Meanwhile, to support the effective implementation of its duties and responsibilities, the Board of Directors has also formed 5 (five) committees, namely the Assets and Liabilities Committee, Information Technology Steering Committee, Risk Management Committee, Human Resources Committee, Financing Committee and Sustainability Committee. The five committees are expected to be able to make effective and appropriate decisions in facing the dynamics and business challenges of Bank Aladin Syariah.

The Board of Directors has also equipped the organization with an Audit, Risk Management and Compliance Work Unit that is independent from the operational work unit. The work unit which is the 2nd & 3rd line of defense is intended to support Bank Aladin Syariah's operational activities by prioritizing the principles of prudence and GCG. Bank Aladin Syariah's governance infrastructure, which includes Bank Policies and Procedures, Main Duties and Functions well defined for each organizational structure, has been strengthened to ensure adequate support for Bank's business activities.

Governance Process

Bank Aladin Syariah consistently implements structured and systematic procedures and mechanisms. This is in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and the principle of prudence. The process of appointing and/or replacing members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board (DPS) is

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam hal ini, yang diperhitungkan adalah faktor integritas, kompetensi, serta reputasi keuangan. Seluruh organ di Bank Aladin Syariah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dengan benar. Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi secara teratur berkomunikasi dalam rapat koordinasi untuk berbagi informasi, melakukan diskusi, dan membuat keputusan yang diperlukan guna menjaga kelancaran operasional Bank.

Pada tingkat Dewan Komisaris, guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disusun dengan cermat, mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi Bank Aladin Syariah. Dewan Komisaris juga melakukan pemantauan terhadap pencapaian RBB yang telah ditetapkan. Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga membentuk komite-komite yang dirancang untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Di mana rekomendasi yang diajukan oleh komite-komite ini telah menjadi dasar bagi Dewan Komisaris dalam mengevaluasi proses perbaikan yang diperlukan oleh Bank Aladin Syariah.

Sementara itu, fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dijalankan melalui penyelenggaraan rapat bulanan dengan tujuan untuk memastikan antara lain usulan produk, jasa, dan program sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh 1 (satu) orang *Liaison Officer* yang berada di bawah supervisi Satuan Kerja Kepatuhan. Hasil pengawasan dari DPS telah dilaporkan secara semesteran kepada OJK, DSN-MUI dan Direksi.

Adapun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tanpa intervensi dari pemegang saham bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian, GCG, dan prinsip syariah. RBB yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris kemudian dijadikan sebagai pedoman dan fokus bagi Direksi untuk dapat dijalankan dengan baik.

Sementara itu, para karyawan Bank Aladin Syariah senantiasa diberikan kesempatan untuk menerima pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank Aladin Syariah dan masing-masing karyawan. Adapun pelatihan-pelatihan rutin juga dijadwalkan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan, dengan tujuan untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Bank Aladin Syariah juga secara rutin melakukan penilaian dan pembaruan terhadap peraturan internal sebagai langkah untuk menjaga keefektifan, kelengkapan, dan kesesuaian peraturan internal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah.

carried out in accordance with applicable regulations and considering recommendations from the Nomination and Remuneration Committee. In this case, what is considered are the factors of integrity, competence and financial reputation. All organs at Bank Aladin Syariah carry out their duties and responsibilities in accordance with their functions properly. The Board of Commissioners, DPS and Directors regularly communicate in coordination meetings to share information, hold discussions and make decisions necessary to maintain the smooth running of Bank's operations.

At the Board of Commissioners level, in order to support the implementation of its supervisory duties and provide advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners has approved Bank Business Plan (RBB) which has been carefully prepared, considering external and internal factors that influence Bank Aladin Syariah. The Board of Commissioners also monitors the achievement of the RBB that has been determined. In order to strengthen its supervisory function, the Board of Commissioners has also formed committees designed to provide support in carrying out these duties. Where the recommendations submitted by these committees have become the basis for the Board of Commissioners in evaluating the improvement processes required by Bank Aladin Syariah.

Meanwhile, the function of the Sharia Supervisory Board (DPS) is carried out through holding monthly meetings with the aim of ensuring, among other things, that proposed products, services and programs comply with the principles set out in the DSN-MUI Fatwa. In carrying out its duties, the Sharia Supervisory Board is assisted by 1 (one) Liaison Officer who is under the supervision of the Compliance Work Unit. The results of supervision from DPS have been reported semi-annually to OJK, DSN-MUI and the Board of Directors.

As for carrying out their duties and responsibilities, the Board of Directors, without intervention from shareholders, is fully responsible for implementing the management of Bank in accordance with the principles of prudence, GCG and sharia principles. The RBB which has received approval from the Board of Commissioners is then used as a guide and focus for the Board of Directors so that it can be implemented well.

Meanwhile, Bank Aladin Syariah employees are always given the opportunity to receive training according to the needs of Bank Aladin Syariah and each employee. Routine training is also scheduled periodically to improve employee skills and knowledge, with the aim of providing better support to employees in carrying out their duties and responsibilities.

Bank Aladin Syariah also routinely assesses and Update internal regulations as a step to maintain the effectiveness, completeness and conformity of internal regulations with applicable laws and regulations and sharia principles.



Governance Outcome

Hasil penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan tercermin dalam pencapaian *Governance Outcome*, yang merupakan hasil konkret dari praktik GCG Bank Aladin Syariah terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang secara positif berkontribusi pada penciptaan nilai (*value creation*) dan kelangsungan bisnis (*sustainability*).

Bank Aladin Syariah senantiasa meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan *Governance Process* dan dukungan yang memadai dari *Governance Structure*, guna mencapai *outcome* yang berperan dalam pertumbuhan Bank. Selain itu, *Governance Outcome* yang didapatkan oleh Bank Aladin Syariah juga diperkuat dengan peraturan internal yang terus diperbarui dan disesuaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Governance Mechanism

Governance Mechanism dapat didefinisikan sebagai pedoman, kebijakan, prosedur, dan hubungan yang terdefinisi dengan baik antara para pengambil keputusan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab mengawasi keputusan tersebut.

Implementasi GCG dilakukan secara berkelanjutan sehingga prinsip-prinsip GCG menjadi pedoman dalam seluruh aspek kegiatan Bank Aladin Syariah. Implementasi GCG terwujud melalui kolaborasi antara seluruh lembaga dalam Bank Aladin Syariah, dengan struktur GCG Bank Aladin Syariah yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kedudukan tertinggi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Untuk meningkatkan efektivitas organ utama dalam struktur GCG Bank Aladin Syariah, maka pelaksanaannya didukung oleh Komite di tingkat Dewan Komisaris, dan Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan Internal Audit.

Berkaitan dengan tugasnya, komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Adapun komite-komite di tingkat Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko; dan
3. Komite Nominasi dan Remunerasi.

Selanjutnya, Direksi bersama jajaran manajemen Bank Aladin Syariah bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta bertanggung jawab terhadap implementasi GCG di Bank Aladin Syariah, dibantu oleh Komite di tingkat Direksi yang terdiri dari:

1. Komite Aset dan Liabilitas;
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi ;
3. Komite Manajemen Risiko;
4. Komite Pembiayaan; dan
5. Komite Keberlanjutan.

Governance Outcomes

The results of implementing Corporate Governance principles are reflected in the achievement of Governance Outcomes, which are concrete results of Bank Aladin Syariah's GCG practices towards stakeholders which positively contribute to value creation and business continuity.

Bank Aladin Syariah continues to improve and perfect the implementation of the Governance Process and adequate support from the Governance Structure, in order to achieve outcomes that play a role in Bank's growth. Apart from that, the Governance Outcome obtained by Bank Aladin Syariah is also strengthened by internal regulations which are continuously updated and adjusted in accordance with applicable statutory provisions.

Governance Mechanism

Governance Mechanism can be defined as well-defined guidelines, policies, procedures and relationships between decision makers and the parties responsible for overseeing those decisions.

GCG implementation is carried out continuously so that GCG principles become guidelines in all aspects of Bank Aladin Syariah's activities. GCG implementation is realized through collaboration between all institutions within Bank Aladin Syariah, with Bank Aladin Syariah's GCG structure consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS) which has the highest position, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors. To increase the effectiveness of the main organs in the GCG structure of Bank Aladin Syariah, its implementation is supported by Committees at the level of the Board of Commissioners, and Directors, Corporate Secretary and Internal Audit.

In connection with its duties, a committee at the Board of Commissioners level was formed to assist and improve the supervisory function carried out by the Board of Commissioners. The committees at Bank Board of Commissioners level are as follows:

1. Audit Committee;
2. Risk Monitoring Committee; And
3. Nomination and Remuneration Committee.

Furthermore, the Board of Directors together with the management of Bank Aladin Syariah are tasked with managing, controlling and being responsible for the implementation of GCG at Bank Aladin Syariah, assisted by a Committee at the Board of Directors level consisting of:

1. Assets and Liabilities Committee;
2. Information Technology Steering Committee;
3. Risk Management Committee;
4. Financing Committee; And
5. Sustainability Committee.

Dalam hal ini, Bank Aladin Syariah terus berusaha memelihara hubungan kerja yang harmonis antara berbagai organ di dalamnya, sehingga setiap organ dapat beroperasi dengan efektif dan efisien sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap organ dihimbau untuk menghormati dan mematuhi fungsi serta peranannya sesuai dengan ketentuan hukum dan Anggaran Dasar Bank Aladin Syariah.

Governance Soft-Structure

Bank Aladin Syariah memiliki kerangka Arsitektur Pedoman Internal yang menggambarkan struktur hirarki atau tata urutan yang terdiri dari:

1. Anggaran Dasar (AD)

Merupakan ketentuan pada urutan tertinggi dalam struktur Pedoman Internal Bank yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan Anggaran Dasar merupakan wewenang Pemegang Saham dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
2. Kebijakan/Level 1

Pedoman Internal yang bersifat *high level*, strategis, dan jangka panjang (tidak cepat berubah) yang menjadi landasan pokok dalam pelaksanaan kegiatan Bank. Kebijakan dikelompokkan menjadi kelompok kebijakan, sebagai berikut:

 - a. Kebijakan Bisnis, yaitu ketentuan bisnis secara tertulis yang bersifat strategis dan jangka panjang (tidak cepat berubah) yang menjadi landasan pokok pelaksanaan kegiatan bisnis bank baik di bidang pembiayaan, pendanaan, maupun kegiatan jasa.
 - b. Kebijakan Operasional, yaitu ketentuan pendukung kegiatan operasional Bank secara tertulis yang bersifat strategis dan jangka panjang (tidak cepat berubah) yang meliputi kebijakan bidang akuntansi, sumber daya manusia, sistem dan teknologi, serta kebijakan operasional lainnya.
 - c. Kebijakan Pengendalian, yaitu ketentuan pendukung kegiatan Bank secara tertulis yang bersifat strategis dan jangka panjang (tidak cepat berubah) yang menjadi landasan pokok seluruh kegiatan bank dengan tujuan:
 - i) mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan, serta
 - ii) mendorong efisiensi operasi organisasi untuk mencapai tujuan Bank.
3. Standar Prosedur dan Standar/Level 2

Pedoman Internal yang mengatur mekanisme proses atas suatu produk dan/atau aktivitas Bank. Standar Prosedur dan Standar yang merupakan penjabaran dari Kebijakan di atasnya.
4. Petunjuk Teknis/Level 3

Pedoman Internal yang berisikan tahapan proses atau teknis pelaksanaan dari suatu produk/prosedur tertentu atau mengatur prosedur kerja internal unit kerja. Dalam ketentuan ini Petunjuk Teknis merupakan penjabaran lebih lanjut dari Standar Prosedur.

In this case, Bank Aladin Syariah continues to strive to maintain harmonious working relationships between the various organs within it, so that each organ can operate effectively and efficiently in accordance with its respective functions and responsibilities. Each organ is encouraged to respect and comply with its functions and roles in accordance with legal provisions and the Articles of Association of Bank Aladin Syariah.

Soft-Structure Governance

Bank Aladin Syariah has an Internal Guidance Architectural framework which describes a hierarchical structure or sequence consisting of:

1. Articles of Association (AD)

This is the highest order provision in Bank's Internal Guidelines structure which is determined through the General Meeting of Shareholders (GMS). Changes to the Articles of Association are under the authority of Shareholders with the mechanism as regulated in Bank's Articles of Association.
2. Policy/Level 1

Internal guidelines that are high level, strategic and long term (not quickly changing) are the main basis for implementing Bank activities. Policies are grouped into policy groups, as follows:

 - a. Business Policy, namely written business provisions that are strategic and long-term (do not change quickly) which are the main basis for implementing bank business activities both in the fields of financing, funding and service activities.
 - b. Operational Policies, namely provisions supporting Bank's operational activities in writing which are strategic and long term (not quickly changing) which include policies in the areas of accounting, human resources, systems and technology, as well as other operational policies.
 - c. Control Policy, namely written supporting provisions for Bank activities that are strategic and long-term (not quickly changing) which are the main basis for all bank activities with the aim of:
 - i) secure organizational resources from misuse, as well as
 - ii) encourage the efficiency of organizational operations to achieve Bank's goals.
3. Standard Procedures and Standards/Level 2

Internal Guidelines that regulate the process mechanism for a product and/or Bank activity. Standard Procedures and Standards which are an elaboration of the Policies above.
4. Technical Instructions/Level 3

Internal Guidelines which contain the process or technical stages of implementing a particular product/procedure or regulate the internal work procedures of a work unit. In this provision the Technical Instructions are a further elaboration of the Standard Procedures



Bank Aladin Syariah selalu mendorong semua Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan bank untuk menerapkan dan menjalankan GCG dalam setiap kegiatan. Dengan cara ini, Bank dapat mencapai keunggulan daya saing yang berkelanjutan.

Bank Aladin Syariah always encourages all Human Resources (HR) within Bank to implement and carry out GCG in every activity. In this way, Bank can achieve sustainable competitive advantage.

Standar Kualitas Penerapan Corporate Governance

Quality Standards for Implementing Corporate Governance

Sebagai bentuk komitmen Bank dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Bank senantiasa meningkatkan kualitas penerapan GCG. Oleh karenanya, penerapan GCG di Bank Aladin Syariah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia (BI) (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) dan pemangku kepentingan lainnya.

As a form of Bank's commitment to implementing Good Corporate Governance, Bank continues to improve the quality of GCG implementation. Therefore, the implementation of GCG at Bank Aladin Syariah is guided by Bank Indonesia Regulation no. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 and Bank Indonesia Circular Letter (SE) No. 12/13/DPbS dated 30 April 2010 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS), especially Article 62 and Article 63 concerning Bank's obligation to submit GCG Implementation Reports to Bank Indonesia (BI) (now Financial Services Authority or OJK) and other stakeholders.

Implementasi Good Corporate Governance

Implementation of Good Corporate Governance

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, Bank Aladin Syariah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa pelaksanaan GCG oleh Bank mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu:

In implementing GCG principles, Bank Aladin Syariah is guided by Bank Indonesia Regulation no. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 and Bank Indonesia Circular Letter no. 12/13/DPbS dated 30 April 2010 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units that the implementation of GCG by Bank refers to 5 (five) basic principles, namely:

Prinsip-Prinsip GCG Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah GCG Principles

Keterbukaan (Transparency)	Akuntabilita (Accountability)	Tanggung Jawa (Responsibility)	Profesiona (Professional)	Kewajaran (Fairness)
-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------------

Secara lebih rinci, komitmen dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Bank Aladin Syariah dijelaskan melalui tabel berikut:

In more detail, the commitment and implementation of GCG principles at Bank Aladin Syariah is explained in the following table:

Prinsip Principles	Makna Prinsip Principle Meaning	Komitmen Aladin Aladin's commitment
Keterbukaan (<i>Transparency</i>)	Keterbukaan atau transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Openness or transparency contains elements of disclosure and the provision of information in a timely, adequate, clear, accurate manner that can be compared and is easily accessible to stakeholders and the public.	Bank dan segenap jajaran Manajemen selalu berupaya untuk menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mudah diakses oleh <i>stakeholders</i> . Bank and all levels of Management always strive to ensure openness in conveying material and relevant information as well as openness in carrying out the decision-making process and that it is easily accessible to stakeholders.

Penerapan Good Corporate Governance Secara Berkelanjutan

Sustainable Implementation Of Good Corporate Governance

Prinsip Principles	Makna Prinsip Principle Meaning	Komitmen Aladin Aladin's commitment
Akuntabilitas (Accountability)	Kejelasan tugas dan pelaksanaan pertanggungjawaban kepada pemegang saham Bank Aladin Syariah sehingga pengelolannya berjalan secara efektif. Clarity of duties and implementation of accountability to Bank Aladin Syariah shareholders so that management runs effectively.	Manajemen Bank Aladin Syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank Aladin Syariah harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan. Bank Aladin Syariah management must be able to account for its performance in a transparent and fair manner. For this reason, Bank Aladin Syariah's business must be managed correctly, measurably, and in accordance with the interests of business actors while still considering the interests of stakeholders.
Tanggung Jawab (Responsibility)	Kesesuaian pengelolaan Bank Aladin Syariah dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Compliance with the management of Bank Aladin Syariah with applicable laws and regulations and the principles of healthy bank management.	Bank Aladin Syariah dan segenap jajaran Bank Aladin Syariah dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank Aladin Syariah dan jajaran Bank Aladin Syariah harus selalu mengingat kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan. Bank Aladin Syariah and all levels of Bank Aladin Syariah in their actions always adhere to the principle of prudence and conformity of bank management with applicable laws and regulations and the principles of sound bank management, while remaining aware of all risks and negative implications that may arise from their actions. Bank Aladin Syariah and the ranks of Bank Aladin Syariah must always remember the interests of all stakeholders in carrying out their functions and determining policies or making decisions.
Profesional (Professional)	Memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak mana pun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha Bank Aladin Syariah. Have competence, be able to act objectively and be free from influence/pressure from any party (independent) and have a high commitment to developing the business of Bank Aladin Syariah.	Bank Aladin Syariah dan seluruh jajaran manajemen menjamin bahwa Bank Aladin Syariah dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Bank Aladin Syariah and all levels of management guarantee that Bank Aladin Syariah is managed professionally without any conflict of interest and can avoid influence/pressure from any party (independent) which is not in accordance with applicable laws and regulations and healthy corporate principles.
Kewajaran (Fairness)	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Justice and equality in fulfilling stakeholder rights based on applicable agreements and legislation.	Bank Aladin Syariah senantiasa menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (equal treatment) di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Aladin Syariah always applies the principle of fairness which is implemented as justice and equality (equal treatment) in fulfilling the rights of stakeholders arising based on agreements and applicable laws and regulations and guarantees that each stakeholder will receive equal treatment without discrimination in accordance with applicable laws and regulations.

Good Corporate Governance Assessment

Untuk memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan dengan baik, Bank secara rutin melakukan penilaian melalui *self assessment*. Di mana penilaian tersebut yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Good Corporate Governance Assessment

To ensure that the implementation of GCG principles has been implemented properly, Bank routinely carries out assessments through self-assessment. Where the assessment refers to Financial Services Authority Regulation no. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, Financial Services Authority Regulation no. 2 of 2024 dated 16 February 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.



Adapun *self assessment* GCG yang dilakukan Bank mencakup 17 aspek penilaian yang telah ditetapkan oleh Regulator, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal;
11. Pemberian remunerasi;
12. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
13. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance* dan pelaporan internal;
14. Rencana strategis Bank;
15. Aspek pemegang saham;
16. Penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyusapan; dan
17. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

The GCG self-assessment carried out by Bank includes 17 assessment aspects that have been determined by the Regulator, including:

1. Implementation of the duties, responsibilities and authority of the Board of Directors;
2. Implementation of the duties, responsibilities and authority of the Board of Commissioners;
3. Completeness and implementation of the Committee's duties;
4. Implementation of the duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board;
5. Implementation of sharia principles in fund collection and distribution activities as well as service delivery;
6. Handling conflicts of interest;
7. Implementation of bank compliance functions;
8. Implementation of the internal audit function;
9. Implementation of the external audit function;
10. Implementation of risk management including an internal control system;
11. Providing remuneration;
12. Provision of funds to related parties and provision of large funds;
13. Transparency of financial and non-financial conditions, reports on the implementation of good corporate governance and internal reporting;
14. Bank strategic plan;
15. Shareholder aspect;
16. Implementation of anti-fraud strategies, including anti-bribery; And
17. Implementation of sustainable finance, including implementation of social and environmental responsibility.

Pelaksanaan Assessment Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2023

Bank Aladin Syariah telah melakukan *self assessment* terhadap penerapan GCG di tahun 2023 dengan peringkat faktor GCG Bank secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Implementation of Good Corporate Governance Implementation Assessment in 2023

Bank Aladin Syariah has carried out a self-assessment on the implementation of GCG in 2023 with the overall ranking of Bank's GCG factors as follows:

Self Assessment Penerapan Good Corporate Governance Periode Tahun 2023
Self Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance for the 2023 Period

No.	Faktor Factors	Peringkat Rating (Semester I)	Peringkat Rating (Semester II)
1	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi Implementation of the duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors	1	1
2	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris Implementation of the duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners	1	1
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Completeness and implementation of the Committee's duties	1	1
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Implementation of the duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board	1	1
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Implementation of sharia principles in Fundraising and Distributing Funds and Services	1	1
6	Penanganan benturan kepentingan Handling conflicts of interest	1	1
7	Penerapan fungsi kepatuhan Implementation of compliance functions	2	2
8	Penerapan fungsi audit intern Implementation of the internal audit function	1	1

Self Assessment Penerapan Good Corporate Governance Periode Tahun 2023
Self Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance for the 2023 Period

No.	Faktor Factors	Peringkat Rating (Semester I)	Peringkat Rating (Semester II)
9	Penerapan fungsi audit ekstern Implementation of the external audit function	1	1
10	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal Implementation of risk management including an internal control system	-	2
11	Pemberian remunerasi Providing remuneration	-	1
12	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar Providing funds to related parties and providing large funds	1	1
13	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal Transparency of BUS financial and non-financial conditions, GCG implementation reports and internal reporting	1	1
14	Rencana strategis Bank Bank strategic plan	-	1
15	Aspek pemegang saham Shareholder aspect	-	1
16	Penerapan strategi anti <i>fraud</i> , termasuk anti penyuapan Implementation of anti-fraud strategies, including anti-bribery	-	1
17	Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan Implementation of sustainable finance, including implementation of social and environmental responsibility	-	1
Peringkat Rating		2	2

Pada semester I tahun 2023 Bank melakukan self assessment pada 11 (sebelas) faktor penilaian GCG. Adapun pada semester II tahun 2023 terdapat penambahan faktor penilaian GCG sebagaimana tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Self assessment implementasi GCG Bank semester I dan semester II di tahun 2023 telah dijalankan secara komprehensif dengan hasil peringkat self assessment GCG Bank secara individual adalah 2 (dua) dengan definisi peringkat yang mencerminkan manajemen Bank telah melaksanakan penerapan Good Corporate Governance dengan baik. Adapun jika terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh manajemen Bank Aladin Syariah.

Roadmap GCG Bank Aladin Syariah

Bank telah menetapkan *Roadmap* GCG yang sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku. Di mana *Roadmap* ini digunakan untuk mendukung praktik implementasi GCG dalam meningkatkan daya saing dan kredibilitas Bank.

In the first semester of 2023, Bank conducted a self-assessment on 11 (eleven) GCG assessment factors. Meanwhile, in the second semester of 2023, there was additional GCG assessment factors as stated in Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated 14, September 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

The self-assessment of Bank's GCG implementation in the first semester and second semester in 2023 has been carried out comprehensively with the results of Bank's individual GCG self-assessment ranking being 2 (two) with a rating definition that reflects that Bank's management has implemented Good Corporate Governance well. Meanwhile, If there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are quite significant and require sufficient attention from Bank's management.

Bank Aladin Syariah GCG Roadmap

Bank has established a GCG Roadmap that is in accordance with applicable regulatory standards. Where this Roadmap is used to support GCG implementation practices in increasing Bank's competitiveness and credibility.



Sebagaimana *roadmap* yang telah disusun di atas, Bank Aladin Syariah memulai penerapan GCG dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan *good compliance corporation*. Selanjutnya, dalam rangka mendukung hal tersebut, Bank didukung dengan kebijakan mengenai tata kelola perusahaan yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing struktur organisasi. Bank juga berkomitmen untuk memutakhirkan kebijakan dan prosedur yang diselaraskan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengedepankan prinsip kepatuhan dalam setiap kegiatan, Bank Aladin Syariah optimis dapat meningkatkan penerapan prinsip GCG. Adapun prinsip GCG yang dimaksud antara lain *transparency, accountability, responsibility, professional, dan fairness*.

Sementara itu, Bank Aladin Syariah juga ditunjang dengan kode etik perusahaan, yaitu pedoman perilaku yang menjadi acuan bagi organ perusahaan dan karyawan dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan secara berkelanjutan menjadi budaya perusahaan. Dalam hal ini prinsip-prinsip GCG telah diinternalisasi dan melekat pada nilai-nilai perusahaan. Dengan demikian Bank Aladin Syariah mencapai keberhasilan penerapan GCG.

As in the roadmap prepared above, Bank Aladin Syariah started implementing GCG by implementing the principles of Good Corporate Governance, by referring to statutory regulations in order to realize a good compliance corporation. Furthermore, in order to support this, Bank is supported by policies regarding corporate governance which regulate the duties and responsibilities of each organizational structure. Bank is also committed to updating policies and procedures that are aligned with applicable legislation.

By prioritizing compliance principles in every activity, Bank Aladin Syariah is optimistic that it can increase the implementation of GCG principles. The GCG principles referred to include transparency, accountability, responsibility, professionalism and fairness.

Meanwhile, Bank Aladin Syariah is also supported by a company code of ethics, namely a code of conduct that serves as a reference for company organs and employees in implementing company values in a sustainable manner as part of the company culture. In this case, GCG principles have been internalized and embedded in the company's values. In this way, Bank Aladin Syariah achieved successful implementation of GCG.

Struktur dan Organ Tata Kelola Bank

Bank Good Governance Structure and Organs

Struktur GCG Bank meliputi organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kedudukan tertinggi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Dalam pelaksanaannya, organ utama dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Internal Audit.

Untuk membantu dan meningkatkan tugas serta fungsi pengawasan, Dewan Komisaris membentuk beberapa komite di antaranya:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Selain itu, Direksi juga memiliki komite dalam rangka membantu tugasnya, antara lain:

1. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi
3. Komite Manajemen Risiko
4. Komite Sumber Daya Manusia
5. Komite Pembiayaan
6. Komite Keberlanjutan

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Bank. Di mana RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham memiliki kewenangan untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. RUPS juga menjadi tempat bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting, dengan kewenangan yang tidak dapat dilimpahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Dalam pelaksanaannya, RUPS dilakukan dalam 2 (dua) macam, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Lebih jauh, RUPS memiliki hak untuk menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui atau menolak laporan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengangkat auditor eksternal, menentukan keseimbangan antara remunerasi dan dividen, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan anggaran dasar Bank, menyetujui laporan keuangan, serta menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Bank's GCG structure includes the main organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS) which has the highest position, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors. In its implementation, the main organ is assisted by supporting organs consisting of committees at the level of the Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Corporate Secretary, Risk Management and Internal Audit.

To assist and improve its supervisory duties and functions, the Board of Commissioners formed several committees including:

1. Audit Committee
2. Risk Monitoring Committee
3. Nomination and Remuneration Committee

Apart from that, the Board of Directors also has committees to assist with their duties, including:

1. Asset and Liability Committee (ALCO)
2. Information Technology Steering Committee
3. Risk Management Committee
4. Human Resources Committee
5. Financing Committee
6. Sustainability Committee

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in Bank. The GMS is a forum for shareholders who have the authority to obtain information about company management carried out by the Board of Directors under the supervision of the Board of Commissioners. The GMS is also a place for shareholders to make important decisions, with authority that cannot be delegated to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits regulated by Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and/or the Company's Articles of Association. In its implementation, GMS is held in 2 (two) types, namely Annual GMS and Extraordinary GMS. Furthermore, the GMS has the right to appoint members of the Board of Commissioners and Directors, approve or reject reports submitted by the Board of Commissioners and Directors, appoint external auditors, determine the balance between remuneration and dividends, evaluate the performance of the Board of Commissioners and Directors, approve changes to Bank's articles of association, approve Financial Statements, and determine remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors.



Jenis RUPS

RUPS Tahunan

Pelaksanaan RUPS tahunan diselenggarakan oleh Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham untuk membahas serta meminta persetujuan terkait Laporan Tahunan, untuk membahas dan meminta persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Bank, penetapan penggunaan laba bersih Bank, penunjukan Kantor Akuntan Publik, penetapan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, perubahan alamat Bank dan perubahan susunan Pengurus Bank.

RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

RUPS Luar Biasa adalah RUPS lainnya yang dapat diadakan yang dapat diadakan kapan pun sesuai kebutuhan dan kepentingan Bank. Agenda RUPSLB melibatkan diskusi mengenai perubahan nama Bank, mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Bank. Selain itu, RUPSLB juga memberikan persetujuan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Bank dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penambahan modal, memberikan kuasa kepada Direksi Bank untuk merubah anggaran dasar Bank dalam rangka peningkatan modal.

Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimulai dengan proses pengumuman dan pemanggilan RUPS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan RUPS akan disampaikan bersamaan dengan pemanggilan RUPS. Namun, jika informasi tersebut belum tersedia pada saat pengumuman RUPS maka informasi akan disampaikan selama berlangsungnya RUPS. Pada umumnya, sebelum RUPS dilaksanakan, akan dilakukan pemanggilan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat. Selain itu, undangan juga menyertakan informasi bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Bank Aladin Syariah sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Dalam pelaksanaannya, agenda RUPS dapat ditambah sesuai kebutuhan selama tidak bertentangan dengan kepentingan Bank Aladin Syariah dapat dilakukan bila disetujui oleh peserta RUPS. Selama RUPS berlangsung acara dipimpin oleh Pemegang Saham.

Type of GMS

Annual GMS

The implementation of the annual GMS is held by the Board of Directors by inviting the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Shareholders to discuss and request approval regarding the Annual Report, to discuss and request approval of the Annual Report, ratification of the Financial Statements, and ratification of the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of Bank, determining the use Bank net profit, appointment of a Public Accounting Firm, determination of remuneration packages including allowances, bonuses and facilities provided to the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board, reporting on the realization of the use of funds from the Public Offering, changes to Bank's address and changes to the composition of Bank Management.

Extraordinary GMS (EGMS)

Extraordinary GMS is another GMS that can be held at any time according to the needs and interests of Bank. The EGMS agenda involves discussions regarding changing Bank's name, appointing and dismissing the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Bank Directors. Apart from that, the EGMS also gave approval for additional capital by issuing new shares with Pre-emptive Rights (HMETD), giving authority and power to Bank's Directors with substitution rights to carry out all necessary actions in order to increase capital, giving power of attorney to the Board of Directors Bank to change Bank's articles of association in order to increase capital.

GMS Implementation

The holding of a General Meeting of Shareholders (GMS) begins with the process of announcing and calling for a GMS in accordance with applicable regulations. All necessary information related to the implementation of the GMS will be submitted simultaneously with the invitation to the GMS. However, if this information is not yet available at the time of the GMS announcement, the information will be provided during the GMS. In general, before the GMS is held, a summons will be sent to shareholders no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS, without considering the date of the summons and the date of the GMS. The summons for the GMS shall be made by registered letter including the date, time, place and agenda of the meeting. Apart from that, the invitation also includes information that the materials to be discussed at the GMS are available at Bank Aladin Syariah office from the date the invitation for the GMS is made until the date the GMS is held. In its implementation, the GMS agenda can be added as needed as long as it does not conflict with the interests of Bank Aladin Syariah. This can be done if approved by the GMS participants. During the GMS, the event is chaired by the Shareholders.

Pelaksanaan RUPS di Tahun 2023

Di tahun 2023, Bank Aladin Syariah telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS yakni RUPS Tahunan dengan rincian sebagai berikut:

GMS Implementation in 2023

In 2023, Bank Aladin Syariah held 1 (one) GMS, namely the Annual GMS with the following details:

HARI/TANGGAL Day / Date	: Rabu, 21 Juni 2023 Wednesday, June 21, 2023
WAKTU Time	: 08.00 WIB s.d selesai 08.00 WIB onwards
TEMPAT Place	: Rapha Room 1 dan 2 JS Luwansa Hotel and Convention Center Jl. H. R. Rasuna Said No.22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 Rapha Rooms 1 and 2 JS Luwansa Hotel and Convention Center Jl. H. R. Rasuna Said No.22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, District Setiabudi, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12940
PIHAK-PIHAK YANG HADIR Attendees	: Dewan Komisaris <ul style="list-style-type: none"> • Rudy Hamdani (Presiden Komisaris/Independen) • Fransisca Ekawati (Komisaris Independen) • Ationo Teguh Basuki (Komisaris) Direksi <ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama Marsudi (Presiden Direktur) • Firdila Sari (Direktur) • Mayang Ekaputri (Direktur) • Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan) Dewan Pengawas Syariah <ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. (Ketua Dewan Pengawas Syariah) • Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si (Anggota Dewan Pengawas Syariah) Board of Commissioners <ul style="list-style-type: none"> • Rudy Hamdani (President Commissioner/Independent) • Fransisca Ekawati (Independent Commissioner) • Ationo Teguh Basuki (Commissioner) Board of Directors <ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama Marsudi (President Director) • Firdila Sari (Director) • Mayang Ekaputri (Director) • Baiq Nadea Dzurriatin (Director of Compliance) Sharia Supervisory Board <ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. (Chairman of the Sharia Supervisory Board) • Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si (Member of the Sharia Supervisory Board)

RUPS Tahunan ini juga diselenggarakan secara elektronik, dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentra Efek Indonesia. Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan ini, Bank Aladin Syariah menggunakan pihak independen yakni Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia untuk melakukan penghitungan suara.

This Annual GMS was also held electronically, using eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentra Efek Indonesia. In implementing this Annual GMS, Bank Aladin Syariah used an independent party, namely PT Sharestar Indonesia Securities Administration Bureau to count the votes.



Adapun keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut:

The resolutions of the Annual GMS are as follows:

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2022 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen
Resolutions of Annual GMS on June 23, 2022 and Follow-up by Management

Mata Acara Rapat ke-1:

Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;

Hasil Keputusan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

1st Meeting Agenda:

Approval of the Annual Report, ratification of the Financial Statements, and ratification of the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the Fiscal Year ending 31 December 2022 as well as granting full repayment and release of responsibility ("*volledig acquit et de charge*") to members of the Board of Directors for their actions in managing the Company and members of the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions that have been carried out during the 2022 Fiscal Year;

Resolutions:

Approve and ratify the Annual Report, Financial Statements and Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the Fiscal Year ending December 31 (thirty-one) 2022 (two thousand and twenty-two) as well as granting full repayment and release of responsibility ("*volledig acquit et de charge*") to members of the Board of Directors for their management actions of the Company and Members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company which have been carried out during the 2022 Fiscal Year (two thousand and twenty two).

Follow-up on Resolutions:

Has been realized

Mata Acara Rapat ke-2:

Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

Hasil Keputusan:

Tidak melakukan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

2nd Meeting Agenda:

Determination of the use of the Company's net profit/loss for the Fiscal Year ending on December 31, 2022;

Resolutions:

Did not distribute Dividend for the 2022 Fiscal Year (two thousand twenty two).

Follow-up on Resolutions:

Has been realized

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2022 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen
Resolutions of Annual GMS on June 23, 2022 and Follow-up by Management

Mata Acara Rapat ke-3:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Hasil Keputusan:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
- Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut; serta
- Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

3rd Meeting Agenda:

Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2023;

Resolutions:

Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:

- Appoint and determine a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31 (thirty-one) 2023 (two thousand and twenty-three);
- Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant; as well as
- Appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable statutory provisions, including capital market regulations and Bapepam and LK regulations and/or OJK Regulations.

Follow-up on Resolutions:

Has been realized

Mata Acara Rapat ke-4:

Penetapan paket remunerasi berikut tunjangan dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Hasil Keputusan:

Menyetujui pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi berikut Tunjangan dan Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan;

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

4th Meeting Agenda:

Determination of the remuneration package along with allowances and facilities provided to the Company's Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board for the Fiscal Year ending December 31, 2023

Resolutions:

Approved the granting and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the Remuneration package along with the Allowances and Facilities provided to the Company's Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board for the Fiscal Year ending December 31 (thirty-one) 2023 (two thousand and twenty three) considering the Company's financial condition;

Follow-up on Resolutions:

Has been realized

**Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2022 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen**
Resolutions of Annual GMS on June 23, 2022 and Follow-up by Management**Mata Acara Rapat ke-5:**

Peretujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Hasil Keputusan:

Menyesuaikan pasal 24 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman neraca dan laporan laba rugi dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan atau kuasa yang ditunjuk untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

5th Meeting Agenda:

Approval of changes to the Company's Articles of Association

Resolutions:

Adjust article 24 paragraph 5 of the Company's Articles of Association regarding the announcement of the balance sheet and profit and loss statements on the PT Bursa Efek Indonesia website and the Company website, considering the provisions of applicable laws in the Capital Market sector.

Agree to appoint and grant power of attorney, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors or appointed proxies to state this decision in a Notarial Deed including re-drafting Article 24 of the Company's Articles of Association, and to do so be authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters letter, as well as doing everything necessary to achieve the above objectives without exception, as well as requesting approval for changes to these articles of association from the competent authority.

Follow-up on Resolutions:

Has been realized

Mata Acara Rapat ke-6:

Perubahan Pengurus Perseroan

Hasil Keputusan:

1. Menyetujui:
 - a. Mengangkat kembali tuan ATIONO TEGUH BASUKI sebagai Komisaris Perseroan;
 - b. Mengangkat kembali nyonya FRANSISCA EKAWATI sebagai Komisaris (Independen) Perseroan;
 - c. Mengangkat kembali nyonya BAIQ NADEA DZURRIATIN sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan;
 - d. Mengangkat kembali tuan DR. H. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 - e. Mengangkat kembali tuan SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.Ag, M.Si sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris (Independen) : Bapak RUDY HAMDANI
- Komisaris : Bapak ATIONO TEGUH BASUKI
- Komisaris Independen : Ibu FRANSISCA EKAWATI

Direksi

- Presiden Direktur : Bapak DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI
- Direktur : Ibu FIRDILA SARI
- Direktur : Ibu MAYANG EKAPUTRI
- Direktur Kepatuhan : Ibu BAIQ NADEA DZURRIATIN

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Bapak Prof. DR H.M ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A
- Anggota : Bapak SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.Ag., M.Si

2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini, baik dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2022 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen Resolutions of Annual GMS on June 23, 2022 and Follow-up by Management

6th Meeting Agenda:

Changes in Company Management

Resolutions:

1. Approve:

- a. Reappointing Mr. ATIONO TEGUH BASUKI as Commissioner of the Company;
- b. Reappointed Mrs. FRANSISCA EKAWATI as Commissioner (Independent) of the Company;
- c. Reappointed Mrs BAIQ NADEA DZURRIATIN as Company Director of Compliance;
- d. Reappointing Mr. DR. H. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A as Chairman of the Sharia Supervisory Board of the Company;
- e. Reappointing Mr. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.AG, M.SI as Member of Sharia Supervisory Board of the Company;

So that henceforth the composition of the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company will be as follows:

Board of Commissioners

- President Commissioner (Independent): Mr. RUDY HAMDANI
- Commissioner : Mr. ATIONO TEGUH BASUKI
- Independent Commissioner: Mrs. FRANSISCA EKAWATI

Board of Directors

- President Director : Mr. DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI
- Director: Mrs. FIRDILA SARI
- Director: Mrs. MAYANG EKAPUTRI
- Director of Compliance: Mrs. BAIQ NADEA DZURRIATIN

Sharia Supervisory Board

- Chairman: Mr. Prof. DR H.M ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A
- Member: Mr. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.Ag., M.Si

2. To authorize a member of the Company's Board of Directors to state this resolution, either in a notarial deed and for this to be authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters and to do everything necessary to achieve the above objectives without any exceptions. at the same time notify the change to the competent authority.

Follow-up on Resolutions:

Has been realized

Mata Acara Rapat ke-7:

Pelaporan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Hasil Keputusan:

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu, tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Bersifat penyampaian informasi kepada publik

7th Meeting Agenda:

Reporting on the realization of the use of Public Offering Proceeds

Resolutions:

The Board of Directors has reported the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public Offering as of 31 (thirty-first) December 2022 (two thousand and twenty-two) at the Annual General Meeting of Shareholders which was held today, Wednesday, 21 (twenty-first) June 2023 (two thousand twenty three).

Follow-up on Resolutions:

The nature of conveying information to the public

Keputusan dan Tindak Lanjut Hasil Keputusan RUPS Tahun 2022

Di tahun 2022, Bank menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS dengan rincian yakni RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2022, serta RUPS Luar Biasa tanggal 10 Februari 2022 dan 29 Juli 2022. Seluruh hasil keputusan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa tersebut, telah ditindaklanjuti di tahun 2022.

Adapun hasil keputusan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa di tahun 2022, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

Resolutions and Follow-up to the 2022 GMS Resolutions

In 2022, Bank held 3 (three) GMS with details namely the Annual GMS on June 23, 2022, and the Extraordinary GMS on February 10, 2022 and July 29, 2022. All the resolutions of the Annual GMS and Extraordinary GMS have been followed up in 2022.

The resolutions of the Annual GMS and Extraordinary GMS in 2022 are as attached below.



1. Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2022
 - a. Mata Acara Rapat Pertama
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya "volledig acquit et de charge") kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
 - b. Mata Acara Rapat Kedua
Tidak melakukan pembayaran Dividen untuk kinerja tahun buku 2021.
 - c. Mata Acara Rapat Ketiga
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - i) Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
 - ii) Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut; serta
 - iii) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
 - d. Mata Acara Rapat Keempat
Menyetujui pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi berikut Tunjangan dan Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
 - e. Mata Acara Rapat Kelima
 - i) Memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan;
 - ii) Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk menyusun Kembali Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.
1. Resolutions of Annual GMS on June 23, 2022
 - a. First Meeting Agenda
Approve and ratify the Annual Report, Financial Statements and Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the Fiscal Year ending December 31, 2021 (as well as granting full repayment and release of responsibility "volledig acquit et de charge") to the Members of the Board of Directors for their management actions of the Company and Members of the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions that have been carried out during the 2021 Fiscal Year.
 - b. Second Meeting Agenda
Do not distribute dividend for the 2021 Fiscal Year performance.
 - c. Third Meeting Agenda
Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
 - i) Appoint and determine a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2022;
 - ii) Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant; as well as
 - iii) Appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable statutory provisions, including capital market regulations and Bapepam and LK regulations and/or OJK Regulations.
 - d. Fourth Meeting Agenda
Approved the granting and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the Remuneration package along with the Allowances and Facilities provided to the Company's Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board for the Fiscal Year ending December 31, 2022, considering the Company's financial condition.
 - e. Fifth Agenda
 - i) Provide approval for changes to Article 3 of the Company's articles of association regarding the aims and objectives;
 - ii) To authorize one member of the Company's Board of Directors to state this resolution in a Notarial Deed, either in part or in full, including re-drafting Article 3 of the Company's articles of association and for this reason to be authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters, and do everything necessary to achieve the above objectives without any exceptions and at the same time requesting approval of changes to these articles of association from the competent authority.

f. Mata Acara Rapat Keenam

- i) Menegaskan masa periode susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah akan berakhir pada penutupan RUPS Tahun Ketiga dengan mengikuti masa pengangkatan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris (Independen) : Rudy Hamdani
- Komisaris : Ationo Teguh Basuki
- Komisaris Independen : Fransisca Ekawati

Direksi

- Presiden Direktur : Dyota Mahottama Marsudi
 - Direktur : Firdila Sari
 - Direktur : Mayang Ekaputri
 - Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin
 - Dewan Pengawas Syariah
 - Ketua : DR H.M Asrorun Ni'am Sholeh, MA
 - Anggota : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S. Ag, M.Si
- ii) Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini, baik dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

g. Mata Acara Rapat Ketujuh

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 Desember 2021 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022.

2. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Februari 2022

a. Mata Acara Rapat Pertama

- i) Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp2.500.000.000.000,- menjadi Rp5.000.000.000.000,- dan sehubungan itu merubah pasal 4 ayat 1 dari anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Modal dasar Perseroan berjumlah Rp5.000.000.000.000,- terbagi atas 50.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,-.
- ii) Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali pasal 1 anggaran dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang

f. Sixth Meeting Agenda

- i) Confirms that the period for the composition of members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board will end at the close of the Third Year GMS following the appointment period for each member of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board.

To be further, the composition of the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company is as follows:

Board of Commissioners

- President Commissioner (Independent): Rudy Hamdani
- Commissioner: Ationo Teguh Basuki
- Independent Commissioner: Fransisca Ekawati

Board of Directors

- President Director: Dyota Mahottama Marsudi
 - Director: Firdila Sari
 - Director: Mayang Ekaputri
 - Director of Compliance: Baiq Nadea Dzurriatin
 - Sharia Supervisory Board
 - Chairman: DR H.M Asrorun Ni'am Sholeh, MA
 - Members: Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S. Ag, M.Sc
- ii) Granting authority to one of the Company's Board of Directors to state this resolution, either in a notarial deed and for this to be authorized to appear before the Notary, sign deeds, documents or letters and do everything necessary to achieve the above objectives without exception and at the same time informing such changes to the competent authorities.

g. Seventh Meeting Agenda

The Board of Directors has reported the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public Offering as of December 31, 2021 at the Annual General Meeting of Shareholders which was held on Thursday, June 23, 2022.

2. Resolutions of Extraordinary GMS on February 10, 2022

a. First Meeting Agenda

- i) Increase the Company's authorized capital from IDR2,500,000,000,000 to IDR5,000,000,000,000 and in connection with this amend article 4 paragraph 1 of the Company's articles of association to be as follows:
- The authorized capital of the Company is IDR 5,000,000,000,000,- divided into 50,000,000,000 shares, each share has a nominal value of IDR 100,-.
- ii) Authorize a member of the Company's Board of Directors to state this resolution in a Notarial Deed, including re-drafting article 1 of the Company's articles of association and for this to be authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters, and do everything necessary to achieve this purpose above without any



diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

b. Mata Acara Rapat Kedua

- i) 1) Menerima pengunduran diri Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa dari pencalonannya sebagai Presiden Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan serta memberikan apresiasi atas kontribusi beliau kepada Perseroan.
- 2) Menerima pengunduran diri Basuki Hidayat dari Direktur Operasional Perseroan dan Mohammad Riza dari Direktur Bisnis Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan mereka, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan serta memberikan apresiasi atas kontribusi beliau kepada Perseroan.
- 3) Mengangkat Rudy Hamdani sebagai Presiden Komisaris (Independen) Perseroan.
- 4) Mengangkat Mayang Ekaputri sebagai Direktur Perseroan.
- 5) Budi Kusmiantoro, untuk selanjutnya berkarya sebagai Chief Technology Officer Perseroan.
- 6) Willy Hambali, untuk selanjutnya berkarya sebagai Chief Operating Officer Perseroan.

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris (Independen) : Rudy Hamdani
- Komisaris : Ationo Teguh Basuki
- Komisaris Independen : Fransisca Ekawati

Direksi

- Presiden Direktur : Dyota Mahottama Marsudi
- Direktur : Firdila Sari
- Direktur : Mayang Ekaputri
- Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : DR H.M Asrorun Ni'am Sholeh, MA
- Anggota : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S. Ag, M.Si

- ii) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada --instansi yang berwenang.

exceptions and at the same time requesting approval for changes to these articles of association from the competent authority.

b. Second Meeting Agenda

- i) 1) Accept the resignation of Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa from his candidacy as Independent President Commissioner of the Company by providing full release and repayment (*acquit et de charge*) for his supervisory actions, as long as these actions are reflected in the Company's books and giving appreciation for his contribution to the Company.
- 2) Accept the resignation of Basuki Hidayat from the Company's Director of Operational and Mohammad Riza from the Company's Director of Business by providing full release and repayment (*acquit et de charge*) for their management actions, as long as these actions are reflected in the Company's books and giving appreciation for their contribution to the Company .
- 3) Appoint Rudy Hamdani as President Commissioner (Independent) of the Company.
- 4) Appoint Mayang Ekaputri as Director of the Company.
- 5) Budi Kusmiantoro, to continue working as the Company's Chief Technology Officer.
- 6) Willy Hambali, to continue working as Chief Operating Officer of the Company .

So that from the closing of the Meeting, the composition of the Company's Management will be as follows:

Board of Commissioners

- President Commissioner (Independent): Rudy Hamdani
- Commissioner: Ationo Teguh Basuki
- Independent Commissioner: Fransisca Ekawati

Board of Directors

- President Director: Dyota Mahottama Marsudi
- Director: Firdila Sari
- Director: Mayang Ekaputri
- Director of Compliance: Baiq Nadea Dzurriatin

Sharia Supervisory Board

- Chairman: DR H.M Asrorun Ni'am Sholeh, MA
- Members: Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S. Ag, M.Sc

- ii) Grant authority to the Company's Directors to state this resolution in a Notarial deed and to do so be authorized to appear before a Notary Public, sign deeds, documents or letters and do everything necessary to achieve the above objectives without exception, as well as notify changes in the composition of the management. to the authorized agency.

3. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Juli 2022

a. Mata Acara Tunggal

- i) Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD);
- ii) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) serta menentukan jumlah pasti saham baru yang akan dikeluarkan; dan
- iii) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan melakukan segala suatu tindakan, tanpa ada yang dikecualikan.

3. Resolutions of Extraordinary GMS on July 29, 2022

a. Single Agenda

- i) Giving approval to the Company's plan to increase capital by carrying out non-preemptive right issue (PMTHMETD);
- ii) Grant authority and power to the Company's Board of Directors with substitution rights to carry out all necessary actions in order to increase capital by carrying out non-preemptive right issue (PMTHMETD) and determine the exact number of new shares to be issued; And
- iii) Granting authority to the Company's Board of Directors to amend the Company's articles of association in the context of Capital Increases By carrying out non-preemptive right issue (PMTHMETD) and carrying out all actions, without exception.



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan Bank Aladin Syariah yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Bank, Rencana Bisnis Bank serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank Aladin Syariah.

Kriteria Dewan Komisaris

Perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dapat menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Bank. Adapun kriteria atau persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
2. Memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan dan perbankan, terutama perbankan syariah.
4. Mampu bekerja sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
6. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
8. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan atau Direktur lainnya.
9. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai.
10. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
11. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan kewajiban Komisaris.
12. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai.
13. Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen.
14. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
15. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Memiliki pengalaman di bidang perbankan, terutama perbankan Syariah.

The Board of Commissioners is responsible for carrying out the supervisory function over the management policies of Bank Aladin Syariah carried out by the Board of Directors, as well as providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of Bank's Long Term Plan, Bank Business Plan as well as the provisions of the Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders, as well as statutory regulations. - applicable invitations, for the interests of Bank and in accordance with the aims and objectives of Bank Aladin Syariah.

Board of Commissioners Criteria

Individuals who meet the criteria and requirements in accordance with Bank's Articles of Association may serve as Members of Bank's Board of Commissioners. The criteria or requirements are as follows:

1. Able to carry out legal actions.
2. Have dedication, understand company management problems.
3. Have adequate knowledge in the fields of finance and banking, especially sharia banking.
4. Able to work together with other members of the Board of Commissioners.
5. Never been declared bankrupt by the Court.
6. Never been a Director or member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
7. Never been convicted of committing a criminal act that was detrimental to state finances within 5 (five) years prior to his appointment.
8. Has no blood family relationship up to the second degree, with Controlling Shareholders, members of the Board of Commissioners and/or other Directors.
9. Have a commitment to provide adequate time.
10. Have integrity and a good reputation, that is, never directly or indirectly involved in acts of engineering and deviant practices, breach of contract and other acts that are detrimental to the company where the person concerned works or has worked.
11. Have competence, namely ability and experience in fields relevant to the duties and obligations of the Commissioner.
12. Have the ability to consider a problem adequately.
13. Have the ability to discuss problems without management interference.
14. Have good morals and morals.
15. Have a commitment to comply with applicable laws and regulations.
16. Have experience in Banking sector, especially Sharia banking.

17. Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari otoritas yang berwenang.
18. Bagi Komisaris Independen, selain harus memenuhi persyaratan umum seperti tersebut di atas, juga berlaku syarat independensi dan kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance* (GCG) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Ketentuan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Mengacu pada Anggaran Dasar Bank, Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
4. Pengunduran dirinya efektif;
5. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan putusan Pengadilan;
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah, Komposisi, Susunan dan Dasar Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2023

Dewan Komisaris Bank Aladin Syariah terdiri dari 3 (tiga) anggota, di mana 2 (dua) di antaranya adalah Komisaris Independen. Komposisi Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Per 31 Desember 2023 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, baik jumlah, komposisi maupun susunan Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan, namun terdapat pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya, sebagaimana tertuang dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023. Di mana para pemegang saham dalam RUPS Tahunan tersebut, memutuskan untuk mengangkat kembali Ationo Teguh Basuki sebagai Komisaris dan Fransisca Ekawati sebagai Komisaris (Independen) Bank.

Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

17. Pass the Fit and Proper Test from the competent authority.
18. For Independent Commissioners, apart from having to fulfill the general requirements as mentioned above, independence requirements and other criteria as intended in Bank Indonesia Regulation on Good Corporate Governance (GCG) and other Legislative Regulations also apply.

Terms of Office for the Board of Commissioners

Referring to Bank's Articles of Association, the Board of Commissioners is appointed by the GMS for a period starting from the date of the GMS that appointed them and ending at the close of the third GMS after the date of appointment without reducing the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends.

The term of office of a member of the Board of Commissioners ends if:

1. Passed Away;
2. His term of office ends;
3. Dismissed based on the GMS;
4. His resignation is effective;
5. Declared bankrupt or placed under guardianship based on a court decision;
6. No longer meets applicable statutory requirements.

Number, Composition, Structure and Basis for Appointment of Members of the Board of Commissioners Throughout 2023

The Board of Commissioners of Bank Aladin Syariah consists of 3 (three) members, of which 2 (two) are Independent Commissioners. The composition of the Board of Commissioners is in accordance with the provisions in Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

As of December 31, 2023 until this Annual Report is signed, the number, composition and structure of the Board of Commissioners has not changed, however there has been a re-appointment of members of the Board of Commissioners whose term of office has expired, as stated in the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the Fiscal Year 2022 which was held on June 21 2023. Where the shareholders at the Annual GMS decided to reappoint Ationo Teguh Basuki as Commissioner and Fransisca Ekawati as Commissioner (Independent) of Bank.

The composition and structure of the Board of Commissioners as of December 31, 2023 is as follows:



Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 Composition and structure of the Board of Commissioners as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris (Independen) President Commissioner (Independent)	<ul style="list-style-type: none"> RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2021 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 56 tanggal 29 Juli 2021. RUPS Luar Biasa tanggal 10 Februari 2022 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa melalui No. 38 tanggal 10 Februari 2022. Annual GMS dated July 29, 2021 as stated in the Deed of Annual GMS Resolution Statement No. 56 dated July 29, 2021. Extraordinary GMS dated February 10, 2022 as stated in the Deed of Extraordinary GMS Resolution Statement No. 38 dated February 10, 2022.
Ationo Teguh Basuki	Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> RUPS Sirkuler tanggal 28 Mei 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023. Circular GMS on May 28, 2020 with minutes in Notarial Deed No. 149 dated May 28, 2020. Annual GMS dated June 21, 2023 which was notarized through the Deed of Meeting Decision Statement No. 12 dated July 6, 2023.
Fransisca Ekawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> RUPS Sirkuler tanggal 28 Mei 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023. Circular GMS on May 28, 2020 with minutes in Notarial Deed No. 149 dated May 28, 2020. Annual GMS dated June 21, 2023 which was notarized through the Deed of Meeting Decision Statement No. 12 dated July 6, 2023.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris mengacu pada *Board Manual* yang merupakan petunjuk tata laksana tugas dan wewenang Dewan Komisaris dalam tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait kebijakan dan jalannya pengurusan Bank. Dewan Komisaris telah memiliki *Board Manual* yang merupakan pedoman kerja Dewan Komisaris, yakni Standar Prosedur Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Aladin Syariah Tbk yang terakhir diperbarui pada 28 Juli 2023.

Penyusunan *Board Manual* Dewan Komisaris disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Board Manual* memuat kumpulan dari prinsip-prinsip hukum korporasi dan ketentuan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar maupun peraturan Bank Aladin Syariah yang mengatur mengenai tata kerja Dewan Komisaris.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Lingkup pengungkapan hubungan afiliasi Dewan Komisaris adalah hubungan afiliasi atau keterikatan atau ketergantungan dalam hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua; antar pejabat anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, dengan tujuan menghindari adanya benturan kepentingan yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang dapat merugikan Bank.

Per 31 Desember 2023, seluruh Dewan Komisaris yang menjabat tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham. Adapun hubungan afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners Work Guidelines

The implementation of the Board of Commissioners' functions refers to the Board Manual, which is a guide to the implementation of the duties and authority of the Board of Commissioners in their duties of supervision and providing advice to the Board of Directors regarding the policies and management of Bank. The Board of Commissioners has a Board Manual which is the work guide for the Board of Commissioners, namely the Standard Procedures for the Board of Commissioners and Directors of PT Bank Aladin Syariah Tbk which was last updated on July 28 2023.

The preparation of the Board Manual for the Board of Commissioners is adjusted to the applicable laws and regulations. The Board Manual contains a collection of corporate legal principles and provisions that refer to statutory regulations, the Articles of Association and Bank Aladin Syariah regulations which regulate the work procedures of the Board of Commissioners.

Board of Commissioners Affiliate Relationship

The scope of disclosure of affiliate relationships of the Board of Commissioners is affiliation relationships or attachment or dependence in financial relationships, management, share ownership and/or family relationships up to the second degree; between other officials, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and controlling shareholders or major shareholders, with the aim of avoiding conflicts of interest that could disrupt the decision-making process which could be detrimental to Bank.

As of December 31, 2023, all serving members of the Board of Commissioners have no affiliation with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholders. The affiliate relationship between the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with			Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with		
		Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris (Independen) President Commissioner (Independent)	x	x	x	x	x	x
Ationo Teguh Basuki	Komisaris Commissioner	x	x	x	x	x	x
Fransisca Ekawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	x	x	x	x	x	x

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam semua aktivitas Bank di setiap tingkat maupun jenjang organisasi. Berikut tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, yakni antara lain:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Bank.
5. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua perbukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has the duty and responsibility to ensure the implementation of GCG principles in all Bank activities at every level and level of the organization. The following are the duties and responsibilities of Bank's Board of Commissioners in accordance with Bank's Articles of Association, namely:

1. The Board of Commissioners is tasked with supervising and is responsible for supervising management policies, the course of management in general, both regarding Bank and Bank's business, and providing advice to the Board of Directors.
2. The Board of Commissioners is obliged to carry out its duties and responsibilities independently in accordance with the principles of Good Corporate Governance and ensure the implementation of Good Corporate Governance in every Bank business activity at all levels of the organization.
3. Each member of the Board of Commissioners cannot act independently, but rather based on the decision of the Board of Commissioners.
4. In order to support the effective implementation of its duties and responsibilities in supervision, the Board of Commissioners is obliged to form and determine the composition of the audit committee and other committees as determined by the laws and regulations in force in the capital market, and is obliged to evaluate the performance of the committees. at the end of each Bank's Fiscal Year.
5. The Board of Directors and each member of the Board of Directors are obliged to provide explanations regarding all matters asked by the Board of Commissioners.
6. The Board of Commissioners at any time during Bank office working hours has the right to enter buildings and grounds or other places used or controlled by Bank and has the right to inspect all books, letters and other evidence, inventory of goods, check and check the condition of cash (for purposes verification) and other securities and has the right to know all actions that have been carried out by the Board of Directors, in such cases the Board of Directors and each member of the Board of Directors are obliged to provide explanations regarding all matters asked by members of the Board of Commissioners or experts who assist them.



7. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh anggota Dewan Komisaris sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Bank.
8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Bank. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
9. Dalam jangka waktu 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS tersebut. Apabila RUPS tidak diselenggarakan dalam waktu 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Bank, sehingga kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan bersama.
11. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau keputusan RUPS.
13. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, audit ekstern, hasil pengawasan regulator, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya (sesuai dengan peraturan yang berlaku).
14. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada regulator paling lambat 7 hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan Bank.
15. Anggota Dewan Komisaris dilarang:
 - a. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank; dan
7. The division of work among the members of the Board of Commissioners is regulated by the members of the Board of Commissioners themselves, and to carry out their duties smoothly the Board of Commissioners may be assisted by a Secretary appointed by the Board of Commissioners at the expense of Bank.
8. The Board of Commissioners has the right at any time to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from their positions, if the members of the Board of Directors are deemed to have acted contrary to Bank's articles of association and applicable laws and regulations or neglected their obligations or there are urgent reasons for Bank. The temporary suspension must be notified in writing to the person concerned, including the reasons.
9. Within 90 days after the date of the temporary dismissal, the Board of Commissioners is obliged to hold a GMS to revoke or confirm the temporary dismissal, while the members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are given the opportunity to attend to defend themselves. The GMS is chaired by the President Commissioner and in the event that the President Commissioner is absent or absent, which does not need to be proven to a third party, the GMS will be chaired by another member of the Board of Commissioners, and in the event that no member of the Board of Commissioners is present or is absent, whichever does not need to be proven to a third party, the GMS is chaired by a person selected by and from the shareholders or their proxies who are present at the GMS. If the GMS is not held within 90 days after the date of the temporary dismissal, the temporary dismissal becomes null and void and the person concerned returns to his/her position
10. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed, then the Board of Commissioners is temporarily obliged to manage Bank, so that temporary authority is given to one or more of them on joint responsibility.
11. Under certain conditions, the Board of Commissioners is obliged to hold an Annual GMS and other GMS in accordance with its authority as regulated in Bank's articles of association and statutory regulations.
12. The Board of Commissioners may take action to manage Bank in certain circumstances for a certain period of time, as stipulated in Bank's articles of association or GMS resolutions.
13. The Board of Commissioners is obliged to ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from Bank's internal audit work unit, external audit, results of regulatory supervision, and/or results of supervision by other authorities (in accordance with applicable regulations).
14. The Board of Commissioners is obliged to notify the regulator in writing no later than 7 working days after the discovery of:
 - a. Violation of laws and regulations in the financial and banking sector; and/or
 - b. Circumstances or anticipated circumstances that could endanger the continuity of Bank.
15. Members of the Board of Commissioners are prohibited from:
 - a. Utilizing Bank for personal, family and/or other party interests which can reduce assets or reduce Bank profits; And

- b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
16. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
- Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik kepada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank;
 - Rangkap jabatan pada Bank atau Lembaga lain; dan
 - Remunerasi dan fasilitas yang diterima bank, dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Dewan Komisaris akan meneliti dan mengesahkan rencana bisnis yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk di dalamnya rencana permodalan dan biaya operasional.
18. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
19. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan:
- Waktu kerja; dan
 - Pengaturan rapat.
20. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Bank berlaku pula baginya.
- b. Taking and/or receiving personal benefits from Bank, in addition to remuneration and other facilities determined by the GMS.
16. Members of the Board of Commissioners are required to disclose:
- Share ownership reaching 5% (five percent) or more, both in Bank concerned and in other banks and companies domiciled at home and abroad;
 - Financial and family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of Bank;
 - Concurrent positions at a Bank or other Institution; And
 - Remuneration and facilities received by Bank, in the Good Corporate Governance implementation report as regulated in the applicable laws and regulations.
17. The Board of Commissioners will audit and approve the business plan contained in Bank Business Plan (RBB), including capital plans and operational costs.
18. In supervising the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners is prohibited from being involved in making decisions on Bank's operational activities, except:
- Provision of funds to related parties as regulated in OJK provisions regarding Maximum Fund Distribution Limits; And
 - Other matters stipulated in Bank's Articles of Association or applicable laws and regulations.
- Decision making by the Board of Commissioners as intended does not negate the responsibility of the Board of Directors for the implementation of Bank management.
19. The Board of Commissioners is required to have binding guidelines and rules for each member of the Board of Commissioners which at least include:
- Working time; And
 - Meeting settings.
20. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities granted to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in Bank's Articles of Association also apply to him.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

- Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Bank.
- Anggota Dewan Komisaris berhak meminta semua keterangan yang berkenaan dengan Bank kepada Direksi dan Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan para anggota Dewan Komisaris.

Rights and Authorities of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners have the following rights and authorities:

- Members of the Board of Commissioners, both jointly and individually, have the right to audit books, documents of evidence, inventories of goods, audit and check the condition of cash (for verification purposes) and other securities and to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.
- Members of the Board of Commissioners, both together and individually, have the right to enter buildings and grounds or other places used or controlled by Bank at any time.
- Members of the Board of Commissioners have the right to request all information relating to Bank from the Board of Directors and the Board of Directors must provide all information relating to Bank as required by members of the Board of Commissioners.



4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
 5. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
 6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris.
 7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 8. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Bank.
 9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Bank, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 10. Melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
 12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan atau keputusan RUPS.
 13. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan fasilitas/tunjangan yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS.
 14. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Bank.
 15. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 16. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Bank, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank.
 17. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 18. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
 19. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
 20. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
 21. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 22. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lainnya.
 23. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
 24. Melakukan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
4. Know all policies and actions that have been and will be implemented by the Board of Directors.
 5. Request the Directors and/or other officials under the Directors with the knowledge of the Directors to attend the Board of Commissioners meetings.
 6. Appoint and dismiss a Secretary to the Board of Commissioners.
 7. Temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association.
 8. Establish an Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee, and other Committees if deemed necessary considering Bank's capabilities.
 9. Use experts for certain matters and within a certain period of time at Bank's expense, if deemed necessary and considering applicable regulations.
 10. Carry out Bank management actions in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association.
 11. Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed.
 12. Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS Resolutions.
 13. Each member of the Board of Commissioners has the right to receive an honorarium and facilities/benefits whose amount and type are determined by the GMS.
 14. Advise the Board of Directors in managing Bank.
 15. Provide opinions and approval for the Company's Long Term Plan and the Company's Annual Work Plan and Budget, as well as other plans prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association.
 16. Follow, supervise the development of Bank's activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important for the management of Bank.
 17. Report immediately to the GMS if there are symptoms of declining Company performance along with suggestions regarding corrective steps that must be taken.
 18. Propose to the GMS the appointment of a Public Accountant who will audit the Company's books.
 19. Research and review and provide responses to periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the Annual Report.
 20. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested.
 21. Prepare minutes of meetings of the Board of Commissioners and keep a copy.
 22. Report to the Company regarding his or her family's share ownership in the Company and other Companies.
 23. Provide a report on the supervisory tasks that have been carried out during the previous Fiscal Year to the GMS.
 24. Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with provisions, laws and regulations, the Articles of Association and GMS Resolutions.

Program Orientasi/Pengenalan Bagi Komisaris Baru

Program Orientasi wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama kali menjabat di Bank. Dalam hal ini, Program Orientasi ini dirancang dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efektivitas Dewan Komisaris. Materi yang disajikan dalam program ini mencakup presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Bank, perkenalan dengan para pimpinan dan pegawai Bank serta program lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Di tahun 2023, Bank Aladin Syariah tidak melaksanakan program orientasi atau pengenalan Bank dikarenakan tidak terdapat Dewan Komisaris baru.

Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Seluruh Dewan Komisaris Bank Aladin Syariah senantiasa mendapatkan pelatihan atau pendidikan untuk menunjang dan mengoptimalkan peran serta fungsi Dewan Komisaris. Adapun program peningkatan kompetensi baik berupa seminar atau pelatihan dan pendidikan, yang diikuti Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Orientation/Introduction Program for New Commissioners

An orientation program must be provided to members of the Board of Commissioners who are serving at Bank for the first time. In this case, this Orientation Program is designed with the aim of improving the performance and effectiveness of the Board of Commissioners. The material presented in this program includes presentations, meetings or visits to Bank facilities, introductions to Bank leaders and employees and other programs as needed.

In 2023, Bank Aladin Syariah did not carry out an orientation or introduction program to Bank because there is no new Board of Commissioners.

Board of Commissioners Competency Improvement Program

The entire Board of Commissioners of Bank Aladin Syariah always receives training or education to support and optimize the role and function of the Board of Commissioners. The competency improvement programs, in the form of seminars or training and education, which the Board of Commissioners is participating in as of December 31, 2023 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara
Rudy Hamdani (Presiden Komisaris/Independen) (President Commissioner/ Independent)	Advanced Sharia Banking	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Knowing and understanding the transaction philosophy at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	Jakarta, 3 Februari dan 1 Maret 2023 Jakarta, February 3 and March 1, 2023	Yayasan Muamalat Institute
	Sustainable Finance	Memahami update dan issue terkini mengenai praktik keuangan berkelanjutan Understanding the latest updates and issues regarding sustainable financial practices	Jakarta, 17 Februari 2023 Jakarta, February 17, 2023	Trisakti Sustainability Center
Ationo Teguh Basuki (Komisaris) (Commissioner)	Advanced Sharia Banking	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Knowing and understanding the transaction philosophy at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	Jakarta, 3 Februari dan 1 Maret 2023 Jakarta, February 3 and March 1, 2023	Yayasan Muamalat Institute
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 5 Level 5 Banking Risk Management Certification Refreshment	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security	Jakarta, 6 Juni 2023 Jakarta, June 6 2023	PT Gema Prima Solusi
	Sustainable Finance	Memahami update dan issue terkini mengenai praktik keuangan berkelanjutan Understanding the latest updates and issues regarding sustainable financial practices	Jakarta, 17 Februari 2023 Jakarta, February 17, 2023	Trisakti Sustainability Center
Fransisca Ekawati (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Advanced Sharia Banking	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Knowing and understanding the transaction philosophy at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	Jakarta, 3 Februari dan 1 Maret 2023 Jakarta, February 3 and March 1, 2023	Yayasan Muamalat Institute



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Level 2 Banking Risk Management Certification Refreshment	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security	Jakarta, 6 Juni 2023 Jakarta, June 6 2023	PT Gema Prima Solusi
	Sustainable Finance	Memahami update dan issue terkini mengenai praktik keuangan berkelanjutan Understanding the latest updates and issues regarding sustainable financial practices	Jakarta, 17 Februari 2023 Jakarta, February 17, 2023	Trisakti Sustainability Center

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi disampaikan melalui saran, rekomendasi dan surat keputusan Dewan Komisaris, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Bank dan mengevaluasi kinerja Bank. Pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam rapat, maupun secara informal. Rapat yang dimaksud adalah pada pelaksanaan rapat komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris ditunjang oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko untuk mendukung tugas pengawasannya. Dalam hal ini, setiap kinerja Komite akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dengan tujuan untuk memetakan sasaran tahun berikutnya.

Dasar penilaian terhadap Komite di bawah Dewan Komisaris adalah tingkat kehadiran dalam rapat Komite, tingkat kontribusi bagi Dewan Komisaris, serta peran aktif (inisiatif) terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai pelaksana penilaian.

Dalam mencapai kinerja yang baik, penilaian tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam rencana kerja dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan komite. Hasil dari penilaian ini, dijadikan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite untuk periode jabatan berikutnya.

Di tahun 2023, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko, telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan memberikan dukungan yang positif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.

Implementation of the Duties of the Board of Commissioners

Throughout 2023, the Board of Commissioners has supervised and provided advise to the Board of Directors conveyed through suggestions, recommendations and decision letters from the Board of Commissioners, including holding meetings related to discussing issues related to Bank management and evaluating Bank's performance. Supervision and provision of advice from the Board of Commissioners to the Board of Directors is carried out both formally in meetings and informally. The meeting referred to is the holding of committee meetings under the supervision of the Board of Commissioners and meetings of the Board of Commissioners together with the Board of Directors.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is supported by an Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Monitoring Committee to support its supervisory duties. In this case, each Committee's performance will be evaluated at least once in 1 (one) year with the aim of mapping the following year's targets.

The basis for assessing Committees under the Board of Commissioners is the level of attendance at Committee meetings, the level of contribution to the Board of Commissioners, as well as their active role (initiative) in what has been determined by the Board of Commissioners as the implementer of the assessment.

In achieving good performance, the assessment is also carried out by considering the realization and completion of the work program stated in the work plan and reported to the Board of Commissioners in the committee report. The results of this assessment are used as consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss Committee members for the next term of office.

In 2023, the Board of Commissioners assesses that the committees under the Board of Commissioners, consisting of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Monitoring Committee, have carried out their duties and responsibilities well and provided positive support in the implementation of the supervisory function by the Board. Commissioner.

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat kemampuannya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Per 31 Desember 2023, Bank Aladin Syariah memiliki Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) anggota dari 3 (tiga) anggota anggota Dewan Komisaris. Jumlah ini telah memenuhi persyaratan POJK No.33/POJK.04/2014 yaitu sebanyak 50% dari total anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Anggota Komisaris Independen

Masing-masing Komisaris Independen Bank telah memenuhi kriteria berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen;
2. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
3. Cakap melakukan perbuatan hukum;
4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iv) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - v) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan emiten atau perusahaan publik.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders or with the company which may hinder or impede their ability to act independently in accordance with the principles. GCG principles. As of December 31, 2023, Bank Aladin Syariah has 2 (two) Independent Commissioners from the 3 (three) members of the Board of Commissioners. This number meets the requirements of POJK No.33/POJK.04/2014, namely 50% of the total members of the Board of Commissioners.

Criteria for Independent Commissioner Members

Each Independent Commissioner of Bank has met the following criteria:

1. Members of the Board of Commissioners who come from outside the Issuer or Public Company and meet the requirements as Independent Commissioners;
2. Have good morals, morals and integrity;
3. Capable of carrying out legal actions;
4. Within 5 (five) years before appointment and during office:
 - a. Never declared bankruptcy;
 - b. Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - c. Never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector; and
 - d. Never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners during his tenure:
 - i) Never held an Annual GMS;
 - ii) His accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or he has never provided his accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS;
 - iii) Has ever caused a company that obtained a permit, approval or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or Financial Statements to the Financial Services Authority;
 - iv) Have a commitment to comply with laws and regulations; And
 - v) Have knowledge and/or expertise in the fields required by issuers or public companies.



Pernyataan tentang Independensi Komisaris Independen

Seluruh anggota Komisaris Independen Bank Aladin Syariah telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan pemenuhan seluruh kriteria dan independensi jabatannya sesuai kriteria yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Statement on the Independence of Independent Commissioners

All members of the Independent Commissioners of Bank Aladin Syariah have signed a Statement Letter stating that they fulfill all criteria and the independence of their positions in accordance with the criteria required by applicable laws and regulations.

Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang bertanggung jawab dalam memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar berjalan sesuai dengan prinsip Syariah dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip GCG.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Aladin Syariah berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang ketua dan anggota. Sepanjang tahun 2023 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan jumlah, susunan dan komposisi Dewan Pengawas Syariah, namun terdapat pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah yang telah habis masa jabatannya, sebagaimana tertuang dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023.

Adapun komposisi dan susunan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2023:

The Sharia Supervisory Board (DPS) is a board that is responsible for providing advice and suggestions to the Board of Directors as well as supervising Bank's activities so that they run in accordance with Sharia principles while always being guided by applicable laws and regulations including GCG principles.

Composition of the Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board of Bank Aladin Syariah consists of 2 (two) people consisting of a chairman and members. Throughout 2023 until this Annual Report is signed, there was no changes to the number, structure and composition of the Sharia Supervisory Board, however there was a re-appointment of the Sharia Supervisory Board whose term of office has expired, as stated in the decision of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) which will be held on June 21, 2023.

The composition and structure of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2023:

Komposisi dan Susunan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2023

Composition and Structure of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA	Ketua Chairman	<ul style="list-style-type: none"> RUPS Sirkuler tanggal 28 Mei 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023. Circular GMS on May 28, 2020 with minutes in Notarial Deed No. 149 dated May 28, 2020. Annual GMS dated June 21, 2023 which was notarized through the Deed of Meeting Decision Statement No. 12 dated July 6, 2023.
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si	Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> RUPS Sirkuler tanggal 28 Mei 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023. Circular GMS on May 28, 2020 with minutes in Notarial Deed No. 149 dated May 28, 2020. Annual GMS dated June 21, 2023 which was notarized through the Deed of Meeting Decision Statement No. 12 dated July 6, 2023.

Berkaitan dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terkait jumlah anggota DPS paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi akan dipenuhi Bank sebagaimana waktu pemberlakuan yang telah ditetapkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

In connection with the provisions contained in Article 10 of Financial Services Authority Regulation no. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units regarding the number of DPS members of at least 3 (three) people or a maximum of 50% (fifty percent) of the number of members of the Board of Directors will be fulfilled by Bank according to the implementation time that has been determined in the Financial Services Authority Regulation.



Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah disesuaikan dengan prinsip Syariah, di antaranya:

1. Sebagai perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan pada Bank;
2. Mengawasi produk dan kegiatan usaha Bank agar produk dan aktivitasnya sesuai dengan Prinsip Syariah;
3. Membuat Opini Syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan aspek syariah di Bank;
4. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
5. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
6. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
7. Melakukan reviu secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
8. Membuat laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran yang memuat hasil pelaksanaan tugas dan wewenang DPS selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain: kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi, Dewan Komisaris, DSN-MUI dan OJK. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

DPS berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan, Kebijakan GCG, AD/ART DSN-MUI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS, Bank menunjuk 1 (satu) karyawan sebagai petugas yang menjalankan fungsi *liaison officer* dan melakukan fungsi kesekretariatan serta pengelolaan arsip/administrasi bagi DPS (*Syariah Management*).

Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Keuangan Dewan Pengawas Syariah

Pada tahun 2023, seluruh anggota DPS Bank Aladin Syariah telah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, seluruh anggota DPS telah lulus *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari BI dan/atau OJK sebagaimana tertuang dalam Hasil Kelulusan *Fit and Proper Test* melalui surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah dan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No.SR-33/PB.13/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Keputusan atas Pengajuan Calon Dewan Pengawas Syariah Bank yang pada saat itu masih bernama PT Bank Maybank Syariah Indonesia, sebagaimana tersebut di atas.

Duties and Responsibilities

The Sharia Supervisory Board has duties and responsibilities that have been adapted to Sharia principles, including:

1. As a DSN-MUI representative assigned to Bank;
2. Supervise Bank's products and business activities so that the products and activities comply with Sharia Principles;
3. Create a Sharia Opinion based on requests/questions and/or findings on sharia aspects in Bank;
4. Assess and ensure compliance with Sharia Principles for operational and product guidelines issued by Bank;
5. Oversee Bank's new product development process so that it complies with Sharia Principles;
6. Request a fatwa from DSN-MUI for new Bank products for which there is no fatwa;
7. Conduct regular reviews on the fulfillment of Sharia Principles on the mechanism for collecting funds and channeling funds as well as Bank services;
8. Prepare a semi-annual report on the results of DPS supervision containing the results of the implementation of DPS duties and authority for 1 (one) semester, which includes, among other things: supervision work papers on Bank's new product development process; and supervisory working papers on Bank activities and submit these reports to the Board of Directors, Board of Commissioners, DSN-MUI and OJK. The report must be submitted to the OJK no later than 2 (two) months after the semester period in question ends.

DPS is guided by the Company's Articles of Association, GCG Policy, AD/ART DSN-MUI in carrying out its duties and responsibilities. Furthermore, to support the implementation of DPS duties, Bank appoints 1 (one) employee as an officer who carries out the function of *liaison officer* and carries out secretarial functions and archive management/administration for DPS (*Syariah Management*).

Integrity, Competence and Financial Reputation of the Sharia Supervisory Board

In 2023, all DPS members of Bank Aladin Syariah have adequate integrity, competence and financial reputation. In this regard, all DPS members have passed the fit and proper test (fit and proper test) and have obtained a Letter of Approval from BI and/or OJK as stated in the Fit and Proper Test Pass Results via letter No.12/5/DpG/DPbS dated 23 September 2010 regarding Decisions on Candidates for Members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board of Bank Brothers in the Context of Changing Business Activities to Become a Sharia Commercial Bank and approval letter from the Financial Services Authority No.SR-33/PB.13/2016 dated 9 December 2016 regarding the Decision on the Nomination of Candidates for Bank's Sharia Supervisory Board which at that time was still called PT Bank Maybank Syariah Indonesia, as mentioned above.

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota DPS Bank Aladin Syariah adalah sebagai berikut:

Concurrent Position as Member of the Sharia Supervisory Board at Other Sharia Financial Institutions

The concurrent positions held by DPS members of Bank Aladin Syariah are as follows:

Nama Name	Jabatan Lain di Luar Jabatan Anggota DPS Bank Other Positions Outside the Position of Bank DPS Member	Perusahaan Company
Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA	Anggota DPS DPS member	<ul style="list-style-type: none"> PT Pegadaian (Persero) PT FWD Insurance
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si	Ketua DPS DPS Chairman	<ul style="list-style-type: none"> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
	Anggota DPS DPS member	<ul style="list-style-type: none"> PT Indomobil Finance Syariah PT Reasuransi Syariah Indonesia

Dengan demikian, rangkap jabatan di atas telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah yang membatasi rangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah.

Thus, the above concurrent positions have fulfilled the provisions of Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 dated 29 January 2009 concerning Sharia Commercial Banks which limits concurrent positions as DPS members to a maximum of 4 (four) sharia financial institutions.

Mekanisme dan Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dalam menjalankan tugasnya, DPS diwajibkan melakukan rapat setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Adapun setiap hasil rapat akan dituangkan dalam Risalah Rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam Risalah Rapat DPS merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

Mechanism and Frequency of Sharia Supervisory Board Meetings

In carrying out its duties, DPS is required to hold meetings at least 1 (one) time in 1 (one) month. The results of each meeting will be stated in the DPS Meeting Minutes and properly documented. All DPS decisions outlined in the Minutes of DPS Meetings are joint decisions of all DPS members.

Per 31 Desember tahun 2023, DPS telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali sebagaimana terlampir berikut:

As of December 31, 2023, DPS has held 12 (twelve) meetings as attached below:

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Pengawas Syariah dalam Rapat Reasons for the absence of the Sharia Supervisory Board at the Meeting
5 April 2023 April 5, 2023	Virtual Meeting/ Online Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Update Skema Pengalihan Utang. Proposal Penggunaan Dana TBDSP untuk Program Baznas. Update Komitmen atas Temuan Hasil Uji Petik DPS Per 31 Maret 2023. Update the Debt Transfer Scheme. Proposal for the Use of TBDSP Funds for the Baznas Program. Updated Commitment on the Findings of DPS Pick Test Results as of March 31, 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si 	-
10 Mei 2023 May 10, 2023	Virtual Meeting/ Online Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Skema Pembiayaan Kendaraan Bermotor Menggunakan Akad Qardh dan MMQ. Produk Dompot Ekstra. Program Aktivasi Nasabah Aladin. Motor Vehicle Financing Scheme Using Qardh and MMQ Agreements. Extra Wallet Products. Aladin Customer Activation Program. 	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si 	-



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Pengawas Syariah dalam Rapat Reasons for the absence of the Sharia Supervisory Board at the Meeting
22 Juni 2023 June 22, 2023	Virtual Meeting/ Online Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Perhitungan Denda Keterlambatan (<i>Ta'zir</i>). Pelaksanaan Akad Invoice Financing dalam SAT B2B Website. Penyelesaian Sengketa Syariah dalam Ruang Lingkup Peradilan Umum. Laporan Komitmen Hasil Uji Petik DPS Q4 2022 Per Juni 2023. Changes in the Calculation of Late Fines (<i>Ta'zir</i>). Implementation of the Invoice Financing Agreement on the SAT B2B Website. Sharia Dispute Resolution within the Scope of General Courts. Commitment Report on DPS Q4 2022 Picking Test Results as of June 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si 	-
21 Juli 2023 July 21, 2023	Virtual Meeting/ Online Meeting	Aladin Gen – Tabungan Anak dan Remaja. Aladin Gen – Children and Youth Savings.	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si 	-
9 Agustus 2023 August 9, 2023	Virtual Meeting/ Online Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Tabungan Ala Impian Tematik. Pemberian Bagi Hasil Untuk Penutupan Rekening CASA. Thematic Dream Style Savings. Provision of Profit Sharing for Closing CASA Accounts. 	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si 	-
5 September 2023 September 5, 2023	Virtual Meeting/ Online Meeting	Perubahan Nisbah Ala Impian dan Metode <i>Income Smoothing</i> . Dream Style Ratio Changes and Income Smoothing Methods.	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si 	-
30 Oktober 2023 October 30, 2023	Virtual Meeting/ Online Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Uji Petik DPS Periode Oktober 2023. Penyampaian Undangan Sosialisasi Panduan Produk <i>Murabahah</i> OJK. DPS Pick Test Results Report for the October 2023 Period. Submission of Invitations for the Socialization of OJK Murabahah Product Guidelines. 	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si 	-
20 November 2023 November 20, 2023	Virtual Meeting/ Online Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Produk Ala Deposito. Produk Pembiayaan Pensiun. Permohonan Opini DPS atas Temuan OJK Aspek Syariah. Deposit Style Products. Pension Financing Products. Request for DPS Opinion on OJK Findings on Sharia Aspects. 	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si 	-
6 Desember 2023 December 6, 2023	Virtual Meeting/ Online Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko. Dompot Ekstra Fitur Transaksi dan Tarik Tunai. Metode Perhitungan Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo. Usulan Konsep Restrukturisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i>. Update Informasi KHP OJK Terkait Aspek Syariah. Evaluation of Risk Management Policies. Extra Wallet Transaction and Cash Withdrawal Features. Calculation method for repayment of Murabahah financing debt before maturity. Proposed Murabahah Financing Restructuring Concept. Updated OJK KHP Information Regarding Sharia Aspects. 	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si 	-

Rekapitulasi kehadiran Dewan Pengawas Syariah pada rapat internal dapat dilihat di bawah ini.

A recapitulation of the Attendance of the Sharia Supervisory Board at internal meetings can be seen below.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Pengawas Syariah pada Rapat Internal Recapitulation of Sharia Supervisory Board Attendance at Internal Meetings

Dewan Komisaris Board of Commissioner	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA (Ketua DPS) (DPS Chairman)	12	12	100%
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si (Anggota DPS) (DPS Member)	12	12	100%
Rata-Rata Average			100%

Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, wajib disampaikan kepada manajemen Bank setiap 6 (enam) bulan sekali. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I 2023 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S.037.BOD/08.2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan Laporan Dewan Pengawas Syariah Semester II 2023 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S.047.BOD/02.2024 tanggal 28 Februari 2024.

Aktivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Syariah Compliance Officer yang sudah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman memadai tentang operasional perbankan syariah.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan atas produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank. Dari pengawasan tersebut, produk-produk Bank secara umum telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Syariah Compliance Officer juga telah melakukan kajian dan pembahasan atas usulan produk/aktivitas baru sebagai berikut:

1. Produk Pembiayaan Investasi
2. Produk Dompot Ekstra
3. Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Karyawan SAT dan Group
4. Produk Ala Impian Qurban
5. Produk Deposito Ala Bisnis Harian
6. Produk Ala Gen
7. Produk QRIS MPM dan CPM

Produk/aktivitas baru tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI.

Implementation of the Duties of the Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board Supervision Report must be submitted to Bank management every 6 (six) months. Next, the report is submitted to DSN-MUI and the Financial Services Authority. The Sharia Supervisory Board's Supervision Report for Semester I 2023 has been submitted to the Financial Services Authority via Letter No. S.037.BOD/08.2023 dated August 31, 2023 and the Report of the Sharia Supervisory Board Semester II 2023 have been submitted to the Financial Services Authority via Letter No. S.047.BOD/02.2024 dated 28 February 2024.

The supervisory activities of the Sharia Supervisory Board include supervision of the implementation of sharia principles in fund collection and distribution activities as well as service delivery. In carrying out supervision, the Sharia Supervisory Board is assisted by a Sharia Compliance Officer who already has adequate knowledge and/or understanding of sharia banking operations.

Throughout 2023, the Sharia Supervisory Board will supervise fund collection products, fund distribution and Bank services. From this supervision, Bank's products are generally in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI).

The Sharia Supervisory Board, assisted by the Sharia Compliance Officer, has also conducted studies and discussions on proposed new products/activities as follows:

1. Investment Financing Products
2. Extra Wallet Products
3. Motor Vehicle Financing Products for SAT and Group Employees
4. Qurban Dream Style Products
5. Daily Business Style Deposit Products
6. Ala Gen Products
7. QRIS MPM and CPM products

The new product/activity is in accordance with and does not conflict with sharia principles as stipulated in the DSN-MUI Fatwa.



Direksi

Board Of Directors

Direksi adalah organ GCG yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan atas Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank Aladin Syariah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam hal ini, Direksi dapat mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta mengelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, Anggota Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Kriteria Direksi

Anggota Direksi Bank merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank. Berikut adalah kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iv) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - v) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

The Board of Directors is a GCG organ that is tasked and collectively responsible for managing Bank for the interests and objectives of Bank Aladin Syariah in accordance with the provisions of Bank's Articles of Association and implementing GCG at all levels or levels of the organization. In this case, the Board of Directors can represent Bank, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association and manage the company as intended in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In addition, members of the Board of Directors are required to implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, accountability and fairness.

Board of Directors' Criteria

Members of Bank's Board of Directors are individuals who meet the criteria and requirements as stated in Bank's Articles of Association. The following are the criteria or requirements that must be met by someone to serve as a member of the Company's Board of Directors:

1. Have good morals, morals and integrity;
2. Capable of carrying out legal actions;
3. Within 5 (five) years before appointment and during office:
 - a. Never declared bankruptcy;
 - b. Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - c. Never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector; And
 - d. Never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners during his tenure:
 - i) Never held an annual GMS;
 - ii) His accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never provided his accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS;
 - iii) Has ever caused a company that obtained a permit, approval or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or Financial Statements to the Financial Services Authority;
 - iv) Have a commitment to comply with laws and regulations; And
 - v) Have knowledge and/or expertise in the field required by the Issuer or Public Company.

Ketentuan Masa Jabatan Direksi

Sebagaimana yang dimuat dalam Anggaran Dasar Bank, Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Adapun jabatan anggota Dewan Komisaris dapat berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
4. Pengunduran dirinya efektif;
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah, Komposisi, Susunan dan Dasar Pengangkatan Direksi di Sepanjang Tahun 2023

Direksi Bank Aladin Syariah terdiri dari 4 (empat) anggota, di mana komposisi Direksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Per 31 Desember 2023 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, baik jumlah, komposisi maupun susunan Direksi tidak mengalami perubahan, namun terdapat pengangkatan kembali terhadap satu orang Direksi yang telah habis masa jabatannya, sebagaimana tertuang dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023. Di mana para pemegang saham dalam RUPS Tahunan tersebut, memutuskan untuk mengangkat kembali Baiq Nadea Dzurriatin sebagai Direktur Kepatuhan Bank.

Adapun komposisi dan susunan Direksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2023 Composition and Structure of the Board of Directors as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur President Director	RUPS Luar Biasa tanggal 7 April 2021 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 11 tanggal 7 April 2021. Extraordinary GMS dated April 7, 2021 as stated in the Deed of Extraordinary GMS Resolution Statement No. 11 April 7, 2021.
Firdila Sari	Direktur Director	RUPS Luar Biasa tanggal 7 April 2021 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 11 tanggal 7 April 2021. Extraordinary GMS dated April 7, 2021 as stated in the Deed of Extraordinary GMS Resolution Statement No. 11 April 7, 2021.

Terms of Office for Board of Directors

As stated in Bank's Articles of Association, Directors are appointed by the GMS for a period starting from the date of the GMS that appointed them and ending at the close of the third GMS after the date of appointment without reducing the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends.

The position of a member of the Board of Commissioners may end if:

1. Passed Away;
2. His term of office ends;
3. Dismissed based on the GMS;
4. His resignation is effective;
5. No longer meets applicable statutory requirements.

Number, Composition, Structure and Basis for Appointment of Directors Throughout 2023

The Board of Directors of Bank Aladin Syariah consists of 4 (four) members, which the composition of the Board of Directors is in accordance with the provisions in Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

As of December 31, 2023 until this Annual Report is signed, the number, composition and structure of the Board of Directors has not changed, however there has been a re-appointment of one Director whose term of office has expired, as stated in the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the Fiscal Year 2022 which will be held on June 21, 2023. The shareholders at the Annual GMS decided to reappoint Baiq Nadea Dzurriatin as Bank Director of Compliance.

The composition and structure of the Board of Directors as of December 31, 2023 is as follows:



Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2023 Composition and Structure of the Board of Directors as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Mayang Ekaputri	Direktur Director	RUPS Luar Biasa tanggal 10 Februari 2022 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa melalui Akta No. 56 tanggal 21 Februari 2022. Extraordinary GMS dated February 10, 2022 as stated in the Deed of Statement of Extraordinary GMS Resolutions through Deed No. 56 dated February 21, 2022.
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	<ul style="list-style-type: none"> RUPS Sirkuler tanggal 31 Januari 2020 yang telah diaktakan melalui Akta No. 19 tanggal 31 Januari 2020. RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 12 tanggal 6 Juli 2023. Circular GMS dated January 31, 2020, which was notarized through Deed No. 19 dated January 31, 2020. Annual GMS dated June 21, 2023 as stated in the Deed of Annual GMS Resolution Statement No. 12 dated July 6, 2023.

Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Keuangan Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank telah memenuhi beberapa kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

- Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit & Proper Test* serta telah memperoleh surat persetujuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebagai berikut:
 - Dyota Mahottama Marsudi (Presiden Direktur), hasil kelulusan *Fit & Proper Test* berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep 166/D.03/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Dyota Mahottama Marsudi Selaku Calon Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk.
 - Firdila Sari (Direktur Digital Banking), hasil kelulusan *Fit & Proper Test* berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep 167/D.03/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Firdila Sari Selaku Calon Direktur Digital Banking PT Bank Aladin Syariah Tbk.
 - Mayang Ekaputri (Direktur), dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-83/D.03/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Mayang Ekaputri Selaku Calon Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk.
 - Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan), hasil kelulusan *Fit & Proper Test* Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia No. 12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan Atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah di mana Ibu Baiq Nadea Dzurriatin disetujui oleh Bank Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Maybank Syariah Indonesia.

Integrity, Competence and Financial Reputation of the Board of Directors

All members of Bank's Board of Directors have fulfilled several criteria in accordance with applicable regulations, including:

- The President Director comes from a party who is independent of the controlling shareholder.
- All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia.
- All members of the Board of Directors have passed the *Fit & Proper Test* and have obtained a letter of approval from Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority, namely as follows:
 - Dyota Mahottama Marsudi (President Director), the results of passing the *Fit & Proper Test* are based on a copy of the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number Kep 166/D.03/2021 dated November 11, 2021 regarding the Results of the *Fit and Proper Test* of Mr. Dyota Mahottama Marsudi as Candidate for President Director of PT Bank Aladin Syariah Tbk.
 - Firdila Sari (Director of Digital Banking), the results of passing the *Fit & Proper Test* are based on a copy of the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number Kep 167/D.03/2021 dated November 11, 2021 regarding the Results of the *Fit and Proper Test* of Ms. Firdila Sari as Candidate for Digital Banking Director of PT Bank Aladin Syariah Tbk.
 - Mayang Ekaputri (Director), was declared to have passed the *fit and proper test* by the Financial Services Authority (OJK) as stated in the OJK Board of Commissioners Decree No. Kep-83/D.03/2022 dated June 10, 2022 concerning the Results of the Capability and *Proper Test* Assessment of Ms. Mayang Ekaputri as Candidate for Director of PT Bank Aladin Syariah Tbk.
 - Baiq Nadea Dzurriatin (Compliance Director), results of passing Bank Indonesia *Fit & Proper Test* based on Bank Indonesia letter No. 12/5/DpG/DPbS dated 23 September 2010 concerning Decisions on Candidates for Members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board of Bank Brothers in the Context of Changing Business Activities to become a Sharia Commercial Bank where Mrs. Baiq Nadea Dzurriatin was approved by Bank Indonesia as Compliance Director of PT Bank Maybank Syariah Indonesia.

4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang perbankan.
5. Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai berikut:
 - a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
 - b. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi.
 - d. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan.
7. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja Direksi

Bank Aladin Syariah telah memiliki Pedoman Kerja (*Board Manual*) Direksi, yakni Standar Prosedur Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Aladin Syariah Tbk yang terakhir diperbarui pada 28 Juli 2023. Pedoman Kerja Direksi ini merupakan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank telah memiliki ketentuan internal terkait tata tertib Direksi dan Dewan Komisaris yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Organisasi dan Kewenangan
3. Pelaksanaan Waktu Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
4. Ketentuan Alternate
5. Ketentuan Rapat
6. Keterbukaan Informasi
7. Kode Etik Dewan Komisaris dan Direksi
8. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi
9. Perjalanan Dinas Dewan Komisaris dan Direksi
10. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi bertanggung jawab penuh menjalankan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tercantum dalam Anggaran Dasar, pembagian dan tugas dan tanggung jawab Direksi (job description), Terms of Reference (TOR) Rapat BOD, dan Kebijakan GCG.

Board of Directors' Work Guidelines

Bank Aladin Syariah has a Board Manual for Board of Directors, namely the Standard Procedures for the Board of Commissioners and Directors of PT Bank Aladin Syariah Tbk, which was last updated on July 28 2023. This Board of Directors Work Manual is a reference for Directors in carrying out their duties and responsibilities effectively, optimal, transparent and in accordance with applicable laws and regulations. Bank has internal provisions related to the rules of conduct for the Board of Directors and Board of Commissioners which regulate the following matters:

1. Introduction
2. Organization and Authority
3. Implementation of Working Hours for the Board of Commissioners and Directors
4. Alternate Terms
5. Meeting Terms
6. Information Disclosure
7. Code of Conducts for the Board of Commissioners and Directors
8. Increasing the Competency of the Board of Commissioners and Directors
9. Official Travel of the Board of Commissioners and Directors
10. Closing

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Based on the Articles of Association, the Board of Directors is fully responsible for carrying out its duties for the benefit of Bank in achieving its aims and objectives based on prudential principles and Sharia Principles. The Board of Directors also implements GCG principles in every Bank business activity at all levels and levels of the organization. The Board of Directors has work guidelines and rules listed in the Articles of Association, division and duties and responsibilities of the Board of Directors (job description), Terms of Reference (TOR) for BOD Meetings, and GCG Policy.



Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi antara lain:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Direksi berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Direksi menerapkan tata kelola yang baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
5. Dalam rangka melaksanakan Good Corporate Governance, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
 - a. Audit Intern (SKAI).
 - b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
 - c. Kepatuhan.

Fungsi-fungsi tersebut telah beroperasi secara independen dan terpisah dari unit operasional lainnya.

6. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, Direksi wajib:
 - a. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; dan
 - b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk proyek bersifat khusus;
 - b. Berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas;
 - c. Dilaksanakan oleh pihak independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud pada poin no 1);
 - d. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank; dan
 - e. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.
9. Berkaitan dengan tindakan yang merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan yang dimaksud di dalam peraturan OJK, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan OJK.
10. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan regulator, audit intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor eksternal.

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors includes, among others:

1. The Board of Directors is tasked with carrying out and being responsible for managing Bank for Bank's interests in accordance with Bank's aims and objectives as stipulated in the provisions of statutory regulations, articles of association and GMS Resolutions.
2. The Board of Directors is obliged to carry out their duties, authority and responsibilities in good faith and with the principle of prudence.
3. The Board of Directors has the authority to represent Bank in accordance with the provisions of laws and regulations, the articles of association and GMS Resolutions.
4. The Board of Directors implements good governance at Bank, risk management and compliance in an integrated manner that is adapted to the latest developments in Banking ecosystem and is supported by digitalization and technological innovation.
5. In order to implement Good Corporate Governance, the Board of Directors must have at least the following functions:
 - a. Internal Audit (SKAI).
 - b. Risk Management and Risk Management Committee.
 - c. Compliance.

These functions have operated independently and separately from other operational units.

6. The Board of Directors must disclose to employees regarding Bank's strategic internal policies in the field of personnel.
7. In managing data and information related to Bank, the Board of Directors is obliged to:
 - a. Own and provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board; And
 - b. Carry out data and information management in accordance with good governance and statutory provisions.
8. The Board of Directors may only use the services of consultants, advisors, or equivalent as long as they meet the following requirements:
 - a. For special projects;
 - b. Based on a clear employment contract;
 - c. Carried out by an independent party who has certain technical knowledge with adequate skill qualification standards to work on special projects as referred to in point no. 1);
 - d. Carried out by parties who do not hold structural positions at Bank; And
 - e. Carried out by parties who do not have the authority to make Bank operational decisions.
9. In relation to actions that constitute material transactions and/or conflicts of interest as referred to in OJK regulations, the Board of Directors must fulfill the requirements specified in OJK regulations.
10. The Board of Directors is obliged to follow up on audit findings and/or recommendations from the results of supervision by the regulator, internal audit, Sharia Supervisory Board and/or external auditors.

11. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
12. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
13. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
14. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan. Dalam kerangka ini Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, dan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
15. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank, antara lain melalui forum town-hall dan rapat staf yang diadakan secara reguler.
16. Direksi telah menyediakan program-program pelatihan bagi seluruh karyawan dalam rangka peningkatan keahlian dan kemampuan karyawan secara berkelanjutan.

Wewenang Direksi

Di samping tugas dan tanggung jawab Direksi, Bank juga telah mengatur kewenangan Direksi pada ketentuan internal yang mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Bank sejumlah uang yang nilainya melampaui kewenangan Direksi yang dari waktu ke waktu akan ditentukan secara tertulis oleh Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk mengambil uang Bank di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap.
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Bank.
 - e. Mengikat Bank sebagai penjamin.
2. Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan dari RUPS:
 - a. Mengalihkan kekayaan Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Bank yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Bank dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

11. The Board of Directors is obliged to be accountable for the implementation of their duties to shareholders through the GMS.
12. Members of the Board of Directors are prohibited from granting general power of attorney to other parties which results in the transfer of the duties and functions of the Board of Directors.
13. Every decision of the Board of Directors is binding and the responsibility of all members of the Board of Directors.
14. The Board of Directors is responsible for the implementation of Risk Management policies and risk exposure taken by Bank as a whole. Within this framework, the Board of Directors has developed and established a transaction approval mechanism, evaluated and decided on transactions that require approval from the Board of Directors, and developed a risk management culture at all levels of the organization.
15. The Board of Directors has prepared a realistic, comprehensive and measurable Bank Business Plan (RBB) by considering the principles of prudence and being responsive to internal and external changes. The Board of Directors has also communicated the RBB to Bank's shareholders and all levels of organizations in Bank, including through town-hall forums and staff meetings which are held regularly.
16. The Board of Directors has provided training programs for all employees in order to continuously improve employee skills and abilities.

Board of Directors Authorities

In addition to the duties and responsibilities of the Board of Directors, Bank has also regulated the authority of the Board of Directors in internal regulations which regulate several matters as follows:

1. Authority of the Board of Directors which must be approved by the Board of Commissioners:
 - a. Borrowing or lending money on behalf of Bank in an amount whose value exceeds the authority of the Board of Directors which will from time to time be determined in writing by the Board of Commissioners (in this case it does not include taking Bank money at Bank).
 - b. Establishing a business or participating in other companies both at home and abroad.
 - c. Purchasing or otherwise obtaining rights to fixed assets.
 - d. Selling or otherwise relinquishing rights to fixed assets and companies or encumbering Bank's assets.
 - e. Binding Bank as guarantor.
2. Authority of the Board of Directors which must obtain approval from the GMS:
 - a. Transfer Bank assets within a period of 1 (one) Fiscal Year; or
 - b. Serve as collateral for debts of Bank's assets which constitute more than 50% of the total net assets of Bank in one transaction or several transactions that stand alone or are related to each other;



- c. Harus mendapat persetujuan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Must obtain approval from the GMS which meets the attendance quorum of at least $\frac{3}{4}$ (three-quarters) of the total shares with valid voting rights and is approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-quarters) of the total shares with voting rights present at the GMS.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Berikut adalah ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing Direksi, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Scope of Work and Responsibilities of Each Director

The following is the scope of work and responsibilities of each Director, as explained below.

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur President Director	Membawahi seluruh direktorat serta membawahi unit kerja yang berada langsung di bawahnya yaitu: Anti Fraud Management dan Internal Audit Supervises all directorates and supervises the work units directly below them, namely: Anti Fraud Management and Internal Audit
Firdila Sari	Direktur Director	Membawahi Unit Kerja sebagai berikut: Information & Technology, Digital Product Management, Digital Product Design, Digital Product Financing, Commercial dan Product Performance Supervises the following Work Units: Information & Technology, Digital Product Management, Digital Product Design, Digital Product Financing, Commercial and Product Performance
Mayang Ekaputri	Direktur Director	Membawahi Unit Kerja sebagai berikut: Treasury, Corporate Secretary & Investor Relations, Business Finance & Corporate Planning, Sustainability dan Central Finance Supervises the following Work Units: Treasury, Corporate Secretary & Investor Relations, Business Finance & Corporate Planning, Sustainability and Central Finance
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	Membawahi Unit Kerja sebagai berikut: Business Risk Control, Compliance & Legal, Enterprise & Operational Risk Management, Risk Analytic dan Financing Risk Supervises the following Work Units: Business Risk Control, Compliance & Legal, Enterprise & Operational Risk Management, Risk Analytics and Financing Risk Management

Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, meliputi jenis dan jumlah saham pada Bank, maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri. Anggota Direksi, baik secara sendiri atau bersama sama, dilarang memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.

Rangkap Jabatan

Bank telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan anggota Direksi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Selama tahun 2023 tidak ada Direksi yang memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/instansi lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan. Berikut merupakan tabel rangkap jabatan dari anggota Direksi Bank:

Board of Directors' Share Ownership

All Directors do not have share ownership that reaches 5% (five percent) or more of the paid-up capital, including the type and number of shares in Bank, as well as banks and other companies domiciled at home or abroad. Members of the Board of Directors, either individually or together, are prohibited from owning shares of more than 25% of the paid-up capital in other companies.

Concurrent Position

Bank has fulfilled the provisions for concurrent positions for members of the Board of Directors as stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks. During 2023, no Directors will hold concurrent positions in other companies/agencies which could give rise to potential conflicts of interest. The following is a table of concurrent positions of members of Bank's Board of Directors:

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Companies/Agencies	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Company/Other Agency
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur President Director	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain Do not hold positions in other companies/ agencies	-
Firdila Sari	Direktur Director	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain Do not hold positions in other companies/ agencies	-
Mayang Ekaputri	Direktur Director	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain Do not hold positions in other companies/ agencies	-
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain Do not hold positions in other companies/ agencies	-

Hubungan Afiliasi Direksi

Dalam pemenuhan pelaksanaan GCG anggota Direksi mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih;
2. Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank maupun pada Bank dan/atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri.
3. Hubungan Keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
4. Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Berkaitan dengan poin b dan c di atas dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Board of Directors' Affiliate Relationship

In fulfilling the implementation of GCG, members of the Board of Directors expressed several things as follows:

3. Share ownership reaching 5% (five percent) or more;
4. All members of the Board of Directors do not have share ownership that reaches 5% (five percent) or more of the paid-up capital, including the type and number of shares in Bank or in other Banks and/or companies domiciled at home or abroad.
5. Financial relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders of Bank; And
6. Family relationships up to the second degree with other Directors, members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders of Bank.

Regarding points b and c above, it can be seen in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With		
		Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur President Director	x	x	x	x	x	x
Firdila Sari	Direktur Director	x	x	x	x	x	x
Mayang Ekaputri	Direktur Director						
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	x	x	x	x	x	x

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Anggota Direksi yang baru pertama kali menjabat di Bank Aladin Syariah wajib mengikuti program pengenalan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan efektivitas kerja Direksi. Adapun materi yang diberikan pada program pengenalan tersebut meliputi

Orientation Program for New Directors

Members of the Board of Directors who are serving for the first time at Bank Aladin Syariah are required to take part in an induction program which aims to improve the function and effectiveness of the work of the Board of Directors. The material provided in the introduction



presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Bank, perkenalan dengan para pimpinan dan pegawai Bank serta program lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai pelaksana program pengenalan bagi Direksi yang baru diangkat, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam menyiapkan materi program pengenalan yang mencakup Program Pengenalan Bank berkaitan dengan:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam Bank;
2. Visi, misi, strategi, risiko, posisi kompetitif, kinerja keuangan dan operasional;
3. Kewenangan Komite, Audit Internal dan Eksternal dan Sistem Pengendalian Internal.

Di tahun 2023, Bank Aladin Syariah tidak melaksanakan program orientasi atau pengenalan Bank dikarenakan tidak terdapat Direksi baru.

Program Peningkatan Kompetensi Direksi

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kapabilitas serta fungsi Direksi, Bank Aladin Syariah senantiasa mengikutsertakan Direksi dalam program peningkatan kompetensi baik berupa seminar atau pelatihan. Adapun kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

program includes presentations, meetings or visits to Bank facilities, introductions to Bank leaders and employees and other programs as needed.

As implementer of the introduction program for newly appointed Directors, the Corporate Secretary is responsible for preparing introduction program materials which include Bank Introduction Program relating to:

1. Implementation of GCG principles within Bank;
2. Vision, mission, strategy, risks, competitive position, financial and operational performance;
3. Committee Authority, Internal and External Audit and Internal Control System.

In 2023, Bank Aladin Syariah will not carry out an orientation or introduction program to Bank because there are no new Directors.

Board of Directors Competency Improvement Program

In order to improve and optimize the capabilities and functions of the Board of Directors, Bank Aladin Syariah always involves the Board of Directors in competency improvement programs in the form of seminars or training. The competency improvement activities that the Board of Directors participated in throughout 2023 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Dyota Mahottama Marsudi (President Director)	<i>Advanced Sharia Banking</i>	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Knowing and understanding the transaction philosophy at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	Jakarta, 3 Februari dan 1 Maret 2023 Jakarta, February 3 and March 1, 2023	Yayasan Muamalat Institute
	<i>Excellent Public Speaking Skills</i>	Meningkatkan kemampuan dalam memberikan public statement Improving the ability to make public statements	Jakarta, 8 September 2023 Jakarta, September 8, 2023	PT Trikata Esa Karsa (TALKINC)
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 Level 4 Banking Risk Management Certification Refreshment	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security	Jakarta, 14 Maret 2023 Jakarta, March 14, 2023	PT Gema Prima Solusi
	<i>Sustainable Finance</i>	Memahami update dan issue terkini mengenai praktik keuangan berkelanjutan Understanding the latest updates and issues regarding sustainable financial practices	Jakarta, 17 Februari 2023 Jakarta, February 17, 2023	Trisakti Sustainability Center
	<i>Team Building Management</i>	Meningkatkan kolaborasi di internal perusahaan Increasing collaboration within the company	Bali, 27 Agustus 2023 Bali, August 27, 2023	Widya Nayati
	<i>Coaching with Action Coach</i>	Meningkatkan kompetensi diri baik secara personal maupun profesional Increasing self-competence both personally and professionally	Jakarta, 27 Oktober 2023-27 April 2024 Jakarta, October 27, 2023-April 27, 2024	PT Ide Cemerlang Hasil Gemilang PT Ide Cemerlang Action Coach

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Baiq Nadea Dzurriatin (Compliance Director)	<i>Advanced Sharia Banking</i>	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Knowing and understanding the transaction philosophy at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	Jakarta, 3 Februari dan 1 Maret 2023 Jakarta, February 3 and March 1, 2023	Yayasan Muamalat Institute
	<i>Corporate Action</i>	Menambah pengetahuan mengenai penerbitan saham dan memperkuat struktur modal perseroan Increasing knowledge regarding share issuance and strengthening the Company's capital structure	Jakarta, 29-30 Mei 2023 Jakarta, May 29-30, 2023	Aditya Martowardoyo (CIMB Sekuritas) & Freddy Karyadi (ABNR)
	<i>Excellent Public Speaking Skills</i>	Meningkatkan kemampuan dalam memberikan public statement Improving the ability to make public statements	Jakarta, 8 September 2023 Jakarta, September 8, 2023	PT Trikata Esa Karsa (TALKINC)
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 Level 4 Banking Risk Management Certification Refreshment	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security	Jakarta, 6 Juni 2023 Jakarta, June 6, 2023	PT Gema Prima Solusi
	<i>Sustainable Finance</i>	Memahami update dan issue terkini mengenai praktik keuangan berkelanjutan Understanding the latest updates and issues regarding sustainable financial practices	Jakarta, 17 Februari 2023 Jakarta, February 17, 2023	Trisakti Sustainability Center
	<i>Team Building Management</i>	Meningkatkan kolaborasi di internal perusahaan Increasing collaboration within the company	Bali, 27 Agustus 2023 Bali, August 27, 2023	Widya Nayati
	Webinar FKDKP Batch 2/2023 dengan tema "Implementation Of Personal Data Protection Laws and Challenges To Their Implementation" FKDKP Batch 2/2023 Webinar with the theme "Implementation of Personal Data Protection Laws and Challenges To Their Implementation"	Mengetahui informasi dan tantangan implementasi dari UU no 27 th 2022 tentang perlindungan data pribadi Knowing the information and implementation challenges of Law No. 27 of 2022 concerning personal data protection	Jakarta, 12 Juli 2023 Jakarta, July 12, 2023	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
	<i>Coaching with Action Coach</i>	Meningkatkan kompetensi diri baik secara personal maupun profesional Increasing self-competence both personally and professionally	Jakarta, 27 Oktober 2023-27 April 2024 Jakarta, October 27, 2023-April 27, 2024	PT Ide Cemerlang Hasil Gemilang PT Ide Cemerlang Action Coach
Firdila Sari (Digital Banking Director)	<i>Advanced Sharia Banking</i>	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Knowing and understanding the transaction philosophy at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	Jakarta, 3 Februari dan 1 Maret 2023 Jakarta, February 3 and March 1, 2023	Yayasan Muamalat Institute
	<i>Corporate Action</i>	Menambah pengetahuan mengenai penerbitan saham dan memperkuat struktur modal perseroan Increasing knowledge regarding share issuance and strengthening the Company's capital structure	Jakarta, 29-30 Mei 2023 Jakarta, May 29-30, 2023	Aditya Martowardoyo (CIMB Sekuritas) & Freddy Karyadi (ABNR)
	<i>Excellent Public Speaking Skills</i>	Meningkatkan kemampuan dalam memberikan public statement Improving the ability to make public statements	Jakarta, 8 September 2023 Jakarta, September 8, 2023	PT Trikata Esa Karsa (TALKINC)
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 Level 4 Banking Risk Management Certification Refreshment	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security	Jakarta, 14 Maret 2023 Jakarta, March 14, 2023	PT Gema Prima Solusi
	<i>Sustainable Finance</i>	Memahami update dan issue terkini mengenai praktik keuangan berkelanjutan Understanding the latest updates and issues regarding sustainable financial practices	Jakarta, 17 Februari 2023 Jakarta, February 17, 2023	Trisakti Sustainability Center
	<i>Team Building Management</i>	Meningkatkan kolaborasi di internal perusahaan Increasing collaboration within the company	Bali, 27 Agustus 2023 Bali, August 27, 2023	Widya Nayati



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
	Webinar FKDKP Batch 4/2023 dengan tema "Peluang, Harapan Dan Tantangan Perekonomian Nasional" FKDKP Batch 4/2023 Webinar with the theme "Opportunities, Hopes and Challenges for the National Economy"	Mengetahui tantangan perekonomian Indonesia Understanding the challenges of the Indonesian economy	Jakarta, 10 Oktober 2023 Jakarta, October 10, 2023	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) Banking Compliance Director Communication Forum (FKDKP)
	<i>Coaching with Action Coach</i>	Meningkatkan kompetensi diri baik secara personal maupun profesional Increasing self-competence both personally and professionally	Jakarta, 27 Oktober 2023-27 April 2024 Jakarta, October 27, 2023-April 27, 2024	PT Ide Cemerlang Hasil Gemilang PT Ide Cemerlang Action Coach
Mayang Ekaputri (Finance Director)	<i>Advanced Sharia Banking</i>	Mengetahui dan paham filosofi transaksi di Bank Syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, birokratis dan akademis Knowing and understanding the transaction philosophy at Sharia Banks from the product side to operational, bureaucratic and academic management	Jakarta, 3 Februari dan 1 Maret 2023 Jakarta, February 3, and March 1, 2023	Yayasan Muamalat Institute
	<i>Corporate Action</i>	Menambah pengetahuan mengenai penerbitan saham dan memperkuat struktur modal perseroan Increasing knowledge regarding share issuance and strengthening the Company's capital structure	Jakarta, 29-30 Mei 2023 Jakarta, May 29-30, 2023	Aditya Martowardoyo (CIMB Sekuritas) & Freddy Karyadi (ABNR)
	<i>Excellent Public Speaking Skills</i>	Meningkatkan kemampuan dalam memberikan public statement Improving the ability to make public statements	Jakarta, 8 September 2023 Jakarta, September 8, 2023	PT Trikata Esa Karsa (TALKINC)
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 Level 4 Banking Risk Management Certification Refreshment	Melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis Mitigating or tracking sources that have the potential to threaten business productivity and security	Jakarta, 13 Desember 2023 Jakarta, December 13, 2023	Yayasan Muamalat Institute
	<i>Sustainable Finance</i>	Memahami update dan issue terkini mengenai praktik keuangan berkelanjutan Understanding the latest updates and issues regarding sustainable financial practices	Jakarta, 17 Februari 2023 Jakarta, February 17, 2023	Trisakti Sustainability Center
	<i>Team Building Management</i>	Meningkatkan kolaborasi di internal perusahaan Increasing collaboration within the company	Bali, 27 Agustus 2023 Bali, August 27, 2023	Widya Nayati
	<i>Coaching with Action Coach</i>	Meningkatkan kompetensi diri baik secara personal maupun profesional Increasing self-competence both personally and professionally	Jakarta, 27 Oktober 2023-27 April 2024 Jakarta, October 27, 2023-April 27, 2024	PT Ide Cemerlang Hasil Gemilang PT Ide Cemerlang Action Coach

Pelaksanaan Tugas Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi antara lain:

- Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi telah membentuk fungsi-fungsi:
 - Audit Intern (SKAI).
 - Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
 - Kepatuhan.

Fungsi-fungsi tersebut telah beroperasi secara independen dan terpisah dari unit operasional lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut ditetapkan dalam peraturan internal Bank.
- Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan. Dalam kerangka ini Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi,

Implementation of Board of Directors' Duties

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors includes, among others:

- In order to implement GCG, the Board of Directors has established the following functions:
 - Internal Audit (SKAI).
 - Risk Management and Risk Management Committee.
 - Compliance.

These functions have operated independently and separately from other operational units. Furthermore, the implementation of these functions is stipulated in Bank's internal regulations.
- The Board of Directors is responsible for the implementation of Risk Management policies and risk exposure taken by Bank as a whole. Within this framework, the Board of Directors has developed and established a transaction approval mechanism, evaluated and decided on transactions that require approval from

dan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.

3. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank, antara lain melalui forum *town-hall* dan rapat staf yang diadakan secara reguler.
4. Direksi telah menindaklanjuti dan memonitor setiap hasil temuan dan rekomendasi dari SKAI, audit eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
5. Direksi telah menyediakan program-program pelatihan bagi seluruh karyawan dalam rangka peningkatan keahlian dan kemampuan karyawan secara berkelanjutan.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi

Dasar penilaian terhadap Komite di bawah Direksi adalah dengan mempertimbangkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam rencana kerja dan dilaporkan kepada Direksi dalam laporan komite. Sepanjang tahun 2023, Direksi menilai bahwa Komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik, serta memberikan dukungan yang positif dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pengurusan oleh Direksi.

the Board of Directors, and developed a risk management culture at all levels of the organization.

3. The Board of Directors has prepared a realistic, comprehensive and measurable Bank Business Plan (RBB) by considering the principles of prudence and being responsive to internal and external changes. The Board of Directors has also communicated the RBB to Bank's shareholders and all levels of organizations in Bank, including through town-hall forums and staff meetings which are held regularly.
4. The Board of Directors has followed up and monitored every finding and recommendation from SKAI, external audits, and results of supervision by the Financial Services Authority, Sharia Supervisory Board, and/or results of supervision by other authorities.
5. The Board of Directors has provided training programs for all employees in order to continuously improve employee skills and abilities.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Directors

The basis for evaluating committees under the Board of Directors is to consider the realization and completion of the work program stated in the work plan and reported to the Board of Directors in the committee report. Throughout 2023, the Board of Directors assesses that the Committees under the Board of Directors have carried out their respective duties and responsibilities well, as well as providing positive support in the implementation of management and management functions by the Board of Directors.



Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information Related to The Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2023, Bank Aladin Syariah belum menetapkan kebijakan terkait keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun kewenangan untuk mengangkat Komisaris dan Direktur Bank merupakan hak dari Pemegang Saham dalam RUPS. Namun, Bank menyadari bahwa keberagaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Dengan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Bank Aladin Syariah diharapkan dapat memberikan alternatif pemecahan masalah dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Bank.

Policy on Diversity Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

As of December 31, 2023, Bank Aladin Syariah has not yet established a policy regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors. The authority to appoint Bank Commissioners and Directors is the right of Shareholders at the GMS. However, Bank realizes that diversity of expertise, experience and educational background will support the effective implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors.

With the composition of the Board of Commissioners and Directors of Bank Aladin Syariah, it is hoped that it can provide alternative problem solving and encourage more objective, comprehensive, optimal decision making and have a positive impact on the supervision and management of Bank.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
DEWAN KOMISARIS Board of Commissioner						
Rudy Hamdani (Presiden Komisaris Independen) (Independent President Commissioner)	Indonesia	Laki-laki Male	61	Bachelor of Science in Economics and Business Administration dari St. Mary College of California (1987) Bachelor of Science in Economics and Business Administration from St. Mary College of California (1987)	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Danakita Investama (2013-2022) Vice President Director PT Sequis Life Insurance Indonesia (2017-2018) Direktur Perbankan di PT Bank OCBC NISP Tbk (2000-2007) Direktur Perbankan di Bank International Indonesia (BII) (2000-2013) Account Officer di Bank International Indonesia (BII) (1989-2000) President Commissioner of PT Danakita Investama (2013-2022) Vice President Director of PT Sequis Life Insurance Indonesia (2017-2018) Banking Director at PT Bank OCBC NISP Tbk (2000-2007) Banking Director at Bank International Indonesia (BII) (2000-2013) Account Officer at Bank International Indonesia (BII) (1989-2000) 	Perbankan Banking

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Ationo Teguh Basuki (Komisaris) (Commissioner)	Indonesia	Laki-laki Male	63	Sarjana Teknik Elektro dari ITB Bandung, Jawa Barat (1985) Bachelor of Electrical Engineering from ITB Bandung, West Java (1985)	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan Bank Index (2018- 2019) • Direktur IT & E-Channel Bank Index (2015-2018) • Direktur Pengembangan Bisnis Bank Index (2011-2015) • Direktur Bisnis Support Bank Index (2008-2011) • Advisor untuk Direksi di Bidang Operasional Bank Index (2008-2008) • Kepala Bidang Operasi di Panin Bank (2004-2007) • Kepala Bagian Pelayanan Jasa KCU di Panin Bank (1997-2003) • Kepala Bagian Administrasi Operasi KCU Senayan di Panin Bank (1996- 1997) • Pemimpin KCP Tanah Abang di Panin Bank (1994-1995) • Koordinator Marketing KCU Senayan di Panin Bank (1993-1994) • Director of Compliance Bank Index (2018-2019) • Director of IT & E-Channel Bank Index (2015-2018) • Director of Business Development at Index Bank (2011-2015) • Business Director Support Bank Index (2008-2011) • Advisor to the Board of Directors in the Field of Bank Index Operations (2008-2008) • Head of Operations at Panin Bank (2004-2007) • Head of KCU Services at Panin Bank (1997-2003) • Head of Operations Administration Section of KCU Senayan at Panin Bank (1996-1997) • Head of KCP Tanah Abang at Panin Bank (1994-1995) • Marketing Coordinator for KCU Senayan at Panin Bank (1993-1994) 	Perbankan Banking
Fransisca Ekawati (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Indonesia	Perempuan Female	58	Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia (1988) Bachelor of Economics Majoring in Management from Universitas Kristen Indonesia (1988)	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur PT Sippa Kemasan Internasional (April 2020 - September 2021) • General Manager Treasury PPA (2019-2020) • General Manager Business Advisory & Asset Management PPA (2014- 2019) • General Manager Monitoring and Administration of Equity Management PT PPA (2004-2014) • <i>Group Head</i> Analisa dan Pengkajian Pengelola Bank pada Unit Restrukturisasi Bank di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2004) • Kepala Sub Divisi Pengembangan Cabang PT Bank Pesona Kriadana (1989) • Director of PT Sippa Kemasan Internasional (April 2020 - September 2021) • General Manager Treasury PPA (2019-2020) • General Manager Business Advisory & Asset Management PPA (2014- 2019) • General Manager Monitoring and Administration of Equity Management PT PPA (2004-2014) • Group Head of Bank Management Analysis and Review at Bank Restructuring Unit at the National Bank Restructuring Agency (IBRA) (1999-2004) • Head of Branch Development Sub Division of PT Bank Pesona Kriadana (1989) 	Perbankan Banking



Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
DIREKSI Board of Directors						
Dyota Mahottama Marsudi (Presiden Direktur) (President Director)	Indonesia	Laki-laki Male	34	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (2010) Master in Business Administration dari INSEAD (2016) Bachelor of Economics from Universitas Indonesia (2010) Master in Business Administration from INSEAD (2016) 	<ul style="list-style-type: none"> Senior Executive Director of Investments di Vertex Ventures, Singapura (2018-2021) Member of National Digital Transformation Committee di PPN/BAPPENAS (2019) Co-Founder & COO di Happy5.co (2016-2018) Management Consultant di Boston Consulting Group (2011-2017) Senior Executive Director of Investments at Vertex Ventures, Singapore (2018-2021) Member of National Digital Transformation Committee at PPN/BAPPENAS (2019) Co-Founder & COO at Happy5.co (2016-2018) Management Consultant at Boston Consulting Group (2011-2017) 	Investasi Investment
Firdila Sari (Direktur) (Director)	Indonesia	Perempuan Female	38	<p>Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (2007)</p> <p>Bachelor of Economics from Universitas Indonesia (2007)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Digital Banking Group Head di PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (2020-2021) Head of Product di PT Visionet Internasional (OVO) (2018-2020) Vice President, Head of Mobile Products di PT Bank Commonwealth (2017-2018) Head of Product di PT Visionet Internasional (OVO) (2015-2017) Senior Manager, Business Development, Product, & Content Management di PT Digital Vision Nusantara (K-Vision) (2013-2015) Senior Manager, Office of CEO di PT Digital Media Asia (VivaPlus) (2012-2013) Product Management-Global Payments & Cash Management (PCM) di PT Bank HSBC Indonesia (2008-2012) Digital Banking Group Head at PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (2020-2021) Head of Product at PT Visionet Internasional (OVO) (2018-2020) Vice President, Head of Mobile Products at PT Bank Commonwealth (2017-2018) Head of Product at PT Visionet Internasional (OVO) (2015-2017) Senior Manager, Business Development, Product, & Content Management at PT Digital Vision Nusantara (K-Vision) (2013-2015) Senior Manager, Office of CEO at PT Digital Media Asia (VivaPlus) (2012-2013) Product Management-Global Payments & Cash Management (PCM) at PT Bank HSBC Indonesia (2008-2012) 	Perbankan Banking
Mayang Ekaputri (Direktur) (Director)	Indonesia	Perempuan Female	41	<p>Bachelor of Electrical Engineering – National University of Singapore (2002)</p> <p>University of Chicago Booth School of Business – Master Degree in Business Administration (2018)</p> <p>Bachelor of Electrical Engineering – National University of Singapore (2002)</p> <p>University of Chicago Booth School of Business – Master Degree in Business Administration (2018)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Group Head Finance & Strategy dan Pjs. Corporate Secretary di Bank Aladin Syariah (2021) Senior Vice President Treasury Finance di HSBC Indonesia (2011-2021) Assistant Vice President Product Control di Credit Suisse Singapura (2006-2010) Group Head Finance & Strategy and Acting. Corporate Secretary at Bank Aladin Syariah (2021) Senior Vice President Treasury Finance at HSBC Indonesia (2011-2021) Assistant Vice President Product Control at Credit Suisse Singapore (2006-2010) 	Perbankan Banking

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan) (Director of Compliance)	Indonesia	Perempuan Female	52	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Hukum - Universitas Airlangga (1993) Master Bidang Hukum (LLM) Jurusan International Comparative Law dari Southern Methodist University School of Law, Dallas, Texas, Amerika Serikat (1999) Bachelor of Laws - Universitas Airlangga (1993) Master of Law (LLM) International Comparative Law Department from Southern Methodist University School of Law, Dallas, Texas, United States (1999) 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan di PT Maybank Syariah Indonesia (Okt 2010-Jan 2020) Direktur Kepatuhan di PT Bank Maybank Indocorp (Feb 2009-Okt 2010) Direktur Kepatuhan di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Jakarta (Juli 2005-Nov 2008) Head of Compliance Department di Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Jakarta (Sep 2001-Juli 2005) Direktorat Hukum di Bank Indonesia (Juni 1995-Juni 2001) Director of Compliance at PT Maybank Syariah Indonesia (Oct 2010-Jan 2020) Director of Compliance at PT Bank Maybank Indocorp (Feb 2009-Oct 2010) Director of Compliance at Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Jakarta (July 2005-Nov 2008) Head of Compliance Department at Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Jakarta (Sep 2001-July 2005) Legal Directorate at Bank Indonesia (June 1995-June 2001) 	Perbankan Banking

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara kolegal melalui beberapa jenis prosedur, antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian oleh RUPS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS, berdasarkan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan fungsi, serta tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Adapun hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2023 adalah sebagaimana yang terlampir berikut ini:

- Efektivitas Peran Komisaris dan Direksi
- Efektivitas Pelaksanaan Strategi dan Pengelolaan Bank
- Efektivitas Rapat, Etika Kerja dan Dinamika Direksi
- Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Prinsip Keberlanjutan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

2. Penilaian Berdasarkan *Self Assessment* GCG

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan juga berdasarkan *self assessment* yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2023 adalah sebagaimana yang terlampir berikut ini:

Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors

The performance assessment of the Board of Commissioners and Directors is carried out collegally through several types of procedures, including the following:

1. Assessment by the GMS

The performance assessment of the Board of Commissioners and Directors is carried out by Shareholders at the GMS, based on accountability reports regarding the implementation of functions, as well as the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors.

The results of the performance assessment of the Board of Commissioners and Directors for 2023 are as attached below:

- Effectiveness of the Role of Commissioners and Directors
- Effectiveness of Bank Strategy and Management Implementation
- Effectiveness of Meetings, Work Ethics and Dynamics of the Board of Directors
- Implementation of Good Corporate Governance and Sustainability Principles, and effectiveness of Risk Management and Internal Control

2. Assessment Based on GCG Self Assessment

The performance assessment of the Board of Commissioners and Directors is also carried out based on a self-assessment which refers to the Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The results of the performance assessment of the Board of Commissioners and Directors for 2023 are as attached below:



- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi memperoleh peringkat 1.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris memperoleh peringkat 1.

Secara komprehensif, Dewan Komisaris dan Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dengan baik, bertanggung jawab, dan mengacu pada ketentuan yang berlaku demi kepentingan Bank. Adapun fokus pengawasan dan pemberian nasihat yang diberikan mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Bank dan mengevaluasi kinerja Bank. Dewan Komisaris juga memberikan rekomendasi pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, melakukan tindakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Bank, dan memberikan nasihat serta rekomendasi kepada Direksi guna memastikan bahwa bisnis dan usaha Bank berjalan dengan baik. Adapun penilaian kinerja Direksi, tercermin dari hasil kinerja Bank di tahun buku, di mana Bank Aladin Syariah mampu mencatatkan hasil yang positif untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Remunerasi dan Fasilitas Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan Penetapan Remunerasi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), antara lain:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk uang (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya, dan
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk uang (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Struktur dan Jumlah Remunerasi Tahun 2023

Adapun jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- a. The implementation of the Board of Directors duties and responsibilities received a rating of 1.
- b. The implementation of the Board of Commissioners duties and responsibilities received a rating of 1.

Comprehensively, the Board of Commissioners and Directors have carried out their duties and responsibilities well. Throughout 2023, the Board of Commissioners has supervised and provided advice to the Board of Directors in a good, responsible manner and referring to applicable regulations in the interests of Bank. The focus of supervision and providing advice includes holding meetings related to discussing issues related to Bank management and evaluating Bank's performance. The Board of Commissioners also provides recommendations for implementing the principles of Good Corporate Governance, carries out supervisory actions on Bank's management policies, and provides advice and recommendations to the Board of Directors to ensure that Bank's business and operations run well. The performance assessment of the Board of Directors is reflected in Bank's performance results in the Fiscal Year, where Bank Aladin Syariah was able to record positive results to achieve sustainable growth.

Remuneration and Other Facilities for the Board of Commissioners and Directors as well as the Sharia Supervisory Board

Remuneration Determination Policy

Remuneration policies and other facilities determined at the General Meeting of Shareholders (GMS), include:

1. Remuneration, namely income in the form of money (non-kind), including salary, benefits, compensation in the form of shares, bonuses and other forms of remuneration, and
2. Other facilities, namely facilities received that are not in the form of money (in kind), include housing facilities, transportation facilities, health insurance facilities, telecommunications facilities, and other facilities that may or may not be owned.

Structure and Amount of Remuneration in 2023

The total amount of remuneration and other facilities as of December 31, 2023 is as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year					
	Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Directors		Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	
	Orang Persons	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Persons	Jutaan Rupiah Million Rupiah
Remunerasi Remuneration	5	3.632.326.269	4	11.595.038.272	2	836.933.334
Fasilitas lainnya*): 1. Yang dapat dimiliki 2. Yang tidak dapat dimiliki Other facilities*): 1. What can be owned 2. What cannot be owned	-	-	-	-	-	-
Total	5	3.632.326.269	4	11.595.038.272	2	836.933.334

*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah
*) Valued in Rupiah equivalent

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini.

The number of members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board who receive remuneration in one year are grouped into a range of income levels, as in the table below.

Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun Amount of Remuneration *) per person in 1 year	Jumlah Dewan Komisaris Number of Board of Commissioners	Jumlah Direksi Number of Directors	Jumlah Dewan Pengawas Syariah Number of Sharia Supervisory Boards
Di atas Rp2 miliar Above IDR 2 billion	-	3	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar Above IDR 1 billion until IDR 2 billion	2	1	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Above IDR 500 million until IDR 1 billion	1	-	-

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Ratio of Highest Salary and Lowest Salary

Informasi mengenai rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

Information regarding the ratio of the highest and lowest salaries on a comparison scale is as follows:

Perihal Subject	2023	2022	2021
Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah Ratio of Highest and Lowest Employee Salaries	40,5 : 1	40,34 : 1	28,3 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah Ratio of Highest and Lowest Directors' Salaries	1,9 : 1	2,4 : 1	2,2 : 1
Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah Highest and Lowest Commissioner Salary Ratio	2,7 : 1	2,2 : 1	2 : 1
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi Salary Ratio of Highest Directors and Highest Employees	1,2 : 1	1,1 : 1	1,4 : 1

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Meeting

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan internal terkait Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi Bank diatur mengenai pelaksanaan rapat Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara fisik paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
4. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Board of Commissioners Meeting

In accordance with internal regulations related to Bank's Board of Commissioners and Directors' Rules of Conduct, the implementation of Board of Commissioners meetings is regulated as follows:

1. The Board of Commissioners is required to hold meetings at least 1 (one) time in 2 (two) months.
2. The Board of Commissioners is required to hold physical meetings with the Board of Directors at least once every 4 (four) months.
3. Meetings of the Board of Commissioners can also be held if deemed necessary by the President Commissioner or by 1/3 (one third) of the total members of the Board of Commissioners or upon written request from the Board of Directors Meeting or upon request from 1 (one) or more shareholders. has at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with valid voting rights, to which meetings the Board of Commissioners may invite the Board of Directors. All members of the Board of Commissioners must physically attend meetings of the Board of Commissioners at least 2 (two) times a year.
4. All members of the Board of Commissioners must physically attend meetings at least 2 (two) times in 1 (one) year.



5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana pada butir a dan b di atas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir d, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir d, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 8. Pada setiap rapat Dewan Komisaris, Presiden Komisaris akan memimpin rapat. Jika Presiden Komisaris berhalangan untuk memimpin rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
 9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
 10. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris tersebut. Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris lain secara otomatis diselenggarakan di tempat dan waktu yang sama 14 hari setelah tanggal dan usulan rapat Dewan Komisaris pertama yang akan membahas hal yang sama. Dalam rapat Dewan Komisaris kedua tersebut, kuorum yang sama untuk menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang sah disyaratkan. Jika kuorum tidak tercapai dalam rapat Dewan komisaris kedua, maka 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dapat memanggil RUPS Luar Biasa yang akan membahas hal-hal yang seharusnya dibahas dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.
 11. Putusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.
 12. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
 13. Semua keputusan Dewan Komisaris yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Dewan Komisaris.
 14. Keputusan tertulis dan keputusan yang diedarkan adalah suatu keputusan yang dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani atau disetujui oleh mayoritas Dewan Komisaris diperlakukan sama seperti sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah rapat Dewan Komisaris dan dapat terdiri dari beberapa dokumen dalam bentuk yang masing-masing ditandatangani oleh satu atau lebih Dewan Komisaris. Istilah dalam "bentuk tertulis" dan "ditandatangani" meliputi persetujuan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris melalui e-mail atau bentuk komunikasi elektronik lainnya yang
5. The Board of Commissioners must schedule meetings as in points a and b above for the following year before the end of the Fiscal Year.
 6. At the meeting that has been scheduled as referred to in point d, the meeting materials are delivered to the participants at least 5 (five) days before the meeting is held.
 7. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in point d, the meeting materials are delivered to the Meeting Participants no later than before the meeting is held.
 8. At each meeting of the Board of Commissioners, the President Commissioner will chair the meeting. If the President Commissioner is unable to chair the meeting, which does not need to be proven to a third party, then the Board of Commissioners meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners selected by and from the members of the Board of Commissioners who are present and/or represented at the relevant Board of Commissioners meeting.
 9. A member of the Board of Commissioners may be represented at a meeting of the Board of Commissioners only by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney.
 10. A meeting of the Board of Commissioners is valid and has the right to make binding decisions if more than 2/3 (two thirds) of the total members of the Board of Commissioners are present or represented at the meeting of the Board of Commissioners. In the event that a quorum is not reached at a meeting of the Board of Commissioners, another meeting of the Board of Commissioners is automatically held at the same place and time 14 days after the date and proposal of the first Board of Commissioners meeting which will discuss the same matter. In the second Board of Commissioners meeting, the same quorum to convene a valid Board of Commissioners meeting is required. If a quorum is not reached at the second Board of Commissioners meeting, then 1 (one) member of the Board of Commissioners can call an Extraordinary GMS which will discuss matters that should be discussed at the Board of Commissioners meeting.
 11. Decisions at meetings of the Board of Commissioners must be taken based on deliberation to reach consensus. In the event that a deliberative decision to reach consensus is not reached, then the decision is taken based on the affirmative vote of more than ½ (one-half) of the number of valid votes cast at the meeting. Each member of the Board of Commissioners has the right to cast one vote.
 12. If the number of votes agreeing and disagreeing is equal, then the chairman of the Board of Commissioners meeting will decide.
 13. All decisions taken by the Board of Commissioners in accordance with the provisions of Bank's Articles of Association are binding and the responsibility of all members of the Board of Commissioners.
 14. Written decisions and circulated decisions are decisions made in written form, signed or approved by a majority of the Board of Commissioners, treated the same as a decision taken at a meeting of the Board of Commissioners and may consist of several documents in this form, each of which is signed by one or more Board of Commissioners. The terms "written form" and "signed" include approval conveyed by the Board of Commissioners via e-mail or other forms of electronic communication approved by the Board of Commissioners for this purpose from time to time and if

disetujui oleh Dewan Komisaris untuk tujuan tersebut dari waktu ke waktu dan apabila dipandang perlu menggunakan prosedur keamanan dan/atau identifikasi dan peralatan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

15. Ketentuan mengenai risalah rapat di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - b. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir nomor 1 dan 2 di atas yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Apabila risalah rapat dibuat oleh notaris, menandatangani tersebut tidak disyaratkan.
16. Risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib didokumentasikan oleh Bank.
17. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
18. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris menggelar rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

deemed necessary using security and/or identification procedures and equipment approved by the Board of Commissioners.

15. Provisions regarding meeting minutes include the following:
 - a. The results of the Board of Commissioners meetings must be stated in the minutes of the meeting, signed by the members of the Board of Commissioners present, and submitted to all members of the Board of Commissioners.
 - b. The results of meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors must be included in the minutes of the meeting, signed by members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors present, and submitted to all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.
 - c. In the event that there are members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors who do not sign the results of the meeting as referred to in points 1 and 2 above, they are required to state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting. If the minutes of the meeting are prepared by a notary, signing them is not required.
16. Minutes of meetings of the Board of Commissioners and minutes of meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors must be documented by Bank.
17. Dissenting opinions that occur in meetings of the Board of Commissioners and meetings of the Board of Commissioners and Directors must be stated clearly in the minutes of meetings of the Board of Commissioners and minutes of meetings of the Board of Commissioners and Directors along with the reasons for the differences of opinion.
18. The Attendance of members of the Board of Directors at meetings of the Board of Commissioners and meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors must be disclosed in Bank's annual report.

During 2023, the Board of Commissioners held 7 (seven) meetings with the following number of members of the Board of Commissioners attending:



Risalah dan Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal Minutes and Attendance of the Board of Commissioners at Internal Meetings

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris/Direksi dalam Rapat Reasons for the absence of the Board of Commissioners/Directors at the Meeting
24 Januari 2023 January 24 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Rencana dan Jadwal Rapat-Rapat Dewan Komisaris; Rencana Kerja Dewan Komisaris Discussion of Plans and Schedule for Board of Commissioners Meetings; Board of Commissioners Work Plan 	Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank All members of the Bank's Board of Commissioners	-
16 Februari 2023 February 16 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester 2 Tahun 2022; Agenda lainnya Board of Commissioners Supervision Report Semester 2 2022; Other agenda 	Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank All members of the Bank's Board of Commissioners	-
21 Maret 2023 March 21, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Audit Bank Tahun 2022 Agenda Lainnya Plan for Submitting Bank Financial Statements Audit Report for 2022 Other Agenda 	Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank All members of the Bank's Board of Commissioners	-
22 Juni 2023 June 22, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Rencana Bisnis Bank (RBB) Information Technology Strategic Plan (RSTI) Bank Business Plan (RBB) 	Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank All members of the Bank's Board of Commissioners	-
21 Agustus 2023 Agustus 21 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I Tahun 2023 Materi Pembahasan Kinerja Bank Periode Juli 2023 Board of Commissioners Supervision Report for Semester I 2023 Material for Discussion on Bank Performance for the July 2023 Period 	Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank All members of the Bank's Board of Commissioners	-
7 November 2023 November 7 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> Materi Pembahasan Rapat Dewan Komisaris; Supervisi Dewan Komisaris dan Tindak Lanjut Discussion Materials for Board of Commissioners Meetings; Board of Commissioners Supervision and Follow-up 	Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank All members of the Bank's Board of Commissioners	-
29 November 2023 November 29 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Bisnis Bank ("RBB") & Rencana Pembiayaan Inklusif Makroprudensial ("RPIM") Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB") Rencana Pengembangan Teknologi Informasi ("RPTI") & Rencana Strategis Teknologi Informasi ("RSTI") Bank Business Plan ("RBB") & Macroprudential Inclusive Financing Plan ("RPIM") 2. Sustainable Financial Action Plan ("RAKB") Information Technology Development Plan ("RPTI") & Information Technology Strategic Plan ("RSTI") 	Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank All members of the Bank's Board of Commissioners	-

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat internal dapat dilihat di bawah ini.

A recapitulation of the attendance of members of the Board of Commissioners at internal meetings can be seen below.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal Recapitulation of Board of Commissioners Attendance at Internal Meetings

Dewan Komisaris Board of Commissioner	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Rudy Hamdani (Presiden Komisaris Independen) (Independent President Commissioner)	7	7	100%
Ationo Teguh Basuki (Komisaris) (Commissioner)	7	7	100%
Fransisca Ekawati (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	7	7	100%
Rata-Rata Average			100%

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2023, rapat gabungan diadakan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

Joint meetings of the Board of Commissioners and Directors are held as needed. During 2023, joint meetings were held 4 (four) times with detailed agendas and frequency of attendance as follows:

Risalah dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan Minutes and Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors at Joint Meetings

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris/Direksi dalam Rapat Reasons for the absence of the Board of Commissioners/Directors at the Meeting
28 April 2023 April 28, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	Pembahasan dari Direktorat berikut: <ul style="list-style-type: none"> Commercial Finance Compliance Risk Management dan Digital Banking Discussion from Directorate: <ul style="list-style-type: none"> Commercial Finance Compliance Risk Management and Digital Banking 	Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Bank Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Bank	-
12 Juni 2023 June 12, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	Pembahasan dari Direktorat berikut: <ul style="list-style-type: none"> Commercial Finance Compliance Risk Management dan Digital Banking Discussion from Directorate: <ul style="list-style-type: none"> Commercial Finance Compliance Risk Management and Digital Banking 	Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Bank Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Bank	-



Risalah dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan Minutes and Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors at Joint Meetings

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris/Direksi dalam Rapat Reasons for the absence of the Board of Commissioners/Directors at the Meeting
24 Juli 2023 July 24, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	Pembahasan dari Direktorat berikut: <ul style="list-style-type: none"> Finance Risk Management Keputusan dan Penutup Discussion from Directorate: <ul style="list-style-type: none"> Finance Risk Management Decision and Conclusion 	Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Bank All members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors	-
30 November 2023 November 30, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	Pembahasan dari Direktorat berikut: <ul style="list-style-type: none"> Risk Management dan Commercial Discussion from Directorate: <ul style="list-style-type: none"> Risk Management and Commercial 	Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Bank All members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors	-

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan dapat dilihat di bawah ini.

A recapitulation of the attendance of members of the Board of Commissioners and Directors at the Joint Meeting can be seen below.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan Recapitulation of the Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors at Joint Meetings

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioner and Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
DEWAN KOMISARIS Board of Commissioner			
Rudy Hamdani (Presiden Komisaris Independen) (Independent President Commissioner)	4	4	100%
Ationo Teguh Basuki (Komisaris) (Commissioner)	4	4	100%
Fransisca Ekawati (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	4	4	100%
DIREKSI Board of Directors			
Dyota Mahottama Marsudi (Presiden Direktur) (President Director)	4	4	100%
Firdila Sari (Direktur) (Director)	4	4	100%
Mayang Ekaputri (Direktur) (Director)	4	4	100%
Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan) (Director of Compliance)	4	4	100%
Rata-Rata Average			100%

Rapat Direksi

Sesuai dengan ketentuan internal terkait Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi Bank diatur mengenai pelaksanaan rapat Direksi sebagai

Board of Directors Meeting

In accordance with internal regulations related to Bank's Board of Commissioners and Directors' Rules of Conduct, the implementation

berikut:

- a. Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Selain rapat sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, rapat Direksi juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- d. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada butir a dan b untuk tahun berikutnya sebelum akhir tahun buku. Jadwal (penetapan tanggal) rapat dalam 1 (satu) tahun sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya awal bulan Januari.
- e. Pemanggilan rapat dan tata caranya, serta tempat penyelenggaraan rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Bank.
- f. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- g. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- h. Rapat Direksi dipimpin/diketahui oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
- i. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- j. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat Direksi.
- k. Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan untuk musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- l. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
- m. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- n. Semua keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Pedoman dan tata tertib Kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- o. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi dibuat risalah rapat Direksi yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat Direksi yang ditunjuk oleh ketua rapat Direksi

of Board of Directors meetings is regulated as follows:

- a. Board of Directors meetings are held periodically at least 1 (one) time in 1 (one) month.
- b. The Board of Directors is obliged to hold regular meetings with the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months.
- c. Apart from the meetings as referred to in points a and b above, Board of Directors meetings can also be held if deemed necessary by one member of the Board of Directors or at the written request of one or more members of the Board of Commissioners or at the request of 1 (one) or more shareholders who are together, equally representing 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.
- d. The Board of Directors must schedule meetings as referred to in points a and b for the following year before the end of the Fiscal Year. The schedule (setting of dates) for meetings within 1 (one) year must be received by all members of the Board of Directors no later than the beginning of January.
- e. Calls for meetings and procedures, as well as places for holding Board of Directors meetings refer to Bank's Articles of Association.
- f. At a scheduled meeting, meeting materials are delivered to participants no later than 5 (five) days before the meeting is held.
- g. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared, the meeting materials are delivered to the participants no later than before the meeting is held.
- h. The Board of Directors meeting is chaired/chaired by the President Director. In the event that the President Director is unable to attend a Board of Directors meeting, which does not need to be proven to a third party, the Board of Directors meeting is chaired by a member of the Board of Directors who is elected by and from among the members of the Board of Directors present.
- i. A member of the Board of Directors may be represented at a Board of Directors meeting only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney.
- j. A Board of Directors meeting is valid and has the right to make binding decisions if more than ½ (one half) of the total number of members of the Board of Directors are present or represented at the Board of Directors meeting.
- k. Decision making at Board of Directors meetings is carried out based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision for deliberation to reach consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on the affirmative votes of more than ½ (one-half) of the total votes cast at the meeting.
- l. If the number of votes agreeing and disagreeing is equal, the chairman of the Board of Directors meeting will decide.
- m. Every strategic policy and decision must be decided through a Board of Directors meeting with due regard to supervision in accordance with the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
- n. All decisions taken by the Board of Directors are in accordance with Bank's Articles of Association and Work Guidelines and regulations, are binding and the responsibility of all members of the Board of Directors.
- o. All matters discussed and decided at the Board of Directors meeting are made into minutes of the Board of Directors meeting which must be drawn up by someone present at the Board of Directors meeting appointed by the chairman of the Board of Directors meeting and must then be signed by all members of the Board



dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi guna memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah rapat Direksi. Risalah rapat Direksi tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat Direksi. Apabila risalah rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

- p. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- q. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
- r. Risalah rapat Direksi dan risalah rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Bank.
- s. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

Sepanjang tahun 2023, Direksi Bank telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

of Directors present at the Board of Directors meeting to ensure the completeness and correctness of the minutes of the Board of Directors meeting. . The minutes of the Board of Directors meeting are valid evidence for all members of the Board of Directors and third parties regarding decisions and everything that occurs at the Board of Directors meeting. If the minutes of the Board of Directors meeting are drawn up by a Notary, signing is not required.

- p. Dissenting opinions that occur at Board of Directors meetings must be stated clearly in the minutes of the Board of Directors meeting along with the reasons for the difference of opinion.
- q. The Board of Directors can also make valid decisions without holding a board of directors' meeting provided that all members of the Board of Directors who are serving give their approval by signing the proposed decision. Decisions taken in this way have the same legal force as decisions legally taken at a Board of Directors meeting.
- r. Minutes of Board of Directors meetings and minutes of meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners must be documented by Bank.
- s. The Attendance of members of the Board of Directors at Board of Directors meetings and meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners must be disclosed in Bank's annual report.

Throughout 2023, Bank's Board of Directors has held 12 (twelve) meetings with detailed agendas and frequency of attendance as follows:

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal Minutes and Attendance of Board of Directors at Internal Meetings

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Reasons for the absence of the Board of Commissioners at the Meeting
26 Januari 2023 January 26, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Update Masing - Masing Direktorat: <ul style="list-style-type: none"> a. Human Capital Directorate b. IT Directorate c. Finance Directorate d. President Directorate e. Compliance Directorate f. Digital Banking & Operations Directorate • Keputusan dan Penutup • Update for each directorate: <ul style="list-style-type: none"> a. Human Capital Directorate b. IT Directorate c. Finance Directorate d. President Directorate e. Compliance Directorate f. Digital Banking & Operations Directorate • Decision and Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama • Marsudi • Firdila Sari • Mayang Ekaputri • Baiq Nadea Dzurriatin 	-

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal
Minutes and Attendance of Board of Directors at Internal Meetings

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Reasons for the absence of the Board of Commissioners at the Meeting
23 Februari 2023 February 23, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Update Masing - Masing Direktorat: <ol style="list-style-type: none"> a. Finance Directorate b. Digital Banking Directorate c. Operations Directorate d. IT Directorate e. Risk Management Directorate f. Compliance Directorate g. President Directorate • Keputusan dan Penutup • Update for each directorate: <ol style="list-style-type: none"> a. Finance Directorate b. Digital Banking Directorate c. Operations Directorate d. IT Directorate e. Risk Management Directorate f. Compliance Directorate g. President Directorate • Decision and Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama • Marsudi • Firdila Sari • Mayang Ekaputri • Baiq Nadea Dzurriatin 	-
20 Maret 2023 March 20, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Update Masing - Masing Direktorat: <ol style="list-style-type: none"> a. Human Capital Directorate b. Commercial Directorate c. IT Directorate d. Risk Management Directorate e. President Directorate f. Compliance Directorate g. Finance Directorate h. Digital Banking & Operations Directorate • Keputusan dan Penutup • Update for each directorate: <ol style="list-style-type: none"> a. Human Capital Directorate b. Commercial Directorate c. IT Directorate d. Risk Management Directorate e. President Directorate f. Compliance Directorate g. Finance Directorate h. Digital Banking & Operations Directorate • Decision and Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama • Marsudi • Firdila Sari • Mayang Ekaputri • Baiq Nadea Dzurriatin 	-
28 April 2023 April 28, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Update Masing - Masing Direktorat: <ol style="list-style-type: none"> a. Human Capital Directorate b. Finance Directorate c. IT Directorate d. President Directorate e. Compliance Directorate f. Operations Directorate g. Risk Management Directorate • Keputusan dan Penutup • Update for each directorate: <ol style="list-style-type: none"> a. Human Capital Directorate b. Finance Directorate c. IT Directorate d. President Directorate e. Compliance Directorate f. Operations Directorate g. Risk Management Directorate • Decision and Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama • Marsudi • Firdila Sari • Mayang Ekaputri • Baiq Nadea Dzurriatin 	-



Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal
Minutes and Attendance of Board of Directors at Internal Meetings

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Reasons for the absence of the Board of Commissioners at the Meeting
30 Mei 2023 May 30, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Update Masing - Masing Direktorat: <ul style="list-style-type: none"> a. Finance Directorate b. Digital Banking & Operations Directorate c. Risk Management Directorate d. IT Directorate e. Compliance Directorate f. President Directorate g. Commercial Directorate • Keputusan dan Penutup • Update for each directorate: <ul style="list-style-type: none"> a. Finance Directorate b. Digital Banking & Operations Directorate c. Risk Management Directorate d. IT Directorate e. Compliance Directorate f. President Directorate g. Commercial Directorate • Decision and Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama • Marsudi • Firdila Sari • Mayang Ekaputri • Baiq Nadea Dzurriatin 	-
21 Juni 2023 June 21, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Update Masing - Masing Direktorat: <ul style="list-style-type: none"> a. Compliance Directorate b. Risk Management Directorate c. President Directorate d. IT Directorate e. Operations Directorate • Keputusan dan Penutup • Update for each directorate: <ul style="list-style-type: none"> a. Compliance Directorate b. Risk Management Directorate c. President Directorate d. IT Directorate e. Operations Directorate • Decision and Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama • Marsudi • Firdila Sari • Mayang Ekaputri • Baiq Nadea Dzurriatin 	-
27 Juli 2023 July 27, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Update Masing - Masing Direktorat <ul style="list-style-type: none"> a. Finance Directorate b. Commercial Directorate c. President Directorate d. Compliance Directorate • Keputusan dan Penutup • Update each directorate <ul style="list-style-type: none"> a. Finance Directorate b. Commercial Directorate c. President Directorate d. Compliance Directorate • Decision and Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama • Marsudi • Firdila Sari • Mayang Ekaputri • Baiq Nadea Dzurriatin 	-
21 Agustus 2023 August 21, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Update Masing - Masing Direktorat <ul style="list-style-type: none"> a. Risk Management Directorate b. President Directorate c. IT Directorate d. Operations Directorate e. Compliance Directorate f. Finance Directorat • Keputusan dan Penutup • Update each directorate <ul style="list-style-type: none"> a. Risk Management Directorate b. President Directorate c. IT Directorate d. Operations Directorate e. Compliance Directorate f. Finance Directorate • Decision and Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama • Marsudi • Firdila Sari • Mayang Ekaputri • Baiq Nadea Dzurriatin 	-

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal
Minutes and Attendance of Board of Directors at Internal Meetings

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Reasons for the absence of the Board of Commissioners at the Meeting
21 September 2023 September 21, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Update Masing - Masing Direktorat <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Human Capital Directorate</i> b. <i>Finance Directorate</i> c. <i>IT Directorate</i> d. <i>Risk Management Directorate</i> e. <i>Compliance Directorate</i> f. <i>President Directorate</i> g. <i>Operations Directorate</i> • Keputusan dan Penutup • Update each directorate <ul style="list-style-type: none"> a. Human Capital Directorate b. Finance Directorate c. IT Directorate d. Risk Management Directorate e. Compliance Directorate f. President Directorate g. Operations Directorate • Decision and Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama • Marsudi • Firdila Sari • Mayang Ekaputri • Baiq Nadea Dzurriatin 	-
19 Oktober 2023 October 19, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Update Masing - Masing Direktorat <ul style="list-style-type: none"> a. <i>IT Directorate</i> b. <i>Finance Directorate</i> c. <i>Operations Directorate</i> d. <i>Risk management Directorate</i> e. <i>Compliance Directorate</i> f. <i>President Directorate</i> • Keputusan dan Penutup • Update each directorate <ul style="list-style-type: none"> a. IT Directorate b. Finance Directorate c. Operations Directorate d. Risk management Directorate e. Compliance Directorate f. President Directorate • Decision and Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama • Marsudi • Firdila Sari • Mayang Ekaputri • Baiq Nadea Dzurriatin 	-



Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal Minutes and Attendance of Board of Directors at Internal Meetings

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Reasons for the absence of the Board of Commissioners at the Meeting
30 November 2023 November 30, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> Update Masing - Masing Direktorat <ol style="list-style-type: none"> Human Capital Directorate Legal, Compliance, & Risk Management Directorate Operations Directorate IT Directorate President Directorate Keputusan dan Penutup Update each directorate <ol style="list-style-type: none"> Human Capital Directorate Legal, Compliance, & Risk Management Directorate Operations Directorate IT Directorate President Directorate Decision and Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> Dyota Mahottama Marsudi Firdila Sari Mayang Ekaputri Baiq Nadea Dzurriatin 	-
21 Desember 2023 December 21, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Head Office of Bank Aladin Syariah	<ul style="list-style-type: none"> Update Masing - Masing Direktorat <ol style="list-style-type: none"> IT Directorate Operations Directorate Legal, Compliance & Risk Management Directorate Finance Directorate President Directorate Keputusan dan Penutup Update each directorate <ol style="list-style-type: none"> IT Directorate Operations Directorate Legal, Compliance & Risk Management Directorate Finance Directorate President Directorate Decision and Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> Dyota Mahottama Marsudi Firdila Sari Mayang Ekaputri Baiq Nadea Dzurriatin 	-

Rekapitulasi kehadiran anggota Direksi pada rapat internal dapat dilihat di bawah ini.

A recapitulation of the attendance of members of the Board of Directors at internal meetings can be seen below.

Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Internal Recapitulation of Board of Directors' Attendance at Internal Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Tota Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dyota Mahottama Marsudi (Presiden Direktur) (President Director)	12	12	100%
Firdila Sari (Direktur) (Director)	12	12	100%
Mayang Ekaputri (Direktur) (Director)	12	12	100%
Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan) (Director of Compliance)	12	12	100%
Rata-Rata Average			100%

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs for The Board of Commissioners

Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan.

Komite Audit

Komite Audit merupakan organ pendukung yang dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal. Pembentukan Komite Audit Bank dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
7. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

Piagam Komite Audit

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit atau *Audit Committee Charter* disusun sebagai acuan dan kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya setiap anggota Komite Audit. Dengan demikian, Komite Audit dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komite Audit Bank telah memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat, masa tugas, waktu kerja dan pelaporan. Piagam

The Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee to support the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function.

Audit Committee

The Audit Committee is a supporting organ formed with the aim of assisting the Board of Commissioners in supporting the effective implementation of its duties and supervisory functions on matters related to Financial Statements, internal and external control systems. The formation of Bank Audit Committee was carried out based on Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and POJK No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines and POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee.

Legal Basis

The formation of the Audit Committee is based on the following regulations:

1. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated 30 April 2010 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
3. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
4. Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 16/POJK.03/2022 dated 31 August 2022 concerning Sharia Commercial Banks.
5. Financial Services Authority Regulation no. 55/POJK.04/2015 dated 29 December 2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee.
6. Bank's Articles of Association concerning the duties and authority of the Board of Commissioners.
7. Audit Committee Charter.

Audit Committee Charter

The Audit Committee Work Guidelines/Charter or Audit Committee Charter is prepared as a clear reference and framework for carrying out the duties and responsibilities of each member of the Audit Committee. In this way, the Audit Committee can work independently, objectively, independently and transparently and can be held accountable in accordance with applicable regulations.

Bank Audit Committee has a Charter that regulates structure and membership, membership requirements, duties and responsibilities, authority, meetings, term of duty, working hours and reporting. The



Komite Audit terakhir dikiniakan pada tanggal 29 November 2023 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank..

Kriteria Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain adalah:

1. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memiliki sertifikat kompetensi keahlian yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Bank khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank;
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank; dan
9. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Ketentuan Masa Jabatan Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Audit Tahun 2023

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Komite Audit wajib seluruhnya berasal dari pihak independen paling sedikit terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Komisaris Independen.
2. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi.
3. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
4. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota komite audit.

Audit Committee Charter was last updated on November 29, 2023 and will be updated in accordance with developments in applicable regulations and the latest conditions of Bank.

Audit Committee Criteria

Requirements for Member of Audit Committeehip from Independent Commissioners and Independent Parties as regulated in the Audit Committee Charter include:

1. Member of Audit Committee must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with their field of work, and be able to communicate well;
2. Must have an expertise competency certificate that supports the implementation of the Audit Committee's functions and responsibilities;
3. Must understand Financial Statements, Bank business, especially those related to Bank services or business activities, audit processes, risk management, and laws and regulations in the Capital Market sector as well as other related laws and regulations;
4. Must comply with the Audit Committee code of ethics established by Bank;
5. Willing to continuously improve competence through education and training;
6. Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Services Firm or other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to Bank within the last 6 (six) months;
7. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise Bank activities within the last 6 (six) months except for Independent Commissioners;
8. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of Bank; And
9. Has no direct or indirect business relationships related to Bank's business activities.

Terms of Office for the Audit Committee

The term of office of members of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association and can only be re-elected for one further period.

Number, Composition and Structure of the Audit Committee in 2023

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning the implementation of Governance for Commercial Banks, all members of the Audit Committee must come from independent parties consisting of at least:

1. 1 (one) Independent Commissioner.
2. 1 (one) person from an Independent Party who has expertise in finance or accounting.
3. 1 (one) person from an Independent Party who has expertise in the field of sharia banking.
4. 1 (one) member of the Sharia Supervisory Board can be a member of the audit committee.

5. Adapun pada tahun 2023, susunan Komite Audit Bank adalah sebagai berikut:
5. As for 2023, the composition of Bank's Audit Committee will be as follows:

Susunan Komite Audit Bank per 31 Desember 2023

Composition of Bank's Audit Committee as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Fransisca Ekawati	Ketua Komite Audit Chair of the Audit Committee	Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 164/SK.BOC/NET/2020 tanggal 9 Juli 2020. Company Audit Committee Appointment Letter No. 164/SK.BOC/NET/2020 dated July 9, 2020.
Rudy Hamdani	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Surat Keputusan Direksi No: SK.002.BOD/03.2022 tentang Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 7 Maret 2022. Board of Directors Decree No: SK.002.BOD/03.2022 concerning Members of the Risk Monitoring Committee, Audit Committee, and Nomination and Remuneration Committee dated March 7, 2022.
Andreas Danny Soesanto	Anggota Komite Komite Audit Member of the Audit Committee	Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 164/SK.BOC/NET/2020 tanggal 9 Juli 2020. Company Audit Committee Appointment Letter No. 164/SK.BOC/NET/2020 dated July 9, 2020.
Jeffri Sugiarto	Anggota Komite Komite Audit Member of the Audit Committee	Surat Keputusan Direksi No: SK.003.BOD/11.2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tanggal 1 Desember 2022. Board of Directors' Decree No: SK.003.BOD/11.2022 concerning the Appointment of Members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee dated December 1, 2022.

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile

Fransisca Ekawati
Ketua Komite Audit/Komisaris Independen
Chair of the Audit Committee/Independent Commissioner

Profil Ketua Komite Audit Fransisca Ekawati dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Chair of the Audit Committee, Fransisca Ekawati, can be seen in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Rudy Hamdani
Anggota Komite Audit/Presiden Komisaris (Independen)
Member of Audit Committee/President Commissioner (Independent)

Profil Anggota Komite Audit Rudy Hamdani dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Member of Audit Committee, Rudy Hamdani can be seen in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.



Andreas Danny Soesanto
Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Member of the Audit Committee/Independent Party
Periode dan Masa Jabatan: 2020 - 2023
Term of Office: 2020 - 2023

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 69 tahun
Kelahiran Jakarta, 8 Agustus 1954

Personal Data

Indonesian citizens
Age 69 years old
Born in Jakarta, August 8 1954

Domisili

Indonesia

Domicile

Indonesia

Pendidikan

Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Kristen Djaja (1986)

Education

Bachelor of Management Economics from Universitas Kristen Djaja (1986)

Pengalaman Kerja

- Komite Audit dan Risk Management di PT Bank Index Selindo (2018—Saat ini)
- Direktur Operasional & Direktur Kepatuhan di PT Bank Index Selindo (2008—2018)
- Direktur Operasional & Kepala Divisi Operasional di PT Bank Harmoni International (2001—2008)
- Direktur Operasional di PT Bank Patriot (2000—2001)
- Tim Penyelesaian DPK di BPPN (1999—2000)
- Kepala Divisi Operasional di PT Bank Metropolitan Raya (1997—1999)
- Kepala Divisi Operasional di PT Bank Harmoni International (1991—1997)
- PT Overseas Express Bank (1979—1991)
- Customer Support di PT Bank Pembangunan Pelayaran Indonesia (1975—1979)

Work Experience

- Audit and Risk Management Committee at PT Bank Index Selindo (2018—Present)
- Operations Director & Compliance Director at PT Bank Index Selindo (2008—2018)
- Operations Director & Head of Operations Division at PT Bank Harmoni International (2001—2008)
- Operations Director at PT Bank Patriot (2000—2001)
- TPF Settlement Team at IBRA (1999—2000)
- Head of Operations Division at PT Bank Metropolitan Raya (1997—1999)
- Head of Operations Division at PT Bank Harmoni International (1991—1997)
- PT Overseas Express Bank (1979—1991)
- Customer Support at PT Bank Pembangunan Pelayaran Indonesia (1975—1979)

Rangkap Jabatan

Komite Audit dan Risk Management di PT Bank Index Selindo

Concurrent Position

Audit and Risk Management Committee at PT Bank Index Selindo

Jeffri Sugiarto
Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Member of the Audit Committee/Independent Party
Periode dan Masa Jabatan: 2022 - 2025
Term of Office: 2022 - 2025

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 36 tahun
Kelahiran Jakarta, 5 Maret 1987

Personal Data

Indonesian citizens
Age 36 years old
Born in Jakarta, March 5 1987

Domisili

Indonesia

Domicile

Indonesia

Pendidikan

- Sarjana (S1) Accounting, San Fransisco State University (2010)
- Sarjana (S2) Business Administration, Argosy University (2015)

Education

- Bachelor of Accounting, San Francisco State University (2010)
- Bachelor of Business Administration, Argosy University (2015)

Pengalaman Kerja

- Tax dan accounting, Partner Evinco Mulia Consulting (2016—Saat ini)
- Senior Tax Associate, PBTaxand Consulting (2015—2016)
- Staff Akunting & Auditor, Van Sloten & Laranang CPAs, California Amerika (2013—2015)
- Tax Preparer, Volunteer Income Tax Assistance, California Amerika (2008)

Work Experience

- Tax and accounting, Partner Evinco Mulia Consulting (2016—Present)
- Senior Tax Associate, PBTaxand Consulting (2015—2016)
- Accounting & Auditor Staff, Van Sloten & Laranang CPAs, California Amerika (2013—2015)
- Tax Preparer, Volunteer Income Tax Assistance, California Amerika (2008)

Rangkap Jabatan

Tax dan accounting, Partner Evinco Mulia Consulting

Concurrent Position

Tax and accounting, Partner Evinco Mulia Consulting

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independensi.

Independence of the Audit Committee

All members of the Audit Committee who are Independent Parties have no financial, management, share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with Bank, which could affect their ability to act independently.

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with			Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with			Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain Management Relationship with Other Companies
	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	
Fransisca Ekawati	x	x	x	x	x	x	x
Rudy Hamdani	x	x	x	x	x	x	x
Andreas Danny Soesanto	x	x	x	x	x	x	x
Jeffri Sugiarto	x	x	x	x	x	x	x

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan paling sedikit terhadap:
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
 - Kesesuaian pelaksanaan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, sekurang-kurangnya Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut:
 - Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan.
 - Mengevaluasi cakupan audit dan hal-hal lain terkait dengan perencanaan audit laporan keuangan.
 - Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik serta rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- Memberikan rekomendasi terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI.
- Memastikan SKAI bekerja secara independen dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
- Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities, including the following:

- The Audit Committee carries out monitoring and evaluation of the planning and implementation of internal and external audits as well as monitoring the follow-up to audit results in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the Financial Statements process for at least:
 - Implementation of the duties of the Internal Audit Work Unit (SKAI).
 - In accordance with the implementation of external audits by Public Accounting Firms with applicable audit standards, at a minimum the Committee carries out the following matters:
 - Evaluate the criteria for the Public Accountant and Public Accounting Firm that will be appointed to carry out the audit.
 - Evaluate audit coverage and other matters related to financial statement audit planning.
 - Evaluate the suitability of audit implementation by Public Accountants and Public Accounting Firms with applicable audit standards, adequacy of field work time, assessment of the scope of services provided and adequacy of sampling tests as well as recommendations for improvements provided by AP and/or KAP.
- Provide recommendations regarding the preparation of the audit plan, scope and budget of SKAI.
- Ensure that SKAI works independently and upholds integrity in carrying out its duties.
- Review compliance with laws and regulations relating to Bank activities.
- Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant regarding the services provided.
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment and fees.
- Review audit reports and ensure that the Board of Directors takes necessary corrective actions quickly to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies, laws and regulations, or other problems identified and reported by SKAI.



8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak eksternal independen untuk melakukan kajian ulang terhadap kinerja Unit Audit Internal.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
12. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
5. Memberikan rekomendasi penunjukan maupun pemberhentian Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan Bank.

Rapat Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit yang telah disesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur beberapa hal terkait tata cara dan prosedur penyelenggaraan rapat sebagai berikut:

1. Rapat Komite Audit akan diselenggarakan sesuai kebutuhan, yang mana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Ketentuan rapat Komite Audit yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali baru terlaksana semenjak bulan November 2023 sampai dengan saat ini, setelah adanya penyesuaian dengan ketentuan POJK No 17 Tahun 2023.
2. Agenda atau acara yang akan dibicarakan dalam setiap rapat dan pertemuan disusun oleh Ketua Komite atas dasar usul pendapat dari anggota komite lainnya.
3. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Audit atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
4. Apabila ada perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam berita acara rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

8. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an independent external party to conduct a review of the performance of the Internal Audit Unit.
9. Maintain the confidentiality of documents, data and Bank information.
10. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment and dismissal of the Head of SKAI.
11. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the provision of overall SKAI annual remuneration and performance awards.
12. Evaluate the implementation of audit services for annual historical financial information by AP and/or KAP.

Audit Committee Authorities

In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authorities:

1. Access required documents, data and information about employees, funds, assets and Bank resources;
2. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and parties carrying out internal audit, risk management and Accountant functions regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee;
3. Involve independent parties outside the Member of Audit Committee who are needed to assist in carrying out their duties (if necessary); And
4. Carry out other authorities granted by the Board of Commissioners;
5. Provide recommendations for the appointment or dismissal of Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP) that audit Bank's Financial Statements.

Audit Committee Meeting

Based on the Audit Committee Charter which has been adapted to Financial Services Authority Regulation no. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks regulates several matters related to the procedures and procedures for holding meetings as follows:

1. Audit Committee meetings will be held as needed, which is at least 1 (one) time in 1 (one) month. The provisions for Audit Committee meetings to be held once every 1 (one) month have only been implemented since November 2023 until now, after adjustments to the provisions of POJK No. 17 of 2023.
2. The agenda or events to be discussed at each meeting and gathering are prepared by the Committee Chair on the basis of suggestions from other committee members.
3. Audit Committee meetings can only be held if attended by the majority of Member of Audit Committee or at least 51% (fifty one percent) of the total number of Member of Audit Committee including 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) Independent Party.
4. If there is a difference of opinion (dissenting opinion) at a committee meeting, it must be stated clearly in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion.
5. Audit Committee meeting decisions are taken based on deliberation to reach consensus.
6. In the event that consensus deliberation does not occur, the decision is taken based on the majority vote.

- | | |
|---|--|
| <p>7. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.</p> <p>8. Setiap rapat komite audit dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> | <p>7. Decisions taken by majority vote are based on the principle of 1 (one) person 1 (one) vote.</p> <p>8. Every audit committee meeting is recorded in minutes, properly documented, signed by the Chair of the Audit Committee and submitted to the Board of Commissioners.</p> |
|---|--|

Selama tahun 2023, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut: During 2023, the Audit Committee held 5 (five) meetings with detailed agendas and frequency of attendance as follows:

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Audit Minutes and Attendance of Audit Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Komite Audit dalam Rapat Reasons for the Audit Committee's Absence from Meetings
10 Februari 2023 February 10, 2023	Online Meeting	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit 28 November 2022. • Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit semester 2 Tahun 2022. • Rencana Kerja dan Anggaran Internal Audit 2023. • Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit. • Follow-up to the Minutes of Audit Committee Meeting November 28, 2022. • Report on the main audit results for semester 2 of 2022. • 2023 Internal Audit Work Plan and Budget. • Monitoring Follow-up Audit Findings. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fransisca Ekawati • Rudy Hamdani • Andreas Danny Soesanto • Jeffri Sugiarto 	-
26 Mei 2023 May 26, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan Online Bank Aladin Syariah Head Office and Online	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit 10 Februari 2023. • Aktivitas Audit dan Usulan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. • Hasil Audit Internal. • Aktivitas Proses Non Audit. • Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit. • Follow-up to the Minutes of Audit Committee Meeting 10 February 2023. • Audit Activities and Proposed Changes to the 2023 Work Plan. • Internal Audit Results. • Non-Audit Process Activities. • Monitoring Follow-up Audit Findings. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fransisca Ekawati • Rudy Hamdani • Andreas Danny Soesanto • Jeffri Sugiarto 	-
18 Agustus 2023 August 18, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan Online Bank Aladin Syariah Head Office and Online	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit 26 Mei 2023. • Aktivitas Audit dan Usulan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. • Hasil Audit Internal Per 31 Juli 2023. • Aktivitas Audit Pendukung. • Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit. • Follow-up to the Minutes of Audit Committee Meeting May 26, 2023. • Audit Activities and Proposed Changes to the 2023 Work Plan. • Internal Audit Results as of July 31, 2023. • Supporting Audit Activities. • Monitoring Follow-up Audit Findings. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fransisca Ekawati • Rudy Hamdani • Andreas Danny Soesanto • Jeffri Sugiarto 	-



Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Audit Minutes and Attendance of Audit Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Komite Audit dalam Rapat Reasons for the Audit Committee's Absence from Meetings
10 November 2023 November 10, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan Online Bank Aladin Syariah Head Office and Online	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit 18 Agustus 2023. Struktur Organisasi Internal Audit, Aktivitas Audit dan Usulan Perubahan Rencana Audit Tahun 2023. Aktivitas Audit Pendukung. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit. Follow-up to the Minutes of Audit Committee Meeting August 18, 2023. Internal Audit Organizational Structure, Audit Activities and Proposed Changes to the 2023 Audit Plan. Supporting Audit Activities. Monitoring Follow-up Audit Findings. 	<ul style="list-style-type: none"> Fransisca Ekawati Rudy Hamdani Andreas Danny Soesanto Jeffri Sugiarto 	-
15 Desember 2023 December 15, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan Online Bank Aladin Syariah Head Office and Online	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat komite Audit 10 November 2023. Aktivitas Audit Tahun 2023 per November 2023. Hasil Audit Internal per 30 November 2023. Aktivitas Audit Pendukung. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit. Rencana Kerja dan Anggaran Internal Audit Tahun 2024 (Annual Audit Plan 2024) Follow-up to the Minutes of Audit Committee Meeting 10 November 2023. Audit Activities for 2023 as of November 2023. Internal Audit Results as of 30 November 2023. Supporting Audit Activities. Monitoring Follow-up Audit Findings. Internal Audit Work Plan and Budget for 2024 (Annual Audit Plan 2024) 	<ul style="list-style-type: none"> Fransisca Ekawati Rudy Hamdani Andreas Danny Soesanto Jeffri Sugiarto 	-

Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Audit pada rapat internal dapat dilihat di bawah ini.

A recapitulation of the attendance of Member of Audit Committee at internal meetings can be seen below.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat Internal Recapitulation of Audit Committee Attendance at Internal Meetings

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Fransisca Ekawati (Ketua) (Chairman)	5	5	100%
Rudy Hamdani (Anggota) (Member)	5	5	100%
Andreas Danny Soesanto (Anggota) (Member)	5	5	100%

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat Internal Recapitulation of Audit Committee Attendance at Internal Meetings

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Jeffri Sugiarto (Anggota) (Member)	5	5	100%
Rata-Rata Average			100%

Program Peningkatan Kompetensi Komite Audit

Bank senantiasa mendorong Komite Audit untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Berikut pengembangan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2023 dapat dilihat di bab Tata Kelola Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit menjalankan tugas dengan berpedoman kepada piagam Komite Audit dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Adapun peran yang dilaksanakan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Reviu Terhadap Sistem Pengendalian Internal Bank**
Melakukan reviu terhadap rancangan dan implementasi dari sistem pengendalian internal Bank dengan memperhatikan kecukupan kontrol dan ketersediaan ketentuan Internal yang salah satunya melalui Laporan Hasil Audit Internal. Hasil reviu tersebut sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan pengarahannya kepada manajemen dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal maupun melaksanakan operasional Bank secara efektif dan efisien serta memperhatikan ketentuan regulator.
- Reviu Terhadap Fungsi Internal Audit**
Komite Audit telah melakukan reviu dan proses penilaian terhadap peran dan pelaksanaan fungsi Audit Internal dalam mengevaluasi rancangan dan implementasi sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola Bank.

Proses reviu terhadap pelaksanaan fungsi internal audit diawali dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran internal audit tahun 2023 yang dilakukan saat rapat Komite Audit. Rencana kerja dan anggaran Internal audit tersebut disusun secara risk based dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pihak regulator, Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen untuk area-area yang ingin dilakukan audit. Pada rencana kerja tahun 2023 terdapat 8 (delapan) objek tematik yang harus dilakukan audit di mana aktivitasnya melekat kepada unit kerja dan sistem/aplikasi.

Audit Committee Competency Improvement Program

Bank always encourages the Audit Committee to develop competency through training. The following is the competency development that the Audit Committee participated in throughout 2023:

Implementation of Audit Committee Duties

The Audit Committee carries out its duties guided by the Audit Committee charter and functions to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties. The roles carried out in 2023 are as follows:

- Review of Bank's Internal Control System**
Conduct a review of the design and implementation of Bank's internal control system by paying attention to the adequacy of controls and the availability of internal provisions, one of which is through the Internal Audit Results Report. The results of the review serve as input to the Board of Commissioners to provide direction to management in preparing and implementing an internal control system and carrying out Bank operations effectively and efficiently and paying attention to regulatory provisions.
- Review of the Internal Audit Function**
The Audit Committee has carried out a review and assessment process of the role and implementation of the Internal Audit function in evaluating the design and implementation of Bank's internal control system, risk management and governance processes.
The review process for the implementation of the internal audit function begins with the preparation of the 2023 internal audit work plan and budget which is carried out during the Audit Committee meeting. The internal audit work plan and budget are prepared on a risk-based basis by considering recommendations from the regulator, Board of Commissioners, Board of Directors and management for areas that wish to be audited. In the 2023 work plan there are 8 (eight) thematic objects that must be audited where the activities are attached to work units and systems/applications.



Selain proses penyusunan rencana kerja, Komite Audit juga melakukan reviu terhadap pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank yang tercantum di dalam POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal Pada Bank. Pada tahun 2023, dari 8 (delapan) objek tematik audit yang telah ditetapkan terdapat 1 (satu) objek tematik audit yang di carry forward ke tahun 2024 dan 1 (satu) objek tematik audit di luar yang ditetapkan (post implementation review) dengan mempertimbangan beberapa hal dan proses tersebut telah disampaikan dalam rapat Komite Audit.

Selain aktivitas tersebut, Komite Audit juga telah melaksanakan seluruh aktivitas yang telah terlaksana pada tahun 2023, yaitu:

- a. Pemberian rekomendasi dan Persetujuan Audit Plan 2023 kepada Dewan Komisaris Tahun 2023.
 - b. Kelemahan yang dijumpai dari hasil audit agar segera disampaikan kepada pihak manajemen untuk segera dilakukan tindak lanjutnya.
 - c. Tindak lanjut hasil audit agar selalu dimonitor pelaksanaannya sehingga memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Bank.
 - d. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proses Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2023.
 - e. Pemberian evaluasi atas kinerja KAP audit Laporan Keuangan 2022 kepada Dewan Komisaris.
 - f. Komite audit meeting secara periodic sesuai peraturan regulator yang agenda pembahasannya antara lain terkait reviu pelaksanaan audit, monitoring tindak lanjut temuan audit dan hal-hal lain yang berhubungan kecukupan sistem pengendalian internal Bank.
3. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Eksternal Audit
Komite Audit melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal melalui proses pemberian evaluasi atas kinerja Auditor Eksternal atas audit Laporan Keuangan 2022 kepada Dewan Komisaris dan pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proses Penunjukan KAP atas audit Laporan Keuangan Tahun 2023. Laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja.
4. Reviu Penyajian Laporan Keuangan Publikasi
Komite Audit secara periodik melakukan review terhadap laporan keuangan sebelum dilakukan publikasi. Pelaksanaan reviu tersebut dimaksudkan untuk menilai kewajaran figure yang disajikan.
5. Realisasi Rapat Komite Audit selama tahun 2023
Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama tahun 2023 adalah sebanyak 5 (lima) kali dengan materi pembahasan yang dapat dilihat pada bagian. Agenda Kegiatan Komite Audit.

In addition to the work plan preparation process, the Audit Committee also reviews the audit implementation. The audit carried out by the Internal Audit Work Unit (SKAI) is in accordance with the Standards for the Implementation of Bank's Internal Audit Function as stated in POJK No.1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Banks. In 2023, of the 8 (eight) audit thematic objects that have been determined, there was 1 (one) audit thematic object that will be carried forward to 2024 and 1 (one) audit thematic object outside of that determined (post implementation review) considering several These matters and processes have been presented at the Audit Committee meeting.

Apart from these activities, the Audit Committee has also carried out all activities that have been carried out in 2023, namely:

- a. Providing recommendations and Approval of the 2023 Audit Plan to the Board of Commissioners in 2023.
 - b. Weaknesses found from the audit results must be immediately conveyed to management for immediate follow-up.
 - c. Follow up audit results so that implementation is always monitored so as to provide added value for achieving Bank's objectives.
 - d. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the KAP Appointment process for the 2023 Financial Statements Audit.
 - e. Providing an evaluation of the KAP's performance in the 2022 Financial Statements audit to the Board of Commissioners.
 - f. The audit committee meets periodically in accordance with regulatory regulations and the discussion agenda includes, among other things, reviewing audit implementation, monitoring follow-up to audit findings and other matters related to the adequacy of Bank's internal control system.
3. Supervision of the Implementation of External Audits
The Audit Committee supervises the implementation of the External Audit through the process of providing an evaluation of the performance of the External Auditor on the audit of the 2022 Financial Statements to the Board of Commissioners and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the process of Appointing a KAP for the audit of the 2023 Financial Statements. Bank Financial Statements for the year ended December 31, 2023 has been audited by the Purwanto, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm.
4. Review of the Presentation of Published Financial Statements
The Audit Committee periodically reviews Financial Statements before publication. The review is intended to assess the fairness of the figures presented.
5. Realization of Audit Committee Meetings during 2023
There was 5 (five) Audit Committee Meetings during 2023 with discussion material which can be seen in section. Audit Committee Activity Agenda.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk Bank Aladin Syariah dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam hal ini, Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah ditetapkan dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.001.BOC/10.2021 tanggal 1 Oktober 2021. Piagam ini mengatur tentang landasan pembentukan dan pelaksanaan tugas, maksud dan tujuan, struktur dan persyaratan keanggotaan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, rapat, serta masa tugas anggota.

Kriteria Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen.
2. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
3. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
4. Mayoritas anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus merupakan Komisaris Independen.
5. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah seorang Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
7. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
8. Mantan anggota Direksi Bank tidak dapat menjadi Pihak Independen pada Bank sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
9. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

1. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee was formed by Bank Aladin Syariah with reference to Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. In this case, the Risk Monitoring Committee was formed to support the effective implementation of its duties and responsibilities, especially on matters relating to the implementation of risk management policies.

Risk Monitoring Committee Charter

The Risk Monitoring Committee carries out its duties and responsibilities based on the Risk Monitoring Committee Charter which has been established and ratified through the Decree of the Board of Commissioners No. SK.001.BOC/10.2021 dated October 1, 2021. This charter regulates the basis for the formation and implementation of duties, aims and objectives, membership structure and requirements, tasks, authority, rights and obligations, meetings, and Terms of Office for members.

Risk Monitoring Committee Criteria

Members of the Risk Monitoring Committee consist of at least:

1. An Independent Commissioner.
2. An Independent Party who has expertise in the financial sector.
3. An Independent Party who has expertise in the field of risk management.
4. The majority of members of the Board of Commissioners who are members of the Risk Monitoring Committee must be Independent Commissioners.
5. Members from Independent Parties must be recommended by the Nomination and Remuneration Committee.
6. The Chair of the Risk Monitoring Committee is an Independent Commissioner who also serves as a member.
7. Members of the Risk Monitoring Committee have integrity and a good financial reputation.
8. Former members of Bank's Board of Directors cannot become Independent Parties at Bank before undergoing a cooling off period of at least 6 (six) months.
9. The Risk Monitoring Committee works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioners.

Terms of Office for the Risk Monitoring Committee

1. The term of office of members of the Risk Monitoring Committee who are members of the Board of Commissioners is the same as the term of their appointment as members of the Board of Commissioners as determined by the General Meeting of Shareholders.
2. Members of the Risk Monitoring Committee who are members of the Board of Commissioners automatically cease when their term of office as a member of the Board of Commissioners ends.



3. Penggantian anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Pemantau Risiko dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

3. Replacement of members of the Risk Monitoring Committee who are not members of the Board of Commissioners shall be carried out no later than 60 (sixty) days after the member of the Risk Monitoring Committee in question can no longer carry out their functions.

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Komite Pemantau Risiko Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua dan 2 (dua) anggota. Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Number, Composition and Structure of the Risk Monitoring Committee in 2023

Bank Risk Monitoring Committee consists of 3 (three) people consisting of 1 (one) Chairman and 2 (two) members. The composition of the Risk Monitoring Committee membership as of December 31, 2023 is as follows:

Susunan Komite Pemantau Risiko Bank per 31 Desember 2023 Composition of Bank's Risk Monitoring Committee as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Fransisca Ekawati	Ketua (Anggota) Komite Pemantau Risiko Chair (Member) of the Risk Monitoring Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002. BOD/04.2021 tanggal 7 April 2021. Board of Commissioners Decree No. SK.002. BOD/04.2021 dated April 7, 2021.
Rudy Hamdani	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002.BOD/03.2022 tanggal 7 Maret 2022. Board of Commissioners Decree No. SK.002.BOD/03.2022 dated March 7, 2022.
Andreas Danny Soesanto	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen Member of the Risk Monitoring Committee/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.001. BOD/07.2020 tanggal 1 Juli 2020. Board of Commissioners Decree No. SK.001. BOD/07.2020 dated July 1, 2020.
Jeffri Sugarto	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen Member of the Risk Monitoring Committee/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002.BOD/11.2022 tanggal 1 Desember 2022. Board of Commissioners Decree No. SK.002.BOD/11.2022 dated 1 December 2022.

Profil Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Profile

Fransisca Ekawati

Ketua (Anggota) Komite Pemantau Risiko /Komisaris Independen
Chairman (Member) of the Risk Monitoring Committee / Independent Commissioner

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko Fransisca Ekawati dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini
The profile of Risk Monitoring Committee Member, Fransisca Ekawati can be seen in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter in this Annual Report

Rudy Hamdani

Anggota Komite Pemantau Risiko /Presiden Komisaris (Independen)
Member of the Risk Monitoring Committee / President Commissioner (Independent)

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko Rudy Hamdani dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini
The profile of Risk Monitoring Committee Member Rudy Hamdani can be seen in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report

Andreas Danny Soesanto

Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen
Member of the Risk Monitoring Committee/Independent Party
Periode dan Masa Jabatan: 2020 - 2023
Term of Office: 2020 - 2023

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 69 tahun
Kelahiran Jakarta, 8 Agustus 1954

Domisili

Indonesia

Pendidikan

Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Kristen Djaja (1986)

Pengalaman Kerja

- Komite Audit dan Risk Management di PT Bank Index Selindo (2018—Saat ini)
- Direktur Operasional & Direktur Kepatuhan di PT Bank Index Selindo (2008—2018)
- Direktur Operasional & Kepala Divisi Operasional di PT Bank Harmoni International (2001—2008)
- Direktur Operasional di PT. Bank Patriot (2000—2001)
- Tim Penyelesaian DPK di BPPN (1999—2000)
- Kepala Divisi Operasional di PT Bank Metropolitan Raya (1997—1999)
- Kepala Divisi Operasional di PT Bank Harmoni International (1991—1997)
- PT Overseas Express Bank (1979—1991)
- Customer Support di PT Bank Pembangunan Pelayaran Indonesia (1975—1979)

Personal Data

Indonesian citizens
Age 69 years old
Born in Jakarta, August 8, 1954

Domicile

Indonesia

Education

Bachelor of Management Economics from Universitas Kristen Djaja (1986)

Work Experience

- Audit and Risk Management Committee at PT Bank Index Selindo (2018—Present)
- Operations Director & Compliance Director at PT Bank Index Selindo (2008—2018)
- Operations Director & Head of Operations Division at PT Bank Harmoni International (2001—2008)
- Director of Operations at PT. Patriot Bank (2000—2001)
- TPF Settlement Team at IBRA (1999—2000)
- Head of Operations Division at PT Bank Metropolitan Raya (1997—1999)
- Head of Operations Division at PT Bank Harmoni International (1991—1997)
- PT Overseas Express Bank (1979—1991)
- Customer Support at PT Bank Pembangunan Pelayaran Indonesia (1975—1979)

Jeffri Sugiarto

Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen
Member of the Risk Monitoring Committee/Independent Party
Periode dan Masa Jabatan: 2022 - 2025
Term of Office: 2022 - 2025

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 36 tahun
Kelahiran Jakarta, 5 Maret 1987

Domisili

Indonesia

Pendidikan

- Sarjana (S1) Accounting, San Fransisco State University (2010)
- Sarjana (S2) Business Administration, Argosy University (2015)

Pengalaman Kerja

- Tax dan accounting, Partner Evinco Mulia Consulting (2016—Saat ini)
- Senior Tax Associate, PBTaxand Consulting (2015—2016)
- Staff Akunting & Auditor, Van Sloten & Laranang CPAs, California Amerika (2013—2015)
- Tax Preparer, Volunteer Income Tax Assistance, California Amerika (2008)

Rangkap Jabatan

Tax dan accounting, Partner Evinco Mulia Consulting

Personal Data

Indonesian citizens
Age 36 years old
Born in Jakarta, March 5 1987

Domicile

Indonesia

Education

Bachelor of Accounting, San Francisco State University (2010)
Bachelor of Business Administration, Argosy University (2015)

Work Experience

- Tax and accounting, Partner Evinco Mulia Consulting (2016—Present)
- Senior Tax Associate, PBTaxand Consulting (2015—2016)
- Accounting & Auditor Staff, Van Sloten & Laranang CPAs, California Amerika (2013—2015)
- ax Preparer, Volunteer Income Tax Assistance, California Amerika (2008)

Concurrent Position

Tax and accounting, Partner Evinco Mulia Consulting

Independensi Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mewujudkan praktik *Good Corporate Governance* yang sesuai prosedur, Komite Pemantau Risiko wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen dalam bentuk opini dan rekomendasi yang objektif, independen dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak di bawah tekanan pihak manapun dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap potensi risiko.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independence of the Risk Monitoring Committee

In order to realize Good Corporate Governance practices that comply with procedures, the Risk Monitoring Committee is obliged to carry out its duties and responsibilities professionally and independently in the form of opinions and recommendations that are objective, independent and accountable, and not under pressure from any party in carrying out evaluation and supervision of potential risk.

All members of the Risk Monitoring Committee are independent parties, that is, they have no financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or business relationships with Bank that could affect their ability to act independently.



Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with			Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with			Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain Management Relationship with Other Companies
	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	
Fransisca Ekawati	x	x	x	x	x	x	x
Rudy Hamdani	x	x	x	x	x	x	x
Andreas Danny Soesanto	x	x	x	x	x	x	x
Jeffri Sugiarto	x	x	x	x	x	x	x

Tugas dan Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko mencakup hal-hal berikut:

- Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko melakukan tugas dan tanggung jawab yang paling kurang meliputi:
 - Melakukan evaluasi tentang kebijakan dan pedoman manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Komite Pemantau Risiko wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).
- Komite Pemantau Risiko dapat menambahkan risiko yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.
- Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - Meminta dan memperoleh keterangan dari Direksi, pejabat, maupun karyawan Bank dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
 - Memperoleh informasi dari auditor internal maupun eksternal.
 - Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap dokumen, data dan Sistem Informasi Manajemen (MIS) serta sumber daya lainnya milik Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 - Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko diatur beberapa hal terkait tata cara dan prosedur penyelenggaraan rapat sebagai berikut:

- Rapat Komite Pemantau Risiko wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun.
- Agenda atau acara yang akan dibicarakan dalam setiap rapat dan pertemuan disusun oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atas dasar usul pendapat dari anggota lainnya pada Komite Pemantau Risiko.

Duties and Responsibilities, and Authorities of the Risk Monitoring Committee

The duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee include the following:

- In order to provide recommendations to the Board of Commissioners, the Risk Monitoring Committee carries out duties and responsibilities which at least include:
 - Evaluating risk management policies and guidelines and implementing Bank policies.
 - Monitor and evaluate the implementation of the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Work Unit.
- The Risk Monitoring Committee is obliged to supervise the implementation of risk management related to country risk and transfer risk carried out by Bank, including the implementation of evaluation and testing (*stress testing*).
- The Risk Monitoring Committee can add risks related to the implementation of the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee in accordance with the needs and/or complexity of Bank.
- In carrying out its duties, the Risk Monitoring Committee has the following authorities:
 - Request and obtain information from the Board of Directors, officers and employees of Bank and parties carrying out risk management functions, regarding the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee.
 - Obtain information from internal and external auditors.
 - Full, free and unlimited access to documents, data and Management Information Systems (MIS) as well as other resources belonging to Bank related to the implementation of its duties.
 - Carry out other authorities granted by the Board of Commissioners.

Risk Monitoring Committee Meeting

In accordance with the Risk Monitoring Committee Charter, several matters related to the procedures and procedures for holding meetings are regulated as follows:

- Risk Monitoring Committee meetings must be held at least 1 (one) time every quarter or 4 (four) times a year.
- The agenda or events to be discussed at each meeting and gathering are prepared by the Chair of the Risk Monitoring Committee on the basis of suggestions from other members of the Risk Monitoring Committee.

3. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
4. Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota pemantau Risiko dari Komisaris Independen lainnya apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
5. Apabila dipandang perlu Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan rapat untuk hadir dalam Rapat Komite Pemantau Risiko.
6. Materi dan seluruh dokumen terkait Rapat Komite Pemantau Risiko disiapkan, dikumpulkan, dan didokumentasikan oleh Sekretaris Komite Pemantau Risiko.
7. Setiap keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko.
8. Setiap Rapat Komite Pemantau Risiko dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko yang dibuat dan disampaikan oleh Sekretaris Komite Pemantau Risiko kepada Ketua Komite Pemantau Risiko untuk ditandatangani oleh Ketua Komite Pemantau Risiko dan Sekretaris Komite Pemantau Risiko.
9. Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko yang telah ditandatangani oleh Ketua Komite Pemantau Risiko/Ketua Pengganti Komite Pemantau Risiko dan Sekretaris Komite Pemantau Risiko selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris sebagai laporan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko, kepada anggota dan unit kerja terkait.
10. Hasil keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko yang terkait dengan seluruh unit kerja ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja dengan diketahui oleh Direksi. Hasil tindak lanjut keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko oleh unit kerja terkait disampaikan dalam Rapat Komite Pemantau Risiko periode selanjutnya.
11. Mekanisme pengambilan keputusan oleh Komite Pemantau Risiko selain melalui forum rapat dapat dilakukan melalui mekanisme sirkulasi, dengan ketentuan:
 - a. Keputusan untuk mengajukan pengambilan keputusan secara sirkulasi ditentukan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang disampaikan melalui Sekretaris Komite Pemantau Risiko.
 - b. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko menyetujui usul yang diajukan secara tertulis (termasuk melalui e-mail) dengan memberikan persetujuan tertulis secara elektronik.
12. Rapat dapat dilakukan dengan tatap muka baik secara langsung maupun virtual melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, atau kombinasi antara keduanya.
13. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam Rapat Komite Pemantau Risiko, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
14. Keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Risk Monitoring Committee meetings can only be held if attended by at least 51% of the total committee members including 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) Independent Party.
4. The Risk Monitoring Committee meeting is chaired by the Chair of the Risk Monitoring Committee or a Risk Monitoring member from another Independent Commissioner if the Chair of the Risk Monitoring Committee is unable to attend.
5. If deemed necessary, the Risk Monitoring Committee may invite other parties related to the meeting to attend the Risk Monitoring Committee Meeting.
6. Materials and all documents related to the Risk Monitoring Committee Meeting are prepared, collected and documented by the Secretary of the Risk Monitoring Committee.
7. Every decision of the Risk Monitoring Committee Meeting is binding on all Risk Monitoring Committee Members.
8. Each Risk Monitoring Committee Meeting and the results of its decisions are stated in the Minutes of the Risk Monitoring Committee Meeting which are drawn up and submitted by the Secretary of the Risk Monitoring Committee to the Chair of the Risk Monitoring Committee to be signed by the Chair of the Risk Monitoring Committee and the Secretary of the Risk Monitoring Committee.
9. Minutes of the Risk Monitoring Committee Meeting which have been signed by the Chair of the Risk Monitoring Committee/Alternate Chair of the Risk Monitoring Committee and the Secretary of the Risk Monitoring Committee are then distributed by the Secretary of the Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners as a report on the implementation of the duties of the Risk Monitoring Committee, to members and related work units .
10. The resolutions of the Risk Monitoring Committee Meeting related to all work units are followed up by all work units and made known to the Board of Directors. The results of the follow-up to the decisions of the Risk Monitoring Committee Meeting by the relevant work units are presented at the Risk Monitoring Committee Meeting for the following period.
11. The decision-making mechanism by the Risk Monitoring Committee, other than through a meeting forum, can be carried out through a circulation mechanism, provided that:
 - a. The decision to submit a circular decision is determined by the Chair of the Risk Monitoring Committee, conveyed through the Secretary of the Risk Monitoring Committee.
 - b. The Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee approve proposals submitted in writing (including via e-mail) by providing written approval electronically.
12. Meetings can be held face-to-face either directly or virtually via teleconferencing or other media facilities that enable all Committee Meeting Participants to see and hear each other directly and participate in the meeting, or a combination of both.
13. Dissenting opinions that occur at the Risk Monitoring Committee Meeting must be stated clearly in the Minutes of Meeting along with the reasons for the difference of opinion.
14. Decisions from the Risk Monitoring Committee Meeting are first made based on deliberation to reach consensus.



15. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip satu orang satu suara.

15. In the event that deliberation to reach consensus does not occur, decisions are made based on the majority vote with the principle of one person, one vote.

Pada tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

In 2023, the Risk Monitoring Committee has held 5 (five) meetings with detailed agendas and frequency of attendance as follows:

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Minutes and Attendance of Risk Monitoring Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Reasons for the absence of the Risk Monitoring Committee at the Meeting
14 Februari 2023 February 14, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan Online Bank Aladin Syariah Head Office and Online	<ul style="list-style-type: none"> Matters Arising Rapat Komite ORMC ke-4 tanggal 24 November 2022 Informasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2022 Informasi Laporan ICAAP Semester II 2022 Informasi Revisi Risk Appetite Statement Informasi Pendelegasian Kewenangan Pembiayaan Informasi Financing to Value (FTV) Keputusan Rapat Komite ORMC Matters Arising 4th ORMC Committee Meeting November 24, 2022 Bank Soundness Level Report Information for Semester II 2022 ICAAP Report Information for Semester II 2022 Information on the Revision of the Risk Appetite Statement Information on Delegation of Financing Authority Financing to Value (FTV) Information ORMC Committee Meeting Decisions 	5 orang 5 people	-
26 Mei 2023 May 26, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan Online Bank Aladin Syariah Head Office and Online	<ul style="list-style-type: none"> Informasi Laporan Profil Risiko Bank Triwulan I tahun 2023 Informasi Revisi Kertas Kerja Profil Risiko Informasi Pemantauan Financing to Deposit Ratio (FDR) Triwulan I tahun 2023 Informasi Penyampaian Hasil Stress Testing Risiko Pasar per 15 Maret 2023 Informasi QA Proses Pembiayaan Keputusan Rapat Komite ORMC Bank Risk Profile Report Information for Quarter I 2023 Risk Profile Working Paper Revision Information Financing to Deposit Ratio (FDR) Monitoring Information for the First Quarter of 2023 Information on Submitting Market Risk Stress Testing Results as of March 15 2023 QA Information on Financing Process ORMC Committee Meeting Decision 	5 orang 5 people	-
18 Agustus 2023 August 18, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan Online Bank Aladin Syariah Head Office and Online	<ul style="list-style-type: none"> Informasi Risalah dari Rapat KPR Sebelumnya Informasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Semester I 2023 Informasi Roadmap ERM 2023 – 2024 Informasi Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Risiko Minutes of Information from Previous KPR Meetings Information on Bank Soundness Level (TKB) Position for Semester I 2023 ERM Roadmap Information 2023 – 2024 Information on the Organizational Structure of the Risk Management Directorate 	4 orang 4 people	Rudy Hamdani tidak hadir dalam rapat karena sakit Rudy Hamdani tidak hadir dalam rapat karena sakit

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Minutes and Attendance of Risk Monitoring Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Reasons for the absence of the Risk Monitoring Committee at the Meeting
10 November 2023 November 10, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan <i>Online</i> Bank Aladin Syariah Head Office and Online	<ul style="list-style-type: none"> Informasi Risalah dari Rapat KPR Sebelumnya Informasi Laporan Penilaian Profil Risiko Triwulan III 2023 dan Perubahan Parameter Kertas Kerja Laporan Profil Risiko Informasi POJK 17 Tahun 2023 dan Implikasinya terhadap Rapat KPR dan KMR Informasi CKPN Informasi <i>Progress Update Enterprise Risk Management</i> Informasi Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Risiko Minutes of Information from Previous KPR Meetings Information on the Risk Profile Assessment Report for Quarter III 2023 and Changes to the Parameters of the Risk Profile Report Working Paper Information on POJK 17 of 2023 and its implications for KPR and KMR meetings CKPN information Enterprise Risk Management Update Progress Information Information on the Organizational Structure of the Risk Management Directorate 	5 orang 5 people	-
15 Desember 2023 December 15, 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan <i>Online</i> Bank Aladin Syariah Head Office and Online	<ul style="list-style-type: none"> Informasi Risalah dari Rapat KPR Sebelumnya Informasi Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Risiko Informasi Rasio Risiko per 30 November 2023 Informasi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) Informasi <i>Progress Update Enterprise Risk Management</i> Informasi <i>Progress Update Business Risk Control</i> Informasi Hasil BCP dan <i>Call Tree Testing</i> 2023 Pemenuhan Pelaksanaan Komite Risiko – 2023 <p>Minutes of Information from Previous KPR Meetings Information on the Organizational Structure of the Risk Management Directorate Risk Ratio Information as of November 30, 2023 Information on the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM) Enterprise Risk Management Update Progress Information Business Risk Control Update Progress Information Information on 2023 BCP and Call Tree Testing Results Fulfillment of Risk Committee Implementation – 2023</p>	5 orang 5 people	-

Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko pada rapat internal dapat dilihat di bawah ini.

A recapitulation of the attendance of Risk Monitoring Committee members at internal meetings can be seen below.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko pada Rapat Internal Recapitulation of Risk Monitoring Committee Attendance at Internal Meetings

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Fransisca Ekawati (Ketua/Anggota) (Chairman/Member)	5	5	100%
Rudy Hamdani (Anggota) (Member)	5	4	80%
Andreas Danny Soesanto (Anggota) (Member)	5	5	100%
Jeffri Sugiarto (Anggota) (Member)	5	5	100%
Rata-Rata Average			95%



Program Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Bank Aladin Syariah senantiasa mendorong dan memfasilitasi Komite Pemantau Risiko untuk melakukan pengembangan kompetensi. Adapun pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh anggota Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2023 dapat dilihat di bab Tata Kelola Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2023 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di antaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat ORMC sebanyak 5 (lima) kali pada tahun 2023.
2. Melakukan ratifikasi piagam ORMC sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2023.
3. Mengevaluasi penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko.
4. Memantau dan mengevaluasi laporan tingkat kesehatan Bank dan ICAAP per semester dan laporan profil risiko per triwulan.
5. Menetapkan dan merekomendasi metodologi, evaluasi dan pengukuran risiko.
6. Memberikan rekomendasi atas pendelegasian kewenangan pembiayaan, *financing to value* (FTV), *stress testing* risiko pasar, QA proses pembiayaan, *roadmap* ERM 2023-2024, struktur organisasi Direktorat Manajemen Risiko, implikasi POJK 17/2023 terhadap pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko, perhitungan CKPN, perhitungan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), hasil BCP dan *call tree testing* dan pemenuhan pelaksanaan Komite Risiko tahun 2023.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Lebih jauh, Komite Remunerasi dan Nominasi akan menilai, memantau, mengevaluasi dan memastikan pelaksanaan sistem nominasi dan remunerasi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Aladin Syariah telah memiliki Piagam Komite yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman tersebut telah disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022

Per 31 Desember 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) ketua dan 2 (dua) anggota. Adapun susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Competency Improvement Program

Bank Aladin Syariah always encourages and facilitates the Risk Monitoring Committee to carry out competency development. The training attended by members of the Risk Monitoring Committee throughout 2023 can be seen in the Corporate Governance chapter.

Implementation of the Duties of the Risk Monitoring Committee

Throughout 2023, the Risk Monitoring Committee has carried out its duties and responsibilities, including the following:

1. Hold 5 (five) ORMC meetings in 2023.
2. Ratify the ORMC charter 1 (one) time in 2023.
3. Evaluate the preparation of guidelines for implementing risk management.
4. Monitor and evaluate Bank's health level and ICAAP reports per semester and risk profile reports per quarter.
5. Determine and recommend methodology, evaluation and risk measurement.
6. Provide recommendations on delegation of financing authority, financing to value (FTV), market risk stress testing, QA financing process, ERM roadmap 2023-2024, organizational structure of the Risk Management Directorate, implications of POJK 17/2023 for the implementation of Risk Monitoring Committee meetings, calculations CKPN, calculation of the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM), BCP results and call tree testing and fulfillment of the implementation of the Risk Committee in 2023.

Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners to carry out the functions and duties of the Board of Commissioners regarding Nomination and Remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. Furthermore, the Nomination and Remuneration Committee will assess, monitor, evaluate and ensure the implementation of the nomination and remuneration system in accordance with Bank's Articles of Association and applicable regulations.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee of Bank Aladin Syariah has a Committee Charter which serves as a guideline in carrying out its duties and responsibilities. These guidelines have been prepared based on applicable regulations and legislation.

Number, Composition and Structure of the Nomination and Remuneration Committee in 2022

As of December 31, 2023, Bank's Nomination and Remuneration Committee consists of 3 (three) people consisting of 1 (one) chairman and 2 (two) members. The membership composition of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Rudy Hamdani	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. M.005/HCD/03.2022 tanggal 07 Maret 2022 Board of Commissioners Decree No. M.005/HCD/03.2022 dated March 7, 2022
Ationo Teguh Basuki	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. M.017.HCA/02.2021 tanggal 05 Februari 2021 Board of Commissioners Decree No. M.017.HCA/02.2021 dated February 5, 2021
Linda Setiawan	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 156/HCD/09/2021 tanggal 14 September 2021 Board of Commissioners Decree No. 156/HCD/09/2021 dated September 14, 2021

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi Nomination and Remuneration Committee Profile

Rudy Hamdani

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi/Presiden Komisaris (Independen)
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/President Commissioner (Independent)

Profil Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Rudy Hamdani dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The profile of the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Rudy Hamdani, can be seen in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Ationo Teguh Basuki

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi/Komisaris
Member of the Nomination and Remuneration Committee/Commissioner

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Ationo Teguh Basuki dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The profile of Nomination and Remuneration Committee Member Ationo Teguh Basuki can be seen in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Linda Setiawan

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee
Periode Jabatan: 14 September 2021 – Saat Ini
Term of Office: September 14, 2021 – Present

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Linda Setiawan dapat dilihat bagian profil *Chief Officer* pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of Nomination and Remuneration Committee Member Linda Setiawan can be seen in the Chief Officer profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Adapun tugas dan tanggung jawab anggota Komite Pemantau Risiko Bank adalah sebagai berikut:

- Terkait Kebijakan Remunerasi:
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- Terkait Kebijakan Nominasi:
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

The duties and responsibilities of Bank Risk Monitoring Committee members are as follows:

- Regarding Remuneration Policy:
 - Evaluate remuneration policies.
 - Evaluate the suitability of remuneration policies with the implementation of these policies.
 - Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration policies for the Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Executive Officers and employees as a whole.
- Regarding Nomination Policy:
 - Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the system and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board.



- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

- b. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding prospective members of the Board of Commissioners, Directors and/or Sharia Supervisory Board.
- c. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding independent party candidates who will become members of the Committee.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Secara periodik, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun setiap keputusan Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, Ketua Komite yang akan mengambil keputusan terakhir. Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali pada tahun 2023 dengan rincian agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Periodically, the Nomination and Remuneration Committee holds meetings at least 1 (one) time every 3 (three) months with a minimum attendance quorum of 50% of all members of the Nomination and Remuneration Committee. Every decision on Remuneration and Nomination is taken based on deliberation to reach consensus. In the event that there are equal votes, the Committee Chair will make the final decision. The Audit Committee has held 5 (five) meetings in 2023 with detailed agendas and frequency of attendance as follows:

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Minutes and Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat Reasons for the Absence of the Nomination and Remuneration Committee at the Meeting
10 Februari 2023 February 10, 2023	Online	Permohonan Persetujuan Bonus Tahunan 2022 bagi Pengurus Bank (BOD, BOC, DPS, dan Dewan Komite) dan Karyawan Bank. Request for Approval of the 2022 Annual Bonus for Bank Management (BOD, BOC, DPS, and Board Committee) and Bank Employees.	Rudy Hamdani Ationo Teguh Basuki Linda Setiawan	-
12 April 2023 April 12, 2023	Online	Persetujuan Penyesuaian Gaji Tahunan 2023 untuk Pengurus Bank (BOD, BOC, Komite Audit dan DPS). Konfirmasi dan Persetujuan Penyesuaian Gaji Tahunan 2023 Karyawan Bank. Approval of 2023 Annual Salary Adjustments for Bank Management (BOD, BOC, Audit Committee and DPS). Confirmation and Approval of 2023 Annual Salary Adjustments for Bank Employees.	Rudy Hamdani Ationo Teguh Basuki Linda Setiawan	-
22 Juni 2023 June 22, 2023	Online	Update data jumlah karyawan, jumlah karyawan baru, jumlah karyawan yang <i>resign</i> (per data bulan Mei 2023) dan <i>insights</i> dari angka tersebut. Update data on the number of employees, number of new employees, number of employees who resigned (as per data for May 2023) and insights from these numbers.	Rudy Hamdani Ationo Teguh Basuki Linda Setiawan	-
7 Agustus 2023 August 7, 2023	Online	<i>Talent Management & Retention Bonus for Critical Positions and Top Talents.</i>	Rudy Hamdani Ationo Teguh Basuki Linda Setiawan	-
10 November 2023 November 10, 2023	Online	Update Kebijakan Remunerasi. Remuneration Policy Update.	Rudy Hamdani Ationo Teguh Basuki Linda Setiawan	-

Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat internal dapat dilihat di bawah ini.

A recapitulation of the attendance of Nomination and Remuneration Committee members at internal meetings can be seen below.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi pada Rapat Internal Recapitulation of Nomination and Remuneration Committee Attendance at Internal Meetings

Komite Remunerasi dan Nominasi Nomination and Remuneration Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Rudy Hamdani (Ketua) (Chairman)	5	5	100%
Ationo Teguh Basuki (Anggota) (Member)	5	5	100%
Linda Setiawan (Anggota) (Member)	5	5	100%
Rata-Rata Average			100%

Program Peningkatan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank senantiasa mendorong dan memfasilitasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan pengembangan kompetensi. Adapun pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2023 dapat dilihat di bab Tata Kelola Perusahaan.

Nomination and Remuneration Committee Competency Improvement Program

Bank always encourages and facilitates the Nomination and Remuneration Committee to carry out competency development. The trainings attended by members of the Nomination and Remuneration Committee throughout 2023 can be seen in the Corporate Governance chapter.

Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi direalisasikan melalui penyelenggaraan rapat sebanyak 5 (lima) kali kali dengan agenda yang telah disampaikan dalam pembahasan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini. Selain itu, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah menjalankan kegiatan dan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk calon pengurus Bank yang baru: Komisaris dan Direksi
2. Perubahan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Aladin Syariah Tbk
3. Persetujuan Bonus Tahunan 2022 untuk Pengurus Bank (BOD, BOC, Komite Audit, dan DPS)
4. Konfirmasi Bonus Tahunan 2022 Karyawan Bank
5. Persetujuan Penyesuaian Gaji Tahunan 2023 untuk Pengurus Bank (BOD, BOC, Komite Audit dan DPS)
6. Konfirmasi dan Persetujuan Penyesuaian Gaji Tahunan 2023 Karyawan Bank
7. Persetujuan KRN untuk Perubahan benefits program biaya operasional mobil kantor dan corporate mobile phone number
8. Update KRN mengenai jumlah karyawan Bank dan perkembangan terakhir rekrutmen di Bank Aladin Syariah
9. Pembahasan calon anggota Komite di bawah Dewan Komisaris
10. Persetujuan PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti)/Defined Contribution Pension Plan untuk karyawan Bank Aladin Syariah

Implementation of the Duties of the Nomination and Remuneration Committee

The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are realized through holding 5 (five) meetings with the agenda presented in the discussion of the Nomination and Remuneration Committee meetings in this Annual Report. Apart from that, the Nomination and Remuneration Committee has also carried out activities and provided the following recommendations:

1. Recommendations for new Bank management candidates: Commissioners and Directors
2. Changes in the Membership Composition of the PT Bank Aladin Syariah Tbk Risk Monitoring Committee, Audit Committee, and Remuneration and Nomination Committee
3. Approval of the 2022 Annual Bonus for Bank Management (BOD, BOC, Audit Committee and DPS)
4. Confirmation of the 2022 Annual Bonus for Bank Employees
5. Approval of 2023 Annual Salary Adjustments for Bank Management (BOD, BOC, Audit Committee and DPS)
6. Confirmation and Approval of 2023 Annual Salary Adjustments for Bank Employees
7. KRN approval for changes to program benefits for office car operational costs and corporate mobile phone numbers
8. KRN update on the number of Bank employees and the latest developments in recruitment at Bank Aladin Syariah
9. Discussion on prospective members of Committees under the Board of Commissioners
10. 10. Approval of PPIP (Defined Contribution Pension Program)/ Defined Contribution Pension Plan for Bank Aladin Syariah employees



Komite-Komite di Bawah Direksi

Committees Under The Board of Directors

Direksi Bank membentuk 5 Komite Eksekutif dengan tujuan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Bank, yaitu:

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi/*Information Technology Steering Committee* (ITSC);
2. Komite Aset dan Liabilitas/*Assets & Liabilities Committee* (ALCO);
3. Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee* (RMC);
4. Komite Pembiayaan/*Credit Committee* (CC); dan
5. Komite Eksekutif Keberlanjutan/*Sustainability Executive Committee* (SEC).

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI/INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE (ITSC)

Direksi membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi atau *Information Technology Steering Committee* (ITSC) dengan tujuan memastikan keselarasan penerapan sistem teknologi informasi (TI) dengan rencana strategis Bank. Selain itu, Komite ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing Bank dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi didasarkan pada peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.
8. Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Bank's Board of Directors formed 5 Executive Committees with the aim of supporting the implementation of duties and responsibilities in managing Bank, namely:

1. Information Technology Steering Committee (ITSC);
2. Assets and Liabilities Committee (ALCO);
3. Risk Management Committee (RMC);
4. Financing Committee/Credit Committee (CC); And
5. Sustainability Executive Committee (SEC).

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE (ITSC)

The Board of Directors formed an Information Technology Steering Committee (ITSC) with the aim of ensuring alignment of the implementation of information technology (IT) systems with Bank's strategic plans. Apart from that, this Committee also aims to increase Bank's competitiveness by optimally utilizing information technology.

Legal Basis

The formation of the Information Technology Steering Committee is based on regulations including the following:

1. Law of the Republic of Indonesia no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation as stipulated into law based on Law no. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation Becomes Law.
2. Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking as amended by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.
3. Financial Services Authority Regulation no. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
4. Financial Services Authority Regulation no. 11/POJK.03/2022 concerning the Implementation of Information Technology by Commercial Banks.
5. Financial Services Authority Regulation no. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks.
6. Financial Services Authority Circular No. 21/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.
7. Financial Services Authority Circular No. 29/SEOJK.03/2022 concerning Cyber Resilience and Security for Commercial Banks.
8. Information Technology Steering Committee Charter.

Term of Reference (TOR) ITSC

ITSC memiliki Term of Reference yang mengatur susunan keanggotaan, tanggung jawab dan wewenang, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan rapat. Adapun *Term of Reference* (TOR) ITSC telah diperbarui pada Maret 2023 dan akan senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

ITSC Terms of Reference (TOR).

ITSC has Terms of Reference which regulate the composition of membership, responsibilities and authority, provisions and mechanisms for holding meetings. The ITSC Terms of Reference (TOR) have been updated in March 2023 and will continue to be updated in accordance with developments in applicable regulations and the latest conditions of Bank.

Struktur ITSC ITSC structure

KETUA MERANGKAP ANGGOTA Chairman Concurrently Member	Presiden Direktur President Director
KETUA PENGGANTI DALAM HAL KETUA BERHALANGAN HADIR Substitute Chair in the event that the Chair is unable to attend	Chief Technology Officer
ANGGOTA ITSC ITSC Member	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur <i>Digital Banking</i> • Direktur <i>Finance</i> • Direktur Kepatuhan • Chief Technology Officer • Chief Operating Officer • Chief People, Diversity and Culture Officer • Chief Commercial Officer • Chief Risk Officer • Director of Digital Banking • Director of Finance • Director of Compliance • Chief Technology Officer • Chief Operating Officer • Chief People, Diversity and Culture Officer • Chief Commercial Officer • Chief Risk Officer
UNDANGAN TETAP Fixed Invitation	Internal Audit
UNDANGAN TIDAK TETAP Not Fixed Invitation	Group Head/Kepala Divisi lainnya apabila diperlukan atau diwakili oleh pejabat level di bawahnya Group Head/Other Division Heads if necessary or represented by lower level officials
SEKRETARIS Secretary	<p>Information Security & Governance Sekretaris akan menginformasikan jadwal rapat. Membuat, mendokumentasikan, dan mensirkulasi risalah rapat. Risalah minimal harus ditandatangani oleh Ketua ITSC. Mendistribusikan keputusan Rapat ITSC</p> <p>Information Security & Governance The secretary will inform you of the meeting schedule. Prepare, document and circulate meeting minutes. The minimum minutes must be signed by the Chair of the ITSC. Distribute ITSC Meeting decisions</p>

Tugas dan Tanggung Jawab ITSC

ITSC bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara rencana pengembangan Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi dengan rencana pengembangan Teknologi Informasi.
5. Evaluasi dan efektivitas biaya Teknologi Informasi terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
6. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.

ITSC Duties and Responsibilities

ITSC is responsible for providing recommendations to the Board of Directors regarding at least:

1. Information Technology Strategic Plan which is in line with Bank's strategic plan for business activities.
2. Formulation of key Information Technology policies, standards and procedures.
3. Conformity between the approved Information Technology development plan and the Information Technology Strategic Plan.
4. Conformity between the implementation of Information Technology development and the Information Technology development plan.
5. Evaluation and cost effectiveness of Information Technology towards achieving planned benefits.
6. Monitoring Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance.



7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, tepat waktu.
8. Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait Teknologi Informasi yang dimiliki Bank.

7. Efforts to resolve various problems related to Information Technology that cannot be resolved by the work unit of Information Technology users and administrators effectively, efficiently and on time.
8. Adequacy and allocation of resources related to Information Technology owned by Bank.

Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat ITSC

ITSC melakukan rapat dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut:

1. Rapat ITSC dipimpin oleh Ketua ITSC atau ketua pengganti dalam hal Ketua berhalangan hadir.
2. Rapat ITSC dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu bulan pada Minggu kedua atau dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Apabila sekretaris ITSC berhalangan hadir (sakit, cuti tahunan, dinas luar kota), maka dapat digantikan oleh kepala dari unit kerja lain yang ditunjuk oleh ketua ITSC.
4. Rapat ITSC diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 3 peserta undangan.
5. Materi rapat ITSC disiapkan dan dikumpulkan oleh sekretaris ITSC.
6. Pengambilan keputusan rapat ITSC hanya dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota yang hadir.
7. Setiap rapat ITSC dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam risalah rapat ITSC yang disusun dan disampaikan oleh Sekretaris ITSC kepada Ketua ITSC untuk ditandatangani oleh ketua ITSC dan sekretaris ITSC.
8. Risalah rapat yang telah ditandatangani oleh Ketua ITSC dan Sekretaris ITSC selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris ITSC kepada anggota ITSC dan unit kerja terkait yang menghadiri rapat ITSC.
9. Seluruh dokumen rapat ITSC dikumpulkan dan didokumentasikan oleh Sekretaris ITSC.
10. Rapat dapat dihadiri oleh ketua ITSC dan anggota ITSC secara tatap muka atau daring.

Provisions and Mechanisms for Implementing ITSC Meetings

ITSC holds meetings with the following provisions and mechanisms:

1. ITSC meetings are chaired by the ITSC Chair or substitute chair in the event that the Chair is unable to attend.
2. ITSC meetings are held at least once a month on the second Sunday or can be held at any time if necessary.
3. If the ITSC secretary is unable to attend (sick, annual leave, overseas service), he can be replaced by the head of another work unit appointed by the ITSC chairman.
4. ITSC meetings are held if attended by at least more than 3 invited participants.
5. ITSC meeting materials are prepared and collected by the ITSC secretary.
6. ITSC meeting decisions can only be made if approved by at least 51% (fifty one percent) of all members present.
7. Each ITSC meeting and the results of its decisions are stated in the minutes of the ITSC meeting which are prepared and submitted by the ITSC Secretary to the ITSC Chairman to be signed by the ITSC chairman and ITSC secretary.
8. Minutes of the meeting that have been signed by the ITSC Chair and ITSC Secretary are then distributed by the ITSC Secretary to ITSC members and related work units who attend the ITSC meeting.
9. All ITSC meeting documents are collected and documented by the ITSC Secretary.
10. Meetings can be attended by the ITSC chairman and ITSC members face to face or online.

Dalam hal ini, ITSC telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian agenda sebagai berikut:

In this case, ITSC has held 12 (twelve) meetings with detailed agendas as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda
1.	25 Januari 2023 January 25, 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 20 Desember 2022 • Proposal: Pemindahan pencatatan aset SBSN dari Bank kustodi BSI ke BI-SSSS Bank • Proposal: Perhitungan Cost of Fund & Base Financing Rate • Confirmation of the ALCO Meeting Minutes held on December 20, 2022 • Proposal: Transfer of SBSN asset recording from BSI custodial bank to BI-SSSS Bank • Proposal: Calculation of Cost of Fund & Base Financing Rate
2.	22 Februari 2023 February 22, 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 25 Januari 2023 • Proposal: Revisi Piagam Komite ALCO • Confirmation of ALCO Meeting Minutes dated January 25, 2023 • Proposal: Revision of the ALCO Committee Charter

No.	Tanggal Date	Agenda
3.	27 Maret 2023 March 27, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 22 Februari 2023 Proposal Pencatatan SUKBI AFS (Available For Sale) Confirmation of the ALCO Meeting Minutes held on February 22, 2023 2. Proposal for Listing SUKBI AFS (Available For Sale)
4.	17 April 2023 April 17, 2023	Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 27 Maret 2023 Confirmation of the ALCO Meeting Minutes held on March 27, 2023
5.	24 Mei 2023 May 24, 2023	Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 17 April 2023 Confirmation of the ALCO Meeting Minutes held on April 17, 2023
6.	20 Juni 2023 June 20, 2023	Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 24 Mei 2023 Confirmation of the ALCO Meeting Minutes held on May 24, 2023
7.	26 Juli 2023 July 26, 2023	Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 20 Juni 2023 Confirmation of the ALCO Meeting Minutes held on June 20, 2023
8.	21 Agustus 2023 August 21, 2023	Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 26 Juli 2023 Confirmation of the ALCO Meeting Minutes held on July 26, 2023
9.	27 September 2023 September 27, 2023	Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 21 Agustus 2023 Confirmation of the ALCO Meeting Minutes held on August 21, 2023
10.	24 Oktober 2023 October 24, 2023	Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 27 September 2023 Confirmation of the ALCO Meeting Minutes held on September 27, 2023
11.	22 November 2023 November 22, 2023	Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 24 Oktober 2023 Confirmation of the ALCO Meeting Minutes held on October 24, 2023
12.	19 Desember 2023 December 19, 2023	Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 22 November 2023. Confirmation of the ALCO Meeting Minutes held on November 22, 2023

Komite Aset dan Liabilitas/Assets & Liabilities Committee (ALCO)

Komite Aset dan Liabilitas atau Assets & Liabilities Committee (ALCO) dibentuk oleh Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas dalam memelihara struktur neraca yang kuat dari PT Bank Aladin Syariah Tbk secara komprehensif, yaitu meliputi penganalisaan dan perumusan kebijakan strategi, pengambilan keputusan serta pengawasan dalam pengelolaan risiko likuiditas, risiko pasar, dan permodalan sejalan dengan peraturan BI/OJK maupun strategi usaha.

Dasar Hukum

ALCO dibentuk dengan mengacu pada peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Aladin Syariah Tbk.
- Piagam ALCO.

Piagam ALCO

ALCO telah memiliki Term of Reference (TOR) ALCO yang mengatur antara lain struktur dan Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas, tugas dan wewenang, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan rapat, pelaporan dan sekretariat. Piagam Komite akan dikinikan dan akan

Assets and Liabilities Committee (ALCO)

The Assets and Liabilities Committee (ALCO) was formed by the Board of Directors to assist in carrying out tasks in maintaining a strong balance sheet structure of PT Bank Aladin Syariah Tbk in a comprehensive manner, which includes analyzing and formulating strategic policies, decision making and supervision in managing liquidity risk, market risk, and capital in line with BI/OJK regulations and business strategy.

Legal Basis

ALCO was formed with reference to regulations including the following:

- Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking.
- Law of the Republic of Indonesia no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.
- Financial Services Authority Regulation no. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
- Financial Services Authority Regulation no. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks.
- Financial Services Authority Regulation no. 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- PT Bank Aladin Syariah Tbk Risk Management Policy.
- ALCO Charter.

ALCO Charter

ALCO has ALCO Terms of Reference (TOR) which regulate, among other things, the structure and membership of the Asset and Liability Committee, duties and authority, provisions and mechanisms for implementing meetings, reporting and the secretariat. The Committee



diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Charter will be updated and will be updated in accordance with developments in applicable regulations and the latest conditions of Bank.

Struktur ALCO ALCO Structure

KETUA Chairman	Presiden Direktur (merangkap anggota) President Director (concurrently member)
PENGGANTI KETUA Substitute Chairman	Direktur Lainnya (merangkap anggota) Other Directors (concurrently members)
ANGGOTA Member	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur • Direktur/Chief yang membidangi Fungsi Operasional • Direktur yang membidangi Fungsi Bisnis • Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko • Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan • Group Head/Kepala Divisi Finance • Group Head/Kepala Divisi Treasury • Group Head/Kepala Manajemen Risiko • President Director • Director/Chief in charge of Operational Functions • Director in charge of Business Functions • Director in charge of the Risk Management Function • Director in charge of Financial Functions • Group Head/Head of Finance Division • Group Head/Head of Treasury Division • Group Head/Head of Risk Management
SEKRETARIS Secretary	Divisi yang membidangi fungsi <i>Enterprise Risk Management</i> Division in charge of Enterprise Risk Management functions
TERUNDANG Invited	Group Head/Kepala Divisi lainnya apabila diperlukan atau diwakili oleh pejabat level di bawahnya. Group Head/Other Division Heads if necessary or represented by lower level officials.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Tugas Komite Aset dan Liabilitas sesuai Piagam Komite Aset dan Liabilitas paling kurang meliputi:

1. Melakukan kajian atau tinjauan (*review*) terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Bank secara keseluruhan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Bank terkait kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Bank.
3. Melakukan evaluasi terhadap implementasi/pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Bank dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Bank selaku Bank Umum Syariah.
4. Memastikan kecukupan sumber daya dan system terkait pengelolaan aset dan kewajiban serta aktivitas terkait dengan pengendalian risiko pasar, risiko likuiditas, risiko imbalance hasil dan risiko investasi.
5. Mengkaji eksposur risiko dan komposisi portfolio khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas baik pada trading book maupun banking book.
6. Mengkaji dan merumuskan strategi secara luas dalam mengelola risiko pasar, risiko likuiditas, risiko imbalance hasil dan risiko investasi terkait dengan profil neraca dan struktur pendanaan Bank.
7. Mengkaji dan memastikan bahwa eksposur risiko dan komposisi portfolio khususnya risiko pasar, risiko likuiditas, risiko imbalance hasil dan risiko investasi berada pada tingkat risiko yang disetujui Bank.
8. Mengkaji dan memonitor sumber daya, risiko pasar, risiko likuiditas dan stress test melalui pelaporan risiko secara berkala.
9. Mengkaji dan memonitor kepatuhan terhadap regulasi internal, eksternal dan limit.

ALCO Duties and Responsibilities

The duties of the Asset and Liability Committee in accordance with the Asset and Liability Committee Charter include at least:

1. Conduct a study or review of Bank's overall asset and liability management policies and strategies.
2. Provide recommendations to Bank's Board of Directors regarding policies and strategies for managing Bank's assets and liabilities.
3. Evaluate the implementation/implementation of policies and strategies for managing Bank's assets and liabilities in order to comply with applicable laws and regulations related to the implementation of the precautionary principle by Bank as a Sharia Commercial Bank.
4. Ensure the adequacy of resources and systems related to managing assets and liabilities as well as activities related to controlling market risk, liquidity risk, return risk and investment risk.
5. Review risk exposure and portfolio composition, especially market risk and liquidity risk in both the trading book and banking book.
6. Review and formulate broad strategies in managing market risk, liquidity risk, return risk and investment risk related to Bank's balance sheet profile and funding structure.
7. Review and ensure that risk exposure and portfolio composition, especially market risk, liquidity risk, return risk and investment risk are at the risk level approved by Bank.
8. Review and monitor resources, market risk, liquidity risk and stress tests through regular risk reporting.
9. Review and monitor compliance with internal, external regulations and limits.

10. Mengkaji dan merekomendasikan prosedur terkait pengelolaan risiko pasar dan risiko likuiditas baik pada trading book maupun banking book.
11. Mengkaji dan merekomendasikan metodologi atau strategi untuk mengelola portofolio Bank terkait dengan:
12. Perubahan pricing untuk produk pendanaan dan pembiayaan termasuk wewenang pemberian special pricing dan perubahan nisbah.
13. Portofolio produk treasury (trading dan non trading) dan produk Bank lainnya termasuk volume dan pricing-nya.
14. Proyeksi pendapatan/net imbalan berdasarkan simulasi dan asumsi.
15. Meratifikasi deviasi/pelampauan limit internal dan merekomendasikan program mitigasinya.
16. Berperan sebagai Liquidity Crisis Management Center sesuai Contingency Funding Plan.
17. Melakukan evaluasi terhadap kinerja ALCO.

Rapat Komite ALCO

ALCO melakukan rapat dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut:

1. Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO atau Ketua pengganti dalam hal Ketua berhalangan hadir.
2. Rapat ALCO dilaksanakan paling sedikitnya satu kali dalam satu bulan pada jadwal dan agenda yang telah ditetapkan oleh Sekretaris ALCO atau dapat dilaksanakan sewaktu-waktu jika diperlukan.
3. Setiap Anggota ALCO diwajibkan untuk menghadiri Rapat ALCO. Dalam hal Anggota ALCO berhalangan untuk menghadiri Rapat ALCO, maka harus diwakili oleh pejabat di level bawahnya.
4. Kuorum Rapat ALCO hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya Ketua dan/atau Pengganti Ketua ALCO dan 1 (satu) Direksi lainnya, dan 50% (lima puluh) persen dari jumlah seluruh anggota lainnya selain Direksi.
5. Pengambilan keputusan Rapat ALCO hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri 50% (lima puluh) persen + 1 satu) dari seluruh anggota Direksi.
6. Materi Rapat ALCO disiapkan dan dikumpulkan oleh Sekretaris ALCO.
7. Hasil keputusan Rapat ALCO adalah sah jika diputuskan oleh Anggota ALCO yang memiliki hak suara yang menghadiri Rapat ALCO.
8. Setiap Rapat ALCO dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam Risalah Rapat ALCO yang dibuat dan disampaikan oleh Sekretaris ALCO kepada Ketua ALCO untuk ditandatangani oleh Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO.
9. Risalah Rapat ALCO yang telah ditandatangani oleh Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris ALCO kepada unit kerja terkait.
10. Seluruh dokumen Rapat ALCO dikumpulkan dan didokumentasikan oleh Sekretaris ALCO.
11. Hasil keputusan Rapat ALCO yang terkait dengan seluruh unit kerja ditindaklanjuti oleh ALCO dengan menyampaikan memorandum kepada seluruh unit kerja dengan diketahui oleh Direksi. Hasil keputusan Rapat ALCO yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait disampaikan melalui memorandum khusus.

ALCO Committee Meeting

ALCO held meetings with the following provisions and mechanisms:

1. ALCO meetings are chaired by the ALCO Chair or substitute Chair in the event that the Chair is unable to attend.
2. ALCO meetings are held at least once a month according to the schedule and agenda determined by the ALCO Secretary or can be held at any time if necessary.
3. Every ALCO Member is required to attend ALCO Meetings. In the event that ALCO Members are unable to attend the ALCO Meeting, they must be represented by an official at a lower level.
4. An ALCO Meeting Quorum can only be held if attended by at least the Chair and/or Substitute Chair of ALCO and 1 (one) other Director, and 50% (fifty) percent of all members other than the Directors.
5. Decision making at the ALCO Meeting can only be carried out if 50% (fifty) percent + 1 one) of all members of the Board of Directors are present.
6. ALCO Meeting materials are prepared and collected by the ALCO Secretary.
7. The results of ALCO Meeting decisions are valid if they are decided by ALCO Members who have voting rights who attend the ALCO Meeting.
8. Each ALCO Meeting and the results of its decisions are stated in the ALCO Minutes of Meeting which are drawn up and submitted by the ALCO Secretary to the ALCO Chair to be signed by the ALCO Chair and ALCO Secretary.
9. Minutes of the ALCO Meeting which have been signed by the ALCO Chair and ALCO Secretary are then distributed by the ALCO Secretary to the relevant work units.
10. All ALCO Meeting documents are collected and documented by the ALCO Secretary.
11. The results of ALCO Meeting decisions related to all work units are followed up by ALCO by submitting a memorandum to all work units with the knowledge of the Board of Directors. The results of the ALCO Meeting decisions which are followed up by the relevant work units are conveyed through a special memorandum.



Pada tahun 2023, ALCO telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian agenda dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

In 2023, ALCO has held 12 (twelve) meetings with detailed agendas and attendance recapitulation as follows:

Agenda dan Peserta Rapat ALCO ALCO Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
1	25 Januari 2023 January 25, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 20 Desember 2022 Proposal: Pemindehan pencatatan aset SBSN dari Bank kustodi BSI ke BI-SSSS Bank Proposal: Perhitungan <i>Cost of Fund & Base Financing Rate</i> Opening Confirmation of the ALCO Meeting Minutes on 20 December 2022 Proposal: Transfer of SBSN asset recording from BSI custodial bank to BI-SSSS Bank Proposal: Calculation of Cost of Fund & Base Financing Rate 	<ul style="list-style-type: none"> Dyota Mahottama Marsudi Firdila Sari Mayang Ekaputri Baiq Nadea Dzurriatin
2	22 Februari 2023 February 22, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 25 Januari 2023 Proposal: Revisi Piagam Komite ALCO <i>Items for Discussion & Noting</i> Penutup Opening Confirmation of the ALCO Meeting Minutes on January 25 2023 Proposal: Revision of the ALCO Committee Charter Items for Discussion & Noting Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> Dyota Mahottama Marsudi Firdila Sari Mayang Ekaputri Baiq Nadea Dzurriatin
3	27 Maret 2023 March 27, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 22 Februari 2023 Proposal Pencatatan SUKBI AFS (<i>Available For Sale</i>) <i>Items for Discussion & Noting</i> Penutup Opening Confirmation of the ALCO Meeting Minutes on 22 February 2023 SUKBI AFS (<i>Available For Sale</i>) Listing Proposal Items for Discussion & Noting Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> Dyota Mahottama Marsudi Firdila Sari Mayang Ekaputri Baiq Nadea Dzurriatin
4	17 April 2023 April 17, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 27 Maret 2023 <i>Items for Discussion & Noting</i> Penutup Opening Confirmation of the ALCO Meeting Minutes on March 27, 2023 Items for Discussion & Noting Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> Dyota Mahottama Marsudi Firdila Sari Mayang Ekaputri Baiq Nadea Dzurriatin
5	24 Mei 2023 May 24, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 17 April 2023 <i>Items for Discussion & Noting</i> Penutup Opening Confirmation of the ALCO Meeting Minutes on April 17, 2023 Items for Discussion & Noting Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> Dyota Mahottama Marsudi Firdila Sari Mayang Ekaputri Baiq Nadea Dzurriatin

Agenda dan Peserta Rapat ALCO ALCO Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
6	20 Juni 2023 June 20, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 24 Mei 2023 <i>Items for Discussion & Noting</i> Penutup Opening Confirmation of the ALCO Meeting Minutes on May 24, 2023 Items for Discussion & Noting Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> Dyota Mahottama Marsudi Firdila Sari Mayang Ekaputri Baiq Nadea Dzurriatin
7	26 Juli 2023 July 26, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 20 Juni 2023 <i>Items for Discussion & Noting</i> Penutup Opening Confirmation of the ALCO Meeting Minutes on 20 June 2023 Items for Discussion & Noting Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> Dyota Mahottama Marsudi Firdila Sari Mayang Ekaputri Baiq Nadea Dzurriatin
8	21 Agustus 2023 August 21, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 26 Juli 2023 <i>Items for Discussion & Noting</i> Penutup Opening Confirmation of the ALCO Meeting Minutes on 26 July 2023 Items for Discussion & Noting Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> Dyota Mahottama Marsudi Firdila Sari Mayang Ekaputri Baiq Nadea Dzurriatin
9	27 September 2023 September 27, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 21 Agustus 2023 <i>Items for Discussion & Noting</i> Penutup Opening Confirmation of the ALCO Meeting Minutes on 21 August 2023 Items for Discussion & Noting Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> Dyota Mahottama Marsudi Firdila Sari Mayang Ekaputri Baiq Nadea Dzurriatin
10	24 Oktober 2023 October 24, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 27 September 2023 <i>Items for Discussion & Noting</i> Penutup Opening Confirmation of the ALCO Meeting Minutes on 27 September 2023 Items for Discussion & Noting Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> Dyota Mahottama Marsudi Firdila Sari Mayang Ekaputri Baiq Nadea Dzurriatin
11	22 November 2023 November 22, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 24 Oktober 2023 <i>Items for Discussion & Noting</i> Penutup Opening Confirmation of the ALCO Meeting Minutes on 24 October 2023 Items for Discussion & Noting Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> Dyota Mahottama Marsudi Firdila Sari Mayang Ekaputri Baiq Nadea Dzurriatin



Agenda dan Peserta Rapat ALCO ALCO Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
12	19 Desember 2023 December 19, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 22 November 2023. Items for Discussion & Noting Penutup Opening Confirmation of the ALCO Meeting Minutes on 22 November 2023. Items for Discussion & Noting Conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> Dyota Mahottama Marsudi Firdila Sari Mayang Ekaputri Baiq Nadea Dzurriatin

Kehadiran Direksi pada Rapat Recapitulation of Board of Directors' Attendance at Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dyota Mahottama Marsudi (Ketua/Presiden Direktur) (Chairman/President Director)	12	9	75%
Firdila Sari (Anggota) (Member)	12	12	100%
Mayang Ekaputri (Anggota) (Member)	12	12	100%
Baiq Nadea Dzurriatin (Anggota) (Member)	12	12	100%
Rata-Rata Average			93,75%

Pelaksanaan Tugas ALCO

Pada tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan oleh ALCO adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat Komite ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali pada tahun 2023.
- Melakukan ratifikasi Piagam ALCO sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2023.
- Melakukan reviu, rekomendasi dan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban yang disampaikan oleh unit kerja terkait.
- Memberikan rekomendasi atas proposal perhitungan cost of fund, proposal pemindahan pencatatan aset SBSN dari Bank custody BSI ke BSI-SSS Bank, revisi piagam Komite ALCO, pencatatan SUKBI AFS, balance sheet projection, FDR ratio monitoring, balance sheet maturity profile, deposits and financing pricing, deposits concentration, capital runaway, ERG projection, strategi investasi treasury dan penyediaan likuiditas tahun 2023, pemenuhan likuiditas Bank, kinerja treasury, Pasar Uang Antar Bank Syariah dan Capital Market Syariah (PUAS), pengelolaan aset dan liabilities, maturity profile asset dan liabilities, komposisi portofolio investasi, utilisasi interbank, proposal penambahan lines dan limit Manajer Investasi (MI) dan alokasi investasi reksadana syariah, liquidity risk (Bank Runs US region), peer analysis 1Q2023, peer analysis 2023, proposal pengajuan perpanjangan dan pengajuan baru interbank limit, proposal pinjaman PASBI ke Bank Indonesia, penerimaan insentif GWM averaging, penerimaan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dan perubahan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM).
- Mengkaji eksposur risiko dan komposisi portofolio yang disampaikan oleh unit kerja terkait secara berkala.

Implementation of ALCO Duties

In 2023, the activities carried out by ALCO are as follows:

- Hold 12 (twelve) ALCO Committee meetings in 2023.
- Ratify the ALCO Charter 3 (three) times in 2023.
- Conduct reviews, recommendations and evaluations of asset and liability management policies and strategies submitted by the relevant work units.
- Provide recommendations on proposals for calculating the cost of funds, proposals for transferring SBSN asset recording from BSI Bank custody to BSI-SSS Bank, revision of the ALCO Committee charter, SUKBI AFS recording, balance sheet projection, FDR ratio monitoring, balance sheet maturity profile, deposits and financing pricing, deposits concentration, capital runaway, ERG projection, treasury investment strategy and liquidity provision in 2023, fulfillment of bank liquidity, treasury performance, Sharia Interbank Money Market and Sharia Capital Market (PUAS), asset and liability management, asset maturity profile and liabilities, investment portfolio composition, interbank utilization, proposal for additional lines and Investment Manager (MI) limits and sharia mutual fund investment allocation, liquidity risk (Bank Runs US region), peer analysis 1Q2023, peer analysis 2023, proposal for extension and new submission of interbank limits, PASBI loan proposal to Bank Indonesia, receipt of GWM averaging incentives, receipt of macroprudential liquidity policy (KLM) incentives and changes in the macroprudential liquidity buffer ratio (PLM).
- Review risk exposure and portfolio composition submitted by the relevant work unit periodically.

6. Mengkaji dan memonitoring kepatuhan terhadap regulasi internal, eksternal dan limit.

Komite Manajemen Risiko/Risk Management Committee (RMC)

Komite Manajemen Risiko atau *Risk Management Committee* dibentuk Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko secara efektif di Bank.

Dasar Hukum

Komite Manajemen Risiko dibentuk dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Anggaran Dasar PT Bank Aladin Syariah Tbk berikut segala perubahannya.

Term of Reference (TOR) RMC

RMC memiliki *Term of Reference* yang mengatur struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan rapat, dan sekretariat. Adapun TOR RMC terakhir dimutakhirkan pada Desember 2023 dan akan diperbarui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

6. Review and monitor compliance with internal, external regulations and limits.

Risk Management Committee (RMC)

The Risk Management Committee was formed by the Board of Directors to assist in the implementation of duties and authorities related to the effective implementation of risk management at Bank.

Legal Basis

The Risk Management Committee was formed based on the following regulations:

1. Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.
2. Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
3. Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks.
4. Financial Services Authority Regulation Number 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
5. Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines.
6. Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/2009 concerning the implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
7. Bank Indonesia Circular Letter Number 12/13/DPbS dated 30 April 2010 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
8. Articles of Association of PT Bank Aladin Syariah Tbk including all amendments.

RMC Terms of Reference (TOR).

RMC has Terms of Reference which regulate the structure and membership of the Risk Management Committee, provisions and mechanisms for holding meetings, and the secretariat. The RMC TOR was last updated in December 2023 and will be updated in accordance with developments in applicable regulations and the latest conditions from Bank.



Struktur RMC RMC structure

KETUA Chairman	Direktur/Chief yang membawahkan fungsi manajemen risiko Director/Chief who supervises the risk management function
PENGGANTI KETUA Substitute Chairman	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Director in charge of the compliance function
ANGGOTA Member	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) orang Direktur/Chief yang membawahkan fungsi manajemen risiko sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko merangkap anggota; • 1 (satu) orang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagai ketua pengganti merangkap anggota dalam hal belum terisinya posisi ketua atau ketika ketua berhalangan; • 1 (satu) orang Direktur/Chief sebagai ketua pengganti merangkap anggota dalam hal ketua pengganti sebagaimana poin 2 belum terisi atau berhalangan; • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan; • Direktur yang membawahkan fungsi Bisnis/Komersial; • Chief yang membawahkan fungsi Operasional; • Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management; • Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Financing Risk Management; dan • Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Risk Analytics; • Anggota terkait lainnya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Hukum; b. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Anti Fraud Management; dan c. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Financial Controller. • 1 (one) Director/Chief who supervises the risk management function as Chair of the Risk Management Committee and is also a member; • 1 (one) Director who is in charge of the compliance function as substitute chairman and member in the event that the position of chairman has not been filled or when the chairman is absent; • 1 (one) Director/Chief as substitute chairman and member in the event that the substitute chairman as in point 2 is not yet filled or is unavailable; • Director in charge of the Finance function; • Director in charge of Business/Commercial functions; • Chief who oversees operational functions; • Group Head/Division Head who oversees the Enterprise Risk Management function; • Group Head/Division Head in charge of the Financing Risk Management function; And • Group Head/Division Head in charge of the Risk Analytics function; • Other related members, namely: <ul style="list-style-type: none"> a. Group Head/Division Head in charge of Compliance and Legal functions; b. Group Head/Division Head in charge of the Anti Fraud Management function; And c. Group Head/Division Head who supervises the Financial Controller function.
UNDANGAN TETAP Fixed Invitation	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan • Group Head/Kepala divisi yang membidangi fungsi enterprise risk management. • Group Head/Kepala divisi yang membidangi fungsi kepatuhan • Group Head/Kepala divisi lainnya atau diwakili oleh pejabat di level bawahnya. • Director of Compliance • Group Head/Head of division in charge of enterprise risk management functions. • Group Head/Head of division in charge of compliance functions • Group Head/Head of other divisions or represented by officials at lower levels.
FREKUENSI RAPAT Meeting Frequency	Rapat Komite Manajemen Risiko wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan oleh ketua dan/atau Anggota Komite Manajemen Risiko. Risk Management Committee meetings must be held at least 1 (one) time every month or at any time if required by the chairman and/or members of the Risk Management Committee.
SEKRETARIS Secretary	1 (satu) orang petugas/pejabat dari Divisi Enterprise Risk Management 1 (one) officer/official from the Enterprise Risk Management Division

Tugas dan Tanggung Jawab RMC

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur, yang paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko, serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Mengevaluasi penyusunan kerangka, strategi, kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko.

RMC Duties and Responsibilities

The Risk Management Committee has the authority and responsibility to provide recommendations to the President Director, which at a minimum include:

1. Preparation of policies, strategies and guidelines for implementing risk management and changes thereto, including the level of risk to be taken and risk tolerance, risk management framework and contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions.
2. Evaluate the preparation of frameworks, strategies, policies and guidelines for implementing risk management.

3. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank.
4. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan risk appetite, strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi dan kecukupan modal.
5. Menetapkan metodologi, skenario, evaluasi, termasuk kondisi stres dalam pengukuran risiko dan contingency plan.
6. Mengevaluasi penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis.
7. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal, antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank dan pengambilan posisi eksposur risiko yang tidak sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.

Rapat RMC

RMC mengadakan rapat dengan frekuensi rapat triwulanan atau jika diperlukan sesuai ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota RMC. Berkaitan dengan hal tersebut, RMC telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali pada tahun 2023 dengan rincian agenda dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

RMC meeting

RMC holds meetings with a quarterly meeting frequency or if necessary according to the provisions of a minimum attendance quorum of 50% of all RMC members. In this regard, the RMC has held 6 (six) meetings in 2023 with detailed agendas and attendance recapitulation as follows:

Agenda dan Peserta Rapat RMC RMC Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
	10 Februari 2023 February 10, 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan. • <i>Matters arising</i> rapat KMR ke-4 tanggal 17 Oktober 2022. • Pengajuan Segmentasi Pembiayaan. • Revisi Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Pembiayaan. • Revisi <i>Financing to Value</i> (FTV). • Keputusan Komite Manajemen Risiko. • Penutup. • Opening. • <i>Matters arising</i> at the 4th KMR meeting on 17 October 2022. • Submission of Financing Segmentation. • Revision of Delegation of Authority for Financing Approval. • Revision of Financing to Value (FTV). • Risk Management Committee Decision. • Conclusion. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama Marsudi • Firdila Sari • Mayang Ekaputri • Baiq Nadea Dzurriatin
	18 April 2023 April 18, 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan • <i>Matters arising</i> rapat KMR ke-2 tanggal 10 Februari 2023. • Revisi Piagam Komite Manajemen Risiko • Laporan profil Risiko Triwulan I 2023. • Revisi Kertas Kerja profil Risiko. • Penyampaian Hasil Stress Testing <i>Risiko Pasar per 15 Maret 2023</i>. • Keputusan Komite Manajemen Risiko. • Penutup. • Opening • <i>Matters arising</i> at the 2nd KMR meeting on February 10 2023. • Revision of the Risk Management Committee Charter • First Quarter 2023 Risk profile report. • Revision of Risk profile Working Paper. • Submission of Market Risk Stress Testing Results as of March 15 2023. • Risk Management Committee Decision. • Conclusion. 	<ul style="list-style-type: none"> • Firdila Sari • Mayang Ekaputri • Baiq Nadea Dzurriatin



Agenda dan Peserta Rapat RMC
RMC Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
	26 Juli 2023 July 26, 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan. • Informasi <i>Matters arising</i> rapat KMR ke-3 tanggal 18 April 2023. • Informasi Penggunaan Kertas Kerja Baru dan Parameter Baru Laporan Profil Risiko Triwulan II 2023. • Informasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I 2023. • Informasi Segmentasi Pembiayaan Komersial dan Ekosistem RAC. • Informasi CKPN. • Keputusan <i>Risk Acceptance</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Pembiayaan dengan Tenor > 5 Tahun. • Keputusan Komite Manajemen Risiko. • Penutup. • Opening. • Information on Matters arising from the 3rd KMR meeting on April 18, 2023. • Information on the Use of New Working Papers and New Parameters for the Second Quarter 2023 Risk Profile Report. • Bank Soundness Level Report Information for Semester I 2023. • Commercial Financing Segmentation Information and RAC Ecosystem. • CKPN information. • Decision on Risk Acceptance and Risk Tolerance for Financing with a Tenor > 5 Years. • Risk Management Committee Decision. • Conclusion. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama Marsudi • Firdila Sari • Mayang Ekaputri • Baiq Nadea Dzurriatin
	27 Oktober 2023 October 27, 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan. • Informasi <i>Matters arising</i> rapat KMR ke-4 tanggal 26 Juli 2023. • Laporan Penilaian Profil Risiko Triwulan III 2023 dan Perubahan Parameter Kertas Kerja Laporan Profil Risiko. • POJK 17 Tahun 2023 dan Implikasinya terhadap Rapat KPR dan KMR. • Pemaparan Informasi CKPN. • <i>Progress Update Enterprise Risk Management</i>. • Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Risiko. • Opening. • Information Matters arising at the 4th KMR meeting on July 26 2023. • Risk Profile Assessment Report for Quarter III 2023 and Changes to Risk Profile Report Working Paper Parameters. • POJK 17 of 2023 and its implications for KPR and KMR meetings. • Presentation of CKPN Information. • Progress Update Enterprise Risk Management. • Organizational Structure of the Risk Management Directorate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama Marsudi • Firdila Sari • Mayang Ekaputri • Baiq Nadea Dzurriatin
	30 November 2023 November 30, 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan. • Informasi Rasio Risiko per 27 Oktober 2023. • Informasi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). • <i>Update Roadmap Enterprise Risk Management</i>. • Informasi Hasil BCP dan <i>Call Tree Testing</i> 2023. • <i>Progress Update FRM dan Risk Analytics</i>. • <i>Progress Update Business Risk Control</i>. • Pengajuan Perubahan Piagam Komite Pembiayaan • Opening. • Risk Ratio Information as of 27 October 2023. • Information on the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM). • Update the Enterprise Risk Management Roadmap. • Information on 2023 BCP and Call Tree Testing Results. • Progress Update FRM and Risk Analytics. • Progress Update Business Risk Control. • Submission of Changes to the Financing Committee Charter 	<ul style="list-style-type: none"> • Dyota Mahottama Marsudi • Firdila Sari • Mayang Ekaputri • Baiq Nadea Dzurriatin

Agenda dan Peserta Rapat RMC RMC Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
	21 Desember 2023 December 21, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan Informasi <i>Monitoring Limit Risk Appetite dan Risk Tolerance Financing Portfolio</i> Informasi Rasio Risiko per 30 November 2023 <i>Update Roadmap Enterprise Risk Management</i> <i>Update Roadmap Business Risk Control</i> <i>Risk Management Organizational Structure</i> Informasi Pemenuhan Pelaksanaan Komite Risiko – 2023 Opening Information on Monitoring Limit Risk Appetite and Risk Tolerance Financing Portfolio Risk Ratio Information as of November 30, 2023 Update the Enterprise Risk Management Roadmap Update the Business Risk Control Roadmap Risk Management Organizational Structure Information on Compliance with Risk Committee Implementation - 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Dyota Mahottama Marsudi Firdila Sari Mayang Ekaputri Baiq Nadea Dzurriatin

Pelaksanaan Tugas RMC

Pada tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan oleh RMC adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat RMC sebanyak 7 (tujuh) kali pada tahun 2023.
- Melakukan ratifikasi piagam RMC sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2023.
- Mengevaluasi penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko.
- Memantau dan mengevaluasi laporan tingkat kesehatan Bank dan ICAAP per semester dan laporan profil risiko per triwulan.
- Menetapkan dan merekomendasi metodologi, evaluasi dan pengukuran risiko.
- Memberikan rekomendasi atas risk appetite statement, segmentasi pembiayaan, pendelegasian kewenangan persetujuan pembiayaan, financing to value (FTV), revisi kertas kerja profil risiko, stress testing risiko pasar, segmentasi pembiayaan komersial dan ekosistem RAC, perhitungan CKPN, risk acceptance dan risk tolerance pembiayaan dengan tenor > 5 tahun, implikasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum terhadap pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko, struktur organisasi Direktorat Manajemen Risiko, perhitungan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), hasil BCP dan call tree testing, perubahan piagam Komite Pembiayaan, limit risk appetite dan risk tolerance financing portfolio dan pemenuhan pelaksanaan Komite Risiko tahun 2023.

Komite Pembiayaan/ Credit Committee (CC)

Komite Pembiayaan atau *Credit Committee* (CC) dibentuk oleh Direksi untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait pembiayaan.

Implementation of RMC Duties

In 2023, the activities carried out by RMC are as follows:

- Hold RMC meetings 7 (seven) times in 2023.
- Ratify the RMC charter 1 (one) time in 2023.
- Evaluate the preparation of guidelines for implementing risk management.
- Monitor and evaluate Bank's health level and ICAAP reports per semester and risk profile reports per quarter.
- Determine and recommend methodology, evaluation and risk measurement.
- Provide recommendations on risk appetite statements, financing segmentation, delegation of authority for financing approvals, financing to value (FTV), revision of risk profile working papers, market risk stress testing, commercial financing segmentation and RAC ecosystem, CKPN calculations, risk acceptance and risk tolerance financing with a tenor of > 5 years, implications of Financial Services Authority Regulation no. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks regarding the implementation of Risk Management Committee meetings, organizational structure of the Risk Management Directorate, calculation of the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM), BCP results and call tree testing, changes to the Financing Committee charter, risk appetite and risk tolerance limits portfolio financing and compliance with the implementation of the Risk Committee in 2023.

Financing Committee/ Credit Committee (CC)

The Financing Committee or Credit Committee (CC) was formed by the Board of Directors to assist in carrying out supervisory functions related to financing.



Dasar Hukum Dasar

Pembentukan *Credit Committee* mengacu pada ketentuan dan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
9. Piagam Credit Committee.

Piagam Credit Committee

Term of Reference yang dimiliki CC mengatur antara lain struktur dan Keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, ketentuan limit kewenangan dan sekretariat. Piagam Komite akan dikinikani dan akan diperbarui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Basic Legal Basis

The formation of the Credit Committee refers to the following provisions and regulations:

1. Law of the Republic of Indonesia no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation as stipulated into law based on Law no. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation Becomes Law.
2. Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.
3. Financial Services Authority Regulation no. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
4. Financial Services Authority Regulation Number 2/POJK.03/2022 concerning Asset Quality Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
5. Financial Services Authority Regulation Number 26/POJK.03/2021 concerning Maximum Limits for Fund Distribution and Large Fund Distribution for Sharia Commercial Banks.
6. Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.03/2017 concerning Obligations for Preparing and Implementing Bank Financing or Financing Policies for Commercial Banks.
7. Financial Services Authority Regulation Number 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
8. Bank Indonesia Circular Letter Number 12/13/DPbS concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
9. Credit Committee Charter.

Credit Committee Charter

CC's Terms of Reference regulate, among other things, structure and membership, duties and responsibilities, provisions on limits of authority and secretariat. The Committee Charter will be updated and will be updated in accordance with developments in applicable regulations and the latest conditions of Bank.

Struktur Komite Credit Committee

Credit Committee Committee Structure

KETUA (VOTING MEMBER) CHAIRMAN (VOTING MEMBER)	Direktur yang membawahkan satuan kerja Bisnis/Komersial Director in charge of the Business/Commercial work unit
ANGGOTA (VOTING MEMBER) MEMBER (VOTING MEMBER)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Head</i> yang membawahkan satuan kerja <i>Financing Operations</i>. • <i>Head</i> yang membawahkan satuan kerja <i>BPRA Financing</i>. • 1. Head who oversees the Financing Operations work unit. • 2. Head who oversees the BPRA Financing work unit.
UNDANGAN Invitation	Sekretaris Komite Pembiayaan dapat menentukan undangan rapat Komite Pembiayaan sesuai dengan materi dan agenda rapat. The Secretary of the Financing Committee can determine the invitation to the Financing Committee meeting according to the material and agenda of the meeting.
SEKRETARIS Secretary	Unit Kerja yang membidangi <i>Financing Analyst</i> . Work Unit in charge of Financing Analyst.

Tugas dan Tanggung Jawab *Credit Committee*

1. Memberikan *review* independen dan persetujuan/penolakan pembiayaan sesuai limit kewenangan yang dimiliki.
2. Melakukan koordinasi dengan Komite Aset dan Kewajiban/Asset and Liability Committee (ALCO).
3. Memberi persetujuan pembiayaan berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat serta seksama.
4. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan untuk memberikan persetujuan Pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.
5. Tunduk dan patuh terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku PT Bank Aladin Syariah Tbk (d/h PT Bank Net Indonesia Syariah).
6. Memastikan setiap saat kehati-hatian dan analisa yang mendalam dalam memberikan persetujuan pembiayaan dengan tetap memperhatikan target pertumbuhan pembiayaan serta standard dan kebijakan risiko pembiayaan yang berlaku.
7. Mendukung bisnis untuk membentuk praktik manajemen risiko pembiayaan dalam proses persetujuan, pengukuran, pelaporan, monitoring, pembatasan dan analisa risiko.
8. Mendukung bisnis dalam melakukan identifikasi, klarifikasi dan pengelolaan pembiayaan bermasalah.

Wewenang Komite *Credit Committee*

Adapun wewenang Komite *Credit Committee* adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of the *Credit Committee*

1. Provide independent review and approval/rejection of financing according to the limits of authority held.
2. Coordinate with the Asset and Liability Committee (ALCO).
3. Give approval for financing based on competence honestly, objectively, carefully and carefully.
4. Refuse requests and/or influence from parties interested in the Financing applicant to provide Financing approval which is only a formality.
5. Submit and comply with the Code of Ethics and Code of Conduct of PT Bank Aladin Syariah Tbk (formerly PT Bank Net Indonesia Syariah).
6. Ensure at all times caution and in-depth analysis in providing financing approval while still paying attention to financing growth targets as well as applicable financing risk standards and policies.
7. Support businesses to establish financing risk management practices in the processes of approval, measurement, reporting, monitoring, limiting and risk analysis.
8. Support businesses in identifying, clarifying and managing problematic financing.

Authority of the *Credit Committee*

The authority of the *Credit Committee* is as follows:

Wewenang Authorities	Limit
<p>Menyetujui fasilitas pembiayaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baru • Penambahan • Perpanjangan • Review <p><i>Approved the following financing facilities:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • New • Addition • Extension • Review 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik wewenang untuk memutuskan pembiayaan adalah ketua dan anggota komite <i>voting member</i> • Dalam memutuskan pembiayaan memperhatikan batas BMPK/BMPD. • The authority to decide on financing is the chairman and members of the member voting committee • When deciding on financing, pay attention to the LLL/BMPD limits.
<p>Menyetujui Restrukturisasi Pembiayaan</p> <p><i>Approved Financing Restructuring</i></p>	
<p>Menyetujui Investasi kepada Surat Berharga Korporasi</p> <p><i>Approve Investment in Corporate Securities</i></p>	
<p>Menyetujui Pemberian Limit Transaksi Penempatan Antar Bank</p> <p><i>Approve the Granting of Interbank Placement Transaction Limits</i></p>	
<p>Menyetujui Fasilitas Transaksi <i>Trade Finance</i> sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Letter of Credit (L/C)</i> • Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) • Bank Garansi <p><i>Approve the Trade Finance Transaction Facility as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Letter of Credit (L/C)</i> • Domestic Letter of Credit (SKBDN) • Bank Guarantee 	
<p>Menyetujui <i>Action Plan</i> dan Proposal untuk pembiayaan bermasalah (macet dan hapus buku)</p> <p><i>Approve Action Plans and Proposals for problematic financing (bad debts and write-offs)</i></p>	
<p>Mendelegasikan kewenangannya dalam pemberian pemutusan pembiayaan yang diatur dalam ketentuan dan atau dokumen tersendiri.</p> <p><i>Delegating authority in granting termination of financing as regulated in separate provisions and/or documents.</i></p>	



Ketentuan Limit Kewenangan Credit Committee

Ketentuan limit kewenangan Komite *Credit Committee* adalah sebagai berikut:

1. Limit memutus adalah per nasabah dan/atau per kelompok nasabah tergantung pada limit keseluruhan nasabah/kelompok nasabah. Standalone facilities (contoh: fasilitas yang dijamin penuh dengan jaminan likuid) tetap dapat disetujui atas dasar standalone basis.
2. Fasilitas pembiayaan yang melampaui wewenang Direksi (tidak tercantum dalam daftar di atas) wajib tunduk pada Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Wewenang limit yang diatur berlaku untuk semua fasilitas pembiayaan kecuali ditentukan berbeda berdasarkan ketentuan tersendiri.
4. Seluruh proposal pembiayaan dan restrukturisasi wajib melalui proses *review* oleh Departemen Independen (selain Departemen Pengusul) sebelum disetujui oleh Komite Pembiayaan.
5. Pembiayaan (baru, penambahan, perpanjangan, *review* dan restrukturisasi) kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris agar tidak melanggar ketentuan BMPD.
6. Persetujuan pemberian pembiayaan harus memenuhi kuorum anggota komite pembiayaan yang memiliki kewenangan limit pemutus pembiayaan.

Ketentuan dan Mekanisme Credit Committee

Mekanisme Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan dapat dilakukan melalui forum rapat atau sirkulasi (termasuk melalui *e-mail*) yang ditetapkan oleh Sekretaris Komite Pembiayaan.
2. Rapat komite adalah rapat yang wajib dihadiri (secara langsung/*online*) oleh ketua komite dan anggota komite sesuai kuorum untuk membahas materi dalam rapat komite.
3. Peserta rapat komite adalah ketua komite, anggota komite, sekretaris komite, dan undangan bilamana dianggap perlu sesuai undangan khusus yang disampaikan oleh ketua atau sekretaris komite.
4. Rapat komite dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum, yaitu dihadiri ketua dan seluruh anggota komite.
5. Rapat dipimpin oleh ketua komite pembiayaan. Apabila Ketua berhalangan hadir (sakit, cuti tahunan, dinas luar kota) maka rapat komite diagendakan kembali oleh sekretaris komite, atau ketua komite menunjuk *alternate* yang merupakan Direktur atau *chief* lainnya selain anggota komite.

Mekanisme pengambilan keputusan Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing ketua dan anggota komite memiliki satu hak suara dalam pengambilan keputusan.
2. Apabila salah satu anggota komite berhalangan hadir (sakit, cuti tahunan, dinas luar kota) sehingga tidak dapat memberikan hak suaranya, maka anggota komite dengan hak suara (*voting member*) dapat digantikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh ketua komite berdasarkan bukti penunjukan, untuk menjalankan fungsi sebagai *voting member* komite pembiayaan.

Provisions for Credit Committee Authority Limits

The provisions on the Credit Committee's authority limits are as follows:

1. The cut off limit is per customer and/or per customer group depending on the overall limit of the customer/customer group. Standalone facilities (for example: facilities that are fully guaranteed by liquid collateral) can still be approved on a standalone basis.
2. Financing facilities that exceed the authority of the Board of Directors (not listed above) must be subject to the Company's Articles of Association.
3. The regulated limit authority applies to all financing facilities unless determined differently based on separate provisions.
4. All financing and restructuring proposals must go through a review process by an Independent Department (other than the Proposing Department) before being approved by the Financing Committee.
5. Financing (new, additional, extension, review and restructuring) to related parties must obtain approval from the Board of Commissioners so as not to violate BMPD provisions.
6. Approval for providing financing must meet the quorum of financing committee members who have the authority to decide financing limits.

Credit Committee Terms and Mechanisms

The Financing Committee mechanism is as follows:

1. The decision-making mechanism by the Financing Committee can be carried out through meetings or circulation forums (including via *e-mail*) determined by the Secretary of the Financing Committee.
2. A committee meeting is a meeting that must be attended (in person/*online*) by the committee chairman and committee members according to the quorum to discuss material in the committee meeting.
3. Committee Meeting Participants are the committee chairman, committee members, committee secretary, and invitees if deemed necessary according to the special invitation sent by the committee chairman or secretary.
4. Committee meetings can be held and decisions can be made if there is a quorum, namely attended by the chairman and all committee members.

The meeting is chaired by the chairman of the financing committee. If the Chair is unable to attend (sick, annual leave, out of town service) then the committee meeting is rescheduled by the committee secretary, or the committee chair appoints an alternate who is a Director or chief other than the committee members.

The Financing Committee's decision-making mechanism is as follows:

1. Each committee chairman and member has one vote in decision making.
2. If one of the committee members is unable to attend (sick, annual leave, out of town service) so he cannot cast his vote, then the committee member with voting rights (*voting member*) can be replaced by an official appointed by the committee chairman based on proof of appointment, to performs the function as a *voting member* of the financing committee.

- Pengambilan keputusan diupayakan secara musyawarah mufakat. Dalam hal diperlukan *voting*, maka keputusan dianggap sah apabila didukung oleh suara terbanyak.
- Mekanisme pengambilan keputusan Komite Pembiayaan:
- Decision making is attempted through deliberation and consensus. In the event that voting is required, the decision is considered valid if it is supported by the majority of votes.
- Financing Committee decision-making mechanism:

Total Limit Total Limits	Mekanisme Pengambilan Keputusan Mechanism of Decision Making
≤ Rp 50 Miliar ≤ IDR 50 Billion	Dapat dilakukan melalui mekanisme rapat (<i>offline/online</i>) atau sirkulasi Can be done through meeting mechanisms (<i>offline/online</i>) or circulation
> Rp 50 Miliar > IDR 50 Billion	Wajib dilakukan dengan mekanisme rapat (<i>offline/online</i>) Must be carried out using a meeting mechanism (<i>offline/online</i>)

Rapat Credit Committee

Secara rutin *Credit Committee* mengadakan rapat dengan frekuensi rapat bulanan atau jika diperlukan sesuai ketentuan kuorum kehadiran dari seluruh anggota *Credit Committee*. Adapun sepanjang tahun 2023, *Credit Committee* telah melakukan rapat sebanyak 55 (lima puluh lima) kali dengan risalah dan rekapitulasi kehadiran rapat sebagai berikut:

Credit Committee Meeting

The Credit Committee regularly holds meetings with a monthly meeting frequency or if necessary according to the provisions on the attendance quorum of all Credit Committee members. Throughout 2023, the Credit Committee has held 55 (fifty five) meetings with the minutes and recapitulation of meeting attendance as follows:

Agenda dan Peserta Rapat Credit Committee Agenda and Meeting Participants of Credit Committee

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	20 Januari 2023 January 20, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	66,67%
2	26 Januari 2023 January 26, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
3	26 Januari 2023 January 26, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
4	2 Februari 2023 February 2, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
5	14 Februari 2023 February 14, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	66,67%
6	22 Februari 2023 February 22, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
7	28 Februari 2023 February 28, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
8	24 Maret 2023 March 24, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
9	31 Maret 2023 March 31, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
10	4 April 2023 April 4, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
11	26 Januari 2023 January 26, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
12	10 April 2023 April 10, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
13	11 April 2023 April 11, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	66,67%
14	11 April 2023 April 11, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
15	12 April 2023 April 12, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
16	14 April 2023 April 14, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%vw
17	14 April 2023 April 14, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%



Agenda dan Peserta Rapat Credit Committee Agenda and Meeting Participants of Credit Committee

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
18	22 Mei 2023 May 22, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
19	23 Mei 2023 May 23, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
20	29 Mei 2023 May 29, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
21	5 Juni 2023 June 5, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
22	6 Juni 2023 June 6, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
23	21 Juni 2023 June 21, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
24	27 Juni 2023 June 27, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
25	7 Juli 2023 July 7, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
26	14 Juli 2023 July 14, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	66,67%
27	21 Juli 2023 July 21, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
28	27 Juli 2023 July 27, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
29	3 Agustus 2023 August 3, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
30	10 Agustus 2023 August 10, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
31	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
32	25 Agustus 2023 August 25, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
33	28 Agustus 2023 August 28, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
34	8 September 2023 September 8, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	66,67%
35	22 September 2023 September 22, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
36	26 September 2023 September 26, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
37	2 Oktober 2023 October 2, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
38	4 Oktober 2023 October 4, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	66,67%
39	12 Oktober 2023 October 12, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
40	31 Oktober 2023 October 31, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	66,67%
41	6 November 2023 November 6, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
42	13 November 2023 November 13, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	66,67%
43	24 November 2023 November 24, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
44	28 November 2023 November 28, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%

Agenda dan Peserta Rapat Credit Committee Agenda and Meeting Participants of Credit Committee

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
45	29 November 2023 November 29, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
46	30 November 2023 November 30, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
47	1 Desember 2023 December 1, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
48	11 Desember 2023 December 11, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
49	15 Desember 2023 December 15, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
50	19 Desember 2023 December 19, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	66,67%
51	19 Desember 2023 December 19, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	66,67%
52	21 Desember 2023 December 21, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
53	27 Desember 2023 December 27, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	66,67%
54	27 Desember 2023 December 27, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%
55	29 Desember 2023 December 29, 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan Nasabah circulation of customer's financing proposal	100%

Pelaksanaan Tugas Credit Committee

Sepanjang tahun 2023, *Credit Committee* telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Pemutusan pengajuan pembiayaan baru dan top up fasilitas pembiayaan
2. Pemutusan pengajuan baru Counterparty limit/Interbank limit
3. Pemutusan perpanjangan dan penambahan interbank/counterparty limit BUS dan UUS
4. Pemutusan Counterparty Limit BUK, Perusahaan Sekuritas dan Manajer Investasi

Komite Eksekutif Keberlanjutan (SEC)

Komite Eksekutif Keberlanjutan (SEC) dan Kelompok Kerja (*Working Group/Champions*) Keberlanjutan dibentuk dengan tujuan memastikan implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam semua aspek operasional Bank sesuai dengan strategi dan rencana kerja keberlanjutan. Hal ini juga bertujuan untuk mencapai target-target keberlanjutan yang telah ditetapkan.

Implementation of Credit Committee Duties

Throughout 2023, the Credit Committee has carried out various activities as follows:

1. Termination of applications for new financing and top up of financing facilities
2. Termination of new Counterparty limit/Interbank limit applications
3. Termination of extensions and additions to interbank/counterparty BUS and UUS limits
4. Termination of Counterparty Limits for BUK, Securities Companies and Investment Managers

Sustainability Executive Committee (SEC)

The Sustainability Executive Committee (SEC) and Sustainability Working Group (Champions) were formed with the aim of ensuring the implementation of sustainability principles in all aspects of Bank's operations in accordance with the sustainability strategy and work plan. This also aims to achieve the sustainability targets that have been set.



Dasar Hukum

Komite Eksekutif Keberlanjutan (SEC) dibentuk melalui ketentuan, peraturan dan pedoman keberlanjutan internasional yang antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta lampiran-lampirannya.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond).
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
8. Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 Tahun 2022.
9. Kerangka Kerja Sustainability UN Global Compact dan UN Principles for Responsible Banking.
10. Sustainability Roadmap PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab SEC

1. Memastikan terintegrasinya prinsip keberlanjutan di seluruh aktivitas operasional dan komunikasi Bank.
2. Mengevaluasi program-program keberlanjutan di seluruh Unit Kerja sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh Direksi.
3. Mengevaluasi indikator-indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) dan target keberlanjutan yang telah ditetapkan, dan memutuskan penyesuaian bilamana dianggap perlu.
4. Mengevaluasi pencapaian target untuk setiap indikator keberlanjutan pada setiap triwulan dan tahun.
5. Mengusulkan pembuatan/pengkinian pedoman internal bank untuk mencapai target-target keberlanjutan yang sudah ditetapkan.
6. Melakukan upaya penyelesaian terhadap isu-isu yang berhubungan dengan aspek keberlanjutan yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja terkait.
7. Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank untuk pelaksanaan program-program keberlanjutan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh Direksi.
8. Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan perubahan strategi, serta pemenuhan atau perubahan target pencapaian kinerja berkelanjutan.

Legal Basis

The Sustainability Executive Committee (SEC) was formed through international sustainability provisions, regulations and guidelines which include:

1. Law of the Republic of Indonesia no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation as stipulated into law based on Law no. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation Becomes Law.
2. Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.
3. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 59 of 2017 concerning Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals.
4. Financial Services Authority Regulation no. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies along with its attachments.
5. Financial Services Authority Regulation no. 60/POJK.04/2017 concerning Issuance and Requirements for Environmentally Friendly Debt Securities (Green Bond).
6. Financial Services Authority Regulation no. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks.
7. Financial Services Authority Regulation no. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
8. Indonesian Green Taxonomy Edition 1.0 2022.
9. UN Global Compact Sustainability Framework and UN Principles for Responsible Banking.
10. Sustainability Roadmap PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Duties and Responsibilities of the SEC

1. Ensure the integration of sustainability principles in all operational and communication activities of Bank.
2. Evaluate sustainability programs in all Work Units in accordance with the work plan approved by the Board of Directors.
3. Evaluate the key performance indicators and sustainability targets that have been set, and decide on adjustments if deemed necessary.
4. Evaluate target achievement for each sustainability indicator every quarter and year.
5. Propose the creation/update of bank internal guidelines to achieve the sustainability targets that have been set.
6. Make efforts to resolve issues related to sustainability aspects that cannot be resolved by the relevant work unit.
7. Ensure the adequacy and allocation of Bank's resources for implementing sustainability programs in accordance with the work plan approved by the Board of Directors.
8. Provide direction and recommendations related to changes in strategy, as well as fulfillment or changes to targets for achieving sustainable performance.

Struktur SEC SEC Structure

KETUA MERANGKAP ANGGOTA Chairman concurrently Member	Presiden Direktur President Director
ANGGOTA Member	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan • Direktur <i>Digital Banking</i> • Chief Strategy & Operating Officer • Chief Technology Officer • Director of Compliance • Director of Digital Banking • Chief Strategy & Operating Officer • Chief Technology Officer
SEKRETARIS Secretary	<p>Unit Kerja <i>Sustainability</i></p> <p>Sekretaris akan menginformasikan jadwal rapat, membuat, mendokumentasikan dan mensirkulasi notulen rapat. Notulen rapat harus ditandatangani oleh Ketua Komite atau anggota Komite lainnya apabila Ketua Komite berhalangan.</p> <p>Sustainability Work Unit</p> <p>The secretary will inform the meeting schedule, create, document and circulate meeting minutes. Meeting minutes must be signed by the Committee Chair or other Committee members if the Committee Chair is absent.</p>

Ketentuan dan Mekanisme SEC

1. Rapat SEC dipimpin oleh Ketua atau anggota SEC lain yang ditunjuk oleh Ketua sebagai wakil apabila Ketua berhalangan.
2. Rapat SEC dilaksanakan baik secara langsung maupun *online* paling sedikit sekali dalam setiap triwulan atau dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Rapat SEC diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota SEC.
4. Apabila salah seorang anggota berhalangan hadir dalam rapat SEC, maka yang bersangkutan dapat menunjuk orang lain untuk mewakili dalam rapat tersebut.
5. Materi rapat SEC disiapkan dan dikumpulkan oleh sekretaris SEC.
6. Hasil rapat SEC berupa antara lain rekomendasi yang akan diputuskan oleh Direksi melalui mekanisme musyawarah mufakat. Apabila konsensus tidak tercapai maka ketua komite berhak mengambil keputusan akhir.
7. Hasil keputusan rapat SEC dianggap sah jika diputuskan oleh mayoritas (di atas 50%) anggota SEC yang hadir pada rapat SEC.
8. Setiap rapat SEC dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam risalah rapat SEC yang disusun dan disampaikan oleh sekretaris SEC kepada ketua komite untuk ditandatangani oleh ketua (atau anggota SEC lainnya apabila ketua berhalangan) dan sekretaris SEC.
9. Risalah rapat SEC yang telah ditandatangani oleh ketua (atau anggota lain yang ditunjuk sebagai wakil apabila ketua berhalangan) dan sekretaris SEC selanjutnya diserahkan kepada Direksi untuk persetujuan.
10. Risalah rapat SEC yang telah disetujui oleh Direksi selanjutnya didistribusikan oleh sekretaris SEC kepada seluruh anggota SEC, undangan tetap dan unit kerja terkait yang menghadiri rapat SEC.
11. Seluruh dokumen rapat SEC dikumpulkan dan didokumentasikan oleh sekretaris SEC.

SEC Provisions and Mechanisms

1. SEC meetings are chaired by the Chairman or another SEC member appointed by the Chairman as a representative in the absence of the Chairman.
2. SEC meetings are held either in person or online at least once every quarter or can be held at any time if necessary.
3. SEC meetings are held if attended by at least more than 50% (fifty percent) of the total number of SEC members.
4. If one of the members is unable to attend the SEC meeting, the person concerned can appoint another person to represent them at the meeting.
5. SEC meeting materials are prepared and collected by the SEC secretary.
6. The results of the SEC meeting include, among other things, recommendations which will be decided by the Board of Directors through a consensus deliberation mechanism. If consensus is not reached, the committee chair has the right to make the final decision.
7. The results of SEC meeting decisions are considered valid if they are decided by the majority (above 50%) of SEC members present at the SEC meeting.
8. Each SEC meeting and the results of its decisions are stated in the minutes of the SEC meeting which are prepared and submitted by the SEC secretary to the chairman of the committee to be signed by the chairman (or another member of the SEC if the chairman is absent) and the SEC secretary.
9. The minutes of the SEC meeting which have been signed by the chairman (or another member appointed as a representative if the chairman is absent) and the SEC secretary are then submitted to the Board of Directors for approval.
10. Minutes of SEC meetings that have been approved by the Board of Directors are then distributed by the SEC secretary to all SEC members, permanent invitees and related work units who attend SEC meetings.
11. All SEC meeting documents are collected and documented by the SEC secretary.



Rapat SEC

Komite Eksekutif Keberlanjutan telah mengadakan rapat atau sirkulasi sebanyak 4 (empat) kali di tahun 2023 dengan risalah sebagai berikut:

SEC Meetings

The Sustainability Executive Committee has held meetings or circulations 4 (four) times in 2023 with the following minutes:

Agenda dan Peserta Rapat SEC Agenda and Participants of SEC Meeting

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
28 April 2023 April 28, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update tentang <i>Sustainability Report</i> (SR) 2022, rencana literasi keuangan, serta penyaluran dana CSR dan Dana Kebajikan untuk triwulan I 2023. Update terkait dengan emisi gas rumah kaca (GRK) 2022 dan usulan pengurangan emisi GRK 2023. Update terkait dengan pilot pelaporan TH1 triwulan I 2023. Tindak lanjut. Update on the 2022 Sustainability Report (SR), financial literacy plans, as well as distribution of CSR funds and Virtue Funds for the first quarter of 2023. Update related to 2022 greenhouse gas (GHG) emissions and proposals for 2023 GHG emission reductions. Update related to the TH1 reporting pilot for the first quarter of 2023. Follow up. 	
21 Juni 2023 June 21, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update tentang <i>assurance Sustainability Report</i> (SR) 2022, rencana & implementasi literasi keuangan, materi komunikasi, serta penyaluran dana CSR dan Dana Kebajikan untuk triwulan I 2023. Update terkait aspek <i>Governance</i>: SP Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, serta <i>Code of Conduct</i>. Update terkait S&P CSA 2023 dan <i>engagement</i> dengan UN JP ASSIST. Tindak lanjut. Update on the 2022 Sustainability Report (SR) assurance, financial literacy plans & implementation, communication materials, as well as distribution of CSR funds and Virtue Funds for the first quarter of 2023. Update related to Governance aspects: SP Financial Literacy and Financial Inclusion, as well as the Code of Conduct. Update regarding S&P CSA 2023 and engagement with UN JP ASSIST. Follow up. 	
19 Oktober 2023 October 19, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update <i>Sustainability Journey</i> di tahap ke-3. Penjelasan program <i>Sustainability</i> yang akan dilaksanakan di tahun 2024 di bidang lingkungan, sosial, dan pemerintah. Penjelasan program <i>Sustainability</i> di Q1-Q4 tahun 2024. Update <i>Sustainability Journey</i> in stage 3. Explanation of the Sustainability program that will be implemented in 2024 in the environmental, social and government sectors. Explanation of the Sustainability program in Q1-Q4 2024. 	
21 Desember 2023 December 21, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Penentuan topik material yang menjadi fokus pembahasan <i>Sustainability</i> Bank Aladin di tahun 2024. Update terkait program CSR yang telah dilaksanakan, seperti kerja sama donor darah dan donasi pengentasan <i>stunting</i>. Tindak lanjut terkait edukasi keuangan dengan Benih Baik. Determine the material topics that will be the focus of discussions on Bank Aladin's Sustainability in 2024. Update regarding CSR programs that have been implemented, such as blood donation cooperation and stunting alleviation donations. Follow-up regarding financial education with Good Seeds. 	

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Bank Aladin Syariah memiliki Sekretaris Perusahaan, yaitu organ tata Kelola yang membantu Dewan Direksi dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan juga berfungsi sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya. Selain itu, tugas Sekretaris Perusahaan adalah memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan, khususnya di bidang pasar modal.

Dasar Hukum

Sekretaris Perusahaan Bank Aladin Syariah dibentuk dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) terkait penunjukan Sekretaris Perusahaan di Perusahaan Terbuka. Direksi dapat mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan untuk mendukung tugas-tugas Direksi dan memastikan Bank telah mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

Pejabat dan Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Indira Indah Prameshwari yang diangkat sejak 15 Juli 2022, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.001.BOD/07.2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Bank Aladin Syariah has a Corporate Secretary, which is a governance organ that assists the Board of Directors in implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG). In this case, the Corporate Secretary also functions as a liaison between Bank and Shareholders and other Stakeholders. In addition, the Corporate Secretary’s duty is to ensure Bank’s compliance with regulations and legislation, especially in the capital markets sector.

Legal Basis

The Corporate Secretary of Bank Aladin Syariah was formed with reference to the applicable provisions and regulations, namely Article 103 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”) regarding the appointment of Company Secretaries in Public Companies. The Board of Directors may appoint a Corporate Secretary to support the Board of Directors’ duties and ensure that Bank complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles.

Officers and Profile of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary is currently held by Indira Indah Prameshwari who was appointed on July 15 2022, based on Directors’ Decree No. SK.001.BOD/07.2022 dated 15 July 2022 concerning the Appointment of the Corporate Secretary.



Indira Indah Prameshwari

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 37 tahun

Domisili

Indonesia

Pendidikan

- Bachelor of Business in Marketing & International Trade, Victoria University (2007)
- Master of Science (MSc) in International Business Management, The University of Nottingham (2009)

Pengalaman Kerja

- Head of Corporate Secretary di Mandiri Manajemen Investasi (2018—2021)
- Corporate Secretary Manager di Bakrie & Brothers Tbk. (2013—2018)
- Investor Relations Manager di Adhi Karya (Persero) Tbk. (2011—2013)
- Business Development di Pemeringkat Efek Indonesia (2009—2011)

Personal Data

Indonesian citizens
Age 37 years old

Domicile

Indonesia

Education

- Bachelor of Business in Marketing & International Trade, Victoria University (2007)
- Master of Science (MSc) in International Business Management, The University of Nottingham (2009)

Work Experience

- Head of Corporate Secretary at Mandiri Investment Management (2018—2021)
- Corporate Secretary Manager at Bakrie & Brothers Tbk. (2013—2018)
- Investor Relations Manager at Adhi Karya (Persero) Tbk. (2011—2013)
- Business Development at Indonesian Securities Ratings (2009—2011)



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Dengan berlandaskan pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Bank;
 - b. Penyampaian laporan-laporan kepada Regulator secara tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; dan
4. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan Peraturan OJK tersebut, Sekretaris Perusahaan Bank Aladin Syariah juga memiliki Kebijakan dan Standar Pedoman sebagai landasan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Aktivitas yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, mencakup:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka:
 - a. Melaksanakan Keterbukaan Informasi termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka.
 - b. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Melaksanakan pelaporan-pelaporan sesuai ketentuan perundangan lainnya yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretaris Perusahaan.
 - d. Mengelola administrasi pemegang saham Bank
 - e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya.
 - f. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi
 - a. Menetapkan strategi serta mengatur penyelenggaraan komunikasi korporasi yang mempresentasikan citra perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan/ *stakeholders* bank.
 - c. Melaksanakan fungsi pengelolaan risiko reputasi.
 - d. Mengadakan dan melaksanakan kegiatan tertentu (e.g. event/ acara/ sponsorship) sebagai pelaksanaan strategi komunikasi yang bersifat korporasi.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Based on Article 5 POJK no. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies, the function of the Corporate Secretary is to carry out duties that at least include:

1. Follow capital market developments, especially applicable laws and regulations in the capital market sector.
2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with statutory provisions in the capital markets sector.
3. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance which includes:
 - a. Information disclosure to the public, including the availability of information on Bank Website;
 - b. Submission of reports to the Regulator in a timely manner;
 - c. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders;
 - d. Organizing and documenting Board of Directors and/or Board of Commissioners meetings; And
4. As a liaison between Bank and shareholders, OJK and other stakeholders.

In line with the OJK Regulations, the Corporate Secretary of Bank Aladin Syariah also has Policies and Standard Guidelines as the basis for the Corporate Secretary in carrying out his functions and duties. Activities within the scope of responsibility of the Corporate Secretary include:

1. Bank Activities as a Public Company:
 - a. Implement Information Disclosure including reporting to Regulators regarding Bank's status as a public company.
 - b. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders.
 - c. Carry out reports in accordance with other statutory provisions which are the authority of the Corporate Secretary work unit.
 - d. Manage the administration of Bank shareholders
 - e. Organizing other activities related to Corporate Actions and/ or other information disclosure.
 - f. Carry out Bank's compliance function with regulations in the capital market sector.
2. Corporate Communication Activities
 - a. Determine strategies and organize corporate communications that present an image
 - b. company to all bank stakeholders.
 - c. Carry out reputation risk management functions.
 - d. Organize and carry out certain activities (e.g. events/ events/sponsorship) as the implementation of corporate communication strategies.

3. **Aktivitas Kesekretariatan**
 - a. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Mengadministrasikan dokumen perusahaan termasuk mengatur atau menetapkan peraturan tentang persuratan dan pengelolaan dokumen perusahaan.
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
4. **Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**
 - a. Bersama Unit Sustainability Menetapkan strategi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

3. **Secretarial Activities**
 - a. Organizing and documenting Board of Directors Meetings and Board of Commissioners Meetings.
 - b. Administering company documents including arranging or establishing regulations regarding correspondence and management of company documents.
 - c. Carry out activities to support the functions and work activities of the Board of Commissioners and Directors.
4. **Social and Environmental Responsibility Activities**
 - a. Together with the Sustainability Unit, establish strategies and implement social and environmental responsibility activities.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan di Bank Aladin Syariah bertanggung jawab langsung kepada Direktur atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Bank senantiasa mendorong dan memfasilitasi Sekretaris Perusahaan untuk melakukan pengembangan kompetensi. Adapun pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Corporate Secretary Structure

The Corporate Secretary at Bank Aladin Syariah is directly responsible to the Director for the implementation of his duties and responsibilities.

Corporate Secretary Competency Improvement Program

Bank always encourages and facilitates the Corporate Secretary to carry out competency development. The training attended by the Corporate Secretary throughout 2023 is as follows:

Nama	Jabatan	Program Pengembangan Kompetensi
Indira Indah Prameshwari	Head of Corporate Secretary	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corporate Action Training 2. Pelatihan Bursa Carbon: Potensi Pembelian Kredit Karbon 3. Public Speaking Training 4. Workshop Town Hall Bank Aladin: Diversity
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Corporate Action Training 2. Carbon Exchange Training: Potential for Purchasing Carbon Credits 3. Public Speaking Training 4. Bank Aladin Town Hall Workshop: Diversity

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan menghadiri pelaksanaan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Direksi & Dewan Komisaris serta membuat seluruh risalah hasil Rapat tersebut.
2. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Bank
3. Melaksanakan Paparan Publik Tahunan sesuai peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan Aksi Korporasi.
4. Bersama unit kerja Sustainability menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility
5. Pengelolaan informasi dan komunikasi perusahaan kepada media massa & masyarakat
6. Berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan pemegang saham

Implementation of Corporate Secretary Duties

Throughout 2023, the Corporate Secretary has carried out several activities as follows:

1. Organized and attended Board of Directors Meetings, Board of Commissioners Meetings and Joint Board of Directors & Board of Commissioners Meetings and prepared all minutes of the results of these meetings.
2. Organized the Bank's Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
3. Carried out Annual Public Exposes in accordance with applicable regulations and was responsible for organizing Corporate Actions.
4. Together with the Sustainability work unit, organized Corporate Social Responsibility activities
5. Managed Company information and communications to the mass media & the public
6. Acted as a liaison between the Company and shareholders



Hubungan Investor

Setiap investor atau calon investor diberikan akses untuk mengirimkan pertanyaan kepada Divisi Investor Relations & Corporate Secretary. Kepala Investor Relations dijabat oleh Indira Indah Prameshwari. Pertanyaan juga dapat ditujukan kepada Perusahaan melalui situs website [https:// aladinbank.id/](https://aladinbank.id/)

Investor Relations & Corporate Secretary
Gedung Millennium Centennial Center, Lt 7,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25.
Jakarta Selatan, Indonesia. Kode Pos: 12920
Telp. : +62 21 39708008
Fax : +62 21 39708007
Email : ir@aladinbank.id
Email Corsec : corsec@aladinbank.id

Investor Relations

Every investor or prospective investor is granted access to submit inquiries to the Investor Relations & Corporate Secretary Division. The Head of Investor Relations is held by Indira Indah Prameshwari. Inquiries can also be directed to the Company through the website <https://aladinbank.id/>

Investor Relations & Corporate Secretary
Millennium Centennial Center Building, 7th Floor,
Jl. General Sudirman Kav. 25.
South Jakarta, Indonesia. Postal Code: 12920
Tel. : +62 21 39708008
Fax : +62 21 39708007
Email : ir@aladinbank.id
Corsec email : corsec@aladinbank.id

Satuan Kerja Audit Internal

Internal Audit Work Unit

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memiliki fungsi untuk memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam lingkungan usaha Bank berjalan secara efektif melalui adanya proses audit yang meliputi seluruh aspek keuangan dan operasional di dalam Bank. Selain itu, SKAI Bank dibentuk untuk memeriksa efektivitas sistem pengendalian Intern yang berfokus pada risiko bisnis yang signifikan dengan mengidentifikasi potensi risiko internal yang dapat mempengaruhi kinerja Bank, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kecukupan proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Bank. SKAI juga bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kinerja dan keamanan Bank.

Internal Audit Charter

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi pengendalian internal, SKAI memiliki pedoman kerja yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) Bank dengan nomor No. KB-O/014/PRES DIR, telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris pada tanggal 05 Agustus 2022.

Piagam Audit ini mencerminkan tekad Perseroan untuk secara konsisten menerapkan Tata Kelola Perusahaan guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Piagam Audit juga merupakan pedoman dan acuan akan kedudukan Internal Audit, visi dan misi, ruang lingkup dan tujuan, wewenang, tugas serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh staf satuan Unit Internal Audit.

Visi dan Misi SKAI SKAI Vision and Mission

VISI VISION	<p>Menjadi mitra kerja Direksi yang independen, objektif, terpercaya dan tanggap dalam upayanya untuk mendukung tugas Direksi mencapai sasarannya.</p> <p>Become a working partner of the Board of Directors who is independent, objective, trustworthy and responsive in its efforts to support the Board of Directors' duties in achieving its targets.</p>
MISI MISSION	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan audit internal atas aktivitas dan kegiatan operasional Perseroan. • Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap proses pengendalian manajemen operasional dan keuangan agar prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dapat terlaksana. • Memberikan pelayanan konsultasi dan rekomendasi secara independen, transparan, <i>accountable</i>, <i>responsible</i> untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta memberikan nilai tambah guna meningkatkan kualitas pengelolaan operasional Perseroan. • Senantiasa meningkatkan kompetensi sehingga menjadi auditor internal yang profesional. • Carry out internal audits of the Company's activities and operational activities. • Carry out inspections and evaluations of operational and financial management control processes so that the principles of good corporate governance can be implemented. • Provide independent, transparent, accountable, responsible consulting and recommendation services to increase the effectiveness and efficiency of performance and provide added value to improve the quality of the Company's operational management. • Continuously improve competence so that you become a professional internal auditor.

The Internal Audit Work Unit (SKAI) has the function of ensuring that the implementation of the internal control system in Bank's business environment runs effectively through an audit process that covers all financial and operational aspects within Bank. In addition, Bank's SKAI was established to audit the effectiveness of the Internal control system which focuses on significant business risks by identifying potential internal risks that could affect Bank's performance, including compliance with applicable laws and regulations, adequacy of governance processes, risk management and control systems. Bank internal. SKAI is also responsible for providing recommendations for improvements to improve Bank's performance and security.

Internal Audit Charter

To support the implementation of duties and internal control functions, SKAI has work guidelines prepared based on Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019 concerning Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks. Bank Internal Audit Charter with number No. KB-O/014/PRES DIR, has been approved and signed by the Board of Directors and has been approved and signed by the Board of Commissioners on August 5, 2022.

This Audit Charter reflects the Company's determination to consistently implement Corporate Governance to achieve the stated vision and mission. The Audit Charter is also a guideline and reference for the position of Internal Audit, vision and mission, scope and objectives, authority, duties and responsibilities that must be carried out by the Internal Audit Unit staff.

Dasar Hukum dan Pengangkatan

SKAI dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Kepala SKAI ditunjuk oleh Presiden Direktur sesuai Surat Penunjukan Unit Audit Internal No. 183/SK.DIR/NET.2020 tanggal 9 Juli 2020, Bank telah menetapkan Senof Gremaldy sebagai Ketua merangkap anggota Unit Audit Internal Emiten, serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 184/BOD.Net/07-2020 tanggal 20 Juli 2020. Bank telah membentuk Piagam Pengawas Internal (Internal Audit Charter) sesuai dengan POJK No. 56/2015.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Kepala SKAI dilakukan atas pertimbangan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaannya, Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SKAI setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris bilamana Kepala SKAI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor SKAI dan/atau gagal atau tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Profil dan Pejabat Kepala SKAI

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 183/SKDir.NET/HCD/07-2020 tanggal 15 Juli 2020 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 184/BOD.NET/07-2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Laporan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank Net Indonesia Syariah, Kepala SKAI dijabat oleh Senof Gremaldy.

Legal Basis and Appointment

SKAI was formed in accordance with the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks. The Head of SKAI is appointed by the President Director in accordance with the Internal Audit Unit Appointment Letter No. 183/SK.DIR/NET.2020 dated July 9, 2020, Bank has appointed Senof Gremaldy as Chairman and member of the Issuer's Internal Audit Unit, and has reported this to the Financial Services Authority with letter No. 184/BOD.Net/07-2020 dated 20 July 2020. Bank has established an Internal Audit Charter in accordance with POJK No. 56/2015.

Party Who Appoints and Dismisses the Head of Internal Audit

The President Director appoints and dismisses the Head of SKAI based on the consideration of the Board of Commissioners. In practice, the President Director can dismiss the Head of SKAI after obtaining approval from the Board of Commissioners if the Head of SKAI does not fulfill the requirements as an SKAI Auditor and/or fails or is incompetent in carrying out his duties and responsibilities.

Profile and Officials of the Head of SKAI

Based on Board of Directors' Decree No. 183/SKDir.NET/HCD/07-2020 dated July 15, 2020 and has been reported to the Financial Services Authority with letter No. 184/BOD.NET/07-2020 dated 20 July 2020 concerning Report on the Appointment of the Head of the Internal Audit Work Unit (SKAI) PT Bank Net Indonesia Syariah, the Head of SKAI is held by Senof Gremaldy.



Senof Gremaldy

Kepala Audit Internal
Head of Internal Audit

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 41 tahun

Domisili

Indonesia

Pendidikan

- Magister Ekonomi Syariah, Universitas Trisakti (2019)
- Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti (2006)

Pengalaman Kerja

- Head of Internal Audit/Kepala Internal Audit, PT Bank Aladin Syariah Tbk (2020—saat ini)
- Head of Information Technology & Head Office, PT Bhinneka Life Indonesia (2019—2020)
- Head of IT Auditor, PT Bank Muamalat Indonesia (2016—2019)
- Area Auditor Head Office, PT Bank Muamalat Indonesia (2012—2019)
- Coordinator of Area Auditor Regional SKAI, PT Bank Panin (200—2012)
- Junior Auditor Eksternal, Kantor Akuntan Publik Maksam & Rekan (2008)
- Finance & Purchasing, PT Emax Fortune International (2006—2008)

Personal Data

Indonesian citizens
Age 41 years old

Domicile

Indonesia

Education

- Master of Sharia Economics, Universitas Trisakti (2019)
- Bachelor of Economics, Universitas Trisakti (2006)

Work Experience

- Head of Internal Audit/Head of Internal Audit, PT Bank Aladin Syariah Tbk (2020—present)
- Head of Information Technology & Head Office, PT Bhinneka Life Indonesia (2019—2020)
- Head of IT Auditor, PT Bank Muamalat Indonesia (2016—2019)
- Area Auditor Head Office, PT Bank Muamalat Indonesia (2012—2019)
- Coordinator of Area Auditor Regional SKAI, PT Bank Panin (200—2012)
- Junior External Auditor, Maksam & Partners Public Accounting Firm (2008)
- Finance & Purchasing, PT Emax Fortune International (2006—2008)

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Sebagaimana yang termuat dalam Piagam Audit Intern Bank Tahun 2023, tugas dan tanggung jawab SKAI adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit dan pengawasan berkelanjutan (continuous monitoring).
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya.
6. Melakukan koordinasi kegiatan SKAI dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia assurance lainnya.
7. SKAI wajib melakukan komunikasi dengan Regulator paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Sertifikasi sebagai Profesi Audit Internal

Auditor memerlukan keahlian dan kompetensi yang mumpuni. Oleh karena itu, sertifikasi profesi baik yang diakui secara internasional maupun nasional menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami lebih jauh perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki SKAI hingga akhir tahun 2023.

SKAI Duties and Responsibilities

As contained in the 2023 Bank Internal Audit Charter, SKAI's duties and responsibilities are as follows:

1. Assist the President Director and the Board of Commissioners in carrying out supervision by explaining operational planning, implementation and monitoring of audit results.
2. Make analyzes and assessments in the fields of finance, accounting, operations and other activities through audits and continuous monitoring.
3. Identify all possibilities to improve and increase the efficiency of use of resources and funds.
4. Provide suggestions for improvement and objective information about the activities audited at all levels of management.
5. Develop written policies and procedures as guidelines for Auditors in carrying out their duties.
6. Coordinate SKAI activities with external audit activities and other assurance provider units/functions.
7. SKAI is required to communicate with the Regulator at least once every 1 (one) year.

Certification as an Internal Audit Professional

Auditors need qualified skills and competencies. Therefore, professional certification, both internationally and nationally recognized, is an important aspect for auditors to understand further audit developments, especially regarding compliance with regulations and industry developments. The following is a presentation of the professional certification held by SKAI until the end of 2023.

Nama Dan Jabatan Name And Position	Jenis Sertifikasi Profesi Audit Internal Type of Internal Audit Professional Certification
Senof Gremaldy (Kepala Skai) (Head of SKAI)	Qualified Internal Audit (QIA)
	Internal Audit Banking Level Supervisor
	Banking Manajemen Risiko Level 3 Banking Risk Management Level 3
	Certified Lead Auditor ISO 27001
Dwima Sulistyowati (Manager General and Sharia Audit)	Banking Manajemen Risiko Level 2
	Internal Audit Bank Level Supervisor
	Certified Akuntan (CA)
Rhiza Ayuningtyas (General and Sharia Auditor)	Banking Manajemen Risiko Level 2
	Internal Audit Bank Level Auditor
Titis Dimas Prasetyo (Manager IT System and Operations Audit)	Banking Manajemen Risiko Level 2 Banking Risk Management Level 2
	Qualified Internal Audit (QIA)
	Information Technology Infrastructure Library 4
Tommy Regia (IT System and Operations Auditor)	Banking Manajemen Risiko Level 1
	Internal Audit Bank Level Auditor
Budi Rezki Wijayanti (Manager Quality Assurance, Monitoring and Development Audit)	Banking Manajemen Risiko Level 2 Banking Risk Management Level 2
	Internal Audit Bank Level Supervisor

Struktur dan Kedudukan SKAI

SKAI bertanggung jawab langsung kepada kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit dan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank. Dalam hal ini, penunjukan dan pemberhentian Kepala SKAI dilakukan oleh Direktur Utama Bank, disertai persetujuan Dewan Komisaris melalui rekomendasi dari Komite Audit. Proses ini selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Program Pengembangan Kompetensi

Bank Aladin Syariah senantiasa mendukung dan memfasilitasi SKAI untuk melakukan pengembangan kompetensi sehingga dapat mengikuti isu-isu seputar audit dan gungsi-fungsi di bawah SKAI. Adapun pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh anggota SKAI sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/Conference/Seminar	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Pelaksanaan Implementation Venue	Penyelenggara Organizer
1.	Lead Auditor ISO 27001	30 Januari-3 Februari 2023 January 30-February 3, 2023	Jakarta	CBQA
2.	Competency Based Interview-Batch 2	28 Februari 2023 February 28, 2023	Gedung MCC, Jakarta	PT Learning Resources
3.	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	6 Maret 2023 March 6, 2023	Online	PT Bintang Solusi Laras
4.	Basic Sharia Banking	7-8 Juni 2023 June 7-8, 2023	Online	Yayasan Muamalat Institute
5.	Infosec Awareness Socialization	13 Juni 2023 June 13, 2023	Gedung MCC, Jakarta	Info Sec PT Bank Aladin Syariah Tbk
6.	Fundamental of IT Auditing	19-20 Juni 2023 June 19-20, 2023	Online	Institute of Internal Auditors Indonesia
7.	Refreshment Security Awareness Phishing	26 Juni 2023 June 26, 2023	Online	Info Sec PT Bank Aladin Syariah Tbk
8.	Anti Fraud Awareness Socialization	6 Juli 2023 July 6, 2023	Gedung MCC, Jakarta	Anti Fraud Management PT Bank Aladin Syariah Tbk
9.	National Conference IAIB 2023	12-13 Juli 2023 July 12-13, 2023	Gading Serpong, Tangerang Selatan	IAIB
10.	Fundamental of Cybersecurity Auditing	17 dan 20 Juli 2023 July 17 and 20, 2023	Online	Institute of Internal Auditors Indonesia
11.	Fundamental Risk Based Auditing	24-25 Juli 2023 July 24-25, 2023	Online	Institute of Internal Auditors Indonesia
12.	Continuous Audit & Data Analytic	26-27 Juli 2023 July 26-27, 2023	Online	Institute of Internal Auditors Indonesia
13.	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	4 Agustus 2023 August 4, 2023	Online	PT Bintang Solusi Laras
14.	Excellent Public Speaking Skills-Batch 1	29 Agustus 2023 August 29, 2023	Jakarta	Talk Inch
15.	Basic Sharia Banking	13-14 September 2023 September 13-14, 2023	Online	Yayasan Muamalat Institute
16.	Fraud and Code of Ethics Investigation Training	11 Oktober 2023 October 11, 2023	Gedung MCC, Jakarta	Anti Fraud Management PT Bank Aladin Syariah Tbk dan Pemateri dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

Structure and Position of SKAI

SKAI is directly responsible to the President Director and can communicate with the Board of Commissioners directly or through the Audit Committee to provide information on various matters relating to the implementation of audits and in carrying out supervisory functions to realize Bank's vision and mission. In this case, the appointment and dismissal of the Head of SKAI is carried out by the President Director of Bank, accompanied by approval from the Board of Commissioners through recommendations from the Audit Committee. This process is then reported to the Financial Services Authority (OJK).

Competency Development Program

Bank Aladin Syariah always supports and facilitates SKAI to develop competencies so that it can follow issues surrounding audits and functions under SKAI. The training attended by SKAI members throughout 2023 is as follows:

No.	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/Conference/Seminar	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Pelaksanaan Implementation Venue	Penyelenggara Organizer
17.	Refreshment Materi LHPK Tahun 2023	3 November 2023 November 3, 2023	Denpasar, Bali	Bank Indonesia
18.	Penerapan Program APU, PPT dan PPSPM	24 November 2023 November 24, 2023	Online	AML-CFT Compliance PT Bank Aladin Syariah Tbk

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Satuan Kerja Audit Internal

SKAI memiliki kewenangan untuk mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah. Adapun rapat yang telah diselenggarakan SKAI di sepanjang tahun 2023 yaitu sebanyak 21 kali rapat, 11 kali rapat dengan Direksi, 5 kali rapat dengan Komite Audit yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, dan 5 kali rapat dengan Dewan Pengawas Syariah.

Adapun rapat SKAI, dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Policy and Implementation of Internal Audit Work Unit Meetings

SKAI has the authority to hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee and Sharia Supervisory Board. The Total Meetings held by SKAI throughout 2023 is 21 times of meetings, 11 times of meetings with the Board of Directors, 5 meetings with the Audit Committee attended by the Board of Commissioners, and 5 meetings with the Sharia Supervisory Board

The SKAI meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee, as well as the Sharia Supervisory Board are as follows:

Agenda dan Peserta Rapat SKAI Agenda and Participants of SKAI Meeting

No	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Rapat Meeting	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
1	13 Januari 2023 January 13, 2023	DPS	<ul style="list-style-type: none"> Skema Pembiayaan Modal Kerja Dan Investasi Skema Pengalihan Utang atau Piutang Dari Lembaga Keuangan Konvensional Penetapan Jadwal Rapat DPS dan Uji Petik Periode Tahun 2023 Working Capital and Investment Financing Scheme Debt or Receivable Transfer Scheme from Conventional Financial Institutions Determination of the DPS Meeting Schedule and Pick Test for the 2023 Period 	SKAI, DPS, Direksi, Unit Kerja Kepatuhan, Unit Kerja Produk, Unit Kerja Sales, Unit Kerja Risk Management SKAI, DPS, Directors, Compliance Work Unit, Product Work Unit, Sales Work Unit, Risk Management Work Unit
2	26 Januari 2023 January 26, 2023	Direksi Board of Directors	Update Pelaksanaan Aktivitas Audit dan Aktivitas Non Audit Rencana Kerja, Anggaran dan Man Power Planning Internal Audit 2023 Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit <ul style="list-style-type: none"> Updates on the Implementation of Audit Activities and Non-Audit Activities 2023 Internal Audit Work Plan, Budget and Man Power Planning Monitoring Audit Findings Follow-up 	SKAI, Direksi, Chief Executive SKAI, Directors, Chief Executive
3	10 Februari 2023 February 10, 2023	Komite Audit Audit Committee	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Semester 2 Tahun 2022 Rencana Kerja dan Anggaran Internal Audit 2023 Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit Follow up on Minutes of Audit Committee Meetings Audit Report and Main Results for Semester 2 2022 2023 Internal Audit Work Plan and Budget Monitoring Audit Findings Follow-up 	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, Directors, Chief Executive, Commissioners, Audit Committee
4	23 Februari 2023 February 23, 2023	Direksi Board of Directors	Update Pelaksanaan Aktivitas Audit dan Aktivitas Non Audit Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit <ul style="list-style-type: none"> Updates on the Audit Activities and Non-Audit Activities Monitoring Audit Findings Follow-up 	SKAI, Direksi, Chief Executive SKAI, Directors, Chief Executive



Agenda dan Peserta Rapat SKAI Agenda and Participants of SKAI Meeting

No	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Rapat Meeting	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
5	24 Februari 2023 February 24, 2023	DPS	<p>Deposito On Call Pembiayaan Kendaraan Bermotor Sharia Compliance Update</p> <ul style="list-style-type: none"> Panduan Seleksi Syariah Untuk Hubungan Kerja Sama Bank Dengan Mitra Pelaksanaan Uji Petik DPS Q2 <p>On Call Deposits Motor Vehicle Financing Sharia Compliance Update</p> <ul style="list-style-type: none"> Sharia Selection Guide for Bank Cooperation Relationships with Partners Implementation of DPS Q2 Pick Test 	<p>SKAI, DPS, Direksi, Chief Executive, Unit Kerja Kepatuhan, Unit Kerja Produk, Unit Kerja Sales, Unit Kerja Risk Management</p> <p>SKAI, DPS, Directors, Chief Executive, Compliance Work Unit, Product Work Unit, Sales Work Unit, Risk Management Work Unit</p>
6	20 Maret 2023 March 20, 2023	Direksi Board of Directors	<p>Update Pelaksanaan Aktivitas Audit dan Aktivitas Non Audit Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit</p> <p>Updates on the Audit Activities and Non-Audit Activities Monitoring Audit Findings Follow-up</p>	<p>SKAI, Direksi, Chief Executive</p> <p>SKAI, Directors, Chief Executive</p>
7	5 April 2023 April 5, 2023	DPS	<ul style="list-style-type: none"> Update Skema Pengalihan Hutang. Proposal Penggunaan Dana TBDSP Untuk Program BAZNAS Update KKmitmen Atas Temuan Hasil Uji Petik DPS per 31 Maret 2023 Debt Transfer Scheme Update. Proposal for Using TBDSP Funds for the BAZNAS Program Updated Commitment on the Findings of DPS Pick Test Results as of March 31, 2023 	<p>SKAI, DPS, Direksi, Chief Executive, Unit Kerja Kepatuhan, Unit Kerja Produk, Unit Kerja Sales, Unit Kerja Risk Management</p> <p>SKAI, DPS, Directors, Chief Executive, Compliance Work Unit, Product Work Unit, Sales Work Unit, Risk Management Work Unit</p>
8	27 April 2023 April 27, 2023	Direksi Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> Update Pelaksanaan Aktivitas Audit dan Aktivitas Non Audit Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit Updates on the Audit Activities and Non-Audit Activities Monitoring Audit Findings Follow-up 	<p>SKAI, Direksi, Chief Executive</p> <p>SKAI, Directors, Chief Executive</p>
9	26 Mei 2023 May 26, 2023	Komite Audit Audit Committee	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit Update Pelaksanaan Aktivitas Audit dan Aktivitas Non Audit Hasil Audit Internal Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit Follow up on Minutes of Audit Committee Meetings Updates on the Audit Activities and Non-Audit Activities Monitoring Audit Findings Follow-up 	<p>SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit</p> <p>SKAI, Directors, Chief Executive, Commissioners, Audit Committee</p>
10	30 Mei 2023 May 30, 2023	Direksi Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> Update Pelaksanaan Aktivitas Audit dan Aktivitas Non Audit Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit Updates on the Audit Activities and Non-Audit Activities Monitoring Audit Findings Follow-up 	<p>SKAI, Direksi, Chief Executive</p> <p>SKAI, Directors, Chief Executive</p>
11	21 Juni 2023 June 21, 2023	Direksi Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> Update Pelaksanaan Aktivitas Audit dan Aktivitas Non Audit Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit Updates on the Audit Activities and Non-Audit Activities Monitoring Audit Findings Follow-up 	<p>SKAI, Direksi, Chief Executive</p> <p>SKAI, Directors, Chief Executive</p>
12	22 Juni 2023 June 22, 2023	DPS	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Perhitungan Denda Keterlambatan (Ta'zir) Pelaksanaan Akad Invoice Financing dalam SAT B2B Website. Penyelesaian Sengketa Syariah dalam Ruang Lingkup Peradilan Umum Laporan Komitmen Hasil Uji Petik DPS Q4 2022 Per Juni 2023 Changes in the Calculation of Late Fines (Ta'zir) Implementation of the Invoice Financing Agreement on the SAT B2B Website. Sharia Dispute Resolution within the Scope of General Courts DPS Q4 2022 Pick Test Results Commitment Report as of June 2023 	<p>SKAI, DPS, Direksi, Chief Executive, Unit Kerja Kepatuhan, Unit Kerja Produk, Unit Kerja Sales, Unit Kerja Risk Management</p> <p>SKAI, DPS, Directors, Chief Executive, Compliance Work Unit, Product Work Unit, Sales Work Unit, Risk Management Work Unit</p>
13	21 Juli 2023 July 21, 2023	DPS	<p>Tabungan Anak Dan Remaja Savings for Children and Teenagers</p>	<p>SKAI, DPS, Direksi, Chief Executive, Unit Kerja Kepatuhan, Unit Kerja Produk, Unit Kerja Sales, Unit Kerja Risk Management</p> <p>SKAI, DPS, Directors, Chief Executive, Compliance Work Unit, Product Work Unit, Sales Work Unit, Risk Management Work Unit</p>
14	27 Juli 2023 July 27, 2023	Direksi Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> Update Pelaksanaan Aktivitas Audit dan Aktivitas Non Audit Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit Updates on the Audit Activities and Non-Audit Activities Monitoring Audit Findings Follow-up 	<p>SKAI, Direksi, Chief Executive</p> <p>SKAI, Directors, Chief Executive</p>

Agenda dan Peserta Rapat SKAI Agenda and Participants of SKAI Meeting

No	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Rapat Meeting	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
15	18 Agustus 2023 August 18, 2023	Komite Audit Audit Committee	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit Update Pelaksanaan Aktivitas Audit dan Aktivitas Non Audit Hasil Audit Internal Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit Follow up on Minutes of Audit Committee Meetings Updates on the Audit Activities and Non-Audit Activities Internal Audit Results Monitoring Audit Findings Follow-up 	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, Directors, Chief Executive, Commissioners, Audit Committee
16	21 September 2023 September 21, 2023	Direksi Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> Update Pelaksanaan Aktivitas Audit dan Aktivitas Non Audit Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit Updates on the Audit Activities and Non-Audit Activities Monitoring Audit Findings Follow-up 	SKAI, Direksi, Chief Executive SKAI, Directors, Chief Executive
17	19 Oktober 2023 October 19, 2023	Direksi Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> Update Pelaksanaan Aktivitas Audit dan Aktivitas Non Audit Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit Updates on the Audit Activities and Non-Audit Activities Monitoring Audit Findings Follow-up 	SKAI, Direksi, Chief Executive SKAI, Directors, Chief Executive
18	10 November 2023 November 10, 2023	Komite Audit Audit Committee	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit Update Struktur Organisasi Internal Audit Update Pelaksanaan Aktivitas Audit dan Aktivitas Non Audit Hasil Audit Internal Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit Follow up on Minutes of Audit Committee Meetings Update the Internal Audit Organization Structure Updates on the Audit Activities and Non-Audit Activities Monitoring Audit Findings Follow-up 	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, Directors, Chief Executive, Commissioners, Audit Committee
19	30 November 2023 November 30, 2023	Direksi Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> Update Pelaksanaan Aktivitas Audit dan Aktivitas Non Audit Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit Updates on the Audit Activities and Non-Audit Activities Monitoring Audit Findings Follow-up 	SKAI, Direksi, Chief Executive SKAI, Directors, Chief Executive
20	15 Desember 2023 December 15, 2023	Komite Audit Audit Committee	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit Update Pelaksanaan Aktivitas Audit dan Aktivitas Non Audit Hasil Audit Internal Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit Annual Audit Plan Internal Audit Tahun 2024 Follow up on Minutes of Audit Committee Meetings Updates on the Audit Activities and Non-Audit Activities Internal Audit Results Monitoring Follow-up Audit Findings Annual Audit Plan Internal Audit for 2024 	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, Directors, Chief Executive, Commissioners, Audit Committee
21	21 Desember 2023 December 21, 2023	Direksi Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> Update Pelaksanaan Aktivitas Audit dan Aktivitas Non Audit Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit Updates on the Audit Activities and Non-Audit Activities Monitoring Audit Findings Follow-up 	SKAI, Direksi, Chief Executive SKAI, Directors, Chief Executive

Pelaksanaan Tugas SKAI

Sepanjang tahun 2023, SKAI telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Proses Post Implementation Review BI-FAST
- Pelaksanaan Proses Audit Implementation ISO 27001:2013
- Pelaksanaan Proses Audit Pemantauan Kepatuhan Sistem Pembayaran dan KPDHN Bank Indonesia
- Pelaksanaan Post Implementation Review *Corporate Internet Banking*
- Pelaksanaan Proses Audit *Revenue Sharing Distribution and Core Banking Module*
- Pelaksanaan Proses Audit Pengadaan Barang dan Jasa Promosi Bank

Implementation of SKAI Duties

Throughout 2023, SKAI has carried out several activities as follows:

- Implementation of the BI-FAST Post Implementation Review Process
- Implementation of the ISO 27001:2013 Implementation Audit Process
- Implementation of Bank Indonesia Payment System and KPDHN Compliance Monitoring Audit Process
- Implementation of Post Implementation Review of Corporate Internet Banking
- Implementation of the Revenue Sharing Distribution and Core Banking Module Audit Process
- Implementation of the Audit Process for Procurement of Bank Promotional Goods and Services



7. Pelaksanaan Proses Audit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
 8. Pelaksanaan Proses Audit *Regulatory Reporting* Antasena
 9. Pelaksanaan Proses Audit Penilaian Keandalan Sistem dan Penilaian Kualitas *Data Single Customer View* (SCV) Pelaporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
 10. Pelaksanaan Proses Audit Proses Perhitungan dan Pelaporan *Internal Capital Adequacy Assessment Report* (ICAAP)
 11. Pelaksanaan *Monitoring* Tindak Lanjut Temuan Audit
 12. Pelaksanaan Audiensi dengan Regulator
7. Implementation of the Financial Information Services System (SLIK) Audit Process
 8. Implementation of the Antasena Regulatory Reporting Audit Process
 9. Implementation of the System Reliability Assessment Audit Process and Single Customer View (SCV) Data Quality Assessment for Deposit Insurance Corporation (LPS) Reporting
 10. Implementation of the Internal Capital Adequacy Assessment Report (ICAAP) Calculation and Reporting Process Audit Process
 11. Implementation of Follow-up Monitoring of Audit Findings
 12. Holding Hearings with Regulators

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Berdasarkan Pedoman Kerja Satuan Pengawas Internal terkait Standar Implementasi Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tanggung jawab Kepala SKAI adalah merancang dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil penugasan yang telah disampaikan kepada manajemen. *Monitoring* terhadap tindak lanjut temuan auditor adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur oleh SKAI, di mana hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa obyek audit (*auditee*) telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam hal ini, *monitoring* tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara objektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan memastikan kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tindak lanjut yang pernah disampaikan *auditee*.

Adapun kegiatan *monitoring* tindak lanjut temuan auditor dilaksanakan di sepanjang tahun 2023 dengan melakukan reminder tindak lanjut kepada *auditee* secara bulanan jika ada temuan audit yang akan jatuh tempo pada bulan tersebut. Kemudian secara berkala, laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Monitoring Activities and Deviation Correction Actions

Based on the Internal Supervisory Unit Work Guidelines regarding Follow-up Monitoring Implementation Standards, one of the responsibilities of the Head of SKAI is to design and supervise the implementation of follow-up actions to the results of assignments that have been submitted to management. Monitoring the follow-up to auditor findings is a series of activities carried out in a structured manner by SKAI, where the aim is to ensure that the audit object (*auditee*) has implemented the recommendations from the audit results, both from internal auditors and external auditors, within the specified time limits. previously agreed.

In this case, follow-up monitoring aims to objectively assess the extent to which recommendations for findings have been implemented and ensure the correctness of both written and physical data in the field on follow-up reports submitted by the *auditee*.

Monitoring activities to follow up on auditor findings will be carried out throughout 2023 by providing follow-up reminders to *auditees* on a monthly basis if there are audit findings that are due in that month. Then periodically, the report is submitted to the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee.

Akuntan Publik

Public Accountant

Akuntan Publik berperan penting dalam memberikan opini mengenai kesesuaian penyajian laporan keuangan Bank dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Akuntan Publik menjadi bagian dari sistem pengendalian internal Bank yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait validitas/audit laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta sistem pengendalian internal.

Kebijakan Penunjukan

Proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal ini, ketentuan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pelaporan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Nama dan Tahun Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik

Pada tahun 2023, Bank Aladin Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai bentuk komitmen dalam penerapan prinsip GCG khususnya transparansi. Berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan yang diberikan dalam mengaudit laporan keuangan Bank untuk periode 6 (enam) tahun terakhir, adalah sebagai berikut ini:

Public Accountants play an important role in providing opinions regarding the suitability of Bank's Financial Statements presentation with the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia. In carrying out their duties, Public Accountants are part of Bank's internal control system which aims to provide adequate assurance regarding the validity/audit of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, compliance with laws and regulations, and the internal control system.

Appointment Policy

The process for appointing a Public Accounting Firm (KAP) to audit Bank's Financial Statements is determined through the General Meeting of Shareholders (GMS), considering the recommendations provided by the Board of Commissioners.

In this case, the provisions for the services of Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP) in Reporting Financial Statements and Annual Reports are regulated in the Financial Services Authority Circular Letter Number 18/SEOJK.03/2023 concerning Procedures for Using the Services of Public Accountants and Accounting Firms Public In Financial Services Activities who will provide audit services for annual historical financial information is decided by the General Meeting of Shareholders of Parties Carrying Out Financial Services Activities by considering the Board of Commissioners' proposal.

Name and Year of Public Accounting Firm and Public Accountant

In 2023, Bank Aladin Syariah has appointed the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja as a form of commitment to implementing GCG principles, especially transparency. The following is a list of Public Accounting Firms, Accountants for auditing Bank's financial statements for the last 6 (six) year period, as follows:



Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Name of Accountant	Penugasan Assignment
2023	Purwanto, Sungkoro & Surja	Yasir	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan <i>standard auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Carry out Financial Statements audits based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants.
2022	Purwanto, Sungkoro & Surja	Christophorus Alvin Kossim	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan <i>standard auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Carry out Financial Statements audits based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants.
2021	Purwanto, Sungkoro & Surja	Christophorus Alvin Kossim	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan <i>standard auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Carry out Financial Statements audits based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants.
2020	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan / and Partners	Sutomo	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan <i>standard auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Carry out Financial Statements audits based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants.
2019	Purwanto, Sungkoro & Surja	Muhammad Kurniawan	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan <i>standard auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Carry out Financial Statements audits based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants.
2018	Purwanto, Sungkoro & Surja	Yasir	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan <i>standard auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Carry out Financial Statements audits based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants.

Manajemen Risiko

Risk Management

Sistem manajemen risiko Bank Aladin Syariah disusun dengan mengacu pada POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK No. 08/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank menjalankan Manajemen Risiko dengan mengimplementasikan manajemen risiko dalam seluruh kegiatan fungsional operasionalnya. Penerapan ini dijalankan dengan efektif dan berfokus pada empat pilar prinsip penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta manajemen risiko sistem informasi;
4. Pengendalian internal yang menyeluruh.

Dalam hal ini, penerapan manajemen risiko Bank juga akan sejalan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan Bank dengan ruang lingkup risiko yang mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

Pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi

Bank Aladin memiliki tanggung jawab atas efektivitas implementasi manajemen risiko di lingkungan Bank yang dijalankan oleh Manajemen Bank melalui Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Melalui Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris akan mengevaluasi kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, guna memastikan keefektifan pengelolaan seluruh aktivitas dan risiko-risiko tersebut. Komite Manajemen Risiko juga membantu Direksi dalam menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko serta implementasinya secara menyeluruh.

Selanjutnya, Direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang dianggap material dan berdampak signifikan telah ditindaklanjuti, dan melaksanakan tindakan perbaikan terhadap permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha. Selain itu, Direksi juga memperhatikan budaya manajemen risiko, termasuk meningkatkan kesadaran risiko di semua tingkat organisasi.

Bank Aladin Syariah's risk management system was prepared with reference to POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, POJK Number 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, POJK No. 08/POJK.03/2014 concerning Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Bank carries out Risk Management by implementing risk management in all operational functional activities. This implementation is carried out effectively and focuses on four pillars of risk management implementation principles, namely:

1. Active supervision by the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board;
2. Adequacy of policies, procedures and determination of risk limits;
3. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes as well as information system risk management;
4. Comprehensive internal control.

In this case, the implementation of Bank risk management will also be in line with Bank's objectives, business policies, size, business complexity and capabilities with a risk scope that includes Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Risk Strategic, Compliance Risk, Return Risk, and Investment Risk.

Supervision from the Board of Commissioners and Board of Directors

Bank Aladin is responsible for the effective implementation of risk management within Bank which is carried out by Bank Management through Bank's Board of Commissioners and Directors. Through the Risk Monitoring Committee, the Board of Commissioners will evaluate the policies and implementation of risk management carried out by the Board of Directors, to ensure the effectiveness of managing all activities and risks. The Risk Management Committee also assists the Board of Directors in determining the direction of risk management policies and strategies as well as their overall implementation.

Furthermore, the Board of Directors has the responsibility to ensure that all risks considered material and have a significant impact have been followed up, and to carry out corrective actions for problems or irregularities in business activities. In addition, the Board of Directors also pays attention to risk management culture, including increasing risk awareness at all levels of the organization.



Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko

Dasar-dasar kebijakan manajemen risiko menjadi acuan kebijakan, prosedur, juga pedoman di bidang manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut merupakan Kebijakan Umum Manajemen Risiko Bank. Di mana Kebijakan tersebut mencakup beberapa tahap proses manajemen risiko, di antaranya:

1. Identifikasi risiko;
2. Pengukuran risiko;
3. Pemantauan risiko; dan
4. Pengendalian risiko.

Dalam mengelola dan menetapkan limit, prosedur yang wajib diimplementasikan untuk setiap jenis risiko dalam semua produk dan kegiatan usaha Bank disesuaikan dengan tingkat risiko yang bersedia diambil (*risk appetite*). Pengelolaan dan penetapan limit tersebut juga memperhitungkan pengalaman yang telah diperoleh dalam mengelola risiko dimaksud. Selanjutnya, limit ditinjau secara berkala guna menyesuaikan perubahan kondisi yang terjadi.

Dalam konteks ini, Direksi memiliki otoritas untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi bagi setiap jenis risiko, dan eksposur risiko. Namun, segala kegiatan tersebut tetap memperhatikan pengalaman, kemampuan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Identifikasi
Bank mengidentifikasi risiko dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang melekat dalam bisnis Bank. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.
2. Pengukuran
Pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk seluruh aktivitas bisnis Bank. Penggunaan model pengukuran risiko disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha, serta manfaat yang diperoleh. Pengukuran risiko dilaksanakan untuk mengukur eksposur risiko sebagai acuan dalam pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau merupakan kombinasi keduanya.
3. Pemantauan
Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan, prosedur, dan limit yang ditetapkan. Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha Bank serta efektivitas proses manajemen risiko terintegrasi.

Adequacy of Policies, Procedures and Determination of Risk Limits

The basics of risk management policies become a reference for policies, procedures and guidelines in the field of risk management in accordance with applicable regulations. This is Bank's General Risk Management Policy. Where the Policy covers several stages of the risk management process, including:

1. Identify risks;
2. Risk measurement;
3. Risk monitoring; And
4. Risk control.

In managing and setting limits, the procedures that must be implemented for each type of risk in all Bank products and business activities are adjusted to the level of risk that is willing to be taken (*risk appetite*). The management and determination of these limits also considers the experience that has been gained in managing the risks in question. Furthermore, limits are reviewed periodically to adjust to changes in conditions that occur.

In this context, the Board of Directors has the authority to determine risk limits, tolerance levels for each type of risk, and risk exposure. However, all these activities still considers experience, capital capabilities, risk management system capabilities and tools, existing resources, and applicable regulations.

Risk Management Process and Risk Management Information System

1. Identify
Bank identifies risks by analyzing all types and characteristics of risks inherent in Bank's business. Risk identification is proactive, covers all Bank business activities and is carried out in order to analyze the sources and possible risks and their impacts. Risk identification is based, among other things, on the experience of losses that have occurred.
2. Measurement
Risk measurements are carried out periodically for all Bank business activities. The use of risk measurement models is adjusted to the needs, size and complexity of business activities, as well as the benefits obtained. Risk measurement is carried out to measure risk exposure as a reference for control. Risk measurements are carried out regularly for both products and portfolios and all Bank business activities. Measurement approaches and methodologies can be quantitative, qualitative, or a combination of both.
3. Monitoring
Bank has monitoring systems and procedures which, among other things, include monitoring the magnitude of risk exposure, risk tolerance, internal limit compliance, and stress testing results as well as implementation consistency with established policies, procedures and limits. Risk monitoring activities are carried out by evaluating the risk exposure contained in Bank's business activities as well as the effectiveness of the integrated risk management process.

4. Pengendalian

Proses pengendalian risiko dilaksanakan dengan memperhatikan sistem pengendalian intern yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Kerangka kerja proses pengendalian risiko didasarkan atas suatu hasil evaluasi dari eksposur risiko yang terdapat pada bisnis Bank.

5. Sistem Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Bank memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank. Divisi yang bertanggung jawab atas fungsi manajemen risiko secara rutin menyusun sistem informasi manajemen risiko dalam bentuk laporan profil risiko. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

1. Risiko Kredit

Merupakan risiko kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Konsentrasi Kredit, *Counterparty Credit Risk* dan *Settlement Risk*. Bank Aladin Syariah melakukan berbagai langkah mitigasi risiko kredit/pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti penerapan agunan dan penjaminan atau asuransi pembiayaan untuk mengurangi dampak risiko.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini, adalah:

- Bank telah menetapkan dan menerapkan tata kelola, kerangka, proses dan pengendalian manajemen risiko kredit;
- Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan dan Prosedur Kredit, *Risk Appetite Statement*, *Risk Acceptance Criteria*, dan Komite Kredit secara konsisten;
- Memiliki standar prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan infrastruktur terkait dengan proses pembiayaan, yaitu antara lain prosedur pembiayaan yang memadai dan memiliki *Tim Collection* dengan sistem yang mendukung.

2. Risiko Pasar

Merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko ini timbul akibat adanya perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar terdiri dari tiga jenis risiko: risiko nilai tukar, risiko komoditas dan ekuitas.

Langkah mitigasi yang dijalankan meliputi:

- Strategi pengelolaan aset dan liabilitas bank melalui mekanisme ALCO antara lain yaitu *asset & liabilities management*;
- Monitoring* dan pengukuran secara berkala terhadap kecenderungan perubahan harga pasar, kemungkinan terjadinya tekanan pasar serta limitasi risiko pasar;

4. Control

The risk control process is carried out by considering the internal control system which is prepared in accordance with applicable regulations and aims to manage certain risks that could endanger the continuity of Bank's business. The risk control process framework is based on an evaluation result of the risk exposure contained in Bank's business.

5. Risk Management System

As part of the risk management process, Bank has a risk management information system that can ensure risk exposure is measured accurately, informatively and in a timely manner, both overall/composite risk exposure and exposure per type of risk inherent in Bank's business activities, as well as risk exposure per type of Bank functional activity. The division responsible for the risk management function routinely prepares a risk management information system in the form of a risk profile report. The report is then submitted to the Board of Directors and the Risk Management Committee.

Types of Risk and Management

1. Credit Risk

This is the risk of failure by customers and/or other parties in fulfilling their obligations to Bank in accordance with agreed agreements, including credit risk due to debtor failure, Credit Concentration Risk, Counterparty Credit Risk and Settlement Risk. Bank Aladin Syariah carries out various credit/financing risk mitigation steps by using a number of techniques such as applying collateral and guarantees or financing insurance to reduce the impact of risk.

Some general steps taken to manage and mitigate this risk are:

- Bank has established and implemented credit risk management governance, framework, processes and controls;
- Bank has and consistently implemented Credit Policies and Procedures, Risk Appetite Statement, Risk Acceptance Criteria, and Credit Committee;
- Having well-documented standard procedures and infrastructure related to the financing process, including adequate financing procedures and having a Collection Team with a supporting system.

2. Market Risk

This is a risk in the balance sheet and administrative account position due to changes in market prices, including risks in the form of changes in the value of assets that can be traded or rented. This risk arises due to changes in the value of assets that can be traded or rented. Market risk consists of three types of risk: exchange rate risk, commodity and equity risk.

Mitigation steps implemented include:

- Strategies for managing bank assets and liabilities through the ALCO mechanism include asset & liabilities management;
- Regular monitoring and measurement of trends in market price changes, the possibility of market pressure and market risk limitation;



- c. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan tingkat margin di pasar dan menganalisa pengaruhnya terhadap kinerja Bank;
- d. Bank telah memiliki dan menerapkan *Prosedur Risiko Pasar dan Risk Appetite Statement*.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini dapat terjadi akibat pertumbuhan pembiayaan bank yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko likuiditas di antaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan pengukuran profil risiko likuiditas yang menggambarkan posisi dan kecenderungan risiko likuiditas Bank secara berkesinambungan, sehingga menjadi indikator peringatan dini, jika Bank mulai mengalami permasalahan likuiditas;
- b. Melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas;
- c. Mengatur dan menjaga likuiditas Bank secara keseluruhan dan sesuai ketentuan Regulator dalam hal pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM);
- d. Memelihara akses Bank ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank;
- e. Bank telah memiliki dan menerapkan *Risk Appetite Statement*, *Prosedur Risiko Likuiditas*, dan *Contingency Funding Plan*.

4. Risiko Operasional

Merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/ atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko operasional merupakan risiko utama yang dikelola Bank dalam bentuk pengembangan pengendalian internal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kontrol diseluruh unit kerja melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control* dalam pelaksanaan fungsi transaksi, deviasi/otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan termasuk pemenuhan kecukupan sumber daya manusia (SDM) dan pelaksanaan audit internal.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Bank untuk mengelola risiko ini adalah:

- a. Melakukan analisa risiko operasional untuk produk baru yang diusulkan dan atau kegiatan yang akan diluncurkan oleh Bank;
- b. Mengembangkan kebijakan manajemen risiko termasuk prosedur untuk teknologi informasi termasuk jaringan komunikasi data dan standarisasi perangkat lunak, manajemen sistem akses, pengembangan layanan perbankan elektronik dalam hal keamanan aksesibilitas dan *Disaster Recovery Plan*;

- c. Supervise the development of margin levels in the market and analyze their influence on Bank's performance;

- d. Bank has and implemented Market Risk Procedures and a Risk Appetite Statement.

3. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk resulting from Bank's inability to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged as collateral, without disrupting Bank's activities and financial condition. This risk can occur due to the growth in bank financing being greater than the growth in third party funds.

Actions taken by Bank to minimize liquidity risk include the following:

- a. Carrying out liquidity risk profile measurements that describe Bank's liquidity risk position and trends on an ongoing basis, so that it becomes an early warning indicator, if Bank begins to experience liquidity problems;
- b. Reviewing policies and standard operating procedures related to liquidity risk management;
- c. Regulate and maintain Bank's overall liquidity and in accordance with Regulator provisions in terms of fulfilling the Minimum Statutory Reserve (GWM), RIM (Macroprudential Intermediation Ratio) and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM);
- d. Maintaining Bank's access to money markets through interbank placements and loans;
- e. Bank has and implemented a Risk Appetite Statement, Liquidity Risk Procedures and Contingency Funding Plan.

4. Operational Risk

This is the risk of loss resulting from inadequate internal processes, internal process failures, human error, system failures and/or external events that affect Bank's operations.

Operational risk is the main risk managed by Bank in the form of developing internal controls. One of the efforts made is increasing control in all work units through separation of duties and responsibilities, dual control mechanisms in the implementation of transaction functions, deviation/authorization, limiting access system authority, increasing employee competency including fulfilling human resource (HR) adequacy and carrying out audits. internal.

Mitigation steps taken by Bank to manage this risk are:

- a. Conduct operational risk analysis for proposed new products and/or activities to be launched by Bank;
- b. Develop risk management policies including procedures for information technology including data communication networks and software standardization, access system management, development of electronic banking services in terms of accessibility security and Disaster Recovery Plan;

- c. Melakukan *review* terhadap ketentuan baik itu kebijakan maupun prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan risiko operasional.
- d. Bank telah memiliki dan menerapkan Risk Appetite Statement, Prosedur Anti *Fraud* Prosedur Risiko Operasional (Risk Control Self Assessment - RCSA & Key Risk Indicator - KRI), dan *Business Continuity Plan*.

5. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, antara lain dapat disebabkan karena kurangnya pendukung hukum atau kelemahan dari kontrak. Selain itu, Bank juga harus mengikuti seluruh aturan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dapat menimbulkan klaim litigasi terhadap Bank.

Mitigasi yang dijalankan untuk mengelola risiko ini, adalah:

- a. Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan Hukum dan *Risk Appetite Statement* untuk risiko hukum;
 - b. Memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Bank dengan pihak ketiga dan meminta *review* dari unit kerja lain yang terkait;
 - c. Melakukan analisa hukum atas produk dan/atau aktivitas baru, serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan/atau aktivitas tersebut;
 - d. Menerapkan standarisasi akad dan perjanjian kerja sama untuk program pembiayaan tertentu.
- #### 6. Risiko Kepatuhan

Risiko yang timbul dari kegagalan Bank dalam memenuhi dan/atau menerapkan hukum yang berlaku dan peraturan untuk bank syariah. Sebagai lembaga perbankan syariah, Bank wajib untuk selalu mematuhi peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional.

Untuk memitigasi risiko ini, Bank menjalankan beberapa inisiatif, yakni:

- a. Melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan masukan/*review* kepada unit bisnis serta unit operasional dalam hal pengembangan produk dan/atau aktivitas baru;
 - b. Melakukan *review* terhadap kebijakan pedoman dan prosedur internal yang dimiliki dalam rangka memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah disediakan akomodasi sedemikian rupa dan dipatuhi dalam pelaksanaannya;
 - c. Melakukan sosialisasi terkait peraturan yang berlaku kepada unit kerja terkait sehingga setiap unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan berlaku;
 - d. Menjadi *Liaison* dengan Dewan Pengawas Syariah guna memastikan kepatuhan operasi Bank dengan prinsip syariah.
- #### 7. Risiko Strategik

Risiko ini merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik antar level strategik.

- c. Reviewing provisions, both policies and procedures related to operational risk management.
- d. Bank has and implemented a Risk Appetite Statement, Anti-Fraud Procedures, Operational Risk Procedures (Risk Control Self Assessment - RCSA & Key Risk Indicator - KRI), and a Business Continuity Plan.

5. Legal Risk

Risks resulting from lawsuits and/or weaknesses in juridical aspects, among other things, can be caused by a lack of legal support or weaknesses in the contract. Apart from that, banks must also follow all the rules set by Bank Indonesia and the OJK. Failure to comply with applicable laws and regulations may give rise to litigation claims against Bank.

The mitigations implemented to manage this risk are:

- a. Bank has and implemented a Legal Policy and Risk Appetite Statement for legal risks;
 - b. Audit all agreements to be made between Bank and third parties and request a review from other related work units;
 - c. Carrying out legal analysis of new products and/or activities, as well as creating standard legal documents related to these products and/or activities;
 - d. Implementing standardization of contracts and cooperation agreements for certain financing programs.
- #### 6. Compliance Risk

Risks arising from Bank's failure to comply with and/or implement applicable laws and regulations for sharia banks. As a sharia banking institution, Bank is obliged to always comply with banking regulations issued by the Government, Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the National Sharia Council.

To mitigate this risk, Bank is implementing several initiatives, namely:

- a. Identify and manage compliance risks from the start by providing input/*review* to business units and operational units regarding the development of new products and/or activities;
 - b. Reviewing existing internal policy guidelines and procedures in order to ensure that all external regulations are provided with such accommodation and are complied with in their implementation;
 - c. Conduct socialization regarding applicable regulations to related work units so that each work unit can carry out duties and responsibilities in accordance with applicable regulations;
 - d. Become a *Liaison* with the Sharia Supervisory Board to ensure compliance of Bank's operations with sharia principles.
- #### 7. Strategic Risk

This risk is a risk resulting from inaccuracies in making and/or implementing strategic decisions as well as failure to anticipate changes in the business environment. This risk arises, among other things, because Bank determines a strategy that is not in line with Bank's vision and mission, carries out an analysis of the strategic environment that is not comprehensive and/or there is a mismatch in strategic plans between strategic levels.



Risiko Strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Adapun mitigasi atau pengelolaan risiko strategik yang dijalankan oleh Bank, mencakup:

- a. Melakukan identifikasi dan kuantifikasi risiko strategis sejak awal penyusunan rencana bisnis bank dengan berpedoman pada visi, misi, strategi serta kemampuan Bank;
- b. Mengelola risiko strategik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan Komite Manajemen Risiko, untuk selanjutnya disampaikan ke Direksi;
- c. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap strategi dan rencana bisnis bank untuk memastikan apakah masih relevan dengan situasi dan kondisi terkini serta melakukan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pencapaian rencana bisnis bank.

8. Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan Bank, mencakup:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media;
- b. Membuat klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah terbaik yang ditempuh Bank apabila terdapat pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media;
- c. Melakukan analisis risiko reputasi yang mungkin timbul, serta strategi untuk mengantisipasi risiko saat meluncurkan produk/ layanan/program baru Bank.

9. Risiko Imbal Hasil

Merupakan risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana.

Mitigasi dan pengelolaan risiko Imbal Hasil yang dilakukan Bank, mencakup:

- a. *Monitoring* dan pengukuran melalui rapat ALCO terhadap kebijakan *pricing* secara berkala atau sesuai kebutuhan apabila terjadi tekanan pasar yang dapat meningkatkan risiko bank;
- b. Kecukupan penetapan limit dan proses kaji ulang yang memadai terhadap portofolio DPK dan pembiayaan dengan akad berbasis bagi hasil serta sensitivitas terhadap perubahan *pricing* di pasar;
- c. Estimasi secara berkala terhadap potensi kerugian ekonomis Bank pada kondisi pasar yang tidak normal guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan suku bunga *benchmark* dan nisbah di pasar;
- d. Bank telah memiliki dan menerapkan standar prosedur risiko imbal hasil.

Strategic risks also arise due to failure to anticipate changes in the business environment, including failure to anticipate changes in technology, changes in macroeconomic conditions, dynamics of competition in the market and changes in relevant authority policies.

The strategic risk mitigation or management carried out by Bank includes:

- a. Identify and quantify strategic risks from the start of preparing Bank's business plan, guided by Bank's vision, mission, strategy and capabilities;
- b. Manage strategic risks through a collective and comprehensive consideration and decision-making process within the Risk Management Committee, to be submitted to the Board of Directors;
- c. Conduct regular reviews of Bank's strategy and business plan to ensure whether it is still relevant to the current situation and conditions and assess the level of success in achieving Bank's business plan.

8. Reputational Risk

Risk resulting from a decrease in the level of stakeholder trust originating from negative perceptions of Bank. This risk arises, among other things, due to negative media reports and/or rumors about Bank as well as ineffective bank communication strategies.

Risk mitigation and management carried out by Bank includes:

- a. Supervise media coverage to monitor negative publications or customer complaints appearing in the media;
- b. Make clarifications and responses in accordance with the best steps taken by Bank if there is negative news and customer complaints appearing in the media;
- c. Analyze reputation risks that may arise, as well as strategies to anticipate risks when launching new Bank products/services/ programs.

9. Return Risk

This is a risk resulting from changes in the rate of return paid by Bank to customers, due to changes in the rate of return received by Bank from channeling funds.

Returns risk mitigation and management carried out by Bank includes:

- a. Monitoring and measuring through ALCO meetings on pricing policies periodically or as needed if market pressure occurs which can increase bank risk;
- b. Adequate determination of limits and an adequate review process for the TPF portfolio and financing with profit sharing based contracts as well as sensitivity to changes in pricing in the market;
- c. Periodic estimates of Bank's potential economic losses in abnormal market conditions to see the sensitivity of Bank's performance to changes in benchmark interest rates and market ratios;
- d. Bank has and implements standard return risk procedures.

10. Risiko Investasi

Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Beberapa langkah mitigasi dan pengelolaan yang dilakukan, mencakup:

- Identifikasi atas risiko aktivitas investasi dengan akad berbasis bagi hasil terhadap portofolio yang sudah ada atau potensi risiko yang mungkin timbul, guna memudahkan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang jelas dan hati-hati, sehingga risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif;
- Mengimplementasikan proses persetujuan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang efektif antara lain dengan menetapkan batas kewenangan (limit) dan mekanisme pengambilan keputusan investasi dengan akad berbasis bagi hasil;
- Monitoring* terhadap konsentrasi penyaluran dana dengan akad berbasis bagi hasil sehingga sesuai dengan *risk appetite* Bank;
- Secara efektif mengawasi dan mengendalikan sifat, karakteristik dan kualitas dari investasi dengan akad berbasis bagi hasil.

10. Investment Risk

Risk resulting from Bank sharing in the customer's business losses financed in profit sharing based financing, whether using the net revenue sharing method or using the profit and loss sharing method.

Some of the mitigation and management steps taken include:

- Identification of the risks of investment activities with profit sharing based contracts on existing portfolios or potential risks that may arise, in order to facilitate the preparation and implementation of investment policies with clear and careful profit sharing based contracts, so that these risks can be managed and controlled effectively effective;
- Implementing an investment approval process with an effective profit-sharing based contract, including by establishing limits of authority and a mechanism for making investment decisions with a profit-sharing based contract;
- Monitoring the concentration of fund distribution using profit sharing based contracts so that it is in line with Bank's risk appetite;
- Effectively monitor and control the nature, characteristics and quality of investments with profit sharing based contracts.

Review terhadap Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Bank melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholders* mengenai kondisi risiko usaha dan potensi kerugian yang dihadapi Bank di masa yang akan datang dalam periode tertentu. Berikut merupakan hasil penilaian profil risiko periode Desember 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama.

Review of the Effectiveness of the Risk Management System

Bank carries out an independent assessment (self assessment) of the inherent risks and quality of the implementation of risk management in Bank's operational activities with the aim of providing information to all stakeholders regarding business risk conditions and potential losses faced by Bank in the future within a certain period. The following are the results of the risk profile assessment for the December 2023 period compared to the previous year with the same period.

Penilaian Profil Risiko Risk Profile Assessment

Profil Risiko Risk Profile	Penilaian Posisi Desember 2023 Position Assessment as of December 2023			Penilaian Posisi Desember 2022 Position Assessment as of December 2022		
	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Management Implementation Quality Rating	Peringkat Risiko Risk Rating	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Management Implementation Quality Rating	Peringkat Risiko Risk Rating
Risiko Kredit Credit Risk	Moderate	Fair	3	Low to moderate	Satisfactory	2
Risiko Pasar Market Risk	Low to moderate	Satisfactory	2	Low	Satisfactory	1
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	Low to moderate	Satisfactory	2	Low to moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional Operational Risk	Moderate	Fair	3	Low to moderate	Satisfactory	2



Penilaian Profil Risiko Risk Profile Assessment

Profil Risiko Risk Profile	Penilaian Posisi Desember 2023 Position Assessment as of December 2023			Penilaian Posisi Desember 2022 Position Assessment as of December 2022		
	Peringkat Risiko Inherent Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Management Implementation Quality Rating	Peringkat Risiko Risk Rating	Peringkat Risiko Inherent Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Management Implementation Quality Rating	Peringkat Risiko Risk Rating
Risiko Hukum Legal Risk	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Risiko Strategik Strategic Risk	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Reputasi Reputational Risk	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Risiko Imbal Hasil Return Risk	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Risiko Investasi Investment Risk	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Predikat Risiko Komposit Bank Keseluruhan Overall Bank Composite Risk Predicate	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2

Hasil dari penilaian Profil Risiko Komposit Bank Aladin Syariah pada Semester II Tahun 2023 (Juli - Desember 2023) adalah Peringkat “*Low to moderate*” dengan nilai 2 untuk Risiko *Inherent* dan *Satisfactory* untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Adapun dari hasil di atas terdapat beberapa pertimbangan yang mendukung penilaian, meliputi:

1. Aktivitas bisnis yang dilakukan Bank di mana kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko *Inherent* komposit tergolong rendah selama Triwulan IV tahun 2023.
2. Strategi bisnis Bank sudah mulai terarah sesuai dengan target RBB.

Pernyataan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris terkait Sistem Manajemen Risiko

Bank melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem manajemen risiko secara berkala, meliputi:

1. Kebijakan dan prosedur terkait penilaian risiko;
2. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
3. Strategi dan kerangka kerja manajemen risiko.

Evaluasi tersebut selalu mempertimbangkan kondisi dan rencana bisnis Bank, termasuk faktor eksternal. Bank diwajibkan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang mengutamakan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip syariah.

The results of the assessment of Bank Aladin Syariah’s Composite Risk Profile in Semester II 2023 (July - December 2023) are a rating of “*Low to moderate*” with a score of 2 for Inherent Risk and *Satisfactory* for the Quality of Risk Management Implementation. From the results above, there are several considerations that support the assessment, including:

1. Business activities carried out by Bank where the possibility of losses faced by Bank from composite Inherent Risk is relatively low during the fourth quarter of 2023.
2. Bank’s business strategy has begun to be directed in line with RBB targets.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding the Risk Management System

Bank periodically evaluates the effectiveness of the risk management system, including:

1. Policies and procedures related to risk assessment;
2. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes;
3. Risk management strategy and framework.

This evaluation always considers Bank’s business conditions and plans, including external factors. Banks are required to be able to adapt to the environment by implementing risk management that prioritizes the principle of prudence and is in accordance with sharia principles.

Perkara Hukum

Legal Cases

Permasalahan Hukum

Hingga akhir tahun 2023, tidak ada tuntutan hukum baik perdata atau pidana atau hubungan industrial yang ditujukan kepada Bank, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, ataupun Dewan Pengawas Syariah.

Sanksi Administratif

Bank senantiasa berupaya menegakkan budaya kepatuhan di seluruh level organisasi Bank dan melakukan pemantauan kepatuhan secara terus-menerus untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga prinsip syariah. Adapun selama tahun 2023 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator dikarenakan pelanggaran kewajiban laporan sebagaimana surat dari regulator sebagai berikut:

1. Surat BI No. 25/21/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs tanggal 23 Mei 2023 perihal Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Penyampaian Koreksi Laporan KI Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) di Luar Batas Waktu Penyampaian.
2. Surat OJK No. S-11/PB.223/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Keterlambatan Koreksi Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Periode September – November 2022.
3. Surat BI No. 25/87/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs tanggal 21 November 2023 perihal Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Koreksi Di Luar Batas Waktu Penyampaian Laporan KI Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT).
4. Surat BI No. 25/369/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 20 Desember 2023 perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT Bank Aladin Syariah Tbk
5. Lampiran Surat OJK No. S-145/PB.341/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Rekapitulasi Kesalahan Pelaporan SLIK Berdasarkan Hasil Pemeriksaan PT Bank Aladin Syariah Tbk posisi 31 Juli 2012 subsequent event s.d. 31 Oktober 2022.
6. Lampiran Surat OJK No. S-145/PB.341/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Rekap Kesalahan Pelaporan LBUT Berdasarkan Hasil Pemeriksaan PT Bank Aladin Syariah Tbk posisi 31 Juli 2012 subsequent event s.d. 31 Oktober 2022.
7. Lampiran Surat OJK No. SR-13/PB.223/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Rekap Kesalahan Pelaporan SLIK Berdasarkan Hasil Pemeriksaan PT Bank Aladin Syariah Tbk posisi 30 Juni 2023 subsequent event s.d. 30 September 2023.
8. Lampiran Surat OJK No. SR-13/PB.223/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Rekap Kesalahan Pelaporan LBUT Berdasarkan Hasil Pemeriksaan PT Bank Aladin Syariah Tbk posisi 30 Juni 2023 subsequent event s.d. 30 September 2023.

Legal Cases

Until the end of 2023, there was no civil or criminal lawsuits or industrial relations charges against Bank, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or the Sharia Supervisory Board.

Administrative Sanctions

Bank always strives to uphold a culture of compliance at all levels of Bank's organization and carries out continuous compliance monitoring to ensure policies, provisions, systems and procedures as well as business activities are carried out in accordance with applicable laws and regulations, including sharia principles. Meanwhile, during 2023 there will still be sanctions imposed by the regulator due to violations of reporting obligations as stated in the letter from the regulator as follows:

1. BI Letter No. 25/21/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs dated 23 May 2023 concerning the Imposition of Sanctions for the Obligation to Pay for Submitting Corrections to the Monthly Financial KI Reports of Integrated Commercial Bank Reports (LBUT) outside the Submission Deadline.
2. OJK Letter No. S-11/PB.223/2023 dated 21 June 2023 concerning Delays in Correcting Financial Information Services System (SLIK) Reports for the Period September – November 2022.
3. BI Letter No. 25/87/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs dated 21 November 2023 concerning the Imposition of Sanctions for the Obligation to Pay for Corrections Outside the Deadline for Submitting Monthly Financial KI Reports, Integrated Commercial Bank Reports (LBUT).
4. BI Letter No. 25/369/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B dated 20 December 2023 concerning Sanctions for Integrated Commercial Bank Reports (LBUT) PT Bank Aladin Syariah Tbk
5. Attachment to OJK Letter No. S-145/PB.341/2022 dated 21 December 2022 concerning Recapitulation of SLIK Reporting Errors Based on Audit Results of PT Bank Aladin Syariah Tbk position 31 July 2012 subsequent events until October 31, 2022.
6. Attachment to OJK Letter No. S-145/PB.341/2022 dated December 21 2022 concerning Recap of LBUT Reporting Errors Based on PT Bank Aladin Syariah Tbk Audit Results position July 31 2012 subsequent events until October 31, 2022.
7. Attachment to OJK Letter No. SR-13/PB.223/2023 dated 28 December 2023 concerning Recap of SLIK Reporting Errors Based on PT Bank Aladin Syariah Tbk Audit Results position 30 June 2023 subsequent events until September 30, 2023.
8. Attachment to OJK Letter No. SR-13/PB.223/2023 dated December 28 2023 concerning Recap of LBUT Reporting Errors Based on PT Bank Aladin Syariah Tbk Audit Results position June 30 2023 subsequent events until September 30, 2023.



9. Lampiran Surat OJK No. SR-13/PB.223/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Rekapitulasi Sanksi Kewajiban Membayar lainnya Berdasarkan Hasil Pemeriksaan PT Bank Aladin Syariah Tbk posisi 30 Juni 2023 subsequent event s.d. 30 September 2023.

9. Attachment to OJK Letter No. SR-13/PB.223/2023 dated 28 December 2023 concerning Recapitulation of Sanctions for Other Payment Obligations Based on the Audit Results of PT Bank Aladin Syariah Tbk position 30 June 2023 subsequent events until September 30, 2023.

Berikut jumlah rincian sanksi Bank selama periode tahun 2023:

The following is a detailed number of bank sanctions for the 2023 period:

No	Keterangan Information	Tanggal Date	Regulator Regulators	Jenis Sanksi Types of Sanctions	Nominal Sanksi (Rp) Nominal Sanction
	Sanksi Kewajiban Membayar atas Penyampaian Koreksi Laporan KI Keuangan Bulanan LBUT di Luar Batas Waktu Sanctions for Obligation to Pay for Submitting Corrections to LBUT's Monthly Financial KI Reports Beyond the Deadline	23 Mei 2023 May 23, 2023	BI	Denda Fines	100.000
	Keterlambatan Koreksi Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Periode September – November 2022 Delay in Correcting the Financial Information Services System (SLIK) Report for the Period September – November 2022	21 Juni 2023 June 21, 2023	OJK FSA	Denda Fines	800.000
	Sanksi Kewajiban Membayar atas Penyampaian Koreksi Laporan KI Keuangan Bulanan LBUT di Luar Batas Waktu Sanctions for Obligation to Pay for Submitting Corrections to LBUT's Monthly Financial KI Reports Beyond the Deadline	21 November 2023 November 21, 2023	BI	Denda Fines	200.000
	Sanksi Pelanggaran Koreksi di luar batas waktu Kelompok Informasi Harian LBUT Violation Sanctions Corrections beyond the LBUT Daily Information Group deadline	20 Desember 2023 December 20, 2023	BI	Denda Fines	500.000
	Kesalahan pelaporan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) (Sektor Ekonomi dan Suku Bunga) Reporting errors in the Financial Information Services System (SLIK) (Economic Sector and Interest Rates)	21 Desember 2022 December 21, 2022	OJK FSA	Denda Fines	200.000
	Kesalahan pelaporan data melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) (Kelompok Informasi Keuangan) Data reporting errors via Integrated Commercial Bank Reports (LBUT) (Financial Information Group)	21 Desember 2022 December 21, 2022	OJK FSA	Denda Fines	100.000
	Kesalahan pelaporan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Reporting errors in the Financial Information Services System (SLIK)	28 Desember 2023 December 28, 2023	OJK FSA	Denda Fines	2.600.000
	Kesalahan pelaporan data melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) (Kelompok Informasi Keuangan - Pelaporan Nominal Agunan) Data reporting errors via Integrated Commercial Bank Reports (LBUT) (Financial Information Group - Nominal Collateral Reporting)	28 Desember 2023 December 28, 2023	OJK FSA	Denda Fines	700.000
	Sanksi tidak menyampaikan laporan realisasi produk Bank dasar Sanctions for not submitting basic bank product realization reports	28 Desember 2023 December 28, 2023	OJK FSA	Denda Fines	50.000.000
Total					55.200.000

Buy Back Saham dan/atau

Buy Back Obligasi Bank

Buy Back Shares and/or Buy Back Bank Bond

Sampai dengan 31 Desember 2023, Bank tidak melakukan *buy back* saham dan/atau *buy back* obligasi.

Until December 31, 2023, Bank did not buy back shares and/or buy back bonds.

Program Kepemilikan Saham

Karyawan dan/atau Manajemen

Employee and/or Management
Share Ownership Program

Bank tidak mengeluarkan program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) sampai dengan akhir 2023.

Bank will not issue a Share Ownership program by Employees and/or Management (ESOP/MSOP) until the end of 2023.



Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Bank Aladin Syariah memiliki tekad untuk menerapkan keterbukaan informasi, baik secara internal maupun eksternal. Pengelolaan dan keterbukaan yang dimaksud melibatkan penyediaan informasi mengenai Perse Bank roan, seperti Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan juga Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal lainnya yang terkait. Keterbukaan dalam kedua aspek ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk citra Bank di mata publik, termasuk di kalangan *stakeholder*.

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan yang dituangkan dalam:

1. Laporan Tahunan, yang dipublikasikan dalam *website* Bank, yaitu <https://aladinbank.id/> dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, yang dipublikasikan dalam *website* Bank dan disampaikan kepada OJK dan media massa.
3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, yang dipublikasikan dalam *website* Bank.

Bank juga telah melaksanakan transparansi kondisi non-keuangan yang dituangkan dalam:

1. Laporan Pelaksanaan GCG, yang dipublikasikan dalam *website* Bank yakni <https://aladinbank.id/> dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
2. Informasi mengenai berbagai peristiwa dan kegiatan Bank, yang dipublikasikan dalam *website* Bank.

Informasi mengenai Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal Bank dapat diakses pada situs *website* Bank (<https://aladinbank.id/>).

In implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG), Bank Aladin Syariah is determined to implement information transparency, both internally and externally. The management and openness referred to involves the provision of information regarding Bank Perse roan, such as Transparency of Financial and Non-Financial Conditions as well as GCG Implementation Reports and other related Internal Reporting. Openness in these two aspects has a very important role in shaping Bank's image in the eyes of the public, including among stakeholders.

Bank has implemented transparency of financial conditions as outlined in:

1. Annual Report, published on Bank's website, namely <https://aladinbank.id/> and submitted to shareholders, OJK and other institutions as specified in the applicable regulations.
2. Quarterly Published Financial Statements, which are published on Bank's website and submitted to the OJK and mass media.
3. Monthly Published Financial Statements, which are published on Bank's website.

Bank has also implemented transparency of non-financial conditions as outlined in:

1. GCG Implementation Report, published on Bank's website, namely <https://aladinbank.id/> and submitted to shareholders, OJK and other institutions as specified in the applicable regulations.
2. Information regarding various events and activities of Bank, which are published on Bank's website.

Information regarding Transparency of Financial and Non-Financial Conditions, GCG Implementation Reports and Internal Bank Reporting can be accessed on Bank's website (<https://aladinbank.id/>).

Kode Etik Bank

Bank Code Of Conducts

Bank Aladin Syariah selalu berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di setiap lini bisnisnya. Komitmen ini diwujudkan dengan menetapkan peraturan dasar yang terdokumentasi dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku (KEPP). Penyusunan KEPP ini bertujuan sebagai pedoman utama bagi seluruh karyawan dan manajemen Bank, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang sehat, profesional, dan berintegritas.

Pokok-Pokok Kode Etik

Bank telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi seluruh karyawan dan Manajemen yang telah dikinikn pada tahun 2023. Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini ditetapkan berdasarkan nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip keberlanjutan Bank Aladin Syariah untuk membantu seluruh Aladiners dalam mengambil keputusan yang tepat dan tindakan yang konsisten sesuai dengan undang-undang, peraturan, standar etika serta kebijakan dan prosedur Bank. Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini mencakup berbagai perilaku yang diharapkan yang terbagi dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Tanggung jawab seluruh karyawan;
2. Tanggung jawab atasan/manajer;
3. Kenyamanan di lingkungan kerja;
4. Berbisnis secara adil dan jujur;
5. Keamanan dan privasi data;
6. Pencegahan terhadap tindak kejahatan keuangan;
7. Benturan kepentingan;
8. Prinsip keberlanjutan dan hak asasi manusia;
9. *Anti fraud*;
10. Penyampaian kekhawatiran (termasuk *whistleblowing*);
11. Pembuatan keputusan; dan
12. Kekerasan seksual.

Pengungkapan Kepatuhan Kode Etik Berlaku untuk Seluruh Level Organisasi

Bukan hanya berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan Bank juga harus menitikberatkan pada norma dan nilai etika. Kode etik ini berlaku untuk seluruh insan Bank Aladin Syariah, termasuk Karyawan yang memiliki hubungan kerja langsung, Karyawan tetap, dan karyawan kontrak, baik itu anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.

Bank Aladin Syariah always strives to apply the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every line of its business. This commitment is realized by establishing basic regulations documented in the Code of Ethics and Code of Conduct (KEPP). The purpose of preparing this KEPP is as the main guideline for all Bank employees and management, with the hope of creating a healthy, professional and integrity work environment and culture.

Code of Conducts Principles

Bank has a Code of Ethics and Code of Conduct for all employees and Management which has been updated in 2023. This Code of Ethics and Code of Conduct is established based on the core values and sustainability principles of Bank Aladin Syariah to assist all Aladiners in making the right decisions and consistent actions in accordance with laws, regulations, ethical standards and Bank policies and procedures. This Code of Ethics and Code of Conduct covers various expected behaviors which are divided into the following aspects:

1. Responsibility of all employees;
2. Responsibilities of superiors/managers;
3. Comfort in the work environment;
4. Do business fairly and honestly;
5. Data security and privacy;
6. Prevention of financial crimes;
7. Conflict of interest;
8. Principles of sustainability and human rights;
9. Anti-fraud;
10. Expressing concerns (including *whistleblowing*);
11. Decision making; And
12. Sexual violence.

Disclosure of Code of Ethics Compliance Applies to All Levels of the Organization

Not only based on the provisions of applicable laws and regulations, bank management must also focus on ethical norms and values. This code of ethics applies to all Bank Aladin Syariah personnel, including employees who have direct work relationships, permanent employees and contract employees, both members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.



Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Bank Aladin Syariah telah melakukan sosialisasi mengenai kode etik kepada seluruh Insan Bank Aladin Syariah, termasuk Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta seluruh karyawan. Bank telah mengungkapkan dan mempublikasikan informasi tersebut melalui situs web resmi Bank Aladin Syariah. Dengan demikian, anggota Bank serta masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses dan memahami kode etik Bank.

Socialization and Dissemination of the Code of Conducts

Bank Aladin Syariah has conducted socialization regarding the code of ethics to all Bank Aladin Syariah personnel, including the Board of Commissioners and supporting organs, the Sharia Supervisory Board, Directors, and all employees. Bank has disclosed and published this information through the official website of Bank Aladin Syariah. In this way, Bank members and the general public can easily access and understand Bank's code of ethics.

Pelanggaran Kode Etik

Code of Ethics Violation

Pelanggaran Violation	Jumlah Kasus yang Dilakukan Number of Cases Performed					
	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Directors		Pegawai Tetap Permanent Employees		Pegawai Tidak Tetap Temporary Employees	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan Completed	-	-	-	-	-	-
Dalam proses internal In internal processes	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya Haven't tried to solve it yet	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum It has been followed up through the legal process	-	-	-	-	-	-

Penanganan Benturan Kepentingan

Handling Conflicts of Interest

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku, Bank Aladin Syariah telah menetapkan pedoman terkait penanganan benturan kepentingan yang berlaku bagi setiap pengurus dan karyawan Bank. Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang melibatkan benturan kepentingan.

In accordance with the provisions outlined in the Code of Ethics and Code of Conduct, Bank Aladin Syariah has established guidelines regarding handling conflicts of interest that apply to every management and employee of Bank. During 2023, there was no transactions involving conflicts of interest.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Implementation of Compliance Functions

Bank Aladin Syariah telah menunjuk seorang Direktur Kepatuhan dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK yang mengatur Fungsi Kepatuhan. Selanjutnya, Direktur Kepatuhan bersama dengan satuan kerja kepatuhan di Bank berkewajiban untuk berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam konteks Prinsip Syariah.

Bank Aladin Syariah has appointed a Director of Compliance with the aim of ensuring compliance with the provisions set by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and applicable laws and regulations. This appointment is carried out in accordance with OJK regulations governing the Compliance Function. Furthermore, the Compliance Director together with the compliance work unit at Bank is obliged to coordinate with the Sharia Supervisory Board regarding the implementation of the Compliance Function in the context of Sharia Principles.

Direktur Kepatuhan Bank telah memenuhi persyaratan independensi dan kriteria yang ditetapkan dalam regulasi, serta telah efektif lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Bank Indonesia pada tahun 2010. Dalam pelaksanaannya, Direktur Kepatuhan secara rutin menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direksi setiap bulan. Laporan tersebut diungkapkan dalam forum Rapat Direksi yang dilaksanakan bulanan dan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan setiap 2 (dua) bulan sekali. Selain itu, secara semesteran, Direktur Kepatuhan juga telah menyerahkan laporan pokok mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank's Director of Compliance has fulfilled the independence requirements and criteria set out in regulations, and has effectively passed the Capability and Proper Test from Bank Indonesia in 2010. In its implementation, the Compliance Director routinely submits reports on the implementation of his duties and responsibilities to the Board of Directors every month. The report is disclosed in the Board of Directors Meeting forum which is held monthly and the Board of Commissioners Meeting which is held every 2 (two) months. Apart from that, on a semi-annual basis, the Compliance Director has also submitted basic reports regarding the implementation of his duties to the Financial Services Authority (OJK).

Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan dibantu oleh unit kerja Satuan Kerja Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya. Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

In accordance with POJK No. 46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 concerning Implementation of Commercial Bank Compliance Functions, the Compliance Director is assisted by the Compliance Work Unit in carrying out his duties. The duties and responsibilities of the Compliance Director include the following:



1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan,, termasuk prinsip syariah;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan;
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
7. Menjalankan peran konsultatif sebagai Strategic Business Partner guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektivitas kepatuhan, pengendalian internal dan GCG;
8. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Unit Kerja Manajemen Risiko terkait risiko kepatuhan yang berpotensi dan berdampak terhadap sanksi kepada Bank secara umum;
9. Bertindak sebagai narahubung bagi Bank dengan pihak otoritas/regulator atau pihak lain yang berwenang membuat peraturan; dan
10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, kegiatan kepatuhan yang dilakukan selama tahun 2023 antara lain berkaitan dengan peningkatan budaya kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, evaluasi ketentuan internal, pemantauan aspek kehati-hatian Bank, pemantauan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank dan kegiatan kepatuhan lainnya.

1. Budaya Kepatuhan
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan Bank antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi ketentuan dan atau peraturan (*sharing information*) dalam rangka menjaga kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan dan peraturan yang baru diterbitkan.
 - b. Memberikan opini atas penerapan ketentuan dan peraturan serta aspek syariah.
 - c. Melakukan *reminder* atas kewajiban dan komitmen yang harus disampaikan dan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Unit Bisnis.
 - d. Melakukan *training* dan *sharing knowledge* salah satunya melalui *Training* APU & PPT.

1. Take steps to support the creation of a Compliance Culture in all Bank business activities at every level of the organization;
2. Identify, measure, monitor and control Compliance Risk by referring to the provisions of the Financial Services Authority which regulate the Implementation of Risk Management for sharia commercial banks and sharia business units;
3. Assess and evaluate the effectiveness, adequacy and conformity of Bank's policies, provisions, systems and procedures with statutory provisions;
4. Review and/or recommend updating and improving policies, provisions, systems and procedures owned by Bank so that they comply with the provisions of the Financial Services Authority and statutory provisions, including sharia principles;
5. Make efforts to ensure that Bank's policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and statutory provisions;
6. Conduct outreach to all Bank employees regarding matters related to the Compliance Function, especially regarding applicable regulations;
7. Carry out a consultative role as a Strategic Business Partner to prevent compliance risks and provide recommendations for improvements and increase the effectiveness of compliance, internal control and GCG;
8. Coordinate regularly with the Risk Management Work Unit regarding potential compliance risks that impact sanctions on Bank in general;
9. Act as a contact person for Bank with authorities/regulators or other parties who have the authority to make regulations; And
10. Perform other tasks related to the Compliance Function.

In order to maintain and improve the implementation of the Compliance Function, compliance activities carried out during 2023 include, among other things, relating to improving compliance culture, managing compliance risks, evaluating internal regulations, monitoring prudential aspects of Bank, monitoring compliance with commitments made by Bank and compliance activities other.

1. Compliance Culture
Efforts that have been made to support the creation of a culture of Bank compliance include the following:
 - a. Carrying out socialization of provisions and/or regulations (*sharing information*) in order to safeguard Bank's business activities so that they do not deviate from applicable provisions and regulations as well as newly issued provisions and regulations.
 - b. Provide opinions on the implementation of rules and regulations as well as sharia aspects.
 - c. Provide reminders of obligations and commitments that must be conveyed and implemented by the Work Unit or Business Unit.
 - d. Carrying out training and sharing knowledge, one of which is through APU & PPT Training.

2. Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul ketika Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik dan secara terus menerus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kualitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bank.

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank telah melakukan serangkaian aktivitas mitigasi, antara lain:

- a. Melakukan pemantauan atas rasio kehati-hatian bank antara lain ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Posisi Devisa Neto (PDN), Kualitas Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP/BMPK) dalam rangka prinsip kehati-hatian seperti tabel dibawah ini:

2. Management and Mitigation of Compliance Risk

Compliance risk arises when Bank does not comply with or does not implement the regulations of the Financial Services Authority and/or Bank Indonesia, as well as other applicable laws and regulations. Bank always makes every effort to ensure that all applicable provisions and regulations can be implemented properly and continuously takes steps to improve the quality of risk management, internal control systems and the implementation of good governance as well as paying attention to the principles of prudence and sharia principles in carrying out activities. bank operations.

In managing compliance risk, Bank has carried out a series of mitigation activities, including:

- a. Monitoring Bank's prudential ratios, including provisions on Minimum Capital Requirements (KPMM), Net Open Position (PDN), Productive Asset Quality and Maximum Financing Limit (BMPP/BMPK) within the framework of the prudential principle as in the table below:

No	Faktor Factors	Ketentuan Provisions	Semester I/2023 (30 Juni 2023)	Semester II/2023 (31 Desember 2023)
			Semester I/2023 (June 30, 2023)	Semester II/2023 (December 31, 2023)
	Rasio Kecukupan Modal (CAR) Capital Adequacy Ratio (CAR)	8% dari ATMR 8% of RWA	152,19%	95,99%
	Batas Maksimum Penyaluran Dana Maximum Fund Distribution Limit	<ul style="list-style-type: none"> • 10% dari modal (untuk Pihak Terkait dengan Bank). • 20% dari modal (untuk satu Peminjam bukan Pihak Terkait). • 25% dari modal (untuk satu kelompok Peminjam bukan pihak terkait). • 30% dari modal (untuk BUMN). • 10% of capital (for Bank Related Parties). • 20% of capital (for one non-Related Party Borrower). • 25% of capital (for one group of non-related party Borrowers). • 30% of capital (for SOE). 	Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampauan There are no violations and/or excesses	Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampauan There are no violations and/or excesses
	Giro Wajib Minimum Statutory Reserve Requirement	<ul style="list-style-type: none"> • GWM Rp: 7.5% dari DPK Rupiah (sebelum insentif). • GWM Valas: 1% dari DPK Valas. • GWM IDR: 7.5% of Rupiah TPF (before incentives). • Foreign Currency GWM: 1% of Foreign Currency DPK. 	<ul style="list-style-type: none"> • GWM: 12,12% • Valas : 157,73% • Statutory Reserves: 12.12% • Forex : 157.73% 	<ul style="list-style-type: none"> • GWM: 13,73% • Valas : 157,73% • Statutory Reserves: 13.73% • Forex : 157.73%
	Non Performing Financing (NPF)	5% dari total Pembiayaan 5% of total financing	0% (gross) 0% (net)	0% (gross) 0% (net)
	Posisi Devisa Netto (PDN) Net Foreign Exchange Position (PDN)	20% dari Modal 20% of Capital	0,03%	0,03%
	Pinjaman Luar Negeri (PLN) Jangka Pendek Short Term Foreign Loans (PLN).	30% dari Modal 30% of Capital	Tidak ada pelanggaran No violations	Tidak ada pelanggaran No violations



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan reviu atas pelaksanaan tata kelola bank melalui <i>self assessment</i> GCG yang dilakukan secara periodik. 2. Melakukan supervisi dan pendampingan kepada unit bisnis dan/ atau unit kerja terkait dalam melakukan penerbitan produk, program, dan layanan operasional. 3. Melakukan sosialisasi (<i>sharing information</i>) ketentuan dan/atau peraturan dalam rangka menjaga kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku. 4. Melakukan <i>training</i> dan/atau <i>sharing knowledge</i> terkait syariah dan APU-PPT kepada pihak internal Bank. 5. Menyampaikan opini dan reviu terkait kebijakan dan/atau prosedur agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah. 6. Memastikan pemenuhan seluruh komitmen Bank atas hasil temuan OJK dan pihak regulator lainnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Carrying out reviews of the implementation of bank governance through periodic GCG self-assessments. 2. Supervise and provide assistance to related business units and/ or work units in publishing products, programs and operational services. 3. Carrying out socialization (information sharing) of provisions and/ or regulations in order to safeguard Bank's business activities so that they do not deviate from the applicable provisions and regulations. 4. Conduct training and/or share knowledge related to sharia and APU-PPT with internal Bank parties. 5. Submit opinions and reviews regarding policies and/or procedures so that they comply with the provisions of applicable laws and regulations and sharia principles. 6. Ensure the fulfillment of all Bank commitments based on the findings of the OJK and other regulatory parties. |
|--|---|

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Anti-Money Laundering And Terrorism Financing Prevention Program (Apu And Ppt)

Bank Aladin Syariah telah menunjuk seorang Pejabat Eksekutif untuk mengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan Program APU dan PPT (Petugas APU dan PPT). Petugas APU dan PPT ini akan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Adapun aktivitas yang telah dilakukan oleh Petugas APU & PPT, di antaranya:

- 1. Review Pedoman/Kebijakan**
Bank telah memiliki Kebijakan dan Standar Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pedoman APUPPT). Bank juga telah melakukan penyesuaian Kebijakan/Pedoman APU dan PPT sesuai dengan model bisnis baru Bank di antaranya mengenai mekanisme *Customer Due Diligence* (CDD) Pihak ketiga dan penggolongan nasabah berdasarkan kategori risiko.
- 2. Pengkinian Data Nasabah**
Bank telah menyampaikan Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2024 dan Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan pengkinian data nasabah ini dilakukan terhadap ada tidaknya perubahan/pengkinian atas data/ informasi/dokumen dari nasabah yang bersangkutan. Adapun nasabah yang dikinikan per periodenya adalah dilakukan berdasarkan kategori risiko dan skala prioritas tertentu sesuai kebutuhan/kriteria yang ditetapkan.
- 3. Pelatihan**
Selama periode tahun 2023, Satuan Kerja Kepatuhan khususnya Petugas APU & PPT telah menghadiri pelatihan/ sosialisasi/ seminar/workshop/webinar yang diselenggarakan oleh Regulator (OJK dan PPATK) maupun lembaga terkait lainnya berkaitan dengan Penerapan Program APU PPT.
- 4. Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL)**
Selama periode Tahun 2023, Bank telah menyampaikan Laporan Transaksi Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), namun tidak ada transaksi keuangan yang teridentifikasi sebagai Transaksi Keuangan Tunai (TKT). Di samping itu, mengingat saat ini cakupan kegiatan usaha Bank belum meliputi kegiatan dalam valas, maka tidak terdapat Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (TKL). Dengan demikian, tidak ada penyampaian LTKT dan LTKL yang disampaikan kepada PPATK.
- 5. Aplikasi SIPESAT (Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu) PPATK**

Bank telah menyampaikan laporan data nasabah pada aplikasi SIPESAT PPATK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank Aladin Syariah has appointed an Executive Officer to assume responsibility for implementing the APU and PPT Program (APU and PPT Officer). This APU and CFT officer will report directly to the Compliance Director.

The activities carried out by APU & PPT officers include:

- 1. Review Guidelines/Policies**
Bank has Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Policies and Standard Procedures (APUPPT Guidelines). Bank has also made adjustments to the APU and PPT Policies/ Guidelines in accordance with Bank's new business model, including regarding third party Customer Due Diligence (CDD) mechanisms and customer classification based on risk categories.
- 2. Updating Customer Data**
Bank has submitted the 2024 Customer Data Update Plan Report and the 2023 Customer Data Update Plan Realization Report to the Financial Services Authority. This customer data updating activity is carried out to determine whether there are changes/Update to the data/information/documents of the customer concerned. Customer Update per period are based on certain risk categories and priority scales according to established needs/criteria.
- 3. Training**
During the 2023 period, the Compliance Work Unit, especially APU & CFT Officers, has attended training/socialization/seminars/ workshops/webinars organized by Regulators (OJK and PPATK) and other related institutions related to the Implementation of the APU PPT Program.
- 4. Reporting of Cash Financial Transactions (LTKT), Suspicious Financial Transactions (LTKM), and Financial Transactions Transferring Funds From and to Overseas (LTKL)**
During the 2023 period, Bank has submitted Suspicious Transaction Reports to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), but no financial transactions were identified as Cash Financial Transactions (TKT). In addition, considering that currently the scope of Bank's business activities does not include activities in foreign currency, there are no Fund Transfer Financial Transactions to and from Overseas (TKL). Thus, no LTKT and LTKL submissions were submitted to PPATK.
- 5. SIPESAT (Integrated Service User Information System) PPATK application**
Bank has submitted customer data reports on the SIPESAT PPATK application in accordance with applicable regulations.



6. Aplikasi goAML PPATK
Berdasarkan surat dari Kepala PPATK Nomor B/120/ PN.01.03/ XI/2019 dan Nomor R.580/PN.01.03/X/2020 perihal Implementasi Aplikasi goAML pada tanggal 1 Februari 2021, Bank telah melakukan persiapan implementasi aplikasi goAML tersebut dan Bank terus melakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi ini dengan menggunakan jasa penyedia jasa aplikasi AML system/ pelaporan go-AML.
 7. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Pemblokiran Serta Merta atas Harta Kekayaan Terduga Teroris dan Organisasi Teroris serta Pelaporan pada SIGAP (Sistem Informasi Program APU PPT) OJK
Selama periode Tahun 2023, Bank telah menyampaikan laporan Nihil Pemblokiran Secara Serta Merta atas Harta Kekayaan Terduga Teroris dan Organisasi Teroris kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Detasemen 88. Laporan juga telah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) OJK.
 8. Permohonan informasi, bukti atau keterangan dan/atau pemblokiran rekening Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
Selama periode tahun 2023, Bank telah menindaklanjuti permohonan informasi, bukti atau keterangan, dan/atau permintaan pemblokiran terhadap rekening wajib pajak atau penanggung pajak dari Direktorat Jenderal Pajak.
 9. Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) PPATK
Bank telah melakukan pendaftaran Aplikasi SIPENDAR yaitu Aplikasi sistem pengelolaan informasi mengenai terduga Pendanaan Terorisme Terintegrasi dan mekanisme pertukaran informasi antara PPATK, Pemangku Kepentingan dan Penyedia Jasa Keuangan secara elektronik sesuai dengan Peraturan PPATK. Bank telah melaporkan informasi SIPENDAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. GoAML PPATK application
Based on letters from the Head of PPATK Number B/120/PN.01.03/ XI/2019 and Number R.580/PN.01.03/X/2020 regarding the Implementation of the goAML Application on February 1 2021, Bank has made preparations for the implementation of the goAML application and Bank continue to make improvements to this application by using the services of the AML system/go-AML reporting application service provider.
 7. List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and Immediate Blocking of Assets of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations as well as Reporting to OJK's SIGAP (APU PPT Program Information System)
During the 2023 period, Bank has submitted a report of Zero Immediate Blocking of the Assets of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations to the Head of the National Police of the Republic of Indonesia c.q. Head of Detachment 88. The report has also been submitted via the OJK Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Program Information System (SIGAP) application.
 8. Request for information, evidence or information and/or blocking of the Taxpayer's or Tax Insurer's account
During the 2023 period, Bank has followed up on requests for information, evidence or information, and/or requests to block the accounts of taxpayers or tax bearers from the Directorate General of Taxes.
 9. Information System for Suspected Terrorism Financing (SIPENDAR) PPATK
Bank has registered the SIPENDAR Application, namely an information management system application regarding suspected Integrated Terrorism Financing and a mechanism for exchanging information between PPATK, Stakeholders and Financial Services Providers electronically in accordance with PPATK Regulations. Bank has reported SIPENDAR information in accordance with applicable regulations.

Dalam rangka menjaga kesesuaian pelaksanaan dengan Kebijakan dan Standar Prosedur yang telah disusun, maka Direksi selalu melakukan pemantauan. Aksi ini dilakukan antara lain melalui forum Rapat Direksi (BOD Meeting) yang dilakukan secara bulanan, di mana Direktur Kepatuhan dan unit kerja APU dan PPT menyampaikan hasil pelaksanaan Program APU dan PPT. Sementara itu, Dewan Komisaris yang akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab Direksi pada penerapan Program APU dan PPT. Pengawasan ini dilakukan melalui forum Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala yang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan (Radirkom). Direksi khususnya Direktur Kepatuhan akan melaporkan pokok-pokok hasil pelaksanaan Program APU dan PPT pada saat Radirkom tersebut berlangsung.

In order to maintain compliance with the implementation of the Policies and Standard Procedures that have been prepared, the Board of Directors always carries out monitoring. This action is carried out, among other things, through the monthly Board of Directors Meeting (BOD Meeting) forum, where the Compliance Director and the APU and PPT work unit present the results of the implementation of the APU and PPT Program. Meanwhile, the Board of Commissioners will supervise the implementation of the Directors' responsibilities in implementing the APU and PPT Program. This supervision is carried out through regular Board of Directors and Board of Commissioners meeting forums which are held at least once every 4 (four) months (Board of Directors and Commissioners Meeting). The Board of Directors, especially the Director of Compliance, will report the main results of the implementation of the APU and PPT Program when the Board of Directors and Commissioners Meeting takes place.

Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

Bank senantiasa membentuk organisasi yang bersih, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Guna mewujudkan komitmen ini, Bank Aladin Syariah berupaya mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengurangi risiko praktik KKN. Bank akan memberlakukan sanksi tegas terhadap setiap bentuk KKN yang melibatkan Insan Bank.

Bank juga secara konsisten menegakkan kebijakan antikorupsi, sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Bank Aladin Syariah juga telah menerapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur aspek anti korupsi dan anti *fraud* di lingkungan Bank.

Bank always forms a clean organization, free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices. In order to realize this commitment, Bank Aladin Syariah seeks to implement policies that have been established to reduce the risk of KKN practices. Bank will impose strict sanctions on every form of KKN involving Bank Personnel.

Bank also consistently enforces anti-corruption policies, in accordance with Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Apart from that, Bank Aladin Syariah has also implemented a Code of Ethics and Code of Conduct which regulates anti-corruption and anti-fraud aspects within Bank.



Pendapatan Non Halal

Non Halal Income

Pelaporan terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.

Berikut laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank tahun 2023:

Reporting related to non-halal income and its use in sharia banks refers to Bank Indonesia Circular Letter Number 12/13/DPbS, dated April 30 2010, concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

The following is a report on the sources and use of Bank's Qardhul Hasan Funds in 2023:

No	Keterangan Information	Tahun 2023 (dalam juta Rupiah) Year 2023 (in million Rupiah)	Tahun 2022 (dalam juta Rupiah) Year 2022 (in million Rupiah)
	Sumber Dana Kebajikan: Source of Qardhul Hasan Funds:		
	Dana denda (<i>ta'zir</i>). Penalties funds (<i>ta'zir</i>).	1	1
	Penerimaan Non Halal Non-Halal Acceptance	1	-
	Lainnya Others	3	-
	Penggunaan Dana Kebajikan Use of Qardhul Hasan Funds	414	10
	Penurunan Dana Kebajikan Decrease in Qardhul Hasan Funds	(409)	(9)
	Saldo Awal Dana Kebajikan Beginning Balance of Qardhul Hasan Funds	993	1.002
	Saldo Akhir Dana Kebajikan Ending Balance of Qardhul Hasan Funds	584	993

Sistem Penanganan Pengaduan

Whistleblowing System

Dalam usaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman, Bank Aladin Syariah memperkenalkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) sebagai bagian dari kontrol internal pada tingkat entitas (entity level control). Lebih lanjut, Bank Aladin Syariah menyajikan WBS sebagai sarana bagi karyawan untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran, kesalahan, atau tindak pidana yang melibatkan pegawai Bank Aladin Syariah. Proses ini diselenggarakan secara aman dan dilindungi, di mana pelapor bukanlah bagian dari pelaku pelanggaran yang dilaporkannya.

Sistem WBS ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan respons serius terhadap masalah-masalah yang dapat menimbulkan kerugian, baik dari aspek keuangan maupun reputasi Bank, tetapi tidak terbatas pada:

1. Penipuan/Fraud, Ketidakjujuran atau Korupsi.
2. Penggunaan tidak sah atau klaim palsu atas dana bank.
3. Penyalahgunaan posisi untuk keuntungan pribadi.
4. Aktivitas tidak sah dan/atau perdagangan ilegal dan/atau kelakuan buruk.
5. Pelanggaran hukum, aturan, peraturan dan pedoman seperti UU Perbankan.
6. Kegagalan untuk memenuhi standar profesional.
7. Tindakan ilegal atau kriminal (seperti perusakan fisik properti, pembakaran, pencurian, bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menipu bank).
8. Pemalsuan, perubahan/penggantian catatan bank.
9. Pelanggaran serius Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
10. Pelecehan Seksual (baik secara fisik maupun verbal), intimidasi/pengancaman, pemerasan.
11. Penyalahgunaan Informasi yang bersifat rahasia.
12. Menyetujui, mengarahkan atau berpartisipasi dalam salah satu kegiatan di atas.

Mekanisme Penyampaian Laporan

Pelapor baik dari pihak internal ataupun pihak eksternal mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pengaduan terhadap tanda-tanda pelanggaran yang terjadi. Laporan yang diberikan oleh pelapor harus didukung dengan bukti indikasi pelanggaran. Dalam proses pelaporan ini, pelapor dapat memilih untuk menyertakan identitasnya secara jelas atau memilih untuk tidak mengungkapkannya. Dalam hal ini, Bank Aladin Syariah komitmen kuat dalam mengedepankan prinsip kerahasiaan dengan menjaga kerahasiaan informasi pelapor dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Saluran *Whistleblowing System* Bank Aladin Syariah yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan yaitu melalui email: Whistleblowing@aladinbank.id.

In an effort to create a conducive and comfortable work environment, Bank Aladin Syariah introduced a Whistleblowing System (WBS) as part of internal control at the entity level (entity level control). Furthermore, Bank Aladin Syariah presents WBS as a means for employees to submit complaints regarding alleged violations, errors or criminal acts involving Bank Aladin Syariah employees. This process is carried out in a safe and protected manner, where the reporter is not part of the perpetrators of the violation he is reporting.

This WBS system was designed with the aim of providing a serious response to problems that could cause losses, both from financial aspects and Bank's reputation, but not limited to:

1. Fraud, Dishonesty or Corruption.
2. Unauthorized use or false claims of bank funds.
3. Abuse of position for personal gain.
4. Unauthorized activities and/or illegal trading and/or misconduct.
5. Violation of laws, rules, regulations and guidelines such as Banking Law.
6. Failure to meet professional standards.
7. Illegal or criminal acts (such as physical destruction of property, arson, theft, collaborating with third parties to defraud Bank).
8. Forgery, alteration/alteration of bank records.
9. Serious violation of the Code of Ethics and Code of Conduct.
10. Sexual harassment (both physical and verbal), intimidation/threats, blackmail.
11. Misuse of confidential information.
12. Approve, direct or participate in any of the above activities.

Report Submission Mechanism

Whistleblowers from both internal and external parties have the opportunity to submit complaints regarding signs of violations that have occurred. The report provided by the reporter must be supported by evidence indicating a violation. In this reporting process, the reporter can choose to include his identity clearly or choose not to reveal it. In this case, Bank Aladin Syariah has a strong commitment to prioritizing the principle of confidentiality by maintaining the confidentiality of the information of the reporter and the party suspected of committing the violation. Bank Aladin Syariah Whistleblowing System channel that can be used to submit reports is via email: Whistleblowing@aladinbank.id.



Perlindungan bagi Pelapor

Bank telah menyediakan saluran pelaporan melalui kanal *e-mail* yang bersifat independen, bebas, dan rahasia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pelaporan dapat berjalan dengan aman. Selain itu, Bank akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor untuk memberikan perlindungan kepada pelapor, dari tindakan balasan yang mungkin dilakukan oleh pihak terlapor dan/atau pihak lain yang mempunyai kepentingan. Perlindungan dari tekanan, hak-hak sebagai Karyawan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Gugus Tugas Tim Investigasi Bank bertanggung jawab menindaklanjuti laporan dari *whistleblower* dan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap laporan indikasi pelanggaran, baik pelanggaran *fraud* maupun kode etik yang dilakukan oleh karyawan Bank serta menerapkan strategi untuk meminimalisir hal tersebut, yang dapat berupa edukasi secara regular, pengawasan aktif pada karyawan, serta pembuatan prosedur penanganan kejadian.

Jumlah Pengaduan di Tahun 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, tidak terdapat laporan melalui *Whistleblowing System* mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan ataupun Manajemen Bank.

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2023

Sehubungan dengan tidak adanya pengaduan di tahun 2023, maka tidak terdapat sanksi/tindak lanjut atas pengaduan di tahun 2023.

Protection for Whistleblowers

Bank has provided a reporting channel via e-mail channel that is independent, free and confidential. This aims to ensure that the reporting process can run safely. In addition, Bank will maintain the confidentiality of the identity of the reporter to provide protection to the reporter from retaliatory actions that may be taken by the reported party and/or other parties who have interests. Protection from pressure, rights as an employee, lawsuits, property, and even physical action.

Party Managing Complaints

Bank Investigation Team Task Force is responsible for following up on reports from whistleblowers and carrying out further investigations into reports of indications of violations, both fraud and code of ethics violations committed by Bank employees as well as implementing strategies to minimize this, which can be in the form of regular education, active supervision of employees, as well as creating incident handling procedures.

Number of Complaints in 2023

As of December 31 2023, there were no reports through the *Whistleblowing System* regarding violations committed by employees or Bank Management.

Sanctions/Follow Up for Complaints in 2023

Due to the absence of complaints in 2023, there was no sanctions/follow-up for complaints in 2023.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles In Accordance With Financial Services Authority Provisions

Terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, mengacu pada Surat Edaran No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Bank menerapkan ketiga hal tersebut sebagai standar dalam menjalankan prinsip tata kelola.

Adapun uraian penerapan aspek dan prinsip tata kelola yang dijalankan Bank Aladin Syariah dapat disampaikan sebagai berikut:

There are 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 (twenty five) recommendations for implementing aspects and principles of Good Corporate Governance, referring to Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines. Based on these recommendations, Bank applies these three things as standards in implementing governance principles.

The description of the implementation of governance aspects and principles implemented by Bank Aladin Syariah can be presented as follows:

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Guidelines of Public Company Governance	Penerapan di Bank Aladin Syariah Implementation at Bank Aladin Syariah
HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM RELATIONSHIP OF PUBLIC COMPANIES WITH SHAREHOLDERS IN GUARANTEEING SHAREHOLDERS' RIGHTS	
PRINSIP 1 MENINGKATKAN NILAI PENYELENGGARAAN RUPS Principle 1 Increase the value of holding a GMS	
<p>Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Public Companies have technical methods or procedures for collecting votes (<i>voting</i>) both openly and privately that prioritize independence and the interests of shareholders.</p>	<p>Bank Aladin Syariah telah memiliki ketentuan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (<i>voting</i>) dalam RUPS baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Ketentuan tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Bank Aladin Syariah yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. <p>Bank Aladin Syariah has provisions for procedures for making decisions through voting at the GMS, both open and closed, which prioritizes the independence and interests of shareholders. These provisions are regulated in the Articles of Association of Bank Aladin Syariah, namely as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> GMS Resolutions are taken based on deliberation to reach consensus. In the event that a resolution based on deliberation to reach consensus is not reached, the GMS Resolution is valid if it is approved by more than ½ (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS, unless the statutory regulations and/or the Articles of Association stipulate that a decision is valid if it is approved by a greater number of affirmative votes.
<p>Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of Public Companies are present at the Annual GMS.</p>	<p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 21 Juni 2023 dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah efektif menjabat.</p> <p>The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on June 21, 2023 was attended by all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who have effectively served.</p>



Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Guidelines of Public Company Governance	Penerapan di Bank Aladin Syariah Implementation at Bank Aladin Syariah
<p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the GMS minutes is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.</p>	<p>Bank Aladin Syariah telah menyusun ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS, salah satunya adalah melalui situs web Bank Aladin Syariah https://aladinbank.id/old/id/rapat-umum-pemegang-saham selama paling sedikit 1 (satu) tahun. Bank Aladin Syariah has prepared a summary of the minutes of the GMS in Indonesian and disclosed information to the public 2 (two) working days after the GMS, one of which is via Bank Aladin Syariah website https://aladinbank.id/old/id/rapat-general-shareholder for at least 1 (one) year.</p>
<p>PRINSIP 2 MENINGKATKAN KUALITAS KOMUNIKASI PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR Principle 2 Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors</p>	
<p>Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Public Companies have a communication policy with shareholders or investors.</p>	<p>Bank telah memiliki kebijakan tata kelola perusahaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada pemegang kepentingan dan secara khusus kepentingan nasabah menjadi fokus dalam operasi bisnis Bank. Pada kebijakan tersebut diatur pula bahwa dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perusahaan dari manajemen, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Bank has a corporate governance policy which is implemented based on principles that are oriented towards stakeholders and specifically customer interests are the focus in Bank's business operations. This policy also stipulates that in the GMS forum, shareholders have the right to obtain information relating to the company from management, as long as it is related to the agenda of the meeting and does not conflict with the interests of the company.</p>
<p>Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. The Public Company discloses the Public Company's communication policy with shareholders or investors on the Website.</p>	<p>Pemegang saham atau investor dapat melakukan komunikasi kepada Bank Aladin Syariah melalui kanal Hubungan Investor di https://aladinbank.id/old/id/informasi-investor dalam Situs Web PT Bank Aladin Syariah Tbk. Shareholders or investors can communicate with Bank Aladin Syariah via the Investor Relations channel at https://aladinbank.id/old/id/information-investor on the PT Bank Aladin Syariah Tbk Website.</p>
<p>FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS FUNCTIONS AND ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS</p>	
<p>PRINSIP 3 MEMPERKUAT KEANGGOTAAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS Principle 3 Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners</p>	
<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determining the number of members of the Board of Commissioners considers the conditions of the Public Company.</p>	<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Bank Aladin Syariah yang antara lain meliputi karakteristik, kapasitas, ukuran, pencapaian tujuan dan pemenuhan bisnis serta tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan ketentuan yang mengatur mengenai Pasar Modal. Determining the number of members of the Board of Commissioners has considered the condition of Bank Aladin Syariah which includes, among other things, characteristics, capacity, size, achievement of objectives and fulfillment of business as well as considering the provisions that apply to Sharia Commercial Banks and the provisions governing the Capital Market.</p>
<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determining the composition of members of the Board of Commissioners considers the diversity of skills, knowledge and experience required.</p>	<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan bagi Bank Aladin Syariah. Determining the composition of the members of the Board of Commissioners has considered the diversity of expertise, knowledge and experience required for Bank Aladin Syariah.</p>
<p>PRINSIP 4 MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS. Principle 4 Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.</p>	
<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.</p>	<p>Dewan Komisaris telah melakukan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja. The Board of Commissioners has carried out a self-assessment to assess performance.</p>
<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Public Company's Annual Report.</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank Aladin Syariah. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in the Annual Report of Bank Aladin Syariah.</p>

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Guidelines of Public Company Governance	Penerapan di Bank Aladin Syariah Implementation at Bank Aladin Syariah
<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.</p>	<p>Dewan Komisaris berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan akan menerima segala keputusan OJK berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>The Board of Commissioners is committed to complying with statutory provisions and regulations, especially in Banking and sharia banking sector and will accept all OJK decisions and their consequences in accordance with applicable regulations.</p>
<p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function prepares a succession policy in the Nomination process for members of the Board of Directors.</p>	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>The Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Nomination and Remuneration Committee Charter.</p>
FUNGSI DAN PERAN DIREKSI FUNCTIONS AND ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS	
PRINSIP 5 MEMPERKUAT KEANGGOTAAN DAN KOMPOSISI DIREKSI. Principle 5 Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors.	
<p>Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Determining the number of members of the Board of Directors considers the condition of the Public Company and effectiveness in decision making.</p>	<p>Komposisi Direksi telah sesuai dengan regulasi dan telah mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan skala usaha Bank Aladin Syariah.</p> <p>The composition of the Board of Directors is in accordance with regulations and has considered the characteristics, capacity and business scale of Bank Aladin Syariah.</p>
<p>Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Determining the composition of members of the Board of Directors considers the diversity of skills, knowledge and experience required.</p>	<p>Komposisi anggota Direksi telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai pembagian fungsi, tugas dan wewenang Direksi dalam mencapai tujuan Bank Aladin Syariah.</p> <p>The composition of the members of the Board of Directors has considered the diversity of expertise, knowledge and experience required according to the division of functions, duties and authority of the Board of Directors in achieving the goals of Bank Aladin Syariah.</p>
<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting.</p>	<p>Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang Akuntansi, Operasional, dan Audit.</p> <p>Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in the fields of Accounting, Operations and Audit.</p>
PRINSIP 6 MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI. Principle 6 Improving the Quality of Implementation of Board of Directors' Duties and Responsibilities.	
<p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.</p>	<p><i>Self assessment</i> kinerja Direksi dilakukan secara berkala terhadap <i>governance structure, process, dan outcome</i> di level Direksi. Berdasarkan hasil <i>self assessment</i> tersebut telah dilakukan Upaya-upaya yang perlu ditingkatkan untuk kinerja ke depannya.</p> <p>Self-assessment of the Board of Directors' performance is carried out periodically on the governance structure, processes and outcomes at the Directors level. Based on the results of the self-assessment, efforts have been made that need to be improved for future performance.</p>
<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Directors is disclosed in the Public Company's annual report.</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi akan diungkapkan melalui laporan tahunan Bank Aladin Syariah.</p> <p>The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Directors will be disclosed in Bank Aladin Syariah annual report.</p>
<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes.</p>	<p>Direksi berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan akan menerima segala keputusan OJK berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>The Board of Directors is committed to complying with statutory provisions and regulations, especially in Banking and sharia banking sector and will accept all OJK decisions and their consequences in accordance with applicable regulations.</p>

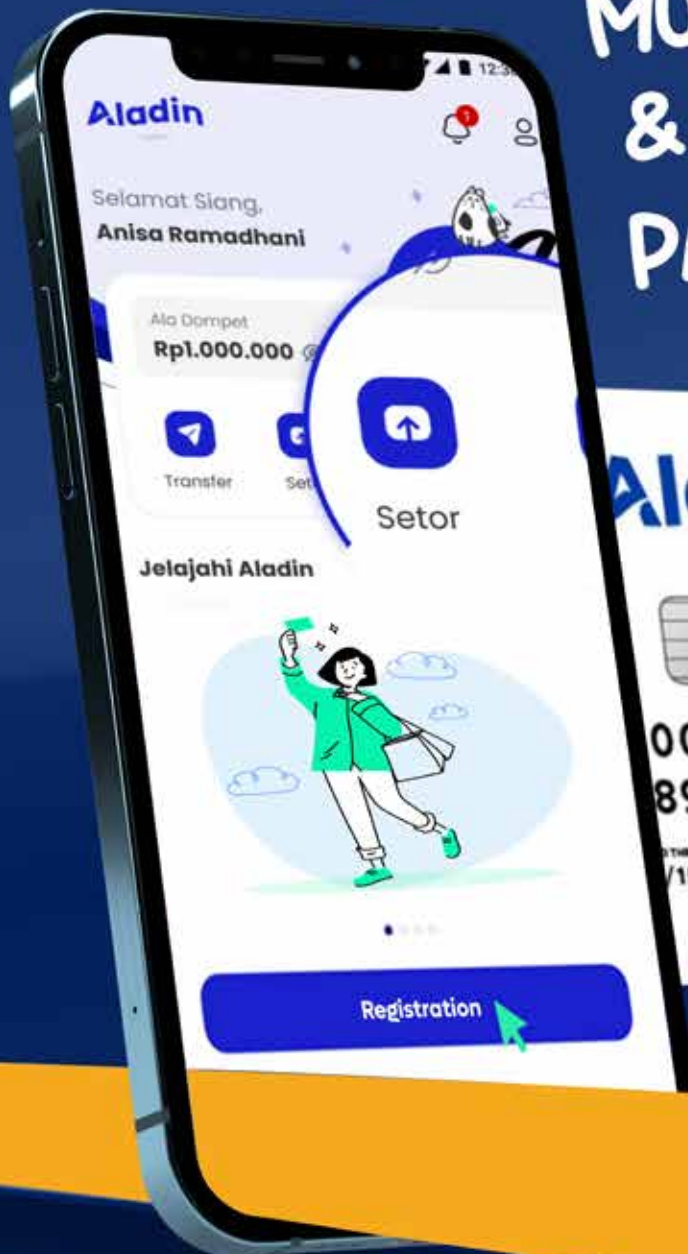


Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Guidelines of Public Company Governance	Penerapan di Bank Aladin Syariah Implementation at Bank Aladin Syariah
PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDER PARTICIPATION	
PRINSIP 7 MENINGKATKAN ASPEK TATA KELOLA PERUSAHAAN MELALUI PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN. Principle 7 Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.	
<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>. Public Companies have policies to prevent insider trading.</p>	<p>Bank Aladin Syariah telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur perihal tindakan yang dilarang sebagai <i>insider trading</i>. Bank Aladin Syariah has a Code of Ethics and Code of Conduct which regulates prohibited actions as insider trading.</p>
<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>. Public Companies have anti-corruption and anti-fraud policies.</p>	<p>Bank Aladin Syariah telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai anti korupsi dan <i>anti-fraud</i>. Bank Aladin Syariah has a Code of Ethics and Code of Conduct that regulates anti-corruption and anti-fraud.</p>
<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>. Public Companies have policies regarding the selection and improvement of supplier or vendor capabilities.</p>	<p>Bank Aladin Syariah telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai konflik kepentingan. Bank Aladin Syariah has a Code of Ethics and Code of Conduct that regulates conflicts of interest.</p>
<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public Companies have policies regarding fulfilling creditor rights.</p>	<p>Bank Aladin Syariah telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai konflik kepentingan terhadap fasilitas pembiayaan. Bank Aladin Syariah has a Code of Ethics and Code of Conduct that regulates conflicts of interest regarding financing facilities.</p>
<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>. Public Companies have a whistleblowing system policy.</p>	<p>Bank Aladin Syariah telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai <i>whistleblowing</i>. Bank Aladin Syariah has a Code of Ethics and Code of Conduct that regulates whistleblowing.</p>
<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan Public Companies have a policy of providing long-term incentives to Directors and employees</p>	<p>Bank Aladin Syariah memiliki Kebijakan Remunerasi Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Kebijakan Remunerasi Karyawan. Bank Aladin Syariah has a Remuneration Policy for Directors, Commissioners, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employee Remuneration Policy.</p>
KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	
PRINSIP 8 MENINGKATKAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI. Principle 8 Improving the Implementation of Information Disclosure.	
<p>Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Public Companies make wider use of information technology apart from Websites as a medium for information disclosure.</p>	<p>Bank telah menggunakan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web yaitu melalui media sosial dan penyebaran informasi melalui <i>mobile banking</i> Bank. Bank has used information technology more widely apart from the Website, namely through social media and the dissemination of information through Bank's mobile banking.</p>
<p>Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Annual Report of a Public Company discloses the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership of at least 5% (five percent), in addition to disclosure of the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership through the major and controlling shareholders.</p>	<p>Bank telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen) atau lebih saham kepada regulator dan masyarakat melalui <i>website</i> Bank. Bank has disclosed the ultimate beneficial owner of Public Company share ownership of at least 5% (five percent) or more shares to regulators and the public via Bank's website.</p>

Aladin



MUDAHNYA TARIK
& SETOR TUNAI
PAKAI **ALADIN**



Aladin

A man in a green polo shirt is smiling and holding a smartphone. Above him are three white line-art icons: a globe with arrows, a banknote with 'Rp' on it, and a wallet with arrows. The background is a dark blue gradient with a yellow curved shape at the bottom.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

Nilai-nilai keberlanjutan direpresentasikan melalui kebijakan dan strategi TJS Bank Aladin Syariah, dimana kebijakan dan strategi tersebut disusun untuk senantiasa menghargai dan mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan serta mematuhi hukum dan norma-norma yang berlaku.

Sustainability values are reflected in Bank Aladin Syariah's SER policies and strategies, where these policies and strategies are prepared to always respect and consider stakeholder expectations and comply with applicable laws and norms.

07

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Bank Aladin Syariah mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *corporate governance* yang baik di setiap operasional Bank. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya Tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mendukung TPB dengan menerbitkan Peraturan Presiden No.59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selaras dengan kebijakan pemerintah, Bank Aladin Syariah percaya bahwa sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting untuk turut mendukung percepatan transisi menuju ekonomi yang rendah karbon. Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon, termasuk penerapan keuangan berkelanjutan, Bank Aladin Syariah menyatakan dukungannya melalui penerapan keuangan berkelanjutan dengan mengacu pada implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Social and Environmental Responsibility

Bank Aladin Syariah supports efforts to achieve the Sustainable Development Goals (SDG) by applying sustainable financial principles and good corporate governance practices in all Bank operations. The main objective of sustainable development is to maintain the quality of the environment as well as inclusive development and the implementation of governance that can maintain an improvement in the quality of life from one generation to the next. The Indonesian Government has expressed its commitment to support the SDGs by issuing Presidential Regulation No. 59/2017 concerning Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals.

In line with Government policy, Bank Aladin Syariah believes that the banking sector has a very important role to play in supporting the acceleration of the transition to a low-carbon economy. Therefore, as a form of support for efforts to accelerate the transition to a low-carbon economy, including the implementation of sustainable finance, Bank Aladin Syariah has expressed its support for the implementation of sustainable finance by referring to POJK No. 51/POJK.03/2017 dated July 18, 2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance in Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies.



Selain itu, sejalan dengan visi dan misi bank, yakni “Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan” dan “Bersama, Memperkuat Ekosistem Keuangan Syariah yang Bermanfaat untuk Seluruh Lapisan Masyarakat,” Bank Aladin Syariah mengembangkan strategi dan kerangka kerja keuangan berkelanjutan yang nantinya akan menjadi panduan dalam menjalankan program-program dan aktivitas-aktivitas operasional Bank. Kerangka kerja keuangan berkelanjutan Bank Aladin Syariah bersandar kepada 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Layanan Perbankan secara Bertanggung jawab (*Banking Responsibly*);
2. Tumbuh Bersama Karyawan (*Grow with Our People*);
3. Tidak Meninggalkan Siapapun (*Leave No One Behind*); dan
4. Kesadaran Bertindak untuk Menjaga Kelestarian Bumi (*Act with Conscience for the Planet*).

Bank Aladin Syariah juga telah memformulasikan Komitmen Keberlanjutan yang mana komitmen tersebut memiliki filosofi keberlanjutan sebagai berikut “Sebagai bank syariah masa depan, kami percaya akan adanya masa depan yang lebih baik. Kami juga meyakini bahwa keberlanjutan merupakan prinsip dasar dari cara kami berbisnis. Yang akan kami lakukan tidak hanya sebatas berperilaku secara bertanggung jawab untuk keberlangsungan Bumi sebagai rumah bagi semua, ataupun sebatas pemberian dukungan untuk komunitas dimana kami berada. Kami juga akan berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga memungkinkan adanya transisi yang lebih cepat ke arah masa depan yang berkelanjutan.”

Nilai-nilai keberlanjutan direpresentasikan melalui kebijakan dan strategi TJSI Bank Aladin Syariah, dimana kebijakan dan strategi tersebut disusun untuk senantiasa menghargai dan mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan serta mematuhi hukum dan norma-norma yang berlaku. Bank Aladin Syariah senantiasa berupaya menghindari pelaksanaan program TJSI yang hanya sekedar bertujuan untuk meningkatkan citra Bank dimata masyarakat dan lingkungan bisnis. Pemahaman tujuan program TJSI yang dilaksanakan serta dampak positif yang diharapkan, menjadi tujuan utama Bank Aladin Syariah dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan TJSI yang ideal, objektif, tepat sasaran, dan berkesinambungan, sejalan dengan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan.

Apart from that, in line with the bank's vision and mission, namely "To Become the Leading Digital Sharia Bank" and "Together, Strengthening the Sharia Financial Ecosystem that is Benefits All Levels of Society," Bank Aladin Syariah is developing a sustainable financial strategy and framework that will become a guide for carrying out the Bank's operational programs and activities. Bank Aladin Syariah's sustainable financial framework relies on 4 (four) pillars, namely:

1. Banking Responsibly;
2. Grow with Our People;
3. Leave No One Behind; and
4. Act with Conscience for the Planet.

Bank Aladin Syariah has also formulated a Sustainability Commitment with a sustainability philosophy as follows: "As a future sharia bank, we believe in a better future. We also believe that sustainability is a fundamental principle of the way we do business. What we will do is not only limited to behaving responsibly for the sustainability of the Earth as a home for all, or limited to providing support to the communities where we are located. We will also collaborate with all parties to enable a faster transition towards a sustainable future."

Sustainability values are reflected through Bank Aladin Syariah's SDG policies and strategies, where these policies and strategies are prepared to always respect and consider stakeholder expectations and comply with applicable laws and norms. Bank Aladin Syariah tries to avoid implementing SER programs that simply aim to improve the Bank's image in the eyes of the public and the business world. Understanding the objectives of the SER program being implemented and the expected positive impacts is the main objective of Bank Aladin Syariah to achieve the goals of SER in an ideal, objective, on target and sustainable manner, in line with the concept of sustainable development goals.

Hal lain yang menjadi fokus Bank Aladin Syariah dalam melaksanakan program TJSI adalah dengan senantiasa meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Bank Aladin Syariah mengimplementasikan program TJSI yang memiliki dampak terhadap lingkungan dengan menetapkan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan inisiatif dalam upaya pelestarian lingkungan. Komitmen Bank Aladin Syariah terhadap lingkungan juga diwujudkan melalui operasional kantor yang ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*). Prinsip tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan kertas, energi, emisi, air, limbah dan sebagainya.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan selaras dengan komitmen Bank Aladin Syariah dalam mendukung TPB dan penerapan keuangan berkelanjutan. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16 /SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik informasi tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip *environment, social and governance* (ESG) disajikan pada Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan ini.

Adapun informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan Bank Aladin Syariah Tahun Buku 2023, disajikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mencakup poin-poin sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan;
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup);
3. Profil Singkat Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Penjelasan Direksi;
5. Tata Kelola Keberlanjutan;
6. Kinerja Keberlanjutan;
7. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen;
8. Lembar Umpan Balik (feedback) untuk Pembaca; dan
9. Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya.

Another thing that Bank Aladin Syariah focuses on in implementing the TJSI program is to always increase concern for the community and the environment. Bank Aladin Syariah implements TJSI programs that have an impact on the environment by establishing and developing various policies and initiatives in an effort to preserve the environment. Bank Aladin Syariah's commitment to the environment is also realized through environmentally friendly office operations by applying the 3R principle (*Reduce, Reuse and Recycle*). This principle is implemented in the management of paper, energy, emissions, water, waste and so on.

Social and Environmental Responsibility is carried out in line with Bank Aladin Syariah's commitment to supporting SDGs and implementing sustainable finance. In accordance with Financial Services Authority Circular No. 16 /SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, information on corporate social responsibility, especially for the application of environmental, social and governance (ESG) principles, is presented in a Sustainability Report which is presented separately from this Annual Report.

The information disclosed in the Bank Aladin Syariah Sustainability Report for the 2023 Fiscal Year is regulated in Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies, and includes the following points:

1. Explanation of Sustainability Strategy;
2. Overview of Sustainability Aspects (Economic, Social and Environmental);
3. Brief Profile of the Issuer or Public Company;
4. Explanation from the Board of Directors;
5. Sustainability Governance;
6. Sustainability Performance;
7. Written Verification from an Independent Party;
8. Feedback Sheet for Readers; and
9. Issuer or Public Company Response to Previous Year Report Feedback.

halaman ini sengaja dikosongkan

Aladin



MUDAH

DIMANA SAJA KAPAN SAJA



Aladin



Laporan Keuangan

Financial Statements

08

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Financial statements as of December 31, 2023
and for the year then ended with independent auditor's report*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan.....	1-2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3-4	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	5	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	6-7	<i>Statement of Cash Flows</i>
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil.....	8	<i>Statement of Reconciliation of Income and Revenue Sharing</i>
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	9	<i>Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds</i>
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	10	<i>Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	11 - 103	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
PT BANK ALADIN SYARIAH TBK**

Aladin
**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PT BANK ALADIN SYARIAH TBK**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned below:

- | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| 1. Nama | : | Dyota Mahottama Marsudi | : | Name |
| Alamat kantor | : | Millennium Centennial Center, 7 th Floor:
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25,
Jakarta 12920 | : | Office address |
| Alamat domisili
atau sesuai KTP | : | Jl. Ciomas IV RT006/RW001
Rawa Barat, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12180 | : | Domicile address or
address according to ID |
| Nomor telepon | : | (021) 39708008 | : | Telephone number |
| Jabatan | : | Presiden Direktur/ President Director | : | Title |
| 2. Nama | : | Mayang Ekaputri | : | Name |
| Alamat kantor | : | Millennium Centennial Center, 7 th Floor:
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25,
Jakarta 12920 | : | Office address |
| Alamat domisili
atau sesuai KTP | : | Jl. Mimosa VIII Blok I No.8, RT006/
RW004, Pejaten Barat,
Pasar Minggu
Jakarta Selatan, DKI Jakarta | : | Domicile address or
address according to ID |
| Nomor telepon | : | (021) 39708008 | : | Telephone number |
| Jabatan | : | Direktur/ Director | : | Title |

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank"); | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank"); |
| 2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar; dan | 3. a. All information in the Bank's financial statements have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and |
| b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The Bank's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank. | 4. We are responsible for the Bank's internal control system. |

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 28 Maret 2024/Jakarta, March 28, 2024

Dyota Mahottama Marsudi
Presiden Direktur/ President Director

Mayang Ekaputri
Direktur/ Director

PT. Bank Aladin Syariah Tbk
Millennium Centennial Center, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 25
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
T : +6221 3970 8008
F : +6221 3970 8007

aladinbank.id



Purwanto, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in
the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-
3/1/III/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan
Direksi
PT Bank Aladin Syariah Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Aladin Syariah Tbk. ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-
3/1/III/2024

The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Bank Aladin Syariah Tbk

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Aladin Syariah Tbk. (the "Bank") which comprise the statement of financial position as of December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakat funds, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2023, and its financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit Utama (lanjutan)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah, pinjaman qardh dan pembiayaan musyarakah

Penjelasan atas hal audit utama:

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 9, 10 dan 11 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2023, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah, pinjaman qardh dan pembiayaan musyarakah masing-masing adalah sebesar Rp23.924 juta, Rp7.739 juta dan Rp14.446 juta. Lihat ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan untuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah, pinjaman qardh dan pembiayaan musyarakah yang diungkapkan dalam Catatan 2c dan penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan terlampir. Kami berfokus pada area ini karena nilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah, pinjaman qardh dan pembiayaan musyarakah adalah signifikan terhadap laporan keuangan terlampir. Selain itu, penentuan cadangan kerugian penurunan nilai memerlukan pertimbangan dan memiliki ketidakpastian estimasi yang mencakup penentuan model untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, identifikasi eksposur kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan, dan penentuan asumsi yang digunakan dalam model perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (continued)

Key audit matters (continued)

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Allowance for impairment losses on murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing

Description of the key audit matter:

As described in Note 9, 10 and 11 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2023, the balance of allowance for impairment losses on murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing were Rp23,924 million, Rp7,739 million and Rp14,446 million, respectively. Refer to summary of significant accounting policies for allowance for impairment losses on murabahah receivables, funds of qardh and funds of musyarakah as disclosed in Note 2c and use of significant accounting estimates and judgements in Note 3 to the accompanying financial statements. We focused on this area because the amount of allowance for impairment losses on murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing are significant to the accompanying financial statements. In addition, determination of allowance for impairment losses requires judgement and is subject to estimation uncertainty which includes determining the model to calculate allowance for impairment losses, identification of credit exposures with significant deterioration in credit quality, and determining assumptions used in the allowance for impairment losses calculation models.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah, pinjaman qardh dan pembiayaan musyarakah (lanjutan)

Respons audit:

Kami menguji pengendalian utama atas pemberian, penilaian kualitas kredit internal secara regular, serta pencatatan dan pembayaran kembali piutang murabahah, pinjaman qardh dan pembiayaan musyarakah. Kami memperoleh pemahaman dan menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, melakukan validasi model pencadangan kerugian penurunan nilai, data masukan, dasar, dan asumsi yang digunakan oleh Bank dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai. Kami menguji piutang murabahah, pinjaman qardh dan pembiayaan musyarakah untuk mengevaluasi identifikasi eksposur yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan atau yang telah mengalami penurunan nilai secara tepat waktu oleh Bank. Kami memeriksa keakurasian perhitungan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio. Kami menilai apakah pengungkapan dalam laporan keuangan cukup dan secara memadai mencerminkan eksposur Bank terhadap risiko kredit. Kami melibatkan pakar auditor internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (continued)

Key audit matters (continued)

Allowance for impairment losses on murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing (continued)

Audit response:

We tested the key controls over the origination, regular internal credit quality assessments, and recording and repayments of the murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing. We obtained understanding and assessed impairment measurement methodologies, performed validation of allowance for impairment losses models, inputs, bases, and assumptions used by the Bank in calculating the allowance for impairment losses. We tested murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing to evaluate the timely identification by the Bank of exposures with significant deterioration in credit quality or exposures which have been impaired. We checked the accuracy of the calculation of the allowance for impairment losses amount by recalculating the impairment assessment for the entire portfolio. We assessed whether the financial statement disclosures are adequately and appropriately reflecting the Bank's exposures to credit risk. We involved our auditor's internal experts to assist us in the performance of the above procedures where their specific expertise was required.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (lanjutan)

Report No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (continued)

Informasi lain

Other information

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam dalam Laporan Tahunan 2023 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2023 Annual Report] ("The Annual Report") other than the accompanying financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (lanjutan)

Report No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (continued)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Bank or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (lanjutan)

Report No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00459/2.1032/AU.4/07/0703-3/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

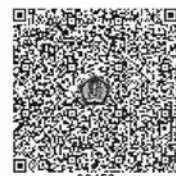
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Yasir

Registrasi Akuntan Publik No.: AP.0703/Public Accountant Registration No.: AP.0703

28 Maret 2024/March 28, 2024



00459

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	
ASET				ASSETS
Kas	1.013	2,4	651	Cash
Giro pada Bank Indonesia	423.910	2,5	83.353	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	13.488		1.870	Current accounts with other banks
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(135)		(19)	Less: Allowance for impairment losses
	13.353	2,6	1.851	
Penempatan pada Bank Indonesia	1.752.700	2,7	1.734.100	Placements with Bank Indonesia
Investasi pada surat berharga	1.409.892		1.219.816	Investment in marketable securities
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.530)		(2.754)	Less: Allowance for impairment losses
	1.403.362	2,8,18	1.217.062	
Piutang <i>murabahah</i>	814.569		826.998	Murabahah receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.924)		(30.282)	Less: Allowance for impairment losses
	790.645	2,9,21	796.716	
Pinjaman <i>qardh</i>	823.362		549.866	Funds of qardh
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.739)		(5.066)	Less: Allowance for impairment losses
	815.623	2,10,21	544.800	
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	1.464.378		-	Musyarakah financing
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.446)		-	Less: Allowance for impairment losses
	1.449.932	2,11,21	-	
Aset tetap dan aset hak guna - neto	47.367	2,12	45.177	Fixed assets and right of use assets – net
Aset tak berwujud - neto	77.339	2,13	51.538	Intangible assets – net
Aset lain-lain	316.876	2,14	258.153	Other assets
TOTAL ASET	7.092.120		4.733.401	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	69.839	2,15	16.392	<i>Liabilities due immediately</i>
Simpanan <i>wadiah</i>	1	2,17	1	<i>Wadiah deposits</i>
Surat berharga yang diterbitkan	-	2,19	684.000	<i>Securities issued</i>
Liabilitas kepada bank indonesia	584.248	2,8,18	-	<i>Liabilities due to bank indonesia</i>
Utang pajak	6.973	2,16	6.066	<i>Taxes payable</i>
Liabilitas lain-lain	90.819	2,9 20,32	89.017	<i>Other liabilities</i>
TOTAL LIABILITAS	751.880		795.476	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Tabungan <i>mudharabah</i>	510.651	2,9,10 11,21	116.306	<i>Mudharabah demand saving</i>
Deposito <i>mudharabah</i>	2.744.348	2,9,10 11,21	678.343	<i>Mudharabah time deposits</i>
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	3.254.999		794.649	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022				<i>Share capital - par value of Rp100 (full amount) per share as of December 31, 2023 and 2022, respectively</i>
Modal dasar 50.000.000.000 dan 25.000.000.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022				<i>Authorized - 50,000,000,000 and 25,000,000,000 shares as of December 31, 2023, and 2022, respectively</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 13.918.379.517 saham dan 13.770.509.989 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	1.391.838	2,22	1.377.051	<i>Issued and fully paid - 13,918,379,517 shares and 13,770,509,989 shares as of December 31, 2023 and 2022, respectively</i>
Tambahan modal disetor	965.669	2,22	964.190	<i>Additional paid-in capital</i>
Dana setoran modal	1.512.501	2,22	1.363.862	<i>Capital deposit funds</i>
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	4.761	2,32	2.720	<i>Remeasurement of defined benefit plan</i>
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	2.120	2,8	363	<i>Unrealized gain on available-for-sale marketable securities</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541		29.541	<i>Retained earnings from conventional activities</i>
Saldo rugi dari kegiatan syariah	(821.189)		(594.451)	<i>Deficit from sharia activities</i>
TOTAL EKUITAS	3.085.241		3.143.276	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	7.092.120		4.733.401	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan Dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2023	Catatan/ Notes	2022	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB				INCOME FROM FUND MANAGED BY BANK AS MUDHARIB
Pendapatan dari piutang	201.056	2,23	16.101	Income from receivables
Pendapatan usaha utama lainnya	133.446	2,23	65.654	Other main operating income
Total pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai <i>mudharib</i>	334.502		81.755	Total income from fund managed by Bank as <i>mudharib</i>
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(121.047)	2,24	(23.982)	THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	213.455		57.773	BANK'S SHARE IN PROFIT SHARING
PENDAPATAN USAHA LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Pendapatan imbalan jasa perbankan	32.734	25	7.272	Fee based income from banking services
Pendapatan atas penjualan surat berharga	4.070	8	12.365	Income from sales of marketable securities
Laba selisih kurs - neto	(11)		150	Gain on foreign exchange - net
Lain-lain	1		1	Others
TOTAL PENDAPATAN USAHA LAINNYA	36.794		19.788	TOTAL OTHER OPERATING INCOME
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(15.724)	26	(36.777)	Addition of allowance for impairment losses on earning assets
BEBAN OPERASIONAL				OPERATING EXPENSES
Umum dan administrasi	(137.667)	27	(86.734)	General and administrative
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(194.251)	28	(161.867)	Salaries and employees' benefits
Penyusutan dan amortisasi	(24.070)		(18.703)	Depreciation and amortization
Promosi	(105.799)		(22.037)	Promotion
Iuran Otoritas Jasa Keuangan	(3.282)		(1.631)	Financial Services Authority contributions
Lain-lain	(12.597)	29	(14.171)	Others
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	(477.666)		(305.143)	TOTAL OPERATING EXPENSES
RUGI OPERASIONAL	(243.141)		(264.359)	LOSS FROM OPERATION
Pendapatan non-operasional - neto	16.403		(554)	Non-operating income - net
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK	(226.738)		(264.913)	LOSS BEFORE TAX EXPENSE
Beban pajak - neto	-	2,16	-	Tax expenses - net
RUGI TAHUN BERJALAN	(226.738)		(264.913)	CURRENT YEAR LOSS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan Dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2023	Catatan/ Notes	2022	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2.041	32	912	Remeasurement of defined benefit plan
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will be reclassified to profit or loss:
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	1.757	8	(6.464)	Unrealized gain (loss) on available-for-sale marketables securities
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	3.798		(5.552)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(222.940)		(270.465)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	(16)	37	(20)	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Million of Rupiah, unless otherwise stated)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Shares capital issued and fully paid capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Dana setoran modal/ Capital deposits funds	Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual/ Unrealized gain on available-for-sale marketable securities	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ Remeasurement of defined benefit plan	Saldo laba dari kegiatan konvensional/ Retained earnings from conventional activities	Saldo rugi dari kegiatan syariah/ Deficit from sharia activities	Total ekuitas/ Total equity	Balance as of December 31, 2021
Saldo 31 Desember 2021	1.324.135	10.870	2.684	6.827	1.808	29.541	(329.538)	1.046.327	Balance as of December 31, 2021
Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I	50.427	968.102	-	-	-	-	-	1.008.529	Additional capital from limited public offering with pre-emptive rights (PMHMETD) I
Biaya emisi PMHMETD I	-	(5.031)	-	-	-	-	-	(5.031)	Issuance cost of PMHMETD I
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)	-	-	1.190.000	-	-	-	-	1.190.000	Additional capital without pre-emptive right (PMTHMETD)
Penambahan Modal dari Pemegang Saham Pengendali	-	-	-	-	-	-	-	170.000	Additional capital from ultimate shareholder
Pelaksanaan Waran I	2.489	249	-	-	-	-	-	3.916	Waran / exercise
Rugi komprehensif lain	-	-	-	(6.464)	912	-	-	(5.552)	Other comprehensive loss
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	(264.913)	(264.913)	Net loss for the year
Saldo 31 Desember 2022	1.377.051	964.190	1.363.862	363	2.720	29.541	(594.451)	3.143.276	Balance as of December 31, 2022
Penambahan Modal dari Pemegang Saham Pengendali	-	-	152.500	-	-	-	-	152.500	Additional capital from Ultimate Shareholder
Pelaksanaan Waran I	14.787	1.479	(3.861)	-	-	-	-	12.405	Waran / exercise
Keuntungan komprehensif lain	-	-	-	1.757	2.041	-	-	3.798	Other comprehensive income
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	(226.738)	(226.738)	Net loss for the year
Saldo 31 Desember 2023	1.391.838	965.669	1.512.501	2.120	4.761	29.541	(821.189)	3.085.241	Balance as of December 31, 2023

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
		2023	Catatan/ Notes	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan jual beli, bagi hasil dan usaha utama lainnya	336.092			<i>Proceeds of margin, profit sharing, and other main operating</i>
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	(115.011)			<i>Payment of profit sharing for temporary syirkah funds</i>
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	36.805			<i>Receipt of other operating income</i>
Pembayaran beban lain	(487)			<i>Payment of other expense</i>
Pembayaran beban operasional	(345.060)			<i>Payment of operating expense</i>
Rugi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	(87.661)			<i>Loss before changes in operating assets and liabilities</i>
Kenaikan aset operasi:				<i>Increase in operating assets:</i>
Piutang <i>murabahah</i>	12.429	9		<i>Murabahah receivables</i>
Pinjaman <i>qardh</i>	(273.496)	10		<i>Funds of qardh</i>
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	(1.464.378)	11		<i>Funds of musyarakah</i>
Aset lain-lain	(166.112)			<i>Other assets</i>
(Penurunan) kenaikan liabilitas operasi:				<i>(Decrease) increase in operating liabilities:</i>
Liabilitas segera	53.447			<i>Liabilities due immediately</i>
Liabilitas kepada bank indonesia	584.248			<i>Liabilities due to bank indonesia</i>
Simpanan <i>wadiah</i>	-			<i>Wadiah deposits</i>
Surat berharga yang diterbitkan	(684.000)			<i>Securities issued</i>
Utang pajak	907	16		<i>Taxes payable</i>
Liabilitas lain-lain	6.882			<i>Other liabilities</i>
Dana <i>syirkah</i> temporer	2.460.350	21		<i>Temporary syirkah funds</i>
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	442.616			Net cash provided by (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan investasi dalam surat berharga dalam kelompok biaya perolehan dan tersedia untuk dijual	(842.993)			<i>Acquisition of investment in marketable securities classified at cost and available-for-sale</i>
Perolehan aset tetap, aset hak guna dan piranti lunak	(35.673)	12,13		<i>Acquisitions of fixed assets, right to use asset and software</i>
Penerimaan dari penjualan surat berharga	326.000			<i>Proceed from sale of marketable securities</i>
Penerimaan dari investasi dalam surat berharga yang telah jatuh tempo	328.674			<i>Proceed from investment in matured marketable securities</i>
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(223.992)			Net cash used in investing activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
2023	Catatan/ Notes	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan modal dari pemegang saham pengendali	152.500	170.000	<i>Proceeds capital of ultimate shareholder</i>
Pelaksanaan waran	12.405	3.916	<i>Exercise of warrants</i>
Pembayaran liabilitas sewa	(12.376)	(12.338)	<i>Payment of lease liabilities</i>
Penerimaan modal dari Penawaran Umum Terbatas I	-	1.008.529	<i>Proceeds capital of Limited Public Offering I</i>
Pembayaran biaya emisi penerbitan Saham Penawaran Umum Terbatas I	-	(5.031)	<i>Payment of the issuance costs of the Limited Public Offering I</i>
Penerimaan modal dari aksi korporasi Penambahan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)	-	1.190.000	<i>Proceeds capital of the corporate action of the Increase Capital Without Going Through Pre-emptive Rights (PMTHMETD)</i>
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	152.529	2.355.076	Net cash provided by financing activities
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	371.153	661.326	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.819.974	1.158.523	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	(16)	125	<i>Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents</i>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	2.191.111	1.819.974	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR
Rincian kas dan setara kas terdiri dari :			<i>Cash and cash equivalents consist of :</i>
Kas	1.013	651	<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia	423.910	83.353	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain	13.488	1.870	<i>Current accounts with other Banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia	1.752.700	1.734.100	<i>Placements with Bank Indonesia</i>
Total kas dan setara kas	2.191.111	1.819.974	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN REKONSILIASI
PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF RECONCILIATION OF
INCOME AND REVENUE SHARING
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2023	Catatan/ Notes		2022
Pendapatan Usaha	334.502		81.755	Operating Income
Pengurangan :				Deduction :
Pendapatan tahun berjalan kas atau setara kas yang belum di terima :				Income during the year in which the cash or cash equivalent has not been received :
Keuntungan <i>murabahah</i>	1.212		3.029	Margin <i>murabahah</i>
Pendapatan dari Sukuk Negara	1.191		123	Income from Government Sukuk
Pendapatan dari SIMA	185		-	Income from SIMA
Pendapatan dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (SBSN)	5.460		6.795	Income from Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (SBSN)
Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	767		458	Sharia Deposit Facility (FASBIS)
Total pengurang	8.815		10.405	Total deduction
Penambah :				Addition :
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan :				Income from previous year in which cash has been received in current year :
Keuntungan <i>murabahah</i>	3.029		-	Margin <i>murabahah</i>
Pendapatan dari Sukuk Negara	124		886	Income from Government Sukuk
Pendapatan dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (SBSN)	6.795		1.349	Income from Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (SBSN)
Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	458		87	Sharia Deposit Facility (FASBIS)
Total penambah	10.406		2.322	Total addition
Pendapatan usaha yang tersedia untuk bagi hasil	336.093		73.672	Available operating income for profit sharing
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	215.049		49.690	Profit sharing attributable to Bank
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	121.047	24	23.982	Profit sharing attributable to depositors
Dirinci atas :				Details to :
Hak pemilik dana atas hasil dana <i>syirkah</i> temporer yang sudah didistribusikan	121.047		23.982	Distributed return of temporary <i>syirkah</i> funds attributable to depositors

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	Catatan/ Notes	
Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat			Distribution of Zakat
Saldo awal tahun			Beginning balance of the year
Sumber dana zakat			Sources of zakat funds
Zakat dari bank	-		Zakat from banks
Zakat dari pihak luar bank	357		Zakat from non-bank parties
	357		
Penyaluran dana zakat	357		Distribution of zakat funds
Kenaikan dana zakat	-		Increase in zakat funds
Saldo akhir tahun	-		Ending balance of the year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
 31 Desember 2023
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF SOURCES AND
USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
 For the Year Ended December 31, 2023
 (Expressed in Million of Rupiah,
 unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2023	Catatan/ Notes	2022	
Sumber dana kebajikan				Sources of qardhul hasan funds
Denda	2	33	1	Penalties
Lainnya	5	33	-	Others
Penggunaan dana kebajikan	416		10	Uses of qardhul hasan funds
Penurunan dana kebajikan	(409)		(9)	Decrease in qardhul hasan funds
Saldo awal dana kebajikan	993		1.002	Beginning balance of qardhul hasan funds
Saldo akhir dana kebajikan	584	2,15	993	Ending balance of qardhul hasan funds

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian bank dan informasi umum

PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank"), berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "PT Bank Maybank Nusa International" berdasarkan Akta Pendirian No. 58 tanggal 16 September 1994, dibuat oleh Achmad Abid, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 1994, No. 433/CN/PDT.P/1944/PN.JKT.PST., dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dan diubah dengan Akta Notaris No. 135 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat oleh Sutjipto, S.H., yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Bank berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) No. C2-15.525.HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah didaftarkan dalam register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2992/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 2 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10872 Tahun 1994 ("Akta Pendirian").

Pada tanggal 11 September 2000, Bank berganti nama dari yang sebelumnya bernama "PT Maybank Nusa International" menjadi "PT Bank Maybank Indocorp" dengan beralihnya kepemilikan saham Bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selanjutnya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Bank No. 6 dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-22089.HT.01.04-TH.2000 tanggal 9 Oktober 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1 tanggal 2 Januari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 25 Tahun 2001.

1. GENERAL INFORMATION

a. The bank's establishment and general information

PT Bank Aladin Syariah Tbk (the "Bank"), domiciled in Jakarta, is a limited liability company that has been established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia initially under the name "PT Bank Maybank Nusa International" based on Deed of Establishment No. 58, dated September 16, 1994 of Achmad Abid, S.H. based on the Decision Letter No. 433/CN/PDT.P/1944/PN.JKT.PST., of the Central Jakarta District Court, dated August 22, 1994 of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, and amended by Notarial Deed No. 135 dated October 17, 1994 of Sutjipto, S.H., who was authorized to establish the Bank based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia (currently the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia) No. C2-15.525.HT.01.01.Th.94 dated October 17, 1994 and the deed has been registered in the registry of the Registrar's Office of South Jakarta District Court No. 2992/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL dated November 2, 1994, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 103 dated December 27, 1994, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 10872 Year 1994 ("Deed of Establishment").

On September 11, 2000, the Bank changed its name from "PT Maybank Nusa International" to "PT Bank Maybank Indocorp" upon transfer of ownership of the Bank's shares to Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) subsequently to the Minister of Finance of the Republic of Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), based on the Deed of Decision Statement outside the Bank's Meeting No. 6 of Arman Lany, S.H., Notary in Jakarta, the change has been approved by the Minister of Law and Legislation of the Republic of Indonesia based on Decree No. C-22089.HT.01.04-TH.2000 dated October 9, 2000 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1 dated January 2, 2001, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 25 of 2001.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Bank kembali berganti nama dari "PT Bank Maybank Indocorp" menjadi "PT Bank Maybank Syariah Indonesia" (Maybank Syariah) seiring dengan pergantian bidang usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa No. 1 tanggal 1 Juni 2010, dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-29107.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0043068.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010.

Pada tahun 2010, Bank melakukan konversi kegiatan usahanya dari konvensional menjadi syariah. Saldo laba yang diperoleh dari kegiatan konvensional dicatat dalam ekuitas.

Berdasarkan Akta Notaris Aliya S. Azhar S.H., M.H., M.Kn., No. 27 tanggal 19 Desember 2011, Rapat Pemegang Saham Bank memutuskan untuk menjual 30.000 lembar saham Bank yang dimiliki oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada Malayan Banking (Maybank) Berhad dan Maybank telah melakukan penjualan 9.451 saham Bank kepada PT Prosperindo.

Pada tanggal 15 Juni 2012, Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui untuk mengubah pasal 9 Anggaran Dasar sehubungan perubahan ketentuan pemindahan hak atas saham. Keputusan ini didokumentasikan dalam Akta Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn. No. 34 tanggal 15 Juni 2012 dan perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-AH.01.10-25737 tanggal 16 Juli 2012.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

The Bank once again changed its name from "PT Bank Maybank Indocorp" to "PT Bank Maybank Syariah Indonesia" (Maybank Syariah) in line with the change of business field from conventional commercial bank to sharia commercial bank based on the Governor of Bank Indonesia Decision Letter No.12/60/KEP.GBI/DpG/2010 dated September 23, 2010. The said amendment to the Articles of Association was based on the Decision Statement of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1 dated June 1, 2010 of Arman Lany, S.H., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-29107.AH.01.02.Tahun 2010 dated June 8, 2010, and has been registered in the Company Registry of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0043068.AH.01.09. Tahun 2010 dated June 8, 2010.

In 2010, the Bank converted its business activities from conventional to sharia. Retained earnings from conventional activities are recorded in shareholders' equity.

Based on the Notary Deed of Aliya S. Azhar S.H., M.H., M.Kn., No. 27 dated December 19, 2011, the Bank's Shareholders Meeting decided to sell 30,000 shares of the Bank owned by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) to Malayan Banking (Maybank) Berhad and Maybank sold 9,451 shares of the Bank to PT Prosperindo.

On June 15, 2012, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders which agreed to amend Article 9 of the Articles of Association in connection with the changes in the provisions for transfer of rights over shares. This decision is documented in the Notary Deed of Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn. No. 34 dated June 15, 2012 and these changes have been accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-AH.01.10-25737 dated July 16, 2012.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Pada tanggal 19 Desember 2013, Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui untuk mengubah pasal 25 Anggaran Dasar sehubungan perubahan ketentuan Dewan Pengawas Syariah. Keputusan ini didokumentasikan dalam Akta Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn. No. 54 tanggal 19 Desember 2013, perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-AH.01.10-06466 tanggal 25 Februari 2014.

Bank kembali berganti nama menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Bank No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035488.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0105852.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 20460 Tahun 2020. Perubahan tersebut sudah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat pergantian nama, dimana pergantian nama menjadi efektif setelah OJK menerbitkan keputusan No. 113/PB.1/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah.

Pada tanggal 31 Januari 2020, akuisisi Bank telah berlaku efektif dan disahkan oleh Notaris Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., berdasarkan Akta No. 20 tanggal 31 Januari 2020 mengenai akuisisi Bank.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

On December 19, 2013, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders which agreed to amend Article 25 of the Articles of Association in connection with changes to the provisions of the Sharia Supervisory Board. This decision is documented in the Notary Deed of Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn. No. 54 dated December 19, 2013, these changes have been accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-AH.01.10-06466 dated February 25, 2014.

The Bank changed its name again to "PT Bank Net Indonesia Syariah" based on the Deed of Shareholders' Decision Statement taken outside the Banks Meeting No. 5 dated July 3, 2019 of Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the said amendment to the Articles of Association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0035488.AH.01.02.Tahun 2019 dated July 8, 2019, registered in the Company Registry of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0105852.AH.01.11.Tahun 2019 dated July 8, 2019 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 46 dated June 9, 2020, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20460 Year 2020. The change was approved by the Financial Services Authority ("OJK") through a name change letter which became effective after OJK issued Decree No. 113/PB.1/2019 dated December 20, 2019 stipulating the change in the use of business license from PT Bank Maybank Syariah Indonesia to PT Bank Net Indonesia Syariah.

The acquisition of the Bank has been effective and validated by Notary Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., based on Deed No. 20 dated January 31, 2020 regarding the acquisition of Bank.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Dengan ditandatanganinya akta tersebut maka susunan pemegang saham sejak tanggal akta akuisisi adalah sebagai berikut:

1. PT NTI Global Indonesia sebagai pemilik dari 661.548 lembar saham atau 70% saham Bank dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp573.514.815.318 (nilai penuh); dan
2. PT Berkah Anugerah Abadi sebagai pemilik dari 283.521 lembar saham atau 30% Bank dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp245.792.435.248 (nilai penuh).

Atas pelaksanaan pengambilalihan kepemilikan Bank tersebut, telah dilakukan pengumuman pada media masa pada 7 Februari 2020.

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham Bank No. 37 tanggal 30 April 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Bank. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU/0035208.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020.

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 3 Juli 2020 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Bank dari semula Rp819.307.250.566,5 (nilai penuh) menjadi Rp2.500.000.000.000 (nilai penuh) dan modal ditempatkan/disetor Bank dari Rp819.307.250.566,5 (nilai penuh) menjadi Rp819.307.256.000 (nilai penuh) sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan/disetor Bank sebesar Rp5.433,5 (nilai penuh) yang diambil oleh PT Berkah Anugerah Abadi dan PT NTI Global Indonesia masing-masing sebesar Rp4.751,5 (nilai penuh) dan Rp682 (nilai penuh). Para pemegang saham juga menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp866.928,50 (nilai penuh) menjadi Rp200 (nilai penuh).

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

With the signing of the deed, the composition of the shareholders from the date of the deed of acquisition is as follows:

1. PT NTI Global Indonesia as the owner of 661,548 shares or 70% of the Bank's shares with a total nominal value amounted to Rp573,514,815,318 (full amount); and
2. PT Berkah Anugerah Abadi as the owner of 283,521 shares or 30% of the Bank with a total nominal value amounting to Rp245,792,435,248 (full amount).

In relation to the transfer of ownership of the Bank, an announcement was made in mass media on February 7, 2020.

Based on the Deed of Circular Decision of the Bank's Shareholders No. 37 dated April 30, 2020 of Notary Eliwaty Tjitra, S.H., the shareholders decided to amend several articles in the Bank's Articles of Association. These changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-0035208.AH.01.02. Tahun 2020 dated May 12, 2020.

Based on Deed No. 17 dated July 3, 2020 of Yulia, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders agreed to increase the Bank's authorized capital from the Rp819,307,250,566.5 (full amount) to Rp2,500,000,000,000 (full amount) and the Bank's issued/paid-up capital from Rp819,307,250,566.5 (full amount) to Rp819,307,256,000 (full amount) resulting in an increase in the Bank's issued/paid-up capital by Rp5,433.5 (full amount) taken by PT Berkah Anugerah Abadi and PT NTI Global Indonesia amounting to Rp4,751.5 (full amount) and Rp682 (full amount), respectively. The shareholders also agreed to change the par value of the shares from Rp866,928.50 (full amount) to Rp200 (full amount) per share.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Dengan demikian, susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut: 1) PT NTI Global Indonesia sebagai pemilik dari 2.867.574.080 lembar saham atau 70% lembar saham Bank dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp573.514.816.000 (nilai penuh); dan 2) PT Berkah Anugerah Abadi sebagai pemilik dari 1.228.962.200 lembar saham atau 30% Bank dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp245.792.440.000 (nilai penuh). Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU 0045699.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0276124 tanggal 6 Juli 2020.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 6 Juli 2020, dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham-saham Bank kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp200 (nilai penuh) dan mencatatkan saham-saham Bank tersebut pada Bursa Efek Indonesia, serta mengubah status Bank dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, memberikan kuasa pada Direksi dan Dewan komisaris sehubungan dengan Penawaran Umum saham, mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Bank, dan menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Bank sehubungan dengan perubahan status Bank menjadi perseroan terbatas terbuka/publik.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

Therefore, the composition of the shareholders is now as follows: 1) PT NTI Global Indonesia as the owner of 2,867,574,080 shares or 70% of the Bank's shares with a total nominal value amounting to Rp573,514,816,000 (full amount); and 2) PT Berkah Anugerah Abadi as the owner of 1,228,962,200 shares or 30% of the Bank's shares with a total nominal value amounting to Rp245,792,440,000 (full amount). These changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU 0045699.AH.01.02.Tahun 2020 dated July 6, 2020 and has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0276124 dated July 6, 2020.

Based on Deed No. 26 dated July 6, 2020 of Notary Yulia, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders agreed on the following: the plan to issue new shares through Initial Public Offering to a maximum number of 2,500,000,000 shares with a nominal value of Rp200 (full amount) per share and list the Bank's shares on the Indonesia Stock Exchange; change the status of the Bank from a private company to a public company; authorize the Board of Directors and the Board of Commissioners in connection with the Public Offering of the shares; change the purpose and objective, as well as the business activities of the Bank, and amend and adjust the Bank's Articles of Association in connection with the change of the Bank's status to a public company.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0107659.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020, serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0046009.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020.

Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 14 Juli 2020 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp200 (nilai penuh) per saham menjadi sebesar Rp100 (nilai penuh) per saham, menyetujui perubahan rencana Bank untuk Penawaran Umum perdana saham-saham Bank (*Initial Public Offering*) dari sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 saham menjadi sampai dengan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham dan mencatatkan saham-saham Bank tersebut pada Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (nilai penuh), serta menyetujui rencana Bank menerbitkan waran atas nama Bank sebanyak-banyaknya 2.800.000.000 waran. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0288622 tanggal 14 Juli 2020.

Berdasarkan Akta No. 113 tanggal 24 September 2020 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan status Bank yang semula Perseroan Terbatas Terbuka/Publik menjadi Perseroan Tertutup/Non Fasilitas Umum. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0066400.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

These changes have been submitted to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in letter No. AHU-0107659.AH.01.11.Tahun 2020 dated July 7, 2020, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-0046009.AH.01.02.Tahun 2020 dated July 7, 2020.

Based on Deed No. 53 dated July 14, 2020 of Yulia, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders agreed to change the nominal value of the shares from Rp200 (full amount) per share to Rp100 (full amount) per share, approved the change in the Bank's plan for an Initial Public Offering of the Bank from a maximum number of 2,500,000,000 shares to a maximum of 5,000,000,000 shares and list the Bank's shares in the Indonesia Stock Exchange with a nominal value Rp100 (full amount) per share, as well as approved the Bank's plan to issue warrants to a maximum number of 2,800,000,000 (full amount) warrants. These changes have been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-AH.01.03-0288622 dated July 14, 2020.

Based on Deed No. 113 dated September 24, 2020 Yulia, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders has approved the change of the status of the Bank from a Public Company to a Private/Non-Public Facility. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-0066400.AH.01.02.Tahun 2020 dated September 25, 2020.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 November 2020 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui beberapa hal, antara lain; rencana Bank untuk menerbitkan saham baru melalui penawaran umum perdana sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, mencatatkan saham-saham Bank tersebut pada Bursa Efek Indonesia, serta mengubah status Bank dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, menyetujui rencana Bank menerbitkan waran atas nama Bank sebanyak-banyaknya 2.800.000.000 waran sesuai dengan syarat dan ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan waran, memberikan kuasa pada Direksi dan Dewan komisaris sehubungan dengan Penawaran Umum saham, mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Bank, dan menyetujui untuk mengubah dan Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Bank sehubungan dengan perubahan status Bank menjadi perseroan terbatas terbuka/publik.

Perubahan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0074002.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 3 November 2020, serta diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0403667 tanggal 3 November 2020. Perubahan tersebut juga telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU00183733.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 November 2020.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

Based on Deed No. 1 dated November 2, 2020 of Notary Yulia, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders agreed on the following among others: the Bank's plan to issue new shares through Initial Public Offering at maximum number of 5,000,000,000 shares with nominal value of Rp100 (full amount) per share, list the Bank's shares on Indonesia Stock Exchange, and change the status of Bank from a private company to a public company. Bank's plan to issue warrants on behalf of the Bank to a maximum number of 2,800,000,000 warrants in accordance with the terms and conditions relating to the issuance of the warrants; authorize the Boards of Directors and Commissioners in connection with the Public Offering of the shares; change the purpose and objective, as well as the business activities of the Bank, and amend and adjust the Bank's Articles of Association in accordance with the change of the Bank's status to a public company.

These changes have been submitted and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on Decree No. AHU-0074002.AH.01.02.Tahun 2020 dated November 3, 2020; and has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0403667 dated November 3, 2020. It has also been registered in the Company Register of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU00183733.AH.01.11.Tahun 2020 dated November 3, 2020.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Bank, yang telah diaktakan dalam akta No. 63 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 17 Desember 2020, para Pemegang Saham memberikan persetujuan kepada PT Berkah Anugerah Abadi untuk menjual seluruh sahamnya dalam Bank, yakni sebanyak 2.457.924.400 saham, kepada dan menunjuk sebagai pembelinya, yakni: 1) PT Alphaplus Adhigana Asia, sebanyak 204.826.814 saham dan 2) PT NTI Global Indonesia sebanyak 2.253.097.586 saham. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0420308 tanggal 17 Desember 2020.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah diaktakan dalam akta No. 11 dari Notaris Yulia S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 7 April 2021, para pemegang saham memberikan persetujuan perubahan nama Bank dari PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0021937.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021. Perubahan tersebut sudah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat pergantian nama, dimana pergantian nama menjadi efektif setelah OJK menerbitkan keputusan No. KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan penggunaan izin atas nama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Pada tanggal 24 September 2021, Bank menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik terkait perubahan nama Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank yang semula bernama PT NTI Global Indonesia menjadi PT Aladin Global Ventures.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

Based on the Decree of the Bank's Shareholders, which is notified in Deed No. 63 by Yulia, S.H., Notary in Jakarta, dated December 17, 2020, the Shareholders gave approval to PT Berkah Anugerah Abadi to sell all of 2,457,924,400 shares in the Bank, to designated buyers, namely: 1) PT Alphaplus Adhigana Asia for 204,826,814 shares and 2) PT NTI Global Indonesia for 2,253,097,586 shares. These changes have been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0420308 dated December 17, 2020.

Based on the result of the Extraordinary Shareholders General Meeting (EGMS) which has been notarized in deed No. 11 from Notary Yulia S.H., Notary in Jakarta, dated April 7, 2021, the shareholders gave their approval to change the Bank's name from PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk to PT Bank Aladin Syariah Tbk.

The change has been submitted and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on Decree No. AHU-0021937.AH.01.02 Tahun 2021 dated April 12, 2021. The change has been approved by the Financial Service Authority ("OJK") through a name change letter which became effective after OJK issued Decree No. KEP-42/PB.1/2021 dated June 3, 2021 stipulating the change in the use of business license from PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk to PT Bank Aladin Syariah Tbk.

On September 24, 2021, the Bank submits information disclosure to public regarding the change of the Bank's Controlling Shareholder name of the Bank which was formerly named PT NTI Global Indonesia to PT Aladin Global Ventures.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan Akta Nomor 56 tanggal 21 Februari 2022 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0013582.AH.01.02 tanggal 23 Februari 2022. Para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Bank dari Rp2.500.000.000.000 menjadi Rp5.000.000.000.000.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Pemegang Saham PT Bank Aladin Syariah Tbk No. 32 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 17 Januari 2023 mengenai perubahan modal saham ditempatkan dan disetor Bank. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0008480 tanggal 19 Januari 2023.

Pemegang saham pengendali Bank adalah PT Aladin Global Ventures (dahulu PT NTI Global Indonesia) dengan Pemegang saham akhir adalah John Dharma J. Kusuma.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah melakukan usaha di bidang Bank Umum Syariah Devisa dengan kegiatan usaha utama melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah.

Kantor pusat Bank berlokasi di Millennium Centennial Center, Lantai 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan.

Penawaran Umum Saham Perdana di Bursa Efek Indonesia

Pada tanggal 22 Januari 2021, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No. S-8/D.04/2021 untuk melakukan penawaran umum perdana 5.000.000.000 saham Bank dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp103 (nilai penuh) per saham dan disertai dengan 2.800.000.000 Waran I yang melekat pada saham yang dikeluarkan dan diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi pemegang saham dengan harga pelaksanaan waran Rp110 yang mulai berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 30 Januari 2026. Pada tanggal 1 Februari 2021, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

Based on Deed Number 56 dated February 21, 2022 made before Yulia, S.H., Notary in Jakarta and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0013582.AH.01.02 dated February 23, 2022. The shareholders agreed to increase the Authorized capital of the Bank from Rp2,500,000,000,000 to Rp5,000,000,000,000.

The Bank's Articles of Association have been amended most recently by Deed of Shareholders Statement No. 32 of Yulia, S.H., Notary in Jakarta, dated January 17, 2023 concerning the changes of the Bank's issued and fully paid share capital. These changes have been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0008480 dated January 19, 2023.

The controlling shareholder of the Bank is PT Aladin Global Ventures (previously PT NTI Global Indonesia) with the ultimate shareholder is John Dharma J. Kusuma.

According to Article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's scope of activities is to engage in Foreign Exchange Sharia Commercial Banking with the main business activities carrying out banking activities that run their business according to sharia principles.

The Bank's head office is located at 7th Floor Millennium Centennial Center, Jl. Jendral Sudirman Kav. 25, South Jakarta.

Initial Public Offering on Indonesia Stock Exchange

On January 22, 2021, the Bank obtained the notice of effectivity from Financial Services Authority (OJK) in its letter No. S-8/D.04/2021 for the public offering of 5,000,000,000 shares with par value of Rp100 (full amount) per share with offering price at Rp103 (full amount) per share and simultaneously issued 2,800,000,000 Warrants I accompanying the new shares issued, which are to be granted free as an incentive for the shareholders at an exercise price of Rp110 which is effective starting from August 2, 2021 up to January 30, 2026. As of February 1, 2021, these shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 24 Februari 2021 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0124836 tanggal 25 Februari 2021. Dari hasil penawaran umum saham perdana, Bank berhasil mencatat penambahan modal disetor sebesar Rp500.000 dan tambahan modal disetor berupa agio sebesar Rp15.000 sebelum dikurangi biaya emisi penerbitan saham sebesar Rp4.612. Hasil penerimaan bersih dari penawaran umum saham perdana ini adalah sebesar Rp510.388.

Pada tanggal 28 April 2022, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No. S-74/D.04/2022 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Bank sejumlah 504.264.065 (lima ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu enam puluh lima) lembar saham dengan nominal Rp100 (Rupiah penuh) per lembar saham pada harga penawaran Rp2.000 (Rupiah penuh) per lembar saham.

Penawaran Umum Terbatas I tersebut telah diaktakan melalui Akta No. 94 tanggal 20 Juni 2022 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-AH.01.03-0252875 tanggal 20 Juni 2022.

Dari hasil Penawaran Umum Terbatas I, Bank berhasil mencatat penambahan modal disetor sebesar Rp50.427 dan tambahan modal disetor berupa agio sebesar Rp958.102 sebelum dikurangi biaya emisi penerbitan saham sebesar Rp5.031. Hasil penerimaan bersih dari penawaran umum terbatas ini adalah sebesar Rp1.003.498.

Penambahan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)

Pada tanggal 29 Desember 2022, Bank melaksanakan Aksi Korporasi PMTHMETD dimana Bank menerbitkan saham baru sejumlah 850.000.000 lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp1.400 (nilai penuh) per saham yang dibeli seluruhnya oleh PT BNC Technologies Ventures.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

Based on Deed No. 54 dated February 24, 2021 of Yulia, S.H., a Notary in Jakarta and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0124836 dated February 25, 2021. From the results of the initial public offering, the Bank managed to record an additional share capital of Rp500,000 and additional paid-in capital in the form of premium of Rp15,000 before deducting the issuance costs of shares issuance of Rp4,612. The net proceeds from this initial public offering amounted to Rp510,388.

On April 28, 2022, the Bank obtained the notice of effectivity from Financial Services Authority (OJK) in its letter No. S-74/D.04/2022 for Limited Public Offering I with pre-emptive rights to the Bank's shareholders amounting to 504,264,065 (five hundred four million and two hundred sixty-four thousand sixty-five) shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share with the offering price of Rp2,000 (full amount) per share.

The Limited Public Offering I has been recorded on Deed No. 94 dated June 20, 2022 of Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0252875 dated June 20, 2022.

From the results of the Limited Public Offering I, the Bank managed to record an additional share capital of Rp50,427 and additional paid-in capital in the form of premium of Rp958,102 before deducting the issuance costs of shares issuance of Rp5,031. The net proceeds from this initial public offering amounted to Rp1,003,498.

Increase Capital Without Going Through Pre-emptive Rights (PMTHMETD)

On December 29, 2022, the Bank executed the Corporate Action PMTHMETD which the Bank issued 850,000,000 new shares at a price exercise of Rp1,400 (full amount) per share that purchased entirely by PT BNC Technologies Ventures.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Penambahan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) (lanjutan)

PMTHMETD tersebut meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp1.380.561.760.100 (nilai penuh) menjadi Rp1.465.561.760.100 (nilai penuh). PMTHMETD tersebut telah diaktakan melalui Akta No. 32 tanggal 17 Januari 2023 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0008480 tanggal 19 Januari 2023 (Catatan 22).

b. Penyelesaian laporan keuangan

Manajemen Bank bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 28 Maret 2024.

c. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**31 Desember/December 31,
2023 dan 2022**

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)
Komisaris
Komisaris (Independen)

Rudy Hamdani
Ationo Teguh Basuki
Franisca Ekawati

Direksi

Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Kepatuhan

Dyota Mahottama Marsudi
Firdila Sari
Mayang Ekaputri
Baiq Nadea Dzurriatin

Board of Commissioners

President Commissioner (Independent)
Commissioner
Commissioner (Independent)

Board of Directors

President Director
Director
Director
Compliance Director

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

Increase Capital Without Going Through Pre-emptive Rights (PMTHMETD) (continued)

That PMTHMETD increased the Bank's issued/paid-up capital from Rp1,380,561,760,100 (full amount) to Rp1,465,561,760,100 (full amount). PMTHMETD has been recorded on Deed No. 32 dated January 17, 2023 of Yulia, S.H., Notary In Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0008480 dated January 19, 2023 (Note 22).

b. Completion of the financial statements

The Bank's management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Board of Directors of the Bank on March 28, 2024.

c. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board, Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Employees

Compositions of the Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Sharia Supervisory Board of the Bank as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2023 dan 2022
<u>Komite Audit</u>	
Ketua	Fransisca Ekawati
Anggota	Rudy Hamdani
Anggota (Independen)	Jeffri Sugiarto
Anggota (Independen)	Andreas Danny Soesanto
<u>Dewan Pengawas Syariah</u>	
Ketua	Prof. DR. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.
Anggota	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub S.Ag, M.Si.

Berdasarkan Surat Keputusan No. SK.001.BOD/07.2022 tertanggal 15 Juli 2022, Sekretaris Perusahaan Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Indira Indah Prameshwari.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 166/SK.DIR/NET.2020 tertanggal 9 Juli 2020, Kepala Divisi Audit Internal Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Senof Gremaldy.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen Kunci pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Direksi	11.595	11.052	Board of Directors
Dewan Komisaris	2.935	3.155	Board of Commissioners
Dewan Pengawas Syariah	837	770	Sharia Supervisory Board
Manajemen Kunci	26.401	24.091	Key Management

Personel manajemen kunci Bank terdiri dari Pemimpin Grup dan Pemimpin Divisi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank mempekerjakan masing-masing 291 dan 256 karyawan tetap (tidak diaudit).

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board, Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Employees (continued)

Compositions of the Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Sharia Supervisory Board of the Bank as of December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

	31 Desember/December 31, 2023 dan 2022
<u>Audit Committee</u>	
Chairman	Fransisca Ekawati
Member	Rudy Hamdani
Member (Independent)	Jeffri Sugiarto
Member (Independent)	Andreas Danny Soesanto
<u>Sharia Supervisory Board</u>	
Chairman	Prof. DR. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.
Member	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub S.Ag, M.Si.

Based on Decree No. SK.001.BOD/07.2022 dated July 15, 2022, the Bank's Corporate Secretary as of December 31, 2023 and 2022 is Indira Indah Prameshwari.

Based on Decree No. 166/SK.DIR/NET.2020 dated July 9, 2020, the Head of the Bank's Internal Audit Division as of December 31, 2023 and 2022 is Senof Gremaldy.

Salaries and other compensations paid to the Board of Commissioners and Directors, Sharia Supervisory Board and Key Management for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Direksi	11.595	11.052	Board of Directors
Dewan Komisaris	2.935	3.155	Board of Commissioners
Dewan Pengawas Syariah	837	770	Sharia Supervisory Board
Manajemen Kunci	26.401	24.091	Key Management

Bank's key management consist of Chief, Group Head and Division Head.

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank employs 291 and 256 permanent employees, respectively (unaudited).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2019), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102 (Revisi 2019), "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106, "Akuntansi Musyarakah", PSAK No. 107 (Revisi 2021), "Akuntansi Ijarah", PSAK No. 110 (Revisi 2020), "Akuntansi Sukuk", PSAK No. 111, "Akuntansi Wa'd", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2019), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Laporan Posisi Keuangan;
- 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 4) Laporan Arus Kas;
- 5) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
- 6) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
- 7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- 8) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai dengan prinsip syariah.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi bagi hasil.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS"), namely SFAS No. 101 (Revised 2019), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102 (Revised 2019), "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105, "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106, "Accounting for Musyarakah", and SFAS No. 107 (Revised 2021), "Accounting for Ijarah", SFAS No. 110 (Revised 2020) "Accounting for Sukuk", SFAS No. 111 "Accounting for Wa,d", and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), and Bapepam Regulation-LK No. VIII.G.7 Attachment to Decree of the Chairman of Bapepam and LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 concerning "Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements for Issuers or Public Companies".

Based on SFAS No. 101 (Revised 2019), a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

- 1) Statements of Financial Position;
- 2) Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income;
- 3) Statements of Changes in Equity;
- 4) Statements of Cash Flows;
- 5) Statements of Reconciliation of Income and Profit Sharing;
- 6) Statements of Sources and Uses of Zakat Funds;
- 7) Statements of Source and Uses of Qardhul Hasan Funds; and
- 8) Notes to the Financial Statements.

The statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

The financial statements are presented on the historical cost basis, unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account and prepared on accrual basis, except statement of cash flow and statement of reconciliation of income and revenue sharing.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak tanggal akuisisi.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi bagi hasil.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The statement of cash flows is prepared based on the direct method which presents receipt and withdrawal of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks maturing within 3 (three) months from the acquisition date.

The financial statements are presented on the historical cost basis, unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account and prepared on accrual basis, except statement of cash flow and statement of reconciliation of income and revenue sharing.

The statements of sources and distribution of zakat and sources and uses of qardhul hasan funds are statements that represent the Bank's role as mandate holder of social activities funds which are separately managed.

The statement of sources and distribution of zakat represents a statement showing the sources and the distribution of zakat funds for a certain period and the balance of undistributed funds on a specific date.

The statement of sources and uses of qardhul hasan funds represents statement of the sources and uses of qardhul hasan funds during certain period of time and balance of undistributed qardhul hasan on a specific date.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are rounded in millions of Rupiah.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten untuk laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The accounting policies are applied consistently in the financial statements for years ended December 31, 2023 and 2022, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

Efektif 1 Januari 2023, Bank menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") revisi yang relevan untuk Bank, sebagai berikut:

Effective on January 1, 2023, the Bank has applied revised Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") which are relevant to the Bank, as follows:

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian laporan keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi".
- Amendemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan".
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi".
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan tentang Pajak Tanggahan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal".

- Amendment of SFAS No. 1, "Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies".
- Amendments to SFAS No. 16, "Fixed Assets - Proceeds before Intended Use".
- Amendment of SFAS No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates".
- Amendment of SFAS No. 46, "Income Tax - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction".

Penerapan dari standar revisi tersebut tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya.

The implementations of such revised standards did not result in substansial changes to Bank's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior periods.

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

c. Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets and estimated losses on commitment and contingencies

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *musyarakah* dan komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit.

Earning assets consist of current accounts and placement with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts with other banks, investments in marketable securities, *murabahah* receivables, funds of *qardh*, *musyarakah* financing and commitments and contingencies with credit risk.

Aset non-produktif adalah aset selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian dan antara lain terdiri dari *suspense accounts*. *Suspense account* adalah akun yang tujuannya pencatatannya belum teridentifikasi dalam akun yang seharusnya.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets, which have potential loss and among others consist of *suspense accounts*. *Suspense account* are accounts with recording purposes not yet identified in the appropriate account.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Bank mengklasifikasikan aset produktif ke dalam satu dari lima kategori dan non-produktif ke dalam satu dari empat kategori. Aset produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai "Lancar" dan "Dalam Perhatian Khusus", sedangkan aset produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu: "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet". Kategori untuk aset non-produktif terdiri dari "Lancar", "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet".

Khusus untuk surat berharga kualitasnya ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Sedangkan untuk penyertaan modal kualitasnya ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Piutang murabahah

Sesuai dengan PSAK No. 102 (Revisi 2019), "Akuntansi Murabahah" dan PAPS 2013, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

c. Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets and estimated losses on commitment and contingencies (continued)

In accordance with Financial Service Authority Regulations (POJK), the Bank classifies earning assets into one of five categories and non-earning assets into one of four categories. Performing earning assets are categorized as "Current" and "Special Mention", while non-performing earning assets are categorized into three categories: "Substandard", "Doubtful" and "Loss". Non-Earning assets are divided into "Current", "Substandard", "Doubtful" and "Loss".

For marketable securities, the quality rating is classified into 3 (three) categories: current, substandard, and loss. For equity investments, the quality rating is determined into 4 (four) categories: current, substandard, doubtful, and loss.

Murabahah receivables

In accordance with SFAS No. 102 (Revised 2019), "Accounting for Murabahah" and PAPS 2013, the Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial assets or a group of financial assets is impaired at each statement of financial position date. A financial assets or a group of financial assets is deemed to be impaired and the value is reduced if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the assets (an incurred 'loss event') which has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

Bukti objektif penurunan nilai meliputi indikasi kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau debitur, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin pembiayaan restrukturisasi dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, kemungkinan bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya, dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan melalui akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan margin tetap diakui atas nilai tercatat yang telah diturunkan tersebut berdasarkan tingkat imbal hasil efektif awal yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dari aset tersebut. Jika pada periode berikutnya, jumlah estimasi kerugian penurunan nilai meningkat atau menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang sudah diakui sebelumnya dinaikkan atau diturunkan dengan menyesuaikan akun penyisihan.

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan menggunakan metode statistik dari data historis berupa probability of default pada masa lalu, waktu pengembalian, dan jumlah kerugian yang terjadi (Loss Given Default).

Aset produktif lainnya

Penilaian kualitas aset bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam POJK No. 2/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

c. Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets and estimated losses on commitment and contingencies (continued)

Objective evidence of impairment may include indications that the debtors or issuers are experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in principal or margin payments, financing restructuring with terms that may not be applied if the debtor is not experiencing financial difficulty, the probability that the debtor will enter bankruptcy or other financial reorganization, and observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of the debtor or issuer in the group or economic conditions that correlate with defaults in the asset in such group.

The carrying values of the assets is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Margin income continues to be accrued on the reduced carrying amount and is accrued using effective rate of return used to discount the future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. If, in subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account.

In determining the allowance for impairment losses of financial assets that was assessed collectively, the Bank uses statistical method of the historical data such as the probability of defaults, time of recoveries, the amount of loss incurred (Loss Given Default).

Other earning assets

The assessment of asset quality of commercial banks under sharia principle is regulated by Financial Service Authority Regulations (POJK) No. 2/POJK.03/2022 dated January 31, 2022 regarding "Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit".

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

c. Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets and estimated losses on commitment and contingencies (continued)

Aset produktif lainnya (lanjutan)

Other earning assets (continued)

Pedoman pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

The guidelines in determining the allowance for impairment losses on earning assets based on the aforementioned Financial Services Authority Regulation are as follows:

- a. Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.
- a. Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
 - 1) 5% dari aset produktif yang digolongkan dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
 - 2) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan
 - 3) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
- b. 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

- a. General reserve shall be at least 1% of total earning assets classified as current, excluding securities issued by the government based on sharia principles, as well as portion of the earning assets guaranteed by government guarantees and cash collaterals in the form of demand deposits, savings deposits, time deposits, guarantee deposits, and/or gold which are pledged and accompanied with the power of attorney for disbursement.
- b. Special reserve, shall be at least:
 - 1) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting collateral value;
 - 2) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting collateral value;
 - 3) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting collateral value; and
 - 4) 100% of earning assets classified as Loss after deducting collateral value.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

The criteria of assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Financial Services Authority regulation.

Cadangan kerugian penurunan nilai liabilitas komitmen dan kontinjensi dicatat pada akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi".

Allowance for impairment losses on commitments and contingencies is recorded under "Estimated Losses on Commitments and Contingencies" account.

Apabila pihak manajemen berpendapat bahwa aset produktif tersebut sudah tidak dapat ditagih kembali maka aset tersebut harus dihapusbukukan dengan cara saldo aset produktif dikurangkan dari masing-masing cadangan kerugian penurunan nilai.

If the management believes that certain earning assets are not recoverable then those assets should be written-off by deducting the balance of earning assets from their respective allowances.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

Aset produktif lainnya (lanjutan)

Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dalam tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan cadangan penghapusan aset produktif selama tahun berjalan, sedangkan penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan usaha lainnya.

d. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi

Dalam usahanya Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak berelasi sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
 - (ii) atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

c. Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets and estimated losses on commitment and contingencies (continued)

Other earning assets (continued)

Recovery of earning assets which are previously written-off during the year is recorded as a reduction to allowance for possible losses on earning assets during the year, while recovery of earning assets previously written-off in the previous years is recorded as other operating income.

d. Transactions and balances with related parties

In the normal course of business, the Bank enters into transactions with related parties. In these financial statements, the term related parties are defined under SFAS No. 7, "Related Parties Disclosures".

A party is considered as a related party of the Bank if:

- a. a person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - (i) has control or joint control of the reporting entity;
 - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. an entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - (i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a company of which the other entity is a member);

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
- (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 29 atas laporan keuangan.

e. Giro pada bank Lain

Giro pada Bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari Bank umum konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*). Penerimaan jasa giro tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas Bank.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Transactions and balances with related parties (continued)

- b. an entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)
- (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
 - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - (vii) a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

Transactions with related parties are conducted under terms agreed by both parties, whereby such terms may not be the same as other transactions undertaken by third parties.

All significant transactions and balances with related parties, are financial in the notes to the financial statement and the financial presented in Note 29 of these financial statements.

e. Current accounts with other banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balance net of allowance for impairment losses. Bonuses received from commercial banks based on sharia principles are recognized as other operating income. Interest on current accounts placed with non-sharia banks are not recognized as the Bank's income but are recorded as part of the *qardhul hasan* funds. The interest from current accounts with non-sharia banks will be recorded as Bank's liabilities before being distributed.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

f. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

**f. Current accounts and placements with Bank
Indonesia**

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penempatan dana pada Bank Indonesia berupa FASBIS. Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of *wadiah* current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of FASBIS. Placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances of placements.

g. Investasi pada surat berharga

g. Investment in marketable securities

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (Sukuk), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) dan Reksadana.

Sharia marketable securities is a proof of investment under the sharia principles commonly traded in sharia money market and/or sharia stock exchange, such as sharia bonds (Sukuk), Bank Indonesia Sharia Certificate (SBIS), Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA) and Mutual Funds.

Investasi pada surat berharga sukuk diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank dan arus kas kontraktual pada saat pembelian surat berharga tersebut sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2020), "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

Investment in sukuk marketable securities are classified based on business model determined by the Bank and contractual cash flows at the date of purchase of the securities in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2020), "Accounting for Sukuk" as follows:

- (i) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto dtisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- (ii) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalaoran laba rugi periode yang bersangkutan.
- (iii) Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

- (i) At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount where premium and discount are amortized over the period until maturity.
- (ii) At fair value securities are stated at fair values through profit or loss where unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current period profit or loss.
- (iii) At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value where unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

g. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

**g. Investment in marketable securities
(continued)**

Sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan karena investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.

Sukuk was classified as measured at amortized cost as the investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.

Investasi dalam unit reksadana syariah dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

Investment in sharia mutual funds are presented at market value based on net asset value of mutual funds on statement of financial position date.

SIMA merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*. SIMA disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

SIMA is a certificate issued by Sharia Bank or Sharia Business Unit (UUS) which used as short-term investment in the interbank money market based on sharia principles with a mudharabah agreement. SIMA is presented at cost less allowance for impairment losses.

Cadangan kerugian diakui sesuai dengan pedoman dari OJK dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada surat berharga.

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of OJK and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

h. Piutang dan pinjaman

h. Receivables and financing

Piutang *murabahah*

Murabahah receivables

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli.

Murabahah is the sale and purchase of goods in which the selling price is determined based on acquisition cost added with mutually agreed margin and the seller shall disclose the acquisition cost to the buyer.

Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan margin yang ditangguhkan yang dapat direalisasikan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas piutang *murabahah* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

Murabahah receivables are stated at the balance of the receivable less deferred margin and allowance for impairment losses. The Bank provides allowance for impairment losses based on the review of the quality of individual murabahah receivables balance.

Pinjaman *qardh*

Funds of *qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh* yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dimana nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Funds of qardh represent a distribution of fund with qardh contract, which is a borrowing contract whereby the borrower should repay the loan at a specified period of time.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

h. Piutang dan pinjaman (lanjutan)

h. Receivables and financing (continued)

Pinjaman *qardh* (lanjutan)

Funds of *qardh* (continued)

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Funds of *qardh* are recognized at the same amount of funds lent when these occur. Any excess amount paid by the borrower in repaying a *qardh* is recognized as revenue when these are incurred. On the statement of financial position date, funds of *qardh* is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Pembiayaan *musyarakah*

Musyarakah financing

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musyarakah financing is a partnership contract among fund's owners (*musyarakah* partners) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position dates, *musyarakah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the existing financing quality.

i. Aset tetap dan aset hak guna

i. Fixed assets and right of use assets

Aset tetap

Fixed assets

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat adalah sebagai berikut:

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Fixed assets are depreciated from the month of the usage of assets and depreciated using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

Tahun/Years

Renovasi bangunan yang disewa	5	Leasehold improvements
Peralatan kantor	5	Office equipment
Kendaraan	4	Vehicles
Komputer	5	Computers

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

i. Aset tetap dan aset hak guna (lanjutan)

**i. Fixed assets and right of use assets
(continued)**

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada saat terjadinya, pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Pada saat aset tetap sudah tidak digunakan lagi atau dijual, nilai buku dan akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut dikeluarkan dari akun aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

The cost of repair and maintenance are charged to operations as incurred, significant renewal and improvement are capitalized. When assets are retired or otherwise disposed, their cost and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is recorded in current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Nilai tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying value of property and equipment is derecognized upon disposal or when there are no future economic benefits expected from its use or disposal. Gains or losses arising from derecognition of the assets (calculated as the difference of the net proceeds from disposal and the carrying amount of the assets) is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the period the asset is derecognized.

Nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset diestimasi ketika kejadian atau perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak sepenuhnya dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai kerugian pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

The recoverable value of an assets is estimated when events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be fully recoverable. Assets impairment, if any, is recognized as a loss in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi dan dicatat sebagai "Aset dalam Pembangunan". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait pada saat proses konstruksi atau pemasangan telah selesai dan aset siap digunakan.

The accumulated costs of construction of fixed assets are capitalized and recognized as "Assets Under Construction". These costs are reclassified to the related fixed asset account when the construction or installation is completed and the asset is ready for its intended use.

Aset hak guna

Right of use assets

- Terdapat aset identifikasian;
- Bank secara substansial menikmati manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian;
- Bank memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian dimaksud.

- There are identifiable assets;
- Banks substantially receives the economic benefits of using identifiable assets;
- The Bank has the right to control those identifiable asset



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

i. Aset tetap dan aset hak guna (lanjutan)

**i. Fixed assets and right of use assets
(continued)**

Pada tanggal insepasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Bank mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

At the inception date or at the time of revaluation of a contract containing a lease component, the Bank allocates the consideration in the contract to each component of the lease based on the relative separate prices of the lease component. Lease payments that are included in the measurement of lease liabilities include:

- i. pembayaran lunas dimuka
- ii. pembayaran angsuran tetap
- iii. pembayaran angsuran sewa secara variabel yang bergantung pada fluktuasi pembayaran sewa yang ditetapkan oleh counterpart

- i. prepayments
- ii. fixed installment payments
- iii. variable lease installment payments based on fluctuations in lease payments determined by the counterpart

Berdasarkan PSAK No. 73, Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Setelah tanggal permulaan, aset hak guna diukur pada biaya perolehan. Aset hak guna diukur sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif.

In accordance with SFAS No 73, the Bank recognizes the rights of use assets and lease liabilities. Rights of use assets are initially measured at cost, which consists of the initial measurement amount of the lease liabilities adjusted for lease payments made on or before the inception date, plus the initial direct costs incurred. After the commencement date, rights of use assets are measured using the cost basis. Rights of use assets are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Lease liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate.

Bank menerapkan pengecualian atas sewa:

Banks apply exceptions to the lease:

- Dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Dengan nilai pendasar rendah.

- With a term less than or equal to 12 months and no purchase options;
- With low base value.

Untuk sewa yang tidak memenuhi kriteria PSAK No. 73 maka diperlakukan sebagai sewa operasi biasa.

For rent that does not meet the criteria of SFAS No. 73 then it is treated as a regular operating lease.

j. Aset tak berwujud

j. Intangible assets

Perangkat lunak yang bukan merupakan bagian dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset tak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Computer software which is not an integral part of the related hardware is recorded as intangible assets and stated at carrying value, which is cost less accumulated amortization.

Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam persiapan perangkat lunak tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Cost of software consists of all expense directly attributable to the preparation of such software to be used for its intended purpose.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Aset tak berwujud (lanjutan)

Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat terkait sehingga menjadi lebih besar dari standar kinerja yang diperkirakan semula. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaatnya, yaitu 5 (lima) tahun.

k. Aset lain-lain

Terdiri dari aset yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos sebelumnya, termasuk di dalamnya biaya dibayar dimuka. Aset lain-lain dinyatakan sebesar nilai tercatat.

l. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

m. Simpanan dari nasabah

Simpanan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*.

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada Bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Terhadap titipan tersebut, Bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang tabungan di Bank.

j. Intangible assets (continued)

Subsequent expenditure on software is capitalized only when it increases the future economic benefits of the software so that it becomes higher than the standard performance originally expected. Expenditure with no addition of future economic benefits of the software is directly recognized as expense when incurred

Computer software is amortized by using straight-line method over the estimated useful life of the software, which is 5 (five) years.

k. Other assets

These represent assets that cannot be classified under the above accounts, including prepaid expenses. Other assets are stated at carrying value.

l. Liabilities due immediately

Liabilities due immediately represent Bank's liabilities to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Liabilities due immediately are stated at the amounts of the Bank's liabilities to the entrustee.

m. Deposits from customers

Deposits represent other parties' deposits in the form of *wadiah* demand deposits.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments and available for withdrawal at any time through cheque and demand deposit drafts, and receive bonuses according to the Bank policies. *Wadiah* demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors.

Wadiah savings deposits are customers' deposits in the Bank which can be withdrawn at any time. For these deposits, the Bank is not required to give any benefits except in terms of voluntary bonuses. *Wadiah* deposits are stated at the amount payable to customers.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2023 and
 for the Year Then Ended
 (Expressed in Million of Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Surat berharga yang diterbitkan

n. Securities issued

Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank dan digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek pada Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dengan akad *mudharabah*.

Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA) is a certificate issued by a Bank and is used as a means of short-term investment in the Interbank Money Market based on sharia principles (PUAS) with a mudharabah contract.

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIPA) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dengan akad *wakalah bi al-istitsmar*.

Interbank Sharia Fund Management Certificate (SIPA) is a certificate issued by a Bank as a statement of acceptance of fund management in the Interbank Money Market based on sharia principles (PUAS) with a wakalah bi al-istitsmar contract.

SIMA dan SIPA disajikan sebesar biaya perolehan nilai kewajiban bank kepada bank lain.

SIMA and SIPA are presented at cost less allowance for impairment losses.

o. Dana syirkah temporer

o. Deposits from customers

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib/Bank*) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Temporary syirkah funds represent investments from other parties on the basis of mudharabah mutlaqah in which the owners of the funds (shahibul maal) entrust the fund manager (mudharib/Bank) in managing their investments with a pre-agreed profit-sharing distribution. Temporary syirkah funds consist of mudharabah demand deposits and mudharabah time deposits

Giro *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang dapat ditarik setiap saat dan mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Giro *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan nasabah.

Mudharabah demand deposits represent third party funds that can be withdrawn at any time and receive predetermined and pre-agreed profit-sharing ratio (nisbah) from income derived by the Bank from the use of such funds. Mudharabah demand deposits are stated based on the customer's demand deposits balance.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn only at a certain point in time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed by deposit holder and the Bank.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

o. Dana syirkah temporer (lanjutan)

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi pendapatan.

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan pembiayaan akad *murabahah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan keuntungan transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Metode yang diterapkan oleh Bank adalah metode efektif (*anuitas*) sesuai dengan jangka waktu akad.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Deposits from customers (continued)

Temporary *syirkah* funds cannot be classified as liability. This is because the Bank does not have any liability to return the fund to the owners, except for losses due to the Bank's management's negligence or misrepresentation. On the other hand, temporary *syirkah* funds also cannot be classified as equity, because of the existence of maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholder such as voting rights and the rights of realized gain from current assets and other non-investment accounts.

Temporary *syirkah* funds represent one of the financial position report, accounts which is in accordance with sharia principle which give right to the Bank to manage and invest funds, including mixing of one fund with the other funds.

The owners of temporary *syirkah* funds receive parts of profit in accordance with the agreement and borne loss based on proportion to the total funds. The profit distribution of temporary *syirkah* funds can be based on profit sharing or revenue sharing concept.

Income from fund managed by the Bank as *mudharib* consists of income from financing with *murabahah* and other main operating income.

Income recognition from *murabahah* transaction with deferred payment or installment is conducted over the period of the contract in line with the level of risk and effort to realize the income. The method implemented by the Bank is effective method (*annuity*) based on the term of the contract.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

o. Dana syirkah temporer (lanjutan)

Pendapatan murabahah yang termasuk marjin ditangguhkan dan pendapatan administrasi, diakui dengan menggunakan metode yang setara dengan tingkat imbal hasil efektif, yaitu tingkat imbal hasil setara yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas pada masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Perhitungan dilakukan dengan memperhitungkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual dari instrumen keuangan termasuk biaya dan biaya tambahan yang timbul secara langsung untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari efektif marjin.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi keuntungan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai *non-performing*.

Setoran dari debitur dengan kualitas *non-performing* diperlakukan sebagai pengembalian harga perolehan atau pokok piutang/pembiayaan. Kelebihan pembayaran diatas harga perolehan atau pokok piutang/pembiayaan diakui sebagai pendapatan pada saat diterimanya.

Pendapatan atas pinjaman *qardh* diakui sebesar ujah yang diterima. Pendapatan atas pinjaman *qardh* yang dananya berasal dari dana pihak ketiga termasuk kedalam pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* dan akan dibagikan kepada nasabah.

**p. Pendapatan pengelolaan dana sebagai
*mudharib***

Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, pendapatan *ujrah qardh*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Deposits from customers (continued)

Murabahah income which includes deferred margin and administrative income, are recorded using the effective rate of return method, which is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial assets or financial liability. The calculation takes into account all contractual terms of the financial instrument and includes any fees or incremental costs that are directly attributable to the instrument and are an integral part of the effective financing rate.

The Bank prescribes the risk rating policies based on the internal regulations. The Bank discontinues the amortization of deferred income at the time its financing is classified as non-performing.

Repayment from debtors classified as non-performing is treated as repayment of acquisition cost or principal of receivable/financing. Payment in excess of the acquisition cost or principal of receivable/financing will be recognized as income when it received.

Revenue from funds of qardh is recognized in the amount of ujah received. Income from funds of qardh whose funds come from third party funds is included in the management of funds by the bank as a mudharib and will be shared with the customer.

p. Income from fund management as mudharib

Income from fund management as mudharib consists of income from murabahah receivables transactions, qardh ujah income, profit sharing from musyarakah financing and other main operating income.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**p. Pendapatan pengelolaan dana sebagai
mudharib (lanjutan)**

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*.

Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) dan giro pada bank lain. Pendapatan usaha utama lainnya diakui secara akrual (*accrual basis*).

**q. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana
syirkah temporer**

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi laba milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian laba dilakukan berdasarkan prinsip bagi laba, yaitu dihitung dari pendapatan Bank.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**p. Income from fund management as mudharib
(continued)**

Income from *murabahah* receivables is recognised using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the *murabahah* receivables.

When calculating the effective margin, the Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Musyarakah income which is distributed to active partners is recognised in accordance with the agreement, while *musyarakah* income which is distributed to passive partners is recognised as right of the passive partner to profit sharing and liability.

Other main operating income consists of income derived from Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS), Bank Indonesia Sharia Deposit Facility, Certificate of Interbank *Mudharabah* Investment (SIMA) and current account with other banks. Other main operating income is recognized on an accrual basis.

**q. Third parties' share on returns of temporary
syirkah funds**

Third parties' share on returns of temporary *syirkah* funds represents fund owners' share on the profit of the Bank derived from managing of such fund under *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* and *mudharabah musytarakah* principles. The profit sharing is determined on cash basis.

Distribution of profit is based on profit sharing principle which is calculated based on the Bank's revenue.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

q. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana
syirkah temporer (lanjutan)

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan dan aset produktif lainnya akan dibagikan kepada penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut dibagikan pada nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis imbalan.

r. Provisi dan komisi

Provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan dan/atau jangka waktu tertentu, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan setara tingkat imbal hasil efektif sesuai dengan jangka waktunya. Provisi dan komisi sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan sebelum tempo diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat penyelesaian. Provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan dan/atau tidak untuk jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi.

s. Dana kebajikan

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja dikenakan berupa denda sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

t. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal-tanggal transaksi tersebut. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs spot Reuters pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) yang berlaku pada tanggal tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

q. Third parties' share on returns of temporary
syirkah funds (continued)

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank, based on the proportion of the fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit-sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as *shahibul maal* and the Bank as *mudharib* based on a predetermined ratio. Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely entitled to the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions

r. Fees and commissions

Fees and commissions directly related to the lending activities and/or which cover a specific period are deferred and amortized using effective rate of return over the respective periods. Fees and commissions related to financing settled prior to maturity is recognized as revenue or expense upon settlement. Fees and commissions, which are indirectly related to the financing activities and/or do not cover specific periods, are recognized upon execution of the transactions.

s. Qardhul hasan funds

Penalties/sanctions are charged to debtors who are able to pay, but deliberately delay payments, in the amount that are not agreed and not determined on the contract. The funds from penalties/sanctions will be used for charity funds/qardhul hasan funds.

t. Foreign currency translation

Transactions denominated in foreign currency are converted into Rupiah using the spot rate at those transaction dates. At the financial position report dates, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated using the Reuters spot rate at 16.00 Western Indonesia Time (WIB) prevailing at that date.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut (nilai penuh):

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah/1 Dolar AS	15.397,00	15.567,50	Rupiah/US Dollar 1

u. Imbalan kerja

Bank diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan yang merupakan liabilitas imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

t. Foreign currency translation (continued)

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currency and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023 and 2022, the exchange rates used are as follows (full amount):

u. Employee benefits

The Bank is required to provide minimum pension benefits as stipulated in the Labor Law and Company Regulation which represents an underlying defined benefit obligation.

The liability recognized in the statement of financial position in respect to defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no active market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

The liability recognized in the statement of Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Imbalan kerja (lanjutan)

u. Employee benefits (continued)

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

The Bank also provides other post-employment benefits, such as service pay, and separation pay. The service pay benefit is vested when the employees reach their retirement age. The separation pay benefit is paid to employees in the case of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

v. Pajak penghasilan

v. Income tax

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak periode berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak pada masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current period. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between commercial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefit, such as the carry-forward of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent that realization of such tax benefit is probable.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyesuaian untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan ke ekuitas.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the assets are realized or the liabilities is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statements of financial position dates. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Benefit/(Expense)" and included in the net income or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Pajak penghasilan (lanjutan)

Koreksi atas liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka perubahan diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut ditetapkan.

w. Pendapatan imbalan jasa perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan pada umumnya diakui pada saat kas diterima, kecuali selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi yang diakui secara akrual.

x. Laba neto per saham dasar

Laba neto per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto dengan rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Adanya unsur ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

a. Pertimbangan dalam penerapan kebijakan akuntansi

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuannya untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya pada masa mendatang.

Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Income tax (continued)

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment is received or, if there is objection or appeal, when the decision on the objection and or the result of the appeal is received.

w. Fee based income from banking services

Fee based income from banking services are generally recognized when cash is received, except for the unamortized discount/premium which is recognized on accrual basis.

x. Basic earning per share

Basic earnings per share is computed by dividing net income with the weighted average number of shares issued and fully paid during the year.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgments, estimates, and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those that have been estimated.

a. Judgment made in applying accounting policies

Going concern

The Bank's management has made an assessment of its ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business in the foreseeable future.

Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pertimbangan dalam penerapan kebijakan
akuntansi (lanjutan)

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak Bank. Bank menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak pada laba rugi. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak badan (Catatan 2v).

b. Sumber utama ketidakpastian estimasi

Penurunan nilai aset keuangan

Bank menelaah kualitas aset pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan harus dicatat dalam laporan laba rugi dan menghasilkan komprehensif lain. Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan pada masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

a. Judgment made in applying accounting
policies (continued)

Fair value of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but when observable market data are not available, management's judgment is required to establish fair values. The management's judgment includes considerations of liquidity and model inputs such as discount rates, early payment rates and default rate assumptions.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for tax. The Bank provides tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit and loss. The Bank recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of corporate taxable income (Note 2v).

b. Key sources of estimation uncertainty

Impairment losses on financial assets

The Bank reviews the quality of its assets at each statement of financial position date to assess whether an impairment loss should be recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income. In determining whether an impairment loss should be recorded in the statement of profit or loss, the Bank makes an assessment whether there is any indication of impairment in the quality of the assets. These estimates are based on assumptions of several factors and actual results may differ, resulting in future changes to the allowance for impairment.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**b. Sumber utama ketidakpastian estimasi
(lanjutan)**

Penurunan nilai aset non-keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") melebihi nilai terpulihnya, yaitu yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya yang menjual dan nilai pakainya.

Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Nilai pakai ditentukan dengan menggunakan estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut. Estimasi nilai yang dapat terulihkan tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan pada masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat, dan tingkat laba fiskal pada masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 2v).

Penyisihan imbalan kerja karyawan

Penyisihan imbalan kerja karyawan ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaris. Perhitungan aktuaris menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan lain-lain (Catatan 2w). Karena imbalan kerja tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

**b. Key sources of estimation uncertainty
(continued)**

Impairment losses on non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or Cash Generating Unit ("CGU") exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use.

The fair value less costs to sell calculation is based on available data from the binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

Value in use is determined using the estimated future cash flows which are discounted using a pre-tax discount rate that reflects current market assessment of the time value of money and the risk specific to the assets. These estimates of recoverable amount are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting in future changes to the allowance for impairment.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available to compensate the temporary differences which result in such deferred tax assets. Management's judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable income together with future tax planning strategies (Note 2v).

Provision for employee benefits

Provision for employee benefits programs is determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, expected rate of returns on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rates and others (Note 2w). Due to the long-term nature of these employee benefits, such estimates are subject to significant uncertainty.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Sumber utama ketidakpastian estimasi
(lanjutan)

Umur ekonomis aset tetap dan perangkat lunak

Manajemen Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap dan perangkat lunak berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset tidak berwujud ditinjau secara berkala dan diperbaharui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut (Catatan 2i dan 2j).

Menentukan jangka waktu kontrak - Bank sebagai lessee

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan.

Bank memiliki kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah lessee cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang sewa.

4. KAS

Kas yang dimiliki seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank memiliki saldo kas masing-masing sebesar Rp1.013 dan Rp651.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah mengasuransikan *cash in safe* dan *cash in transit* kepada PT Asuransi Central Asia Syariah, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.500 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko yang ada.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Key sources of estimation uncertainty
(continued)

Economic life of fixed assets and software

The Bank's Management estimates the useful lives of fixed assets and software based on the period over which the assets are expected to be available for use. The useful life of each item is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical and technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the used of the asset (Note 2i and 2j).

Determine the term of the contract - the Bank is the lessee

The Bank determines the lease term as the term of the lease that non-cancellable, along with the period covered by the option to extend the lease if it is certain to be exercised.

The Bank has lease contracts which include an option to extend the lease term. The Bank applies its judgment in evaluating whether it can be ascertained if it will exercise the option to extend the lease. This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend the lease. After the commencement date, the Bank reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend the lease.

4. CASH

Cash was all denominated in Rupiah. As of December 31, 2023 and 2022, the Bank's cash amounted to Rp1,013 and Rp651, respectively.

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank has insured cash in safe and cash in transit to PT Asuransi Central Asia Syariah, a third party, under blanket policies amounting to Rp1,500, respectively, which management believes is adequate to cover possible losses arising from such risks.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah	423.140
Dollar Amerika Serikat	770
Total	423.910

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	31 Desember/ December 31, 2022	
	82.575	Rupiah
	778	United States Dollar
Total	83.353	Total

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ("PADG") No. 2/PADG/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang "Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2023 yang mana mewajibkan setiap bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 7,5% dan 1% dari dana pihak ketiga ("DPK") dalam Rupiah dan valuta asing.

The MRR ratio as at 31 December 2023 is calculated based on Member of the Board of Governors Regulation ("PADG" No. 2/PADG/2023 dated 24 March 2023 concerning "Implementation Regulations for Fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units" came into force on 1 April 2023, and regulates that each bank is required to maintain a MRR in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 7.5% and 1% of third party funds ("TPF") in Rupiah and foreign exchange.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung berdasarkan PADG No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang "Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 yang mana mewajibkan setiap bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 7,5% dan 1% dari DPK dalam Rupiah dan valuta asing.

The MRR ratio as at 31 December 2022 is calculated based on PADG No. 24/8/PADG/2022 dated 30 June 2022 concerning "Implementation Regulations for Fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units" came into force on 1 July 2022, and regulates that each bank is required to maintain a MRR in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 7.5% and 1% of TPF in Rupiah and foreign exchange.

Dalam perhitungan kewajiban pemenuhan GWM Rupiah, terdapat komponen insentif GWM sesuai PADG No. 24/12/PADG/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang "Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif (Perubahan PADG Insentif)", serta disinsentif RIM sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

In calculating the fulfillment of Rupiah statutory reserves, there is a MRR incentive component which is in accordance with the PADG No. 24/12/PADG/2022 dated 20 July 2022 concerning "Amendment to the Member of the Board of Governors Regulation Number 24/4/PADG/2022 concerning Regulations for Implementation of Incentives for Banks Providing Provision of Funds for Certain and Inclusive Economic Activities (Changes to PADG Incentives)", as well as disincentives RIM according to Bank Indonesia Regulation Number 21/12/PBI/2019 dated 25 November 2019 concerning "Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 20/4/PBI/2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit".

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 yang berlaku sejak 1 Mei 2021 dan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 yang berlaku sejak 28 November 2019, terdapat perubahan perhitungan GWM *Financing to Deposit Ratio* ("FDR") menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial ("RIM"). Bank harus memelihara tambahan GWM jika RIM Bank kurang dari batas bawah 84% atau melebihi batas atas target Bank Indonesia sebesar 94%.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, insentif yang diterima oleh Bank masing-masing sebesar 1% dan 1,1%.

Rasio Giro Wajib Minimum Bank:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah harian	0,00%	0,00%	Rupiah-daily
Rupiah rata-rata	13,46%	10,39%	Rupiah-average
Dolar Amerika Serikat	157,73%	157,73%	United States Dollar

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
(Continued)**

In addition, based on Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 which is effective from 1 May 2021 and Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 which is effective from 28 November 2019, there are changes in the calculation of MRR *Financing to Deposit Ratios* ("FDR") to the *Macroprudential Intermediation Ratio* ("RIM"). Bank must pay additional *Statutory Reserves* if the Bank's RIM is less than the lower limit of 84% or exceeds the upper limit of the Bank Indonesia target of 94%.

As of December 31, 2023 and 2022, the incentives amount received by the Bank 1% and 1.1%, respectively

The Bank's Minimum Reserve Requirement:

The Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the MRR as of December 31, 2023 and 2022.

6. GIRO PADA BANK LAIN

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Sinarmas Tbk	12.463	56	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	231	157	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	100	955	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
	12.794	1.168	
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	694	702	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
	13.488	1.870	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(135)	(19)	Allowance for impairment losses
Neto	13.353	1.851	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Saldo awal	19	24	Beginning balance
Pembentukan (pembalikan) selama tahun berjalan	117	(9)	Provision (reversal) during the year
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	(1)	4	Foreign exchange translation adjustment
Saldo akhir	<u>135</u>	<u>19</u>	Ending balance

Jumlah minimum cadangan kerugian giro pada bank lain yang wajib dibentuk pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

The movement of the allowance for impairment losses of current accounts with other banks as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

The amount of the minimum allowance for losses on current accounts with other banks that should be provided on December 31, 2023 and 2022 are in compliance with Financial Services Authority (OJK) regulations.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on current account with other banks established is adequate.

Rata-rata tingkat imbal bagi hasil per tahun adalah sebagai berikut:

Average annual rate of return are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Rupiah	1,16%	1,46%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0,14%	0,19%	United States Dollar

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua giro pada bank lain diklasifikasikan sebagai kolektibilitas lancar berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

As of December 31, 2023 and 2022, all current accounts with other banks are classified as current collectibility based on Financial Services Authority (OJK) regulations.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat giro pada bank lain yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2023 and 2022, no current accounts with other bank are pledged as collaterals.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Rupiah			Rupiah
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	<u>1.752.700</u>	<u>1.734.100</u>	Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (FASBIS)

Jangka waktu penempatan pada fasilitas FASBIS adalah 1 hari masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA

The placement period of the FASBIS facility is 1 day as of December 31, 2023 and 2022.

Tingkat bonus yang diterima dari penempatan pada fasilitas FASBIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing berkisar antara 4,75% sampai dengan 5,25% dan 2,75% sampai dengan 4,75%.

Bonus rates received from placement on FASBIS facility for the years ended December 31, 2023 and 2022 were ranging from 4.75% to 5.25% and 2.75% to 4.75%, respectively

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, penempatan pada Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai kolektibilitas lancar berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia yang dijadikan jaminan.

**7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA
(continued)**

As of December 31, 2023 and 2022, placement with Bank Indonesia are classified as current collectibility based on Financial Services Authority (OJK) regulations.

As of December 31, 2023 and 2022, no placement with Bank Indonesia are pledged as collaterals.

8. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

8. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES

a. By type and currency

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022		
	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai tercatat/ Nilai wajar/ Carrying amount/ Fair value	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai tercatat/ Nilai wajar/ Carrying amount/ Fair value	
Diukur pada biaya perolehan Rupiah					Measured At cost Rupiah
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	617.700	615.779	902.700	899.533	Government Islamic Securities (SBSN)
Sukuk Bank Indonesia	10.000	10.000	44.920	44.920	Bank Indonesia Sukuk Interbank Mudharabah
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	325.000	325.000	-	-	Investment Certificate (SIMA)
Total	952.700	950.779	947.620	944.453	Total
Tersedia untuk dijual Rupiah					Available-for-sale Rupiah
Reksadana Syariah	328.025	328.025	275.000	275.363	Sharia Mutual Funds
Sukuk Bank Indonesia	131.888	131.088	-	-	Bank Indonesia Sukuk
Total	1.412.613	1.409.892	1.222.620	1.219.816	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai		(6.530)		(2.754)	Allowance for impairment losses
Investasi pada surat berharga - neto		1.403.362		1.217.062	Investment in marketable securities - net

**b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo sesuai
kontrak**

b. By remaining contractual period to maturity

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022		
Diukur pada biaya perolehan					Measured at cost
Sampai dengan 1 tahun		693.139		331.074	Up to 1
Lebih dari 1-5 tahun		237.659		593.398	Over 1-5 years
Di atas 5 Tahun		19.981		19.981	Over 5 years
Tersedia untuk dijual					Available-for-sale
Sampai dengan 1 tahun		131.088		-	Up to 1 year
Tidak memiliki kontrak jatuh tempo		328.025		275.363	No contractual maturity
		1.409.892		1.219.816	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(6.530)		(2.754)	Allowance for impairment losses
Total		1.403.362		1.217.062	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

**8. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES
(continued)**

c. Berdasarkan penerbit

c. By issuer

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pemerintah Republik Indonesia	615.779	899.533	Government of the Republic of Indonesia
Bank lain	325.000	-	Other banks
Bank Indonesia	141.088	44.920	Bank Indonesia
Korporasi	328.025	275.363	Corporate
	1.409.892	1.219.816	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.530)	(2.754)	Allowance for impairment losses
Total	1.403.362	1.217.062	Total

d. Informasi lain

d. Other information

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua investasi pada surat berharga diklasifikasikan sebagai kolektibilitas lancar berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

As of December 31, 2023 and 2022, all investment in marketable securities are classified as current collectibility based on Financial Services Authority (OJK) regulations.

Bank mengakui keuntungan yang belum direalisasi masing-masing sebesar Rp2.120 dan Rp363 dari perubahan nilai wajar efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dalam akun "Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual" dalam laporan posisi keuangan.

The Bank recognized unrealized gain amounting to Rp2,120 and Rp363, respectively from the changes in fair value of available-for-sale marketable securities as of December 31, 2023 and 2022 which is presented as "Unrealized gain on available-for-sale marketable securities" in the statement of financial position.

Selama tahun 2023 dan 2022, Bank melakukan penjualan sejumlah efek-efek dan membukukan keuntungan neto masing-masing sebesar Rp4.070 dan Rp12.365 yang dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

During 2023 and 2022, the Bank sold some of its securities and booked net gain of Rp4,070 and Rp12,365, respectively, which was recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, the movement in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal	2.754	3.068	Beginning balance
Penambahan (pembalikan) selama tahun berjalan	3.776	(314)	Additional (Reversal) during the year
Saldo akhir	6.530	2.754	Ending balance

Jumlah minimum cadangan kerugian investasi pada surat berharga yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

The amount of the minimum allowance for losses on investment in marketable securities that should be provided on December 31, 2023 and 2022 is in compliance with Financial Service Authority (OJK) regulations.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

8. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. Informasi lain (lanjutan)

d. Other information (continued)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on investment in marketable securities established is adequate.

Pada tanggal 31 Desember 2023, investasi pada surat berharga yang dijadikan jaminan adalah Rp617.700 (Catatan 18).

As of December 31, 2023, investment in marketable securities are pledged as collaterals amounting to Rp617,700 (Note 18).

9. PIUTANG MURABAHAH

9. MURABAHAH RECEIVABLES

a. Berdasarkan sektor ekonomi, mata uang dan kolektibilitas

a. By economic sector, currency and collectibility

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah			<i>Rupiah</i>
Lancar			<i>Current</i>
Sosial/kesehatan	500.000	500.000	<i>Social/health</i>
Perdagangan	125.409	35.752	<i>Trading</i>
Biro Perjalanan Wisata	94.679	-	<i>Tour & Travel Agency</i>
Konstruksi	53.083	-	<i>Construction</i>
Industri Pengolahan	24.862	-	<i>Processing Industry</i>
Rumah tangga	16.536	1.246	<i>Household sector</i>
Pengangkutan	-	240.000	<i>Transportation</i>
Jasa konsultan	-	50.000	<i>Consultant services</i>
Total	814.569	826.998	<i>Total</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.924)	(30.282)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	790.645	796.716	Net

b. Berdasarkan jangka waktu perjanjian

b. By contractual period

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah			<i>Rupiah</i>
Lancar			<i>Current</i>
≤ 1 tahun	233.399	825.751	<i>≤ 1 year</i>
> 1 - ≤ 2 tahun	565.603	506	<i>> 1 - ≤ 2 years</i>
> 2 - ≤ 5 tahun	15.406	741	<i>> 2 - ≤ 5 years</i>
> 5 tahun	161	-	<i>> 5 years</i>
Total	814.569	826.998	<i>Total</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.924)	(30.282)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	790.645	796.716	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

9. MURABAHAH RECEIVABLES (continued)

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo sesuai kontrak

c. By contractual remaining period to maturity

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Lancar			Current
> 1 - ≤ 3 bulan	85.250	50.000	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	713.518	776.118	> 3 - ≤ 12 months
> 1 - ≤ 2 tahun	3.554	880	> 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 tahun	12.247	-	> 2 - ≤ 5 years
Total	814.569	826.998	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.924)	(30.282)	Allowance for impairment losses
Neto	790.645	796.716	Net

d. Berdasarkan hubungan

d. By relationship

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Pihak ketiga	814.488	826.998	Third party
Pihak berelasi	81	-	Related party
Total	814.569	826.998	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.924)	(30.282)	Allowance for impairment losses
Neto	790.645	796.716	Net

e. Informasi penting lainnya

e. Other significant information

Tingkat marjin keuntungan piutang dalam Rupiah berkisar antara 6,5% sampai dengan 13% per tahun untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 6,5% sampai dengan 11% per tahun untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

The profit margin rate on receivables in Rupiah range from 6.5% to 13% per annum for the year ended December 31, 2023 and 6.5% to 11% per annum for the year ended December 31, 2022.

Tingkat marjin keuntungan piutang kepada karyawan Bank dalam Rupiah masing-masing berkisar 6,00% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The profit margin rate on receivables to the Bank's employees in Rupiah range from 6.00% per annum for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

Pendapatan marjin *murabahah* yang ditangguhkan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp12.744 dan Rp81.294.

Deferred *murabahah* margin income as of December 31, 2023 and 2022 are Rp12,744 and Rp81,294, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

9. MURABAHAH RECEIVABLES (continued)

e. Informasi penting lainnya (lanjutan)

e. Other significant information (continued)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on *murabahah* receivables are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal (Pembalikan) pembentukan selama tahun berjalan	30.282	-	Beginning balance
	(6.358)	30.282	(Reversal) provision during the year
Neto	23.924	30.282	Net

Fasilitas yang tidak ditarik masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp109.232 dan Rp74.061. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontijensi atas fasilitas yang tidak ditarik adalah sebagai berikut:

Undrawn facilities as of December 31, 2023 and 2022 are Rp109,232 and Rp74,061, respectively. The movements of allowance for impairment losses on estimated commitments and contingencies for undrawn facilities are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal	1.752	-	Beginning balance
Pembentukan selama tahun berjalan	1.070	1.752	Provision during the year
Neto	2.822	1.752	Net

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai akibat tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is adequate to cover impairment losses from uncollectible receivables.

Piutang *murabahah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan dan menjual atau surat kuasa untuk mencairkan deposito *mudharabah* atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tabungan dan deposito *mudharabah* yang menjadi agunan piutang masing-masing sebesar Rp42.500 dan Rp23.750 (Catatan 21).

Murabahah receivables are collateralized by registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, power of attorney to liquidate *mudharabah* time deposits, and other guarantees accepted by the Bank. As of December 31, 2023 and 2022, *mudharabah* saving deposit and *mudharabah* time deposit which collateralized receivables amounting to Rp42,500 and Rp23,750, respectively. (Note 21).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio pinjaman *non-performing* bruto dan neto terhadap jumlah piutang adalah masing-masing sebesar 0,00%.

As of December 31, 2023 and 2022, the ratio of *non-performing* funds gross and neto to total receivables were 0.00%, respectively.

Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat pinjaman yang melanggar ketentuan BMPP.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no funds which exceeded the legal lending limit (BMPP) as stated in the legal lending limit report to Bank Indonesia.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PINJAMAN QARDH

10. FUNDS OF QARDH

a. Berdasarkan sektor ekonomi, mata uang dan kolektibilitas

a. By economic sector, currency and collectibility

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Lancar			Current
Jasa keuangan	715.850	442.220	Financial services
Perdagangan	107.448	9.495	Trading
Rumah tangga	64	-	Household sector
Jasa konsultan	-	98.151	Consultant services
Total	823.362	549.866	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.739)	(5.066)	Allowance for impairment losses
Neto	815.623	544.800	Net

b. Berdasarkan jangka waktu perjanjian

b. By contractual period

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
≤ 1 tahun	823.298	549.866	≤ 1 year
> 1 tahun	64	-	> 1 years
Total	823.362	549.866	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.739)	(5.066)	Allowance for impairment losses
Neto	815.623	544.800	Net

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo sesuai kontrak

c. By contractual remaining period to maturity

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
1 bulan	177.165	245.563	1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	643.962	304.303	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	2.171	-	> 3 - ≤ 12 months
> 1 tahun	64	-	> 1 years
Total	823.362	549.866	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.739)	(5.066)	Allowance for impairment losses
Neto	815.623	544.800	Net

d. Berdasarkan hubungan

d. By relationship

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Pihak ketiga	823.362	549.866	Third party
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.739)	(5.066)	Allowance for impairment losses
Neto	815.623	544.800	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. PINJAMAN QARDH (lanjutan)

10. FUNDS OF QARDH (continued)

e. Informasi penting lainnya

e. Other significant information

Jumlah pinjaman yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar RpNihil.

Restructured funds as of December 31, 2023 and 2022 are RpNil, respectively.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on funds of *qardh* are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal	5.066	-	Beginning balance
Pembentukan selama tahun berjalan	2.673	5.066	Provision during the year
Neto	7.739	5.066	Net

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai akibat tidak tertagihnya pinjaman.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is adequate to cover impairment losses from uncollectible funds.

Pinjaman *qardh* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan dan menjual atau surat kuasa untuk mencairkan deposito *mudharabah* atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tabungan dan deposito *mudharabah* yang menjadi agunan pinjaman masing-masing sebesar Rp59.150 dan Rp43.300 (Catatan 21).

Funds of *qardh* are collateralized by registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, power of attorney to liquidate *mudharabah* time deposits, and other guarantees accepted by the Bank. As of December 31, 2023 and 2022, *mudharabah* saving deposit and *mudharabah* time deposit which collateralized funds amounting to Rp59,150 and Rp43,300, respectively (Note 21).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio piutang *non-performing* bruto dan neto terhadap jumlah piutang adalah masing-masing sebesar 0,00%.

As of December 31, 2023 and 2022, the ratio of non-performing receivables gross and neto to total receivables were 0.00%, respectively.

Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat piutang yang melanggar ketentuan BMPP.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no receivables which exceeded the legal lending limit (BMPP) as stated in the legal lending limit report to Bank Indonesia.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

11. MUSYARAKAH FINANCING

a. Berdasarkan sektor ekonomi, mata uang dan kolektibilitas

a. By economic sector, currency and collectibility

	31 Desember December 31, 2023	
<u>Rupiah</u>		<u>Rupiah</u>
Lancar		Current
Jasa keuangan	650.500	Financial services
Jasa konsultan	428.000	Consultant services
Perdagangan	345.848	Trading
Pengelolaan sampah	34.545	Waste management
Konstruksi	5.000	Construction
Rumah tangga	485	Household sector
Total	1.464.378	Total
Dikurangi:		Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.446)	Allowance for impairment losses
Neto	1.449.932	Net

b. Berdasarkan jangka waktu perjanjian

b. By contractual period

	31 Desember December 31, 2023	
<u>Rupiah</u>		<u>Rupiah</u>
≤ 1 tahun	716.611	≤ 1 year
> 1 - ≤ 5 tahun	160.000	> 1 - ≤ 5 years
> 5 tahun	587.767	> 5 years
Total	1.464.378	Total
Dikurangi:		Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.446)	Allowance for impairment losses
Neto	1.449.932	Net

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo sesuai kontrak

c. By contractual remaining period to maturity

	31 Desember December 31, 2023	
<u>Rupiah</u>		<u>Rupiah</u>
≤ 1 bulan	150.000	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	285.500	> 1 - ≤ 3 month
> 3 - ≤ 12 bulan	441.111	> 3 - ≤ 12 month
> 1 tahun	587.767	> 1 year
Total	1.464.378	Total
Dikurangi:		Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.446)	Allowance for impairment losses
Neto	1.449.932	Net

d. Berdasarkan hubungan

d. By relationship

	31 Desember December 31, 2023	
<u>Rupiah</u>		<u>Rupiah</u>
Pihak ketiga	1.464.378	Third parties
Dikurangi:		Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.446)	Allowance for impairment losses
Neto	1.449.932	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

e. Informasi penting lainnya

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar RpNihil.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

	31 Desember December 31, 2023
Saldo awal	-
Pembentukan selama tahun berjalan	14.446
Neto	14.446

Bank memiliki liabilitas kontingensi atas pembiayaan *musyarakah* yang belum digunakan sebagai berikut:

	31 Desember December 31, 2023
Rupiah	
Fasilitas pembiayaan <i>musyarakah</i> yang belum digunakan	151.211
Total	151.211

Sesuai dengan POJK No.2/POJK.03/2022 tentang kualitas aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 46 ayat 2, fasilitas pembiayaan yang belum digunakan dikecualikan dari penyisihan atas aset produktif.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas pembiayaan *musyarakah* telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai akibat tidak tertagihnya pembiayaan.

Pembiayaan *musyarakah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan dan menjual atau surat kuasa untuk mencairkan deposito *mudharabah* atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Pada tanggal 31 Desember 2023, tabungan dan deposito *mudharabah* yang menjadi agunan pembiayaan sebesar Rp63.375 (Catatan 21).

Pada tanggal 31 Desember 2023, rasio pembiayaan *non-performing* bruto dan neto terhadap jumlah pembiayaan adalah masing-masing sebesar 0,00%.

Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat pembiayaan yang melanggar ketentuan BMPP.

11. MUSYARAKAH FINANCING (continued)

e. Other significant information

Restructured financing as of December 31, 2023 and December 31, 2022 are RpNil, respectively.

The movements of allowance for impairment losses on *musyarakah* financing are as follows:

	31 Desember December 31, 2023
Saldo awal	-
Pembentukan selama tahun berjalan	14.446
Neto	14.446

The Bank's payables from contingencies for unused *musyarakah* financing are as follows:

	31 Desember December 31, 2023
Rupiah	
Fasilitas pembiayaan <i>musyarakah</i> yang belum digunakan	151.211
Total	151.211

According to POJK No.2/POJK.03/2022 concerning the asset quality of Sharia Banks and Sharia Business Units article 46 paragraph 2, unused financing facilities are excluded from the allowance for productive assets.

Management believes that the allowance for impairment losses on *musyarakah* financing is adequate to cover impairment losses from uncollectible financing.

Musyarakah Financing are collateralized by registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, power of attorney to liquidate *mudharabah* time deposits, and other guarantees accepted by the Bank. As of December 31, 2023, *mudharabah* saving deposit and *mudharabah* time deposit which collateralized funds amounting to Rp63,375 (Note 21).

As of December 31, 2023 the ratio of *non-performing* financing gross and neto to total receivables were 0.00%, respectively.

As of Desember 31, 2023, there are no financing which exceeded the legal lending limit (BMPP) as stated in the legal lending limit report to Bank Indonesia.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA

12. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS

		31 Desember/December 31, 2023						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance			
<u>Biaya perolehan</u>						<u>Acquisition cost</u>		
Renovasi bangunan yang disewa	8.886	90	-	721	9.697	Leasehold Improvements		
Peralatan kantor	9.088	109	-	36	9.233	Office equipment		
Kendaraan	46	-	-	-	46	Vehicles		
Komputer	13.348	720	(19)	506	14.555	Computers		
Total biaya perolehan	31.368	919	(19)	1.263	33.531	Total cost		
Aset dalam pembangunan	525	989	-	(1.263)	251	Construction in progress		
Aset hak guna	41.844	16.628	(14.315)	-	44.157	Right of use of assets		
Total biaya perolehan	73.737	18.536	(14.334)	-	77.939	Total cost		
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>		
Renovasi bangunan yang disewa	2.842	1.985	-	-	4.827	Leasehold improvements		
Peralatan kantor	3.287	1.375	-	-	4.662	Office equipment		
Kendaraan	11	11	-	-	22	Vehicle		
Komputer	5.183	2.132	(10)	-	7.305	Computers		
Aset hak guna	11.323	5.503	(10)	-	16.816	Right of use of assets		
	17.237	10.603	(14.084)	-	13.756			
Total akumulasi penyusutan	28.560	16.106	(14.094)	-	30.572	Total accumulated depreciation		
Nilai buku neto	45.177				47.367	Net book value		
		31 Desember/December 31, 2022						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance			
<u>Biaya perolehan</u>						<u>Acquisition cost</u>		
Renovasi bangunan yang disewa	10.817	89	(4.065)	2.045	8.886	Leasehold Improvements		
Peralatan kantor	15.470	1.919	(6.284)	(2.017)	9.088	Office equipment		
Kendaraan	33	20	(7)	-	46	Vehicles		
Komputer	16.043	3.564	(6.259)	-	13.348	Computers		
Total biaya perolehan	42.363	5.592	(16.615)	28	31.368	Total cost		
Aset dalam pembangunan	247	306	-	(28)	525	Construction in progress		
Aset hak guna	36.533	6.379	(1.068)	-	41.844	Right of use of assets		
Total biaya perolehan	79.143	12.277	(17.683)	-	73.737	Total cost		
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>		
Renovasi bangunan yang disewa	4.737	1.600	(4.065)	570	2.842	Leasehold improvements		
Peralatan kantor	8.005	2.136	(6.284)	(570)	3.287	Office equipment		
Kendaraan	8	10	(7)	-	11	Vehicle		
Komputer	8.375	3.067	(6.259)	-	5.183	Computers		
Aset hak guna	21.125	6.813	(16.615)	-	11.323	Right of use of assets		
	6.904	10.504	(171)	-	17.237			
Total akumulasi penyusutan	28.029	17.317	(16.786)	-	28.560	Total accumulated depreciation		
Nilai buku neto	51.114				45.177	Net book value		

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

12. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS (continued)

Aset hak guna per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Right of use of assets as of December 31, 2023 dan 2022 are as follows:

		31 Desember/December 31, 2023				
	Saldo awal/ Beginning balances	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balances		
<u>Biaya perolehan</u>					<u>Acquisition cost</u>	
Bangunan	37.761	14.716	(12.662)	39.815	Buildings	
Kendaraan	4.083	1.912	(1.653)	4.342	Vehicles	
Total biaya perolehan	41.844	16.628	(14.315)	44.157	Total cost	
<u>Akumulasi penyusutan</u>					<u>Accumulated depreciation</u>	
Bangunan	15.175	8.831	(12.662)	11.344	Buildings	
Kendaraan	2.062	1.772	(1.422)	2.412	Vehicles	
Total akumulasi penyusutan	17.237	10.603	(14.084)	13.756	Total accumulated depreciation	
Nilai tercatat	24.607			30.401	Carrying value	
		31 Desember/December 31, 2022				
	Saldo awal/ Beginning balances	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balances		
<u>Biaya perolehan</u>					<u>Acquisition cost</u>	
Bangunan	31.627	6.134	-	37.761	Buildings	
Kendaraan	4.906	245	(1.068)	4.083	Vehicles	
Total biaya perolehan	36.533	6.379	(1.068)	41.844	Total cost	
<u>Akumulasi penyusutan</u>					<u>Accumulated depreciation</u>	
Bangunan	6.032	9.143	-	15.175	Buildings	
Kendaraan	872	1.361	(171)	2.062	Vehicles	
Total akumulasi penyusutan	6.904	10.504	(171)	17.237	Total accumulated depreciation	
Nilai tercatat	29.629			24.607	Carrying value	

Aset hak guna pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan kontrak sewa atas gedung kantor dan mobil dengan pihak ketiga.

Right of use assets as of December 31, 2023 and 2022 represent lease contracts for office buildings and cars with third parties.

Bank melakukan perjanjian sewa aset dengan periode sewa berkisar antara 1 - 3 tahun.

The Bank entered into an asset lease agreement with lease period ranging from 1 - 3 years.

Jumlah beban penyusutan aset tetap dan aset hak guna sebesar Rp16.106 dan Rp17.317 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The depreciation expenses of fixed assets and right of use assets charged to profit and loss amounting to Rp16,106 and Rp17,317 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

Pada tahun 2023, Bank menghapusbukkan aset tetap berupa komputer dengan nilai buku sebesar Rp9. Perseroan mengakui kerugian atas penghapusbukuan tersebut pada akun pendapatan non-operasional - neto pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

In 2023, the Bank dispose fixed assets of computers with book value amounting to Rp9. The Company recognized loss on that disposal on non-operating income - net account on the statement of profit or loss and other comprehensive income current year.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan aset hak guna selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Nilai bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.055.

Aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	31 Desember/ December 31, 2023	
Renovasi bangunan yang disewa	2024	213	Leasehold improvements
Peralatan kantor	2024	38	Office equipment
	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	31 Desember/ December 31, 2022	
Renovasi bangunan yang disewa	2023	306	Leasehold improvements
Peralatan kantor	2023	219	Office equipment

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah berkisar 50%-95% dan 30%-60%.

Aset tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Central Asia Syariah, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp17.125 dan Rp29.985 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko yang ada.

12. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS (continued)

Management believes that there is no impairment of fixed assets and right of use assets of the Bank during the year because management believes that the carrying amounts of assets do not exceed the estimated recoverable amount.

As of December 31, 2023 and 2022, the gross value of fixed assets which have been fully depreciated and still being used amounted to Rp2,055.

Construction in progress as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

The estimated percentage of completion of construction in progress as of December 31, 2023 and 2022 are around 50%-95% and 30%-60%, respectively.

Fixed assets are covered by insurance against losses on fire and other risks with PT Asuransi Central Asia Syariah, a third party, under blanket policies amounting to Rp17,125 and Rp29,985 as of December 31, 2023 and 2022, respectively, which management believes is adequate to cover possible losses arising from such risks.

13. ASET TAK BERWUJUD - NETO

13. INTANGIBLE ASSETS - NET

31 Desember/December 31, 2023						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Piranti lunak	60.756	3.599	-	23.762	88.117	Software
Aset dalam penyelesaian	28.672	30.166	-	(23.762)	35.076	Assets under construction
Total biaya perolehan	89.428	33.765	-	-	123.193	Total cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Piranti lunak	37.890	7.964	-	-	45.854	Software
Total akumulasi penyusutan	37.890	7.964	-	-	45.854	Total accumulated depreciation
Nilai buku neto	51.538				77.339	Net book value

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. ASET TAK BERWUJUD - NETO (lanjutan)

13. INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

31 Desember/December 31, 2022						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Piranti lunak	41.413	19.343	-	-	60.756	Software
Aset dalam penyelesaian	694	27.978	-	-	28.672	Assets under construction
Total biaya perolehan	42.107	47.321	-	-	89.428	Total cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Piranti lunak	36.504	1.386	-	-	37.890	Software
Total akumulasi penyusutan	36.504	1.386	-	-	37.890	Total accumulated depreciation
Nilai buku neto	5.603				51.538	Net book value

Piranti lunak merupakan aplikasi metadata integrasi pelaporan dan lisensi program komputer yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Bank.

Aset dalam pembangunan merupakan aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Bank dalam rangka mendukung kegiatan usaha Bank menjadi Bank digital.

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah berkisar 20%-75% dan 20%-85%.

Software represent metadata integrated reporting application and license of computer programme which used to support the Bank's operational activities.

Assets under construction represent applications that are being developed by the Bank in order to support the Bank's business activities into a digital bank.

The estimated percentage of completion of construction in progress as of December 31, 2023 and 2022 are around 20%-75% and 20%-85%, respectively.

14. ASET LAIN-LAIN - NETO

14. OTHER ASSETS - NET

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Biaya dibayar dimuka	250.302	202.017	Prepaid expense
Pajak dibayar dimuka	33.758	33.758	Prepaid tax
Tagihan ATM	19.037	4.916	ATM receivables
Pendapatan yang masih akan diterima	8.815	10.405	Accrued income
Setoran jaminan	302	2.619	Security deposits
Lain-lain	4.662	4.438	Others
Total	316.876	258.153	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, akun pajak dibayar dimuka merupakan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan pasal 25 tahun 2018 yang diajukan ke kantor pajak untuk direstitusi (Catatan 16).

Pendapatan yang masih akan diterima terutama berasal dari piutang pendapatan dari investasi pada surat berharga dan piutang *murabahah*.

Aset lain-lain - lain-lain merupakan uang muka atas pembayaran jasa yang diberikan oleh pihak ketiga.

Biaya dibayar dimuka terutama merupakan biaya sewa pemakaian dan jasa pengelolaan piranti lunak, biaya promosi dibayar dimuka dan bonus dibayar dimuka atas rekrutmen pegawai.

As of December 31, 2023 and 2022, the prepaid tax account represents overpayment of corporate income tax article 25 for fiscal year 2018 which is submitted to Tax Office for refund (Note 16).

Accrued income is mainly due to receivables from investments in marketable securities and *murabahah* receivables.

Other assets - others represent advance payment for services provided by third parties.

Prepaid expenses mainly represent rental fees and software management services, prepaid promotions expenses and prepaid bonuses for employee recruitment.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET LAIN-LAIN - NETO (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juli 2022, Bank memiliki perjanjian *acquisiton marketing* dan *retention marketing* dengan PT Orange Inovasi Digital (OID) dengan jangka waktu 5 tahun sampai dengan tanggal 29 Juli 2027 dimana perjanjian tersebut telah diaddendum pada tanggal 27 Februari 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai tercatat biaya dibayar dimuka sehubungan dengan *acquisiton marketing* dan *retention marketing* dihitung penurunan nilainya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Desmar, Susanto, Salman dan Rekan dalam laporannya tanggal 25 Maret 2024 dengan menggunakan pendekatan berbasis pendapatan melalui metode Pendapatan Berlebih (*Excess Earnings Method*).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat neto setelah penurunan nilai biaya dibayar dimuka sehubungan dengan *acquisiton marketing* dan *retention marketing* masing-masing adalah sebesar Rp231.218 dan Rp179.542 yang dicatat sebagai bagian dari biaya dibayar dimuka.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai biaya dibayar dimuka di atas dapat dipulihkan.

14. OTHER ASSETS - NET (continued)

On July 30, 2022, the Bank has agreements of *acquisiton marketing* and *retention marketing* with PT Orange Inovasi Digital (OID) with 5 years period until July 29, 2027, which agreements has been amended on February 27, 2023.

As of December 31, 2023, carrying amount of prepaid expenses related to the *acquisiton marketing* and *retention marketing* has been tested for impairment by Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Desmar, Susanto, Salman dan Rekan with it's report dated March 25, 2024 using income-based approach through the *Excess Earnings Method*.

As of December 31, 2023 and 2022, net carrying amount after impairment losses of prepaid expenses related to the *acquisiton marketing* dan *retention marketing* amounting to Rp231,218 and Rp179,542, respectively which recorded as part of prepaid expenses.

The management believes that the prepaid expenses above is recoverable.

15. LIABILITAS SEGERA

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Titipan ATM	69.255	15.399
Dana kebajikan	584	993
Total	69.839	16.392

15. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

ATM remittance
Qardhul hasan funds
Total

16. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pasal 21	4.051	3.765
Pasal 4 (2)	2.615	498
Pasal 23	247	1.760
Pajak Pertambahan Nilai	60	43
Total	6.973	6.066

16. TAXATION

a. Taxes payable

Article 21
Article 4 (2)
Article 23
Value Added Tax
Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

b. Beban pajak (lanjutan)

b. Taxes expense (continued)

Rekonsiliasi rugi sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran rugi fiskal adalah sebagai berikut:

Reconciliation between loss before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and estimated fiscal loss as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2023	2022	
Rugi sebelum beban pajak	(226.738)	(264.913)	Loss before tax expense
<u>Beda temporer</u>			<u>Temporary differences</u>
Liabilitas lain-lain	(14.181)	1.984	Other liabilities
Penyusutan aset tetap	(165)	(519)	Fixed assets depreciation
Amortisasi aset tidak berwujud	(9.950)	(2.321)	Amortization of intangible assets
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif	(1.528)	23.008	Provision for impairment losses of earning assets
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.007	4.937	Employee benefit liabilities
Penyusutan aset hak guna dan beban bunga liabilitas sewa	960	878	Depreciation of right of use assets and interest expense on lease liabilities
<u>Beda tetap</u>			<u>Permanent differences</u>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	5.878	3.387	Non-deductible expense
Imbalan dalam bentuk natura	-	2.684	Benefit-in-kind
Liabilitas segera	7	-	Liabilities due immediately
Taksiran rugi fiskal	(242.710)	(230.875)	Estimated (fiscal loss) taxable income
Akumulasi rugi fiskal	(334.626)	(165.670)	Accumulated fiscal loss
Total akumulasi rugi fiskal	(577.336)	(396.545)	Total accumulated fiscal loss
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rangkuman akumulasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:			Summary of accumulated fiscal loss are as follows:
Tahun 2023	(242.710)	-	Year 2023
Tahun 2022	(230.875)	(230.875)	Year 2022
Tahun 2021	(103.751)	(103.751)	Year 2021
Tahun 2017	-	(61.919)	Year 2017
Total akumulasi rugi fiskal	(577.336)	(396.545)	Total accumulated fiscal loss

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

c. Rekonsiliasi tarif pajak efektif

c. Reconciliation of effective tax rate

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menerapkan perkalian antara tarif pajak maksimum dengan rugi sebelum beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense as computed by applying the maximum tax rate to the loss before tax expense as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2023	2022	
Rugi sebelum beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(226.738)	(264.913)	Loss before income tax expense per statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak berdasarkan tarif pajak maksimum yang berlaku	(49.883)	(58.281)	Tax expense at maximum enacted tax rate
Pengaruh pajak atas beda tetap	1.295	1.336	Permanent differences
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	48.588	56.945	Unrecognized deferred income tax
Beban pajak	-	-	Tax expense

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 di atas digunakan sebagai dasar pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023.

Calculation of estimated taxable income for the year ended December 31, 2023 above, was used as the basis for the amounts reported in the Bank's annual tax returns for 2023.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sesuai dengan SPT Tahunan Bank.

The calculations of income tax for the year ended December 31, 2022 conform to the Bank's Annual Tax Return.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam UU HPP tersebut ditetapkan tarif PPH Badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On October 7, 2021, the Government of the Republic of Indonesia ratified the Harmonization of Tax Regulations (HPP) Law. In the HPP Law, the corporate income tax rate is set at 22% for the fiscal year 2022 and beyond.

Sesuai dengan Peraturan tersebut, Bank telah menghitung pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 menggunakan tarif pajak 22%.

In accordance with the Regulation, the Bank has calculated its corporate income tax for the year ended December 31, 2023 and 2022 using the tax rate of 22%.

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax assets

Aset dan liabilitas pajak tangguhan berasal dari perbedaan temporer pengakuan antara pelaporan komersial dan pajak serta rugi fiskal.

Deferred tax assets and liabilities are originated from temporary differences between commercial and tax reporting and fiscal loss.

Manfaat yang diperoleh dari aset pajak tangguhan yang diakui Bank tergantung pada adanya penghasilan kena pajak yang lebih besar dari pembalikan perbedaan temporer yang bisa dikurangkan pada masa yang akan datang.

The utilization of deferred tax assets recognized by the Bank depends on future availability of taxable income against which the deferred tax assets will be realized.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen tidak mengakui aset pajak tangguhan karena tidak terdapat bukti yang memadai bahwa aset pajak tangguhan tersebut dapat diutilisasi.

e. Informasi lainnya

Tahun pajak 2018

Pada tanggal 4 Juli 2019, Bank menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. S-0800/WPJ.07/KP.0600/2019 tentang pemeriksaan lapangan untuk semua jenis pajak untuk tahun pajak 2018. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pada tanggal 24 April 2020, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") lebih bayar sebesar Rp33.758 (Catatan 14) (sebelumnya Bank melaporkan rugi fiskal sebesar Rp115.000) dan SKP kurang bayar atas pajak lainnya sebesar Rp489.

Bank memutuskan untuk melakukan keberatan atas SKP tersebut. Pada tanggal 10 Mei 2021, Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan Bank atas SKP tersebut dan Bank telah menerima hasil keputusan tersebut dan tidak mengajukan banding ke pengadilan pajak.

Pada tanggal 19 Maret 2024, Bank telah mengirimkan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, Bank belum menerima pengembalian atas lebih bayar tahun 2018 tersebut.

Tahun pajak 2017

Pada tanggal 14 November 2018, Bank menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. S2079/WPJ.07/KP.0600/2018 tentang pemeriksaan lapangan untuk semua jenis pajak untuk tahun pajak 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pada tanggal 14 April 2021, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") pajak penghasilan badan dan pajak lainnya masing-masing sebesar Rp79.541 dan Rp312. Bank memutuskan untuk melakukan keberatan atas SKP pajak penghasilan badan.

16. TAXATION (continued)

d. Deferred tax assets (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, management did not recognize deferred tax assets due to insufficient evidence that it is probable that the deferred tax assets can be realized.

e. Other information

Fiscal year 2018

On July 4, 2019, the Bank received a Field Inspection Notification Letter No. S-0800/WPJ.07/KP.0600/2019 regarding field inspections for all taxes for the 2018 fiscal year. From the results of the audit that was carried out, on April 24, 2020 the Bank received an overpayment of Tax Assessment Letter ("SKP") amounting to Rp33,758 (Note 14) (previously the Bank reported fiscal loss amounting to Rp115,000) and an underpayment SKP for other taxes amounting to Rp489.

The Bank decided to submit objection of the SKP. On May 10, 2021, the Directorate General of Taxation rejected the Bank's objection of the SKP, and the Bank has accepted the results of the decision and did not appeal to the tax court.

On March 19, 2024, the Bank has sent a refund request for the tax overpayment to the Tax Service Office.

As of the issuance date of the financial statements, the Bank has not received the tax overpayment of 2018.

Fiscal year 2017

On November 14, 2018, the Bank received Field Examination Notification Letter No. S2079/WPJ.07/KP.0600/2018 regarding field examination for all taxes for the 2017 fiscal year. From the results of the audit that was carried out, on April 14, 2021, the Bank received an underpayment of Tax Assessment Letter ("SKPKB") of corporate income tax and other taxes amounting to Rp79,541 and Rp312, respectively. The Bank decided to object to the underpayment SKP of corporate income tax.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Informasi lainnya (lanjutan)

Tahun pajak 2017 (lanjutan)

Pada tanggal 2 Agustus 2022, Bank menerima surat penolakan keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan surat tersebut, Bank mengajukan proses banding ke pengadilan pajak pada tanggal 1 November 2022.

Pada tanggal 28 Februari 2024, Pengadilan Pajak telah menerbitkan keputusan untuk mengabulkan seluruh keberatan banding yang diajukan oleh Bank (Catatan 41).

Keputusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan karena Bank sebelumnya tidak melakukan pembayaran atau pencatatan atas SKPKB tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak dan tahun-tahun selanjutnya.

16. TAXATION (continued)

e. Other information (continued)

Fiscal year 2017 (continued)

On August 2, 2022, the Bank receive rejection letter of objection from the Directorate General of Taxes. Based on those letter, the Bank has submitted the appeal process to the tax court on November 1, 2022.

On February 28, 2024, the Tax Court has issued its decision to granted all Bank's appeal (Note 41).

The Tax Court Decision has no impact on the financial statements since the Bank did not previously make any payments or recording on that SKPKB.

Under the prevailing Taxation Laws of Indonesia, the Bank calculates, determines and pays tax payable based on self-assessment. The Directorate General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years from the time the tax becomes due and subsequent years.

17. SIMPANAN WADIAH

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah			Rupiah
Pihak ketiga			Third parties
Tabungan Wadiah	1	1	Wadiah savings deposits
Total Simpanan Wadiah	1	1	Total wadiah deposits

Simpanan wadiah merupakan simpanan tabungan dari pihak ketiga dengan akad wadiah yad-dhamanah yang akan mendapatkan bonus sesuai kebijakan Bank.

Wadiah deposits represent wadiah savings deposits from third party in wadiah yad-dhamanah principle which will earn bonus based on the Bank's policy.

17. WADIAH DEPOSITS

18. LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA

	31 Desember December 31, 2023	
Rupiah		Rupiah
Pihak ketiga	584.248	Third parties

18. LIABILITIES TO BANK INDONESIA

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA
(lanjutan)

Liabilitas kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 berisi instrumen Pengelolaan Likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia ("PaSBI") yang merupakan fasilitas penyediaan dana dari Bank Indonesia untuk pengelolaan likuiditas Bank dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah dengan nilai nominal sebesar Rp617.700 (Catatan 8).

Pada akhir bulan Desember 2023, Bank mendapatkan fasilitas PaSBI sebesar Rp584.248 dengan persentase bagi hasil yang dibayar oleh Bank sebesar 7,55% per tahun, serta jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2024.

18. LIABILITIES TO BANK INDONESIA (continued)

Liabilities to Bank Indonesia as at December 31, 2023 containing Liquidity Management based on Bank Indonesia Sharia Principles ("PaSBI") instrument, which is a funding facility from Bank Indonesia for managing the Bank's liquidity with collateral in the form of securities that comply with sharia principles with nominal value amounting to Rp617,700 (Note 8).

At the end of December 2023, the Bank obtained PaSBI facilities amounting to Rp584,248 with a percentage profit sharing paid by the Bank of 7.55% per annum, and mature on January 24, 2024.

19. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

19. SECURITIES ISSUED

	31 Desember December 31, 2022	
Rupiah		Rupiah
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank (SIMA)	180.000	<i>Interbank mudharabah</i> <i>investment certificate (SIMA)</i>
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIPA)	504.000	<i>Interbank sharia fund</i> <i>management certificate (SIPA)</i>
Total	684.000	Total

20. LIABILITAS LAIN-LAIN

20. OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah			Rupiah
Biaya masih harus dibayar dan lainnya	41.224	54.223	<i>Accrued expense and others</i>
Liabilitas sewa	30.423	23.689	<i>Lease liabilities</i>
Liabilitas imbalan kerja karyawan (Catatan 32)	8.915	7.950	<i>Employee benefit</i> <i>liabilities (Note 32)</i>
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 9)	2.822	1.752	<i>Estimated losses on commitment</i> <i>and contingencies (Note 9)</i>
Bagi hasil yang belum dibagikan	6.946	910	<i>Undistributed revenue sharing</i>
Mata uang asing			Foreign currency
Biaya masih harus dibayar dan lainnya	489	493	<i>Accrued expense and others</i>
Total	90.819	89.017	Total

Analisis jatuh tempo liabilitas lain-lain terkait sewa adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of other liabilities related to lease is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
1 tahun	9.121	3.041	1 year
2 tahun	9.235	19.652	2 years
3 tahun	8.455	996	3 years
Di atas 3 tahun	3.612	-	Above 3 years
Total	30.423	23.689	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

Biaya yang masih harus dibayar dan lainnya merupakan liabilitas kepada pihak ketiga atau vendor dan akrual atas bonus, tunjangan hari raya, tunjangan akhir tahun, dan lainnya.

20. OTHER LIABILITIES (continued)

Accrued expenses and others represents liabilities to third parties or vendor and accruals for bonuses, holiday allowances, year-end allowance, and others.

21. DANA SYIRKAH TEMPORER

a. Tabungan

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Pihak berelasi (Catatan 31)	17.587	10.237	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga	493.064	106.069	Third parties
Total	510.651	116.306	Total

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut berdasarkan nisbah yang disetujui sebelumnya.

Pemilik dana *syirkah* memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi pendapatan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, tabungan *mudharabah* yang menjadi agunan piutang *murabahah*, pinjaman *qardh* dan *musyarakah* masing-masing adalah sebesar RpNihil, Rp5.700 dan Rp22.000 (Catatan 9, 10, dan 11).

Pada tanggal 31 Desember 2022, tabungan *mudharabah* yang menjadi agunan piutang *murabahah* dan pinjaman *qardh* masing-masing adalah Rp1.200 dan Rp43.300 (Catatan 9 dan 10).

21. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

a. Saving accounts

Mudharabah demand deposits from other parties which are entitled to receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such fund based on a predetermined ratio.

The owners of syirkah funds receive parts of profit in accordance with the agreement and borne loss based on proportion to the total funds. The profit distribution of syirkah funds can be based on profit sharing or revenue sharing concept.

As of December 31, 2023, mudharabah saving accounts which collateralized murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing amounting to RpNil, Rp5,700 and Rp22,000, respectively (Note 9, 10, and 11).

As of December 31, 2022, mudharabah saving accounts which collateralized murabahah receivables and funds of qardh amounting to Rp1,200 and Rp43,300, respectively (Note 9 and 10).

b. Deposito *mudharabah*

i. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Pihak berelasi (Catatan 31)	9.230	-	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga	2.735.118	678.343	Third parties
Total	2.744.348	678.343	Total

b. *Mudharabah time deposits*

i. *By relationship*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

21. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)

b. Deposito *mudharabah* (lanjutan)

b. *Mudharabah* time deposits (continued)

ii. Berdasarkan jangka waktu kontrak

ii. *By contractual period*

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
1 bulan	122.300	626.943	1 month
1-3 bulan	1.413.330	51.400	1-3 months
3-6 bulan	720.236	-	3-6 months
> 6 bulan	488.482	-	> 6 months
Total	2.744.348	678.343	Total

iii. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo sesuai kontrak

iii. *By remaining contractual period to maturity*

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
1 bulan	1.953.141	626.943	1 month
1-3 bulan	644.013	51.400	1-3 months
3-6 bulan	146.194	-	3-6 months
> 6 bulan	1.000	-	> 6 months
Total	2.744.348	678.343	Total

Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut berdasarkan nisbah yang disetujui sebelumnya.

Mudharabah time deposits represent other parties' investment which are entitled to received a share in the income derived by the Bank from the use of such fund based on a predetermined ratio.

Bagi hasil untuk deposito berjangka *mudharabah* dalam Rupiah berkisar antara 2,70% sampai dengan 5,91% per tahun untuk tahun 2023 dan 2,02% sampai dengan 4,42% per tahun untuk tahun 2022. Bank juga memberikan bonus tambahan bagi nasabah deposito berjangka *mudharabah* dengan nilai bonus sesuai kebijakan Bank.

The annual profit sharing ratio for Rupiah *mudharabah* time deposits in Rupiah ranges from 2.70% to 5.91% per annum for the year 2023 and 2.02% to 4.42% per annum for the year 2022. Bank also give additional bonuses for *mudharabah* time deposits customers with a bonus value in accordance Bank policy.

Pada tanggal 31 Desember 2023, deposito *mudharabah* yang menjadi agunan piutang *murabahah*, pinjaman *qardh* dan *musyarakah* masing-masing adalah sebesar Rp42.500, Rp53.450 dan Rp41.375 (Catatan 9, 10, dan 11).

As of December 31, 2023, *mudharabah* time deposits which collateralized *murabahah* receivables, funds of *qardh* and *musyarakah* financing amounting to Rp42,500, Rp53,450 and Rp41,375, respectively (Note 9, 10, and 11).

Pada tanggal 31 Desember 2022, deposito *mudharabah* yang menjadi agunan piutang *murabahah* dan pinjaman *qardh* masing-masing adalah Rp22.550 dan RpNihil (Catatan 9 dan 10).

As of December 31, 2022, *mudharabah* time deposits which collateralized *murabahah* receivables and funds of *qardh* amounting to Rp22,550 and RpNil, respectively (Note 9 and 10).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

22. SHARE CAPITAL

The compositions of the Bank's shareholders as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

31 Desember/December 31, 2023				
Nama pemegang saham	Total saham/ Number of shares (full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Name of shareholder
PT Aladin Global Ventures Masyarakat	7.759.230.746 6.159.148.771	55,75% 44,25%	775.923 615.915	PT Aladin Global Ventures Public
	13.918.379.517	100,00%	1.391.838	

31 Desember/December 31, 2022				
Nama pemegang saham	Total saham/ Number of shares (full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Name of shareholder
PT Aladin Global Ventures Masyarakat	7.988.245.746 5.782.264.243	58,01% 41,99%	798.825 578.226	PT Aladin Global Ventures Public
	13.770.509.989	100,00%	1.377.051	

Dana setoran modal

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, mutasi dana setoran modal Bank adalah sebagai berikut:

Capital deposit funds

As of December 31, 2023 and 2022, the movement of Bank's capital deposit funds are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal	1.363.862	2.684	Beginning balance
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD)	-	1.190.000	Additional capital without going through pre-emptive right (PMTMETD)
Penambahan Modal dari pemegang saham pengendali	152.500	170.000	Additional capital from ultimate shareholder
Pelaksanaan Waran I	(3.861)	1.178	Accrued expense and others
Saldo akhir	1.512.501	1.363.862	Ending balance

Untuk memperkuat struktur permodalan selama tahun 2023 dan 2022, Bank telah menerima dana setoran modal dari PT Aladin Global Venture masing-masing sebesar Rp152.500 dan Rp170.000.

To strengthen the capital structure during the years 2023 and 2022, the Bank receipt capital deposit funds from PT Aladin Global Ventures amounting to Rp152,500 and Rp170,000, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

Dana setoran modal (lanjutan)

Pada tanggal 29 Desember 2022, Bank telah melaksanakan aksi korporasi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) kepada PT BNC Technologies Ventures dengan penerbitan saham baru 850.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) dengan harga pelaksanaan Rp1.400 (nilai penuh) untuk memperkuat struktur permodalan Bank. Bank telah menerima penambahan modal tersebut dengan nilai sebesar Rp1.190.000 pada tanggal tersebut. Pada tanggal 30 Desember 2022, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

PMTHMETD tersebut meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp1.380.561.760.100 (nilai penuh) menjadi Rp1.465.561.760.100 (nilai penuh). PMTHMETD tersebut telah diaktakan melalui Akta No. 32 tanggal 17 Januari 2023 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0008480 tanggal 19 Januari 2023.

Komposisi pemegang saham setelah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Nama pemegang saham	Total saham/ Number of shares (full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership
PT Aladin Global Ventures	7.865.630.746	53,67%
PT BNC Technologies Ventures	850.000.000	5,80%
Masyarakat	5.939.986.855	40,53%
	14.655.617.601	100,00%

Bank telah mengkomunikasikan penambahan dana setoran modal dari PT Aladin Global Ventures dan PMTHMETD tersebut kepada OJK. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Bank masih menunggu persetujuan OJK atas penambahan modal dari PMTHMETD tersebut.

22. SHARE CAPITAL (continued)

Capital deposit funds (continued)

On December 29, 2022, the Bank carried out a corporate action to increase capital without pre-emptive right (PMTHMETD) to PT BNC Technologies Ventures by issuing 850,000,000 new shares with a nominal value of Rp100 (full amount) with an exercise price of Rp1,400 (full amount) to strengthen the Bank's capital structure. The Bank has received those additional capital amounting to Rp1,190,000 on that date. As of December 30, 2022, these shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

That PMTHMETD increased the Bank's issued/paid-up capital from Rp1,380,561,760,100 (full amount) to Rp1,465,561,760,100 (full amount). PMTHMETD has been recorded on Deed No. 32 dated January 17, 2023 of Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0008480 dated January 19, 2023.

The composition of shareholders after PMTHMETD are as follows:

Modal disetor/ Paid capital	Name of shareholder
786.563	PT Aladin Global Ventures
85.000	PT BNC Technologies Ventures
593.999	Public
1.465.562	

The Bank has communicated the capital deposit funds from PT Aladin Global Ventures and PMTHMETD to OJK. Until the completion date of the financial statements, the Bank is still waiting OJK approval for those additional capital from PMTHMETD.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

Waran I

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, mutasi waran I adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022		
	Lembar waran (nilai penuh)/ Warrants (full amounts)	Nilai nominal/ Nominal amounts	Lembar waran (nilai penuh)/ Warrants (full amounts)	Nilai nominal/ Nominal amounts	
Total eksekusi waran I	221.053.392	24.316	108.280.976	11.910	Total executed warrants I
Reklasifikasi ke modal saham	(221.042.892)	(22.104)	(73.173.364)	(7.317)	Reclassified as share capital
Reklasifikasi ke tambahan modal disetor (agio saham)	-	(2.210)	-	(731)	Reclassified as share additional paid-in-capital (shares premium)
Waran I yang dicatat sebagai dana setoran modal	10.500	2	35.107.612	3.862	Warrants I which recorded as capital deposits funds

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sisa waran yang telah di eksekusi namun belum diaktakan masing-masing sebesar 10.500 lembar waran (nilai eksekusi sebesar Rp1) dan 35.107.612 lembar waran (nilai eksekusi sebesar Rp3.862), masih dicatat sebagai dana setoran modal.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tanggal 8 November 2021 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0470683 tanggal 8 November 2021 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/disetor Bank sehubungan dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham sebanyak 48.281.804 saham atau Rp4.828.

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 19 Januari 2022 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0061046 tanggal 27 Januari 2022, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/disetor Bank sehubungan dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham sebanyak 24.405.460 saham atau Rp2.441.

22. SHARE CAPITAL (continued)

Warrants I

As of December 31, 2023 and 2022, the movements of warrants I are as follows:

Until December 31, 2023 and 2022, the remaining warrants that have been executed but not yet notarize of 10,500 warrants (executed amount of Rp1) and 35,107,612 warrants (executed amount of Rp3,862), respectively, still recorded as capital deposit funds.

Based on Deed of Shareholder Decision Statement No. 36 dated November 8, 2021 from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta and has been accepted and recorded in the Administrative System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0470683 dated November 8, 2021, the shareholders agreed to increase the issued/paid-up capital of the Bank due to the exercise of warrants into the company's shares of 48,281,804 shares or Rp4,828.

Based on the Deed No. 25 dated January 19, 2022 of Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and has been accepted and recorded in the Administrative System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0061046 dated January 27, 2022, the shareholders agreed to increase the issued/paid-up capital of the Bank due to the exercise of warrants into the company's shares of 24,405,460 shares or Rp2,441.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

Waran I (lanjutan)

Berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 8 Maret 2022 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-AH.01.03-0156976 tanggal 10 Maret 2022 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/diseter Bank sehubungan dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham sebanyak 478.400 saham atau Rp48.

Berdasarkan Akta Nomor 79 tanggal 15 Juni 2022 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-AH.01.03-0251353 tanggal 16 Juni 2022 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/diseter Bank sehubungan dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham sebanyak 7.700 saham atau Rp770.000 (nilai penuh).

Berdasarkan Akta Nomor 94 tanggal 20 Juni 2022 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-AH.01.03-0252875 tanggal 20 Juni 2022 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/diseter Bank dari Rp1.326.624.592.400 (nilai penuh) menjadi Rp1.377.050.998.900 (nilai penuh) peningkatan tersebut sehubungan dengan adanya pelaksanaan aksi korporasi Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) menjadi saham perseroan sebanyak 504.264.065 saham atau Rp50.426.406.500.

Berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 16 Januari 2023 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-AH.01.03-0008011 tanggal 17 Januari 2023 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/diseter Bank dari Rp1.377.050.998.900 (nilai penuh) menjadi Rp1.380.561.760.100 (nilai penuh) peningkatan tersebut sehubungan dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham perseroan sebanyak 35.107.612 saham atau Rp3.510.761.200.

22. SHARE CAPITAL (continued)

Warrants I (continued)

Based on Deed Number 18 dated March 8, 2022, drawn up before Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0156976 dated March 10, 2022, the shareholders agreed to increase the issued/paid-up capital of the Bank due to the exercise of warrants into the shares of 478,400 shares or Rp48.

Based on Deed Number 79 dated 15 June 2022 drawn up before Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0251353 dated 16 June 2022 the shareholders agreed to increase the Bank's issued/paid-up capital of the Bank due to the exercise of warrants into company shares totaling 7,700 shares or Rp770,000 (full amount).

Based on Deed No. 94 dated June 20, 2022, drawn up before Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0252875 dated June 20, 2022, the shareholders agreed to increase the Bank's issued/paid-up capital from Rp1,326,624,592,400 (full amount) to Rp1,377,050,998,900 (full amount) the increase is in connection with the implementation of the corporate action of Capital Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD) into company shares as many as 504,264,065 shares or Rp50,426,406,500

Based on Deed Number 28 dated January 16, 2023 made before Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0008011 dated 17 January 2023 the shareholders agreed to increase the issued/paid-up capital of the Bank from Rp1,377,050,998,900 (full amount) to Rp1,380,561,760,100 (full amount) the increase was in connection with the exercise of warrants into company shares of 35,107,612 shares or Rp3,510,761,200.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

Waran I (lanjutan)

Berdasarkan Akta Nomor 82 tanggal 20 Desember 2023 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-AH.01.03-0159560 tanggal 20 Desember 2023 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/disetor Bank dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham perseroan sebanyak 112.761.916 saham atau Rp11.276.191.600. Penambahan modal ini meningkatkan modal ditempatkan/disetor Bank dari Rp1.380.561.760.100 (nilai penuh) menjadi Rp1.391.837.951.700 (nilai penuh).

Tambahan modal disetor

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Agio saham	964.190	10.870
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I	-	958.102
Biaya emisi PMHMETD I	-	(5.031)
Pelaksanaan Waran I	1.479	249
Total	965.669	964.190

22. SHARE CAPITAL (continued)

Warrants I (continued)

Based on Deed Number 82 dated 20 December 2023 made before Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0159560 dated 20 December 2023, the shareholders agreed to increase the issued/paid-up capital of the Bank with the exercise of warrants into company shares totaling 112,761,916 shares or Rp11,276,191,600. This additional shares capital increase the issued/paid-up capital of the Bank from Rp1,380,561,760,100 (full amount) to Rp1,391,837,951,700 (full amount).

Tambahan modal disetor

As of December 31, 2023 and 2022, additional paid-in capital are as follows:

	2023	2022
Agio saham	964.190	10.870
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I	-	958.102
Biaya emisi PMHMETD I	-	(5.031)
Pelaksanaan Waran I	1.479	249
Total	965.669	964.190

Shares premium
Additional capital
from limited public offering
with pre-emptive right (PMHMETD) I
Issuance cost of PMHMETD I
Warrants I exercise

Total

**23. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH
BANK SEBAGAI MUDHARIB**

**23. INCOME FROM FUND MANAGED BY BANK AS
MUDHARIB**

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31	
	2023	2022
Pendapatan dari piutang dan pinjaman		
Pendapatan marjin <i>murabahah</i>	97.609	3.371
Pendapatan ujarah <i>qardh</i>	76.814	12.730
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	26.633	-
Total	201.056	16.101
Pendapatan usaha utama lainnya		
Pendapatan dari Sukuk Negara	39.023	32.278
Pendapatan dari Sukuk Bank Indonesia	9.998	19.017
Pendapatan Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (SIMA)	3.778	1.446
Pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	78.580	12.423
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SIPA)	1.102	139
Pendapatan Jasa Giro Bank Indonesia	931	-
Bank lainnya	34	351
	133.446	65.654
Total	334.502	81.755

Income from receivables and financing
Murabahah margin income
Qardh ujarah income
Musyarakah profit sharing income

Total

Other main operating income
Income from Sukuk Government
Income from Sukuk Bank Indonesia
Income from Certificate of Interbank
Mudharabah Investment (SIMA)
Income from Bank Indonesia Sharia
Deposit Facility (FASBIS)
Syariah Principle
based fund Management (SIPA)
Income of Bank Indonesia's Giro
Other Banks

Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER

24. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2023	2022	
Bukan Bank			Non-Bank
Deposito <i>mudharabah</i>	96.441	21.626	Mudharabah time deposits
Surat berharga yang diterbitkan	18.959	1.349	Securities issued
Tabungan <i>mudharabah</i>	5.647	1.007	Mudharabah saving
Total	121.047	23.982	Total

Termasuk dalam hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer adalah bagi hasil dana *syirkah* temporer yang berasal dari pihak-pihak berelasi dengan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp312 dan Rp166 (Catatan 31).

Third parties' share on return of temporary *syirkah* funds includes temporary *syirkah* funds from related parties for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp312 and Rp166, respectively (Note 31).

25. PROVISI DAN KOMISI LAINNYA

25. OTHER PROVISION AND COMMISSIONS

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2023	2022	
Pendapatan transaksi perbankan	30.168	7.138	Income from banking transactions
Pendapatan administrasi pembiayaan	2.479	120	Income from financing administration
Lain-lain	87	14	Others
Total	32.734	7.272	Total

26. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF

26. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING ASSETS

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2023	2022	
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	14.446	-	Musyarakah financing
Investasi pada surat berharga	3.776	(314)	Investment in marketable securities
Pinjaman <i>qardh</i>	2.673	5.066	Funds of <i>qardh</i>
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.070	1.752	Estimated losses on commitment and contingencies
Giro pada bank lain	117	(9)	Current account in other banks
Piutang <i>murabahah</i>	(6.358)	30.282	Murabahah receivables
Total	15.724	36.777	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2023	2022	
Jasa tenaga ahli	54.084	33.311	Professional service
Transfer antar bank	39.574	9.589	Interbank transfer
Komunikasi	19.931	13.480	Communication
Sewa gedung dan peralatan	5.603	1.960	Office and equipment rent
Kartu <i>debit</i>	4.347	10.102	Debit card
Pemeliharaan	4.197	5.873	Maintenance
Pengiriman kartu	3.470	7.701	Card delivery
Premi penjaminan simpanan	2.215	1.204	Deposit guarantee premium
Transportasi dan perjalanan dinas	1.904	902	Transportation and travel
Listrik dan air	945	959	Electricity and water
Perlengkapan kantor	544	1.279	Office supplies
Asuransi	70	71	Insurance
Lain-lain	783	303	Others
Total	137.667	86.734	Total

28. GAJI DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

28. SALARIES AND EMPLOYEES' BENEFITS

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2023	2022	
Gaji dan upah	121.033	99.867	Salaries and wages
Tunjangan karyawan	67.464	59.518	Employee allowances
Pendidikan dan pelatihan	5.754	2.482	Education and training
Total	194.251	161.867	Total

29. BEBAN OPERASIONAL LAIN-LAIN

29. OTHER OPERATING EXPENSES

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beban operasional lain-lain terutama berasal dari beban *outsourcing*, beban pajak, beban CSR, dan beban liabilitas sewa.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, other operating expenses mainly consist of expenses for *outsourcing*, tax expenses, CSR expenses, and rent liability expenses.

30. POSISI DEvisa NETO

30. NET OPEN POSITION

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Posisi Devisa Neto (PDN) merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih neto aset dan liabilitas dari masing-masing mata uang asing, baik dalam laporan posisi keuangan maupun rekening administratif yang dinyatakan dalam Rupiah.

In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015 concerning the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 regarding Bank Net Open Position. The Net Open Position (NOP) is the sum of absolute value of the net difference between assets and liabilities of each foreign currency, either on the statement of financial position or off statement of financial position which are stated in Rupiah.

Sesuai ketentuan-ketentuan tersebut, sejak tanggal 29 Mei 2015 Bank umum wajib mengelola dan memelihara PDN secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal.

According to these regulations, since May 29, 2015, commercial banks are required to manage and maintain overall NOP at a maximum of 20% from capital.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. POSISI DEvisa NETO

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Posisi Devisa Neto.

PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai peraturan Bank Indonesia sebagai berikut:

30. NET OPEN POSITION

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank has complied with Bank Indonesia Regulation on Net Open Position.

The Bank's NOP as of December 31, 2023 and 2022 in accordance with Bank Indonesia regulation are as follows:

31 Desember/ December 31, 2023					
	Aset dan aset pada rekening administratif/ Assets and off balance sheet assets	Liabilitas dan Liabilitas pada rekening administratif/ Liabilities and off balance sheet liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai neto absolut/ Net absolute value	
Dolar Amerika Serikat	1.457	(488)	969	969	United States Dollar
Total modal				3.058.074	Total capital
Rasio PDN terhadap modal				0,03%	NOP to capital ratio

PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai peraturan Bank Indonesia sebagai berikut: (lanjutan)

The Bank's NOP as of December 31, 2023 and 2022 in accordance with Bank Indonesia regulation are as follows: (continued)

31 Desember/ December 31, 2022					
	Aset dan aset pada rekening administratif/ Assets and off balance sheet assets	Liabilitas dan Liabilitas pada rekening administratif/ Liabilities and off balance sheet liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai neto absolut/ Net absolute value	
Dolar Amerika Serikat	1.473	(493)	980	980	United States Dollar
Total modal				3.133.799	Total capital
Rasio PDN terhadap modal				0,03%	NOP to capital ratio

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-
PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi, karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Pihak berelasi/Related parties

John Dharma J. Kusuma

PT Aladin Global Ventures

Komisaris, Direksi, Pemimpin Grup dan Pemimpin Divisi/*Commissioners, Directors, Chief, Group Head and Division Head.*

**31. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH
RELATED PARTIES**

In the normal course of business, the Bank engages in transactions with related parties due to the relationship of ownership and/or management. All transactions with related parties were made according to the mutually agreed policies and terms.

Sifat dari hubungan/Relationship:

Pemegang saham utama/*Ultimate shareholder*

Pemegang saham pengendali/*Controlling shareholder*

Manajemen kunci/*Key management*

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pembiayaan			Financing
Piutang <i>Murabahah</i> (Catatan 9)			<i>Murahabah Receivables (Note 9)</i>
Manajemen kunci	81	-	<i>Key management</i>
Persentase terhadap total pembiayaan	0,003%	0,000%	<i>Percentage to total Financing</i>
Dana <i>syirkah</i> temporer			Temporary <i>syirkah</i> funds
Tabungan <i>Mudharabah</i> (Catatan 21)			<i>Mudharabah saving (Note 21)</i>
Pemegang saham utama	8.377	8.301	<i>Ultimate shareholder</i>
Pemegang saham pengendali	65	-	<i>Controlling shareholder</i>
Manajemen kunci	9.145	1.936	<i>Key management</i>
Deposito <i>Mudharabah</i> (Catatan 21)			<i>Mudharabah deposit (Note 21)</i>
Manajemen kunci	9.230	-	<i>Key management</i>
	26.817	10.237	
Persentase terhadap dana <i>syirkah</i> temporer	0,82%	1,28%	<i>Percentage to total temporary <i>syirkah</i> funds</i>
	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2023	2022	
Beban			Expenses
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer (Catatan 24)	312	166	<i>Third parties' share on return of temporary <i>syirkah</i> funds (Note 24)</i>
Persentase terhadap total Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	0,26%	0,69%	<i>Percentage to total third parties' share on return of temporary <i>syirkah</i> funds</i>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Bank menerapkan kebijakan program imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan. Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Steven dan Mourits untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dalam laporannya masing-masing No. 0868/ST-FA-PSAK24-BANK/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan No. 1069/ST-FA-PSAK24-BANK/2023 tanggal 26 Januari 2023.

Penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Tingkat diskonto	6,80%	7,40%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	6,00%	Rate of salary increase
Tingkat mortalita	TMI 2019	TMI 2019	Mortality rate
Tingkat cacat	10% TMI 2019	10% TMI 2019	Disability rate
Usia pensiun normal	56	56	Normal retirement age

Berikut ini merupakan komponen-komponen beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja awal tahun	7.950	3.925	Present value of post-employment benefits liability beginning of the year
Penyesuaian metode atribusi	-	(286)	Adjustment on attribution method
Beban tahun berjalan	3.442	6.147	Expense in current year
Keuntungan aktuarial	(2.041)	(912)	Actuarial gain
Pembayaran manfaat	(219)	(197)	Payment of benefits
Kelebihan pembayaran	(217)	(727)	Excess benefit paid
Nilai kini liabilitas imbalan Kerja	8.915	7.950	Present value of post-employment benefits liability

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2023	2022	
Beban imbalan kerja:			Employees' benefits expense:
Beban jasa kini	4.618	5.154	Current service cost
Perubahan imbalan	(1.835)	-	Changes in benefits
Penyesuaian metode atribusi	-	(286)	Adjustment on attribution method
Beban jasa lalu	442	266	Past service cost
Kelebihan pembayaran	217	727	Excess benefit paid
Beban imbalan kerja - neto	3.442	5.861	Employee benefits expense - net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

Pengukuran kembali keuntungan di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal	2.720	1.808	Beginning balance
Keuntungan aktuarial	2.041	912	Actuarial gain
Saldo akhir	4.761	2.720	Ending balance

Durasi rata-rata tertimbang dari nilai kini liabilitas imbalan kerja diakhir tahun pelaporan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 16,00 tahun dan 17,26 tahun.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji sebesar 1% dengan variabel lain dianggap tetap terhadap nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja karyawan: (tidak diaudit)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Kenaikan tingkat diskonto 1%	(8.061)	(7.129)	Increase in discount rate by 1%
Penurunan tingkat diskonto 1%	9.901	8.905	Decrease in discount rate by 1%
Kenaikan tingkat kenaikan gaji 1%	10.522	8.931	Increase in salary increase rate by 1%
Penurunan tingkat kenaikan gaji 1%	(7.844)	(7.094)	Decrease in salary increase rate by 1%

Jatuh tempo kewajiban imbalan manfaat pasti adalah sebagai berikut (tidak diskonto): (tidak diaudit):

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya	1.105	293	Within the next 12 months
Diantara 1-2 tahun	169	1.253	Between 1 - 2 years
Diantara 2-5 tahun	3.554	2.301	Between 2 - 5 years
Diatas 5 tahun	223.564	366.929	Beyond 5 years
Total	228.392	370.776	Total

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK No. 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS No.19 *Employee Benefits*. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS *Intepretation Committee* ("IFRIC") *Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS No. 19). Perubahan perhitungan tersebut diakui pada laporan keuangan tahun berjalan.

32. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY
(continued)

Remeasurement of gain in other comprehensive income are as follows:

The weighted average duration of present value of benefit obligation at the end of reporting year December 31, 2023 and 2022 is 16.00 years and 17.26 years, respectively.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change at 1% change in discount rate and salary rate with all other variables held constant of the present value of the post-employment benefit liabilities: (unaudited)

The maturity profile of defined benefit obligation is as follows (undiscounted): (unaudited)

In April 2022, DSAK IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board) issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with SFAS No. 24: *Imbalan Kerja* which was adopted from IAS No. 19 *Employee Benefits*. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS *Intepretation Committee* (IFRIC) *Agenda Decision Attributing Banefit to Periods of Service* (IAS No. 19). The change in calculation is recognized in the current year's financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. DANA KEBAJIKAN

Dana kebajikan merupakan penerimaan pendapatan denda dari nasabah dan pendapatan dari transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7 dan Rp1.

33. QARDHUL HASAN FUNDS

Qardhul hasan funds represents penalty from customers and income from sharia transactions that are not fulfilled by the terms and limitations (pillars and/or conditions) for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp7 and Rp1, respectively.

34. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) No. 2 tanggal 25 November 2010, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.

34. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATION OF COMMERCIAL BANKS

Based on Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Regulation No. 2 dated November 25, 2010, the deposits guaranteed included demand deposits, time deposits, certificates of deposits and saving deposits.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 24 tentang LPS. Berdasarkan Undang-undang tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah sampai dengan Rp100 dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

On September 22, 2004, the President of the Republic of Indonesia approved the Law No. 24 of the LPS. Based on the said law, LPS will guarantee customer's deposits up to Rp100 and actively participate in maintaining the stability of the banking system in accordance with the authority given. The said law became effective from September 22, 2005 and since that date, the LPS has been formally operated.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan Peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp100 diubah menjadi maksimum Rp2.000.

On October 13, 2008, the President of the Republic of Indonesia approved the Government Regulation No. 66 Year 2008 regarding the maximum amount of deposits guaranteed by LPS. Based on such regulation, the maximum amount of deposits guaranteed for a particular customer in a bank which previously according to the Law No. 24 Year 2004 amounted to Rp100 was amended to Rp2,000.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank is a participant of the guarantee program.

35. MANAJEMEN MODAL

Kebijakan pengelolaan modal Bank bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha Bank saat ini dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank pada masa yang akan datang, serta untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

35. CAPITAL MANAGEMENT

The Bank's capital management policy aims to ensure that the Bank has an efficient capital structure, has a strong capital to support the Bank's current business development strategy and to maintain the continuity of the Bank's business in the foreseeable future, as well as to meet the capital adequacy set by the regulator.

Rencana permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dalam Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana permodalan Bank disusun berdasarkan penilaian atas kecukupan kebutuhan permodalan yang dipersyaratkan, rencana pengembangan usaha dan kebutuhan likuiditas Bank.

Capital plan is prepared by the Board of Directors as part of the Bank's Business Plan and is approved by the Board of Commissioners. The Bank's capital plan is formulated based on the assessment of capital adequacy requirements, business expansion plan and the Bank's liquidity needs.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016, POJK No. 27 tahun 2022 dan perubahan POJK No. 34/OJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana bank wajib membentuk tambahan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) yaitu *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systematically Important Banks*.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dimana Bank wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp3.000.000. Apabila ketentuan Modal Inti tersebut tidak dipenuhi, maka Bank dapat dikenakan

- a. sanksi administratif berupa teguran tertulis;
- b. sanksi administratif berupa larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha atau jaringan kantor dan pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan
- c. menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha Bank menjadi BPRS, atau mengajukan permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bank Umum Syariah apabila Bank telah dikenakan sanksi administratif pada poin b dan belum dapat memenuhi ketentuan dalam POJK tersebut.

Manajemen berkeyakinan bahwa Bank dapat memenuhi POJK tersebut diatas untuk menjaga modal inti Bank minimum sebesar Rp3.000.000.

Berdasarkan Penilaian yang dilakukan secara internal (*self assessment*), profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah peringkat 2 (dua). Atas dasar ini, KPMM ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

35. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

The Minimum Required Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Requirement as of December 31, 2023 and 2022, calculated based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 11/POJK.03/2016 dated January 26, 2016, POJK No. 27 Year 2022 and the amendment to POJK No. 34/OJK.03/2016 dated September 22, 2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks, where banks are required to establish additional capital according to the risk profile that functions as a buffer, namely *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* and *Capital Surcharge* for *Domestic Systematically Important Banks*.

In addition, based on POJK No. 12/POJK.03/2020 dated March 17, 2020 regarding Consolidation of Commercial Banks where the Bank are required to meet a minimum core capital at least is Rp3,000,000. If the Core Capital requirement is not met, the Bank may be subject to:

- a. Administrative sanctions in the form of written reprimands;
- b. administrative sanctions in the form of prohibitions on expanding business activities or office networks and suspension certain business activities; and
- c. adjust the form and business activities of the Bank to become BPRS, or submit an application for revocation of the business license at the request of the Bank in accordance with the laws and regulations regarding Sharia Commercial Banks if the Bank has been subject to administrative sanctions in point b and has not been able to comply with the POJK.

Management believes that the Bank's can fulfilled that POJK above to maintain the Bank's minimum core capital amounting to Rp3,000,000.

Based on the assessment carried out internally (*self assessment*), the Bank's risk profile as of December 31, 2023 and 2022 is rank 2 (two). On this basis, the minimum KPMM is set at 9% to less than 10%.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Rasio kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhatikan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing dihitung sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Modal inti (<i>Tier 1</i>)		
Modal inti utama (CET 1)	3.003.141	3.117.691
Modal inti tambahan (AT-1)	-	-
Total modal inti	3.003.141	3.117.691
Modal pelengkap (<i>Tier 2</i>)	36.997	16.108
Total modal	3.040.138	3.133.799
Aset tertimbang menurut risiko (ATMR):		
ATMR untuk risiko kredit	3.048.909	1.582.447
ATMR untuk risiko pasar	969	980
ATMR untuk risiko operasional	111.447	72.174
Total ATMR	3.161.325	1.655.601
Rasio CAR		
Rasio CET 1	95,00%	188,31%
Rasio <i>Tier 1</i>	95,00%	188,31%
Rasio <i>Tier 2</i>	1,17%	0,97%
	96,17%	189,28%
Rasio minimum <i>Tier 1</i>	6,00%	6,00%
Rasio minimum CET 1	4,5%	4,50%
CAR minimum berdasarkan profil risiko	9,00% - 10,00%	9,00% - 10,00%

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan oleh Bank Indonesia untuk rasio kecukupan modal.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pelampauan BMPD oleh Bank.

36. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko merupakan bagian penting dalam setiap menjalankan kegiatan usaha. Bank menerapkan fungsi manajemen risiko secara independen sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan Regulator serta *best practices* yang diterapkan oleh perbankan berlandaskan prinsip syariah.

35. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

The Bank's capital adequacy ratio with regard to credit risk, operational risk and market risk as of December 31, 2023 and 2022 are calculated as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Core capital (<i>Tier 1</i>)		
Common equity tier 1	3.003.141	3.117.691
Additional tier 1	-	-
Total core capital	3.003.141	3.117.691
Supplementary capital (<i>Tier 2</i>)	36.997	16.108
Total capital	3.040.138	3.133.799
Risk weighted Assets (RWA):		
Common equity tier 1	3.048.909	1.582.447
RWA for market risk	969	980
RWA for operational risk	111.447	72.174
Total RWA	3.161.325	1.655.601
CAR ratio		
CET 1 ratio	95,00%	188,31%
Tier 1 ratio	95,00%	188,31%
Tier 2 ratio	1,17%	0,97%
	96,17%	189,28%
Minimum Tier 1 ratio	6,00%	6,00%
Minimum CET 1 ratio	4,5%	4,50%
Minimum CAR based on risk profile	9,00% - 10,00%	9,00% - 10,00%

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank has met the ratio required by Bank Indonesia for the capital adequacy ratio.

As of December 31, 2023 and 2022, there was no excess of the BMPD by the Bank.

36. RISK MANAGEMENT

Risk management is an important aspect of any business activities of the Bank. It implements an independent risk management function in accordance with regulations as well as best practices for sharia-based banking.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Tata Kelola Manajemen Risiko

Misi Bank dalam manajemen risiko adalah mempersiapkan kerangka dan metodologi yang sesuai untuk pengelolaan risiko secara efektif di Bank. Tujuan pengelolaan risiko mencakup pengembangan pendekatan dan metodologi baku dalam mengelola risiko di Bank, mempertegas struktur fungsional termasuk tujuan, peran dan tanggung jawab, serta menumbuhkan budaya sadar akan risiko di Bank secara keseluruhan.

Penerapan manajemen risiko mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris bertanggung jawab menyetujui strategi dan kebijakan manajemen risiko. Guna mendukung efektivitas pemantauan risiko, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko serta eksposur risiko.

Dewan Komisaris mendelegasikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan strategi dan kebijakan manajemen risiko. Direksi bertanggung jawab menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, mengembangkan budaya manajemen risiko, memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait serta memastikan fungsi manajemen risiko dilakukan secara independen.

Komite Manajemen Risiko dibentuk pada tingkat Direksi untuk memantau pengembangan strategi dan kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi masalah penting terkait risiko.

Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan risiko, Bank telah membentuk Unit Manajemen Risiko untuk memonitor risiko di Bank secara keseluruhan, terpisah dari *Risk Taking Unit* dan Audit Internal.

Unit Bisnis merupakan *Risk Taking Unit* yang bertanggung jawab mengelola risiko secara keseluruhan dalam ruang tanggung jawab mereka. Unit tersebut harus secara jelas mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengontrol, dan menetapkan mitigasi yang tepat sebelum memasuki setiap aktivitas yang mengandung risiko.

Audit internal akan memberikan penilaian terhadap kecukupan kontrol internal, struktur organisasi dan garis tanggung jawab, dan juga kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan kebijakan internal serta prinsip syariah.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Governance

The Bank's mission on risk management is to provide the appropriate frameworks and methodologies for the effective risk management in the Bank. The objectives of managing risk are to establish standard approach and methodology in managing risks across the Bank, to clarify functional structure including objectives, roles and responsibilities and to cultivate a risk-awareness culture throughout the Bank.

Implementation of Risk Management involves active oversight by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The Board of Commissioners is responsible for approving and evaluating risk management strategy and policy. To support effective oversight, the Board of Commissioners has formed the Oversight Risk Management Committee (ORMC) responsible for overseeing the implementation of risk management strategy, policies and risk exposures.

The Board of Commissioners delegates authority to the Board of Directors to implement the risk management strategy and policies. The Board of Directors is responsible for formulating risk management strategy and policy, developing a risk management culture, ensuring continuing competence enhancement of related risk personnel, and ensuring the independent function of risk management.

The Risk Management Committee is established at the Board of Directors level for overseeing the development of risk strategy, policy and reviewing the major risk issues.

To undertake the risk management function, the Bank has formed the Risk Management Unit to monitor risks across the Bank. The unit is an independent function set apart from Risk Taking Unit and Internal Audit.

Business Unit is risk taking unit which is responsible to manage the risk end to end within their areas of responsibility. They must clearly identify, measure, monitor, control and have mitigations to manage risk before embarking on any risk taking activity.

Internal Audit will provide reasonable assurance of appropriateness of internal controls, organization structure, and reporting lines and also compliance with prevailing law, regulations, and internal policies of the Bank as well as sharia principles.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Kegiatan operasional Bank telah dan dapat terus terdampak oleh pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian global dan Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan terganggunya operasional kegiatan usaha. Pada tanggal 31 Desember 2021, pandemi berdampak terhadap operasi Bank dan kegiatan usaha secara keseluruhan, termasuk kondisi pasar dan lain-lain.

Profil risiko

Dalam melakukan kegiatan usaha, Bank melakukan pengelolaan risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi yang telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, *Risiko Konsentrasi Kredit*, *Counterparty Credit Risk* dan *Settlement Risk*. Risiko kredit dikelola baik pada tingkat transaksi maupun portofolio dan melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian pembiayaan, originasi dan persetujuan pembiayaan, penetapan harga, pemantauan nasabah, pengelolaan pembiayaan bermasalah, dan manajemen portofolio.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko kredit dan mempertahankan kualitas aset yang baik, Bank melakukan *monitoring* ketat terhadap kinerja portofolio pembiayaan termasuk deteksi awal dan usaha-usaha penagihan pembiayaan bermasalah.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

The Bank's operation has and may continue to be impacted by the outbreak of Covid-19 pandemic. The effects of Covid-19 pandemic to the global and Indonesian economy include effect to economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operation. As of December 31, 2021, the pandemic affects the Bank operations and overall business, include market condition and etc.

Risk profile

In conducting its business, the Bank has developed risk management for 10 (ten) different risks as stipulated by Financial Service Authority Regulation (POJK) No. 65/POJK.03/2016 dated December 23, 2016 about Implementation of Risk Management for Sharia Banks and Sharia Business Units which are credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, rate of return risk and investment risk that have been outlined in the Risk Management General Policy (KUMR).

Credit risk is the risk of loss resulting from the defaulting customer or other counterparty in fulfilling their obligations to the Bank as per credit agreement, including credit risk caused by customer default, credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk. Credit risk is managed both at the transaction and portfolio levels and through established policies and procedures covering financing acceptance criteria, financing origination and approval, pricing, account monitoring, problem loan management, and portfolio management.

To increase the effectiveness of credit risk management and to maintain the good asset quality, the Bank closely monitors financing portfolio performance, including early detection and collection effort of problematic financing.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Pengelolaan risiko kredit

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan (*on-statement of financial position*) dan rekening administratif (*off-balance sheet*) tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya.

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Laporan posisi keuangan			Statement of financial position
Giro pada Bank Indonesia	423.910	83.353	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	13.488	1.870	Current account with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia	1.752.700	1.734.100	Placement with Bank Indonesia
Investasi pada surat berharga	1.409.892	1.219.816	Investment in marketable securities
Piutang <i>murabahah</i>	814.569	826.998	Murabahah receivables
Pinjaman <i>qardh</i>	823.362	549.866	Funds of qardh
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	1.464.378	-	Musyarakah Financing
Aset lain-lain ^{*)}	9.117	13.024	Other assets ^{*)}
	6.711.416	4.429.027	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(52.774)	(38.121)	Less: Allowance for impairment losses
Total	6.658.642	4.390.906	Total

^{*)} Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih akan diterima dan setoran jaminan

^{*)} Other assets consist of accrued income and security deposits

Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya adalah sebagai berikut:

Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collaterals and other credit risk mitigations are as follows:

- Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain piutang menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.
- Untuk piutang, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit.

- The carrying amount of Bank's financial assets other than receivable represent the maximum exposure of credit risk.
- For receivables, the Bank uses collaterals to minimize the credit risk.

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan kategori portofolio adalah sebagai berikut:

The disclosure on the maximum credit risk concentration by portfolio category are as follows:

	31 Desember/December 31, 2023				
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Lainnya/ Others	Total/ Total	
Laporan posisi keuangan					Financial assets
Giro pada Bank Indonesia	423.910	-	-	423.910	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	13.488	-	13.488	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia	1.752.700	-	-	1.752.700	Placements with Bank Indonesia
Investasi pada surat berharga	756.867	325.000	328.025	1.409.892	Investment in marketable securities
Piutang <i>murabahah</i>	-	-	814.569	814.569	Murabahah receivables
Pinjaman <i>qardh</i>	-	-	823.362	823.362	Funds of qardh
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	-	-	1.464.378	1.464.378	Musyarakah financing
Aset lain-lain ^{*)}	6.651	952	1.514	9.117	Other assets ^{*)}
	2.940.128	339.440	3.431.848	6.711.416	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai				(52.774)	Less: allowance for impairment losses
Neto				6.658.642	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

36. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Pengelolaan risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk management (continued)

31 Desember/December 31, 2022					
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Lainnya/ Others	Total/ Total	
Laporan posisi keuangan					Financial assets
Giro pada Bank Indonesia	83.353	-	-	83.353	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	1.870	-	1.870	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia	1.734.100	-	-	1.734.100	Placements with Bank Indonesia
Investasi pada surat berharga	944.453	-	275.363	1.219.816	Investment in marketable securities
Piutang <i>murabahah</i>	-	-	826.998	826.998	Murabahah receivables
Pinjaman <i>qardh</i>	-	-	549.866	549.866	Funds of <i>qardh</i>
Aset lain-lain ^{*)}	-	-	13.024	13.024	Other assets ^{*)}
	2.761.906	1.870	1.665.251	4.429.027	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai				(38.121)	Less: allowance for impairment losses
Neto				4.390.906	Net

^{*)} Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih akan diterima dan setoran jaminan

^{*)} Other assets consist of accrued income and security deposits

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan kategori portofolio adalah sebagai berikut:

The disclosure on the maximum credit risk concentration by portfolio category are as follows:

31 Desember/December 31, 2023					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total/ Total	
Laporan posisi keuangan					Financial assets
Giro pada Bank Indonesia	423.910	-	-	423.910	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	13.488	-	-	13.488	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia	1.752.700	-	-	1.752.700	Placements with Bank Indonesia
Investasi pada surat berharga	1.409.892	-	-	1.409.892	Investment in marketable securities
Piutang <i>murabahah</i>	814.569	-	-	814.569	Murabahah receivables
Pinjaman <i>qardh</i>	823.362	-	-	823.362	Funds of <i>qardh</i>
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	1.464.378	-	-	1.464.378	Financing <i>musyarakah</i>
Aset lain-lain ^{*)}	9.117	-	-	9.117	Other assets ^{*)}
	6.711.416	-	-	6.711.416	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(52.774)	-	-	(52.774)	Less: allowance for impairment losses
Neto	6.658.642	-	-	6.658.642	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko (lanjutan)

a. Pengelolaan risiko kredit (lanjutan)

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan kategori portofolio adalah sebagai berikut: (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2022

	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total/ <i>Total</i>	
Laporan posisi keuangan					Financial assets
Giro pada Bank Indonesia	83.353	-	-	83.353	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain	1.870	-	-	1.870	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia	1.734.100	-	-	1.734.100	<i>Placements with Bank Indonesia</i>
Investasi pada surat berharga	1.219.816	-	-	1.219.816	<i>Investment in marketable securities</i>
Piutang <i>murabahah</i>	826.998	-	-	826.998	<i>Murabahah receivables</i>
Pinjaman <i>qardh</i>	549.866	-	-	549.866	<i>Funds of qardh</i>
Aset lain-lain ^{*)}	13.024	-	-	13.024	<i>Other assets^{*)}</i>
	4.429.027	-	-	4.429.027	
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(38.121)	-	-	(38.121)	<i>Less : allowance for impairment losses</i>
Neto	4.390.906	-	-	4.390.906	Net

^{*)} Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih akan diterima dan setoran jaminan

^{*)} Other assets consist of accrued income and security deposits

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini, adalah:

1. Bank telah menetapkan dan menerapkan tata kelola, kerangka, proses dan pengendalian manajemen risiko kredit.
2. Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan dan Prosedur Kredit, *Risk Appetite Statement*, *Risk Acceptance Criteria*, dan Komite Kredit secara konsisten.
3. Memiliki standar prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan infrastruktur terkait dengan proses pembiayaan, yaitu antara lain prosedur pembiayaan yang memadai dan memiliki Tim *Collection* dengan sistem yang mendukung;
4. Bank menetapkan batas kredit, termasuk BMPD, financing line, wewenang pemutus pembiayaan dan portofolio berdasarkan sektor ekonomi guna mengelola risiko kredit.

Some mitigations taken to manage and mitigate this risk are:

1. The Bank has established and implemented credit risk management governance, framework, processes and controls.
2. The Bank has and consistently implemented Credit Policies and Procedures, Risk Appetite Statement, Risk Acceptance Criteria, and Credit Committee.
3. Having well-documented standard procedures and infrastructure related to the financing process, including adequate financing procedures and having a Collection Team with a supporting system.
4. Banks determine credit limits, including BMPD, financing lines, financing decision authority and portfolios based on economic sectors to manage credit risk.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko (lanjutan)

b. Pengelolaan risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau disewakan.

Risiko pasar meliputi antara lain risiko benchmark suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko benchmark suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book, sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi trading book.

Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) oleh Bank.

1. Strategi pengelolaan aset dan liabilitas bank melalui mekanisme ALCO antara lain yaitu *asset & liabilities management*.
2. *Monitoring* dan pengukuran secara berkala terhadap kecenderungan perubahan harga pasar, kemungkinan terjadinya tekanan pasar serta limitasi risiko pasar.
3. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan tingkat *margin* di pasar dan menganalisa pengaruhnya terhadap kinerja Bank.
4. Bank telah memiliki dan menerapkan Prosedur Risiko Pasar dan *Risk Appetite Statement*. Melakukan perhitungan *stress testing* risiko pasar secara berkala.
5. Bank telah melakukan perhitungan *stress testing* risiko pasar secara berkala.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk profile (continued)

b. Market risk management

Market risk is the risk to financial positions and administrative accounts due to changes in market prices, including the risk of changes in the value of traded or leased assets.

Market risk includes, among others, interest rate benchmark risk, exchange rate risk, equity risk and commodity risk. Interest rate benchmark risk, exchange rate risk and commodity risk can originate from both trading book positions and banking book positions, while equity risk originates from trading book positions.

Market risk is managed through a comprehensive policy and limit framework to measure and monitor the amount of risk based on risk appetite of the Bank.

1. *Strategies for managing bank assets and liabilities through the ALCO mechanism, including asset & liabilities management .*
2. *Regular monitoring and measurement of trends in market price changes, the possibility of market pressure and market risk limitation.*
3. *The Bank has and implemented Market Risk Procedures and a Risk Appetite Statement.*
4. *The Bank has and implemented Market Risk Procedures and a Risk Appetite Statement.*
5. *The Bank has carried out market risk stress testing calculations periodically.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko (lanjutan)

c. Pengelolaan risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi Bank yang harus dikelola secara berkesinambungan.

Risiko likuiditas timbul akibat adanya ketidaksesuaian jatuh tempo antara liabilitas dan tagihan/pembiayaan yang dimiliki Bank. Hal ini dikarenakan pada umumnya Bank memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Likuiditas dikelola dan dimonitor berdasarkan arus kas untuk memastikan kecukupan sumber dana dalam memenuhi liabilitas keuangan dan kewajiban regulator berdasarkan normal bisnis proses dan skenario *stress*. Analisis kesenjangan likuiditas dan *monitoring* terhadap indikator likuiditas telah diterapkan untuk memberikan informasi tambahan dalam mengelola posisi risiko likuiditas. Sumber dana terdiversifikasi untuk meminimalkan konsentrasi pendanaan. Rencana pendanaan darurat likuiditas telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis likuiditas.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk profile (continued)

c. Liquidity risk management

Liquidity risk is a risk caused among others by the inability of the Bank to meet its obligation associated with financial liabilities at the due date from the funding source cash flow and/or from high quality liquid asset as collateral, without interrupting Bank's financial activity and financial condition. Liquidity risk is one of major concerns for the Bank that must be managed on an on-going basis.

Liquidity risk arises when there is a timing difference between the maturity of the Bank's liabilities and loan/financing. This is due to the short-term nature of the funds obtained by the Bank whereas the Bank uses these funds to finance loans granted to customers which are usually for a longer period of time.

Liquidity is managed and monitored on a cash flow basis to ensure that sufficient sources of funding is available to meet financial and regulatory obligations under business-as-usual (BAU) and stress scenarios. Liquidity gap analysis and monitoring on liquidity indicators have been implemented to serve as supplementary information in managing liquidity risk position. Sources of funding are diversified to minimize funding concentration. Liquidity contingency plan is in place to prepare the Bank in the case of a liquidity crisis.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Profil risiko (lanjutan)

Risk profile (continued)

c. Pengelolaan risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk management (continued)

Profil sisa umur aset dan liabilitas Bank berdasarkan perjanjian dengan nasabah/pihak lawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

The maturity profiles of the Bank's assets and liabilities based on contractual agreements with customers/counterparties as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

31 Desember/December 2023							
Total	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 - 3 bulan/ More than 1 - 3 month	Lebih dari 3 - 6 bulan/ More than 3 - 6 month	Lebih dari 6 - 12 bulan/ More than 6 - 12 month	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 month	Tidak memiliki kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	
Aset							Assets
Kas	1.013	1.013	-	-	-	-	Cash
Giro pada							Current accounts with
Bank Indonesia	423.910	423.910	-	-	-	-	Bank Indonesia
Giro pada bank lain	13.488	13.488	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placement with Bank Indonesia
bank Indonesia	1.752.700	1.752.700	-	-	-	-	Investment in marketable securities
Investasi pada surat berharga	1.409.892	426.396	25.731	-	372.100	257.640	Murabahah receivables
Piutang murabahah	814.569	54.374	30.876	690.616	22.902	15.801	Funds of qardh
Pinjaman qardh	823.362	177.165	643.962	2.171	-	64	Financing musyarakah
Pembiayaan musyarakah	1.464.378	150.000	285.500	6.111	435.000	587.767	Other assets *)
Aset lain-lain *)	9.117	7.840	46	721	73	437	
Sub-total	6.712.429	3.006.886	986.115	699.619	830.075	861.709	Sub-total
Dikurangi:							Less:
Cadangan kerugian							Allowance for impairment losses
penurunan nilai	(52.774)	(7.908)	(9.444)	(21.230)	(4.793)	(6.119)	(3.260)
Total aset	6.659.655	2.998.978	976.671	678.389	825.282	855.590	Total assets
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas segera	69.839	69.255	-	-	-	-	Liabilities due immediately
Liabilitas kepada Bank							Liabilities due to Bank
Indonesia	584.248	584.248	-	-	-	-	Indonesia
Liabilitas lain-lain **)	79.082	1.637	5.212	1.459	4.266	57.710	Other liabilities **)
Sub-total	733.169	655.140	5.212	1.459	4.266	57.710	Sub-total
Simpanan Wadiah							Wadiah Deposits
Tabungan Wadiah	1	1	-	-	-	-	Wadiah Savings Deposits
Sub-total	1	1	-	-	-	-	Sub-total
Dana Syirkah Temporer							Temporary Syirkah Funds
Tabungan mudharabah	510.651	510.651	-	-	-	-	Mudharabah savings deposits
Deposito mudharabah	2.744.348	1.953.141	644.013	146.194	1.000	-	Mudharabah time deposits
Sub-total	3.254.999	2.463.792	644.013	146.194	1.000	-	Sub-total
Neto	2.671.486	(119.955)	327.446	530.736	820.016	797.880	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko (lanjutan)

c. Pengelolaan risiko likuiditas (lanjutan)

Profil sisa umur aset dan liabilitas Bank berdasarkan perjanjian dengan nasabah/pihak lawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

31 Desember/December 2022

	Total	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 - 3 bulan/ More than 1 - 3 month	Lebih dari 3 - 6 bulan/ More than 3 - 6 month	Lebih dari 6 - 12 bulan/ More than 6 - 12 month	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 month	Tidak memiliki kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	
Aset								Assets
Kas	651	651	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada								Current accounts with
Bank Indonesia	83.353	83.353	-	-	-	-	-	Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.870	1.870	-	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada								Placement with Bank Indonesia
bank Indonesia	1.734.100	1.734.100	-	-	-	-	-	
Investasi pada surat berharga	1.219.816	19.920	125.054	75.357	110.743	613.379	275.363	Investment in marketable securities
Piutang <i>murabahah</i>	826.998	-	50.000	35.752	740.366	880	-	Murabahah receivables
Pinjaman <i>qardh</i>	549.866	245.563	304.303	-	-	-	-	Funds of qardh
Aset lain-lain *)	13.024	10.405	-	-	-	2.619	-	Other assets *)
Sub-total	4.429.678	2.095.862	479.357	111.109	851.109	616.878	275.363	Sub-total
Dikurangi:								Less:
Cadangan kerugian								Allowance for impairment losses
penurunan nilai	(38.121)	(2.763)	(3.486)	(850)	(28.233)	(17)	(2.772)	
Total aset	4.391.557	2.093.099	475.871	110.259	822.876	616.861	272.591	Total assets
Liabilitas								Liabilities
Liabilitas segera	16.392	15.399	-	-	-	-	993	Liabilities due immediately
Surat berharga yang								Securities issued
diterbitkan	684.000	684.000	-	-	-	-	-	Other liabilities **)
Liabilitas lain-lain **)	79.315	-	1.458	29.054	-	25.081	23.722	
Sub-total	779.707	699.399	1.458	29.054	-	25.081	24.715	Sub-total
Simpanan Wadiah								Wadiah Deposits
Tabungan Wadiah	1	1	-	-	-	-	-	Wadiah Savings Deposits
Sub-total	1	1	-	-	-	-	-	Sub-total
Dana Syirkah Temporer								Temporary Syirkah Funds
Tabungan <i>mudharabah</i>	116.306	116.306	-	-	-	-	-	Mudharabah savings deposits
Deposito <i>mudharabah</i>	678.343	621.043	57.300	-	-	-	-	Mudharabah time deposits
Sub-total	794.649	737.349	57.300	-	-	-	-	Sub-total
Neto	2.817.200	656.350	417.113	81.205	822.876	591.780	247.876	Net

*) Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih akan diterima dan setoran jaminan

*) Other assets consist of accrued income and security deposits

**) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya masih harus dibayar dan liabilitas sewa

**) Other accrued income consist of accrued expenses and lease liabilities

Usaha-usaha yang dilakukan Bank untuk mengatasi *maturity gap* yang ada adalah sebagai berikut:

The following are the Bank's efforts to reduce the existing maturity gap:

1. Mengupayakan agar dana pihak ketiga disalurkan dalam bentuk piutang dan pembiayaan dengan jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu penghimpunan dana pihak ketiga. Dengan demikian dana jangka pendek pihak ketiga diupayakan disalurkan ke dalam pembiayaan jangka pendek. Demikian juga sebaliknya untuk pendanaan jangka panjang pihak ketiga diupayakan disalurkan ke dalam pembiayaan jangka panjang pula.

1. Manage third party funds to be disbursed in the form of receivables and financing within the term period which shall not exceed the third party funding time period. The short-term third party funds shall be disbursed into the short-term receivables and financing. Similarly, long-term third party funds shall be disbursed into the long-term receivable and financing.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko (lanjutan)

c. Pengelolaan risiko likuiditas (lanjutan)

2. Mengupayakan agar dana pihak ketiga dihimpun dalam periode jangka panjang dengan memberikan imbal hasil yang lebih kompetitif.

Untuk memperkuat pengelolaan risiko likuiditas, Bank memaksimalkan fungsi Komite Aset dan Liabilitas (ALCO). Posisi keuangan dan strategi likuiditas untuk pendanaan, kecukupan permodalan, penetapan harga dan kesenjangan jatuh tempo didiskusikan di rapat ALCO untuk evaluasi, pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.

d. Pengelolaan risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena kurang memadainya proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia, *fraud*, dan kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional merupakan salah satu risiko besar yang perlu dikelola secara hati-hati karena dampak risiko operasional yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Pengendalian risiko operasional perlu dilakukan untuk memitigasi risiko operasional. Pengendalian risiko dilakukan melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control/dual custody* dalam pelaksanaan transaksi, fungsi *override/ otorisasi*, pembatasan wewenang akses sistem, pendidikan serta penilaian karyawan secara berkelanjutan, dan proses penilaian dan pelaksanaan fungsi internal audit.

Untuk mendukung *monitoring* risiko operasional, Bank menyempurnakan perangkat risiko seperti dan tidak terbatas pada, *Loss Event Management (LEM)*, *Risk & Control Self-Assessment (RCSA)*, *Key Risk Indicators (KRI)*, *Business Continuity Management*, dan *Fraud Risk Management*.

Seluruh aspek pengelolaan risiko operasional tercantum secara resmi dan tertulis pada kerangka manajemen risiko operasional yang dievaluasi secara berkala untuk penyesuaian dan peningkatan.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk profile (continued)

c. Liquidity risk management (continued)

2. *Striving for third party funds to be collected for longer-term period by granting competitive yields.*

To strengthen the management of liquidity risk, the Bank maximizes the function of Asset Liability Management Committee (ALCO). Financial positions, as well as various liquidity strategy of funding, capital adequacy, pricing and maturity gap are discussed in ALCO for further assessment, deliberation and decision.

d. Operational risk management

Operational risk is the risk of loss arising from inadequate internal process, system failure, human error, fraud, and external events that affects the operations of the Bank. Operational risk is one of the major risks that should be managed carefully due to the impact of operational risk that can affect the Bank's going concern.

Controls of operational risk are necessary to mitigate the operational risk. The risk controls was done through the segregation of tasks and duties, dual control/dual custody mechanism in execution of transaction, override/ authorization function, restrictions on system access authority, employee education and assessment on an on going basis, and assessment and implementation of internal audit.

To facilitate the operational risk monitoring, the Bank has been enhancing risk management tools, such as, and not limited to, Loss Event Management (LEM), Risk & Control Self-Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI), Business Continuity Management, and Fraud Risk Management.

All aspect of operational risk management are written formally in operational risk framework and evaluated periodically for adjustments and improvements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko (lanjutan)

d. Pengelolaan risiko operasional (lanjutan)

Proses pengkajian risiko dilakukan untuk menilai kecukupan pengendalian internal serta proses identifikasi dan pengukuran risiko untuk setiap proses dan produk disetiap masing-masing unit kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan batas-batas yang ditetapkan oleh manajemen.

e. Pengelolaan risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, ketentuan internal bank, dan penerapan Prinsip Syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional. Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Bank.

Adapun beberapa metode untuk memitigasi risiko kepatuhan yang telah dilakukan oleh Bank selama ini adalah:

- a. Meminta seluruh karyawan dan satuan kerja yang ada agar lebih meningkatkan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan kegiatan operasional Bank termasuk penyampaian laporan-laporan kepada regulator.
- b. Meneruskan program-program kepatuhan yang bersifat *ex-ante*, antara lain:
 - i. Pelatihan (*in-house*) secara berkala mengenai kepatuhan dan manajemen risiko.
 - ii. Keikutsertaan satuan kerja Kepatuhan dan satuan kerja Manajemen Risiko secara aktif dalam pengawasan pengembangan.
 - iii. Mempertahankan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan Dewan Pengawas Syariah untuk menegakkan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk profile (continued)

d. Operational risk management (continued)

The process of risk assessment is carried out to assess the adequacy of internal control as well as the process of identifying and measuring risks for each process and product in each work unit to ensure compliance with policies, regulations and limits set by management.

e. Compliance risk management

Compliance risk is the risks resulting from the failure of the Bank in fulfilling and/or implementing the prevailing laws and other applicable regulations, Bank's internal regulations, and sharia principles. In engaging in the banking industry services, the Bank is required to always comply with the banking regulations issued by the Government, Bank Indonesia, Financial Services Authority, and National Sharia Board. The Bank inability to follow and comply with all laws and regulations related to the banking business activities may affect the continuity of the Bank.

Several methods to mitigate the compliance risks conducted by the Bank up to present are as follows:

- a. Requesting all employees and units to further enhance prudence and thoroughness in performing the Bank's operations as well as in submitting regulatory reports to the regulators.
- b. Continuance compliance programs that are *ex-ante*, among others:
 - i. Training (*in-house*) periodically on compliance and risk management.
 - ii. Participation of Compliance work units and Risk Management work units is actively in development supervision.
 - iii. Maintain effective communication and coordination with the Sharia Supervisory Board to uphold the implementation of the function of compliance with sharia principles.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko (lanjutan)

e. Pengelolaan risiko kepatuhan (lanjutan)

- c. Melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan masukan kepada unit bisnis serta unit operasional dalam hal pengembangan produk dan/atau aktivitas baru.
- d. Melakukan penilaian terhadap kebijakan dan prosedur internal yang dimiliki dalam rangka memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah diakomodasi dan dipatuhi dalam pelaksanaannya.
- e. Melakukan sosialisasi terkait peraturan yang berlaku kepada seluruh karyawan sehingga setiap unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan berlaku.
- f. Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan operasi Bank dengan prinsip Syariah.
- g. Memberdayakan kepatuhan syariah untuk meninjau dan menganalisis kepatuhan dari produk Bank/kegiatan dengan prinsip Syariah.

f. Pengelolaan risiko hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh kelemahan dalam perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi atau penyelesaian sengketa baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan oleh Bank mencakup:

- a. Melakukan analisa hukum atas produk dan/atau aktivitas baru, serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan/atau aktivitas tersebut.
- b. Memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Bank dengan pihak ketiga dan melakukan pemeriksaan berkala atas perjanjian yang telah dibuat.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk profile (continued)

e. Compliance risk management (continued)

- c. Identifying and managing compliance risk from the start by providing input to business units and operational units in developing new products and/or activities.
- d. Conducting an assessment of the internal policies and procedures in place to ensure that all external regulations have been provided and adhered to in their implementation.
- e. Disseminating information regarding applicable regulations to all employees so that each work unit can carry out its duties and responsibilities in accordance with the applicable regulations.
- f. Cooperating with the Sharia Supervisory Board in ensuring compliance of the Bank's operations with sharia principles.
- g. Empowering sharia compliance by reviewing and analyzing the compliance of the Bank's products/activities with sharia principles.

f. Legal risk management

Risks due to lawsuits and/or weakness in juridical aspects. Legal risk can originate amongst other from weaknesses in the judicial aspect caused by weaknesses in the Bank's contract, lack of or changes in regulations impacting the transactions conducted becomes incompliance with the new regulations, and litigation process or dispute resolution coming from third party litigation claims to the Bank or vice versa.

Mitigations and risk management carried out by the Bank include:

- a. Conducting legal analysis of new product and/or activities, as well as making standard legal documents related to these products and/or activities.
- b. Examining all agreements to be made between the Bank and third parties and conducting periodic checks on agreements that have been made.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko (lanjutan)

f. Pengelolaan risiko hukum (lanjutan)

- c. Menerapkan standarisasi akad dan perjanjian kerja sama untuk program pembiayaan tertentu.
- d. Memberikan opini hukum atas permintaan unit kerja lain guna memitigasi adanya potensi hukum bagi Bank.

g. Pengelolaan risiko strategik

Risiko ini merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena Bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Bank, melakukan analisis lingkungan strategi yang tidak komprehensif dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategi antar level strategi.

Risiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan oleh Bank mencakup:

- a. Melakukan identifikasi dan kuantifikasi risiko strategik sejak awal penyusunan rencana bisnis Bank dengan berpedoman pada visi, misi, strategi dan kemampuan Bank.
- b. Mengelola risiko strategik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan Komite Manajemen Risiko, untuk selanjutnya disampaikan ke Direksi.
- c. Pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan strategi dan rencana bisnis Bank masih relevan dengan situasi dan kondisi terkini dan mengukur tingkat keberhasilan pencapaian rencana bisnis Bank.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk profile (continued)

f. Legal risk management (continued)

- c. Implementing standardization of contracts and cooperation agreements for certain financing programs.
- d. Provide legal opinion at the request of other work units in order to mitigate the existence of legal potential for the Bank.

g. Strategic risk management

This risk refers to inaccuracies in taking and/ or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. This risk arises, among others, because the Bank adopts a strategy that is not in line with the Bank's vision and mission, carries out a strategic environmental analysis that is not comprehensive and/or there are discrepancies in the strategic plan between strategic levels.

Strategic risks also arise from failure to anticipate changes in the business environment, including failure to anticipate changes in technology, changes in macroeconomic conditions, dynamics of competition in the market and changes in policies of relevant authorities.

Mitigations and risk management carried out by the Bank include:

- a. Identifying and quantifying strategic risks from the start of the preparation of the Bank's business plan based on the Bank's vision, mission, strategy and capabilities.
- b. Managing strategic risk through a collective and comprehensive consideration and decision-making process within the Risk Management Committee for submission to the Board of Directors.
- c. Implementing regular reviews to ensure that the Bank's strategy and business plan is still relevant to the current situation and condition and to measure the success rate of achieving the Bank's business plan.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko (lanjutan)

h. Pengelolaan risiko reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Bank yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi Bank yang kurang efektif.

Bank melakukan penerapan manajemen risiko reputasi dengan melakukan aktivitas *public relation*, CSR (*Corporate Social Responsibility*), respons yang cepat terhadap keluhan nasabah, dan penerapan *Good Corporate Governance* yang konsisten.

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan oleh Bank mencakup:

- a. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui *website* Bank dan surat kabar dengan berkoordinasi bersama antar unit kerja.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media.
- c. Membuat klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah terbaik yang ditempuh Bank apabila terdapat pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media.
- d. Melakukan analisis risiko reputasi yang mungkin timbul, serta strategi untuk mengantisipasi risiko saat meluncurkan produk/layanan/program baru Bank.
- e. Menerbitkan laporan keuangan Bank melalui media sesuai ketentuan regulator.

i. Pengelolaan risiko imbal hasil

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk profile (continued)

h. Reputation risk management

Risks due to reduced level of stakeholder trust stemming from negative perceptions to the Bank. This risk arises due to, among others, negative media coverage and/or rumors about the Bank as well as ineffective Bank's communication strategy.

The Bank implements reputational risk management by carrying out public relations activities, CSR (Corporate Social Responsibility), quick responses to customer complaints, and consistent implementation of Good Corporate Governance.

Mitigations and risk management carried out by the Bank include:

- a. *Providing information disclosure to the public through the Bank's website and newspapers by coordinating with other relevant business units.*
- b. *Supervising media coverage to monitor negative publications or customer complaints that appear in the media.*
- c. *Making clarifications and responses in accordance with the best steps taken by the Bank if there is negative news and customer complaints that appear in the media.*
- d. *Performing a reputation risk analysis that may arise, as well as strategies to anticipate risks when launching new products/services/programs of the Bank.*
- e. *Publish the Bank's financial statement through the media in accordance with regulatory requirements.*

i. Rate of return risk management

The rate of return risk is the risk due to changes in the rate of return paid by the Bank to customers, as result of changing the rate of return received by the Bank from channeling funds, which can affect the behavior of the Bank's third party fund customers.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko (lanjutan)

i. Pengelolaan risiko imbal hasil (lanjutan)

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan oleh Bank mencakup:

- a. Kebijakan pemberian *pricing* kepada nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan akad berbasis bagi hasil diputuskan pada rapat ALCO.
- b. *Monitoring* dan pengukuran terhadap kebijakan *pricing* dilakukan minimal satu bulan sekali atau sesuai kebutuhan apabila terjadi tekanan pasar yang dapat meningkatkan risiko Bank.
- c. Kecukupan penetapan limit dan proses kaji ulang yang memadai terhadap limit transaksi maupun portofolio DPK dengan akad berbasis bagi hasil dan sensitivitas terhadap perubahan *pricing* di pasar.
- d. Estimasi secara berkala terhadap potensi kerugian ekonomis Bank pada kondisi pasar yang tidak normal guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan suku bunga *benchmark* dan nisbah di pasar.

j. Pengelolaan risiko investasi

Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun metode *profit and loss sharing*.

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan oleh Bank mencakup:

- a. Identifikasi atas risiko aktivitas investasi dengan akad berbasis bagi hasil terhadap portofolio yang sudah ada atau potensi risiko yang mungkin timbul guna memudahkan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang jelas dan hati-hati, sehingga risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif.
- b. Mengimplementasikan proses persetujuan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang efektif antara lain dengan menetapkan batas kewenangan (limit) dan mekanisme pengambilan keputusan investasi dengan akad berbasis bagi hasil.
- c. *Monitoring* terhadap konsentrasi penyaluran dana dengan akad berbasis bagi hasil sehingga sesuai dengan *risk appetite* Bank.
- d. Secara efektif mengawasi dan mengendalikan sifat, karakteristik dan kualitas dari investasi dengan akad berbasis bagi hasil.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk profile (continued)

i. Rate of return risk management (continued)

Mitigation and risk management carried out by Bank include:

- a. The policy for granting pricing to Third Party Fund (TPF) customers with a profit-sharing based contract is decided at the ALCO meeting.
- b. Monitoring and measurement of the pricing policy is carried out at least once a month or as needed in case of market pressures that can increase the Bank's risk.
- c. Adequacy of limit setting and an adequate review process of transaction limits and TPF portfolio with a profit-sharing based contract and sensitivity to changes in pricing in the market.
- d. Periodic estimation of the Bank's potential economic losses in abnormal market conditions in order to see the sensitivity of the Bank's performance to changes in benchmark interest rates and market ratios.

j. Investment risk management

Risks due to the Bank taking part in the losses of the customers' business financed in profit-sharing based financing using both the net revenue sharing method and the profit and loss sharing method.

Mitigation and risk management carried out by Bank include:

- a. Identification of the risks of investment activities with a profit-sharing agreement based on existing portfolios or on potential risks that may arise in order to facilitate the preparation and implementation of investment policies with a clear and careful profit-sharing based contract, so that these risks can be managed and controlled effectively.
- b. Implementing an investment approval process with an effective profit-sharing based contract among others by setting limits of authority (limit) and a mechanism for making investment decisions with a profit-sharing based contract.
- c. Monitoring the concentration of fund disbursement by means of a profit-sharing based contract so that it is in line with the Bank's risk appetite.
- d. Effectively supervise and control the nature, characteristics and quality of investments under a profit-sharing based contract.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

37. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earning per share is calculated by dividing the income for the years by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the years.

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2023	2022	
Rugi bersih tahun berjalan	(226.738)	(264.913)	Loss income for the year
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	13.813.658.645	13.545.283.972	Weighted average number of ordinary shares outstanding
Laba per saham dasar (nilai penuh)	(16)	(20)	Basic earnings per share (full amount)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, PMTHMETD dan waran yang belum di *exercise* tidak diperhitungkan dalam perhitungan laba per saham dilusian karena instrumen tersebut bersifat antidilutif.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, PMTHMETD and unexercised warrant is not considered in the calculation of diluted earning per share as the instrument is antidilutive.

38. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. S.048.BOD/02.2024 tanggal 28 Februari 2024 dan S.109.BOD/02.2023 tanggal 27 Februari 2023, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta opini syariah dari DPS.

38. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on letter No. S.048.BOD/02.2024 tanggal 28 Februari 2024 and No. S.109.BOD/02.2023 dated 27 Februari 2023, the Sharia Supervisory Board (DPS) of the Bank stated that in general, the sharia aspects on products and operations of the Bank for the years ended December 31, 2023 and December 31, 2022, have complied with fatwa and sharia regulations issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), and sharia opinion of DPS.

39. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

39. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statements are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2023	Arus kas/ Cash flow	Aktivitas non-kas/ Non-cash activity	31 Desember/ December 31, 2023	
	Liabilitas sewa	23.689	(12.376)	19.110	
	1 Januari/ January 1, 2022	Arus kas/ Cash flow	Aktivitas non-kas/ Non-cash activity	31 Desember/ December 31, 2022	
	Liabilitas sewa	27.902	(12.338)	8.125	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. STANDAR AKUNTANSI BARU YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Bank bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional;
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK);
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik; dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Standar ini merupakan adopsi penuh dari *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") yang diterjemahkan kata demi kata dan tidak ada modifikasi dari Standar IFRS, termasuk tanggal efektifnya. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menerapkan standar ini, sejak tanggal efektif.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

Amandemen PSAK No 73, "Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik"

Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

40. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The standards and interpretations that are issued by the Board of Financial Accounting Standards, but not yet effective for current year financial statements are disclosed below. The Bank intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

Effective beginning on or after January 1, 2024

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. Pillar 1 International Financial Accounting Standards;
2. Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK);
3. Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability; and
4. Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.

International Financial Accounting Standard

This standard is a full-adoption of *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") which is translated in a word-for-word basis and there is no modifications from IFRS Standards, including the effective date. Entities that meet the requirements can apply this standard, from the effective date.

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

Amendment to SFAS No. 73, "Lease Liability in a Sale and Leaseback"

The amendment to SFAS No 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Million of Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Sejak awal diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2021 hingga tanggal 31 Desember 2023, jumlah waran yang telah di eksekusi adalah sejumlah 221.053.392 lembar waran atau sebesar Rp24.315.873.120 (nilai penuh) dimana 221.042.892 lembar waran atau sebesar Rp24.314.718.120 (nilai penuh) telah dicatat sebagai modal ditempatkan dan disetor dan untuk sisa waran yang telah di eksekusi namun belum diaktakan sejumlah 10.500 lembar waran, masih dicatat sebagai dana setoran modal. Sisa waran yang belum di eksekusi sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan adalah sejumlah 2.578.946.608 lembar waran.
- b. Pada tanggal 28 Februari 2024, Pengadilan Pajak telah menerbitkan keputusan Pengadilan Pajak tentang Keberatan Bank atas SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 yang dalam keputusan tersebut, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh keberatan banding yang diajukan oleh Bank.
- c. Untuk menambah permodalan Bank, pada tanggal 28 Maret 2024, Bank telah menerima dana setoran modal dari PT Aladin Global Venture sebesar Rp45.000.

41. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- a. Since its initial issuance on August 2, 2021 until December 31, 2023, the number of warrants that have been exercised is 221,053,392 warrants or Rp24,315,873,120 (full amount) of which 221,042,892 warrants or Rp24,314,718,120 (full amount) have been recorded as issued and paid-up capital and the remaining warrants that have been executed but have not been notarized, amounting to 10,500 warrants, are still recorded as capital deposit funds. The remaining warrants that have not been exercised as of the date the financial statements are published are 2,578,946,608 warrants.
- b. On February 28, 2024 the Tax Court has issued Tax Court decision related the Bank's appeal on SKPKB tax income for fiscal year 2017 which on that decision, the Tax Court has granted all appeal that submitted by the Bank.
- c. To add the Bank's capital, on March 28, 2024, the Bank receipt capital deposit funds from PT Aladin Global Ventures amounting to Rp45,000.

2023

Annual Report
Laporan Tahunan

Bridging Inclusivity with **Collaboration** and **Simplicity**

Menjembatani Inklusivitas dengan
Kolaborasi dan Kemudahan

Aladin

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Gedung Millennium Centennial Center, Lt 7,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25,
Jakarta Selatan 12920 Indonesia

Tel: +62 21 85500947

Email : cs@aladinbank.id

